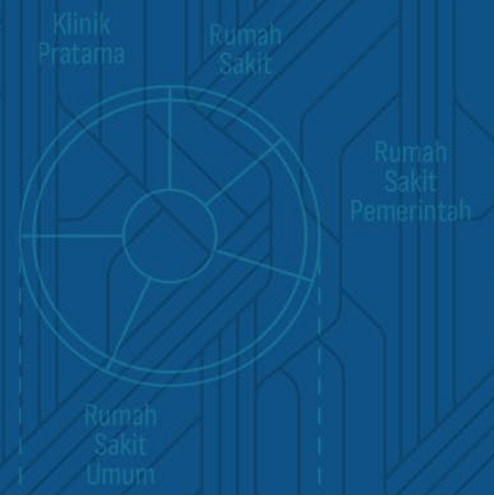




PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2024





PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2025

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

000.000

Ind

p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia 2023.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2024

1. Judul I. HEALTH STATISTICS
II. HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Buku ini diterbitkan oleh:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950

Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168

Fax no: 62-21-5277168

E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id

Website: <http://www.kemkes/go.id>

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E, M.A, Ph.D
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

Eko Sulistijo, S.H., M.T
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Editor

Farida Sibuea, SKM, MScPH

Anggota

Evida Veronika Manullang, S.Si, MKM; **Dian Sulistiyowati**, SKM, MKM;
Eka Satriani Sakti, SKM, MKM; **Wardah**, SKM, MKM; dr. **Yoeyoen Aryantin Indrayani**; Dr. **Zolaiha**, SKM, MPH; **Khairani** SKM, MKM; **Intan Suryantisa Indah**, SKM, MKM; **Sarinah Bintang**, SKM, M.Epid; **Sri Hartatik**, S.Si; **Ridwan Febryanto Syahputra**, SKM; **Ika Kurniasih**, S.Kom, MKM; **Asri Budiningsih**, SKM; **Irma Novalia**, S.Kom

Kontributor

Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Badan Pusat Statistik; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Krisis Kesehatan; Pusat Pembiayaan Kesehatan; Setditjen. Kesehatan Primer dan Komunitas; Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas; Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga; Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan; Setditjen penanggulangan Penyakit; Direktorat penyakit menular, Direktorat Penyakit Tidak Menular, Direktorat Imunisasi; Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; Direktorat Kesehatan Lingkungan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Farmasi dan Alat Kesehatan; Setditjen. Sumber Daya Manusia Kesehatan; Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Set. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024** dapat diselesaikan dengan baik.

Profil ini merupakan publikasi tahunan yang menyajikan **gambaran menyeluruh pembangunan kesehatan nasional**. Disusun dengan basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dokumen ini **merekam capaian indikator kesehatan, program prioritas, serta situasi layanan kesehatan di tingkat nasional maupun daerah**. Dengan demikian, profil ini tidak hanya menjadi catatan statistik, tetapi juga rujukan strategis untuk merumuskan arah kebijakan kesehatan ke depan.

Penyusunan dokumen ini **merupakan hasil kerja sama lintas unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta berbagai institusi strategis** seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKKBN. Atas kontribusi seluruh pihak dalam penyediaan, verifikasi, dan analisis data, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Kami berharap **Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024** dapat menjadi **rujukan utama bagi para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, maupun masyarakat** dalam merancang program dan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Akhirnya, semoga dokumen ini memberi manfaat nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat langkah kita menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Juli 2025

**Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

Kunta Wibawa Dasa Nugraha





MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin-Nya, **Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024** dapat diterbitkan sebagai salah satu rujukan penting dalam menilai capaian pembangunan kesehatan di Indonesia.

Tahun 2025 menjadi tahun yang penting dalam perjalanan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Enam pilar transformasi —mulai dari penguatan layanan primer dan rujukan, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi— terus kita dorong agar layanan kesehatan menjadi lebih merata, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Profil Kesehatan ini berperan penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan masyarakat dan capaian program di berbagai wilayah. Data yang terkumpul tidak hanya mencerminkan situasi saat ini, tetapi juga membantu kita melihat mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih perlu diperbaiki. Ini menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan, menyusun kebijakan, dan menetapkan arah kerja ke depan.

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta para mitra yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen terhadap data yang valid akan terus menjadi kunci dalam mempercepat transformasi kesehatan di Indonesia.

Semoga **Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024** ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, serta memperkuat langkah kita bersama menuju Indonesia yang lebih sehat, adil, dan tangguh.

Jakarta, Juli 2025

Menteri Kesehatan

Budi G. Sadikin



DAFTAR GAMBAR, ISI, DAN LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	PROPORSI PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (DALAM JUTAAN) TAHUN 2024	1
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (JIWA) TAHUN 2024	2
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT PULAU TAHUN 2024	3
GAMBAR 1.4	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2024	4
GAMBAR 1.5	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2019 – 2024	6
GAMBAR 1.6	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	8
GAMBAR 1.7	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2024	10
GAMBAR 1.8	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI TAHUN 2024	12
GAMBAR 1.9	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2020 – 2024	13
GAMBAR 1.10	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2022 – 2024	14
GAMBAR 1.11	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2020 – 2024	15
GAMBAR 1.12	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2020 – 2024	16
GAMBAR 1.13	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2021 – 2024	17
GAMBAR 1.14	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	18

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020 - 2024	21
GAMBAR 2.2	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	22
GAMBAR 2.3	PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024	24
GAMBAR 2.4	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	25
GAMBAR 2.5	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA TAHUN 2020 – 2024	26
GAMBAR 2.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	27
GAMBAR 2.7	PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	28
GAMBAR 2.8	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	30
GAMBAR 2.9	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	31
GAMBAR 2.10	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA TAHUN 2024	32
GAMBAR 2.11	KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	33

GAMBAR 2.12	PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2024	34
GAMBAR 2.13	JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	35
GAMBAR 2.14	JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	36
GAMBAR 2.15	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	37
GAMBAR 2.16	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	38
GAMBAR 2.17	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	39
GAMBAR 2.18	LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2024	40
GAMBAR 2.19	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN TERAKREDITASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	41
GAMBAR 2.20	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2019 - 2024	42
GAMBAR 2.21	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2024	43
GAMBAR 2.22	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2020 - 2024	44
GAMBAR 2.23	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	45
GAMBAR 2.24	PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	46
GAMBAR 2.25	PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2024	48
GAMBAR 2.26	JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME SEPENUHNYA DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2024	49
GAMBAR 2.27	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2024	51
GAMBAR 2.28	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2024	53
GAMBAR 2.29	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI INDONESIA TAHUN 2024	54
GAMBAR 2.30	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI INDONESIA TAHUN 2024	55
GAMBAR 2.31	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	55
GAMBAR 2.32	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	57

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	60
GAMBAR 3.2	PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2024	60
GAMBAR 3.3	JUMLAH 9 TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024	61
GAMBAR 3.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	62
GAMBAR 3.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2024	63
GAMBAR 3.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	64
GAMBAR 3.7	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2024	65
GAMBAR 3.8	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024	66
GAMBAR 3.9	PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024	67
GAMBAR 3.10	DISTRIBUSI JUMLAH SDM KSEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2024	68
GAMBAR 3.11	SEBARAN JUMLAH SDMK DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2024	68
GAMBAR 3.12	JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2024	69
GAMBAR 3.13	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024	70
GAMBAR 3.14	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	71
GAMBAR 3.15	JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2024	71
GAMBAR 3.16	JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR PER PROVINSI AKTIF PER 31 DESEMBER 2024	72
GAMBAR 3.17	PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2024	73
GAMBAR 3.18	PENEMPATAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TIM TAHUN 2024	75
GAMBAR 3.19	PENEMPATAN TENAGA MEDIS DAN TEENAGA KESEHATAN INDIVIDU TAHUN 2024	76
GAMBAR 3.20	PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP DI INDONESIA TAHUN 2024	77
GAMBAR 3.21	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2024	78
GAMBAR 3.22	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHARAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024	80
GAMBAR 3.23	JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024	81
GAMBAR 3.24	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	82
GAMBAR 3.25	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	83
GAMBAR 3.26	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2024	84

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2020-2024	86
GAMBAR 4.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2024	87
GAMBAR 4.3	PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2024	88
GAMBAR 4.4	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2024	88
GAMBAR 4.5	REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	89
GAMBAR 4.6	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	90
GAMBAR 4.7	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	91
GAMBAR 4.8	PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN DI INDONESIA TAHUN 2014-2023	94
GAMBAR 4.9	PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2017-2024	96
GAMBAR 4.10	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	97
GAMBAR 4.11	TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2024	98
GAMBAR 4.12	ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	99
GAMBAR 4.13	JUMLAH FKTP BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2024	100
GAMBAR 4.14	PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA DENGAN BPJS DI INDONESIA TAHUN 2024	100
GAMBAR 4.15	JUMLAH FKRTL BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	100
GAMBAR 4.16	PERSENTASE FKRTL BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	100
GAMBAR 4.17	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONEASIA TAHUN 2018-2024	101
GAMBAR 4.18	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	101
GAMBAR 4.19	PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2024	103
GAMBAR 4.20	BEBAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	103

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1	ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991 – 2020	107
GAMBAR 5.2	JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2018 - 2024	107
GAMBAR 5.3	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA TAHUN 2024	108

GAMBAR 5.4	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2015– 2024	110
GAMBAR 5.5	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	111
GAMBAR 5.6	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6 MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	112
GAMBAR 5.7	CAKUPAN IMUNISASI TETANUS TOXOID 2+ (T2+) PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2024	114
GAMBAR 5.8	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	115
GAMBAR 5.9	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	116
GAMBAR 5.10	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	118
GAMBAR 5.11	PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	119
GAMBAR 5.12	PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2024	120
GAMBAR 5.13	JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2024	121
GAMBAR 5.14	PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	122
GAMBAR 5.15	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	123
GAMBAR 5.16	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	124
GAMBAR 5.17	PERSENTASE IBU HAMIL POSITIF SIFILIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	125
GAMBAR 5.18	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2024	126
GAMBAR 5.19	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2024	127
GAMBAR 5.20	PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2024	128
GAMBAR 5.21	PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2024	128
GAMBAR 5.22	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI INDONESIA TAHUN 2020-2024	129
GAMBAR 5.23	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DAN KN LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2024	130
GAMBAR 5.24	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	131
GAMBAR 5.25	BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	133
GAMBAR 5.26	BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	134
GAMBAR 5.27	BALITA DILAYANI STIMULASI, DETEKSI, DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024 MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	135
GAMBAR 5.28	BALITA DILAYANI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	136
GAMBAR 5.29	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013-2024	138

GAMBAR 5.30	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	139
GAMBAR 5.31	ANGKA <i>DROP OUT</i> (DO) IMUNISASI PADA BAYI TAHUN 2020-2024	140
GAMBAR 5.32	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2020-2024	141
GAMBAR 5.33	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	142
GAMBAR 5.34	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	143
GAMBAR 5.35	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2024	144
GAMBAR 5.36	CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	145
GAMBAR 5.37	CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	146
GAMBAR 5.38	CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	147
GAMBAR 5.39	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	149
GAMBAR 5.40	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	150
GAMBAR 5.41	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	151
GAMBAR 5.42	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	152
GAMBAR 5.43	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	153
GAMBAR 5.44	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024	154
GAMBAR 5.45	PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2024	155
GAMBAR 5.46	PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	156
GAMBAR 5.47	CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	158
GAMBAR 5.48	CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	159
GAMBAR 5.49	PERSENTASE BALITA DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	160
GAMBAR 5.50	CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	161
GAMBAR 5.51	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	163
GAMBAR 5.52	CAKUPAN IBU HAMIL RISIKO KURANG ENERGI KRONIK (KEK) MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	164
GAMBAR 5.53	CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	165

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1	KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2024	168
GAMBAR 6.2	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	169
GAMBAR 6.3	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	170
GAMBAR 6.4	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	171
GAMBAR 6.5	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	172
GAMBAR 6.6	JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	173
GAMBAR 6.7	PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2024	174
GAMBAR 6.8	PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2024	174
GAMBAR 6.9	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	175
GAMBAR 6.10	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	176
GAMBAR 6.11	PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	177
GAMBAR 6.12	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B DAN HEPATITIS C TAHUN 2015-2024	178
GAMBAR 6.13	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	179
GAMBAR 6.14	PROPORSI BALITA PADA KASUS DIARE YANG DILAYANI DI FASILITAS KESEHATAN (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	180
GAMBAR 6.15	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2015-2024	181
GAMBAR 6.16	PREVALENSI KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	182
GAMBAR 6.17	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 DAN 2024	183
GAMBAR 6.18	ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	183
GAMBAR 6.19	ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2024	184
GAMBAR 6.20	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2015-2024	185
GAMBAR 6.21	CAKUPAN RFT KUSTA PB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	186
GAMBAR 6.22	CAKUPAN RFT KUSTA MB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	187
GAMBAR 6.23	SEBARAN KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI TAHUN 2023 - 2024	190
GAMBAR 6.24	PROPORSI KASUS <i>TETANUS NEONATORUM</i> MENURUT FAKTOR RISIKO TAHUN 2024	191
GAMBAR 6.25	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2022 - 2024	192

GAMBAR 6.26	PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2023 - 2024	193
GAMBAR 6.27	PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2024	194
GAMBAR 6.28	PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI DI INDONESIA TAHUN 2024	195
GAMBAR 6.29	FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023-2024	196
GAMBAR 6.30	DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM DI INDONESIA TAHUN 2024	197
GAMBAR 6.31	SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2023 - 2024	198
GAMBAR 6.32	KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2024	199
GAMBAR 6.33	NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2024	201
GAMBAR 6.34	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	202
GAMBAR 6.35	<i>INCIDENCE RATE</i> PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	204
GAMBAR 6.36	ANGKA KESAKITAN (<i>INCIDENCE RATE/IR</i>) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	205
GAMBAR 6.37	<i>CASE FATALITY RATE</i> DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	206
GAMBAR 6.38	<i>CASE FATALITY RATE</i> DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	207
GAMBAR 6.39	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	208
GAMBAR 6.40	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN $IR\ DBD \leq 10$ PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2024	209
GAMBAR 6.41	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	210
GAMBAR 6.42	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	212
GAMBAR 6.43	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2024	213
GAMBAR 6.44	ANGKA KESAKITAN MALARIA (<i>ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API</i>) PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2015-2024	214
GAMBAR 6.45	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	215
GAMBAR 6.46	PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	216
GAMBAR 6.47	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2024	217
GAMBAR 6.48	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	218
GAMBAR 6.49	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	219
GAMBAR 6.50	CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	220
GAMBAR 6.51	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2024	221
GAMBAR 6.52	PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR DI INDONESIA TAHUN 2024	222
GAMBAR 6.53	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2024	223
GAMBAR 6.54	PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2024	223
GAMBAR 6.55	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2024	224
GAMBAR 6.56	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2022 – 2024	224

GAMBAR 6.57	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON MINIMAL 80% TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2024	226
GAMBAR 6.58	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON < 24 JAM MINIMAL 50% TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2024	227
GAMBAR 6.59	HASIL PEMETAAN RISIKO PENYAKIT POLIO MENURUT KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2024	229
GAMBAR 6.60	HASIL PEMETAAN RISIKO PENYAKIT MERS MENURUT KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2024	230
GAMBAR 6.61	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM DI $\geq 80\%$ PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024	232
GAMBAR 6.62	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DI INDONESIA TAHUN 2022-2024	233
GAMBAR 6.63	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS) DI INDONESIA TAHUN 2022-2024	234
GAMBAR 6.64	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2024	235
GAMBAR 6.65	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2024	235
GAMBAR 6.66	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI INDONESIA TAHUN 2024	236
GAMBAR 6.67	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2024	237
GAMBAR 6.68	PERSENTASE USIA 7-15 DAN ≥ 15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING PTM PRIORITAS (DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA) TAHUN 2024	239
GAMBAR 6.69	PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 18 TAHUN YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI OBESITAS TAHUN 2024	241
GAMBAR 6.70	PROPORSI PENDUDUK USIA >18 TAHUN YANG OBESITAS BERDASARKAN HASIL DETEKSI DINI TAHUN 2024	242
GAMBAR 6.71	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA TAHUN 2024	244
GAMBAR 6.72	PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN DENGAN RISIKO MASALAH JIWA YANG MENDAPATKAN SKRINING TAHUN 2024	246
GAMBAR 6.73	PERSENTASE PENYANDANG GANGGUAN JIWA YANG MEMPEROLEH LAYANAN DI FASYANKES MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	248
GAMBAR 6.74	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2024	253
GAMBAR 6.75	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2024	253
GAMBAR 6.76	JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2024	254
GAMBAR 6.77	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	255
GAMBAR 6.78	JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	258
GAMBAR 6.79	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2024	259
GAMBAR 6.80	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2024	259
GAMBAR 6.81	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024	260

GAMBAR 6.82	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2024	261
GAMBAR 6.83	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2024	262
GAMBAR 6.84	CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2024	263
GAMBAR 6.85	PROPORSI JEMAAH HAJI RISIKO TINGGI DAN NON RISIKO TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	264
GAMBAR 6.86	PROPORSI JEMAAH HAJI RISIKO TINGGI YANG DIBINA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	265
GAMBAR 6.87	JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT EMBARKASI TAHUN 2024	267
GAMBAR 6.88	PROPORSI JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024 (‰)	268
GAMBAR 6.89	SEPULUH PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA TAHUN 2024	269

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	272
GAMBAR 7.2	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	274
GAMBAR 7.3	PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBA SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	275
GAMBAR 7.4	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2022-2024	276
GAMBAR 7.5	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE PROVINSI TAHUN 2024	277
GAMBAR 7.6	PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	279
GAMBAR 7.7	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	281
GAMBAR 7.8	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAHAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	283
GAMBAR 7.9	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	285
GAMBAR 7.10	PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	287
GAMBAR 7.11	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	289
GAMBAR 7.12	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2022-2024	290
GAMBAR 7.13	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024	291

DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024	5
TABEL 1.2	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG) TAHUN 2021-2024	11

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

TABEL 2.1	PERSYARATAN PENETAPAN KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS	24
TABEL 2.2	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2020 - 2024	42

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2013 - 2022	93
TABEL 4.2	PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMENT KEPESEERTAAN DI INDONESIA TAHUN 2023-2024	102
TABEL 4.3	JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROFIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2024	104

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2024	256
TABEL 6.2	SEPULUH PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER DI INDONESIA TAHUN 2024	266

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

TABEL 7.1	PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2024	273

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Isi.....	xviii
Daftar Lampiran.....	xxi
 BAB I. DEMOGRAFI	1
A. KEADAAN PENDUDUK.....	1
B. KEADAAN EKONOMI.....	6
C. KEADAAN PENDIDIKAN	13
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	16
 BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM.....	20
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	21
1. Akreditasi Puskesmas	23
2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap	26
3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan.....	26
4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja, Pengukuran dan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani....	29
5. Pelayanan Kesehatan Tradisional.....	32
B. KLINIK, PRAKTIK MANDIRI TENAGA MEDIS, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM	34
1. Klinik	34
2. Praktik Mandiri Tenaga Medis.....	36
3. Unit Tranfusi Darah	38
C. LABORATORIUM KESEHATAN.....	40
D. RUMAH SAKIT	41
1. Jenis Rumah Sakit	42
2. Tipe Rumah Sakit.....	43
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit.....	44
4. Akreditasi Rumah Sakit	46
5. Rekam Medis Elektronik (RME) Rumah Sakit	47
E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN	49
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial.....	49
2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial.....	51
3. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	53
F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN.....	54
1. Sarana dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	54
G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM).....	56
 BAB III. SDM KESEHATAN.....	59
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN.....	59
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas	61
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	65

3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal.....	67
B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN	69
C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN	72
1. Penugasan Khusus Tenaga Residen	72
2. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	73
3. Program Internsip Dokter.....	76
4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	77
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN	79
1. Jumlah Lulusan Poltekkes.....	80
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi.....	81
 BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN	 86
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN.....	86
B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024	88
C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN	91
1. Total Belanja Kesehatan/ <i>Total Health Expenditure</i> (THE)	92
2. Jaminan Kesehatan.....	95
 BAB V. KESEHATAN KELUARGA	 106
A. KESEHATAN IBU.....	106
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	108
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS)	113
3. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil.....	115
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	116
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	117
6. Pelayanan Kontrasepsi.....	118
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil	121
B. KESEHATAN ANAK	126
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal (0-28 Hari)	129
2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah	132
3. Imunisasi.....	137
4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	144
C. GIZI	148
1. Status Gizi Balita	148
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi	156
 BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT	 167
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	167
1. Tuberkulosis	167
2. HIV dan AIDS	172
3. Pneumonia	175
4. Hepatitis.....	177
5. Diare	179
6. Kusta.....	181
 B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I).....	 188
1. Tetanus Neonatrum	188
2. Campak	191

3. Difteri.....	197
4. Polio dan <i>Acute Flaccid Paralysis (APF)</i> /Lumpuh Layu Akut	200
C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS	203
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)	203
2. Chikungunya.....	210
3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya	211
4. Malaria	211
5. Filariasis	217
6. Rabies.....	221
7. Leptospirosis.....	223
D. SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING.....	225
1. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons.....	225
2. Situasi Penyakit Infeksi Emerging	228
E. PENYAKIT TIDAK MENULAR	230
1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di > 80% Puskesmas.....	231
2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara	232
3. Pengendalian Konsumsi Tembakau	236
4. Deteksi Dini Gangguan Indera	238
5. Deteksi Dini Obesitas	240
F. KESEHATAN JIWA & NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)	242
1. Pelayanan Kesehatan Jiwa	243
2. Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis	251
G. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA.....	252
G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI	257
1. Profil Jemaah Haji Indonesia	258
2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	262
3. Pembinaan Jemaah Haji.....	263
4. Pola Morbiditas dan Mortalitas Jemaah Haji.....	266
BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN	271
A. AIR MINUM	271
B. AKSES SANITASI LAYAK.....	274
C. DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN	278
D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR	280
E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP).....	282
F. KABUPATEN/KOTA SEHAT	284
G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS	286
H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)	287
I. PERUMAHAN	290
Daftar Pustaka.....	293
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

LAMPIRAN 1	LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 2.a	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024
LAMPIRAN 2.b	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023-2024
LAMPIRAN 2.c	JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024
LAMPIRAN 3.a	JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2001-2024
LAMPIRAN 3.b	GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2024
LAMPIRAN 3.c	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 3.d	INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2024
LAMPIRAN 3.e	RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL, 2024
LAMPIRAN 3.f	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 3.g	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 3.h	ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 - 2024
LAMPIRAN 3.i	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 3.j	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2024
LAMPIRAN 3.k	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024
LAMPIRAN 3.l	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2024
LAMPIRAN 3.m	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2024

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

LAMPIRAN 4.a	JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2020 - 2024
LAMPIRAN 4.b	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2020 - 2024
LAMPIRAN 4.c	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 4.d	AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024

LAMPIRAN 4.e	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 4.f	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 4.g	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 4.h	JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 4.i	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 4.j	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 4.k	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 8.a	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 8.b	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 8.c	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2024
LAMPIRAN 8.d	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 8.e	AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 8.f	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAHA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 8.g	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 8.h	JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN REKAM MEDIS ELEKTERONIK (RME) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 9.a	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 9.b	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 9.c	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 9.d	JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 9.e	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 10	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

BAB III. SDM KESEHATAN

LAMPIRAN 11.a	JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.b	JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.c	JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023
LAMPIRAN 11.d	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.e	KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.f	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.g	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA MEDIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.h	JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.i	JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 11.j	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM BATCH XXVII-XXIX PADA PERIODE I-III TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.j.1	JUMLAH PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM BATCH XXVII SAMPAI DENGAN BATCH XXIX/ PERIODE I SAMPAI DENGAN III MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.j.2	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN BERBASIS INDIVIDU PERIODE I-V TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.k	JUMLAH DOKTER INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.l	JUMLAH DOKTER GIGI INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 11.m	JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 12.a	JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 12.b	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 12.c	JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2024
LAMPIRAN 13.a	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 13.b	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 13.c	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 14.a	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 14.b	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024

LAMPIRAN 14.c	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 15.a	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 15.b	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 15.c	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.a	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.b	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.c	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.d	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.e	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.f	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.g	JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.h	JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.i	JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.j	JUMLAH LULUSAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN POLTEKKES KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.k	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 16.l	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

LAMPIRAN 19.a	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 19.b	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 19.c	FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 19.d	FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 20.a	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024
LAMPIRAN 20.b	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2024
LAMPIRAN 20.c	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN 20.d	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2024
LAMPIRAN 20.e	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024
LAMPIRAN 20.f	ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 20.g	ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2024

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

LAMPIRAN 21	JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 22	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 23	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 24	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 25	CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 26	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 27.a	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 27.b	PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 27.c	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 27.d	PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 28.a	PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 28.b	PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL RISIKO KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 29	JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN TAHUN 2024
LAMPIRAN 30	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 31	CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 34	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 35	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 37	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 38	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 39	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 42	CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 43.a	CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024

LAMPIRAN 43.b	<i>DROP OUT RATE</i> CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 43.c	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 44.a	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HiB 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 44.b	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 45	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 46	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 47	JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 48.a	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 48.b	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 48.c	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 48.d	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 48.e	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 48.f	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 49	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 53	PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 54	PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

LAMPIRAN 56.a	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, <i>CASE NOTIFICATION RATE</i> (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN CAKUPAN PENEMUAN KASUS TBC MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 56.b	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 56.c	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 57	ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 58	PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024

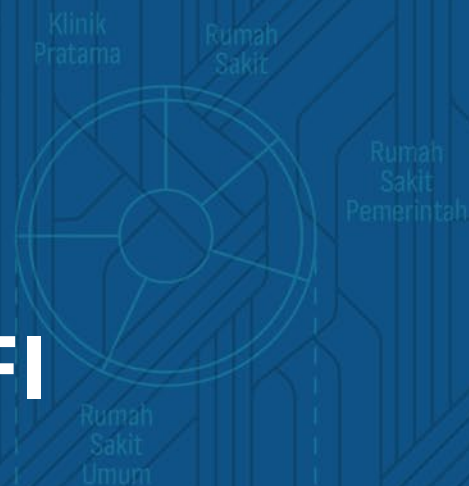
LAMPIRAN 59.a	JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 59.b	JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 60.a	JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 60.b	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 60.c	JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2024
LAMPIRAN 60.d	JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 61	KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 62	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 64	KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 65	KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 66	JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 67	PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (<i>RELEASE FROM TREATMENT/RFT</i>) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 68	KASUS AFP (<i>NON POLIO</i>) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 69.a	JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 69.b	JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 69.c	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 69.d	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 69.e	JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 69.f	FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 69.g	DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 70	KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) SUSPEK CAMPAK DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 72.a	KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 72.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 73.a	KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 73.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 73.c	<i>ANNUAL PARASITE INCIDENCE</i> (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2024

LAMPIRAN 74.a	PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 74.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 74.c	SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 74.d	JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN <i>CASE FATALITY RATE</i> (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024
LAMPIRAN 77.a	REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 77.b	KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 77.c	KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 77.d	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI $\geq 80\%$ PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 77.e	DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA (SKRINING PTM PRIORITAS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 77.f	PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA ≥ 18 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 78.a	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 78.b	JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 88.a	JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2024
LAMPIRAN 88.b	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2024
LAMPIRAN 88.c	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 88.d	JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.a	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 89.b	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.c	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.d	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.e	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.f	JUMLAH DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 89.g	HASIL CAKUPAN PEMBINAAN JEMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.h	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI (RISTI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.i	JUMLAH RAWAT JALAN DAN RATIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER BERDASARKAN EMBARKASI TAHUN 2024
LAMPIRAN 89.j	JUMLAH DAN PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN 79.a	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 79.b	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 80	JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 81.a	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024
LAMPIRAN 81.b	PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 82	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 83.a	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 83.b	JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 83.c	JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 83.d	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) TAHUN 2024
LAMPIRAN 83.e	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024

BAB I. DEMOGRAFI



BAB I. DEMOGRAFI

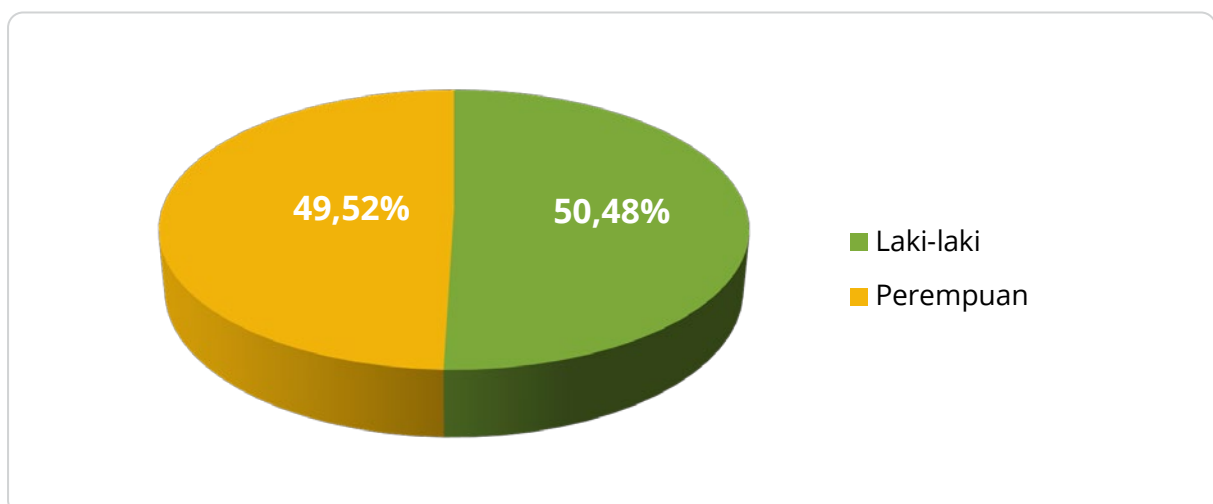
Secara astronomis Indonesia yang berada di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), yang menunjukkan negara Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia, serta berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.380 pulau, dengan luas wilayah sebesar 1.890.179,784 km². Banyaknya pulau yang ada di Indonesia dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa, menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemerintah untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Secara administratif, Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, dengan total 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia. Daerah kabupaten dan kota yang terbagi menjadi 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Daerah kecamatan dibagi menjadi kelurahan dan desa, dengan total 8.496 kelurahan dan 75.266 desa di seluruh Indonesia (data selengkapnya di Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 282.477.584 jiwa yang terdiri dari 142.569.663 jiwa penduduk laki-laki dan 139.907.921 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 menunjukkan proporsi penduduk di Indonesia tahun 2023 menurut jenis kelamin. Proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama besar, hanya terpaut 0,94% lebih banyak laki-laki.

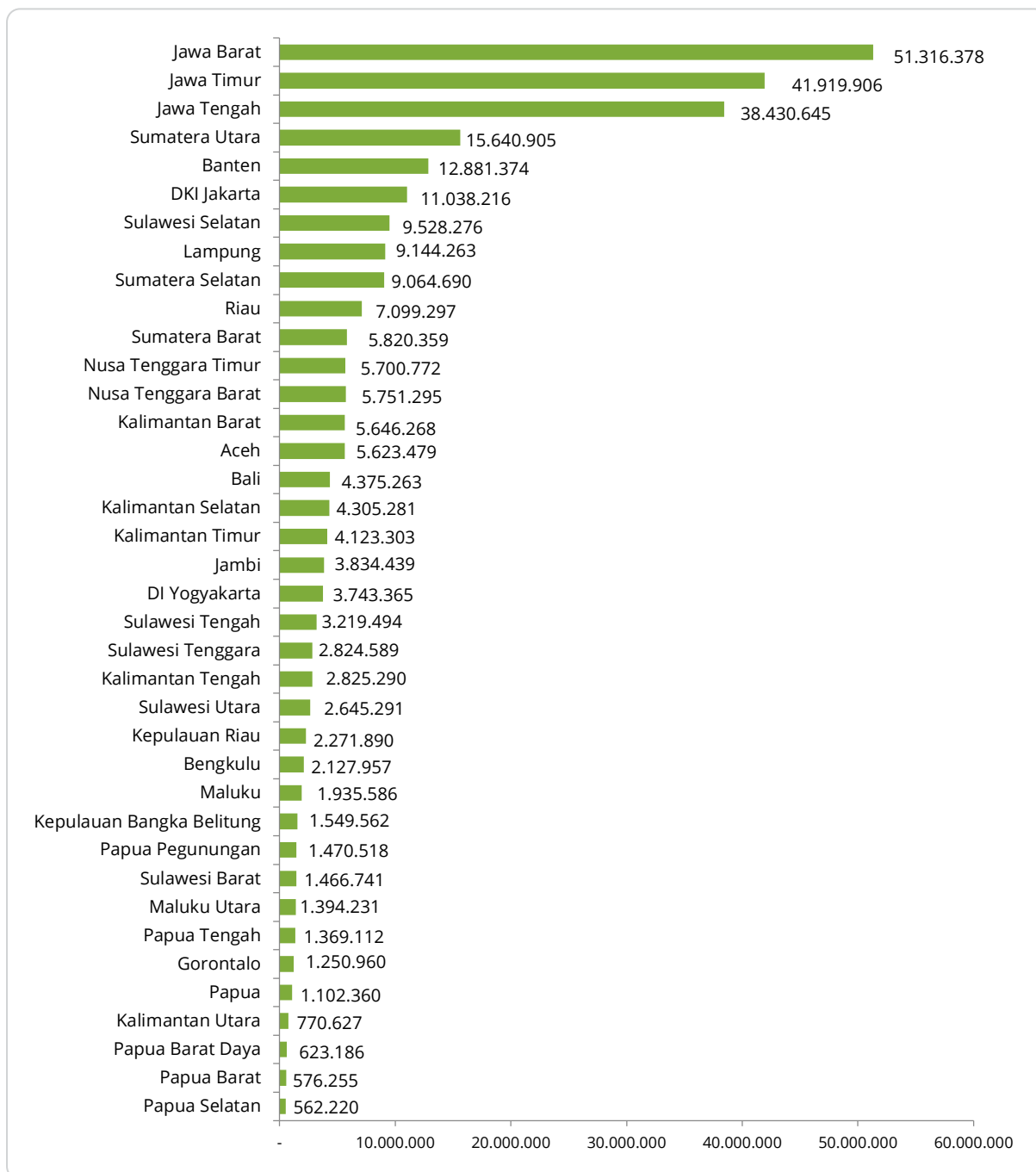
GAMBAR 1.1
PROPORSI PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2024



Sumber: Kementerian dalam Negeri, 2025

Jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Provinsi Papua Selatan. Secara rincian data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (JIWA) TAHUN 2024

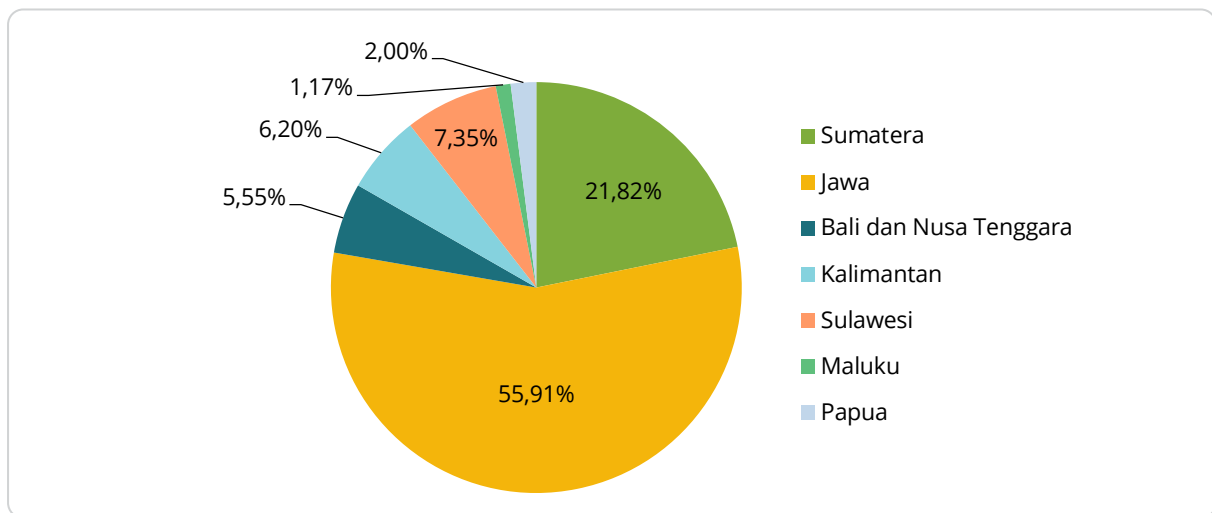


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Pulau berpenduduk adalah pulau dimana ada penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada wilayah administrasi dan berdomisili diantaranya melakukan aktivitas pelayanan publik dan keamanan seperti penjaga mercusuar dan satuan tugas pengamanan.

Tahun 2024 Indonesia memiliki 17.380 pulau dengan 1.562 pulau berpenghuni. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penambahan 63 pulau dari tahun 2023 yang tercatat memiliki 17.374 pulau. Populasi penduduk terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 55,91%, sementara untuk populasi penduduk terkecil berada di pulau Maluku yaitu sebesar 1,17%. Data mengenai persebaran populasi penduduk per pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3.

GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA
MENURUT PULAU TAHUN 2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, pusat pemerintahan, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2024 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yaitu sebanyak 150,77 jiwa/km². Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi (16.165 jiwa/km²). Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Papua Selatan yaitu 5 jiwa/km². Data kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang masih jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) sosialisasi program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

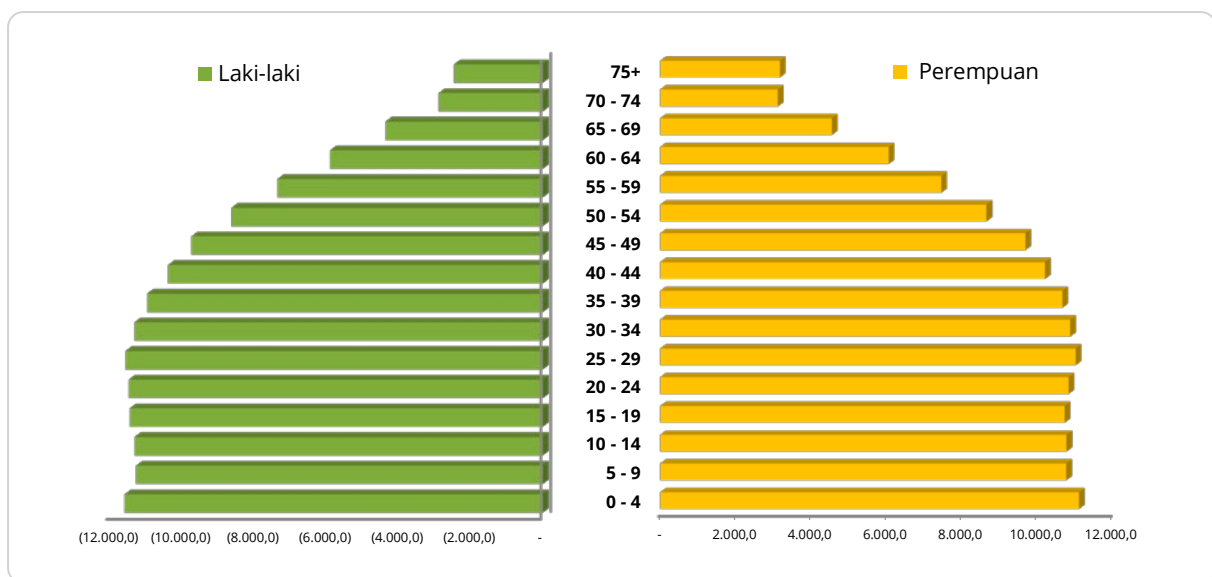
Piramida penduduk adalah grafik demografi yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan komposisi umur-jenis kelamin suatu populasi. Piramida penduduk menyajikan jumlah atau persentase penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu penduduk menurut

kelompok umur. Bentuk piramida pada titik waktu tertentu menunjukkan tahapan transisi demografi yang dialami suatu populasi.

Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok usia di atasnya. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek menunjukkan bahwa angka kematian yang masih tinggi pada penduduk lanjut usia.

GAMBAR 1.4
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS 2025

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebesar 44,82%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Indonesia yang berusia produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 45 orang yang tidak produktif. Angka ini masih sama dengan angka tahun sebelumnya. Dalam menanggapi kondisi ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya menekan jumlah kelahiran untuk mengurangi angka beban ketergantungan dan mengupayakan program kesehatan untuk usia pra lansia sehingga tidak menjadi beban saat mencapai usia lansia.

Tabel 1.1 menyajikan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan digunakan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.a-c.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Jumlah Penduduk	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Bayi	0 tahun	2.360.790	2.257.759	4.618.549
2	Jumlah Batita	0 – 2 tahun	6.993.939	6.705.319	13.699.258
3	Jumlah Anak Balita	1 – 4 tahun	9.193.563	8.825.967	18.019.530
4	Jumlah Balita	0 – 4 tahun	11.554.353	11.083.726	22.638.079
5	Jumlah Anak Prasekolah	5 – 6 tahun	4.502.304	4.311.294	8.813.598
6	Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 tahun	2.242.411	2.143.632	4.386.043
7	Jumlah Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 tahun	13.480.477	12.888.797	26.369.274
8	Jumlah Penduduk Usia Muda	< 15 tahun	34.069.780	32.589.875	66.659.655
9	Jumlah Penduduk Usia Produktif	15 – 64 tahun	98.448.324	96.002.254	194.450.578
10	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 tahun	9.670.543	10.823.023	20.493.566
11	Jumlah Wanita Usia Subur	15 – 49 tahun	-	73.865.611	73.865.611
12	Jumlah Wanita Usia Subur Imunisasi	15 – 39 tahun	-	54.013.506	54.013.506
13	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 tahun	15.547.806	16.876.462	32.424.268
14	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 tahun	5.322.521	6.281.973	11.604.494

Sumber: Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan, Kepmenkes HK.01.07/Menkes/140/2024

B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

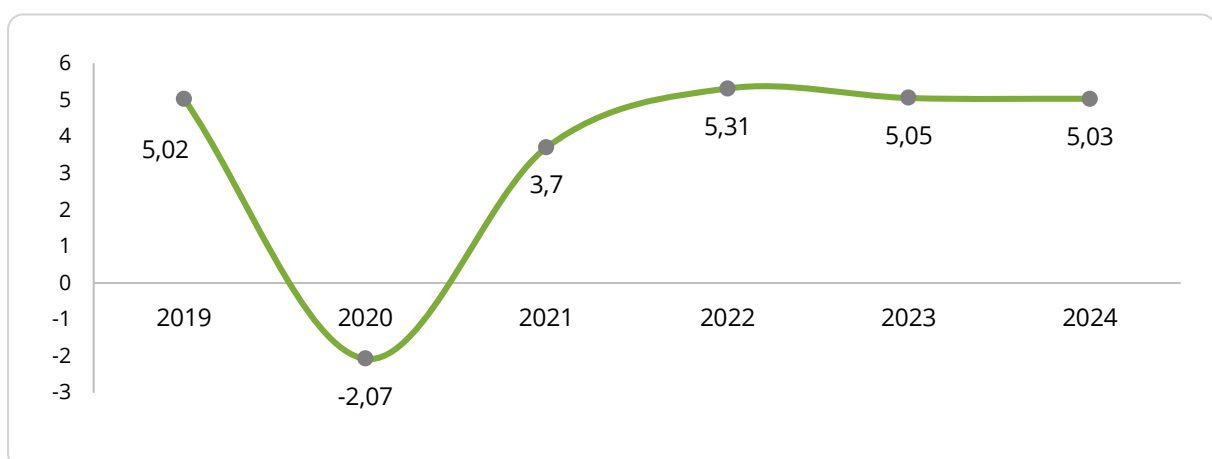
PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau US\$4.960,3.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 yaitu sebesar 5,05%. Sumber pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terdapat pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar, sebesar 9,8,0% diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 8,69%, penyediaan akomodasi dan makanan minum sebesar 8,56%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, terdapat pada konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT sebesar 12,48%.

Pada triwulan IV tahun 2024 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% dibanding terhadap triwulan IV tahun 2023. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36%. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 %.

Selama tahun 2024, kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,02 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,92 persen.

GAMBAR 1.5
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

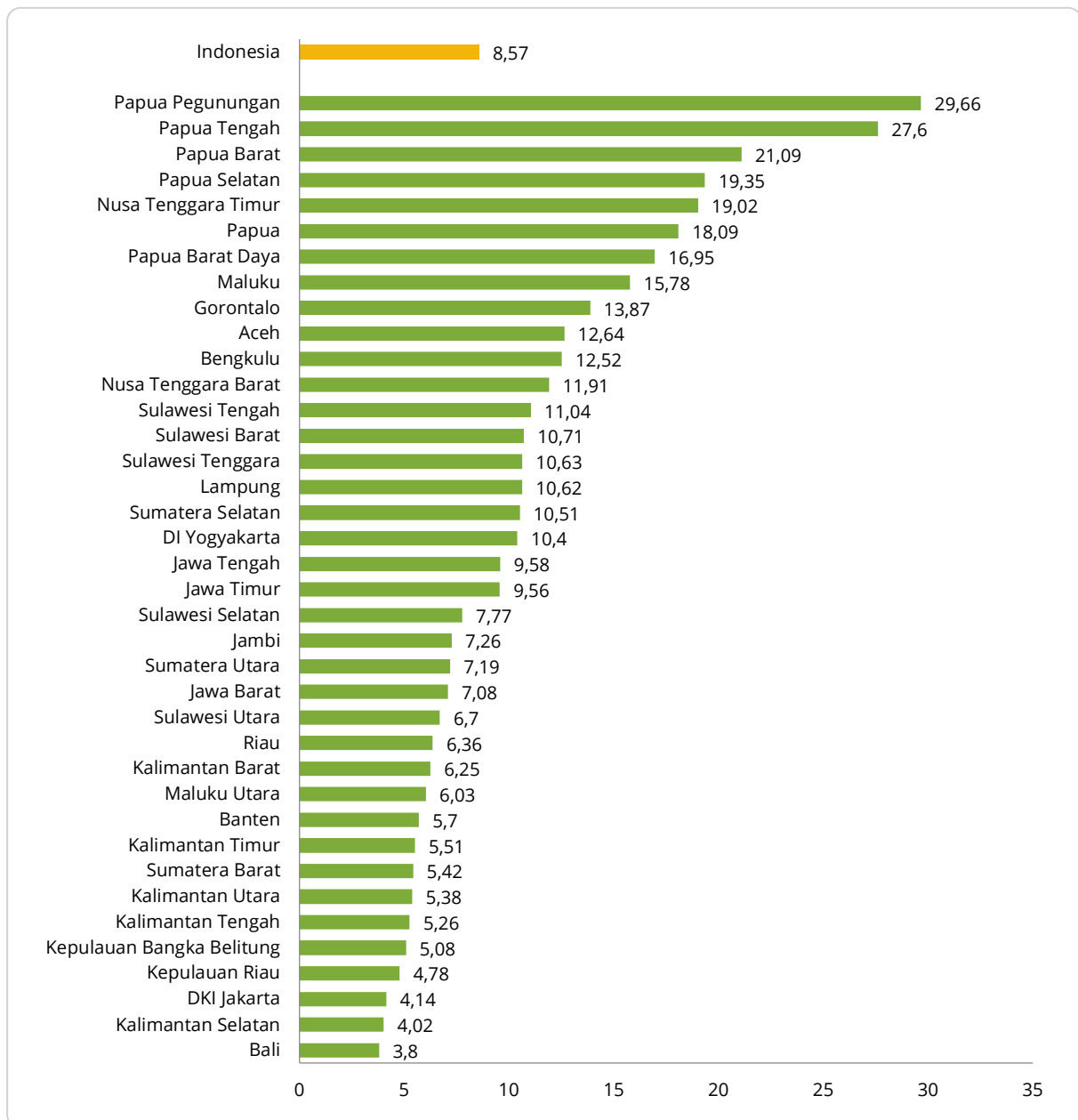
Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan bukan makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 1,84 juta orang. Persentase penduduk miskin pada 2024 tercatat sebesar 8,57%, berkurang 0,79% poin terhadap 2023.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023 - September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan masing-masing berkurang sebesar 690 ribu orang untuk perkotaan dan 1,15 juta orang untuk pedesaan. Persentase kemiskinan di perkotaan berkurang dari 7,29% menjadi 6,66%. Persentase kemiskinan di pedesaan juga mengalami penurunan dari 12,22% menjadi 11,34%. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.a dan 3.b.

Secara spasial provinsi di Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian Indonesia selama tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 57,02%, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,12%, Pulau Kalimantan sebesar 8,24%, Pulau Sulawesi sebesar 7,12%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,81%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,69%.

GAMBAR 1.6
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari Gambar 1.6, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, persentase kemiskinan secara umum di Indonesia yaitu sebesar 8,57%, menurun 0,79% dari tahun 2023. Persentase kemiskinan terendah yaitu di Provinsi Bali sebesar 3,8%, sementara tertinggi yaitu di Provinsi Papua Pegunungan yang pada 2024 mencapai angka sebesar 29,66%.

Jumlah penduduk miskin di tahun 2024 tercatat sebesar 24,6 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 6,66% sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan sebesar 11,34%.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

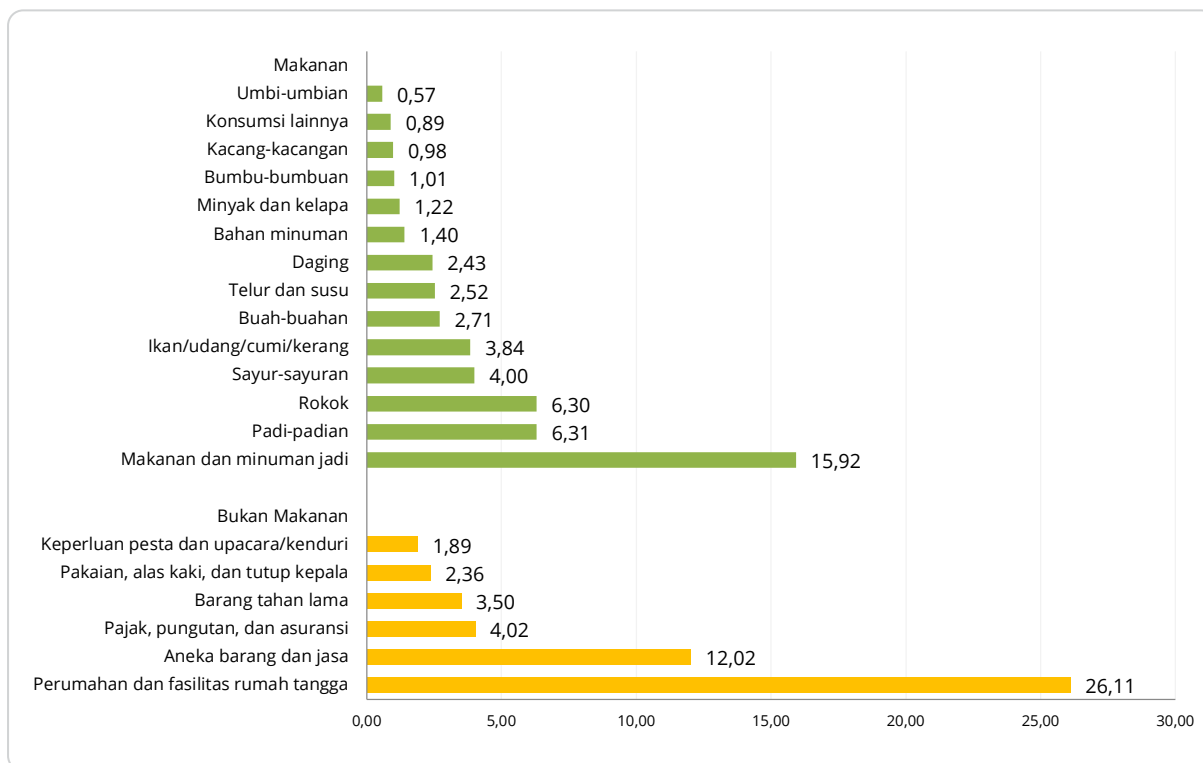
Pada periode Maret 2024–September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2024 sebesar 1,364, turun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,46. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,32, turun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,34.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini atau Koefisien Gini/(Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang mengukur derajat ketidakmerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat ketimpangan pendapatan merata sempurna yang artinya setiap orang/kelompok menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan timpang sempurna yang artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali.

Pada Maret 2024, gini ratio sudah mengalami penurunan menjadi 0,379. Bahkan, angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang Maret 2018–Maret 2024. Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2024 sudah semakin membaik. Namun, pada September 2024, gini ratio meningkat menjadi 0,31. Rincian mengenai Indeks Gini selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.d.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

GAMBAR 1.7
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN
TAHUN 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2024, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan hampir sama besar, yaitu 50,10% untuk pengeluaran makanan dan 49,90% untuk pengeluaran bukan makanan. Dari Gambar 1.7 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 26,11%, makanan dan minuman sebesar 15,92% dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa 12,02%.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada 2024 tercatat sebesar Rp595.242,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433,00 (74,50%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809,00 (25,50 %).

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, yang juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Dalam dimensi sosial, pekerjaan memberikan identitas, stabilitas, serta kesempatan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Secara ekonomi, ketenagakerjaan juga mempengaruhi perekonomian, seperti pendapatan, konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor*

Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 152,11 juta orang, bertambah sekitar 4,4 juta orang (2,98%) dibandingkan Agustus 2023. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, bertambah sebanyak 4,79 juta orang (3,42%) jika dibandingkan dengan Agustus 2023 (139,85 juta orang). TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2024 sebesar 70,63%. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2023 (69,48%).

Jumlah pengangguran pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang, berkurang sebanyak 0,39 juta orang (4,96%) jika dibandingkan dengan Agustus 2023 (7,86 juta orang). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 4,91%, mengalami penurunan sebesar 0,41% poin dibanding Agustus 2023 (5,32%).

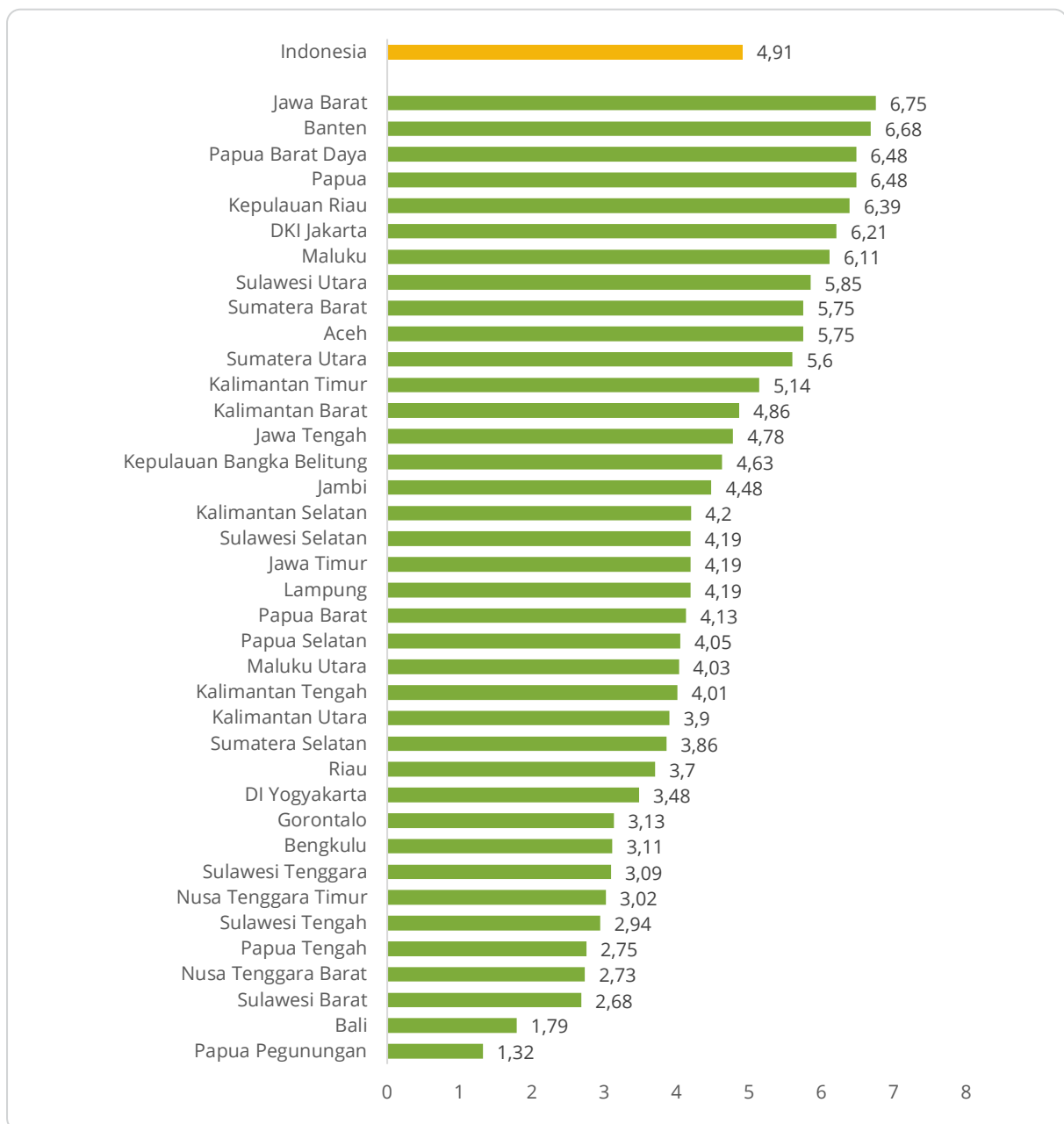
TABEL 1.2
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG)
TAHUN 2021-2024

Angkatan Kerja	2021		2022		2023		2024	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	139,8	140,2	144,01	143,72	146,62	147,71	149,37	152,11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,08	67,80	69,06	68,63	69,30	69,48	69,80	70,63
Jumlah Penduduk yang Bekerja	131,1	131,1	135,61	135,30	138,63	139,85	142,18	144,62
Jumlah Pengangguran Terbuka	8,75	9,10	8,40	8,42	7,99	7,85	7,19	7,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,26	6,49	5,83	5,86	5,45	5,32	4,82	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami penurunan pada periode tahun 2021-2024, dimana pada periode Agustus 2021 TPT tercatat sebesar 6,49% turun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. TPT pada tahun 2024 sebesar 4,91% artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4-5 orang pengangguran. Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, adalah Jawa Barat (6,75%), Banten (6,68%), dan Papua Barat Daya (6,48%). Tingginya TPT diiringi dengan penambahan jumlah penduduk namun tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

GAMBAR 1.8
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI (%) TAHUN 2024



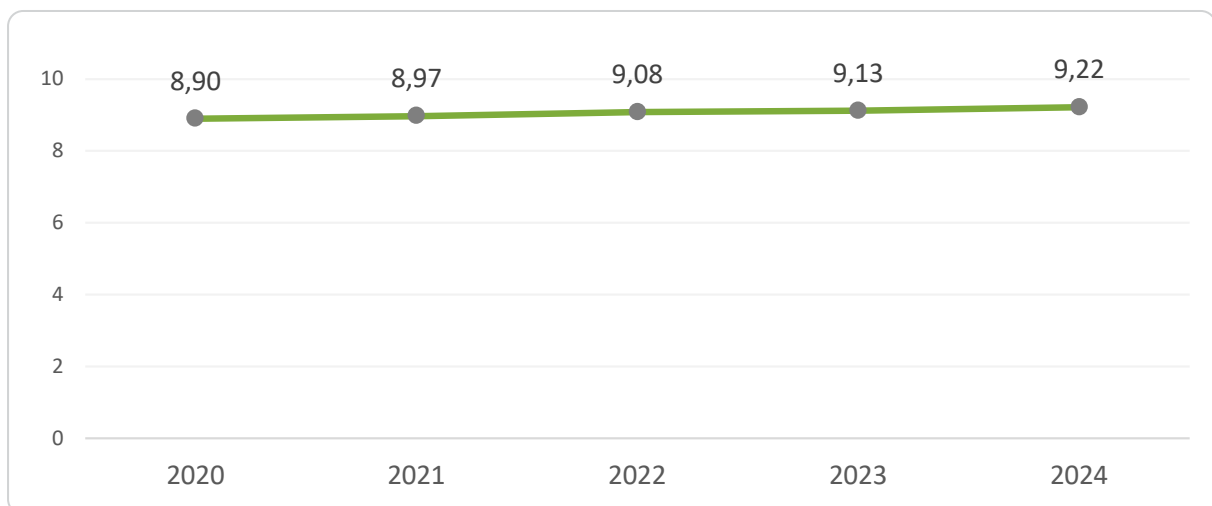
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM tangguh yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Pada tahun 2024, RLS penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 9,22 tahun atau setara kelas 3 SMP/Sederajat. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dibanding tahun sebelumnya.

GAMBAR 1.9
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
TAHUN 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dilihat per provinsi, RLS yang paling rendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan (5,10 tahun) dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (11,49 tahun). Terdapat 25 provinsi (65,79%) yang sudah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.g.

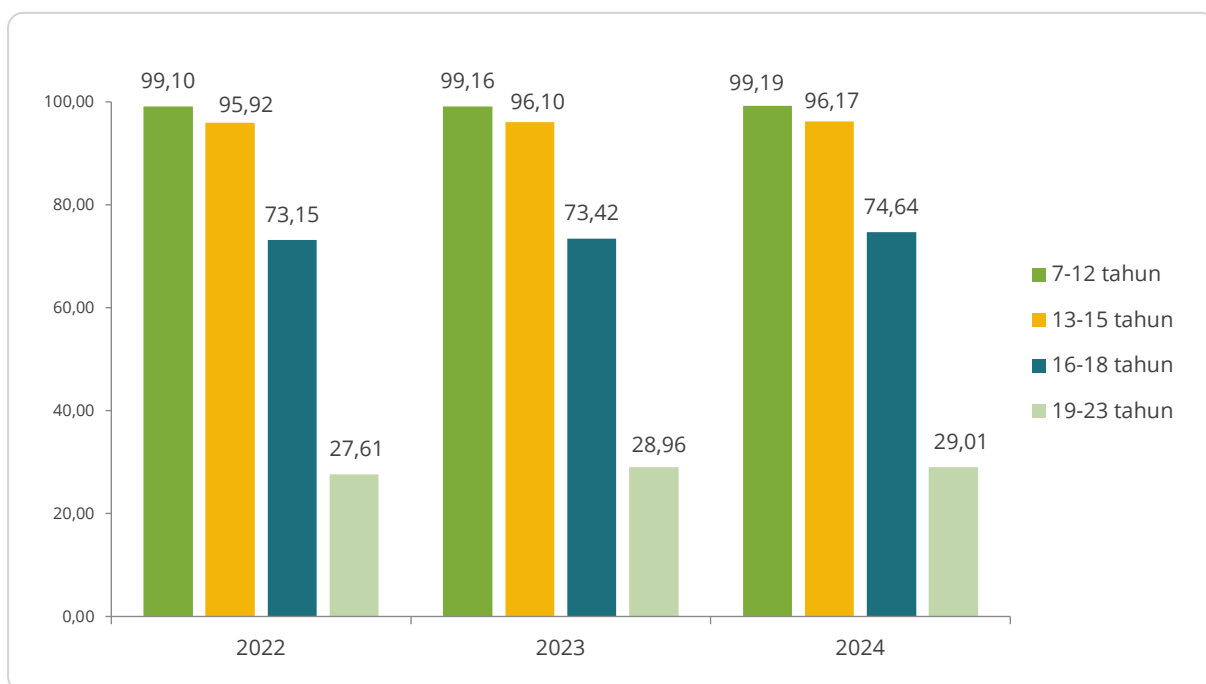
Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Capaian pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) terendah terjadi pada kelompok umur 15 tahun ke atas. Mayoritas penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai wajib belajar 9 tahun (63,84%). Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024, AMH laki-laki yang berusia >15 tahun (97,69%) lebih

tinggi daripada AMH perempuan (95,66%). Secara rinci, AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.h.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan di bidang pendidikan adalah partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Harapannya semakin tinggi tingkat partisipasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-23 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 1.10
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
TAHUN 2022 - 2024



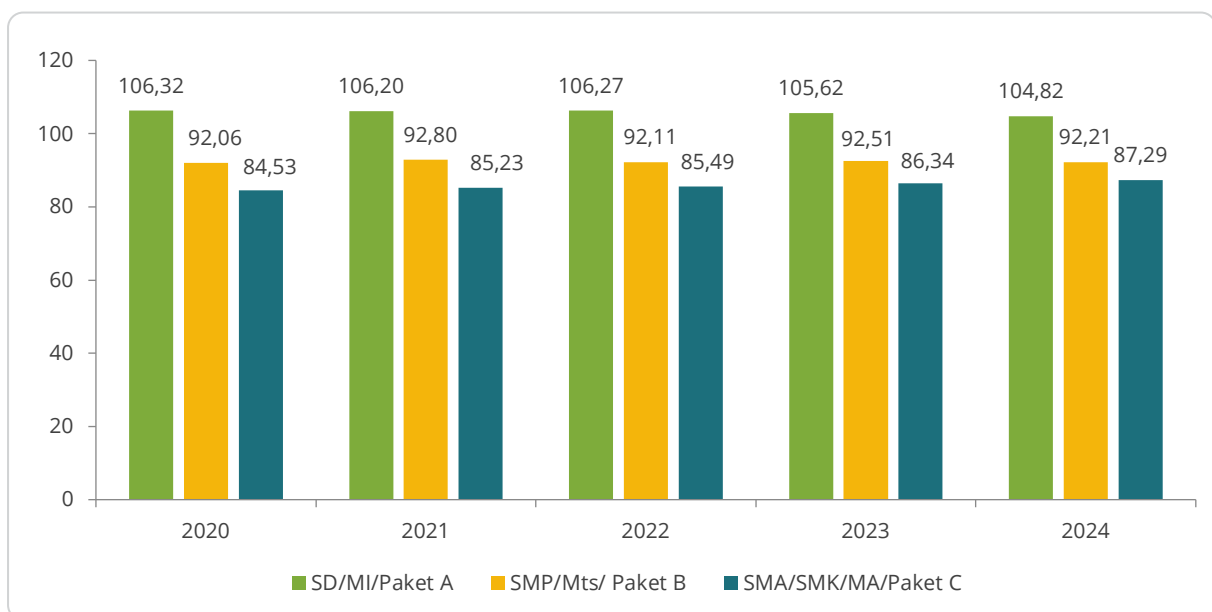
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Nilai APK (Gambar 1.12) untuk SD/MI tahun 2020-2024 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/ sederajat). Meski demikian, dari tahun ke tahun nilainya semakin turun mendekati 100%, hal ini berarti penduduk yang bersekolah di SD/ sederajat semakin banyak yang sesuai dengan peruntukan umurnya. Secara lengkap, nilai APK per jenjang Pendidikan per provinsi ini dapat dilihat pada lampiran 3.j.

Secara umum APK penduduk perempuan pada jenjang sekolah yang lebih tinggi lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2023 terdapat pada Lampiran 3.k.

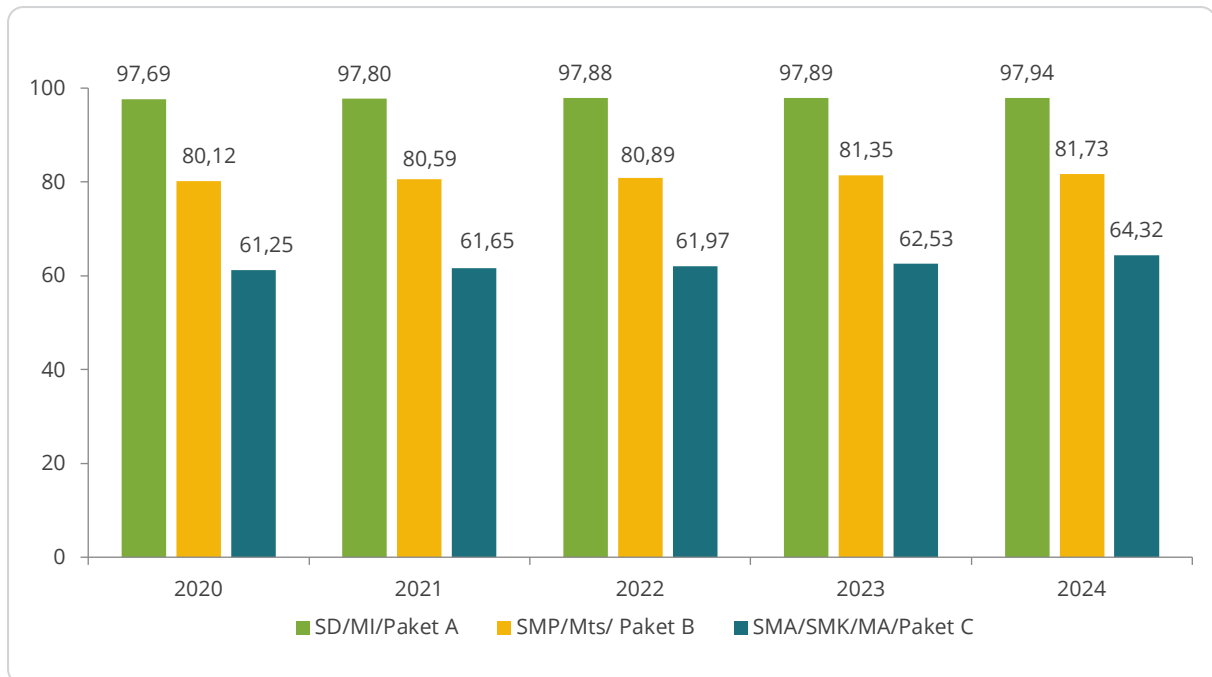
GAMBAR 1.11
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR
TAHUN 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persentase. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Secara umum, APM di setiap kelompok umur sekolah mengalami kenaikan sejak 2020 hingga 2024 (Gambar 1.13).

GAMBAR 1.12
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah/negara. IPM dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; dan (3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan di suatu wilayah dalam jangka panjang.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2024 sebesar 74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2024 meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2024).

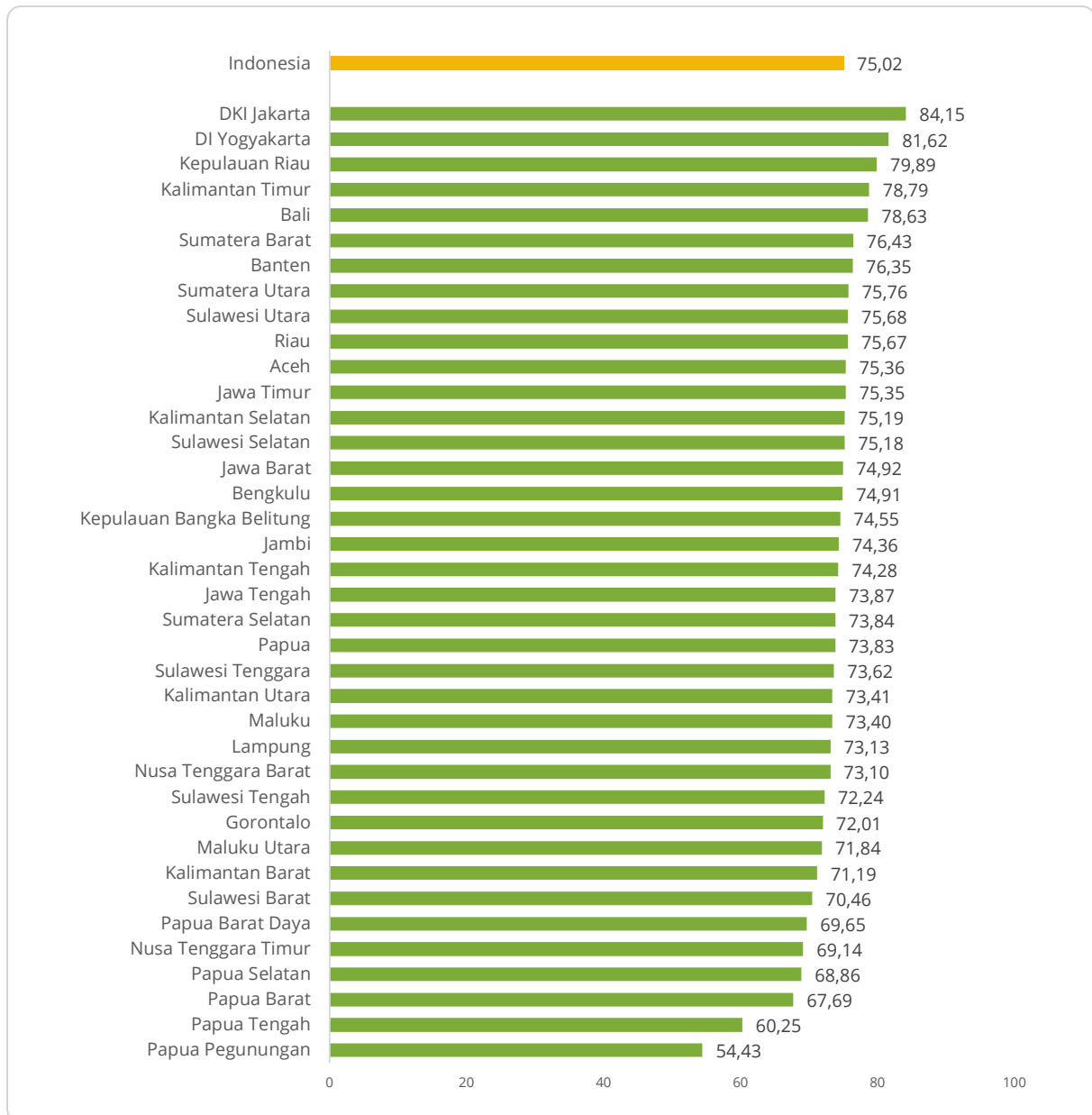
GAMBAR 1.13
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2021 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (84,15). Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian, serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta setiap tahun. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.n.

GAMBAR 1.14
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM



BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari FKTP/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga kesehatan), Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, FKTRL/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), dan Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

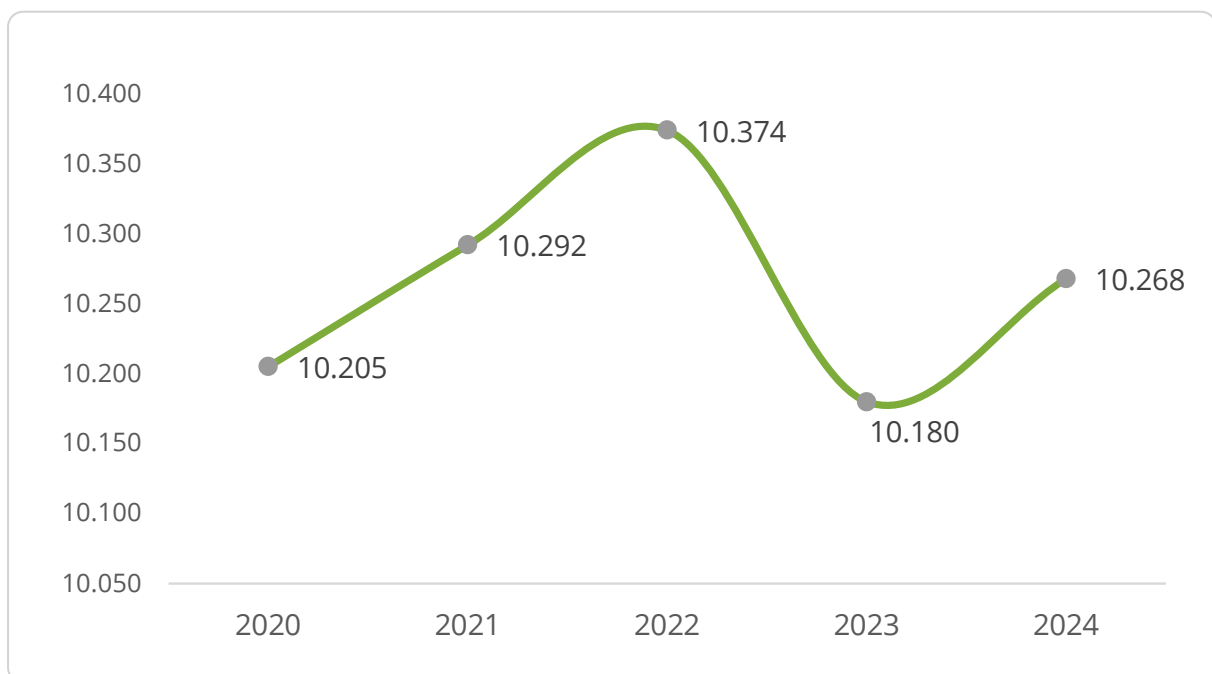
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri dalam bidang Kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009). Peraturan tersebut memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan melainkan yang lebih penting sebagai subyek pembangunan Kesehatan yang dapat mengambil keputusan dalam mengadopsi inovasi di bidang Kesehatan. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan tahap: a. pengenalan kondisi desa/kelurahan; b. survei mawas diri; c. musyawarah di desa/kelurahan; d. perencanaan partisipatif; e. pelaksanaan kegiatan; dan f. pembinaan kelestarian. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat didampingi oleh Tenaga Pendamping yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat. Tenaga Pendamping dimaksud harus memiliki kemampuan sebagai Tenaga Pendamping yang didapat melalui pelatihan. Pada bab II ini, UKBM yang akan diulas adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Total jumlah puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2024 adalah 10.268 puskesmas, yang terdiri dari 4.252 puskesmas rawat inap dan 6.016 puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 10.205, dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 4.119 puskesmas dan puskesmas non rawat inap sebanyak 6.086 puskesmas. Data mengenai jumlah puskesmas ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.a dan 4.b.

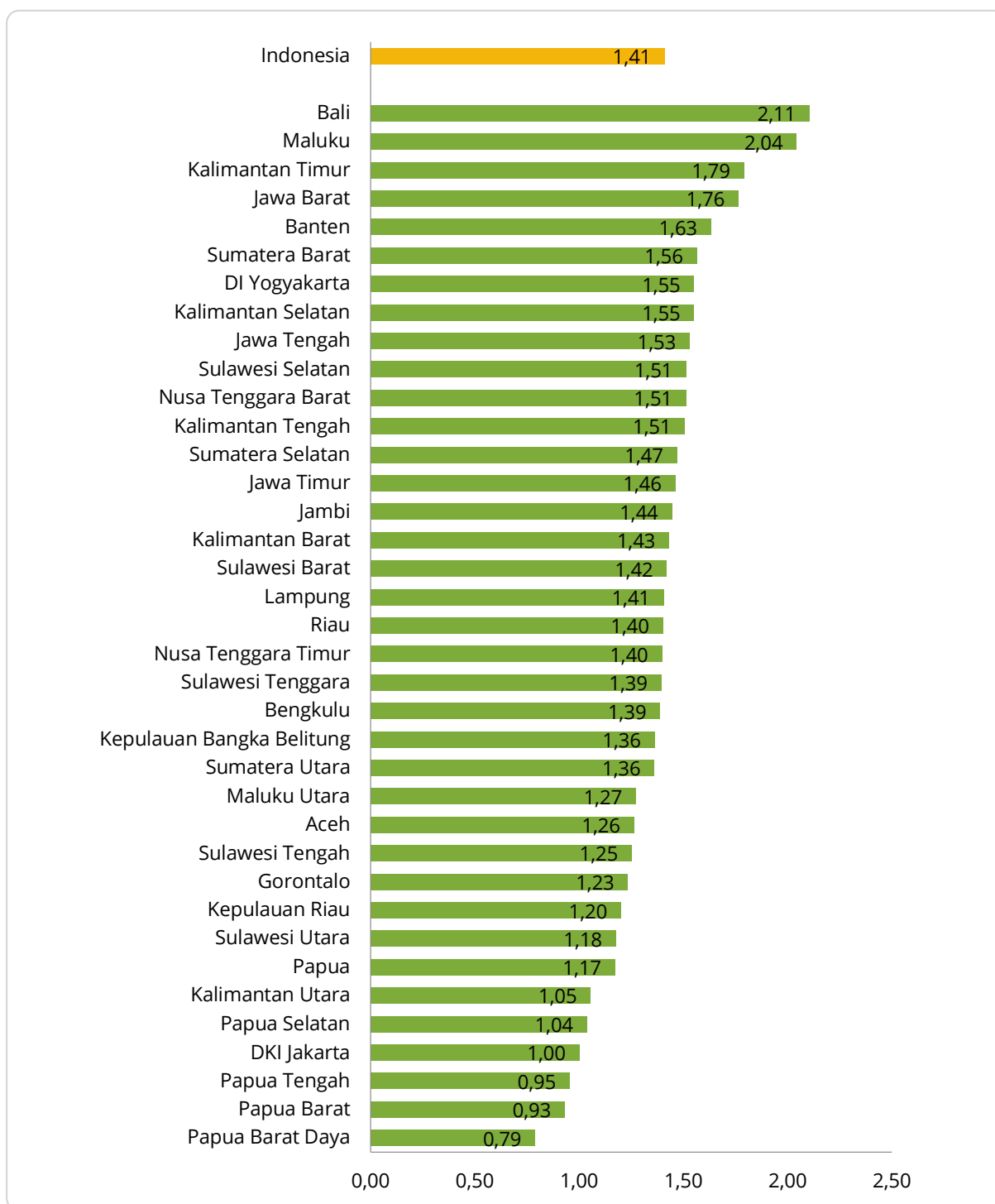
GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020 – 2024



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025

Perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2020 mengalami jumlah yang fluktuasi dari 10.205 unit di tahun 2020 menjadi 10.268 puskesmas pada tahun 2024. Peningkatan jumlah puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pada tahun 2023 jumlahnya menurun yaitu 10.180 yang disebabkan oleh penghapusan jumlah puskesmas dimana penghapusan tersebut karena meningkatnya status puskesmas menjadi RS tipe D, restrukturisasi organisasi, dan penggabungan dua puskesmas. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio puskesmas terhadap kecamatan. Rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2024 sebesar 1,41. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025; Kementerian Dalam Negeri, 2024

Rasio puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh, provinsi dengan rasio terendah di Provinsi Papua Tengah, Papua

Barat, dan Papua Barat Daya. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki puskesmas dan adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi. Data mengenai rasio puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

1. Akreditasi Puskesmas

Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagai pengganti Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 dimana akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas telah memenuhi standar akreditasi. Pengaturan akreditasi ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat;
2. meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan puskesmas sebagai institusi;
3. meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di puskesmas; dan
4. mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

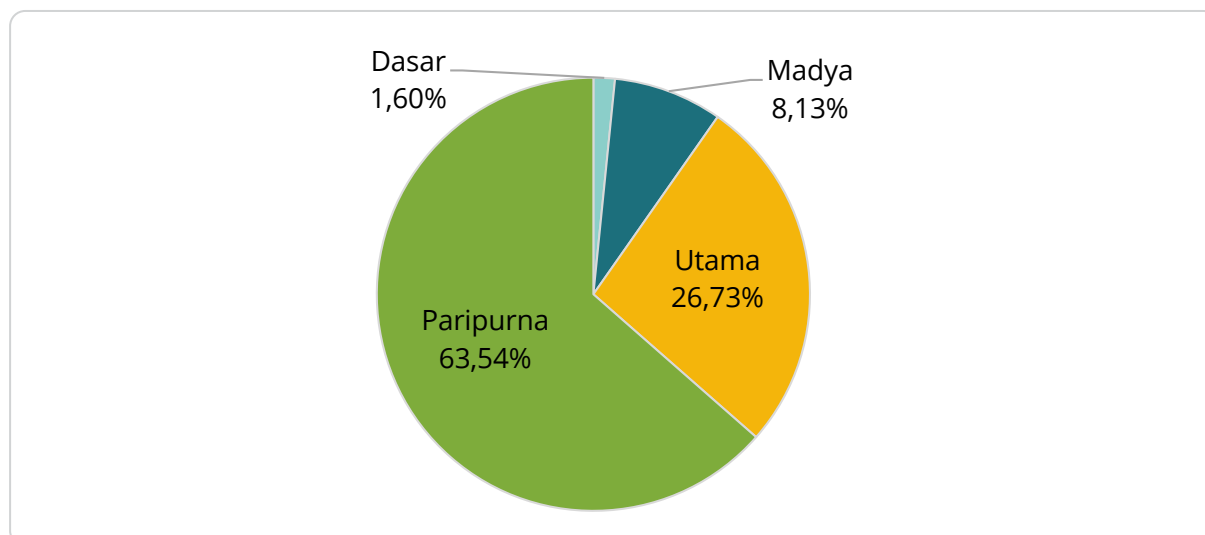
Setiap puskesmas wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi dilakukan paling lambat setelah puskesmas beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Puskesmas yang telah terakreditasi wajib dilakukan akreditasi kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Dalam rangka menyelenggarakan akreditasi, menteri menetapkan lembaga penyelenggara akreditasi yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan survei akreditasi.

Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/menkes/1048/2023 tentang Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Kelas D Pratama, Puskesmas, Dan Klinik, Serta Pelaporan Indikator Nasional Mutu Bagi Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi menyatakan bahwa

1. puskesmas yang telah melaksanakan survei akreditasi pada tahun 2023 dan memiliki sertifikat akreditasi harus melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyusun dan melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS).
2. puskesmas yang belum melakukan survei akreditasi pada tahun 2023 harus segera mendaftarkan survei akreditasi melalui aplikasi Lembaga Penyelenggara Akreditasi rumah sakit yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SINAR) untuk rumah sakit, dan melalui aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) untuk puskesmas dan klinik, paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
3. waktu survei akreditasi puskesmas pada aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan oleh puskesmas dan klinik paling lambat tanggal 31 Mei 2024.
4. bukti pendaftaran survei akreditasi dari aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) untuk puskesmas dan klinik (screenshot pengajuan survei di aplikasi DFO) sebagaimana dimaksud serta sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 10.010 puskesmas (97,5%) dari 10.268 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota Indonesia dengan kategori tingkat kelulusan sebagai berikut.

GAMBAR 2.3
PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Mutu, Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI 2025

Penetapan status akreditasi Puskesmas terdiri atas 5 (lima) tingkatan dengan pemenuhan masing-masing Bab pada tiap tingkatan kelulusan dengan persyaratan sebagai berikut.

TABEL 2.1
PERSYARATAN PENETAPAN KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS

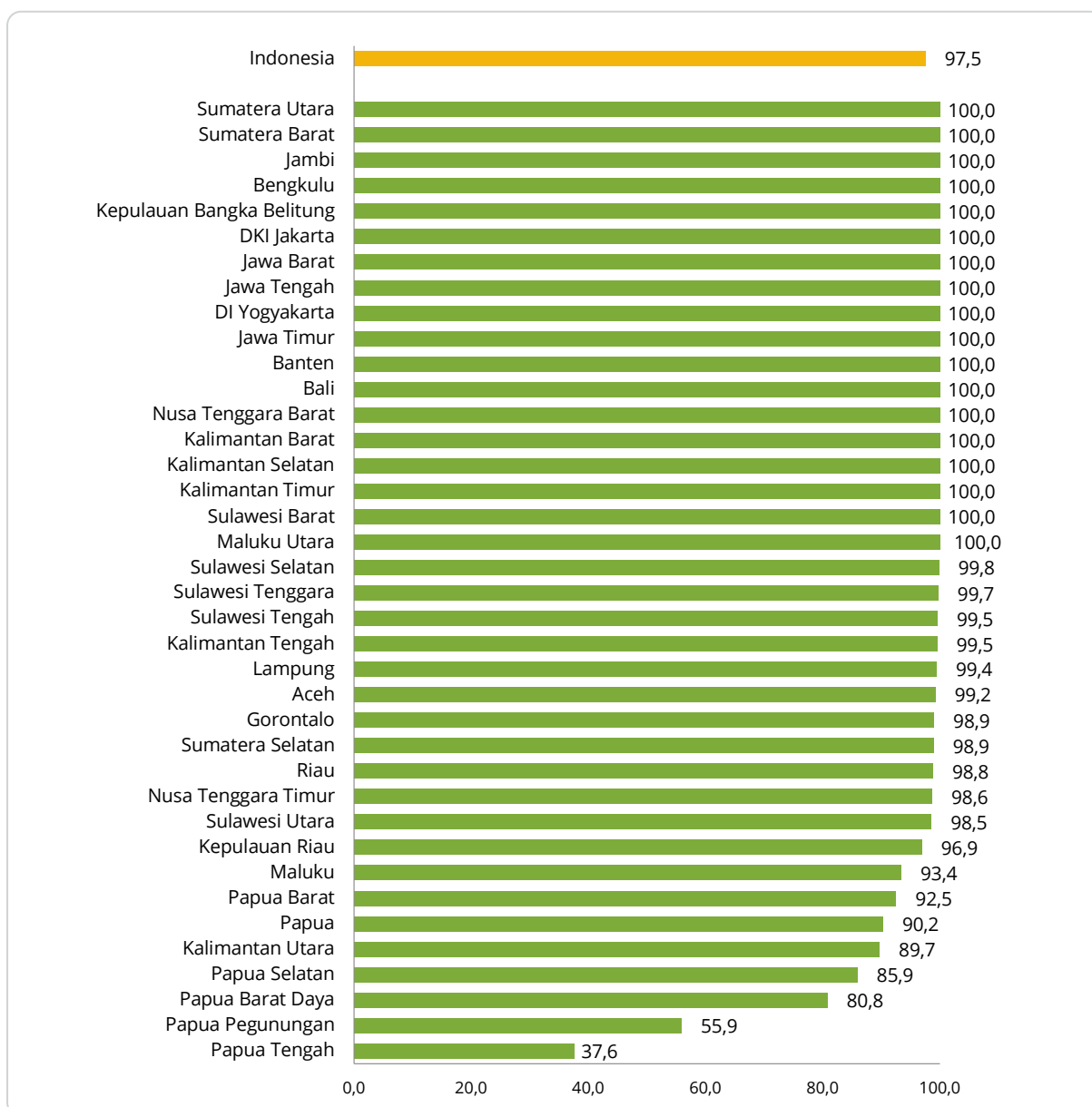
Status Akreditasi	Bab Akreditasi Puskesmas				
	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
Terakreditasi Paripurna	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
Terakreditasi Utama	≥ 80%	≥ 80%	≥ 70%	≥ 80%	≥ 75%
Terakreditasi Madya	≥ 75%	≥ 75%	≥ 60%	≥ 75%	≥ 70%
Terakreditasi Dasar	≥ 75%	≥ 60%	≥ 50%	≥ 60%	≥ 60%
Tidak Terakreditasi	< 75%	< 60%	< 50%	< 60%	< 60%

Untuk kondisi per Desember 2024 didapatkan hasil akreditasi Puskesmas yang mencapai kelulusan status Paripurna sebesar 31,8%, status Utama sebanyak 13,4%, status Madya 4,1%, dan Dasar 1,5%. Setelah proses akreditasi Puskesmas wajib membuat dan menyampaikan Program Perbaikan Strategis (PPS) kepada Lembaga Penyelenggara Akreditasi, dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. PPS digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi.

Puskesmas wajib mengisi formulir umpan balik pelaksanaan survei akreditasi melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sertifikat akreditasi elektronik dan rekomendasi hasil survei diterima melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF). Sehingga diharapkan upaya perbaikan dilakukan memastikan tercapainya pelayanan Puskesmas yang berkualitas.

Berdasarkan Gambar 2.4, terdapat dua provinsi yang berada jauh di bawah target Renstra Kementerian Kesehatan 2024 yaitu Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Untuk Puskesmas pada wilayah tersebut akan didorong untuk melakukan persiapan akreditasi, dengan akan disokong dengan penganggaran melalui pembiayaan DAK Non Fisik. Dengan begitu pelaksanaan akreditasi tetap dapat dilakukan untuk menjamin bahwasannya pelayanan berkualitas adalah merata didapatkan baik di wilayah regional barat maupun regional Timur Indonesia.

GAMBAR 2.4
PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

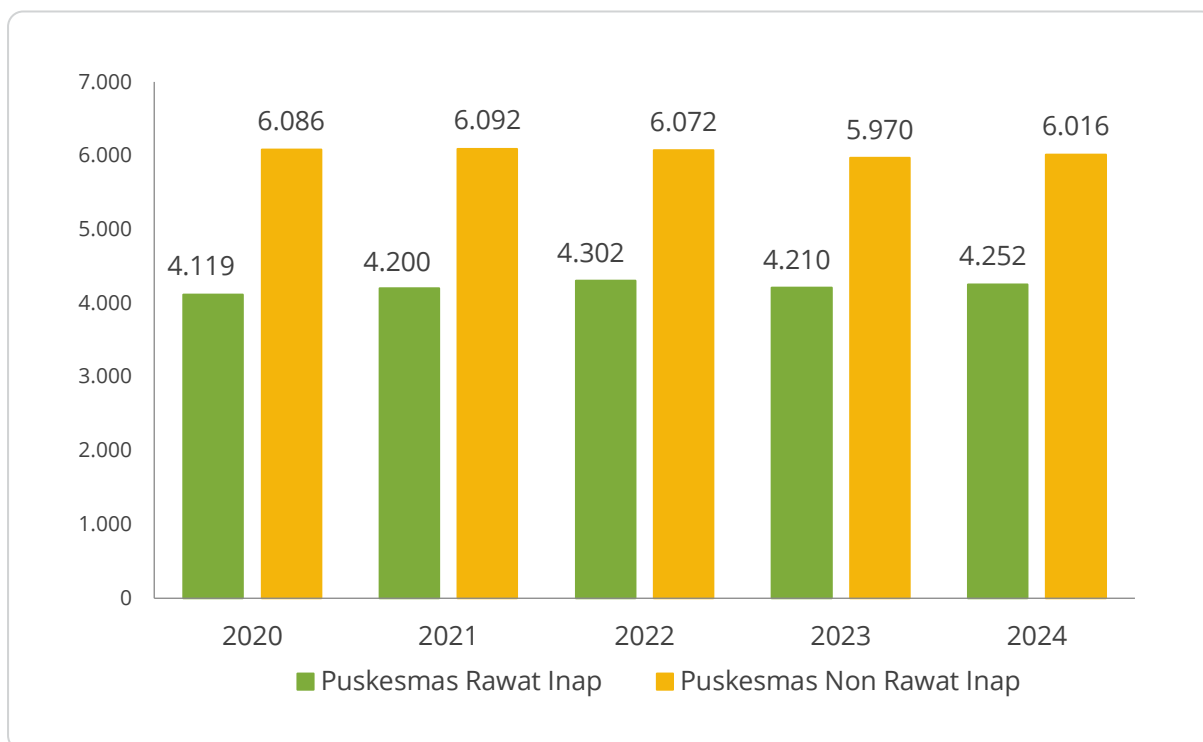


Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025

2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan perkembangan jumlah puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

GAMBAR 2.5
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA
TAHUN 2020 – 2024



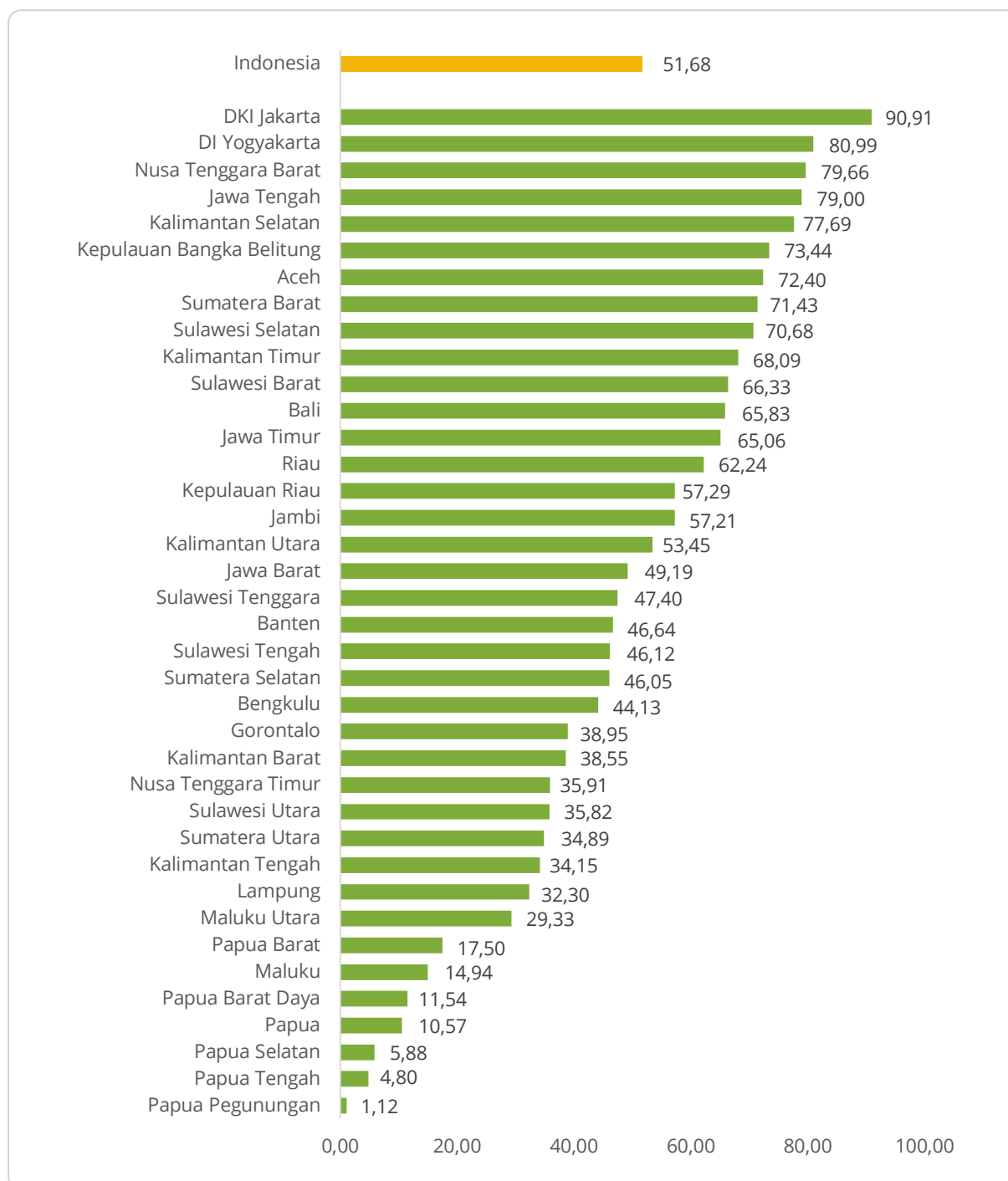
Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025

Jumlah puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir fluktuatif, jumlahnya meningkat selama tahun 2020-2022, lalu menurun menjadi 4.210 unit pada tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024 sebanyak 4.252 unit. Puskesmas non rawat inap cenderung mengalami penurunan jumlah puskesmasnya berdasarkan status pada tahun 2020-2023. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.b.

3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan

Sebuah Puskesmas dianggap memadai atau memenuhi syarat jika memiliki setidaknya satu orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan, meliputi: (1) dokter atau dokter layanan primer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Menurut data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), pada tahun 2024, sebanyak 51,7% Puskesmas telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

GAMBAR 2.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR
JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

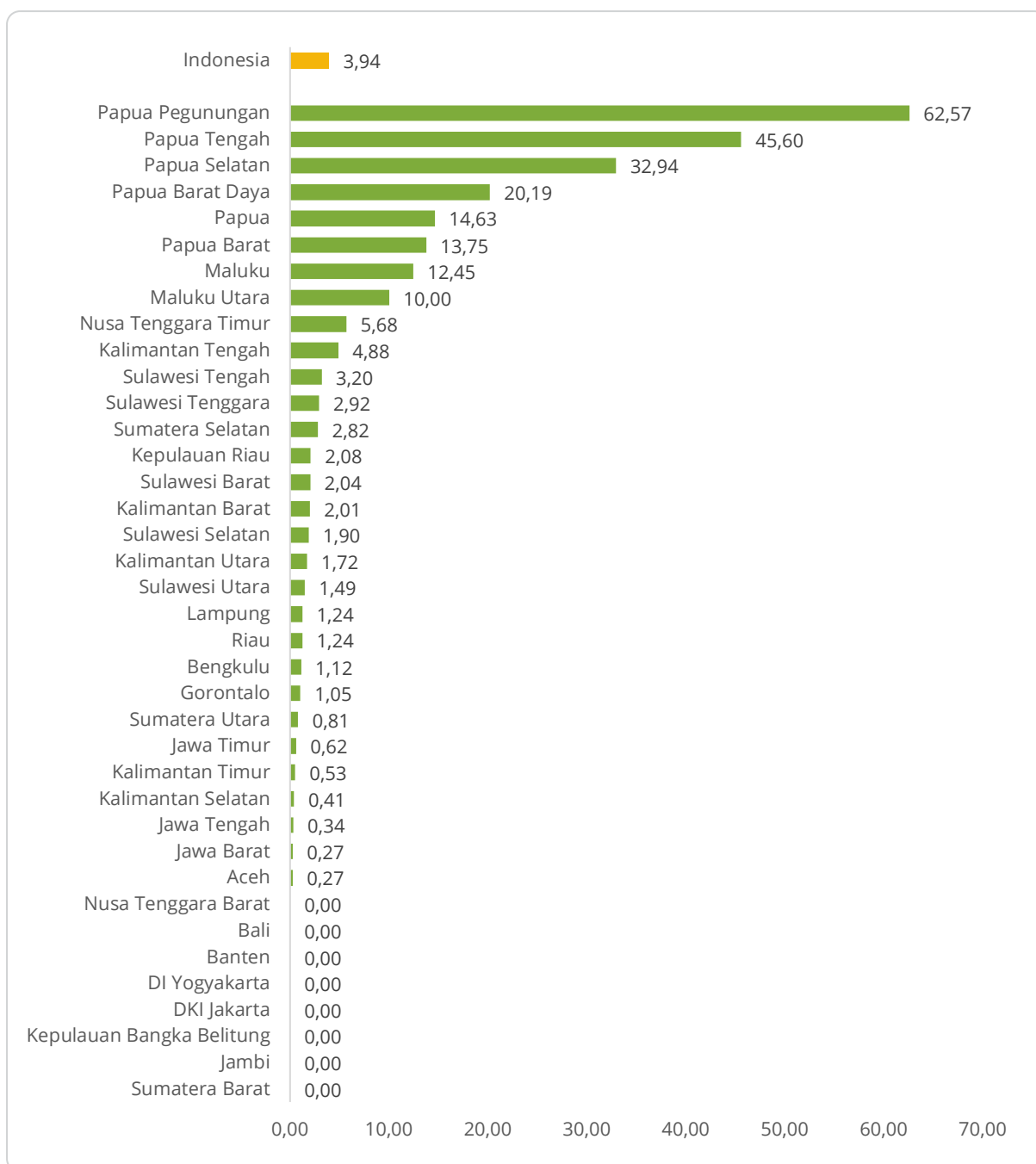


Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan Gambar 2.6, persentase provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (90,91%), DI Yogyakarta (80,99%), dan Nusa Tenggara Barat (79,66%). Sedangkan persentase provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling rendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (1,12%), Papua Tengah (4,80%), dan Papua Selatan (5,88%). Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 4.e.

Derajat kesehatan masyarakat mulai membaik, meskipun jumlah tenaga kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2024 masih terdapat 3,94% Puskesmas tanpa dokter. Kementerian Kesehatan mengadakan program Nusantara Sehat (Penugasan Khusus Berbasis Tim dan Individu) sejak tahun 2015 dalam rangka pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas.

GAMBAR 2.7
PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Provinsi dengan persentase Puskesmas tanpa dokter tertinggi berdasarkan Gambar 2.7 adalah Provinsi Papua Pegunungan (62,57%), Papua Tengah (45,6%), dan Papua Selatan (32,94%). Sedangkan provinsi dimana seluruh puskesmas di wilayahnya memiliki dokter mencakup 8 provinsi di antaranya adalah Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas tanpa dokter dapat dilihat di Lampiran 4.f.

4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

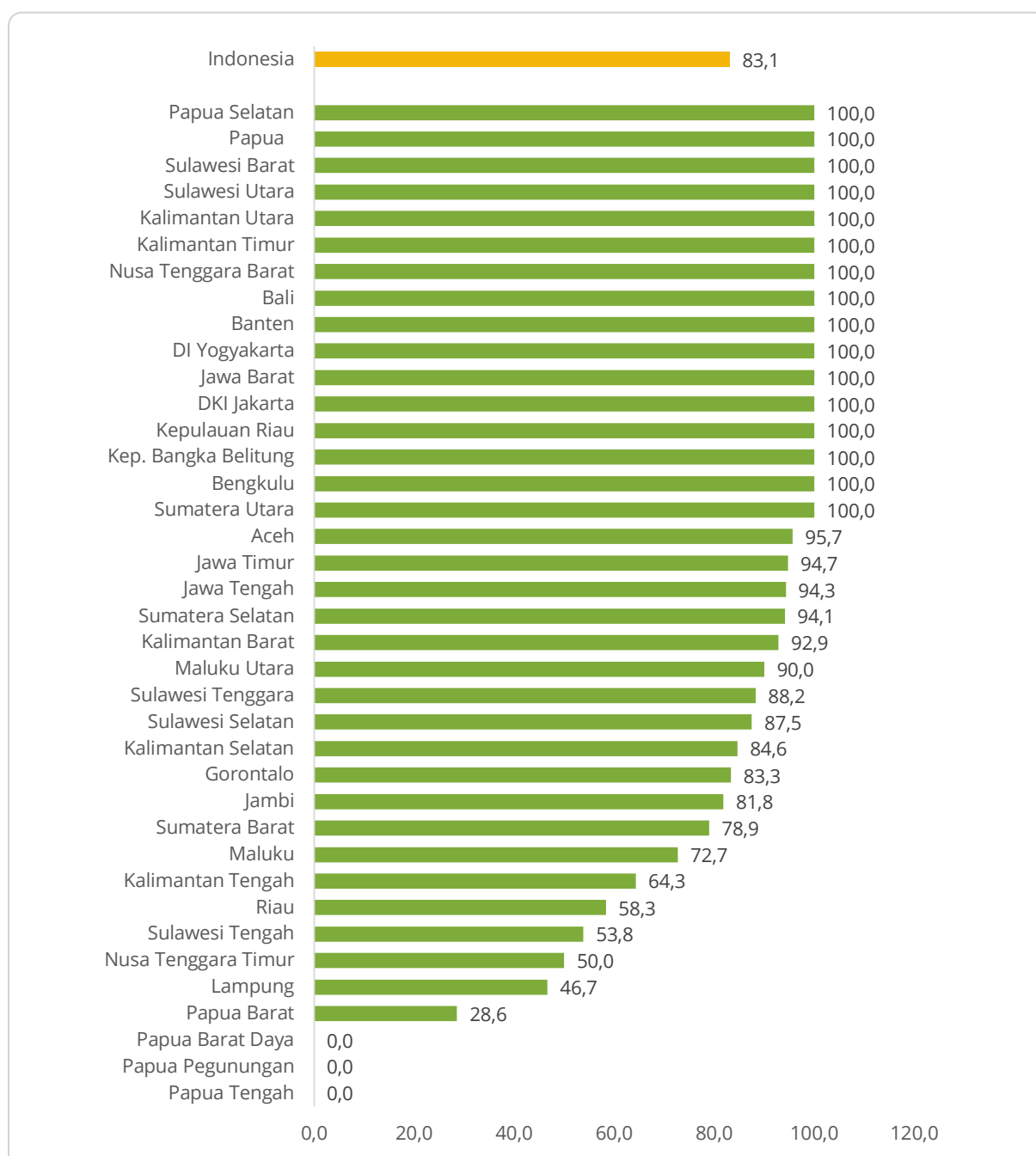
Upaya Kesehatan Kerja mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 98-101 yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja secara umum diatur sesuai dengan standar kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Selanjutnya, Penerapan standar kesehatan kerja dapat dikembangkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait sesuai dengan bahaya, risiko, dan karakteristik masing-masing bidang.

Upaya Kesehatan Kerja yang dilakukan sesuai standar meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pemberi kerja berkewajiban untuk menerapkan standar Kesehatan kerja dan memastikan seluruh pekerjanya mendapatkan hak sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerjanya. Dalam penerapannya, standar ini berkembang menjadi program Kesehatan kerja yang tidak dapat terpisahkan oleh program keselamatan kerja. Oleh karena itu, terdapat program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, K3 Rumah Sakit, dan K3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat diterapkan oleh masing-masing instansi. Selain itu, terdapat program Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang ditujukan bagi pekerja sektor informal dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif bagi Perusahaan dan organisasi perangkat daerah.

Agar tujuan Upaya Kesehatan kerja dapat tercapai, terukur, dan terlaksana dengan baik di setiap tempat kerja, di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan terdapat indikator terkait Kesehatan kerja. Indikator Kesehatan Kerja yang dimaksud adalah jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja. Setiap Kabupaten/kota dapat terhitung melaksanakan Kesehatan kerja, apabila:

1. Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja
2. Adanya SK/SE atau pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja; dan
3. Melakukan Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal diantaranya Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), K3 Perkantoran, dan K3 Fasyankes.

GAMBAR 2.8
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

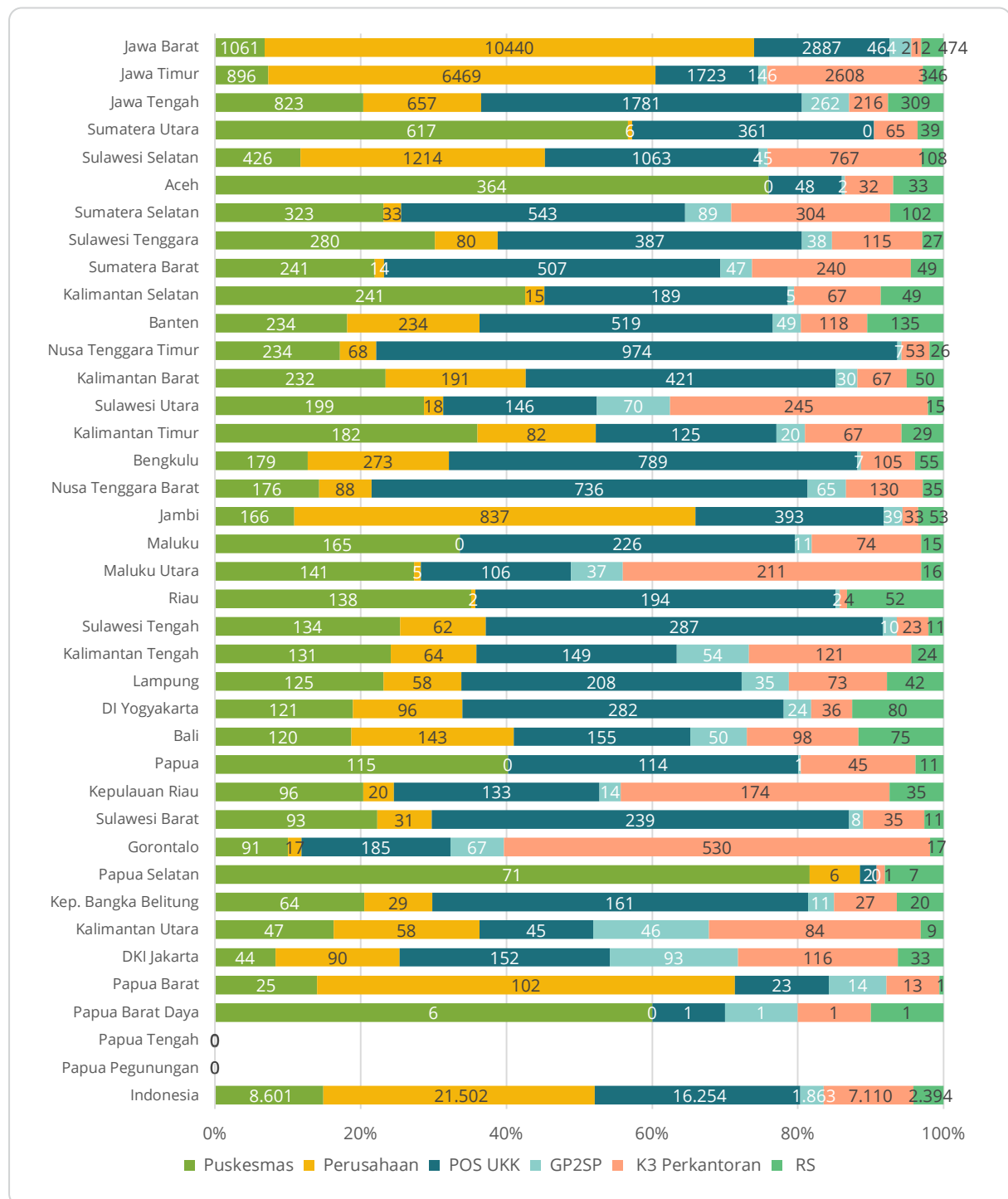


Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2025

Setiap tahunnya target RENSTRA terkait indikator kesehatan kerja berhasil tercapai, dengan capaian terakhir pada tahun 2024 sebanyak 427 kabupaten/kota sudah menerapkan kesehatan kerja. Capaian ini telah melewati target RENSTRA tahun 2024 yaitu 411 kabupaten/kota. Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 28 provinsi telah menerapkan kesehatan kerja sebesar 75% di seluruh kabupaten/kota-nya. Oleh karena itu, pada tahun 2025, perlu adanya penguatan program kesehatan kerja di 10 Provinsi yang capaiannya masih kurang dari 75% diantaranya Maluku, Kalimantan Tengah, Riau, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.

Selain Kesehatan Kerja, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 juga diatur tentang kesehatan olahraga. Pada pasal 102-103 dinyatakan bahwa Upaya Kesehatan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga.

GAMBAR 2.9
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

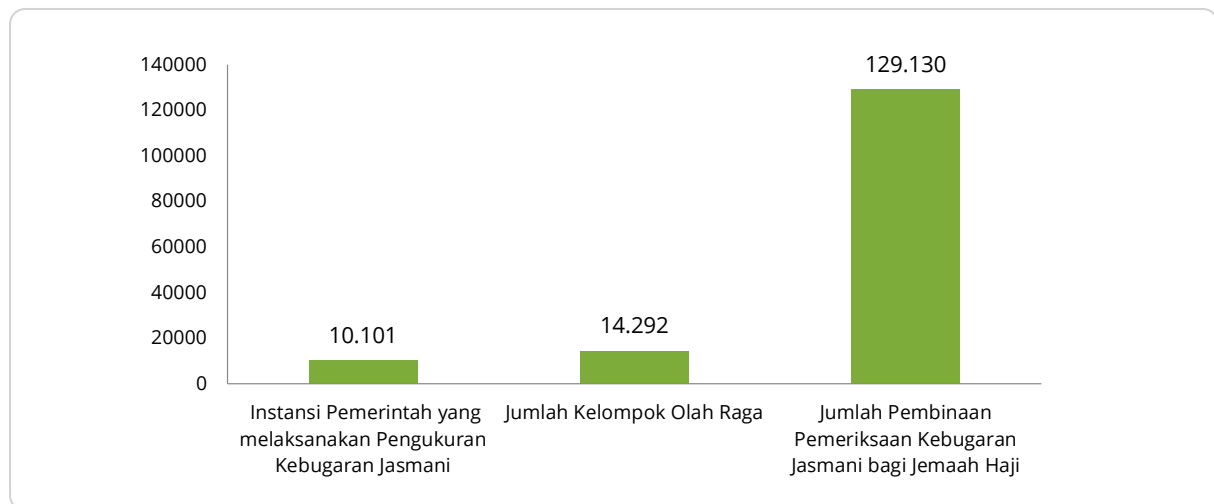


Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan RI, 2025

Pada tahun 2024, di Indonesia terdapat 8.601 Puskesmas, 21.502 perusahaan, 16.254 Pos UKK, dan 1.863 GP2SP yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja.

Dari gambar 2.10, pada tahun 2024 di Indonesia, jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani sebanyak 10.101 instansi, jumlah pembinaan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi jemaah haji sebanyak 129.130 jemaah, dan jumlah kelompok olahraga sebanyak 14.292 kelompok. Gambaran lebih rinci tentang pelaksanaan kesehatan kerja, pengukuran dan pemeriksaan kebugaran menurut provinsi terdapat pada Lampiran 8.h.

GAMBAR 2.10
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAH RAGA DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2025

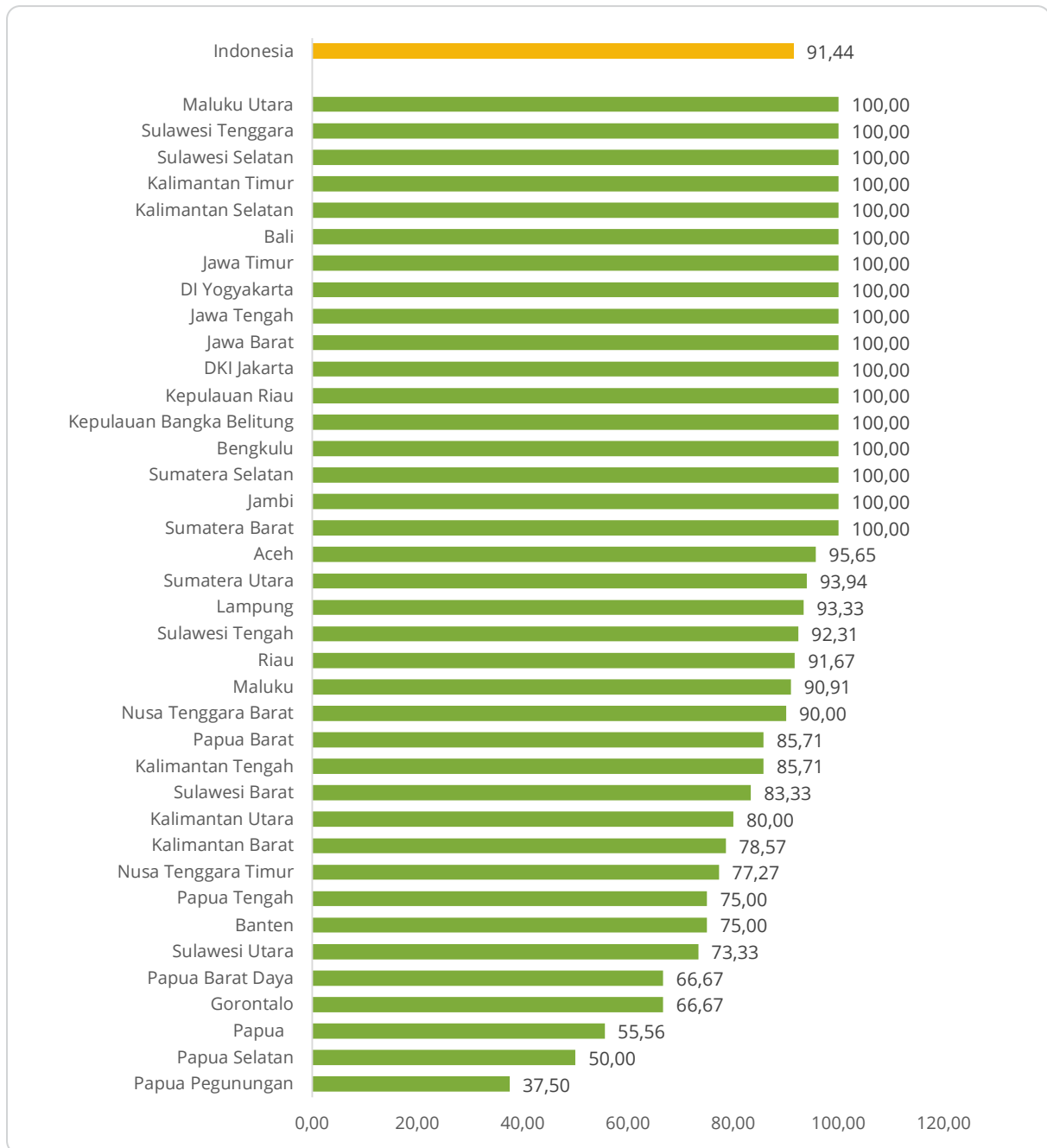
Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan prestasi olahraga. Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bentuk pengobatan dan perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris. Metode ini dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi tiga jenis: empiris, komplementer, dan integrasi. Pelayanan kesehatan tradisional telah dilaksanakan di 350 puskesmas, 16 rumah sakit, dan 16 Griya Sehat.

Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, indikator terkait kesehatan tradisional masuk sebagai salah satu komponen dalam indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yaitu memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional. Pada tahun 2024, sebanyak 470 kabupaten/kota di 38 provinsi terlibat dalam pembinaan kesehatan tradisional.

GAMBAR 2.11
KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT
PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

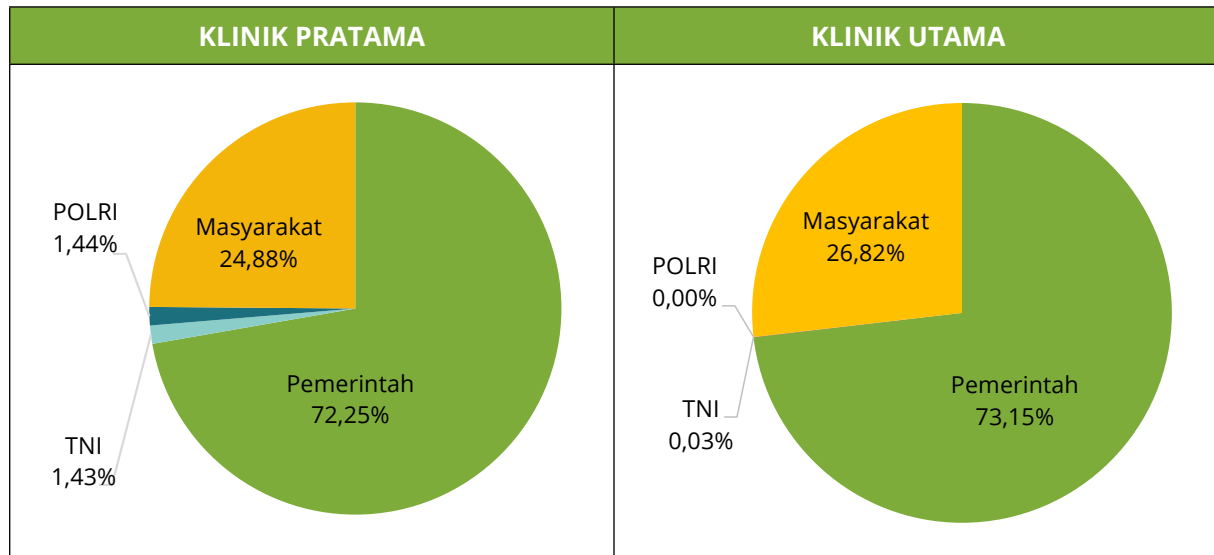
B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM

1. Klinik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, klinik merupakan salah satu jenis fasilitas Pelayanan kesehatan (fasyankes). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/ II/4392/2020 tentang Registrasi Klinik, Kementerian Kesehatan telah menghimbau seluruh klinik di Indonesia melakukan registrasi klinik secara daring melalui aplikasi berbasis *website* pada alamat registrasi fasyankes.kemkes.go.id. Berdasarkan data pada aplikasi tersebut per Desember 2024, terdapat 20.693 klinik teregistrasi di Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan Pemerintah Daerah), dan swasta (masyarakat).

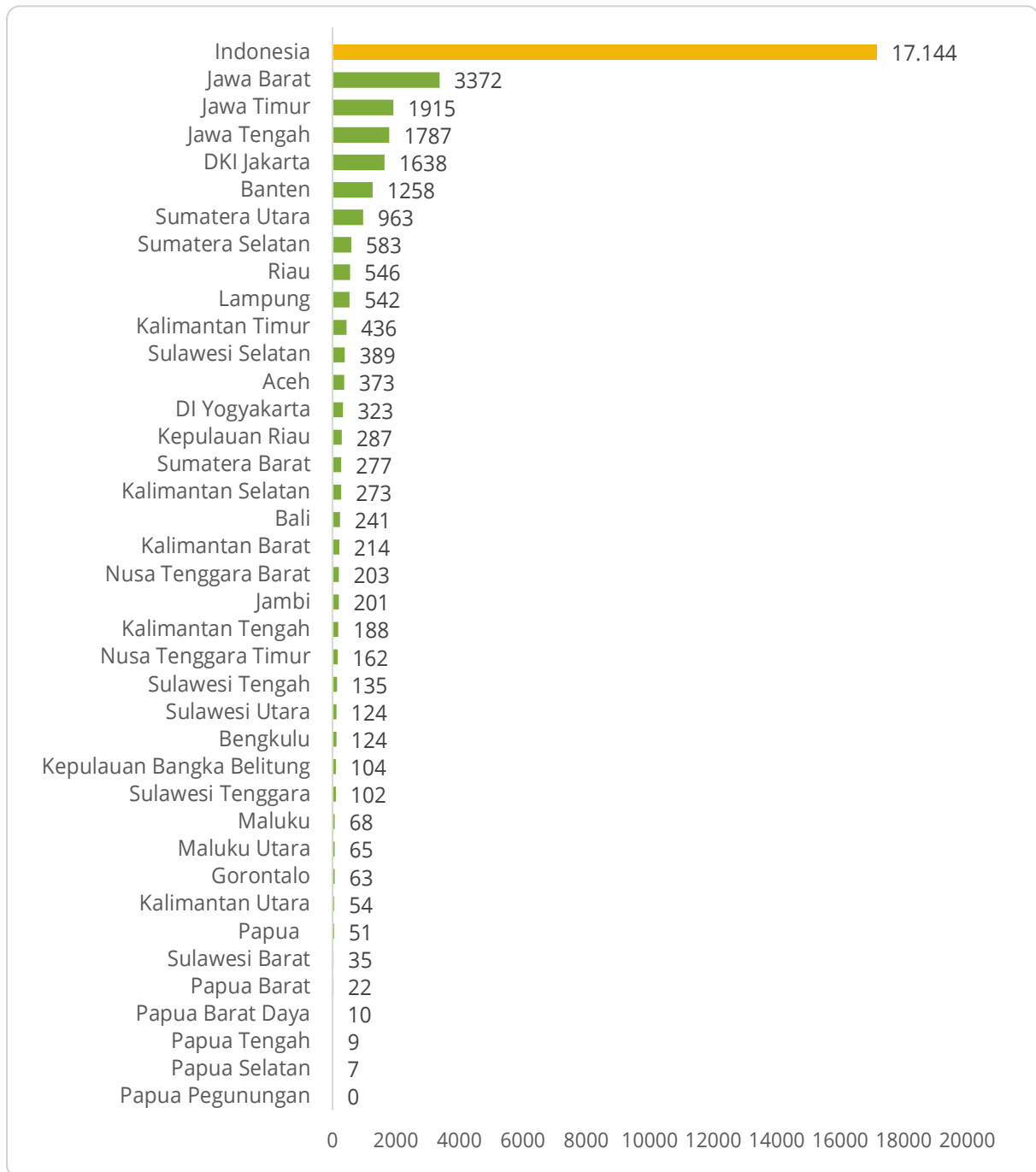
Berdasarkan kemampuan pelayanan klinik, terdapat 17.114 klinik pratama dan 3.549 klinik utama, sedangkan berdasarkan kepemilikan klinik terdapat 15.476 klinik Pemerintah dan 5.217 klinik swasta. Data mengenai klinik teregistrasi secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.12 dan lampiran 4.h.

GAMBAR 2.12
PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

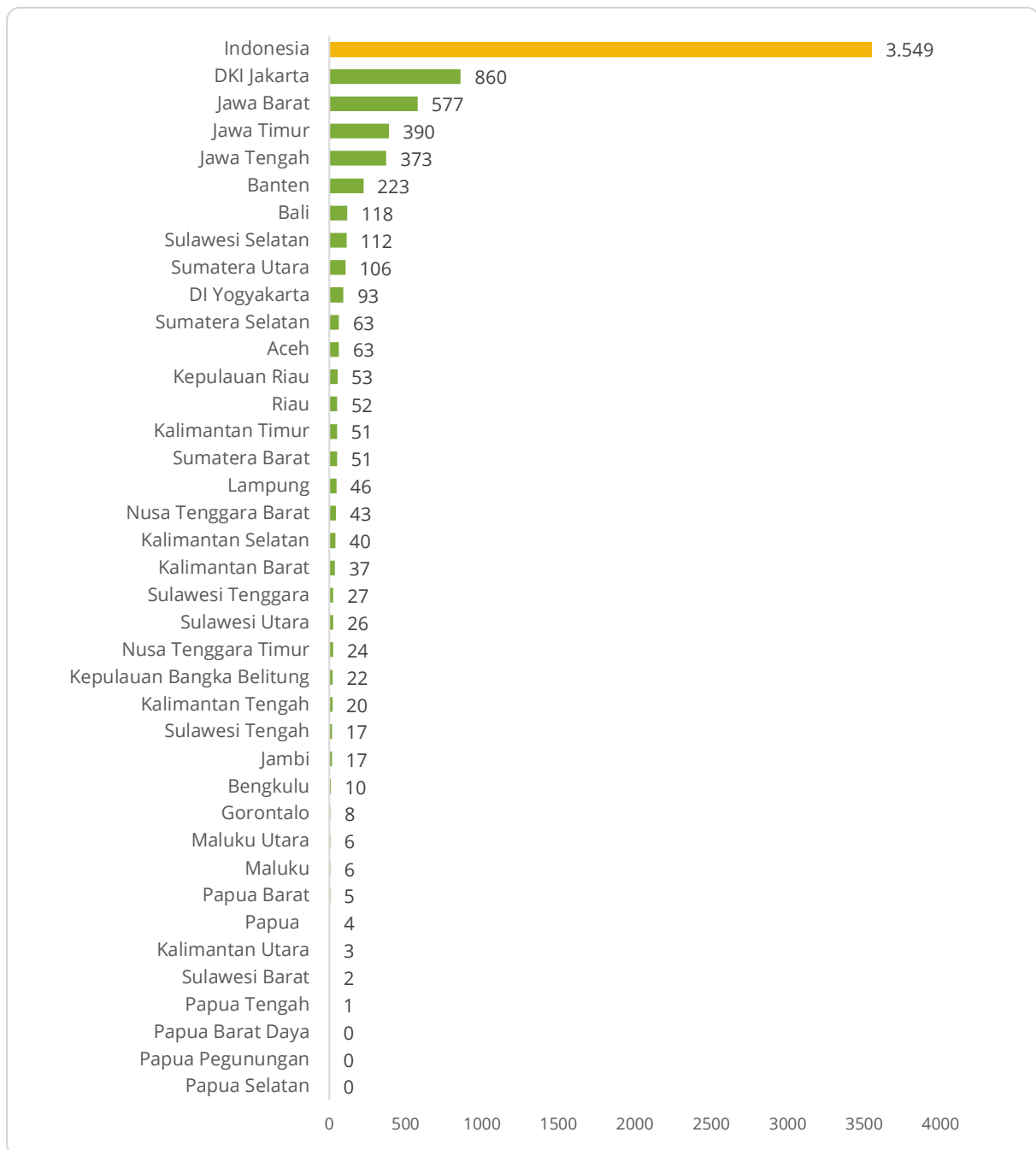
GAMBAR 2.13
JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan jumlah klinik pratama tereistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 3.372 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama paling sedikit adalah Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 0 klinik.

GAMBAR 2.14
JUMLAH KLINIK UTAMA TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

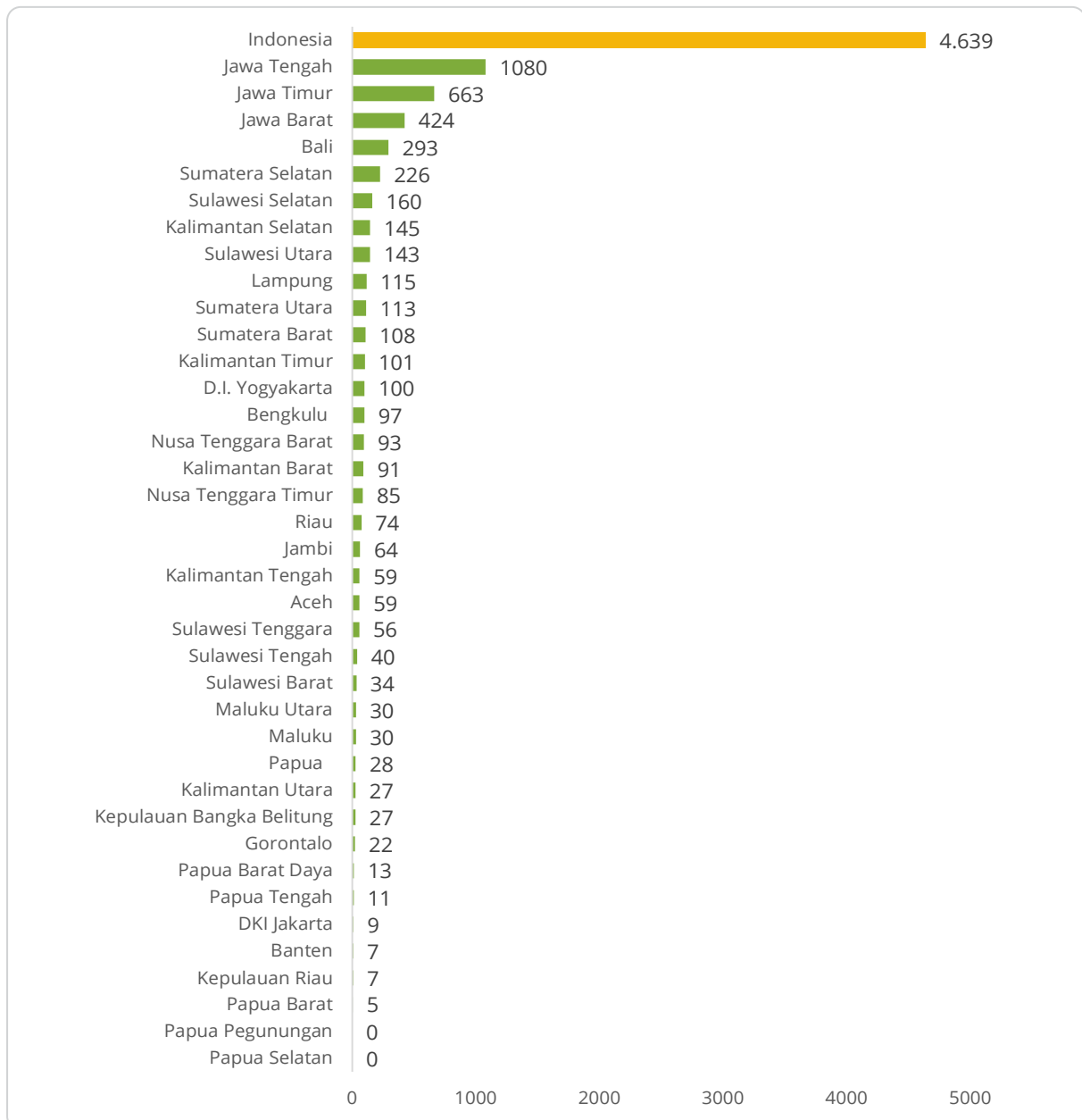
Provinsi dengan jumlah klinik utama tereistrasi paling banyak adalah Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 860 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik utama paling sedikit adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya sebanyak 0 klinik.

2. Praktek Mandiri Tenaga Medis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik mandiri tenaga medis merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Praktik mandiri tenaga medis meliputi Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dan Tempat Praktik Mandiri

Dokter Gigi (TPMDG). Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/4406/2021 tentang Registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menghimbau kepada dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melakukan praktik mandiri agar dapat segera melakukan proses registrasi *online* melalui aplikasi berbasis *website* pada alamat registrasifasyankes.kemkes.go.id. Berdasarkan data pada aplikasi tersebut per Desember 2024 terdapat 5.853 praktik mandiri tenaga medis telah teregistrasi meliputi sebanyak 4.639 TPMD dan 1.214 TPMDG. Data mengenai praktik mandiri tenaga medis ini dapat dilihat pada lampiran 4.i.

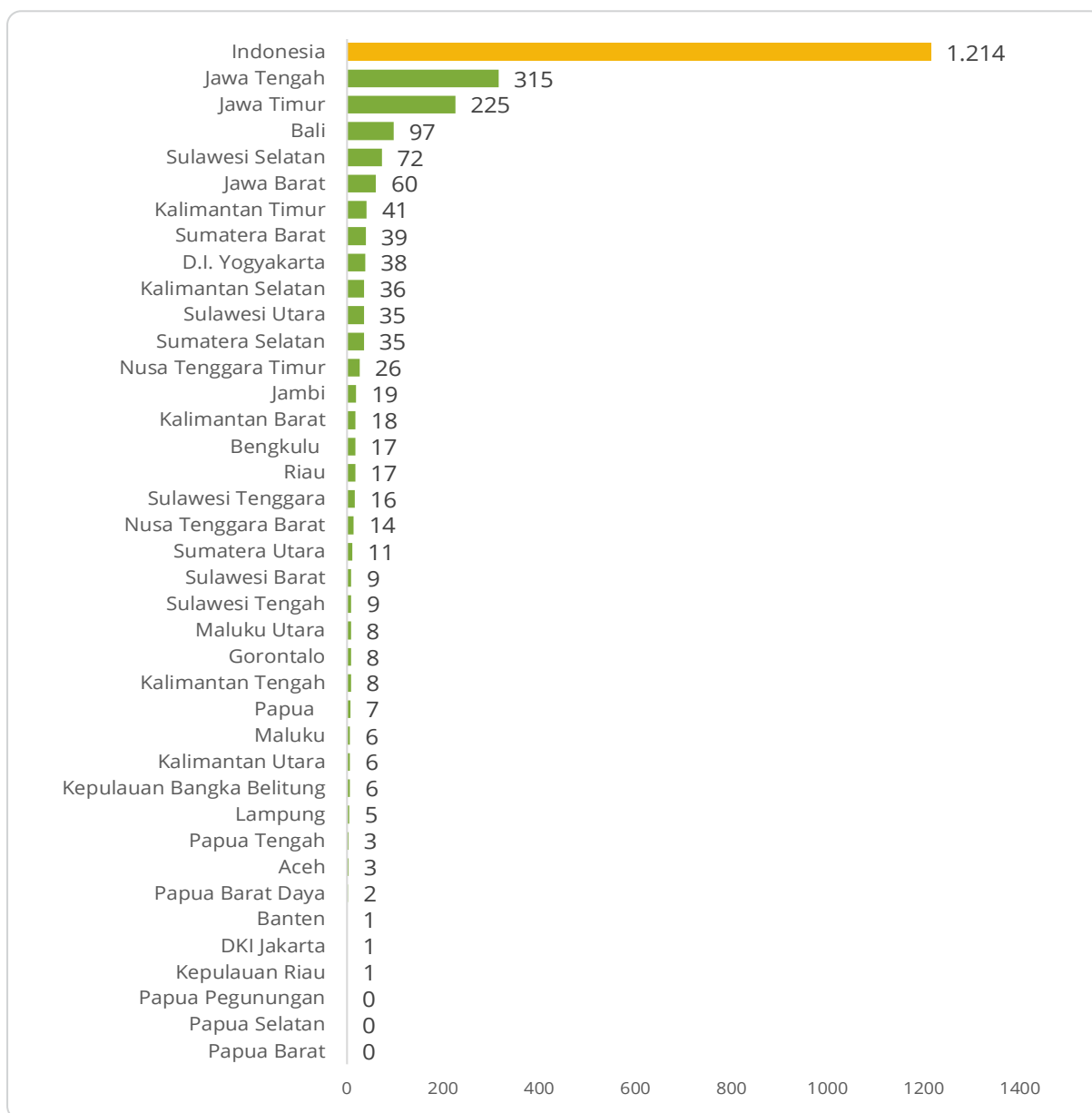
GAMBAR 2.15
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER (TPMD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan jumlah TPMD teregistrasi paling banyak adalah Provinsi DI Yogyakarta, sebanyak 1.080 TPMD. Sedangkan provinsi dengan jumlah TPMD paling sedikit adalah Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 0 TPMD.

GAMBAR 2.16
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI (TPMDG) MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan jumlah TPMDG teregistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 315 TPMDG. Ada 3 provinsi yang belum mempunyai TPMDG yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat.

3. Unit Transfusi Darah

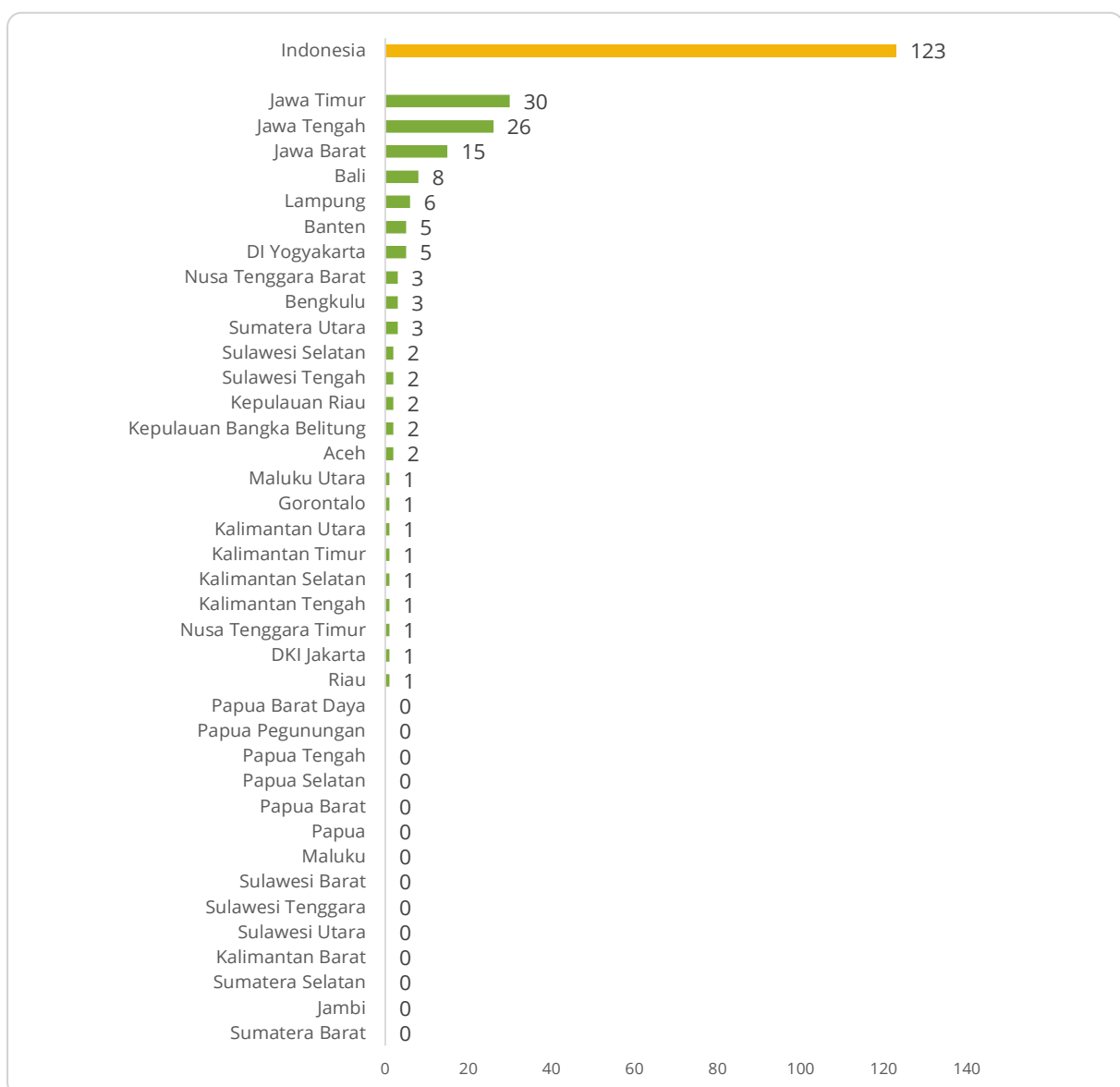
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan

darah, dan pendistribusian darah. Berdasarkan data dari aplikasi registrasi fasyankes, terdapat 363 UTD teregistrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Berdasarkan data dari aplikasi registrasi fasyankes, per Desember 2024 terdapat 123 UTD teregistrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pada tahun 2024, provinsi dengan total jumlah UTD teregistrasi paling banyak yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 30 UTD, sementara itu provinsi yang memiliki UTD teregistrasi paling rendah adalah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya (0 UTD). Data selengkapnya mengenai UTD teregistrasi dapat dilihat pada Gambar 2.17 dan lampiran 4.k

GAMBAR 2.17
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



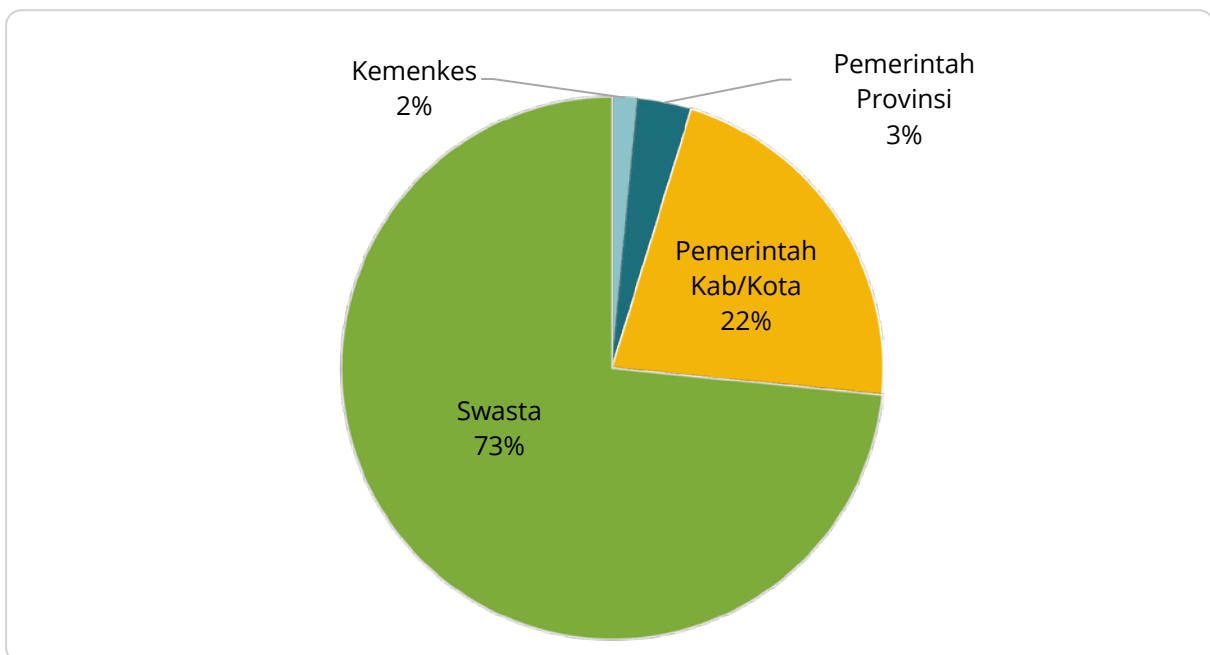
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahkan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisis, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah laboratorium di Indonesia sebanyak 1.204, dengan jumlah laboratorium kesehatan terbanyak dimiliki oleh swasta, yaitu sebanyak 884 dan sebanyak 410 laboratorium laboratorium yang sudah terakreditasi. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke dua yaitu laboratorium pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 263 laboratorium, sudah terakreditasi sebanyak 134. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke tiga yaitu laboratorium milik pemerintah provinsi, yakni sebanyak 39 laboratorium. Laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan menjadi pengampu dari laboratorium kesehatan yang tersebar di Indonesia.

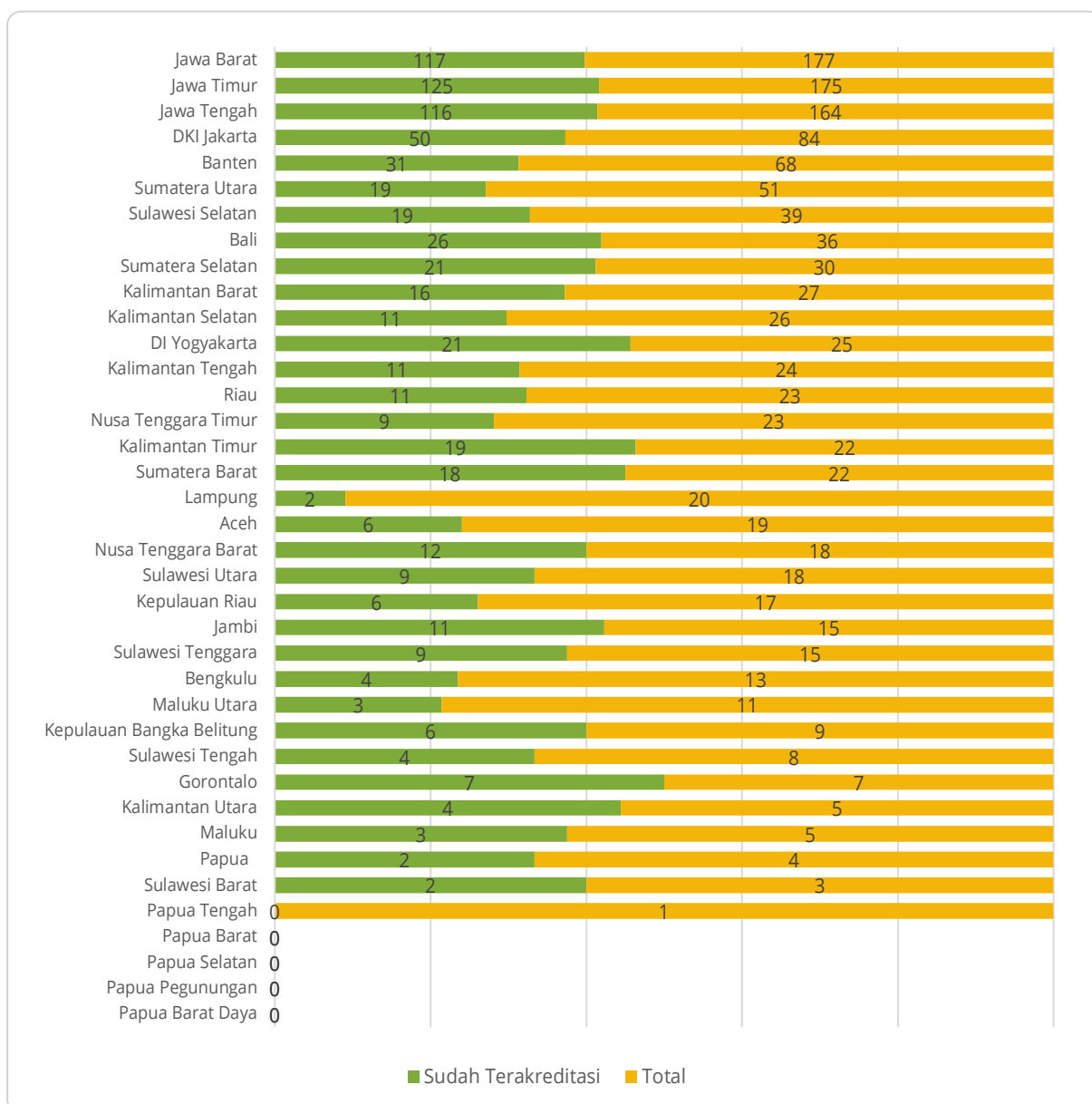
GAMBAR 2.18
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 177 laboratorium. Provinsi terbanyak kedua yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 175, dan terbanyak ketiga yaitu Provinsi Jawa Tengah 164 laboratorium. Sebanyak 3 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Papua Tengah (1 laboratorium), Sulawesi Barat (3 laboratorium), dan Papua (4 laboratorium).

GAMBAR 2.19
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2025

D. RUMAH SAKIT

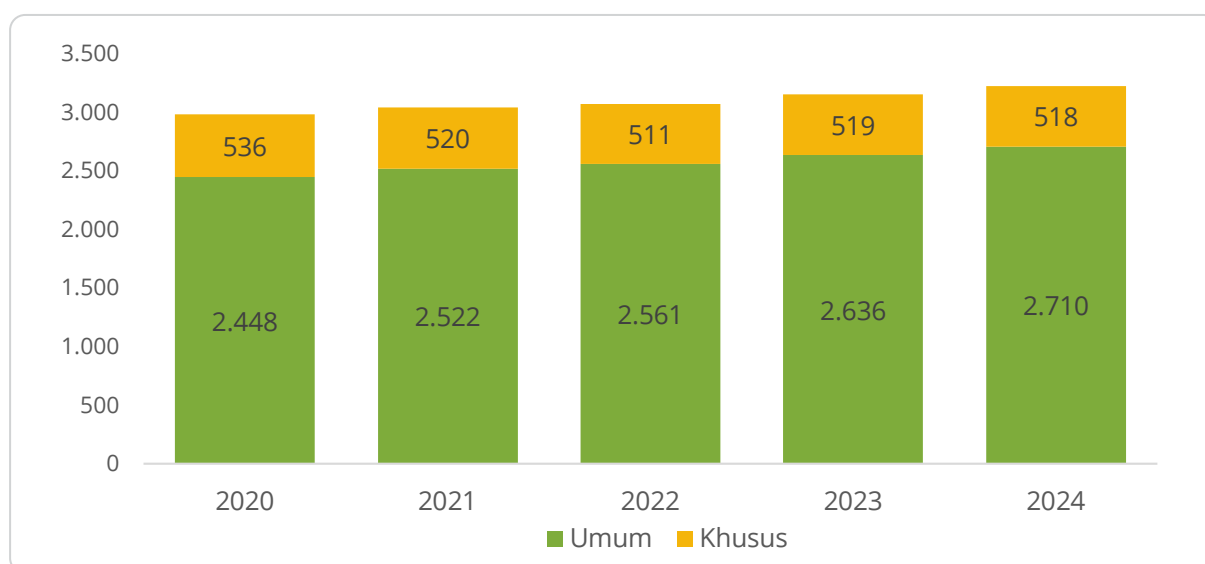
Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain menyediakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, rumah sakit juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diklasifikasikan atau dikelompokkan kelasnya berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.

1. Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan diselenggarakan oleh berbagai instansi atau Lembaga, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, BUMN, dan swasta. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Selama tahun 2020-2024 jumlah rumah sakit di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,2%. Pada tahun 2020 jumlah rumah sakit sebanyak 2.984 meningkat menjadi 3.228 pada tahun 2024. Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2024 terdiri dari 2.710 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 518 Rumah Sakit Khusus (RSK). Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.20.

GAMBAR 2.20
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
DI INDONESIA TAHUN 2020 – 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

TABEL 2.2
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN
DI INDONESIA TAHUN 2020– 2024

No	Penyelenggara	2020	2021	2022	2023	2024
PEMERINTAH PUSAT		230	236	241	242	253
1	Kementerian Kesehatan	19	19	20	20	22
2	TNI/POLRI	160	164	165	163	171
3	Kementerian Lain dan BUMN	51	53	56	59	60
PEMERINTAH DAERAH		773	790	817	849	881
1	Pemerintah Provinsi	97	96	97	98	98
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	676	694	720	751	783
SWASTA		1445	1496	1503	1545	1576
Total Keseluruhan		2448	2522	2561	2636	2710

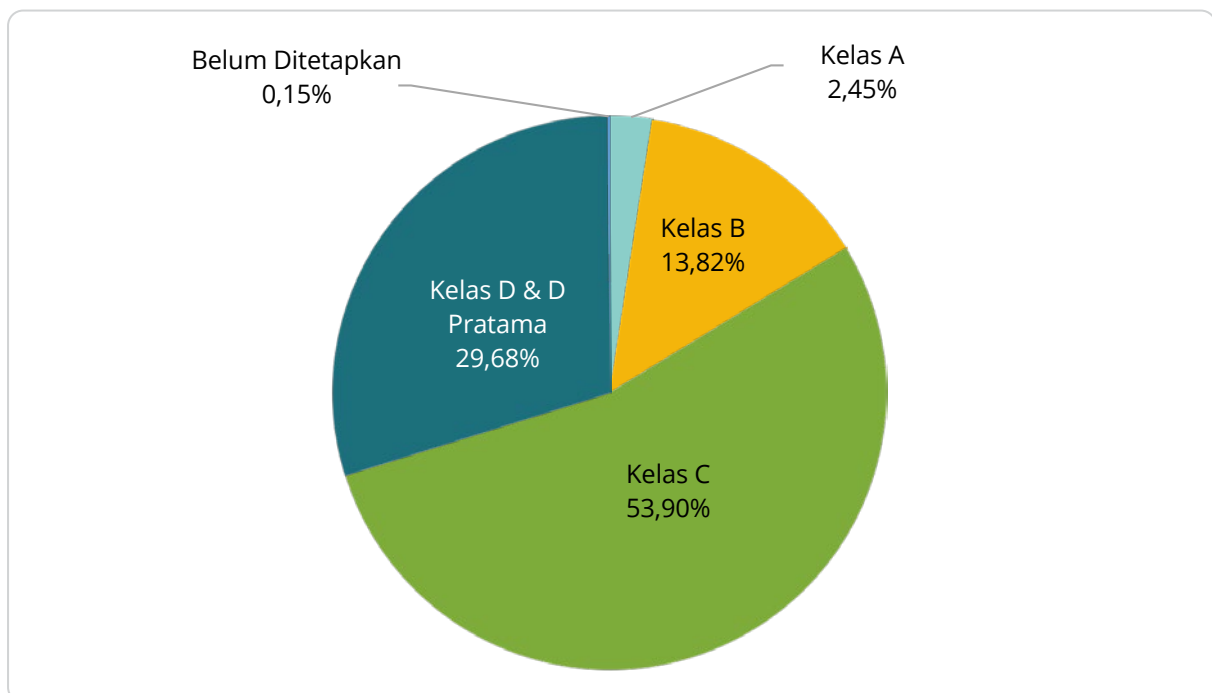
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024 rumah sakit yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 22 RS (0,81%), Kementerian Lain dan BUMN 60 RS (2,21%), TNI/POLRI 171 RS (6,31%), Pemerintah Daerah 881 RS (32,51%), sedangkan swasta menyelenggarakan rumah sakit terbanyak 1.576 RS (58,15%). Sebagian besar merupakan RS Umum, dengan rincian per penyelenggara sesuai tabel 2.1 di atas. Adapun rincian jumlah rumah sakit menurut jenis, kepemilikan, dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 8.a.

2. Tipe Rumah Sakit

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C (1.740 RS) sebesar 53,9%, kemudian kelas D dan D Pratama (958 RS) sebesar 29,68%, kelas B (446 RS) sebesar 13,82%, dan kelas A (79 RS) sebesar 2,45%, sedangkan selebihnya sebesar 0,15% merupakan RS yang belum ditetapkan kelas (5 RS).

GAMBAR 2.21
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2024



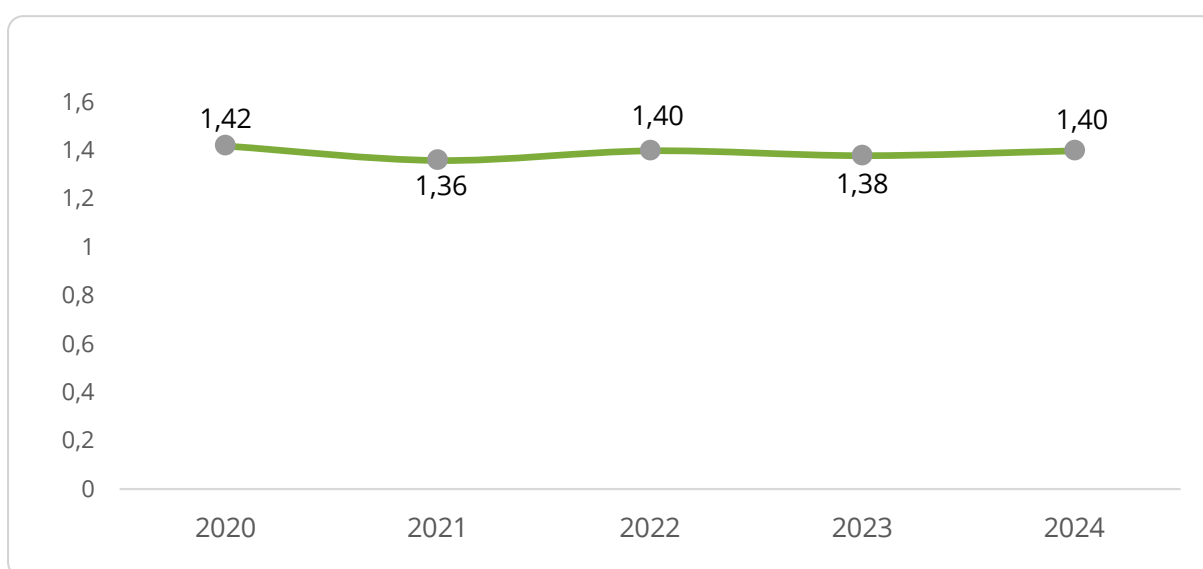
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2025

3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

Dalam standar *World Health Organization* (WHO), standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2024 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk.

Untuk tahun 2024, rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia adalah 1,40 per 1.000 penduduk (Gambar 2.22). Sehingga, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia sudah tercukupi menurut standar WHO.

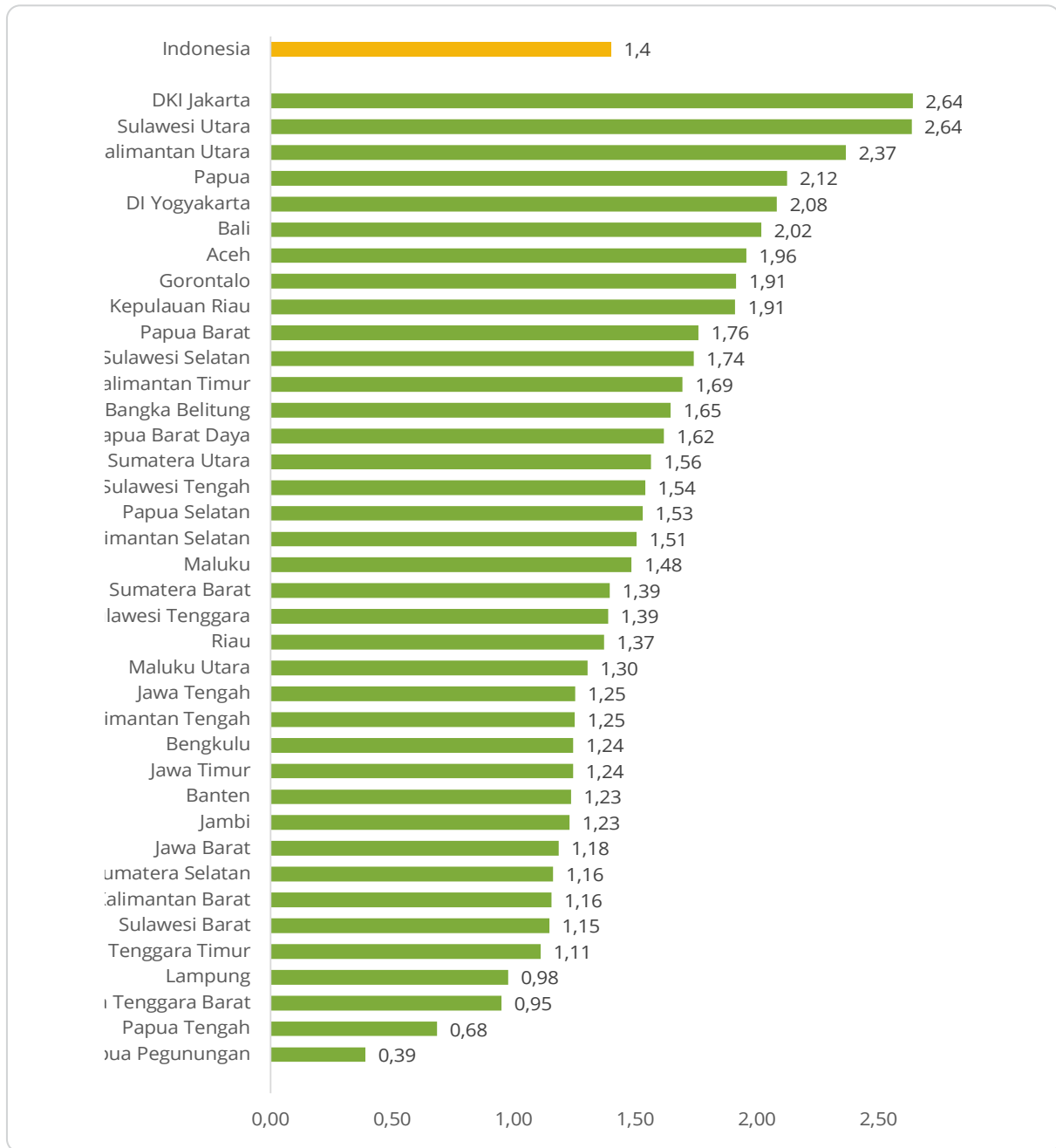
GAMBAR 2.22
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
TAHUN 2020-2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2025

Rasio tempat tidur menurut provinsi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta (2,64 per 1.000 penduduk) dan terdapat dua provinsi yang masih berada dibawah standar WHO yaitu Provinsi Papua Tengah (0,7 per 1.000 penduduk) dan Papua Pegunungan (0,4 per 1.000 penduduk).

GAMBAR 2.23
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



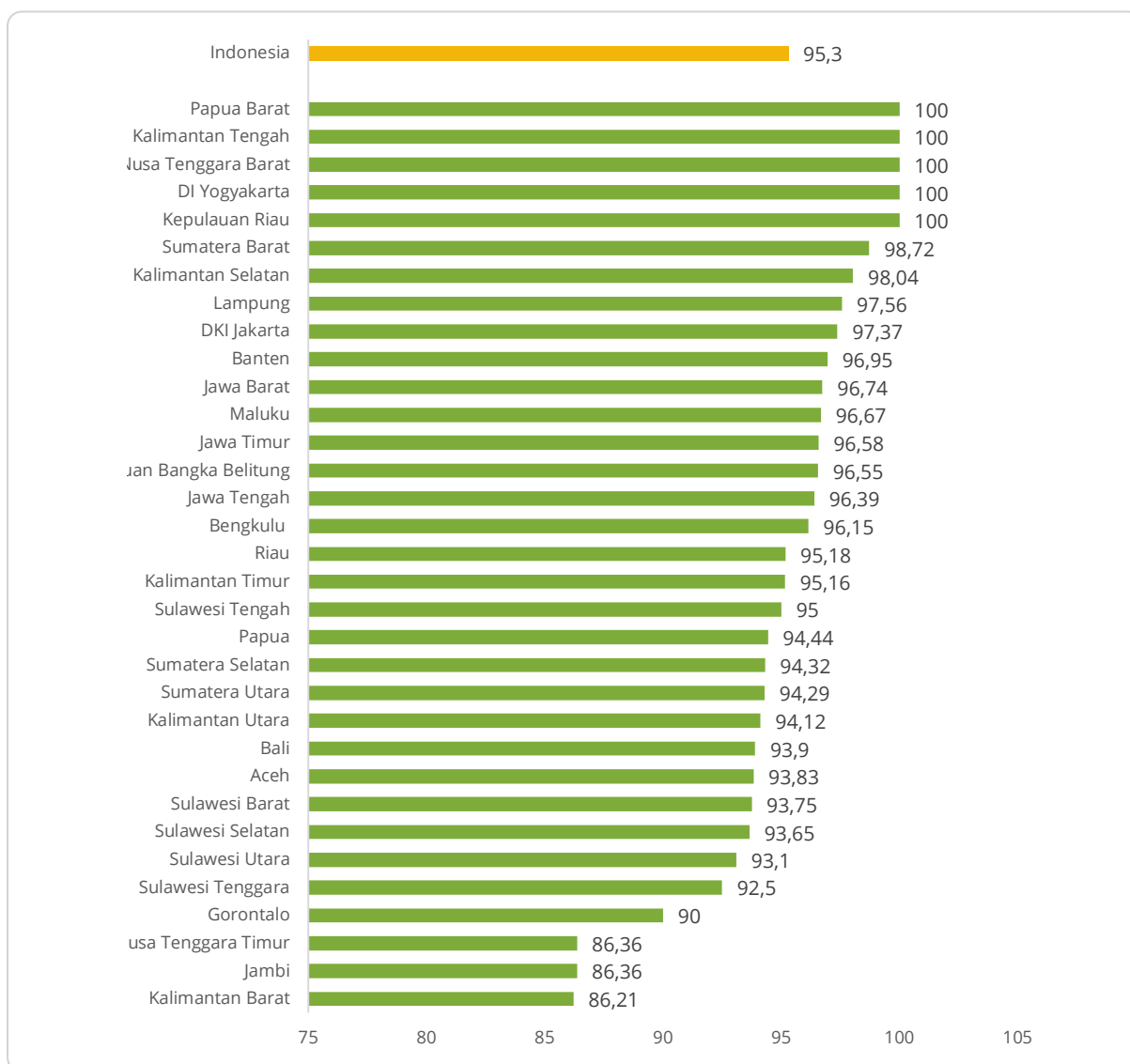
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2025

4. Akreditasi Rumah Sakit

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi pada tahun 2024.

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan rujukan dilakukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan sistem jejaring rujukan serta kemitraan. Persentase RS terakreditasi tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, dan Kep. Riau sebesar 100% dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jambi, Kalimantan Barat dibawah 90%. Capaian rumah sakit yang terakreditasi pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.24 dibawah untuk rincian data selengkapnya terdapat pada Lampiran 8.e.

GAMBAR 2.24
PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2025

5. Rekam Medis Elektronik (RME) Rumah Sakit

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik dibutuhkan beberapa syarat. Salah satu syarat yang dimaksud adalah tersedianya data yang lengkap, tidak hanya tentang keadaan kesehatan pasien yang menjadi tanggung jawab dokter tetapi juga tentang keadaan lingkungan fisik serta lingkungan non fisik masing-masing. Semua data tersebut perlu dicatat serta disimpan sebaik-baiknya, sehingga apabila diperlukan ke depan dapat dengan mudah diambil kembali. Berkas atau catatan yang berisikan data yang dimaksud di atas dalam praktek kedokteran dikenal dengan nama Rekam Medis (*Medical Record*). Peranan rekam medis dalam pelayanan kesehatan sangat penting karena macam dan jenis data pada pelayanan kesehatan relatif lebih banyak dan kompleks.

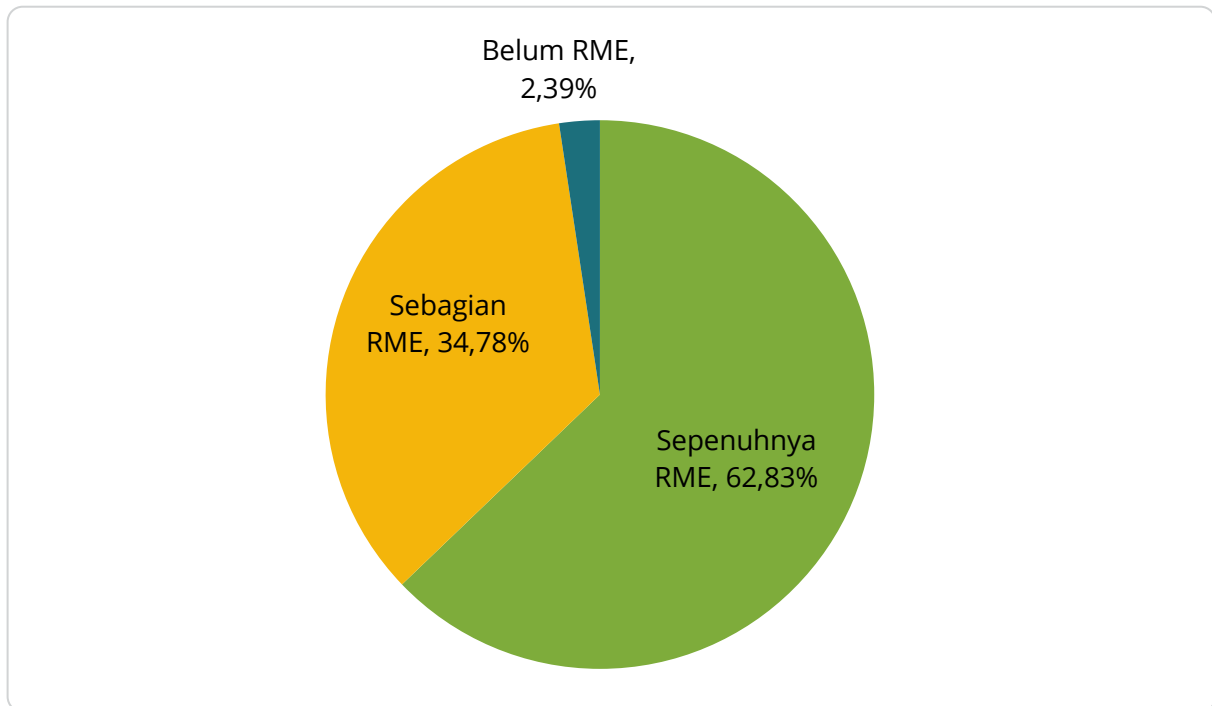
Di era digital ini, semua serba efisien dengan penggunaan teknologi informasi. Salah satu penggunaan teknologi informasi (TI) di bidang rekam medis adalah pemanfaatan RME. RME merupakan sistem informasi kesehatan terkomputerisasi yang berisi data sosial dan data medis pasien, serta dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. RME dapat membantu manajemen pelayanan kesehatan pasien dengan lebih baik. Pengguna merupakan aspek penting untuk mewujudkan RME yang ideal. Dengan memahami persepsi pengguna mengenai RME dapat ditemukan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan adopsi RME dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Penyelenggaraan rekam medis secara elektronik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk mempermudah sistem pelaporan yang dilakukan oleh seluruh pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara administratif, RME bermanfaat sebagai gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Selain itu, penggunaan RME memberikan manfaat kepada dokter dan petugas kesehatan dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Pencatatan rekam medis adalah wajib bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan tindakan medis kepada pasien, sesuai dengan aturan sehingga tidak ada alasan bagi dokter untuk tidak membuat rekam medis tersebut. RME merupakan solusi bagi rumah sakit untuk mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi di rumah sakit seperti tempat penyimpanan yang besar, hilangnya rekam medis, pengeluaran data yang dibutuhkan, dan lain-lain.

Saat ini diperlukan pertukaran informasi yang sangat cepat dan akurat untuk mendukung pelayanan menjadi lebih efisien dan bermutu. RME di Rumah Sakit harus dilaksanakan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan. Keadaan geografis Indonesia, keterbatasan SDM tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana serta mobilitas penduduk membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan dimana saja dengan disertai pertukaran informasi kesehatan yang akurat.

Dengan memahami persepsi pengguna mengenai RME dapat ditemukan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan adopsi RME dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Implementasi RME tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 pasal 45 yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan RME sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

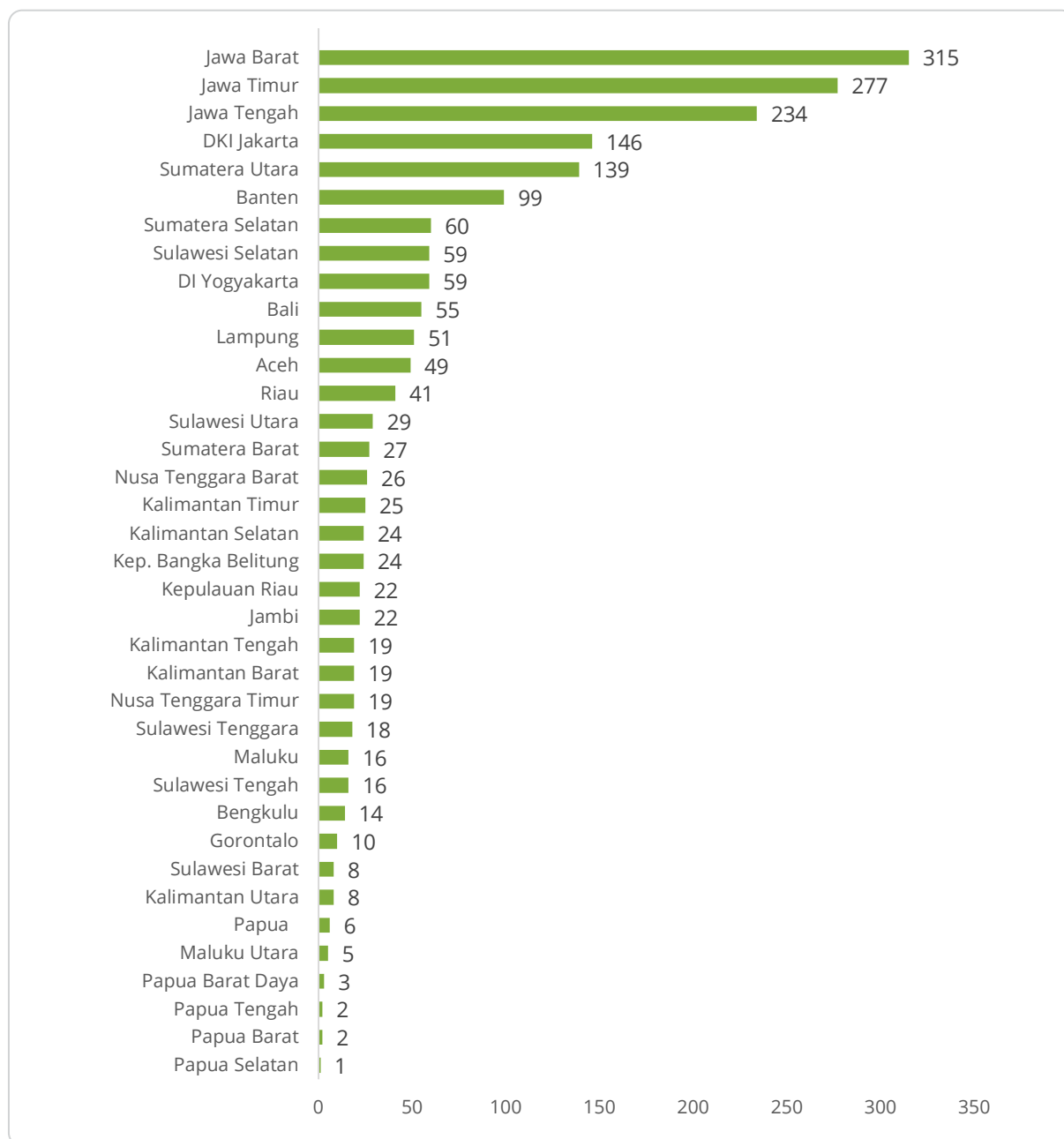
GAMBAR 2.25
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME DI ENAM LAYANAN
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2025

Dari 3.102 rumah sakit yang dilakukan survey, terdapat 1.949 (62,83%) rumah sakit yang telah melaksanakan RME sepenuhnya, 1.079 (34,78%) rumah sakit melaksanakan sebagian RME yaitu RME digunakan minimal pada tiga pelayanan dari total enam pelayanan, dan 74 (2,39%) rumah sakit belum melaksanakan RME sebagaimana terlihat pada Gambar 2.25.

GAMBAR 2.26
JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME SEPENUHNYA DI ENAM LAYANAN
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2025

E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

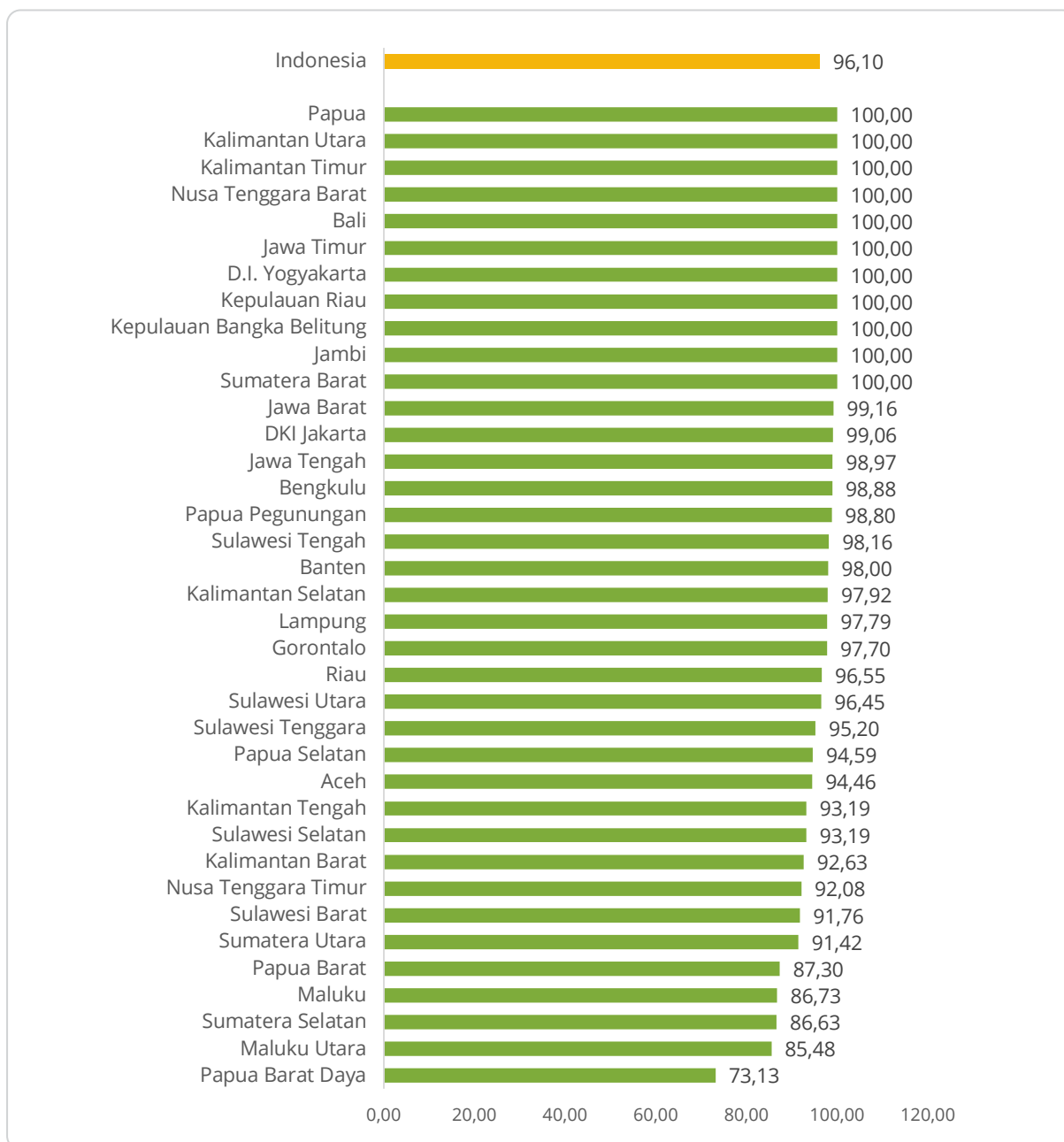
Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan

pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator sasaran program pada Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian upaya tersebut. Adapun indikator sasaran program tersebut yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Pada tahun 2024 realisasi indikator kinerja persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 96,10%, telah melampaui target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 yaitu sebesar 96% dengan capaian 100,10%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4) dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 9.895 dari 10.406 Puskesmas di Indonesia (95,09%) dengan jumlah Puskesmas yang memiliki 80% obat esensial sebanyak 9.509 Puskesmas.

Capaian tertinggi persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial pada Tahun 2024 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh 11 provinsi yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua. Namun, terdapat 15 (lima belas) provinsi dengan capaian persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di bawah target nasional (96,10%). Rincian data persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.a

GAMBAR 2.27
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

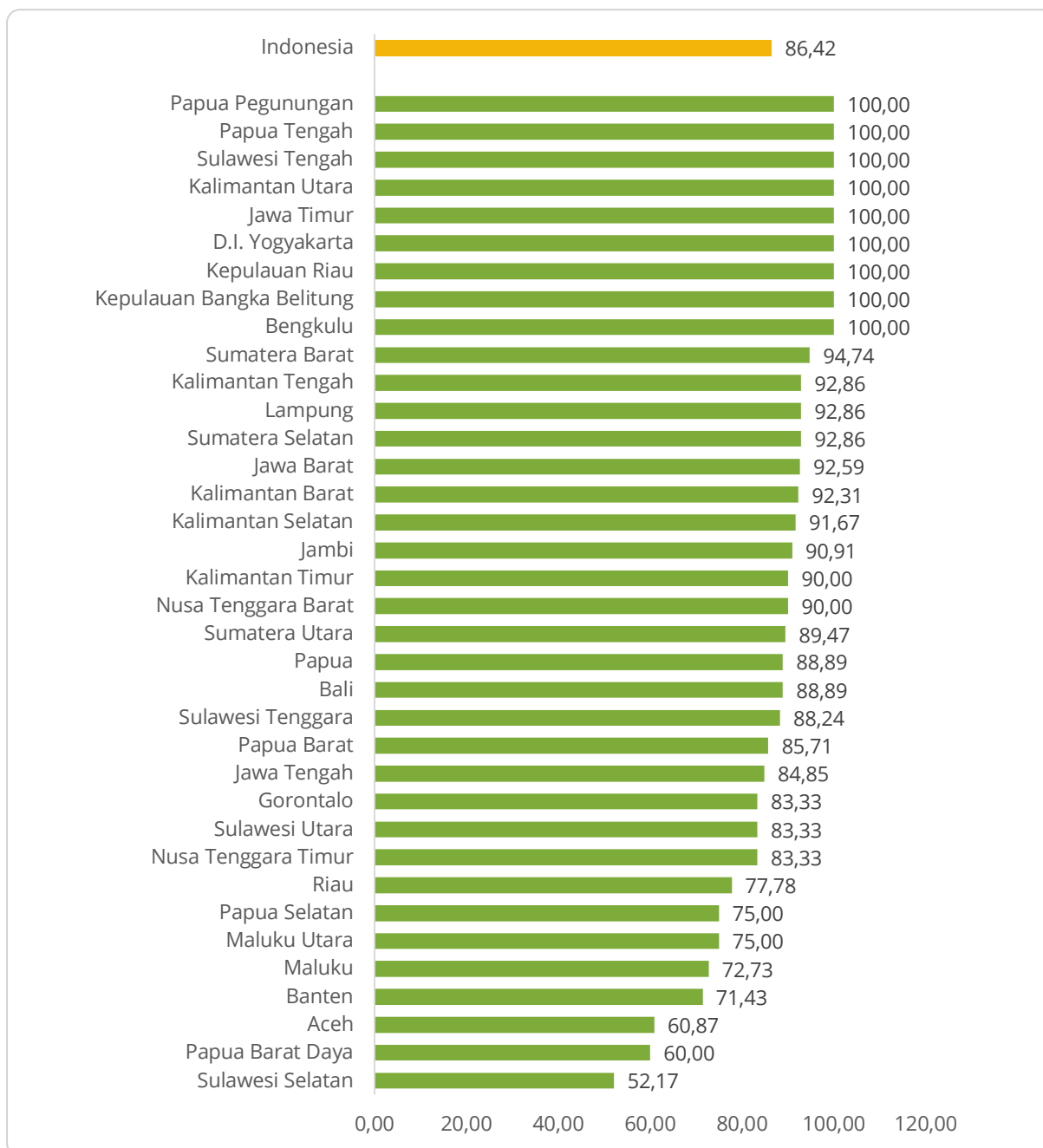
2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan beberapa indikator yang berperan dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang diindikasikan dengan persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar. Adapun definisi operasional dari indikator ini adalah Persentase kabupaten / kota yang memiliki minimal 80% puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar sebesar 92,34%, telah melampaui target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 92% dengan capaian 100,37%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4) dimana jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki 80% Puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator yang melapor sebanyak 509 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia 99,02% dengan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki 80% Puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator sebanyak 470 Kabupaten/Kota.

Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar di Tahun 2024 yakni sebesar 100% yang dicapai oleh 24 (Dua Puluh Empat) Provinsi antara lain Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat. Namun, masih terdapat provinsi dengan capaian persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar di bawah target nasional yaitu Provinsi Papua Tengah, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Aceh. Rincian data persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar menurut provinsi tahun 2024 terdapat pada lampiran 9.b.

GAMBAR 2.28
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2025

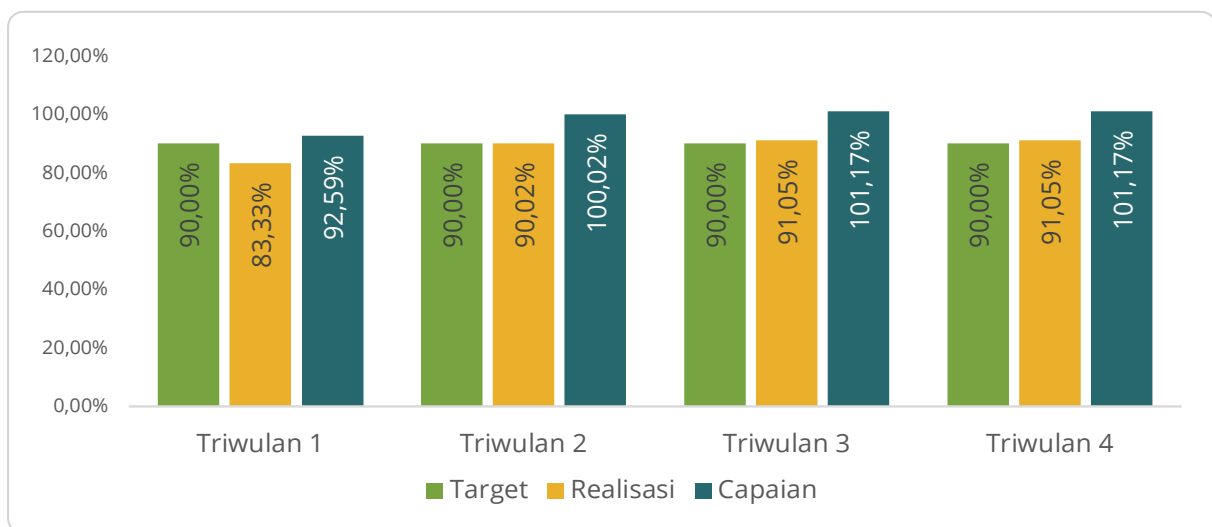
3. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Tercapainya Indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar menunjukkan bahwa tujuan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer berhasil dicapai. Terjaminnya Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan Kesehatan dalam hal ini kegiatan pendukung yang dilakukan adalah

Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian pada Penyakit TBC dan Penyediaan Materi Edukasi Penggunaan Obat Rasional. Adapun definisi operasional dari Indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Puskesmas yang memiliki SOP pengelolaan obat, pengkajian dan pelayanan resep dan Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang terdokumentasi.

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 91,05%, melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu 90% dengan capaian sebesar 101,17%.

GAMBAR 2.29
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

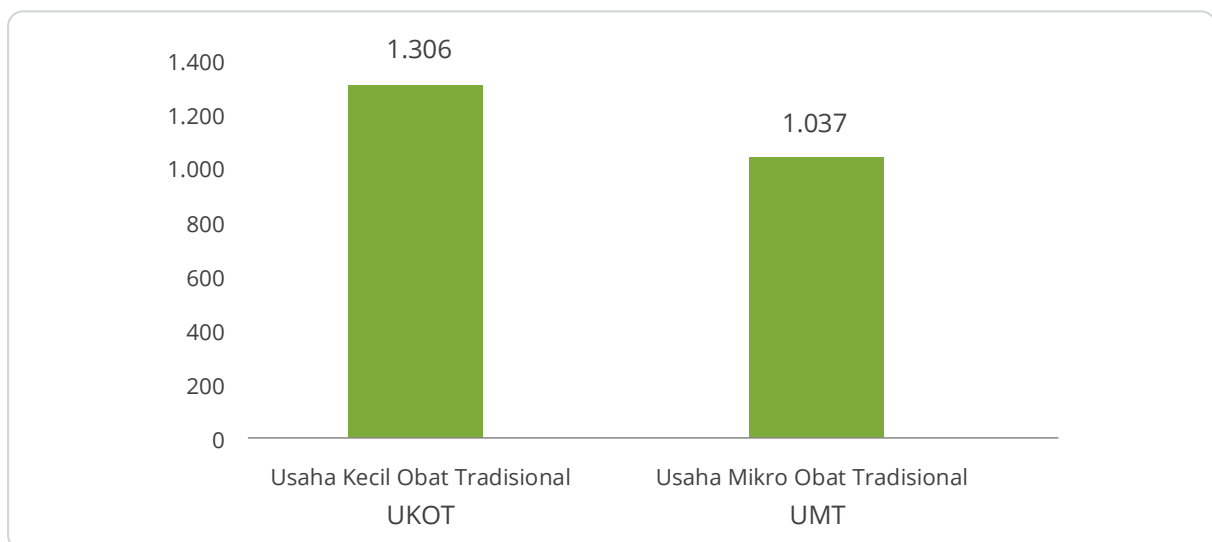
Cakupan sarana produksi dan distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi dan distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi dan distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, dan Distributor Alat Kesehatan (DAK).

Jika ditelaah, sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa yakni sebesar 75,9%. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan

untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

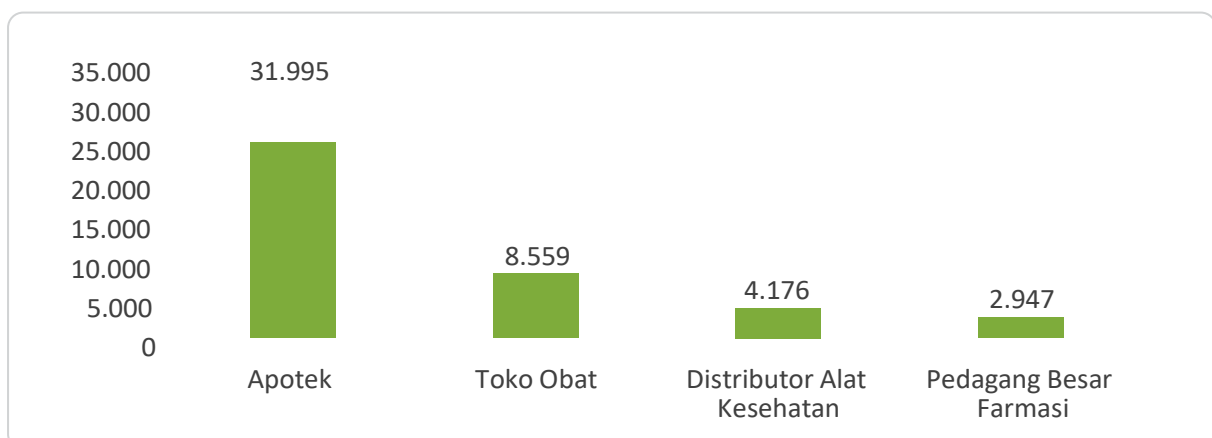
Pada tahun 2023 terdapat 31.995 apotek, 8.559 toko obat, 3.594 Distributor Alat Kesehatan, 2.930 Pedagang Besar Farmasi, serta 2.343 sarana UKOT/UMOT. Secara keseluruhan, Provinsi dengan jumlah sarana produksi dan distribusi terbanyak adalah Jawa Barat. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Gambar 2.29 berikut menyajikan jumlah sarana produksi dan Gambar 2.30 menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2023 serta rincian jumlah sarana produksi (Lampiran 9.d) dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan menurut provinsi tahun 2023 pada Lampiran 9.e.

GAMBAR 2.30
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2023



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023Keterangan: *) Data tahun 2023

GAMBAR 2.31
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2023



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023Keterangan: *) Data tahun 2023

G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2018, Posyandu termasuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan.

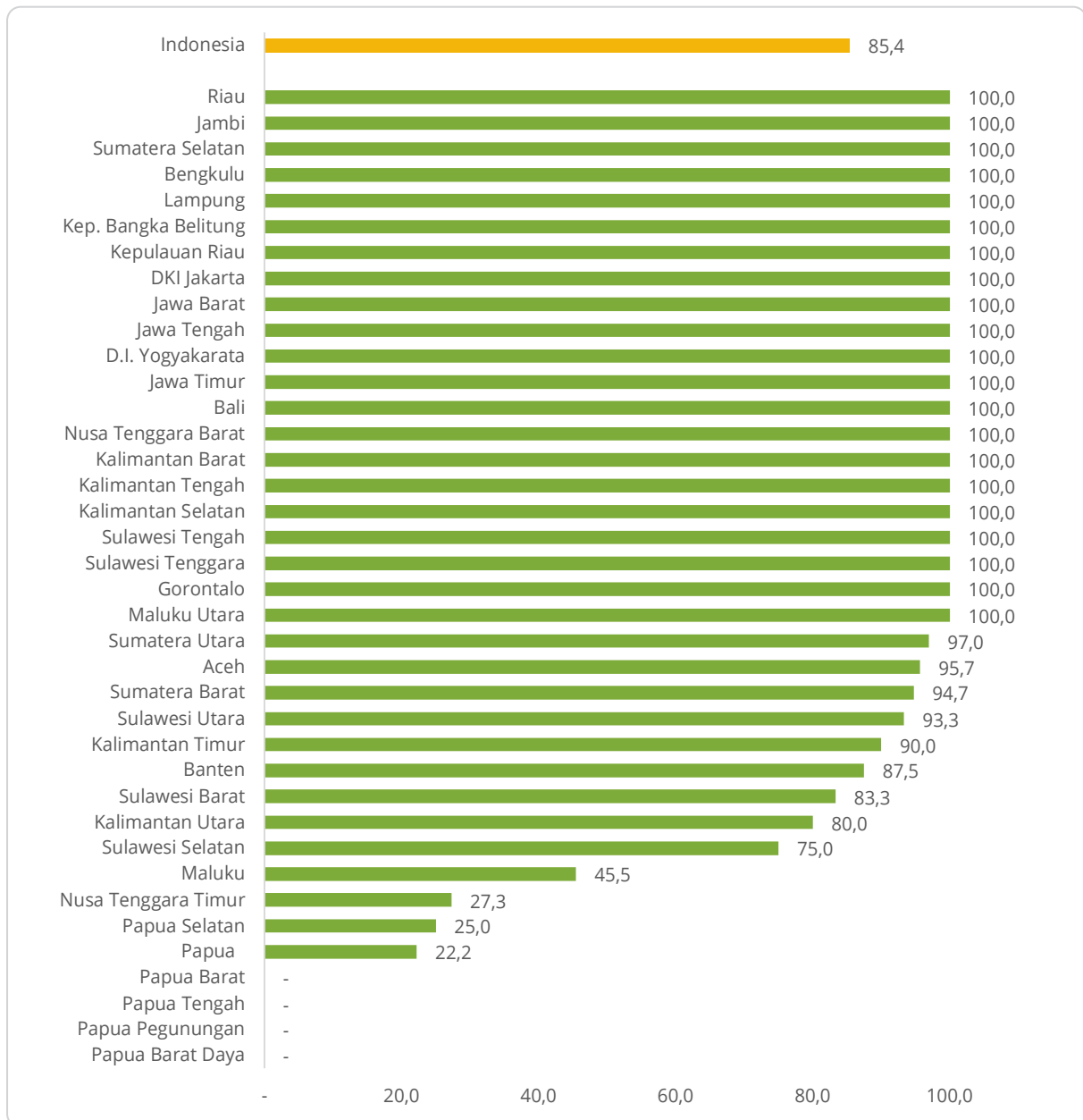
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan dengan komitmen melaksanakan transformasi layanan primer, melaksanakan peningkatan kapasitas posyandu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap edukasi, skrining dan pelayanan promotif preventif bagi sasaran siklus hidup. Posyandu di garda depan, terdekat dengan masyarakat, sangat strategis mendukung Puskesmas untuk memperkuat upaya promosi kesehatan serta pencegahan penyakit bagi sasaran siklus kehidupan, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat. Sehubungan dengan hal itu Posyandu yang selama ini berjalan masih bersifat programatik seperti Posyandu KIA, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Posbindu PTM dengan adanya transformasi layanan kesehatan primer mengintegrasikan dalam satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan “Posyandu”. Posyandu menyediakan layanan untuk seluruh sasaran siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia dewasa dan lansia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Diharapkan Posyandu dalam kerangka LKD/K dilengkapi dengan tempat permanen, pengurus dan kader yang memadai, anggaran operasional memadai serta prasarana kesehatan yang memenuhi standar, peralatan kesehatan.

Kementerian Kesehatan melaksanakan pembinaan teknis bagi posyandu dengan mengacu sasaran Permenkes 13 Tahun 2022 Renstra Kementerian Kesehatan yaitu indikator Tahun 2024 ditargetkan 85% persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Adapun definisi operasional Posyandu aktif adalah jika memenuhi kriteria:

1. Melakukan kegiatan rutin Posyandu (pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/remaja/ usia produktif/lansia) 1 kali dalam satu sebulan minimal 8 kali/tahun;
2. Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau remaja;
3. Memiliki minimal 5 orang kader.

Kabupaten/Kota dengan minimal 80 % Posyandu Aktif di Indonesia sudah memenuhi target (target = 85%) yaitu sebesar 85,4%. Bila dilihat berdasarkan provinsi, sudah 71,05 provinsi yang sudah memenuhi target dengan minimal 80 % Posyandu Aktif seperti tampak pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.32
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

BAB III. SDM KESEHATAN



BAB III. SDM KESEHATAN

Kementerian Kesehatan telah merumuskan transformasi kesehatan terdiri dari enam pilar utama mencakup transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM Kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Di antara semua pilar tersebut, SDM Kesehatan memegang peran kunci dalam menggerakkan proses transformasi ini.

Sistem Kesehatan Nasional menggambarkan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai elemen vital yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterampilan hidup sehat bagi semua individu guna mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan terdiri dari; (a) Tenaga Medis; (b) Tenaga Kesehatan; dan (3) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi (termasuk dokter/dokter gigi spesialis dan subspesialis). Sedangkan tenaga kesehatan terdiri dari: a. tenaga psikologi klinis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kebidanan; d. tenaga kefarmasian; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. tenaga gizi; h. tenaga keterampilan fisik; i. tenaga keteknisian medis; j. tenaga teknik biomedika; k. tenaga kesehatan tradisional; dan l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pembahasan SDM kesehatan pada bab ini meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di puskesmas dan rumah sakit, registrasi tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta lulusan tenaga kesehatan.

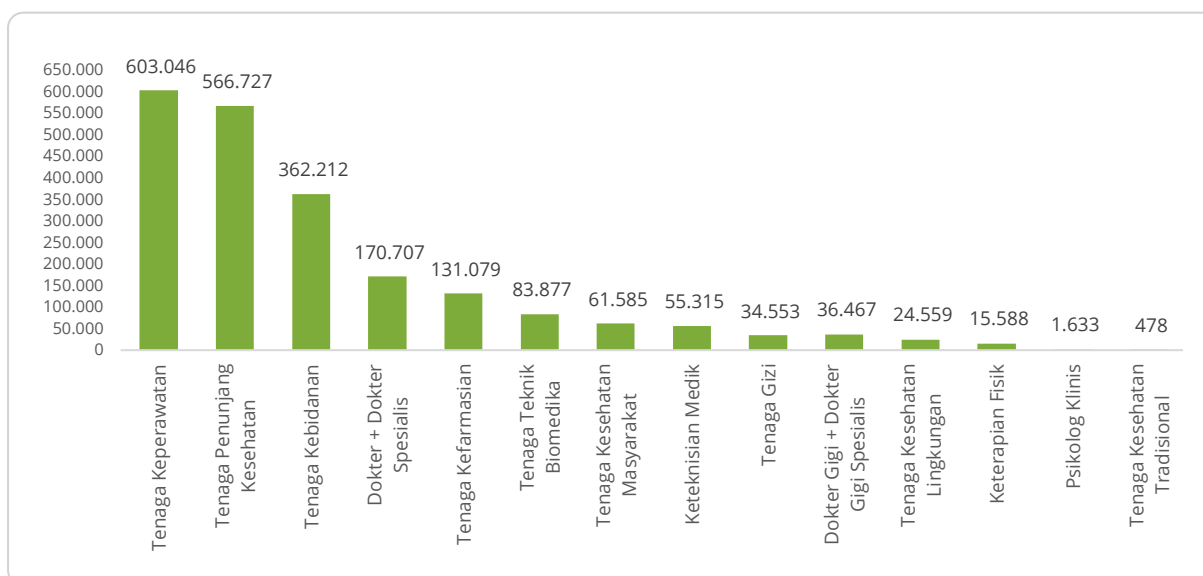
A. JUMLAH SDM KESEHATAN

Pengembangan dan pengelolaan SDM kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mendefinisikan SDM kesehatan sebagai seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. SDM kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan

SDM kesehatan dapat dilihat berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi. Jika dilihat menggunakan kedua pendekatan tersebut, jumlah SDM kesehatan di fasyankes di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 2.147.826 orang yang terdiri dari 207.171 tenaga medis (9,65%), 1.373.925 tenaga kesehatan (63,97%), dan 566.727 tenaga penunjang kesehatan (27,7%).

Dalam ruang lingkup tenaga kesehatan, tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan menempati proporsi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 45,77% dan 27,49% dari seluruh tenaga kesehatan.

GAMBAR 3.1
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024

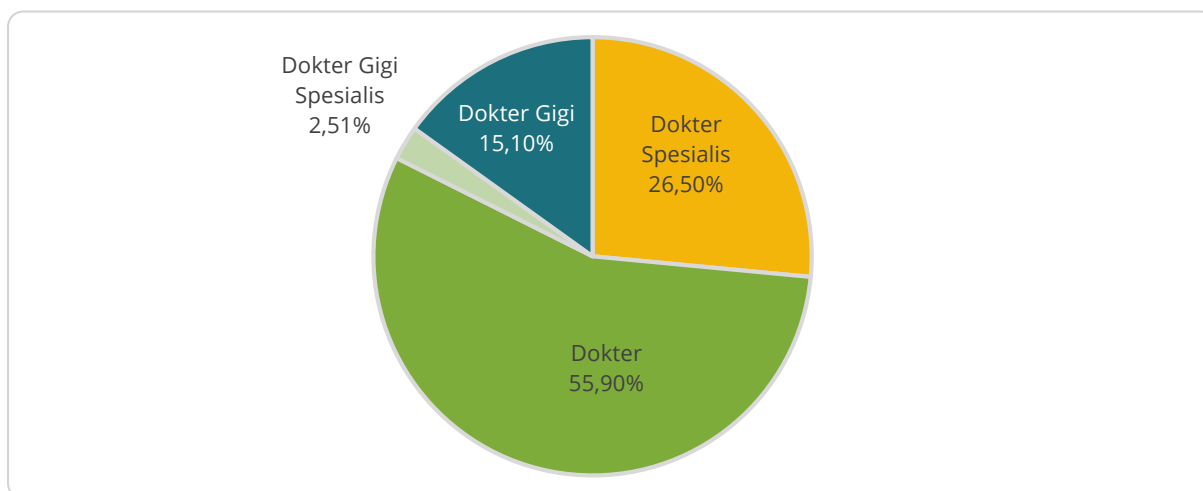


Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia sebanyak 207.174 orang atau 9,65% terhadap seluruh SDM kesehatan.

Dari seluruh tenaga medis, sebagian besar merupakan dokter yaitu sebesar 115.805 orang (55,90%). Proporsi tenaga medis dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

GAMBAR 3.2
PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

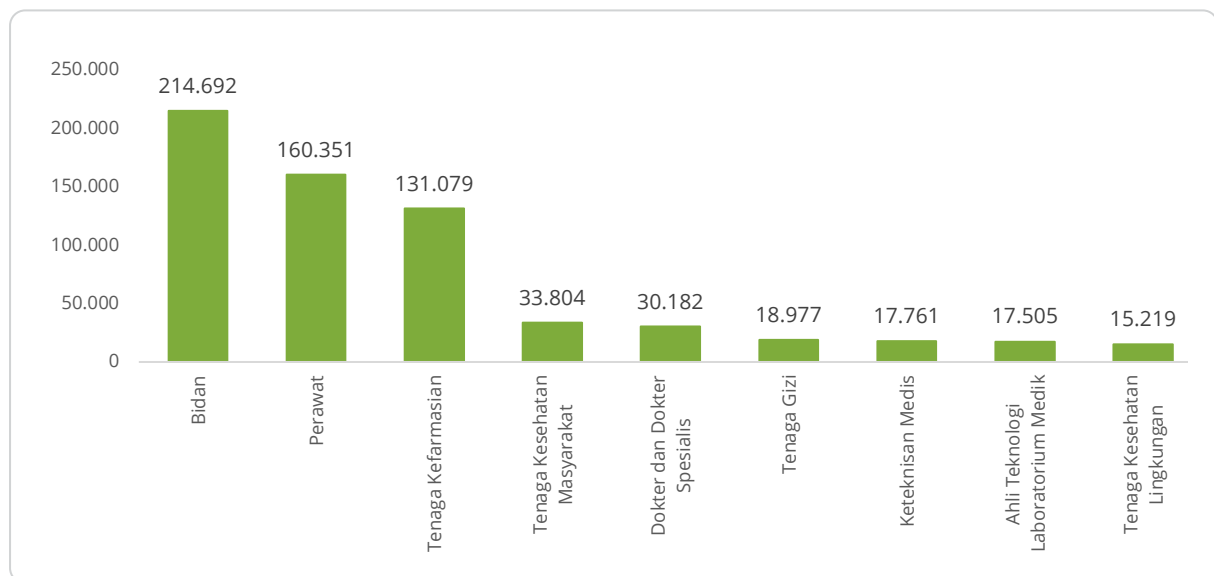
Sebaran tenaga medis masih menunjukkan ketimpangan antara wilayah Jawa-Bali dengan wilayah non Jawa-Bali. Sebanyak 60,67% dari total tenaga medis di Indonesia berada di wilayah Jawa-Bali. Sebagian besar dari tenaga medis tersebut berada di Provinsi Jawa Barat (31.627 orang), Jawa Timur (25.238 orang), dan DKI Jakarta (25.127 orang). Sedangkan provinsi dengan tenaga medis paling sedikit tersebar di Papua Pegunungan (262 orang), Papua Selatan (332 orang), dan Papua Barat Daya (442 orang).

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan penyelenggaraannya, puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Puskesmas setidaknya harus memiliki tenaga yang meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga non kesehatan. Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan lainnya meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.

GAMBAR 3.3
JUMLAH 9 TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024 jumlah 9 tenaga kesehatan di Indonesia yang bertugas di puskesmas sebanyak 530.338 orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) yang sebanyak 521.304 orang. Jumlah tenaga kesehatan tertinggi di puskesmas yaitu bidan sebesar 214.692 orang dan perawat sebesar 160.351 orang.

Selain tenaga kesehatan, puskesmas juga memerlukan tenaga penunjang/pendukung kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja. Jumlah tenaga penunjang/pendukung kesehatan di puskesmas di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 80.461 orang. Tenaga penunjang ini dapat merupakan tenaga kesehatan maupun non-kesehatan yang secara fungsi berperan sebagai pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen.

Terkait dengan tenaga non-kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur lebih jauh tentang hal ini. Regulasi ini mengatur bahwa penentuan jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan non-kesehatan di puskesmas dilakukan dengan mempertimbangkan analisis beban kerja, jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap

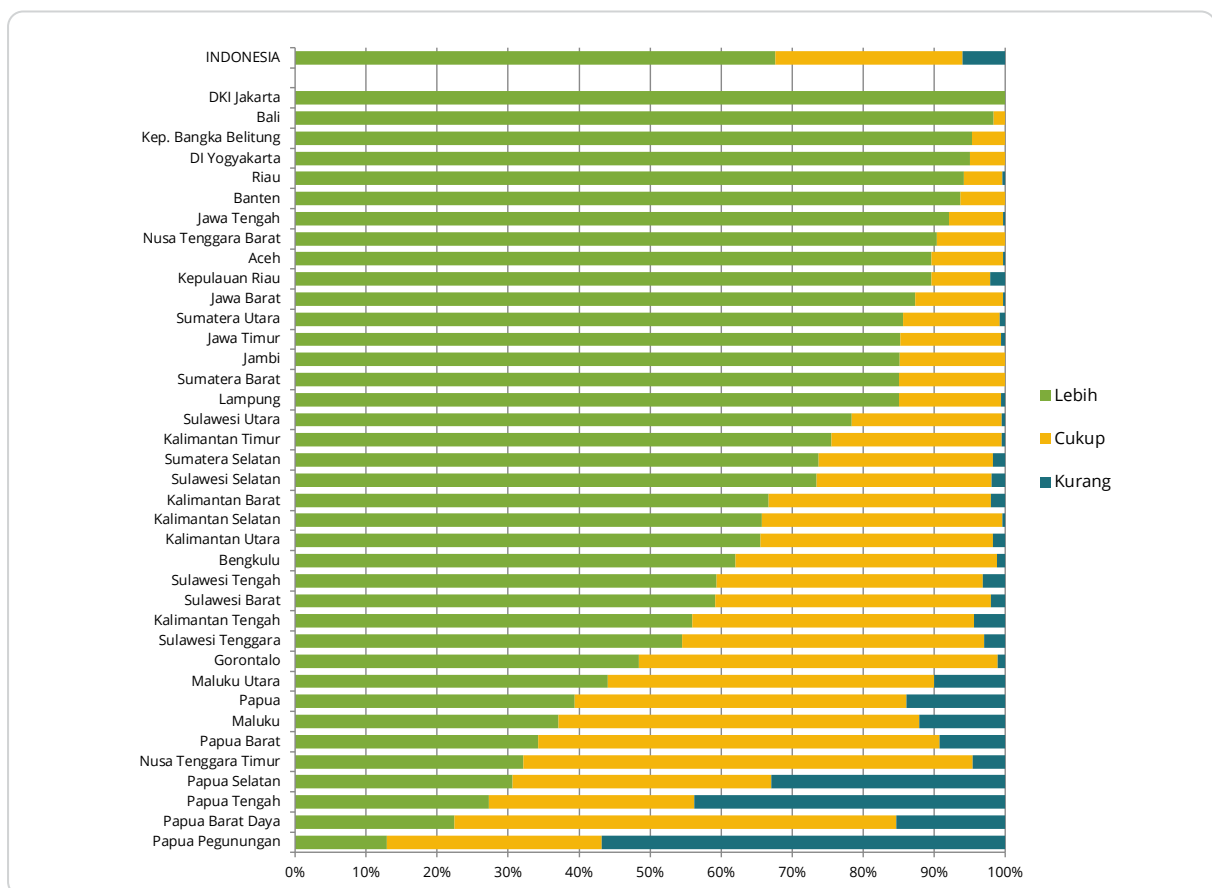
jumlah penduduk dan persebarannya, luas dan karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas dengan memberikan batasan minimal jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya. Kriteria kecukupan tenaga ini dibedakan untuk puskesmas rawat inap dan non-rawat inap. Pada Puskesmas non rawat inap, minimal satu orang dokter baik di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter baik pada kawasan perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pada tahun 2024 terdapat 5,99% puskesmas dengan status kekurangan dokter, di sisi lain terdapat sebanyak 67,63% puskesmas kelebihan dokter.

GAMBAR 3.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

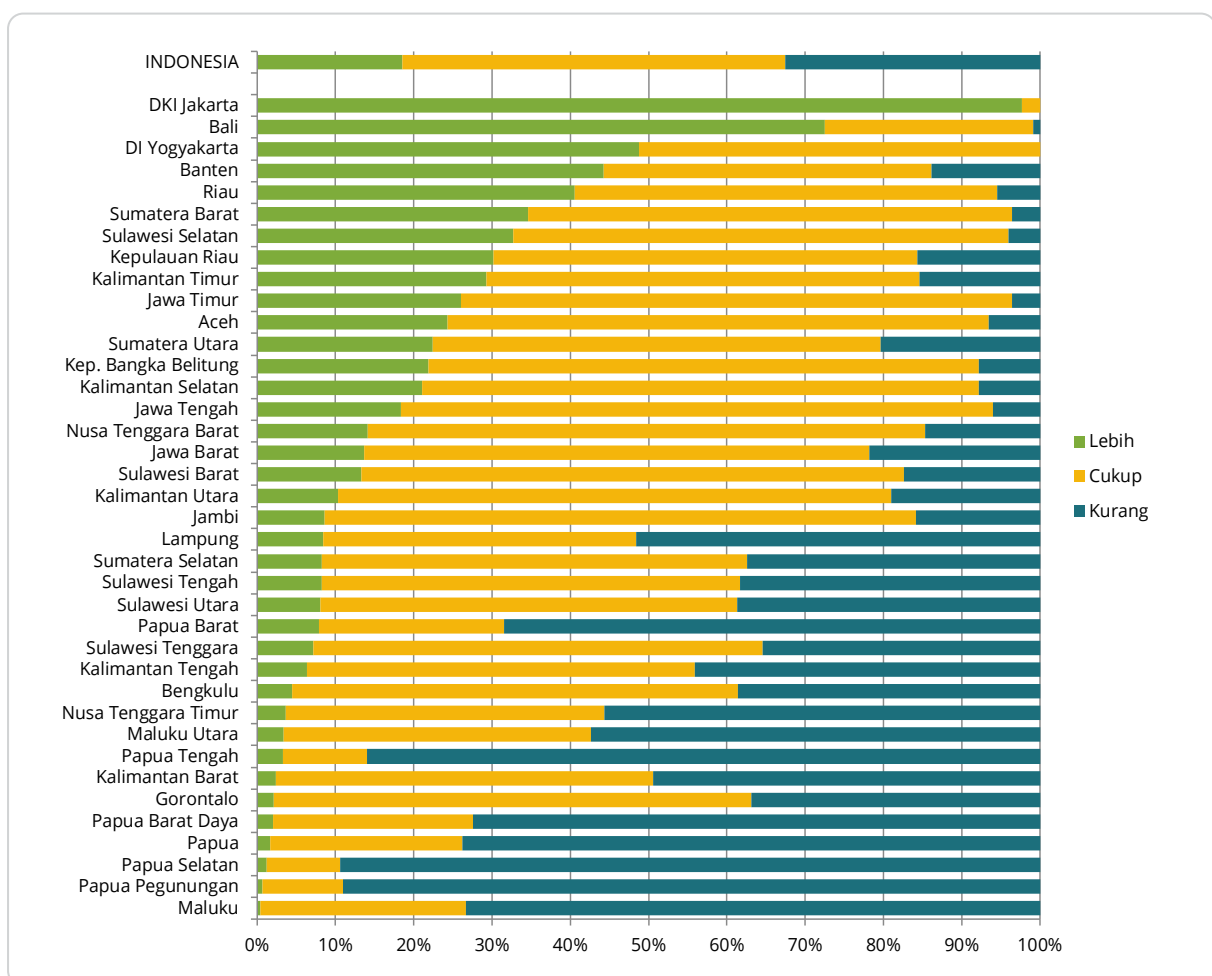
Pada gambaran persebaran provinsi di atas dapat diketahui bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kecukupan dokter puskesmas 100%, bahkan seluruh puskesmas di DKI Jakarta memiliki kelebihan dokter. Sedangkan empat provinsi di Pulau Papua memiliki puskesmas dengan kecukupan dokter paling rendah yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Standar kecukupan dokter gigi di puskesmas rawat inap dan non-rawat inap baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil adalah minimal satu orang.

Pada tahun 2024, terdapat 32,51% puskesmas kekurangan dokter gigi, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 28,9%. Sebanyak 67,49% puskesmas lainnya memiliki dokter gigi sesuai standar (cukup dan lebih).

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

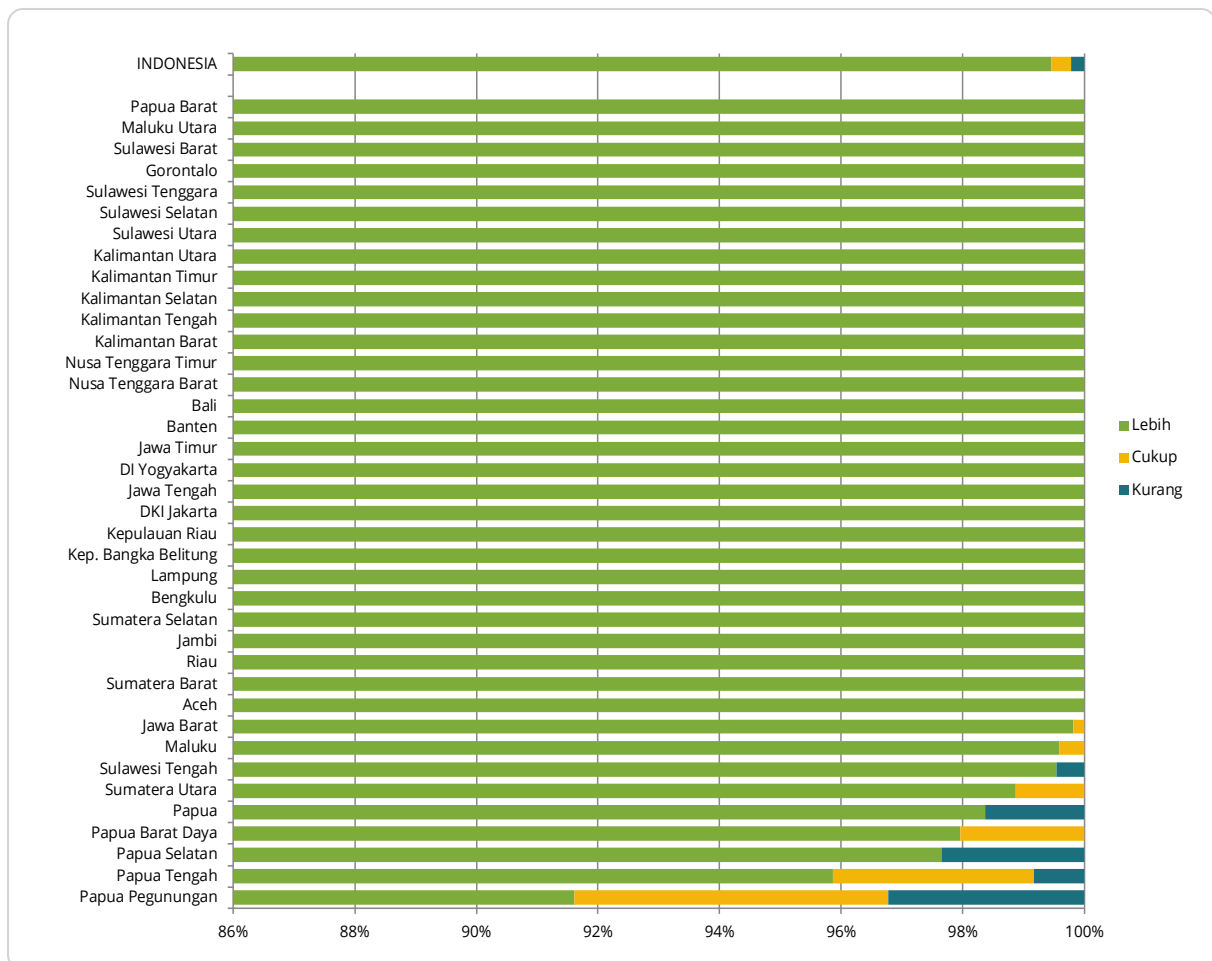
Sejalan dengan kecukupan dokter, Puskesmas di wilayah timur Indonesia memiliki persentase puskesmas dengan status dokter gigi kurang tertinggi. Dari 38 provinsi, 10 diantaranya lebih dari setengah puskesmas di wilayahnya memiliki kekurangan dokter gigi, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Lampung.

Provinsi dengan kecukupan puskesmas dengan dokter gigi sesuai standar tertinggi terdapat di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang masing-masing sebesar 100%. Gambaran tersebut semakin mengkonfirmasi adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara di wilayah yang Jawa-Bali dengan wilayah timur Indonesia.

c. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Standar kecukupan perawat di puskesmas mensyaratkan jumlah minimal yang lebih tinggi dibandingkan dokter dan dokter gigi, yaitu sebesar lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan delapan perawat pada puskesmas rawat inap. Pada tahun 2024 terdapat 0,22% puskesmas dengan status kekurangan perawat di Indonesia, menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 7,3%.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2024



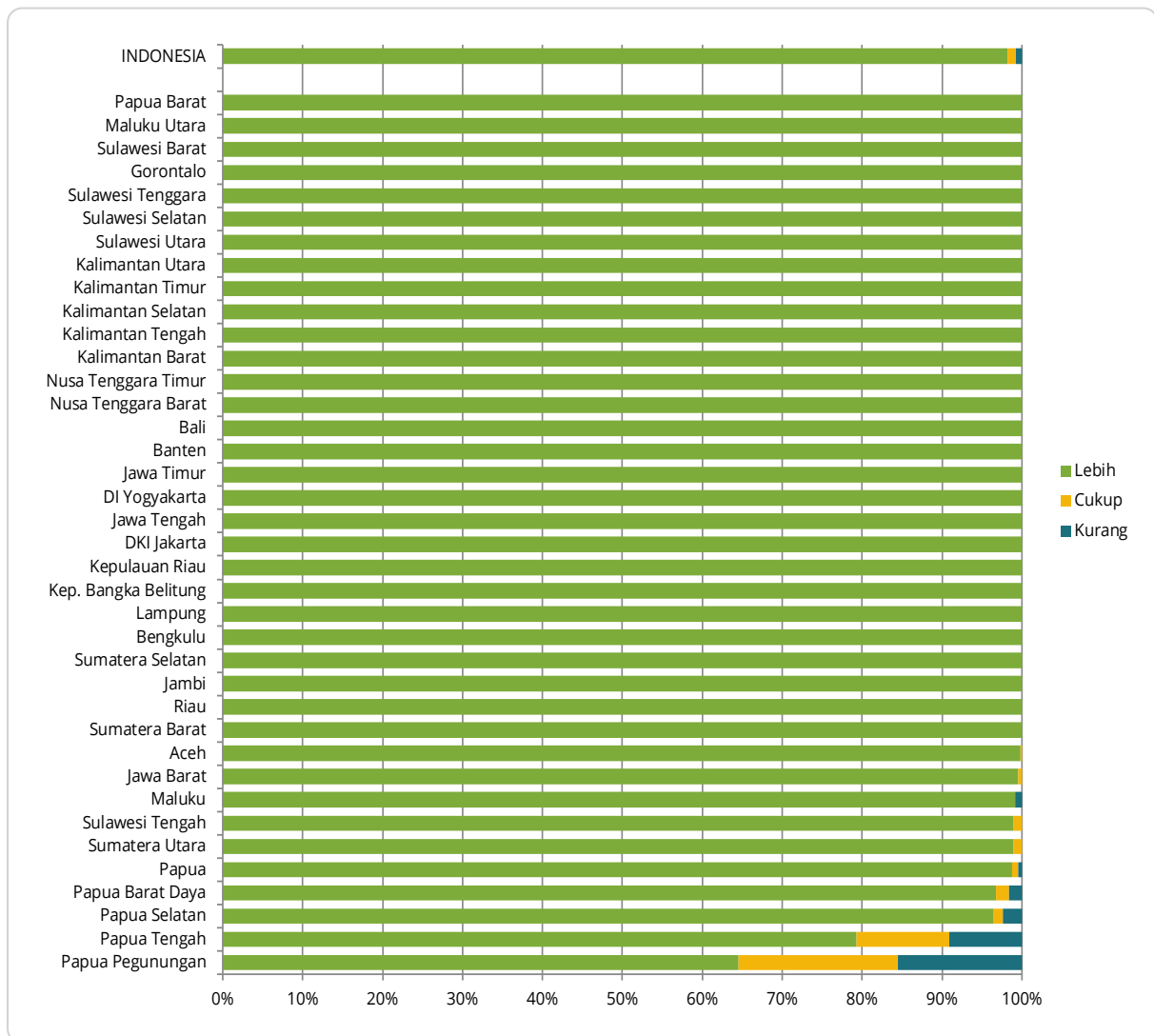
Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional, pada tahun 2024 sebagian besar puskesmas memiliki jumlah perawat sesuai standar (cukup dan lebih) yaitu sebesar 99,78%. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua merupakan provinsi dengan persentase puskesmas dengan kekurangan perawat tertinggi.

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Bidan juga termasuk salah satu tenaga kesehatan yang disyaratkan kecukupannya di puskesmas. Puskesmas dinilai memiliki jumlah bidan cukup jika sedikitnya memiliki empat orang untuk puskesmas non rawat inap, dan tujuh orang untuk puskesmas rawat inap. Jumlah minimal ini diterapkan untuk puskesmas di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

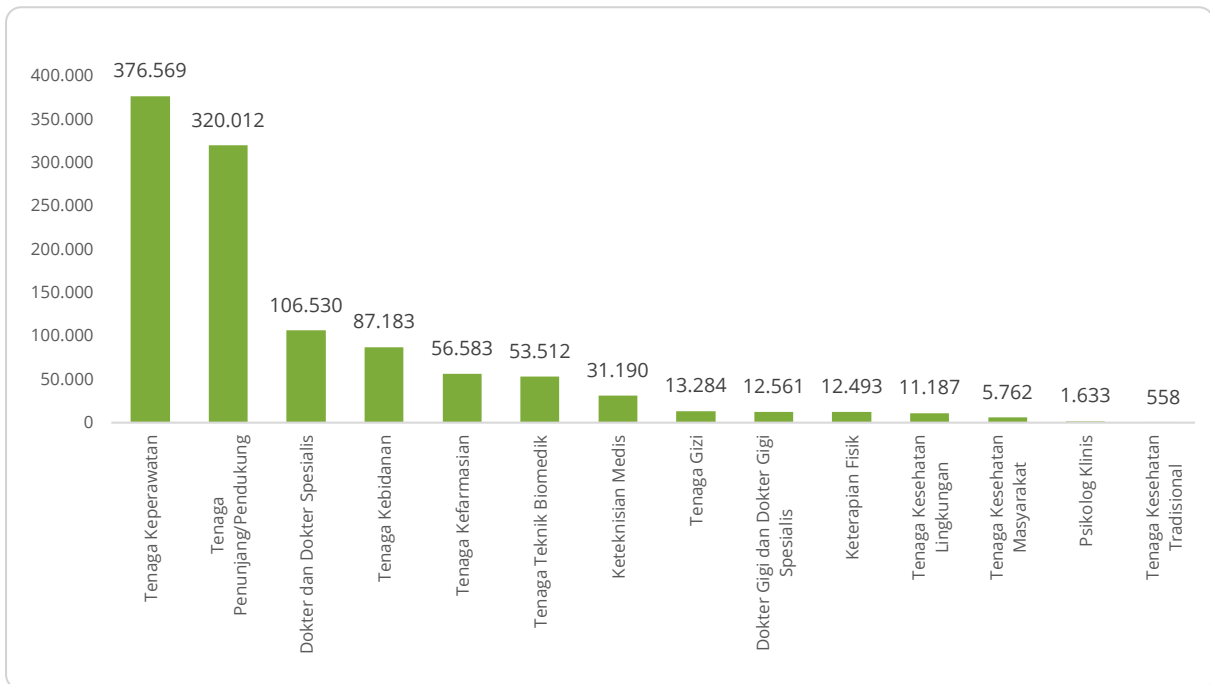
Secara nasional, pada tahun 2024 terdapat 99,22% puskesmas dengan jumlah bidan cukup+lebih dan 0,78% kekurangan bidan. Hanya 6 Provinsi yang belum memiliki 100% puskesmas dengan jumlah bidan sesuai standar, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku dan DI. Yogyakarta

Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan dapat dilihat di Lampiran 11.e.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Selain pelayanan kesehatan dasar yang utamanya diselenggarakan oleh puskesmas, di Indonesia juga terdapat pelayanan kesehatan rujukan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2024



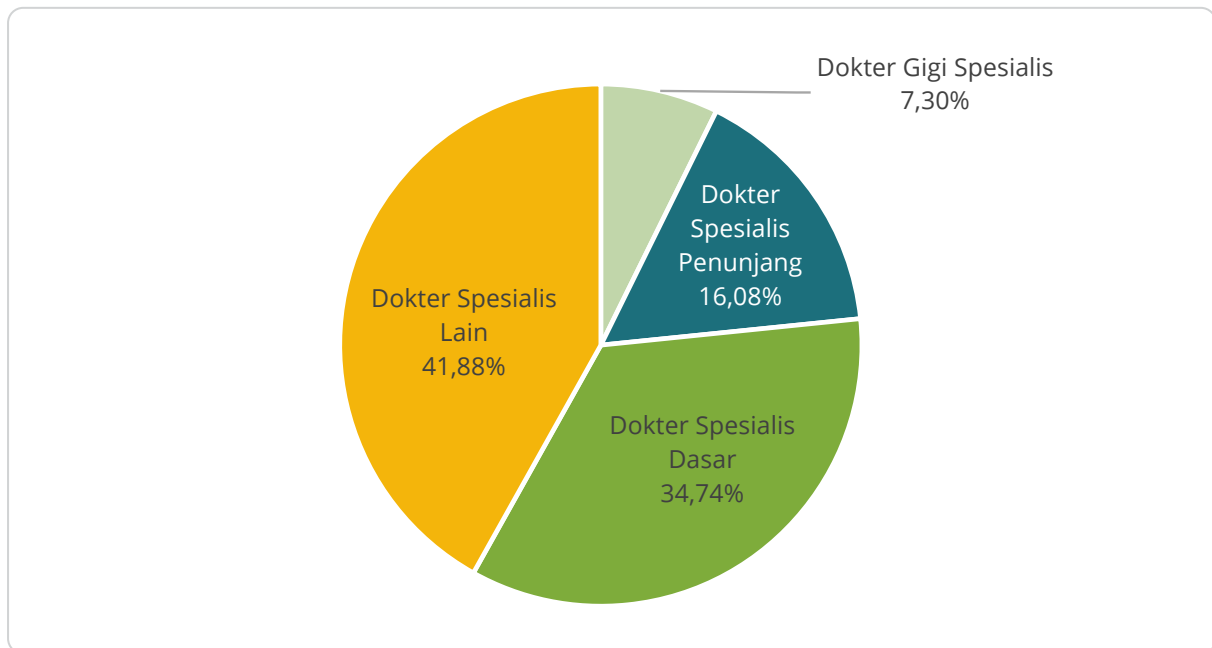
Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

SDM kesehatan dengan jumlah terbanyak di seluruh rumah sakit pada tahun 2024 adalah perawat sebanyak 376.569 orang. Sama halnya dengan pola distribusi yang ada di puskesmas, jumlah perawat memiliki porsi jauh lebih besar dibandingkan jenis SDM kesehatan lainnya. Secara umum, jumlah SDM Kesehatan tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, rumah sakit didukung dengan keberadaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dokter spesialis yang disajikan pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024 dikelompokkan menjadi dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter gigi spesialis, dan spesialis lain.

Dokter spesialis dasar terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah. Spesialis penunjang terdiri dari spesialis radiologi, spesialis anestesi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi, dan spesialis rehabilitasi medik.

GAMBAR 3.9
PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Terdapat sebanyak 56.769 orang dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 51.201 orang. Sebagian besar tenaga ini merupakan dokter spesialis dasar sebanyak 19.719 orang atau 34,74% dari total dokter spesialis di rumah sakit.

Sama seperti permasalahan distribusi tenaga kesehatan lainnya, jumlah dokter spesialis juga menunjukkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur. Sebagian besar dokter spesialis yang melakukan pelayanan di rumah sakit terkonsentrasi di Pulau Jawa Bali (65,88%) dan Sumatera (18,21%). Sedangkan 15,91% lainnya tersebar di pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

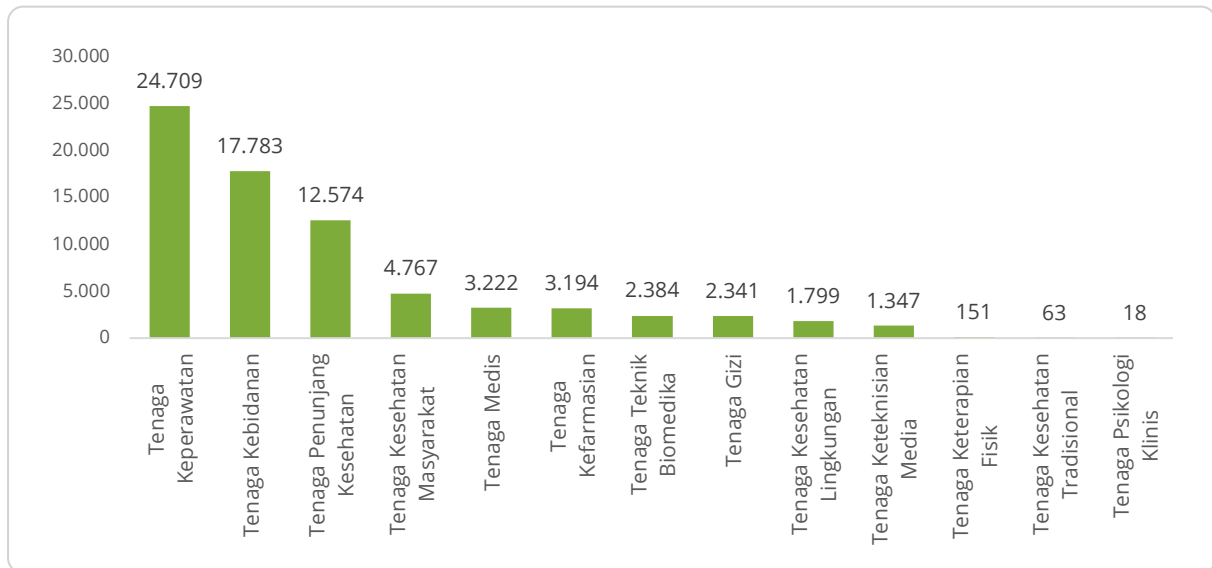
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Ketimpangan pembangunan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia, termasuk pada sektor kesehatan. Permasalahan ini di antaranya dapat dilihat dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar wilayah di Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menetapkan 62 kabupaten tertinggal yang tersebar di 11 provinsi (karena pemekaran wilayah maka menjadi 15 provinsi pada tahun 2023). Dalam sektor kesehatan, pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

Jenis tenaga kesehatan terbanyak yang berada di daerah tertinggal adalah tenaga keperawatan sebanyak 24.709, tenaga kebidanan sebanyak 17.783, dan tenaga penunjang kesehatan sebanyak 12.574. Sebaliknya, jenis tenaga kesehatan dengan jumlah terendah yaitu tenaga psikologi klinis sebesar 18, tenaga kesehatan tradisional sebesar 63, dan tenaga keterampilan fisik sebesar 151 orang.

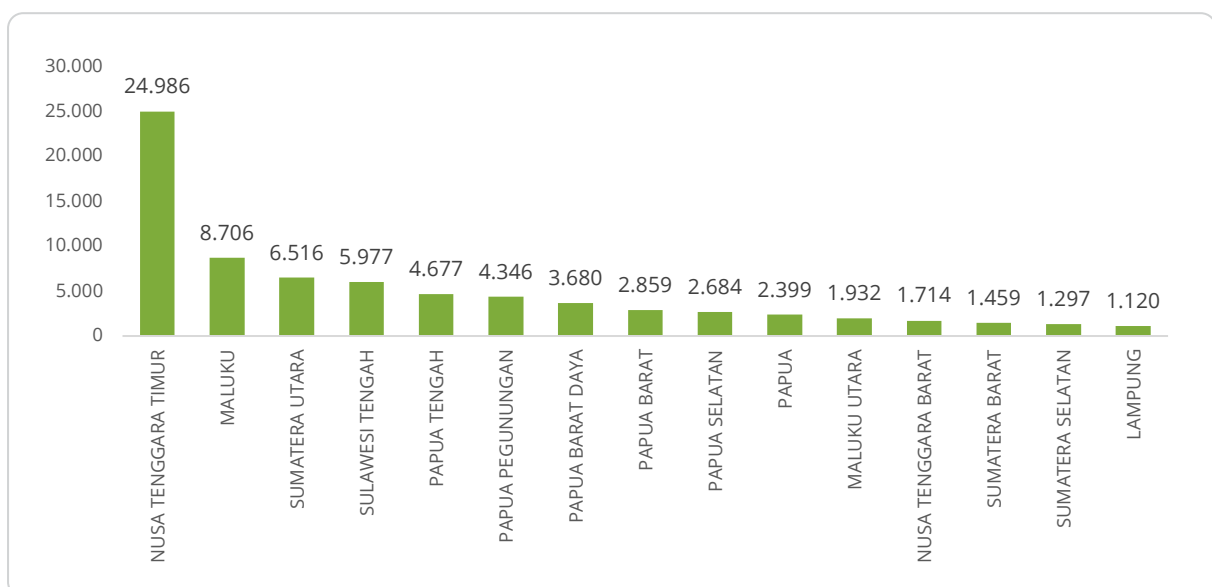
GAMBAR 3.10
DISTRIBUSI JUMLAH SDM KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2024



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan wilayah, sebagian besar SDM kesehatan di di daerah tertinggal tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sumatera Utara.

GAMBAR 3.11
SEBARAN JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

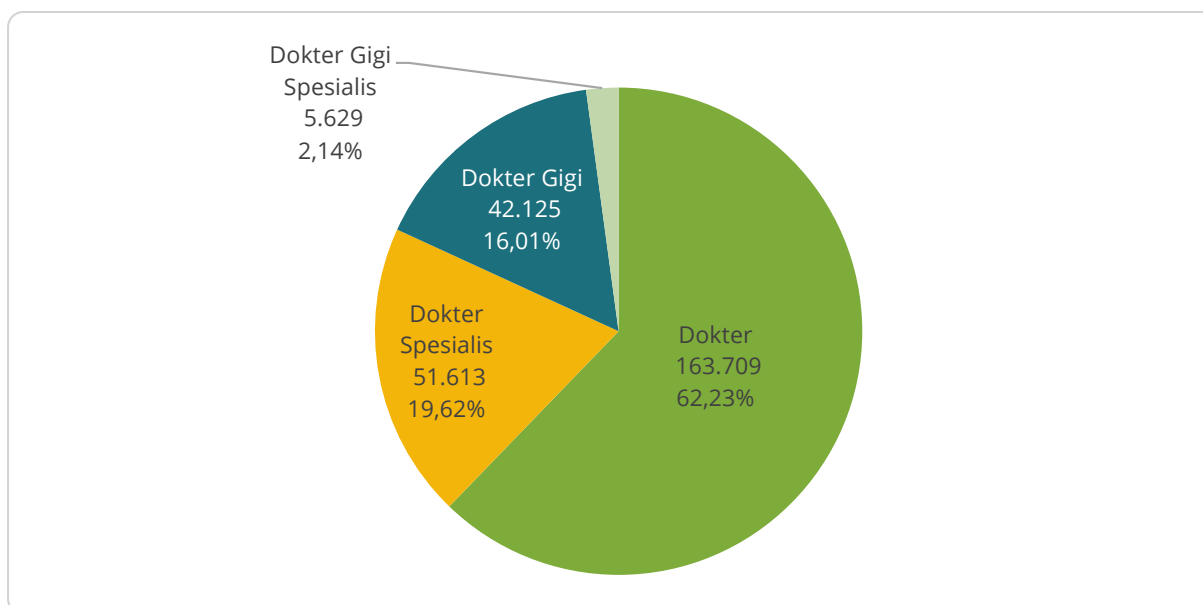
Sebaran SDM kesehatan di daerah tertinggal sejalan dengan banyaknya jumlah kabupaten tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku memiliki jumlah kabupaten tertinggal terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.

B. REGISTRASI SDM KESEHATAN

Selain metode pencatatan dan pelaporan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota, sistem pengelolaan data data SDM kesehatan juga bersumber dari proses registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap SDM kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. SDM kesehatan yang telah menyelesaikan proses registrasi akan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh konsil tenaga kesehatan.

Proses registrasi tidak hanya penting bagi pendataan SDM kesehatan, namun juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan jasa tenaga medis dan tenaga kesehatan. Registrasi tenaga medis yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dikelola oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

GAMBAR 3.12
JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2024

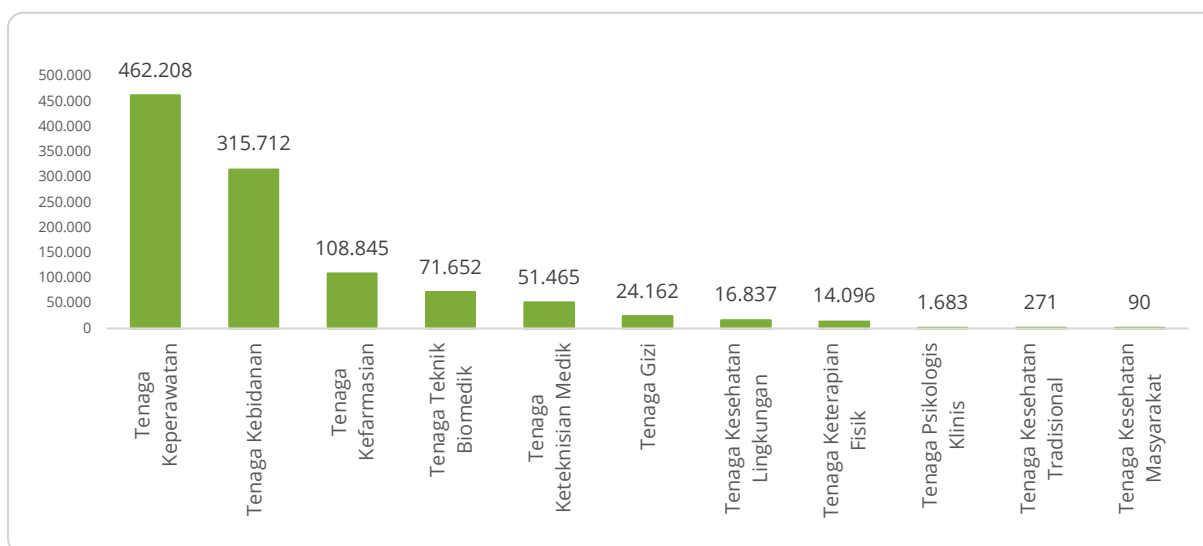


Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2024

Jumlah tenaga medis yang memiliki STR sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 263.076 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 262.679 orang. Dokter merupakan tenaga medis dengan kepemilikan STR terbanyak yaitu sebesar 62,23%.

Registrasi tenaga kesehatan dikelola oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang melingkupi 30 jenis tenaga kesehatan. Sama halnya dengan tenaga medis, tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Izin tersebut diperoleh dengan adanya kepemilikan STR yang diterbitkan oleh KTKI.

GAMBAR 3.13
JUMLAH PENERBITAN STR MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2024

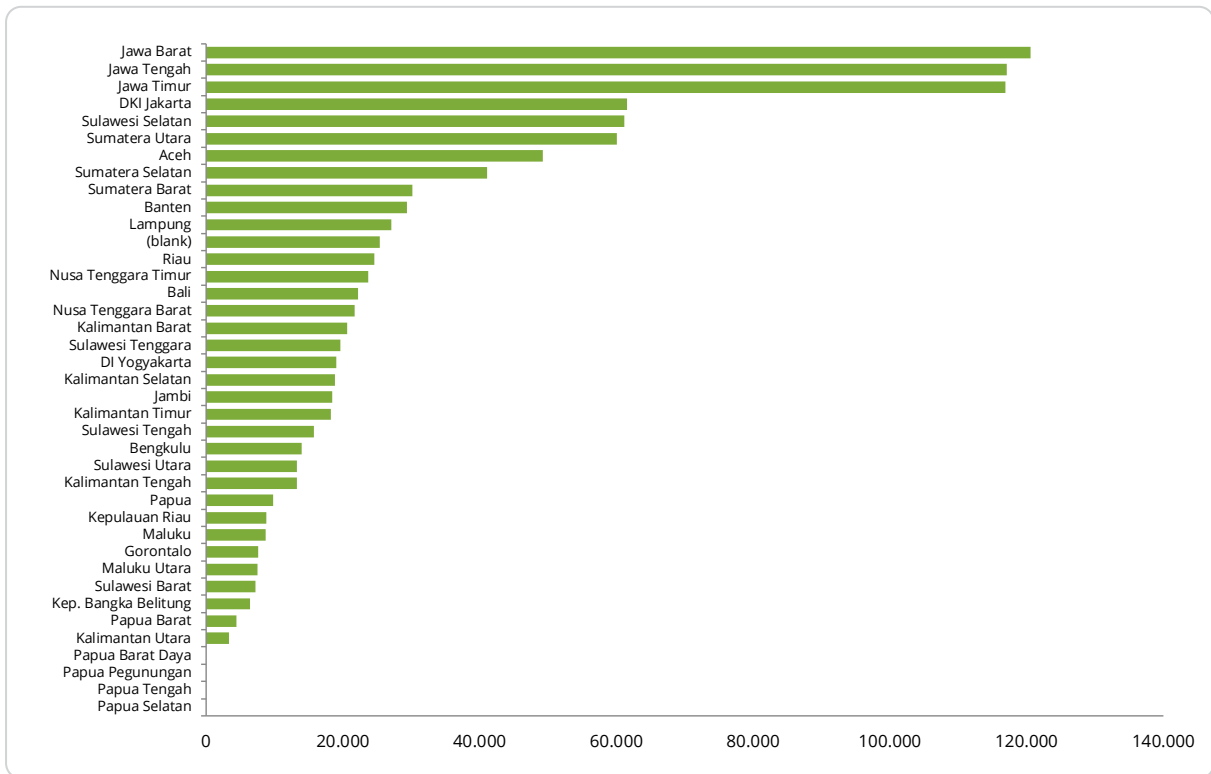


Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2025

Tenaga Keperawatan dan tenaga kebidanan menjadi tenaga dengan jumlah penerbitan STR terbanyak, yaitu masing-masing sebanyak 462.208 dan 315.712 orang.

Berdasarkan sebaran provinsi, penerbitan STR terbanyak dilaporkan di provinsi Jawa Barat sebesar 120.618, Jawa Tengah sebesar 117.137, Jawa Timur sebesar 116.939. Banyaknya registrasi di provinsi tersebut sejalan dengan fakta bahwa jumlah sarana pendidikan ilmu kesehatan dan lulusannya banyak terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali.

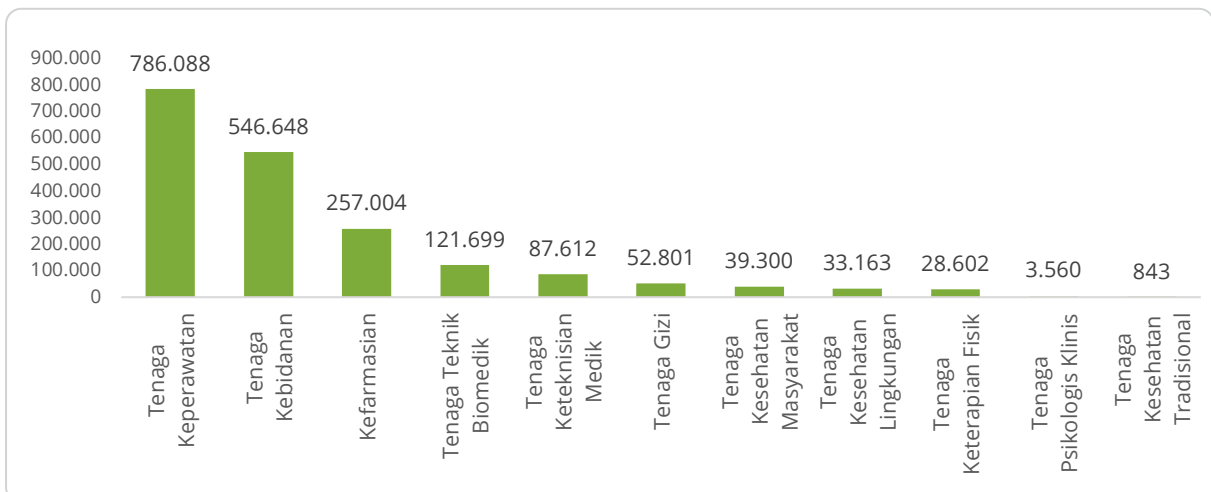
GAMBAR 3.14
JUMLAH PENERBITAN STR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2025

Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 1.957.320 orang. Tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan yang paling banyak memiliki STR.

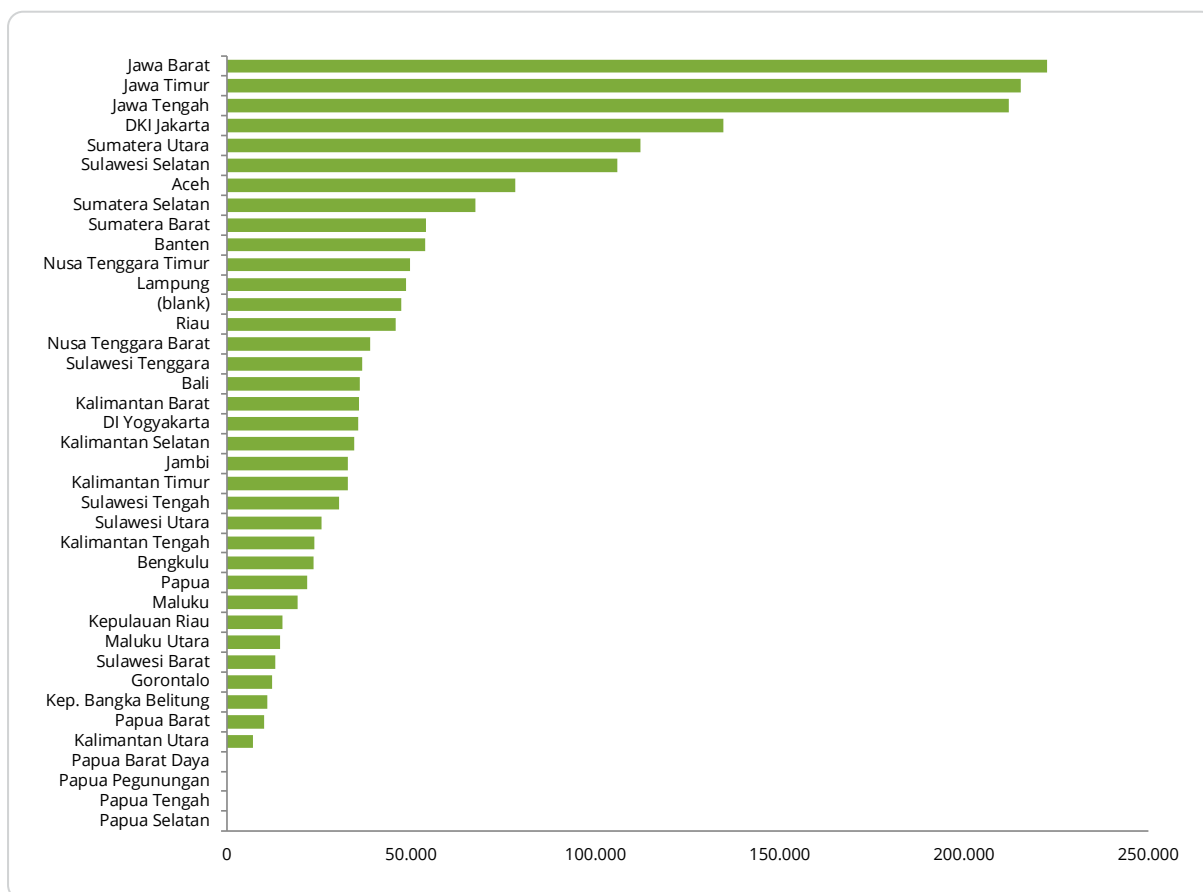
GAMBAR 3.15
JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2024



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2025

Bila dilihat kepemilikan STR per provinsi, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang memiliki STR paling banyak seperti tampak pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 3.16
JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR PER PROVINSI
AKTIF PER 31 DESEMBER 2024



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2025

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan upaya pemenuhan melalui Program Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di puskesmas, Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Dokter dan Dokter Gigi Internship, serta Pendayagunaan Dokter Residen.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan dengan program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015. Namun mulai tahun 2024, program Nusantara Sehat berganti nama menjadi penugasan khusus.

1. Penugasan Khusus Tenaga Residen

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di

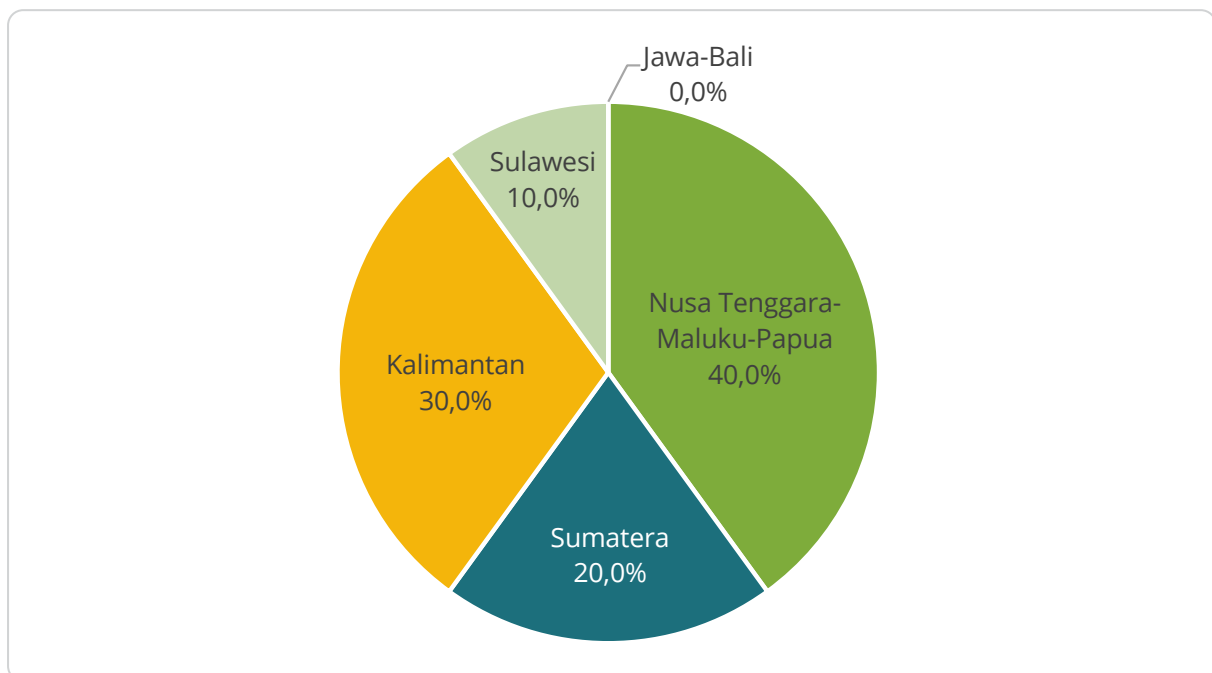
kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen.

Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior (pembiayaan pendidikan secara mandiri) dan residen pasca jenjang I (pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan). Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan, sedangkan residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Pada tahun 2024, jumlah dokter spesialis dalam penugasan khusus sebagai residen di Indonesia adalah 10 orang. Tren jumlah penugasan khusus residen selama 3 tahun terakhir cenderung menurun yaitu 106 orang pada tahun 2022 turun menjadi 23 orang pada tahun 2022 dan kemudian pada tahun 2023 berkurang menjadi 10 orang. Hal ini disebabkan oleh sebagian lokus penugasan residen sudah terisi oleh tenaga dokter spesialis dari program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Program penugasan khusus residen masih berlanjut hingga tahun 2024.

Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar pada tahun 2024 adalah regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 40,0%, diikuti oleh regional Kalimantan sebesar 30,0%, dan Sumatera sebesar 20,0%. Residen dokter spesialis terbanyak terdapat di Provinsi Maluku (3 orang). Sebanyak 32 provinsi tidak terdapat residen dokter spesialis pada tahun 2024.

GAMBAR 3.17
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH
PADA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

2. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat,

fungsi program Nusantara Sehat adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, program penugasan khusus ini dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023, istilah Penugasan Khusus Nusantara Sehat berubah menjadi Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

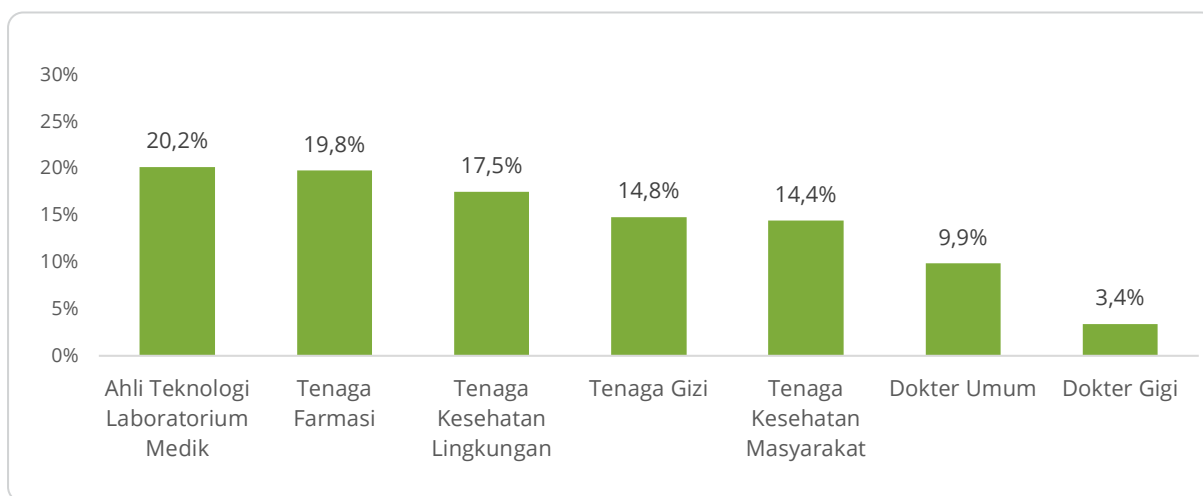
a. Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim

Penugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim akan ditempatkan di Puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masa tugas selama 2 tahun. Tim ini minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan dari sembilan jenis tenaga di Puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penempatan Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 26 batch. Batch I-II dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penempatan di 120 Puskesmas. Batch III-V dilaksanakan pada tahun 2016, dengan penempatan di 131 Puskesmas. Batch VI-VIII dilaksanakan pada tahun 2017 dengan penempatan di 188 Puskesmas. Batch IX-XI dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penempatan di 156 Puskesmas. Batch XII-XIV dilaksanakan pada tahun 2019 dengan penempatan di 173 Puskesmas. Batch XV-XVI dilaksanakan tahun 2020 dengan penempatan tim yang masih aktif pada 32 Puskesmas, 22 kabupaten/kota, dan 11 provinsi. Batch XVII-XIX dilaksanakan di tahun 2021 dengan penempatan di 104 Puskesmas, 52 kabupaten/kota, dan 17 provinsi. Batch XX-XXIII dilaksanakan di tahun 2022 dengan penempatan di 136 Puskesmas, 59 kabupaten/kota, dan 20 provinsi. Batch XXIV-XXVI di tahun 2023 sejumlah 313 orang di 73 puskesmas, 50 kabupaten/kota, dan 20 provinsi. Batch XXVII-XXIX di tahun 2024 sejumlah 263 orang di 76 puskesmas, 41 kabupaten/kota, dan 18 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim dapat dilihat di Lampiran 11.j.

Jumlah tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lingkungan yang ditempatkan di tahun 2024 sebagai berikut, ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 53 orang (20,2%), tenaga farmasi sebanyak 52 orang (19,8%), tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 46 orang (17,5%), dan tenaga gizi sebanyak 39 orang (14,8%). Jenis tenaga dengan penempatan paling sedikit adalah dokter gigi sebanyak 9 orang (3,4%). Provinsi dengan penempatan terbanyak adalah Papua Barat Daya sebanyak 45 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebanyak 3 orang.

GAMBAR 3.18
PENEMPATAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TIM
TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

b. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu

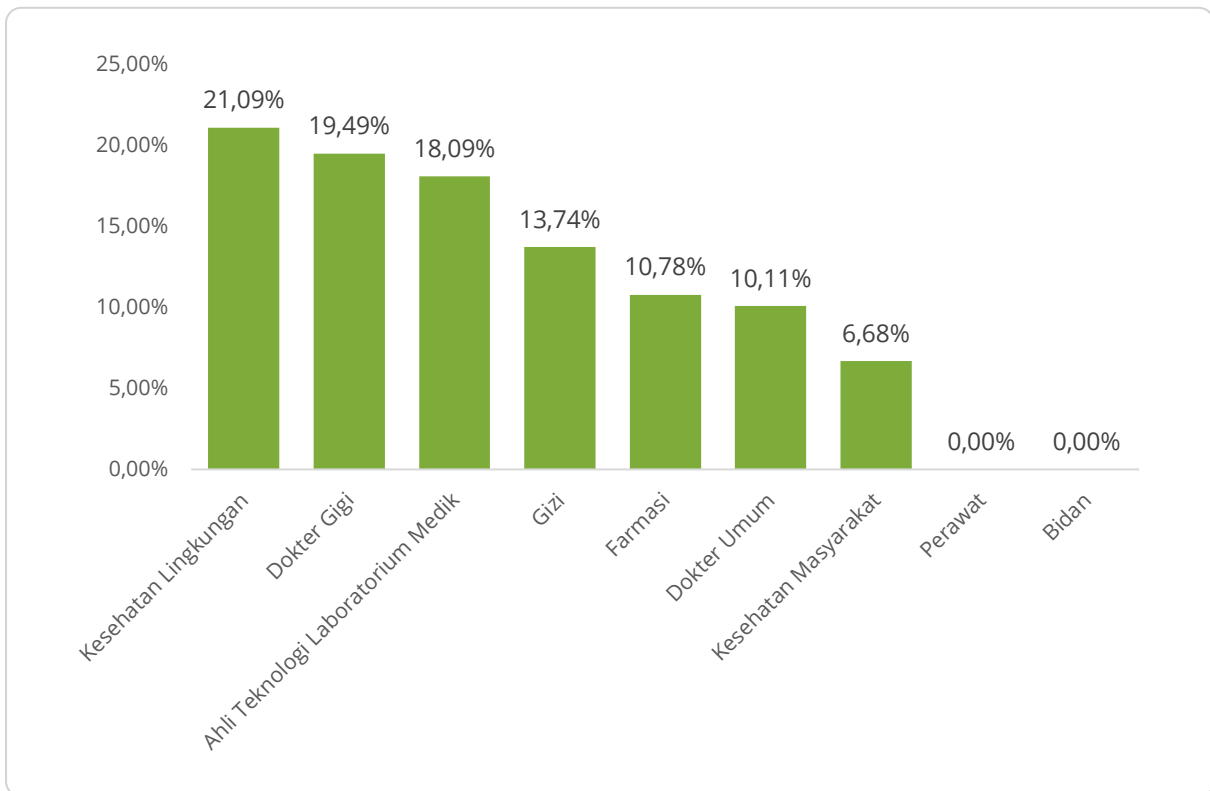
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dilakukan secara perorangan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu akan ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 2 tahun dengan evaluasi pada 1 tahun pertama penugasan.

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu sampai dengan tahun 2024 sudah dilakukan sebanyak 50 batch, dengan penempatan di 341 kabupaten/kota dan 35 provinsi. Pada tahun 2024 penempatannya tersebar pada 1570 Puskesmas di 268 kabupaten/kota dan 31 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu berdasarkan provinsi dapat dilihat di Lampiran 11.j.1.

Jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan yang paling banyak ditempatkan pada tahun 2024 adalah tenaga kesehatan lingkungan sebesar 436 orang (21,09%) dan dokter gigi sebesar 403 orang (19,50%). Kemudian untuk tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 138 orang (6,67%). Pada tahun 2024 tidak ada penempatan tenaga perawat dan bidan.

Provinsi dengan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu terbanyak pada tahun 2024 yaitu di Sumatera utara sebanyak 284 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Jawa Barat yaitu sebanyak 3 orang. Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat tidak mendapatkan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu pada tahun 2024.

GAMBAR 3.19
PENEMPATAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN INDIVIDU TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Program Internsip Dokter

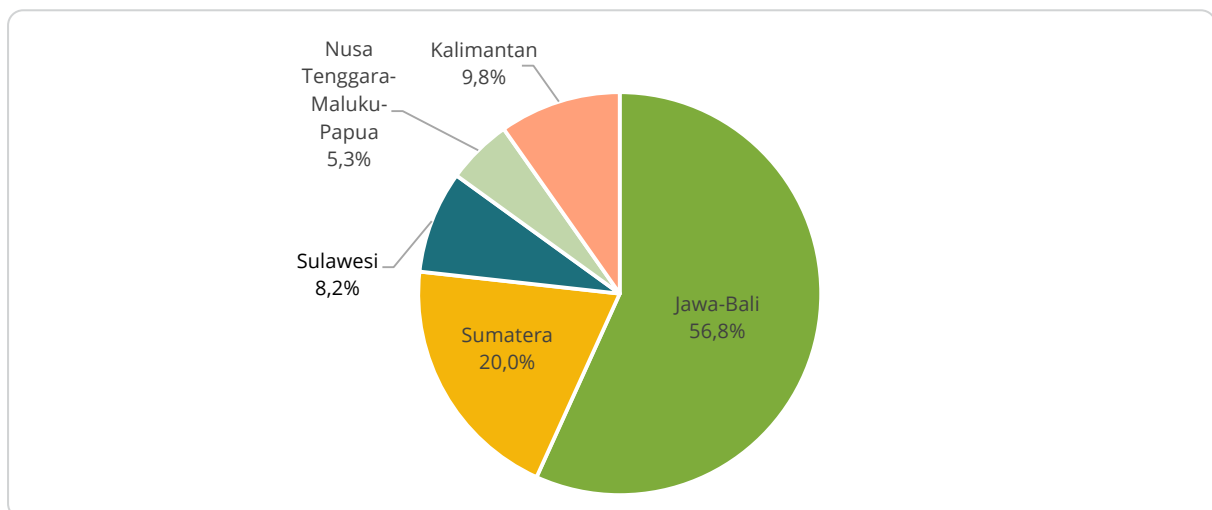
Program internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahaman dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022). Sejak tahun 2022, program internsip wajib diikuti oleh dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter dan dokter gigi peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh kepala dinas kabupaten/kota atau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di masing-masing kabupaten/kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku di wahana internsip selama menjalani internsip. Dokter peserta program internsip ditempatkan selama satu tahun di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Pemberangkatan dokter peserta internsip sebanyak empat kali dalam satu tahun. Jika dibandingkan jumlah dokter peserta internsip tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya, dimana tahun 2024 diberangkatkan empat angkatan berjumlah 11.292 orang. Jumlah dokter peserta intersip yang diberangkatkan pada bulan Februari sebanyak 2.784 orang, bulan Mei sebanyak 2.124 orang, bulan Agustus sebanyak 3.056 orang, dan bulan November sebanyak 3.328 orang. Secara regional, proporsi terbesar dokter peserta intersip yaitu regional Jawa-Bali (5.677 orang) dengan jumlah dokter peserta intersip terbanyak adalah Jawa Timur (1.416 orang). Provinsi dengan jumlah dokter peserta intersip paling sedikit adalah Papua Tengah (26 orang), Papua Barat (16 orang), Papua Selatan (14 orang), dan Papua Pemekaran (4 orang), dikarenakan keempat provinsi tersebut merupakan provinsi baru hasil pemekaran berdasarkan SK Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.

Internsip dokter gigi mulai dilaksanakan pada November tahun 2022, dan pertama kalinya ditempatkan sebanyak 392 orang Dokter Gigi. Pada tahun 2024 proporsi regional terbesar dokter gigi peserta intersip berada di regional Pulau Jawa sebanyak 1.802 orang dengan jumlah dokter gigi peserta intersip terbanyak di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 558 orang dan paling sedikit berada di Provinsi Maluku Utara, ditempatkan sebanyak 7 orang peserta. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta intersip tahun 2024 dapat dilihat di Lampiran 11.I.

GAMBAR 3.20
PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

Pendayagunaan dokter spesialis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan spesialistik, pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, dan mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Terdapat tujuh jenis spesialis yang termasuk kedalam PGDS, yaitu spesialis anak (Sp.A), spesialis Obstetric dan Ginekologi (Sp.OG), spesialis penyakit dalam (Sp. PD), spesialis bedah (Sp.B), spesialis anastesi dan terapi intensif (Sp.An), spesialis patologi klinik (Sp.PK), dan spesialis radiologi (Sp.Rad).

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62P/HUM/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Permohonan Uji Materiil atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), telah dilakukan pembaruan terhadap regulasi penempatan dokter

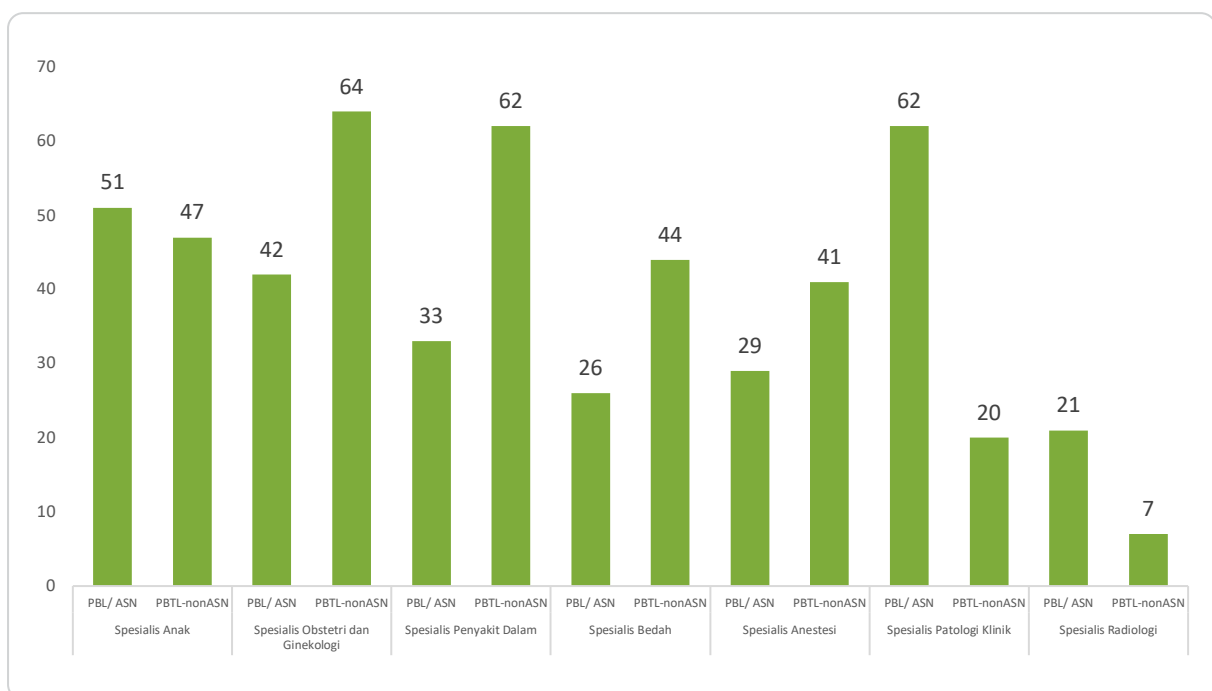
spesialis yang semula WKDS menjadi Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

Pada tahun 2024 telah ditempatkan sejumlah 653 orang dokter spesialis yang ditempatkan di 38 provinsi, termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI dan K/L lainnya yang mengikuti program PGDS. Peserta PGDS terbagi menjadi Peserta Penerima Bantuan Langsung (PBL) ASN dan Peserta Penerima Bantuan Tidak Langsung (PBT) non ASN. Peserta Penerima Bantuan Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya pendidikan (tugas belajar) yang bersumber dari APBN/APBD. Peserta Penerima Bantuan Tidak Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Pusat melalui fakultas kedokteran dan RS yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis.

Sebesar 46,8% dari peserta PGDS merupakan peserta PBL ASN yaitu sejumlah 361 orang, sedangkan peserta PBT-non ASN sejumlah 302 orang. Provinsi dengan penempatan dokter spesialis pada PGDS terbanyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sejumlah 40 orang, kemudian untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat memiliki jumlah penempatan PGDS masing-masing sejumlah 38 dan 31 orang. Provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Banten dan Papua Selatan sejumlah 3 orang.

Jenis spesialisasi terbanyak pada penempatan PGDS tahun 2024 adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (106 orang), sedangkan penempatan jenis spesialisasi yang paling sedikit adalah dokter spesialis onkologi radiasi (3 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2024 dapat dilihat di Lampiran 11.m.

GAMBAR 3.21
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi, dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebanyak 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 33 provinsi. Poltekkes Kemenkes memiliki 509 program studi yang terdiri dari 300 program studi strata Diploma III (296 program studi reguler dan 4 program studi PJJ), 156 program studi strata Sarjana Terapan (Diploma IV), 49 program studi pendidikan profesi, dan 4 program studi Magister Terapan. Kelompok jurusan di Poltekkes terdiri dari:

1. Keperawatan, yang terdiri dari Keperawatan dan Keperawatan Gigi;
2. Kebidanan;
3. Kefarmasian, yang terdiri dari Farmasi serta Analisis Farmasi dan Makanan,
4. Kesehatan Tradisional;
5. Kesehatan Lingkungan;
6. Gizi;
7. Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Promosi Kesehatan;
8. Keterampilan Fisik, yang terdiri dari Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, dan Akupunktur dan Pengobatan Herbal;
9. Keteknisian Medis, yang terdiri dari Teknik Gigi, Kesehatan Gigi, Keperawatan Anestesiologi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah;
10. Teknik Biomedika, yang terdiri dari Teknologi Laboratorium Medis, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Elektromedik, dan Ortotik Prostetik.
11. Lainnya (Asuransi Kesehatan)

Dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Diploma III bagi tenaga kesehatan, sejak tahun 2016 Kementerian Kesehatan mengadakan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Program ini tercantum dalam

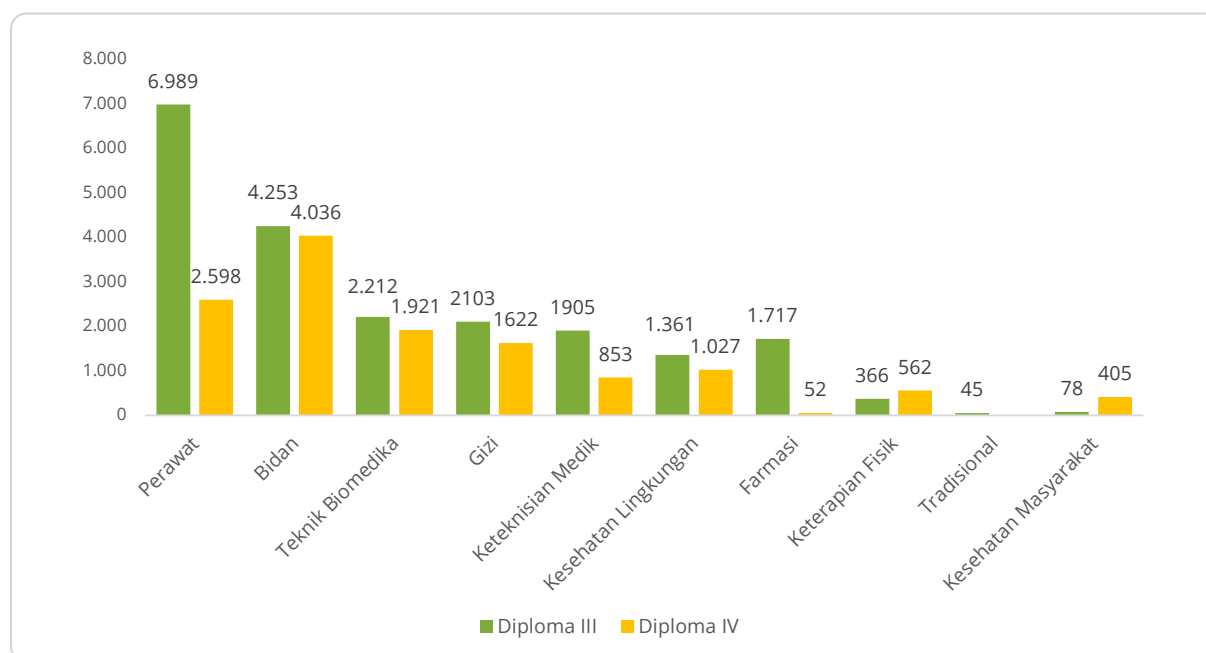
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, dimana salah satunya berisi tentang pembiayaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan berakhir pada tahun 2020. Selanjutnya, program RPL mengikuti ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan tidak lagi mendapat bantuan pendanaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan.

Selain jenjang Diploma, Poltekkes juga membuka program studi Magister Terapan dan Profesi. Program studi Magister Terapan dibuka di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Kebidanan, Keperawatan, Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*). Sementara itu, untuk program studi profesi yang dibuka adalah Profesi Bidan, Ners, Dietisien, dan Fisioterapi.

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2024 sebanyak 40.297 orang, atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 34.234 orang. Jumlah lulusan poltekkes tahun 2024 terdiri dari lulusan diploma III sebanyak 21.029 orang, diploma IV sebanyak 13.378 orang, program profesi sebanyak 5.539 orang, dan magister terapan sebanyak 223 orang. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 6.989 orang lulusan Diploma III dan 2.598 orang lulusan Diploma IV. Program studi Akupunktur memiliki lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 30 orang lulusan Diploma III dan 65 orang lulusan Diploma IV. Secara umum, lulusan Diploma III lebih banyak dibandingkan dengan Diploma IV untuk hampir semua program studi. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.g dan Lampiran 16.h.

GAMBAR 3.22
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024

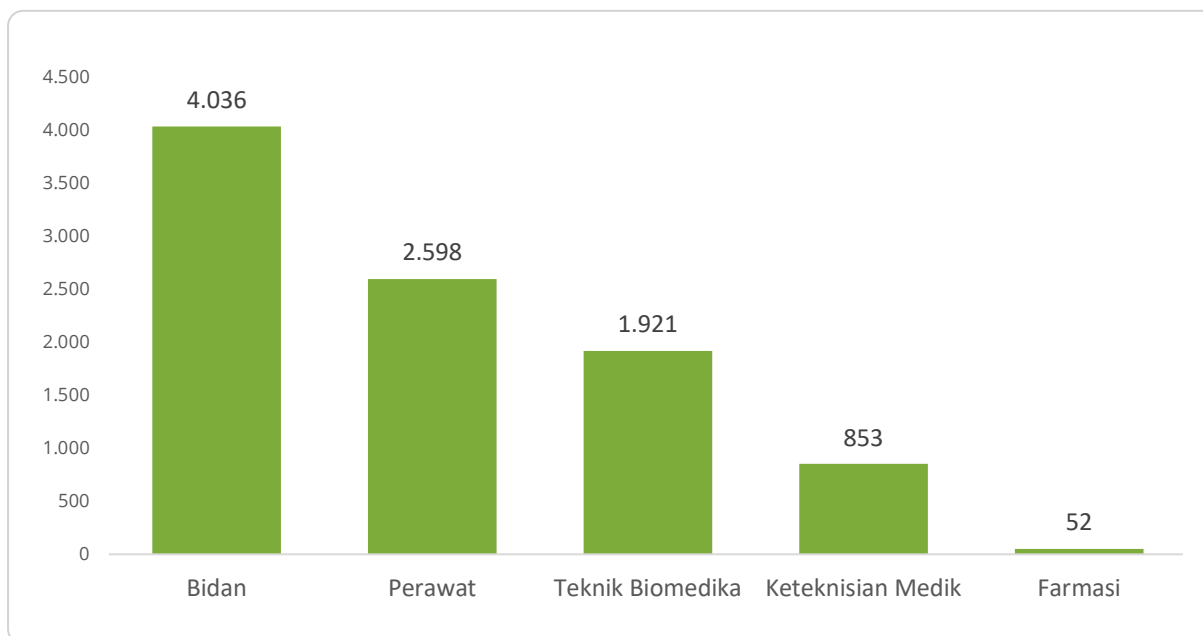


Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Selain jenjang diploma, pada tahun 2024 Poltekkes juga menghasilkan lulusan program profesi sebanyak 5.539 orang dengan rincian 2.939 orang lulusan Profesi Bidan, 2.027 orang lulusan Profesi Ners, 200 orang Profesi Dietisien, dan 373 orang lulusan Profesi Fisioterapi. Jumlah lulusan profesi tahun 2024 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 3.939 orang menjadi 5.539 orang.

Lulusan program studi Magister Terapan Poltekkes tahun 2024 berjumlah 351 orang, dengan rincian 48 orang lulusan Magister Terapan Kebidanan, 13 orang lulusan Magister Terapan Keperawatan, 48 orang lulusan Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan 19 orang Magister Terapan Imaging Diagnostik. Rincian mengenai jumlah lulusan program profesi di Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.j.

GAMBAR 3.23
JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024



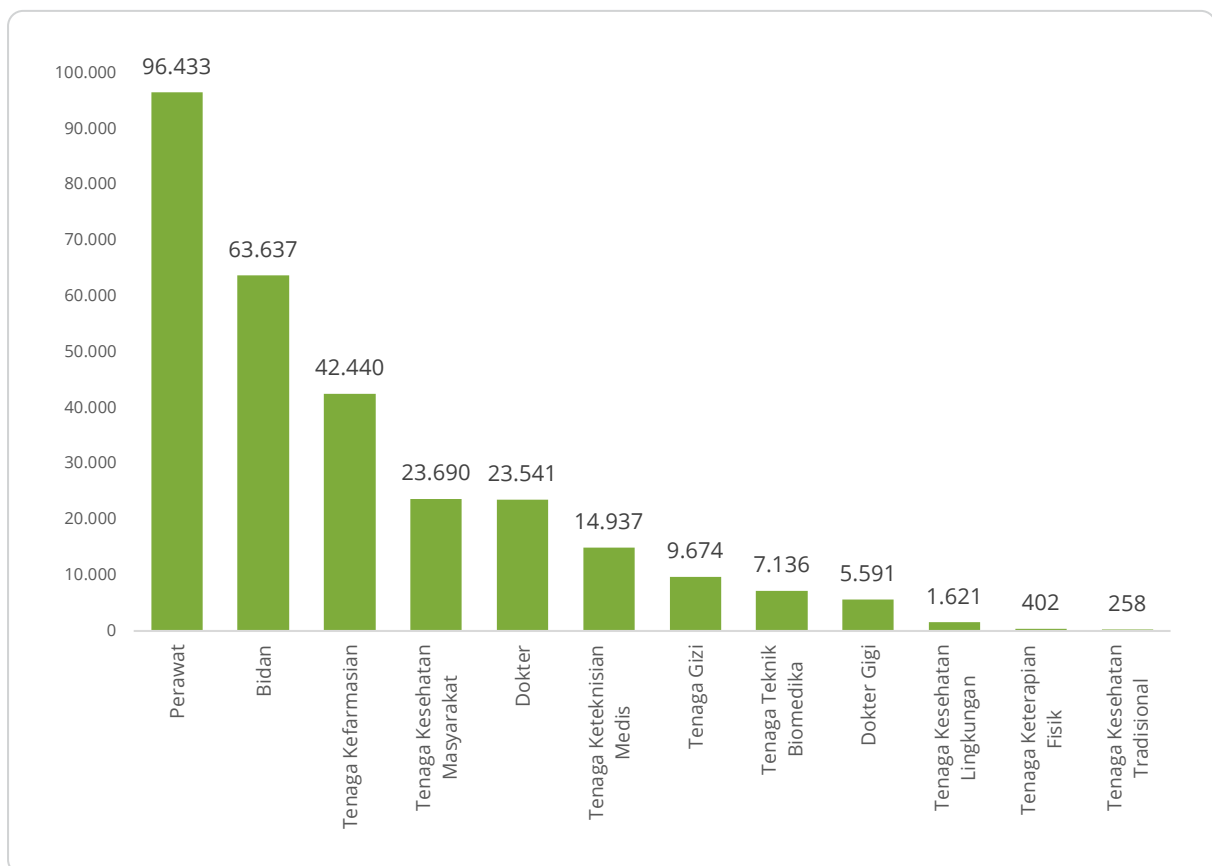
Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Sebagai upaya mencapai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membina dan mengembangkan perguruan tinggi di bawah kewenangannya. Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 316.334 orang lulusan bidang kesehatan serta matematika dan ilmu pengetahuan alam dari 6.245 program studi di 1.338 lembaga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, Profesi, Spesialis 1, Spesialis 2, S2, S2 Terapan, dan S3. Perguruan tinggi, khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang kesehatan dan bidang lain terkait kesehatan dengan jenjang D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi, jumlah lulusan tenaga kesehatan pada tahun 2024 sebesar 316.334 orang. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan jumlah tahun lalu, yaitu 334.194 orang. Menurut rumpun tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 96.433 orang, diikuti oleh bidan sebanyak 63.637 orang, dan tenaga kefarmasian 42.440 orang. Jumlah lulusan perguruan tinggi paling sedikit adalah tenaga kesehatan tradisional yaitu sejumlah 258 orang.

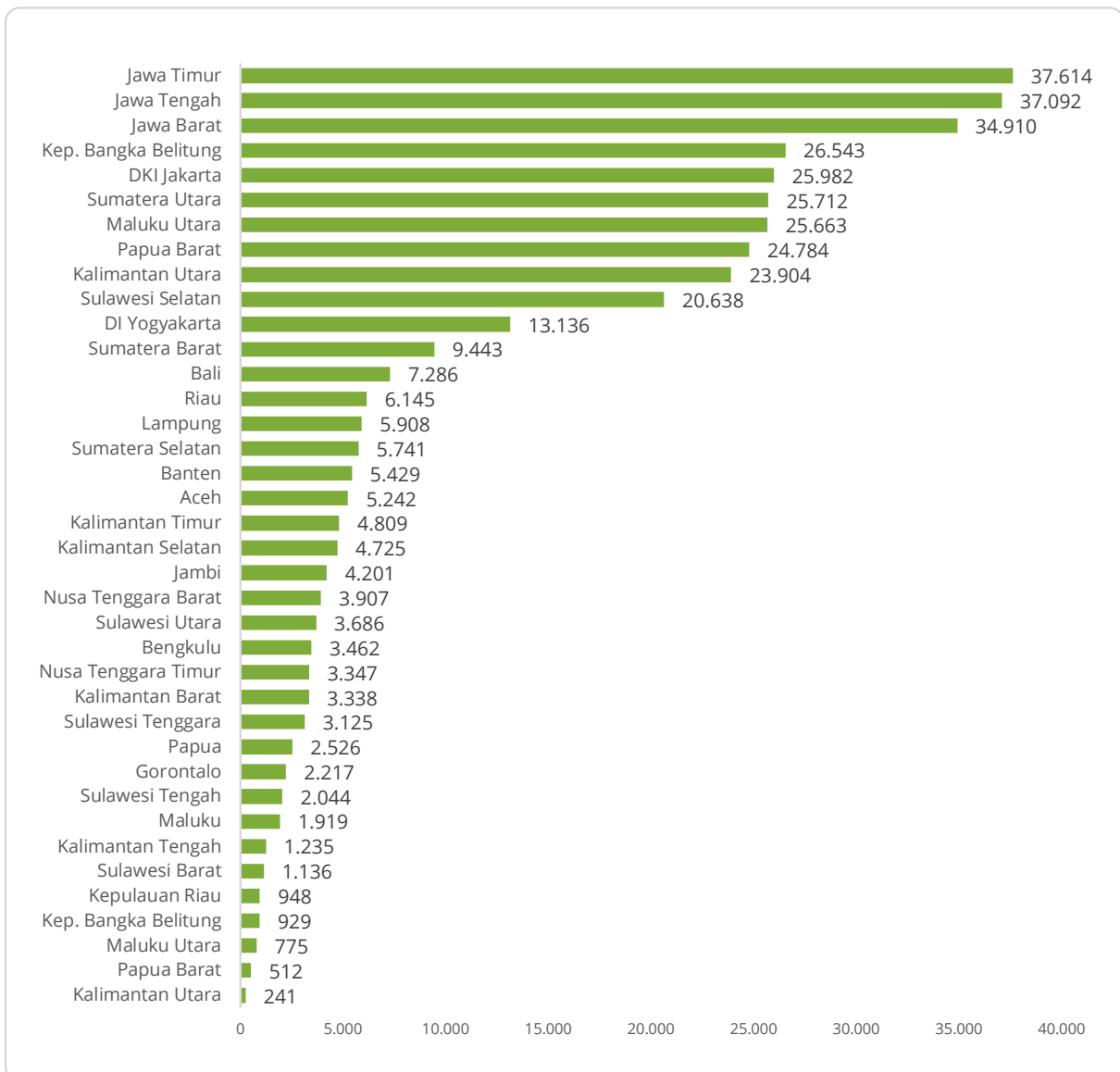
GAMBAR 3.24
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Jika dilihat berdasarkan provinsi, diketahui bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak di Provinsi Jawa Timur sejumlah 37.614 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 37.902 orang, dan Jawa Barat sejumlah 34.910 orang. Provinsi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 241 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 16.k.

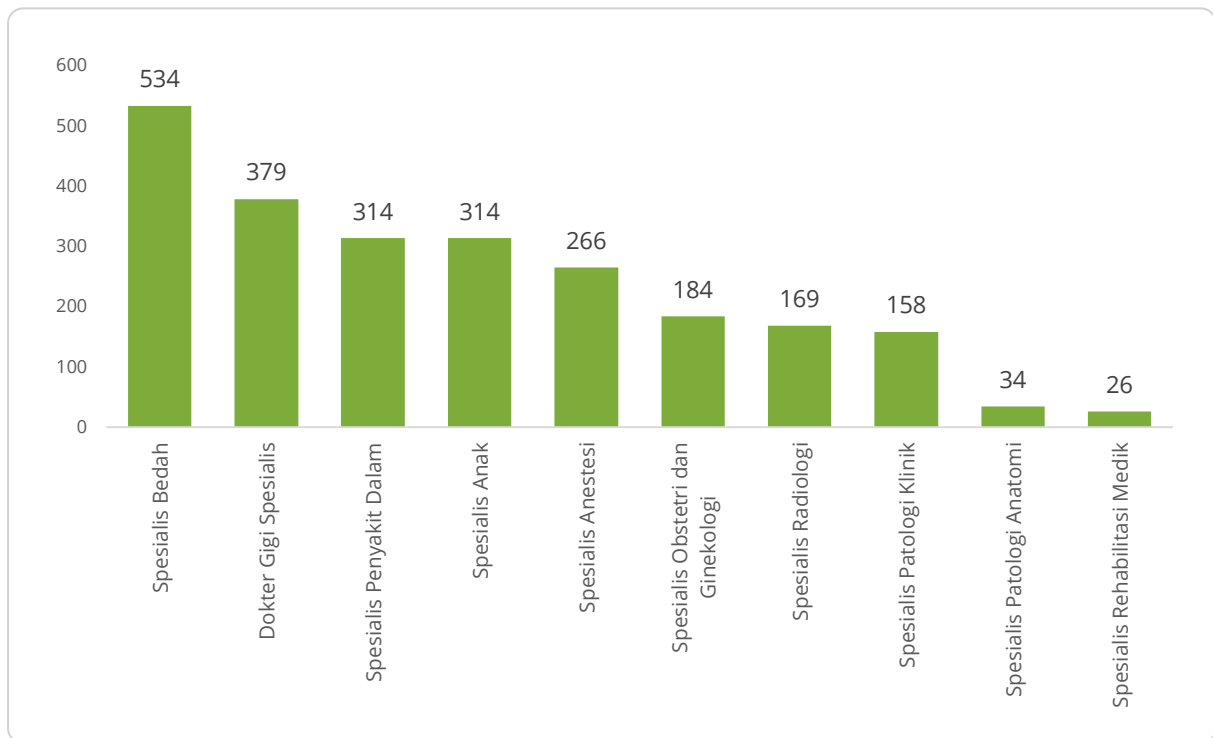
GAMBAR 3.25
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

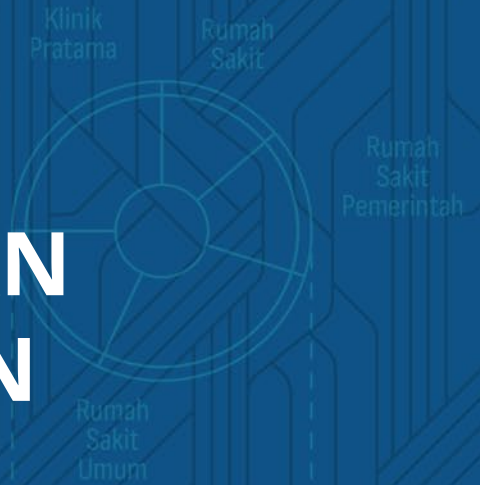
Jumlah lulusan perguruan tinggi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tahun 2024 sebanyak 4.051 orang yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Lulusan dokter spesialis terbanyak adalah dokter spesialis bedah sejumlah 534 orang, diikuti oleh dokter gigi spesialis sejumlah 379 orang. Sementara itu, dokter spesialis lain, di luar yang disebutkan bidang spesialisasi secara spesifik berjumlah 1.673 orang. Dokter spesialis lulusan tahun 2024 yang paling sedikit adalah dokter spesialis rehabilitasi medik sejumlah 26 orang.

GAMBAR 3.26
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN



BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan anggaran berbasis kinerja (*money follow program*), artinya Pemerintah harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas.

Di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan bersumber dari pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 ini memiliki alokasi anggaran sebesar 99,87 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 95,07 triliun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dibandingkan dengan persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami penurunan realisasi, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 95,20%, sedangkan tahun 2023 sebesar 97,04%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2020-2024



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Gambar 4.1 menunjukkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2020-2024 berfluktuasi, dengan alokasi dan realisasi tertinggi pada tahun 2021.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I (Gambar 4.2) menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal sebesar 52 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 35,8 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal sebesar 99,34%, sedangkan realisasi terendah adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan persentase realisasi sebesar 65,24%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2024 selengkapnya terdapat pada Lampiran 20.b.

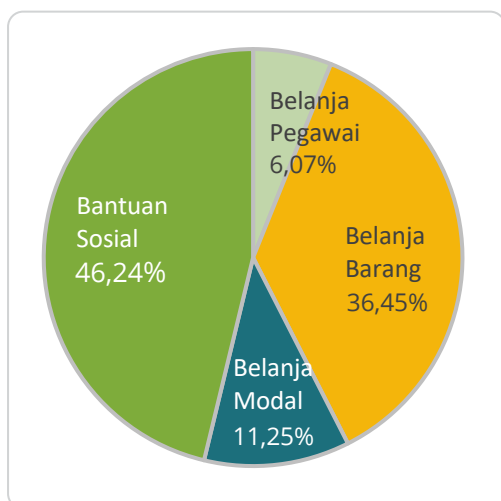
GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2024



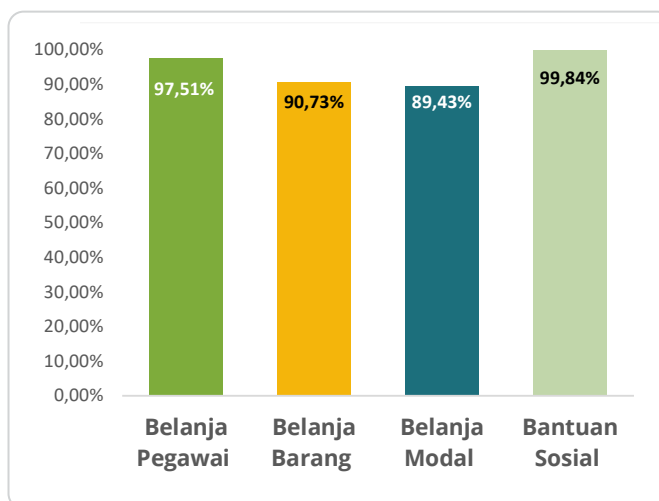
Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 99,87 triliun rupiah, sebanyak 46,17 triliun rupiah atau sebesar 46,24% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alokasi ini dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Anggaran terbesar berikutnya dialokasikan untuk belanja barang sebesar 36,45%, belanja modal sebesar 11,25% dan belanja pegawai 6,07%. Untuk persentase realisasi berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 99,84% dan yang paling rendah adalah belanja modal sebesar 89,43% (Gambar 4.3 dan 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20.c.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN
KESEHATAN BERDASARKAN JENIS
BELANJA TAHUN 2024



GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2024



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

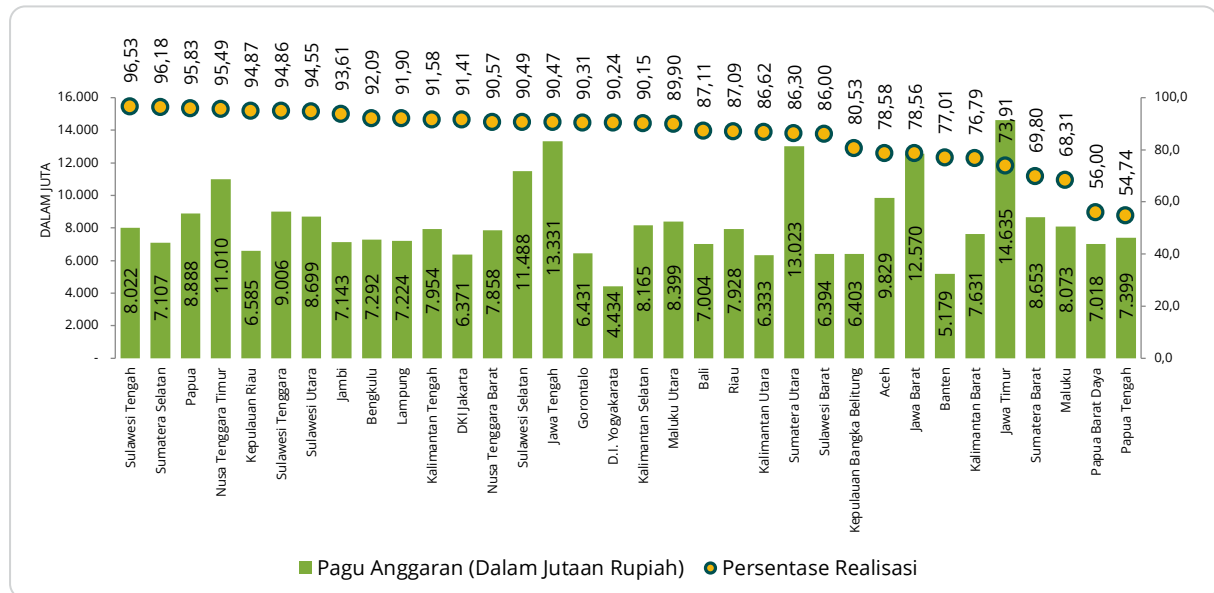
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP. Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada GWPP. Dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN, yang menjadi wewenang dan digunakan untuk penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024, untuk pelaksanaan transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dengan dana dekonsentrasi dengan tujuan meningkatkan capaian program pembangunan kesehatan nasional. Anggaran dekonsentrasi pada Permenkes 2 tahun 2024 dengan anggaran Rp. 320.977.324.000,00.

Adapun pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada tahun berjalan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas, penting dan mendesak serta dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja telah dilakukan optimalisasi dan *refocusing* terhadap dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai pagu dan realisasi anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan menurut provinsi tahun anggaran 2024 disajikan pada Lampiran 20.e.

Realisasi dana dekonsentrasi paling tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 96,5%, sedangkan realisasi terendah adalah Provinsi Papua Tengah sebesar 54,7%. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5. Realisasi dana dekonsentrasi yang masih rendah, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, termasuk analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi.

GAMBAR 4.5
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2025

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu. Tujuan pemberian DAK untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2024 tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik daerah. DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: 1) tenaga kerja lokal; 2) produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah; dan/atau 3) produk dalam negeri.

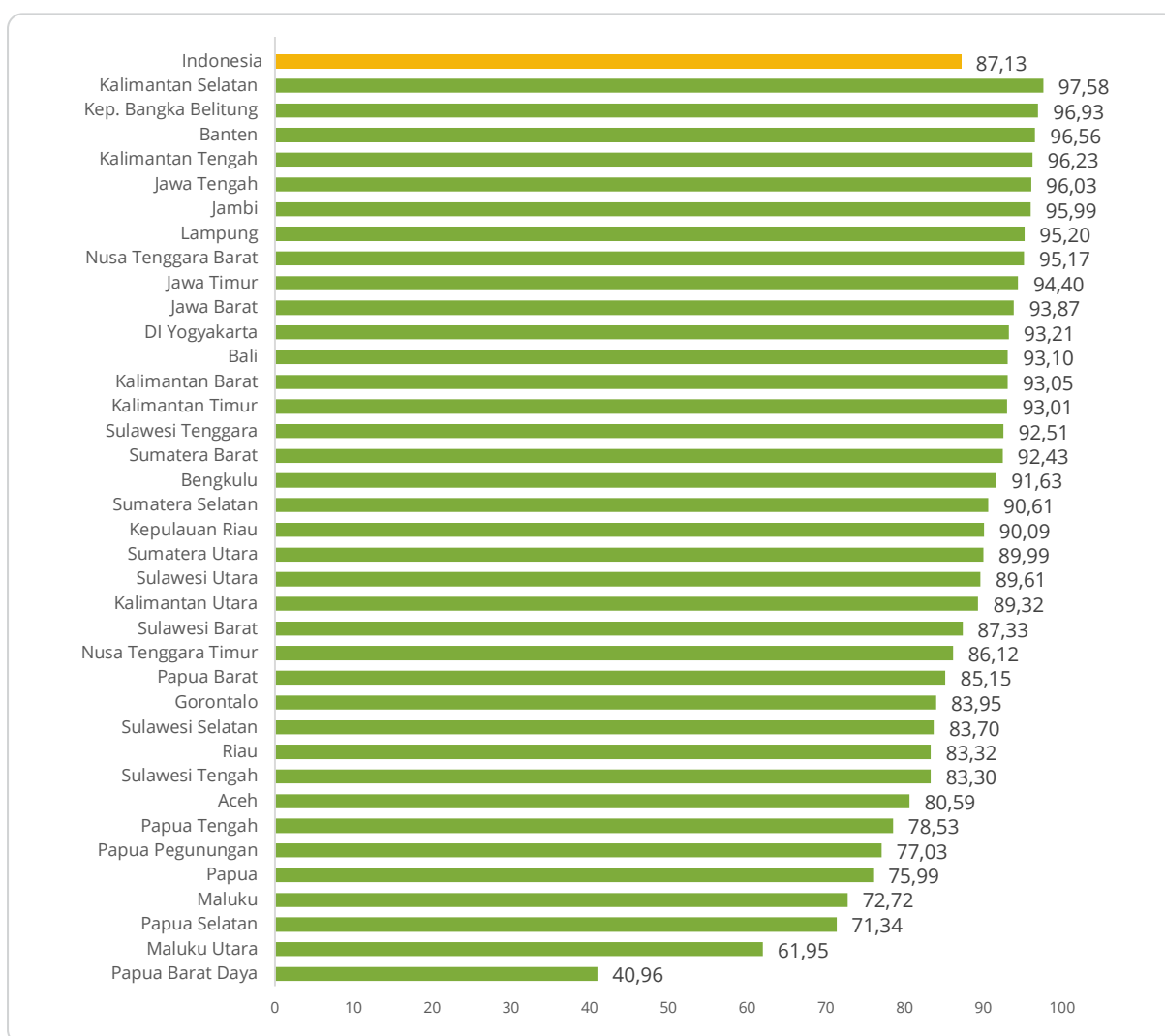
DAK fisik bidang kesehatan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti penyediaan sarana prasarana, dan alat kesehatan puskesmas; pengadaan perangkat Sistem Informasi Kesehatan; penyediaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; kelanjutan rumah sakit dan puskesmas yang belum operasional; penguatan laboratorium kesehatan daerah; pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/ kota; penyediaan alat Kesehatan dan prasarana di rumah sakit; dan peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan,

sarana dan prasarana di rumah sakit daerah provinsi/ kabupaten/kota; penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota; pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana prasarana instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/ kota. Sedangkan DAK non fisik bidang kesehatan terdiri atas: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan.

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan dan tahunan). Sedangkan untuk data realisasi dilaporkan melalui Sistem Informasi Keuangan daerah (IKD) Kemenkeu untuk DAK Fisik dan e-renggar Kemenkes untuk Dak Non Fisik. *Outcome* Jangka Pendek (*Immediate outcome*) dilaporkan melalui aplikasi KRISNA Bappenas.

Pada tahun 2024, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik secara nasional sebesar 87,13% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (69,9%) pada tahun 2023. Dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan (97,58%) dan terendah adalah Provinsi Papua Barat Daya (40,96%) serta DKI Jakarta (0%) tidak ada DAK fisik, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.6 berikut.

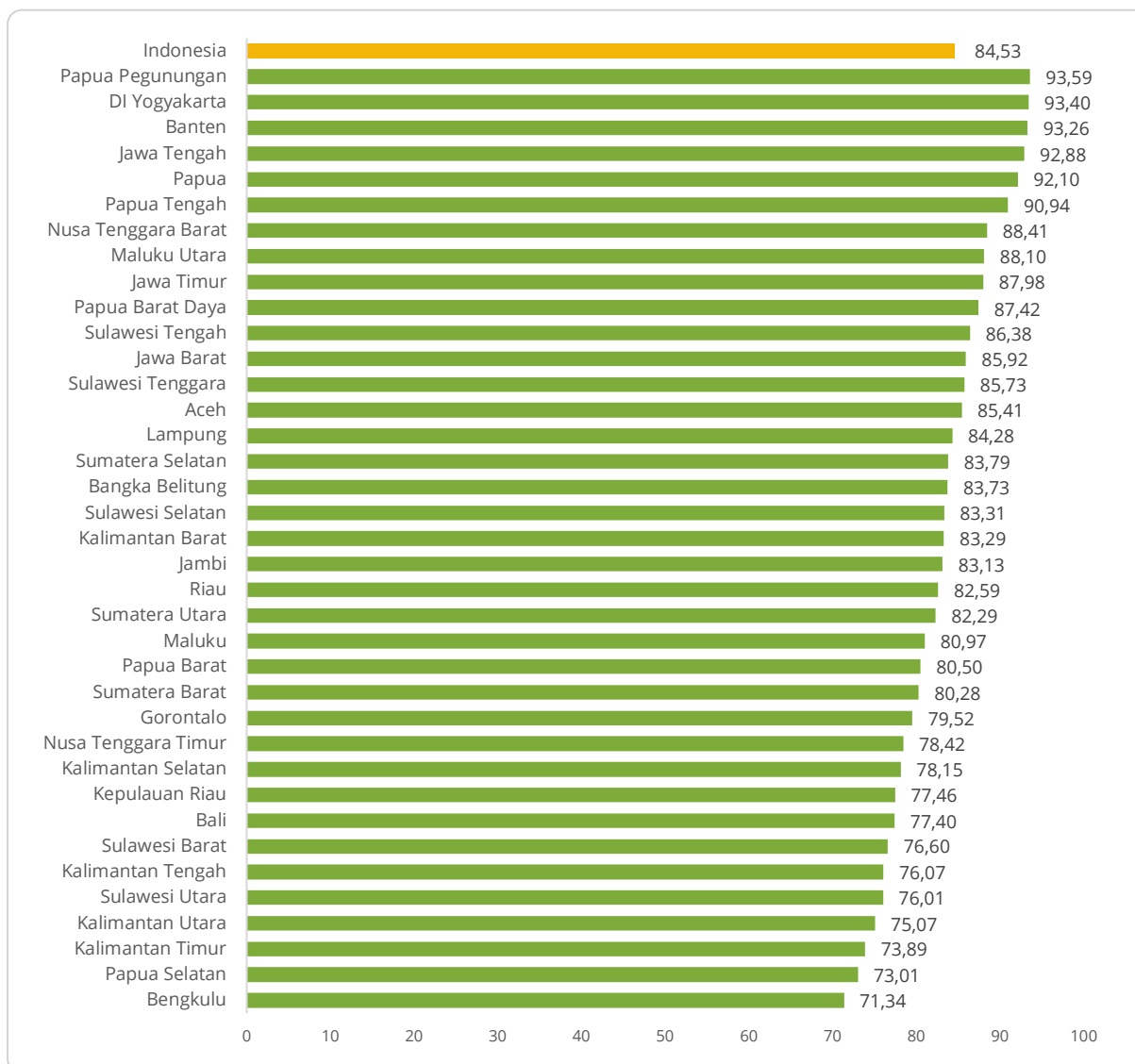
GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2025

Untuk realisasi DAK nonfisik Tahun 2024 secara nasional adalah 84,53% meningkat dari tahun 2023 yaitu 77,1% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan (93,59%) dan terendah adalah Provinsi Bengkulu (71,34%), sedangkan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran DAK nonfisik sebagaimana terlihat pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2025

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Pada tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan. Regulasi ini mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanjanya berdasarkan kebutuhan program nasional dengan berpedoman pada prinsip penganggaran berbasis kinerja. Ketentuan ini menandai terjadinya transisi dalam

pendekatan pendanaan kesehatan, dari yang sebelumnya berlandaskan pada prinsip *mandatory spending* menjadi *mandatory services*. Dengan demikian, penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, efektif, efisien dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Pelaksanaan pendanaan kesehatan dipantau dan dievaluasi setiap tahun oleh Menteri Kesehatan, baik pada tingkat nasional maupun regional guna memastikan tercapainya tujuan Pembangunan Kesehatan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk akun belanja kesehatan nasional, yaitu *National Health Accounts* (NHA) untuk tingkat nasional, *Provincial Health Accounts* (PHA) untuk tingkat provinsi, dan *District Health Accounts* (DHA) untuk tingkat kabupaten/kota. Ketiga jenis akun ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai aliran pendanaan kesehatan yang mencakup sumber dana, mekanisme pendanaan, institusi pengelola dana, penyedia layanan, serta tujuan penggunaan belanja tersebut. Informasi dari NHA dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam menilai input terkait efisiensi, efektivitas, serta keselarasan (sinergi) antara belanja kesehatan dengan arah kebijakan program prioritas dan regulasi yang berlaku.

Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (SHA) 2011, yang merupakan standar internasional, sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan posisi Indonesia dengan negara-negara lain. Data NHA Indonesia juga telah dimasukkan dalam *World Health Report* yang diterbitkan setiap tahun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan data NHA 2023, tercatat adanya peningkatan belanja kesehatan pada sektor publik, dari Pemerintah Daerah maupun Asuransi Kesehatan Sosial. Peningkatan ini berkontribusi terhadap penurunan proporsi pengeluaran langsung oleh rumah tangga (*Out-of-Pocket/ OOP*).

Peningkatan kontribusi sektor publik dalam belanja kesehatan, sebagaimana tercermin dalam data NHA, menunjukkan penguatan peran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memegang peranan sentral menjadi tulang punggung sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2014, JKN bertujuan untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/ UHC*) dengan prinsip gotong royong. Peserta membayar iuran sesuai dengan segmen kepesertaan, sementara pemerintah menanggung iuran peserta tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada tahun 2024, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 95% penduduk Indonesia, menjadikannya salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia.

Meski capaian kepesertaan sangat tinggi, tantangan utama JKN masih berkisar pada aspek keaktifan peserta JKN (tingkat peserta non aktif yang masih tinggi), kualitas layanan, keberlanjutan pendanaan program, serta kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta mandiri. Selain itu, perlu upaya sistematis untuk memastikan bahwa peserta benar-benar mendapatkan manfaat layanan yang berkualitas tanpa hambatan administratif maupun ketidaksetaraan dalam akses. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas serta pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, pembenahan sistem rujukan, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan program.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/Total Health Expenditure (THE)

Total Belanja Kesehatan (TBK), dalam publikasi ini indikator yang akan digunakan adalah THE. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

Tabel 4.8 menyajikan perkembangan total belanja kesehatan Indonesia selama tahun 2014-2023. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terjadi peningkatan signifikan belanja kesehatan yakni hampir 2 (dua) kali lipat, dari Rp324,6 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp614,4 triliun pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan nominal yang cukup besar, proporsi TBK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tidak menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten, tetap berada dalam kisaran 3-4 persen. Bahkan pada tahun 2023, proporsi tersebut menurun menjadi 2,90%. Namun demikian, belanja kesehatan per kapita mengalami peningkatan dari Rp1.287.409 (US \$78) pada tahun 2014 menjadi Rp2.197.930 (USD \$133,2) di tahun 2023.

TABEL 4.1
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2014-2023

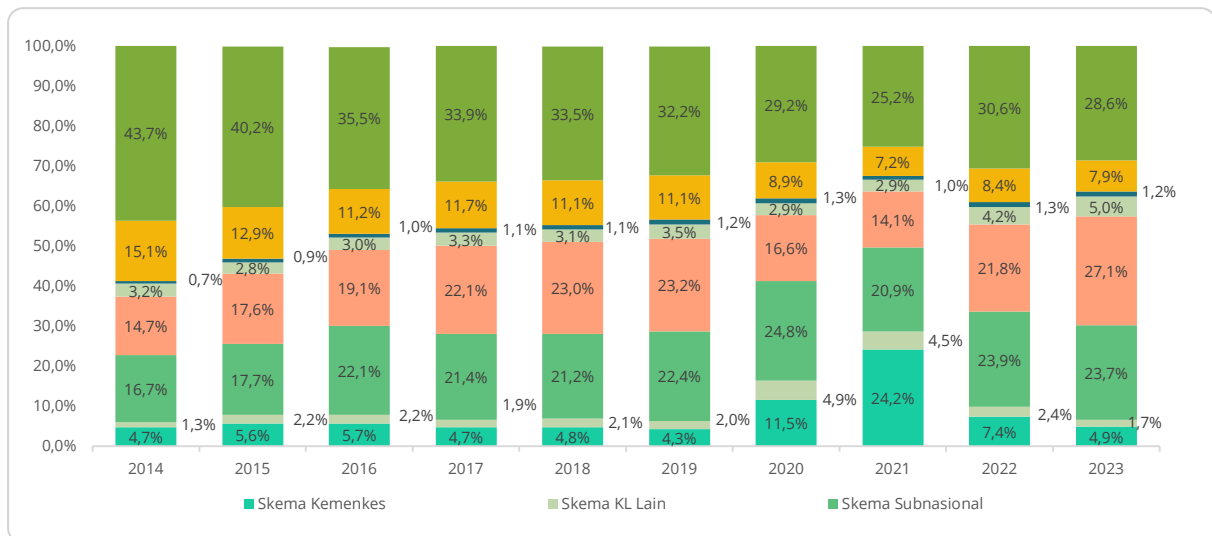
Tahun	Total Belanja Kesehatan/TBK (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US \$)	% TBK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2014	324,6	1.287.409	78	3,10%
2015	358,3	1.402.754	85	3,10%
2016	401,8	1.553.424	94,1	3,20%
2017	421,7	1.610.502	97,6	3,10%
2018	448	1.690.807	102,5	3,00%
2019	488,4	1.822.048	110,4	3,10%
2020	564,2	2.081.726	126,2	3,60%
2021	678,1	2.475.091	150	4,00%
2022	567,6	2.050.677	124,3	2,90%
2023	614,4	2.197.930	133,2	2,90%

Sumber: Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Gambar 4.8 berikut menunjukkan proporsi belanja kesehatan menurut skema pendanaan kesehatan yang meliputi sektor publik dan sektor non publik. Sektor publik mencakup belanja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN dan Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK). Sementara itu, sektor non publik meliputi Asuransi Kesehatan Swasta, Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), Korporasi, dan Pengeluaran langsung Rumah Tangga (*Out of Pocket/OOP*).

Peningkatan proporsi belanja kesehatan melalui skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran strategis dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penurunan proporsi skema OOP yang selama ini menjadi indikator beban finansial masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Secara proporsi, skema OOP mengalami penurunan dari 43,7% pada tahun 2014 menjadi 28,6 % pada tahun 2023. Meskipun demikian, secara nominal OOP tetap meningkat dari Rp139,4 triliun menjadi Rp173,9 triliun dalam periode yang sama. Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

GAMBAR 4.8
PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN
DI INDONESIA TAHUN 2014-2023



Sumber: Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Pada awalnya, belanja kesehatan nasional didominasi oleh pendanaan dari sektor non publik khususnya yang bersumber dari pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan pada kontribusi sektor publik, baik dari sisi proporsi maupun nilai nominal. Pada tahun 2014, sektor publik menyumbang sebesar 32,4% dari total belanja kesehatan nasional (Rp93,2 triliun), dan meningkat menjadi 55,4% pada tahun 2022 (Rp315,4 triliun). Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan belanja pada skema JKN dan skema pemerintah daerah (Pemda). Sementara itu, belanja melalui skema Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta K/L lainnya menunjukkan pola yang fluktuatif pada periode 2013–2019, sebelum mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020–2021 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, pola belanja kesehatan nasional menunjukkan kecenderungan kembali ke tren sebelum pandemi, meskipun secara umum tingkat belanjanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2013–2019. Hal ini mencerminkan adanya penguatan peran sektor publik dalam mendukung sistem pembiayaan kesehatan nasional secara lebih berkelanjutan.

Salah satu skema yang menunjukkan tren peningkatan adalah belanja kesehatan pada skema Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selama periode 2014–2020, belanja Kesehatan daerah cenderung meningkat namun mengalami penurunan kembali setelah tahun 2021–2023. Peningkatan jumlah belanja kesehatan Pemda diharapkan dapat memperkuat peran daerah dalam mendukung pelaksanaan program-program Kesehatan nasional, khususnya program vertikal yang menjadi indikator kinerja Kesehatan Nasional. Peran besar daerah dalam mengelola pembiayaan kesehatan tentu saja melahirkan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karenanya, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Mengingat pencapaian indikator kesehatan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan kesehatan nasional, maka diperlukan pula mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan dana transfer dari pusat ke daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh dana yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan transformasi dari berbagai skema jaminan kesehatan yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah oleh berbagai lembaga di Indonesia. Sebelum JKN diimplementasikan secara nasional, sistem jaminan kesehatan di Indonesia bersifat terfragmentasi, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi landasan hukum skema jaminan kesehatan ke dalam satu sistem yang terpadu dan menyeluruh. JKN telah diimplementasikan mulai tahun 2014 dengan penunjukan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan.

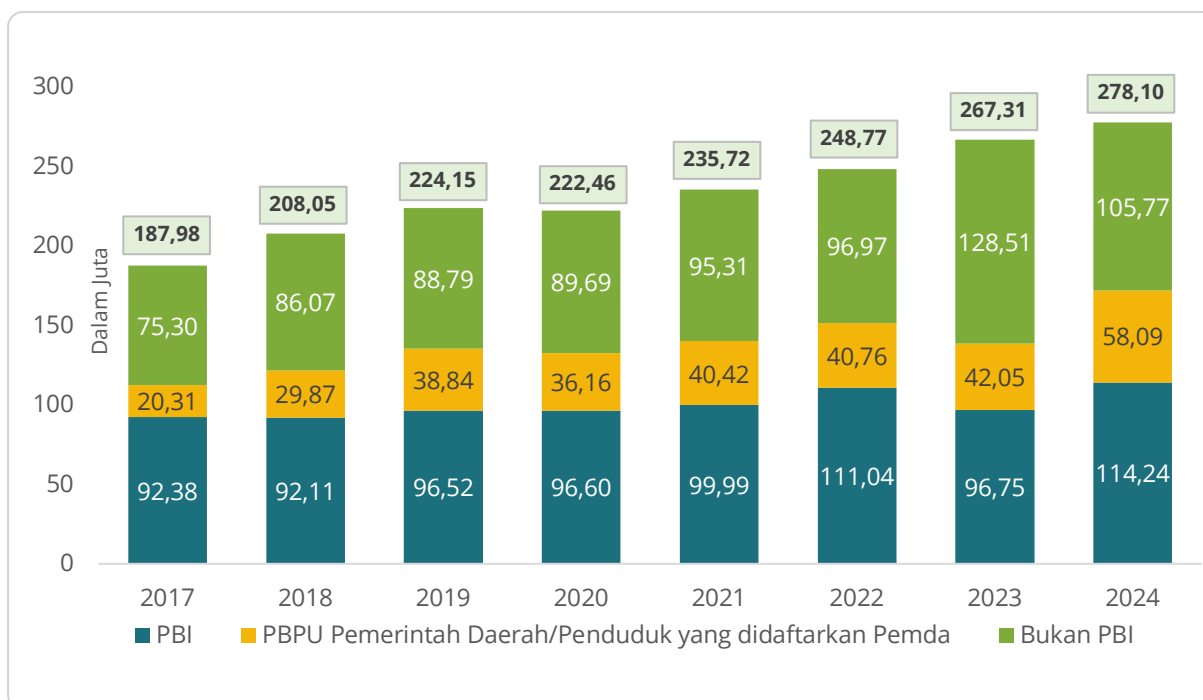
JKN bertujuan untuk mewujudkan *universal health coverage* (UHC) di Indonesia dengan memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program JKN merupakan bentuk nyata amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

Penyelenggaraan JKN mengacu pada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip asuransi sosial meliputi beberapa aspek fundamental, yaitu kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah. Sistem ini memungkinkan terjadinya subsidi silang yang memastikan seluruh masyarakat, terlepas dari kondisi ekonomi mereka, dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Sedangkan prinsip ekuitas menjamin kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis tanpa dikaitkan dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ekuitas dalam JKN mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan antara berbagai kelompok sosial ekonomi. Dengan sistem ini, seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan medis mereka, tanpa terhalang oleh keterbatasan finansial.

Program JKN dirancang untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia melalui sistem kepesertaan yang inklusif. Kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan. PBI Jaminan Kesehatan adalah kelompok peserta yang terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Penetapan status PBI dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan kriteria dan data yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Di luar segmen PBI, terdapat masyarakat dengan kriteria tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang masuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, kelompok Bukan PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya. Struktur kepesertaan JKN yang komprehensif ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam perlindungan Kesehatan.

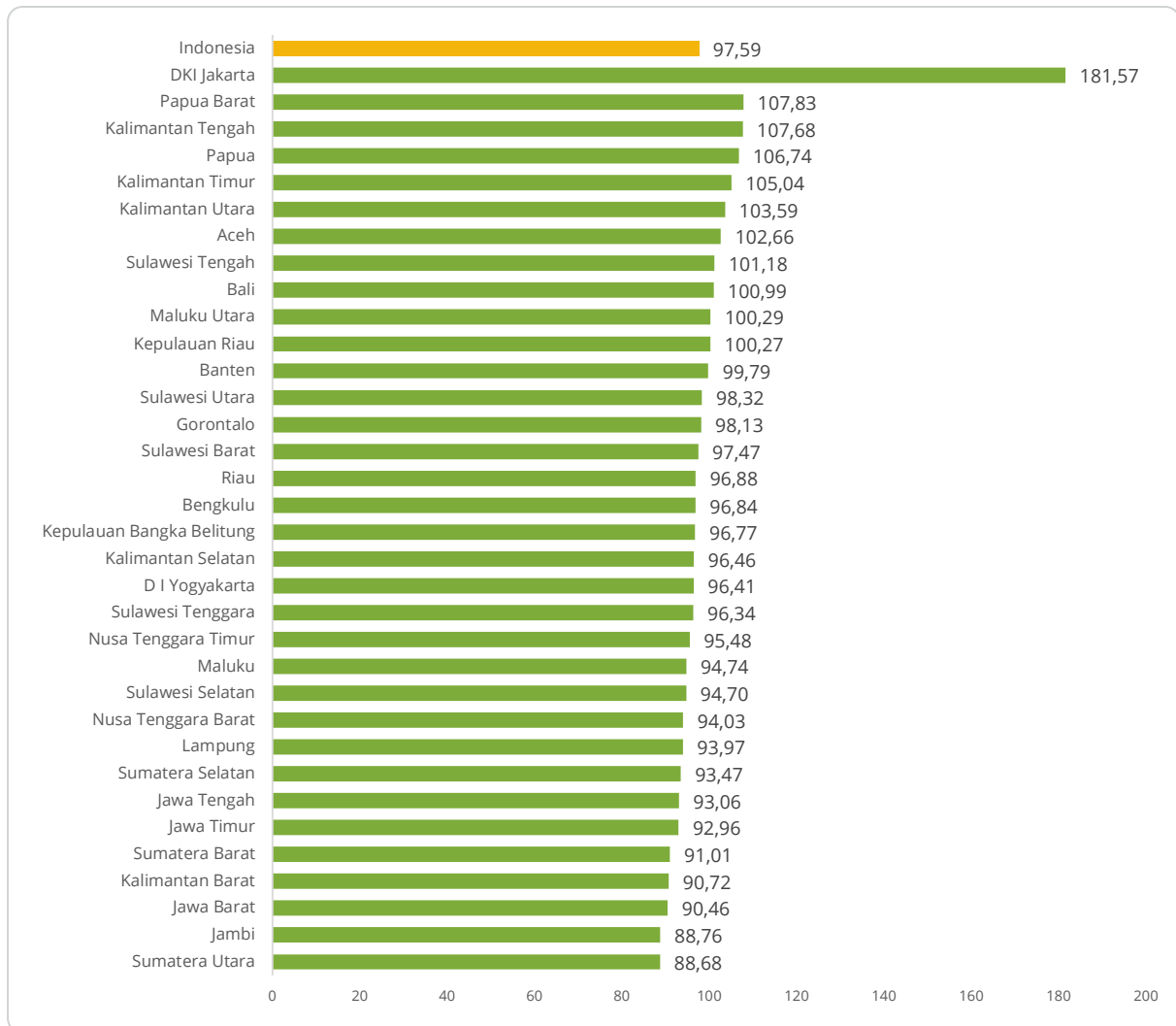
GAMBAR 4.9
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KARTU INDONESIA SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2017-2024



Sumber: Laporan BPJS Kesehatan, Desember 2024

Cakupan kepesertaan JKN mencapai 278,1 juta jiwa, terdiri dari peserta dengan status aktif, nonaktif menunggak dan nonaktif mutasi. Mayoritas peserta berasal dari segmen penerima bantuan (Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda) yang mencapai 172,3 juta jiwa atau 62% dari total peserta JKN. Namun, meskipun total kepesertaan JKN mengalami peningkatan, pertumbuhan peserta di luar segmen bantuan menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa perlu upaya lebih lanjut dari seluruh pemangku kepentingan, untuk mendorong partisipasi kepesertaan aktif JKN bagi masyarakat mampu ke dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mandiri, guna menjaga keberlanjutan ekosistem JKN.

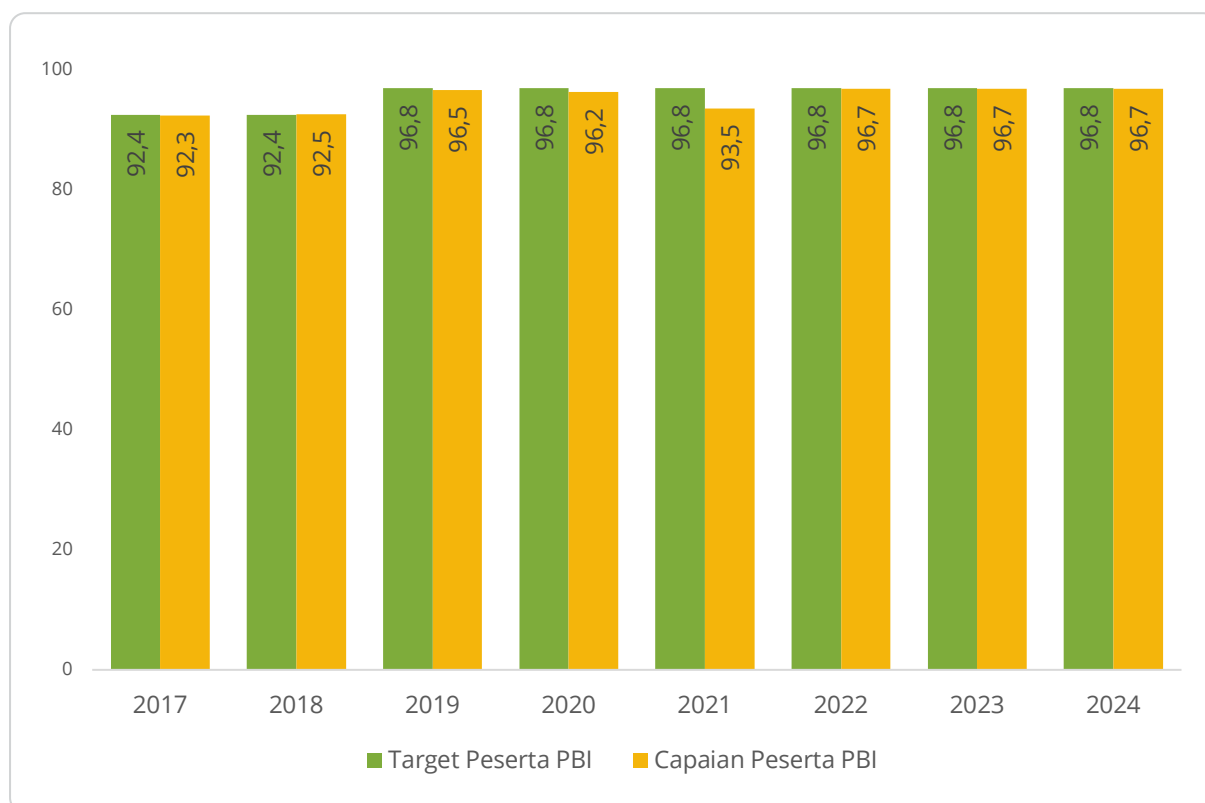
GAMBAR 4.10
CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Laporan BPJS Kesehatan, Desember 2024

Pada tahun 2024 Secara nasional, cakupan kepesertaan JKN baik yang berstatus aktif dan non-aktif mencapai 278,1 juta jiwa atau sekitar 97,59% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN). Namun, masih terdapat tantangan terhadap tingginya peserta non aktif karena menunggak iuran dan mutasi (berpindah segmen kepesertaan) yang mencapai 55,4 juta jiwa atau 19,6% dari total penduduk. Sebagaimana diketahui, syarat bagi peserta JKN mendapatkan manfaat dari program JKN adalah kepesertaan aktif, sehingga peserta JKN yang non aktif tidak dapat memperoleh manfaat dari JKN. Oleh karena itu, meskipun cakupan kepesertaan terus meningkat, namun mendorong peningkatan keaktifan peserta JKN menjadi aspek krusial dalam memastikan manfaat program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Rincian data cakupan kepesertaan JKN di Indonesia menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 19.a

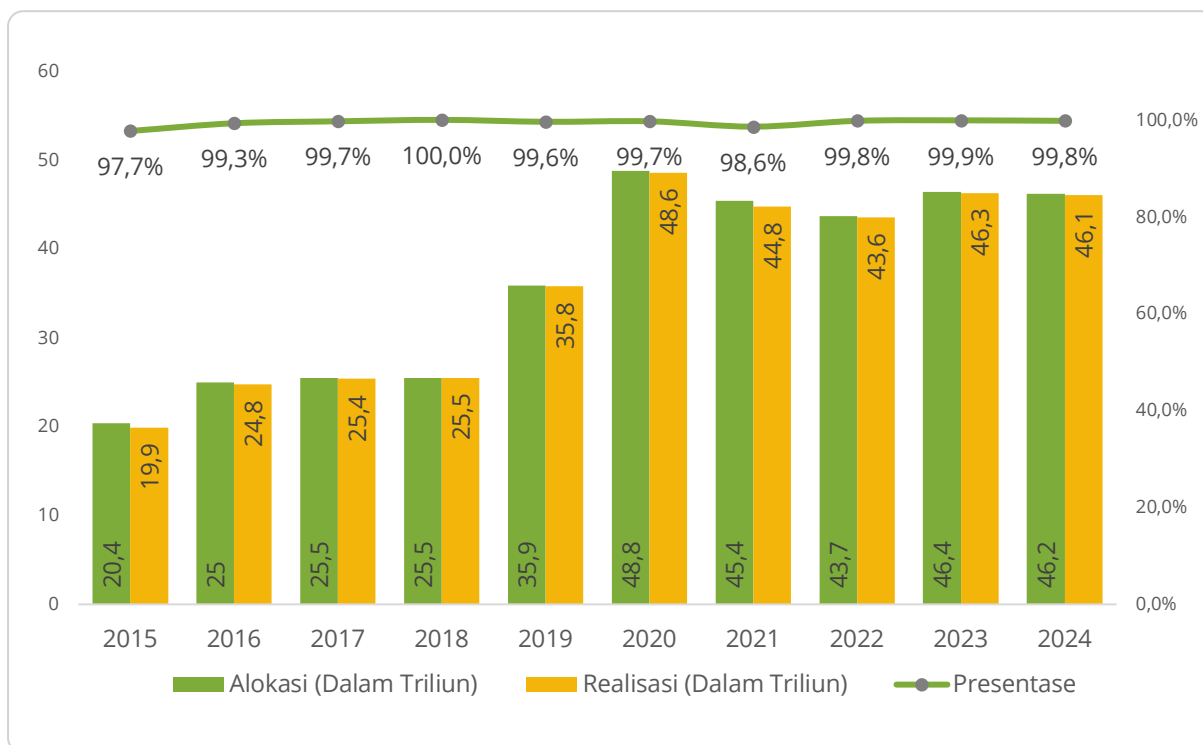
GAMBAR 4.11
TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2024



Sumber: Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan melalui SK Menteri Sosial. Penetapan ini dilakukan setiap bulan dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data bayi baru lahir (BBL) yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 205/HUK/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk bulan November Tahun 2024, SK tersebut menetapkan sebanyak 96,7 juta jiwa fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima PBI JK per Desember 2024. Penetapan ini dilakukan secara cermat melalui proses verifikasi dan validasi data oleh Kemensos, dengan memastikan data penerima sudah terintegrasi dan padan dengan DTKS serta NIK yang terdaftar di Dukcapil. Data ini menjadi dasar bagi Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam memberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada kelompok masyarakat yang berhak.

GAMBAR 4.12
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2015-2024

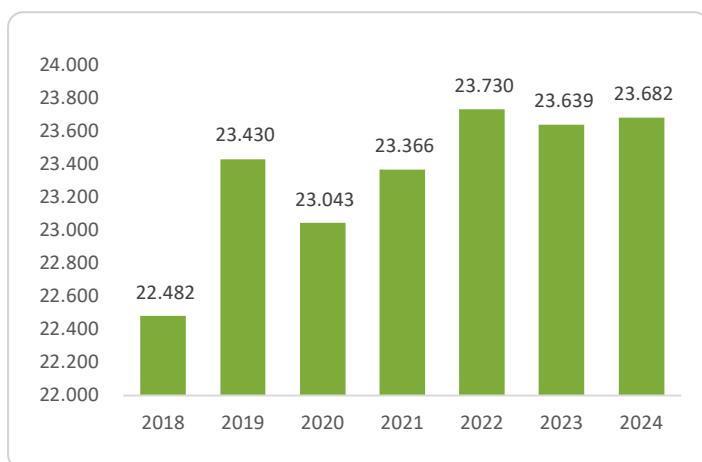


Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

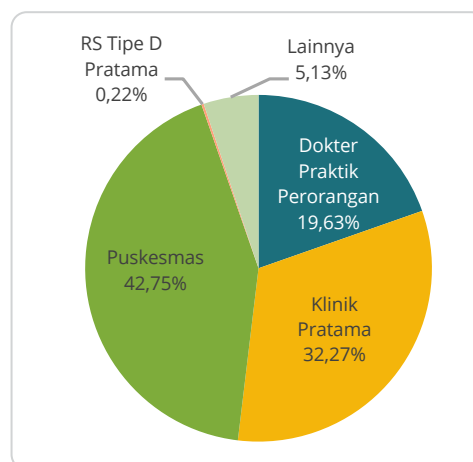
Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, terjadi perubahan besaran iuran, di mana iuran kelas III bagi peserta BPBU dan BP pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp25.500 (dari tarif penuh Rp42.000 dengan subsidi pemerintah sebesar Rp16.500), dan mulai tahun 2021 serta seterusnya menjadi Rp35.000. Sedangkan untuk peserta PBI Jaminan Kesehatan iurannya ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah. Ketentuan ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Pasal 34.

Perubahan regulasi ini memengaruhi tren alokasi dan realisasi anggaran PBI sebagaimana terlihat pada gambar 4.12. Pada tahun 2017-2018, anggaran relatif stabil di angka Rp25 triliun. Seiring peningkatan besaran iuran, anggaran naik signifikan mulai tahun 2019 sekitar Rp35 triliun dan tertinggi di tahun 2020 sekitar Rp48 triliun. Pada 2021-2024, meskipun anggaran sedikit menurun, alokasi tetap berada di atas Rp45 triliun serta tingkat pencapaian jumlah peserta PBI yang tinggi. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pembiayaan PBI tetap terjaga dan sesuai dengan kebijakan iuran yang berlaku.

GAMBAR 4.13
JUMLAH FKTP BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI
INDONESIA
TAHUN 2017-2024



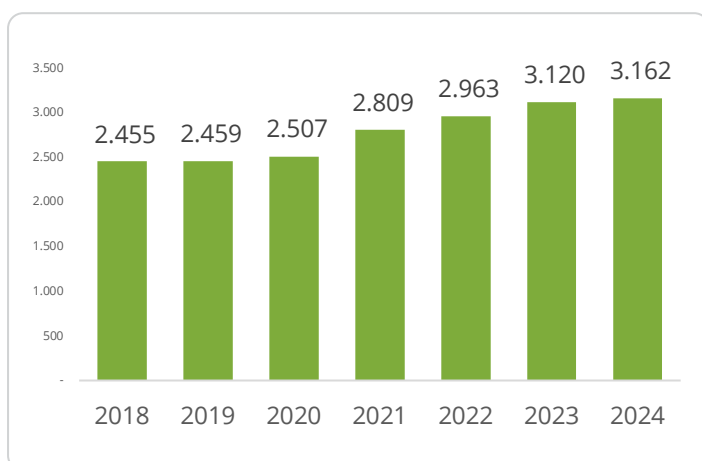
GAMBAR 4.14
PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA
DENGAN BPJS DI INDONESIA
TAHUN 2024



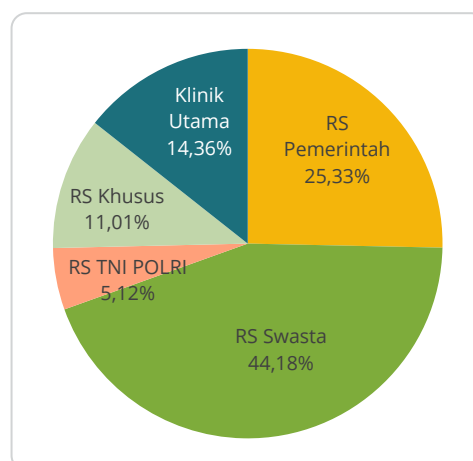
Sumber: BPJS Kesehatan, Desember 2024

Jumlah FKTP yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2024 mengalami peningkatan, dari sebanyak 22.482 FKTP pada tahun 2018 menjadi 23.682 FKTP pada tahun 2024. Jenis FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbanyak adalah Puskesmas yaitu sebesar 42,75%, kemudian Klinik Pratama sebesar 32,27%, diikuti dengan Dokter Praktik Perorangan sebesar 19,63%. Sebaran ini mencerminkan peran puskesmas dan klinik sebagai *gate keeper* dalam mendukung layanan Kesehatan primer dalam program JKN. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19.b.

GAMBAR 4.15
JUMLAH FKRTL BEKERJASAMA DENGAN BPJS
KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2023



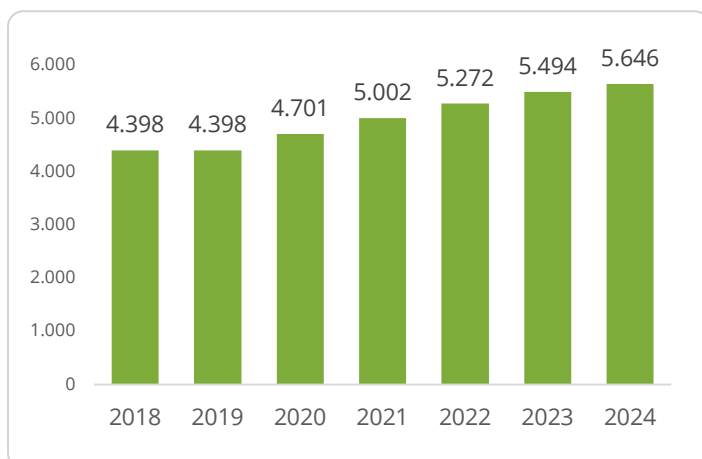
GAMBAR 4.16
PERSENTASE FKRTL BEKERJA SAMA
DENGAN BPJS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024



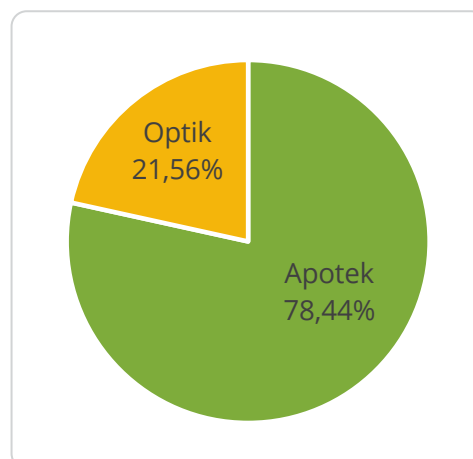
Sumber: BPJS Kesehatan, Desember 2024

Sama halnya dengan FKTP, perkembangan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terjadi peningkatan dari 2.455 FKRTL pada tahun 2018 menjadi 3.162 FKRTL pada tahun 2024. Jenis FKRTL terbanyak adalah Rumah Sakit Swasta, yaitu sebesar 44,2%, Rumah Sakit Pemerintah 25,3%, Klinik Utama 14,4%, Rumah Sakit Khusus 11,0%, dan Rumah Sakit TNI/POLRI sebesar 5,1% dari seluruh FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.17
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG
BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2018-2024



GAMBAR 4.18
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN
PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN
BPJS KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: BPJS Kesehatan, Desember 2024

Selain FKTP dan FKRTL, fasilitas kesehatan penunjang juga melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2024, jumlah fasilitas kesehatan penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tercatat sebanyak 5.646, terdiri dari 4.249 apotek (78,44%) dan 1.217 optik (21,56%). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan jumlah apotek yang bekerja sama, dari 4.309 menjadi 4.249. Sebaliknya, jumlah optik justru mengalami peningkatan, dari 1.185 pada tahun 2023 menjadi 1.217 pada tahun 2024, sehingga secara keseluruhan tetap terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan penunjang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yakni 5.494 di Tahun 2023 menjadi 5.646 fasilitas kesehatan penunjang di Tahun 2024.

Namun demikian, peningkatan jumlah fasilitas Kesehatan maupun penunjang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan juga perlu diikuti dengan pemerataan sebarannya diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut untuk mendukung pemerataan akses peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tujuan *universal health coverage* yang menjadi landasan pelaksanaan program JKN dapat tercapai.

TABEL 4.2
PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMENT KEPESERTAAN
DI INDONESIA TAHUN 2023 – 2024

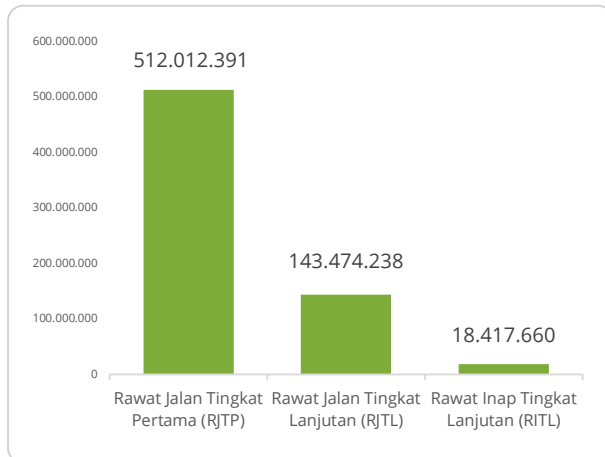
No	Jenis Iuran (Segmen)	Pendapatan Iuran (juta rupiah)	
		2023	2024
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	45.621.222	48.506.458
2	PBPU Pemerintah Daerah	16.128.062	18.758.843
3	Bantuan Iuran		
	a. Bantuan Iuran Pemerintah atas PBPU & BP Mandiri	1.114.515	281.892
	b. Bantuan Iuran Pemerintah atas PBPU Pemda	3.197.328	3.741.958
4	Bukan PBI		
	a. PPU Penyelenggara Negara	27.796.775	30.978.318
	b. BP Penyelenggara Negara	2.218.412	2.582.814
	c. PPU Badan Usaha	41.969.916	45.917.453
	d. PBPU dan BP Mandiri	13.653.084	14.483.910
Total		151.699.314	165.251.646

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Desember 2024

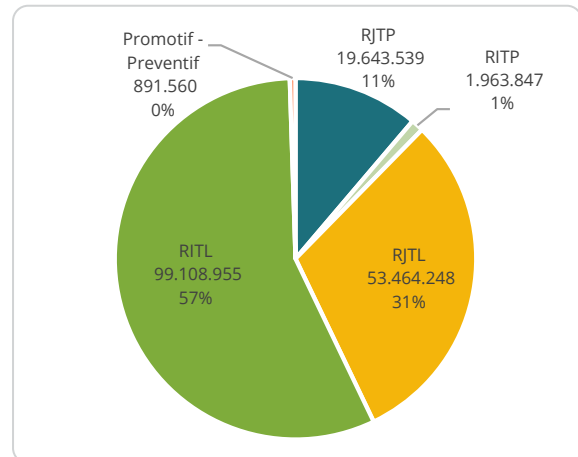
Total pendapatan iuran sampai dengan bulan 31 Desember 2024 adalah Rp165,252 Triliun (*unaudited*), dimana meningkat dari pendapatan iuran tahun 2023 yang telah selesai diaudit (*audited*), yakni 151,699 Triliun. Pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segmen kepesertaan terbesar yaitu pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 48,506 Triliun (29,35%), terbanyak kedua dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan usaha sebesar Rp45,917 Triliun (27,79%). Selanjutnya dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara sebesar 30,978 Triliun (18,75%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda sebesar Rp18,758 Triliun (11,35%), segmen PBPU termasuk dengan bantuan iuran pemerintah atas PBPU Pemda sebesar Rp3,741 Triliun (8,76%), Bantuan Iuran PBPU Pemda sebesar 3,741 Triliun (2,26%), Bukan Pekerja Penyelenggaraan Negara sebesar 2,582 Triliun (1,56%), dan pada segmen BP atau Bukan Pekerja sebesar Rp281 Milyar (0,17%) dari total pendapatan iuran.

Jika dibandingkan dengan data Tahun 2023, secara keseluruhan pendapatan iuran BPJS Kesehatan meningkat sebesar 13, 552 T. Hampir semua pendapatan iuran di setiap segmen meningkat di Tahun 2024 kecuali segmen Bantuan Iuran Pemerintah atas PBPU dan BP Mandiri.

GAMBAR 4.19
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2024



GAMBAR 4.20
BEBAN JAMINAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Desember 2024

Pada tahun 2024, jumlah pelayanan Kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah kunjungan rawat jalan di FKTP atau Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebanyak 512 juta kunjungan sedangkan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebesar 18,4 juta kunjungan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) merupakan yang terbesar pemanfaatannya, yaitu sebesar Rp 99,1 T atau 56,61% dari seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat delapan penyakit katastropik dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Penyakit katastropik yang disajikan merupakan penyakit kronis yang dari sisi pengeluaran peserta diperkirakan dapat membebani finansial rumah tangga. Biaya terbesar dari penyakit katastropik tersebut, biaya terbesar adalah penyakit jantung, yang membutuhkan Rp19,250 Triliun untuk pembiayaan. Penyakit jantung juga merupakan jumlah kasus penyakit yang terbanyak dibiayai oleh BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 22.550.047 kasus. Penyakit katastropik dengan biaya terendah yaitu Sirosis Hati, yang dibiayai BPJS Kesehatan sebesar Rp 463,515 Miliar dengan kasus sebanyak 248.373 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari rata-rata pembiayaan per kasus, tiga teratas penyakit dengan biaya terbesar per kasus merupakan penyakit kronis, yaitu Jantung, Kanker, dan Stroke.

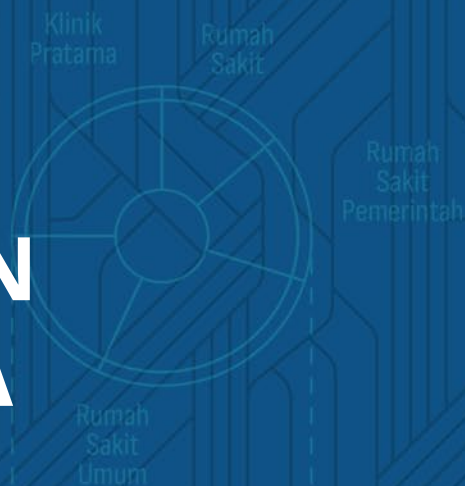
TABEL 4.3
JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Katastropik	Kasus	Biaya (Rp)
1	Jantung	22.550.047	19.250.622.010.793
2	Stroke	3.899.305	5.817.085.160.504
3	Gagal Ginjal	1.448.406	2.760.968.219.728
4	Kanker	4.240.719	6.488.106.411.284
5	Leukemia	168.351	599.911.022.780
6	Talasemia	353.226	794.459.565.791
7	Sirosis Hati	248.373	463.515.546.429
8	Hemofilia	131.639	1.109.170.703.253
TOTAL		33.040.066	37.283.838.640.562

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Desember 2024

Pada tahun 2024, total pemanfaatan pelayanan tingkat lanjutan oleh peserta JKN mencapai 161.891.898 kasus, dengan total biaya pelayanan sebesar Rp152,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit katastropik menyumbang sebanyak 33.040.066 kasus atau sekitar 20,41% dari total kasus yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan, dan dari sisi biaya mencapai Rp37,28 triliun atau 24,44% dari jumlah pembiayaan layanan tingkat lanjutan.

BAB V. KESEHATAN KELUARGA



BAB V. KESEHATAN KELUARGA

Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

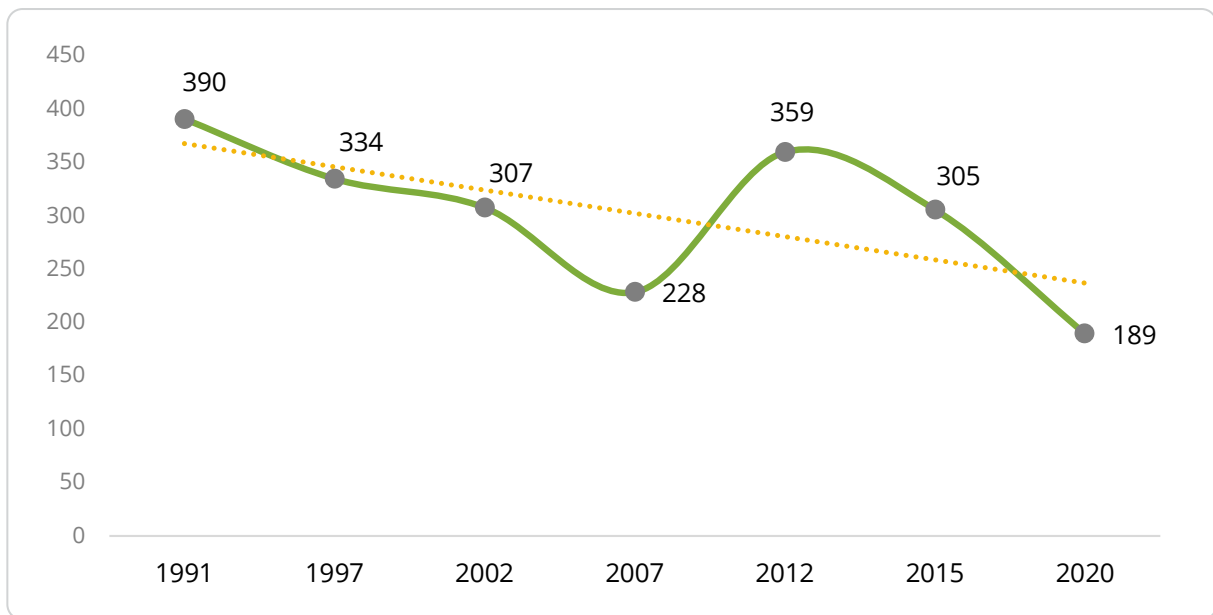
Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum, sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu merupakan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan program Kesehatan ibu. Angka Kematian Ibu yang terus menurun merupakan tujuan dari Pembangunan Kesehatan. Kematian ibu didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Sampai dengan saat ini Angka Kematian Ibu, masih didapatkan dari data Survei dan Sensus. Secara umum, terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2020 dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, masih diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SGDs yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

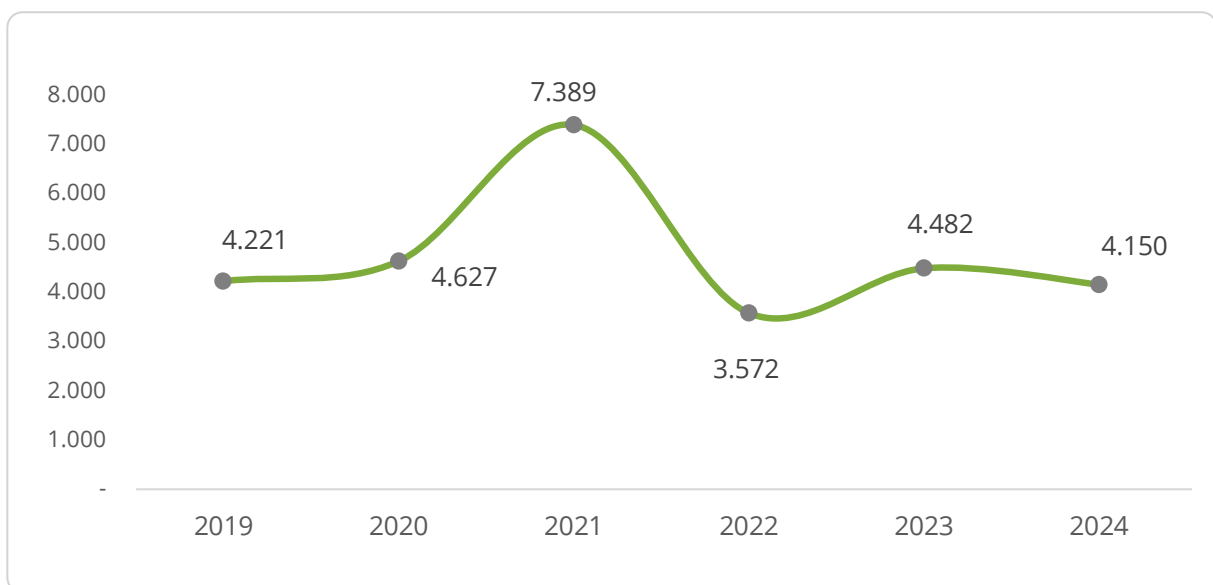
GAMBAR 5. 1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991 – 2020



Sumber: BPS, SDKI 1991-2012
*AKI tahun 2020 merupakan hasil SP 2020

Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program Kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan dari tahun 2019-2021 cenderung meningkat, sedangkan dari tahun 2021-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2022 ke 2023 meningkat, sedangkan jumlah kematian ibu dari tahun 2023 – 2024 menurun walaupun data pada tahun 2024 telah ditambahkan dengan data kematian ibu warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Jumlah Kematian Ibu tahun 2024 secara keseluruhan adalah 4.151 seperti tampak pada gambar di bawah ini.

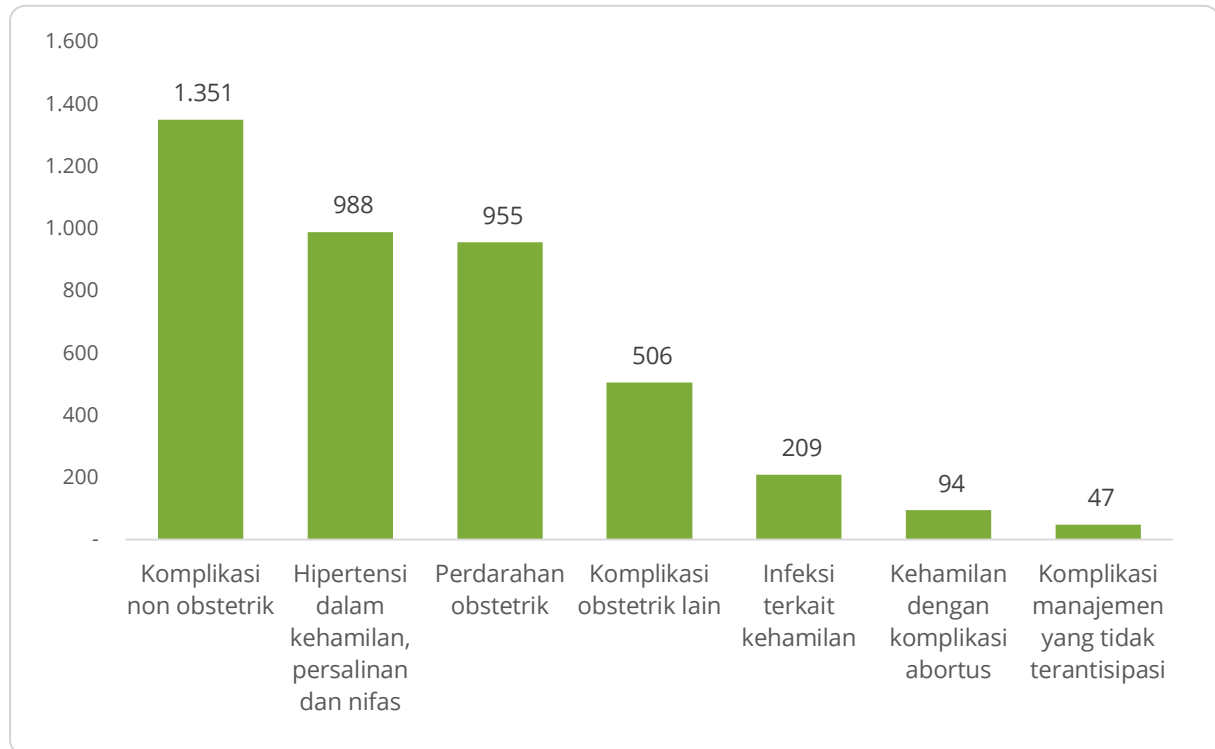
GAMBAR 5. 2
JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2019 – 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2024 adalah komplikasi nonobstetrik dalam kehamilan sebanyak 1.351 kasus, diikuti oleh hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas sebanyak 988 kasus dan perdarahan obstetrik sebanyak 955 kasus. Jumlah kematian ibu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 23.

GAMBAR 5. 3
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS), pemberian tablet tambah darah, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu nifas, puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana (KB), dan pemeriksaan HIV, sifilis, serta Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

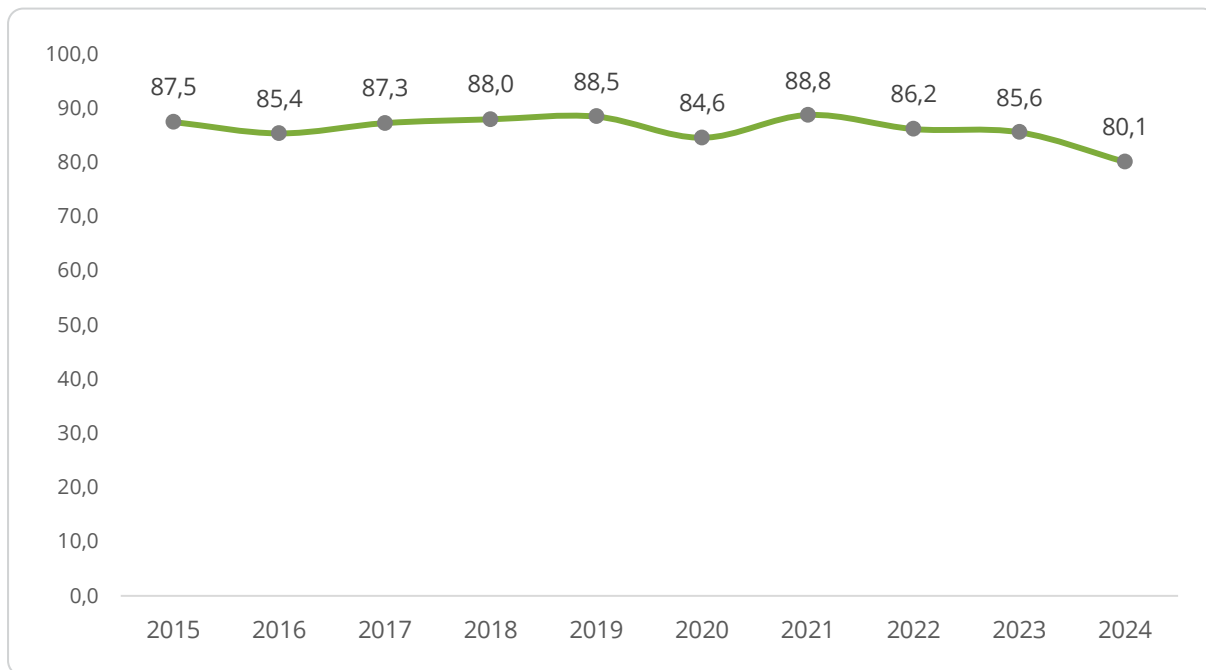
1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
6. Skrining status imunisasi tetanus (TT) dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan.
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
8. Pelayanan tes laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) dan malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti: glukosa-protein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini thalasemia dan pemeriksaan lainnya.
9. Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan.
10. Pelaksanaan Temu wicara (konseling) untuk menyampaikan informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.

Pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dengan dua kali pemeriksaan USG oleh dokter. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 2 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu), dan 3 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya) serta minimal dua kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester satu dan saat kunjungan ke-5 di trimester tiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K4 dan K6. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Gambar berikut ini menampilkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sepuluh tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024.

GAMBAR 5. 4
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2024

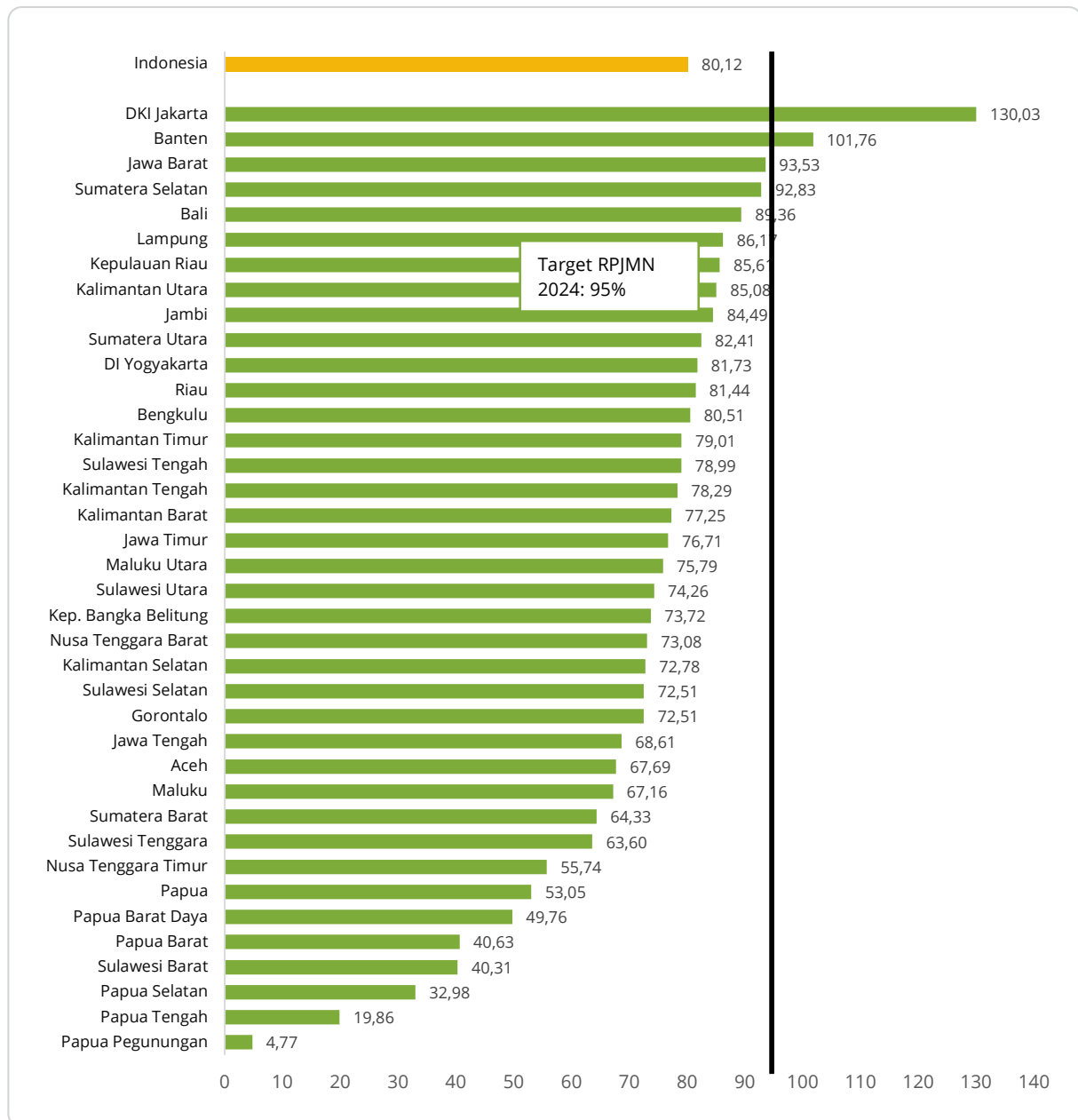


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2024, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 angka K4 sebesar 85,6%, dimana angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2024, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 80,1%.

Gambaran cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2024 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

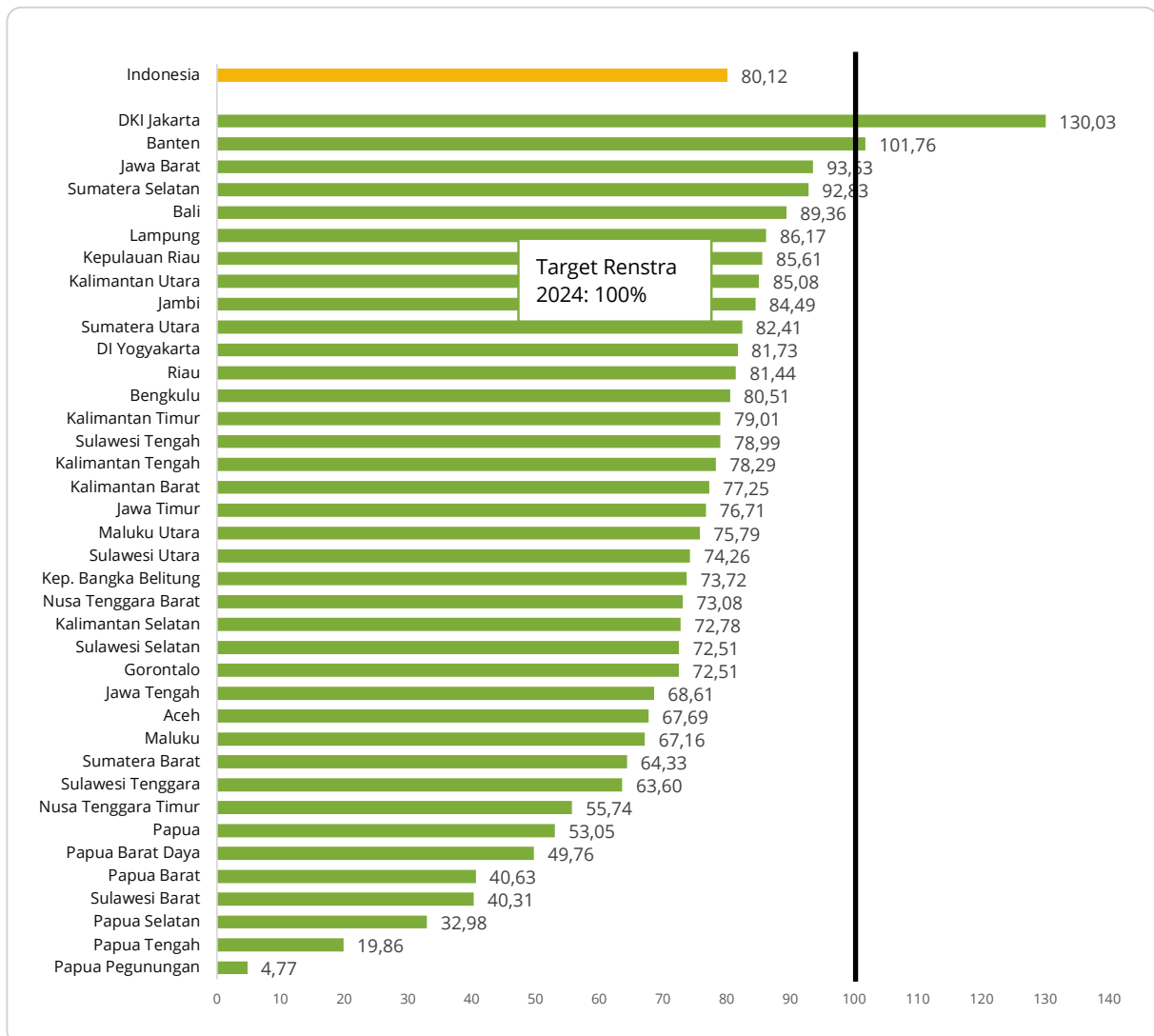
GAMBAR 5. 5
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Pelayanan kesehatan ibu hamil K4 secara nasional pada tahun 2024 sebesar 80,12%, hampir dan belum mencapai target RPJMN sebesar 95%. Terdapat dua provinsi yang sudah mencapai target RPJMN 95%. Gambaran provinsi tertinggi terdapat di DKI Jakarta 130,03%, diikuti oleh Banten sebesar 101,76%.

GAMBAR 5. 6
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6 MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K6) pada tahun 2024 di Indonesia sebesar 75,64% dengan provinsi tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 120,90%, diikuti Kalimantan Tengah sebesar 100%, dan Banten sebesar 98,39%. Hanya 2 provinsi sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 100%. Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil yang harus diberikan saat kunjungan, dan pemerataan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten di seluruh Indonesia. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K4 dan K6 terdapat pada Lampiran 24.

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS)

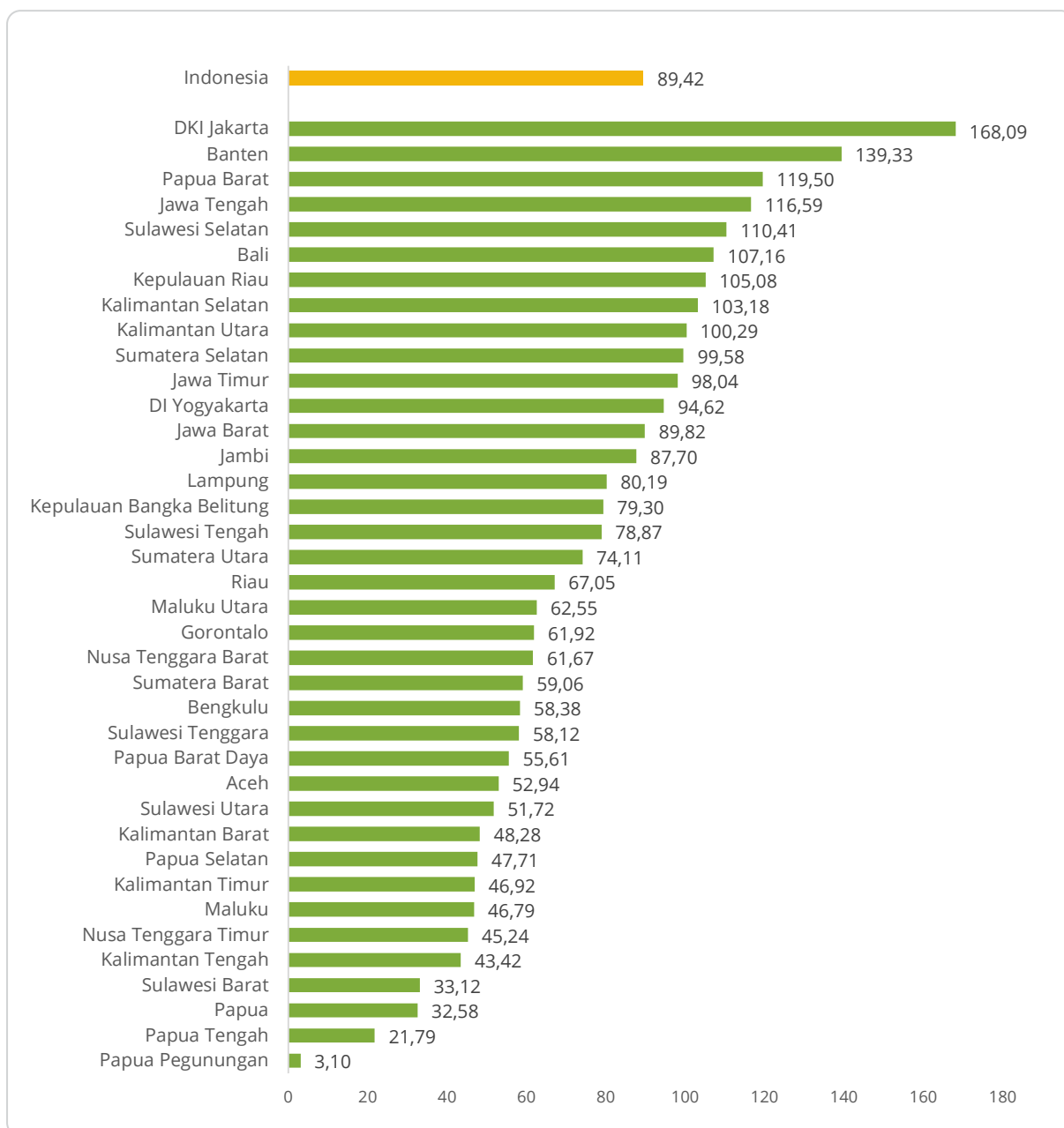
Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi serta memberikan perlindungan tambahan terhadap penyakit difteri, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur (khususnya ibu hamil) merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil skrining penilaian status T yang dimulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal, atau pelayanan kesehatan di posyandu.

Skrining status "T" pada WUS harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan status WUS telah mencapai T5, yang dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, kohort, atau buku register imunisasi lainnya. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan imunisasi Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi T2+.

Imunisasi T2+ merupakan prasyarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4. Namun, bila dibandingkan antara gambar 5.5 dan gambar 5.8 cakupan imunisasi T2+ pada ibu hamil tahun 2024 sebesar 71,11%, angka ini lebih rendah dibandingkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 yang sebesar 80,12%, hal ini dapat diartikan bahwa ibu hamil yang sudah menjalani pemeriksaan kehamilan (K4), tidak semuanya mendapatkan imunisasi T2+.

GAMBAR 5. 7
CAKUPAN IMUNISASI TETANUS TOXOID 2+ (T2+) PADA IBU HAMIL DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

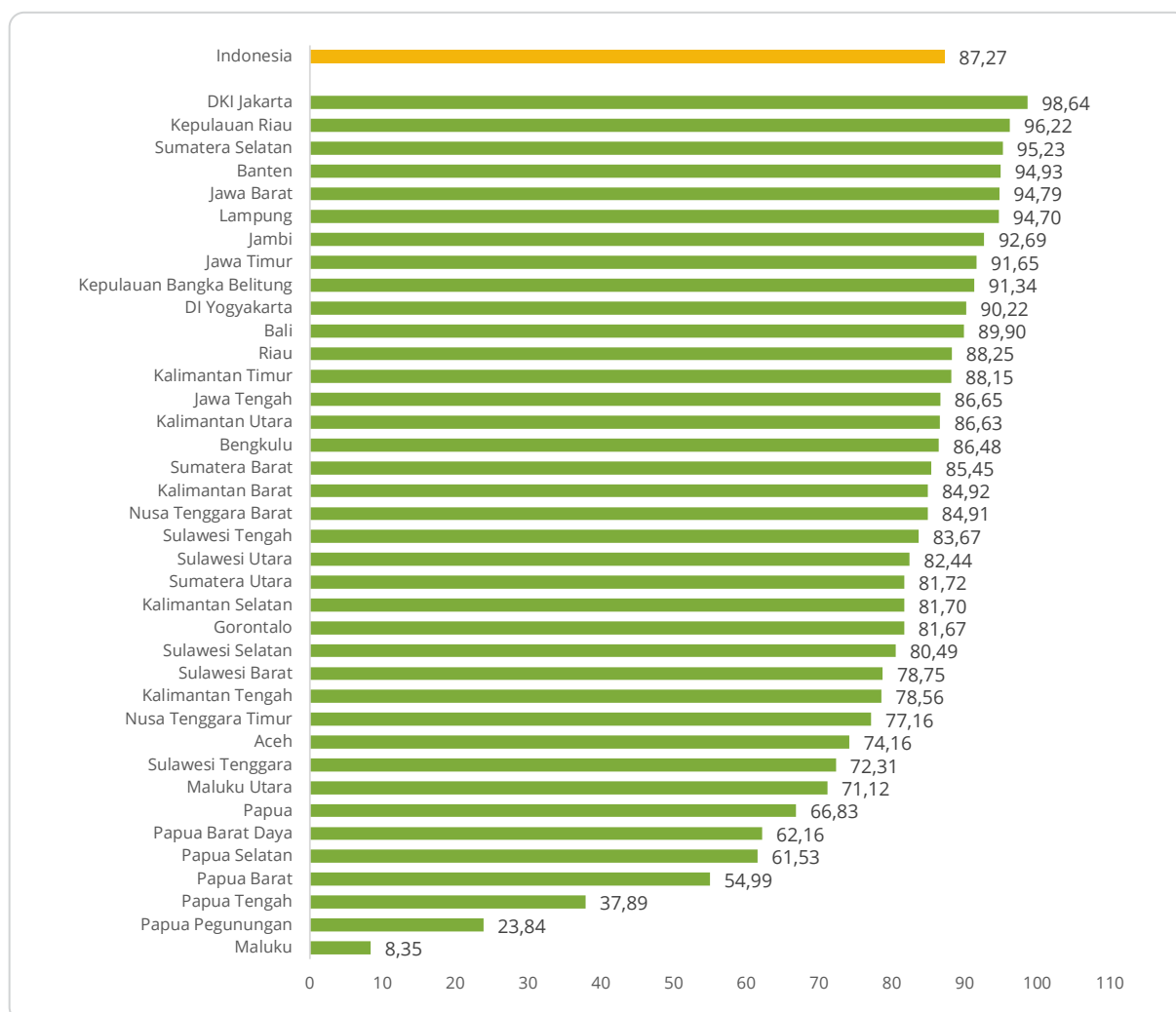
Berdasarkan distribusi provinsi, DKI Jakarta memiliki cakupan tertinggi sebesar 168,09% diikuti oleh Banten sebesar 139,33%, dan Papua Barat sebesar 119,50%. Provinsi dengan cakupan rendah yaitu Papua sebesar 32,58%, Papua Tengah sebesar 21,79%, dan Papua pegunungan sebesar 3,10%. Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur terdapat pada Lampiran 25-27.

3. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi zat besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 27,7% ibu hamil mengalami anemia. Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, ibu hamil mengalami anemia paling tinggi pada kelompok umur 35-44 sebesar 39,6%, diikuti kelompok umur 25-34 sebesar 31,4%. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 Tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD minimal 90 Tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2024 adalah 87,27%. Angka ini meningkat sedikit dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 87,23%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,64%, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 96,22%, dan Sumatera Selatan sebesar 95,23%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Maluku sebesar 8,35% dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar 23,84%. Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28a.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

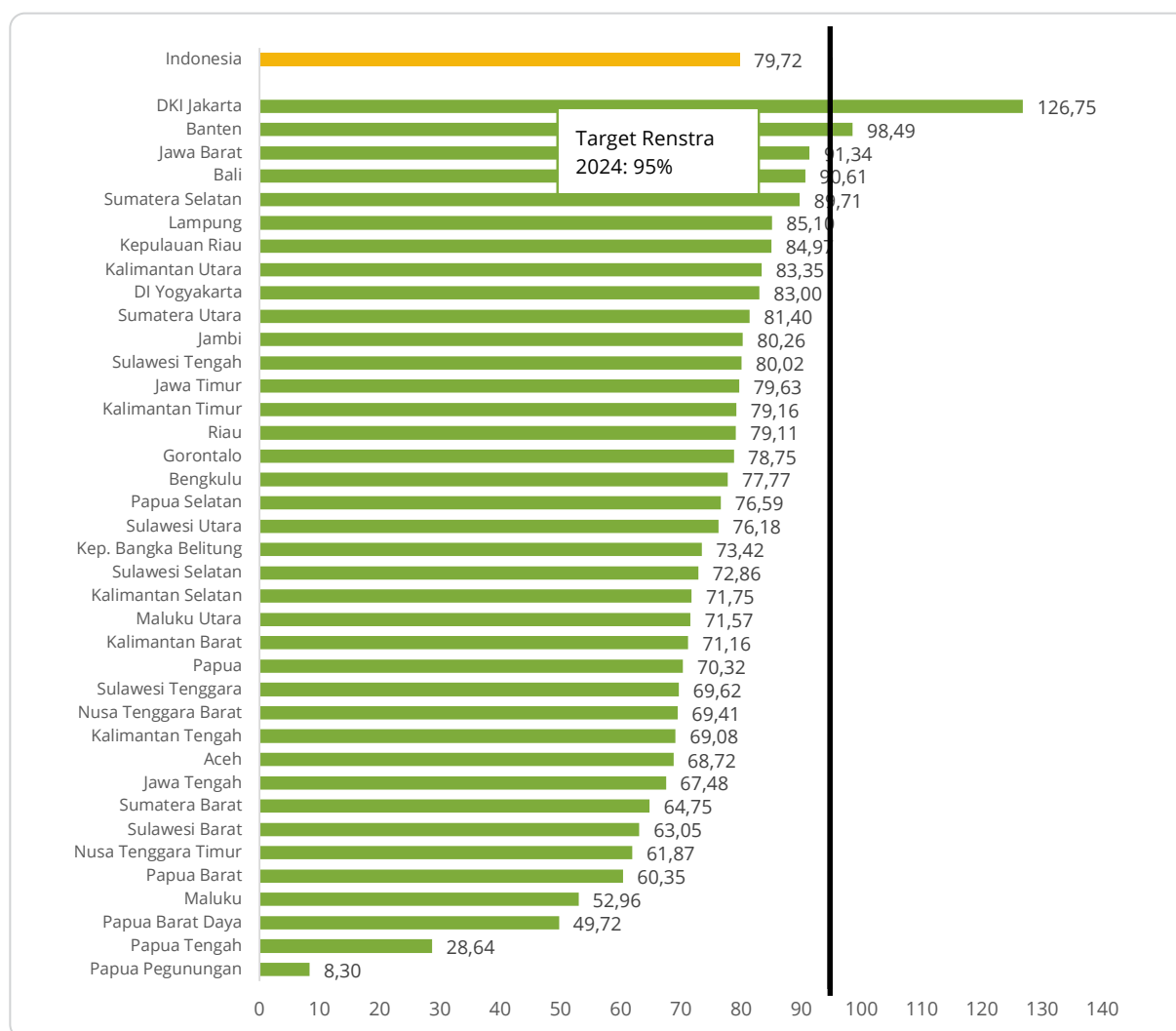
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan, dan perawat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.9 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 38 provinsi di Indonesia tahun 2024

GAMBAR 5. 9
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2024 di Indonesia sebesar 79,72%. Bila dilihat berdasarkan target Renstra 2024 sebesar 95%, maka persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2024 belum mencapai target Renstra 2024. Provinsi dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 126,75%, Banten sebesar 98,49%, dan Jawa Barat sebesar 91,34%. Sementara cakupan terendah di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 49,72%, Papua Tengah sebesar 28,64% dan Papua Pegunungan sebesar 8,30%.

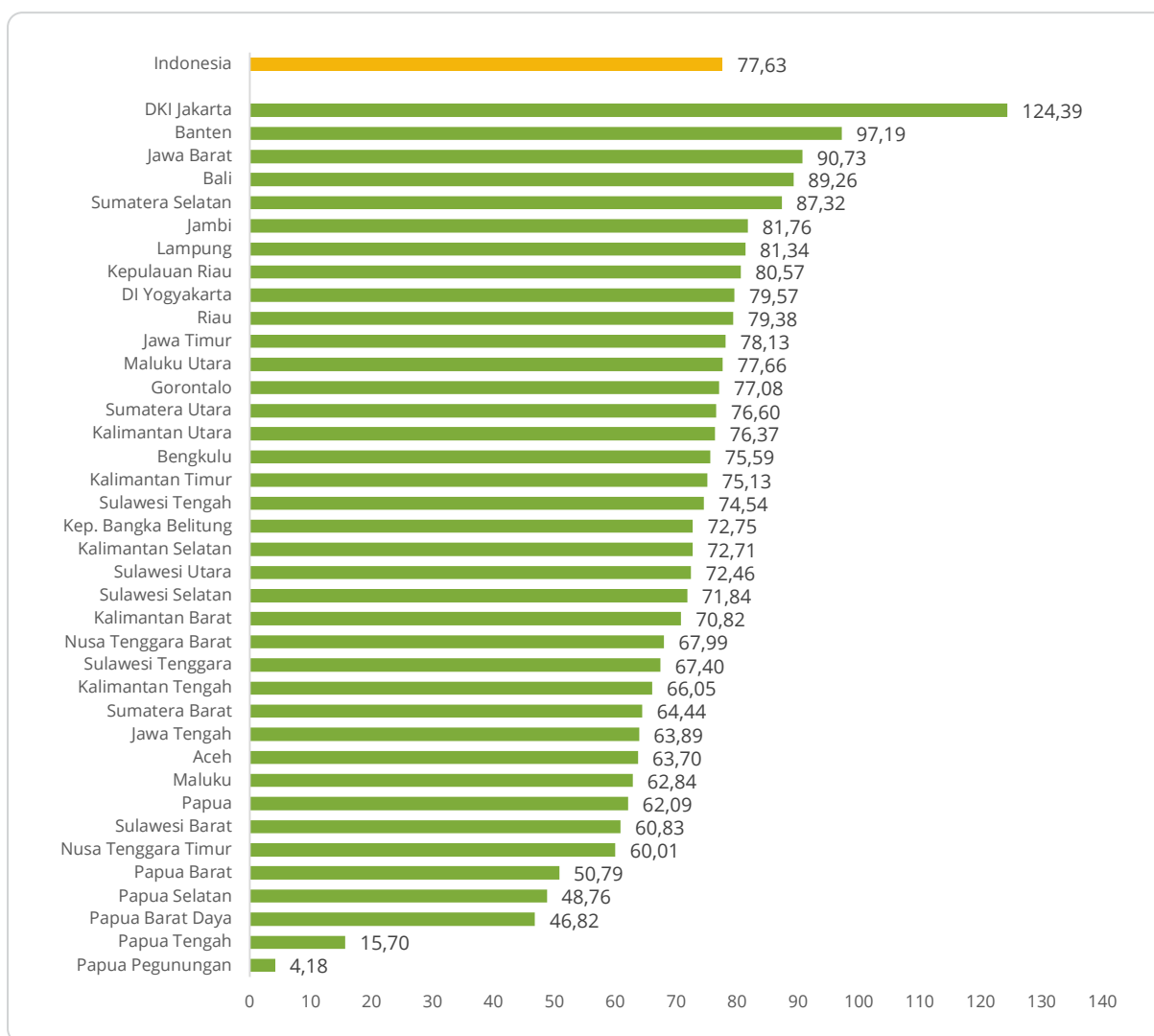
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

1. Anamnesis;
2. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
3. Pemeriksaan tanda-tanda anemia;
4. Pemeriksaan tinggi *fundus uteri*;
5. Pemeriksaan kontraksi *uteri*;
6. Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
7. Pemeriksaan *lokhia* dan perdarahan;
8. Pemeriksaan jalan lahir;
9. Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Eksklusif;
10. Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
11. Pemeriksaan status mental ibu;
12. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
13. Pemberian KIE dan konseling;
13. 14. Pemberian kapsul vitamin A.
14. Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap).

Cakupan kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.10 berikut ini.

GAMBAR 5. 10
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Cakupan kunjungan KF lengkap di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 77,63%, dimana provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 124,39%, Banten sebesar 97,19%, dan Jawa Barat sebesar 90,73%. Provinsi yang memiliki cakupan terendah antara lain Papua Barat Daya dengan 27,7%, Papua Tengah sebesar 15,70% dan Papua Pegunungan sebesar 4,18%.

6. Pelayanan Kontrasepsi

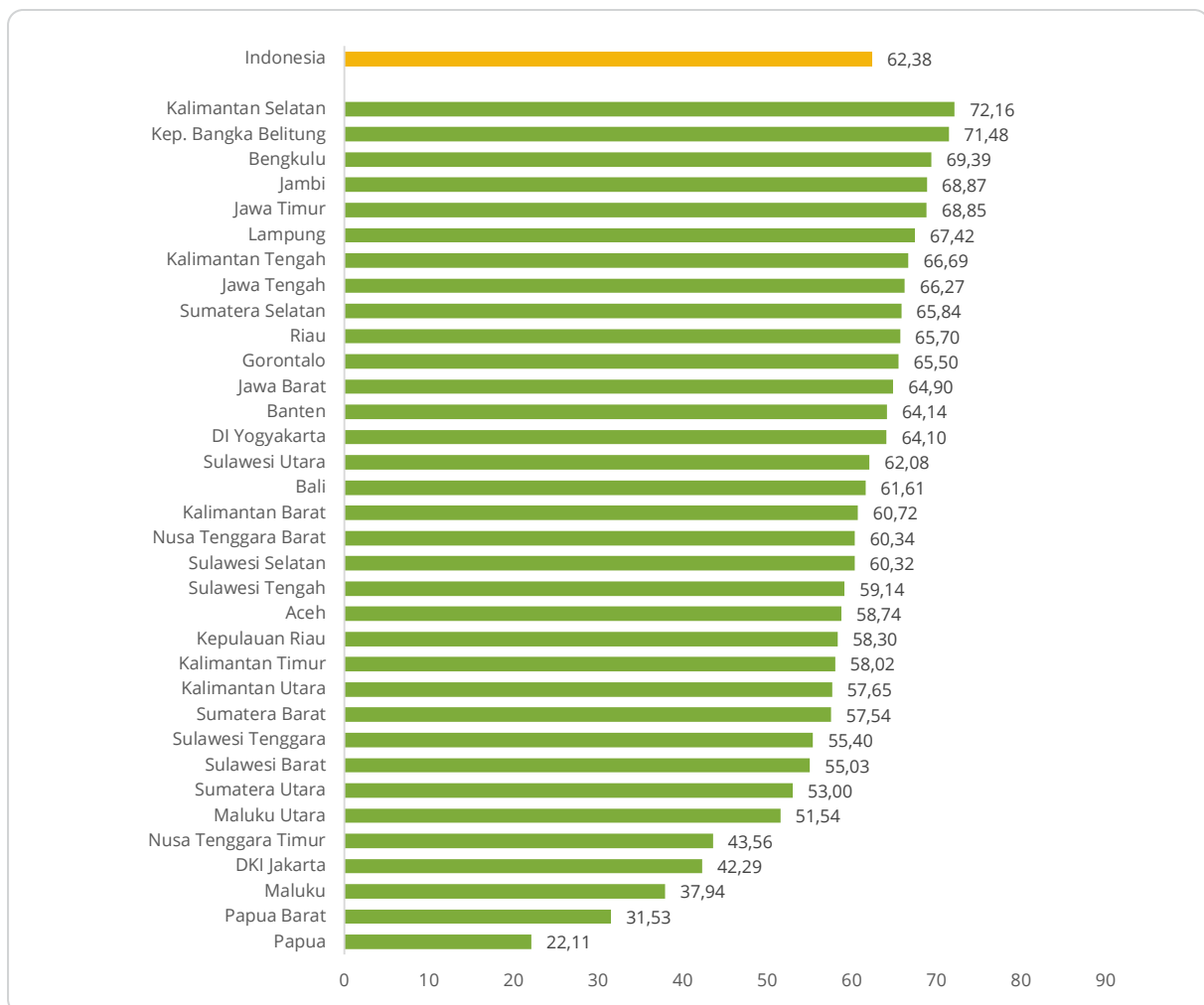
Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui:

1. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan;
2. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas; dan

3. Mencegah terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (menggunakan alat/obat/cara KB berupa steril wanita (MOW), steril pria (MOP), IUD/AKDR), implan/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL) dan peserta KB tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, senggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya).

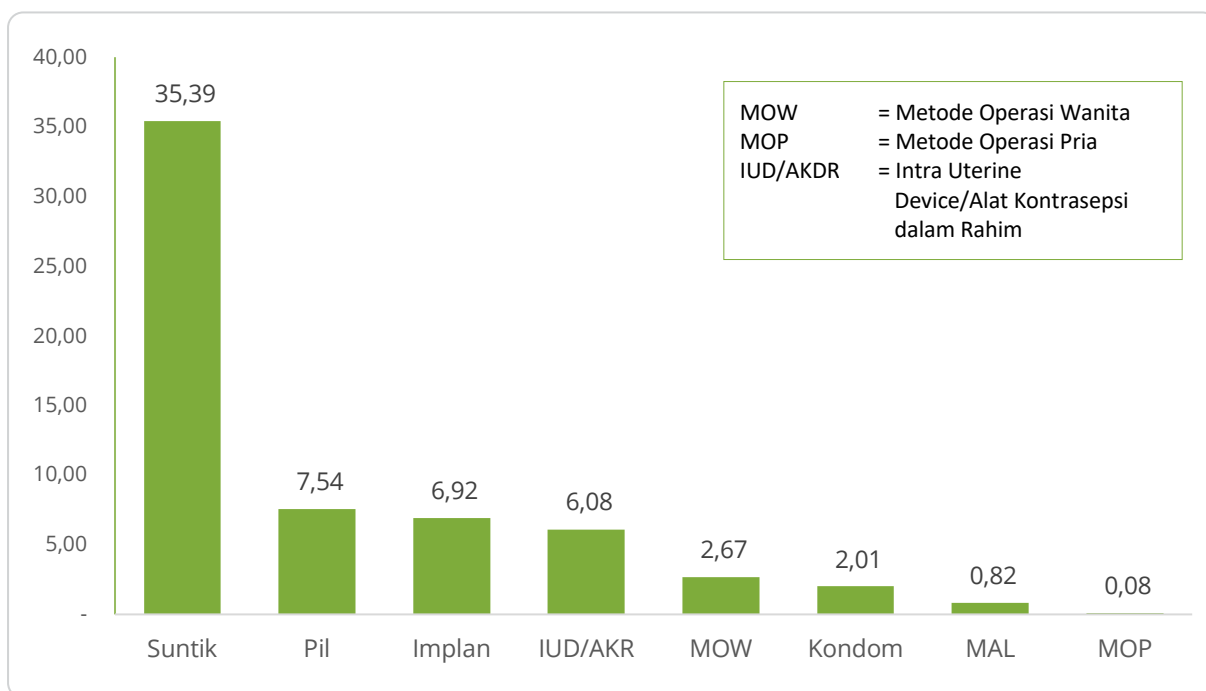
GAMBAR 5. 11
PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (dengan *weighting*), BKKBN

Menurut hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024 oleh BKKBN, menunjukkan bahwa angka prevalensi PUS peserta KB di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 62,38%. Berdasarkan distribusi provinsi, angka prevalensi pemakaian KB tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan (72,16%), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (71,48%), dan Provinsi Bengkulu (69,39%), sedangkan terendah adalah Papua (22,11%), Papua Barat (31,53%) dan Maluku (37,94%). Data angka prevalensi PUS peserta KB Provinsi Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain itu, Data angka prevalensi PUS peserta KB Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya.

GAMBAR 5. 12
PERSENTASE PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI
DI INDONESIA TAHUN 2024

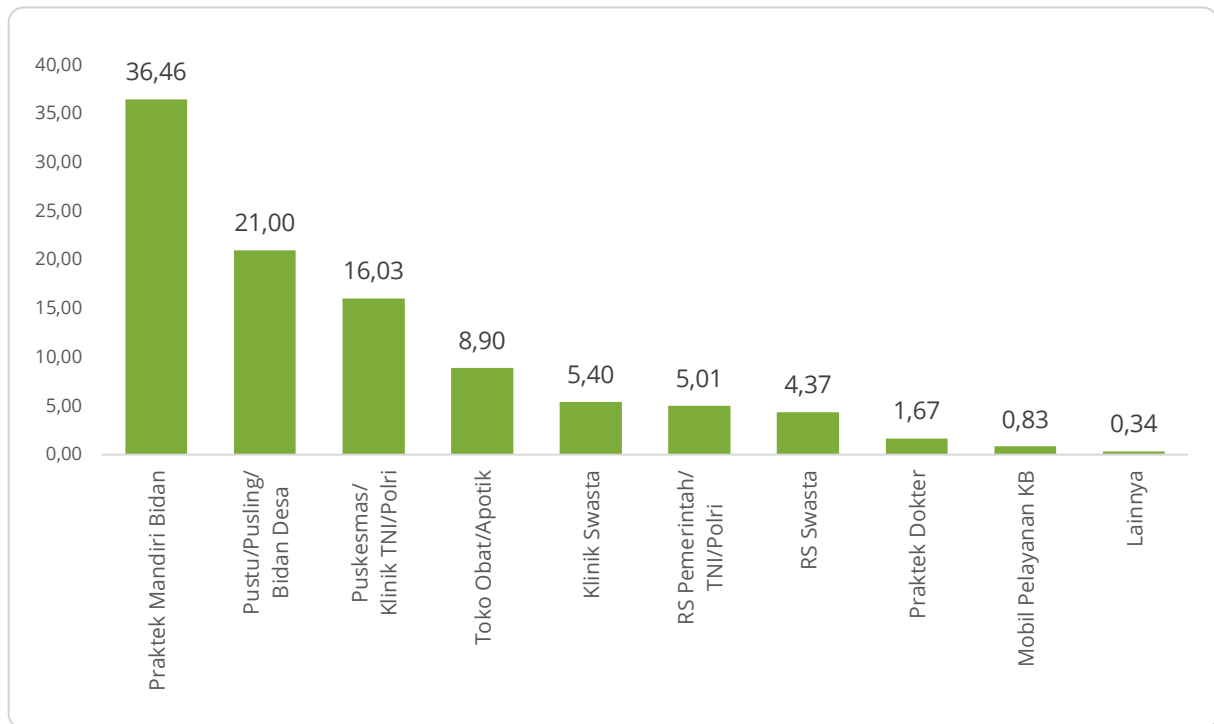


Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (dengan *weighting*), BKKBN

Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebesar 35,39%, diikuti pil sebesar 7,54%. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat/obat/cara KB ini (suntik dan pil) termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek sehingga tingkat efektivitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama (lebih dari dua tahun), efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk MKJP yaitu IUD/AKDR, Implan, MOP dan MOW.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi PUS dengan tujuan membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. PUS bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.13 berikut ini.

GAMBAR 5.13
JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (dengan *weighting*), BKKBN

Berdasarkan tempat pelayanan KB, PUS paling banyak dilayani oleh praktek mandiri bidan sebesar 36,46%, kemudian Pustu/Pusling/Bidan Desa (21,00%), dan Puskesmas/Klinik TNI/Polri (16,03%).

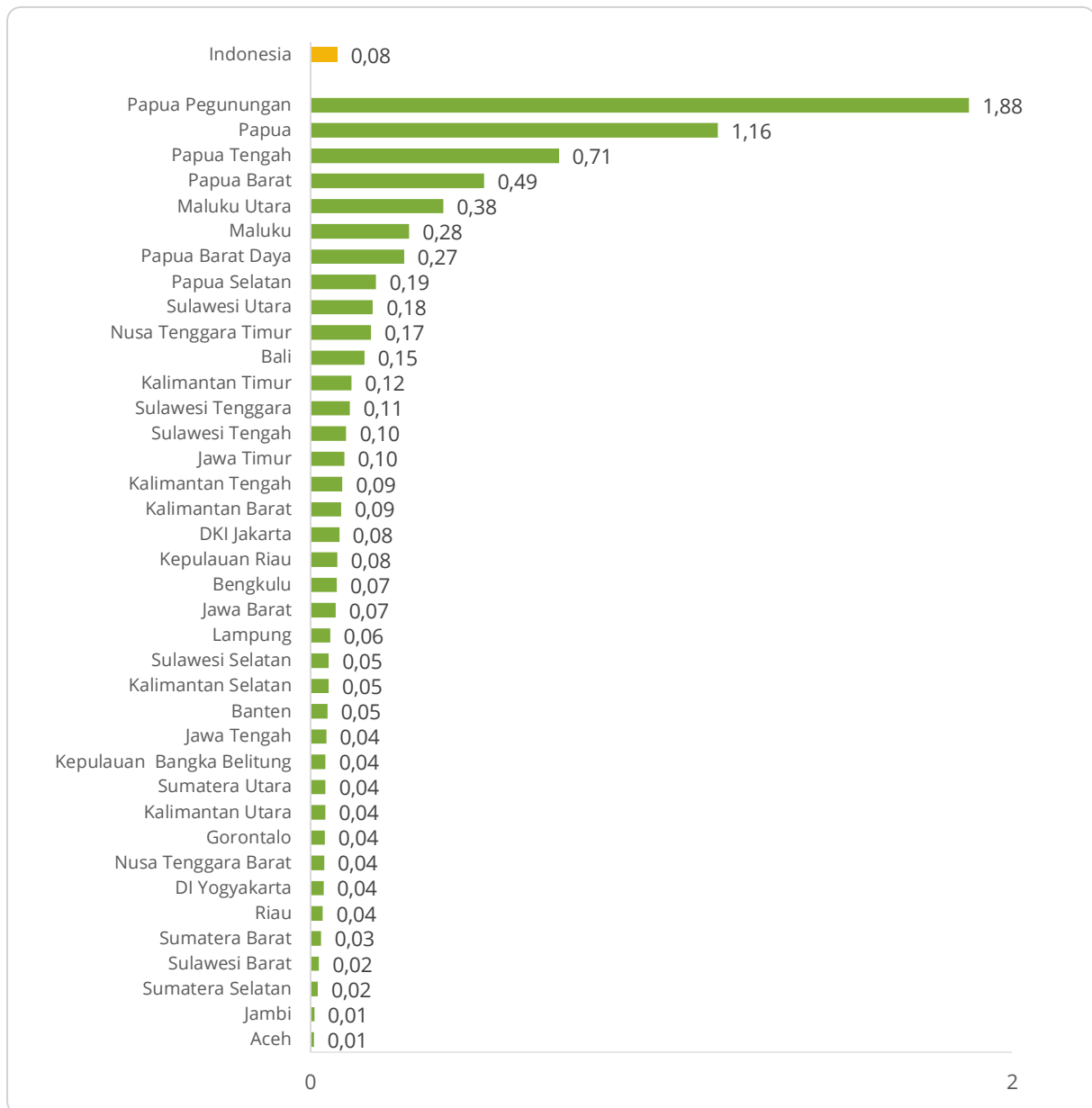
7. Pemeriksaan HIV, Hepatitis B, dan Sifilis pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Pada tahun 2024 terdapat 3.389.523 ibu hamil yang di periksa HIV di Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 2.584 (0,08%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan sebesar 1,88%, Papua sebesar 1,16% dan Papua Tengah sebesar 0,71%. Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 27.b

GAMBAR 5.14
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

b. Hepatitis B

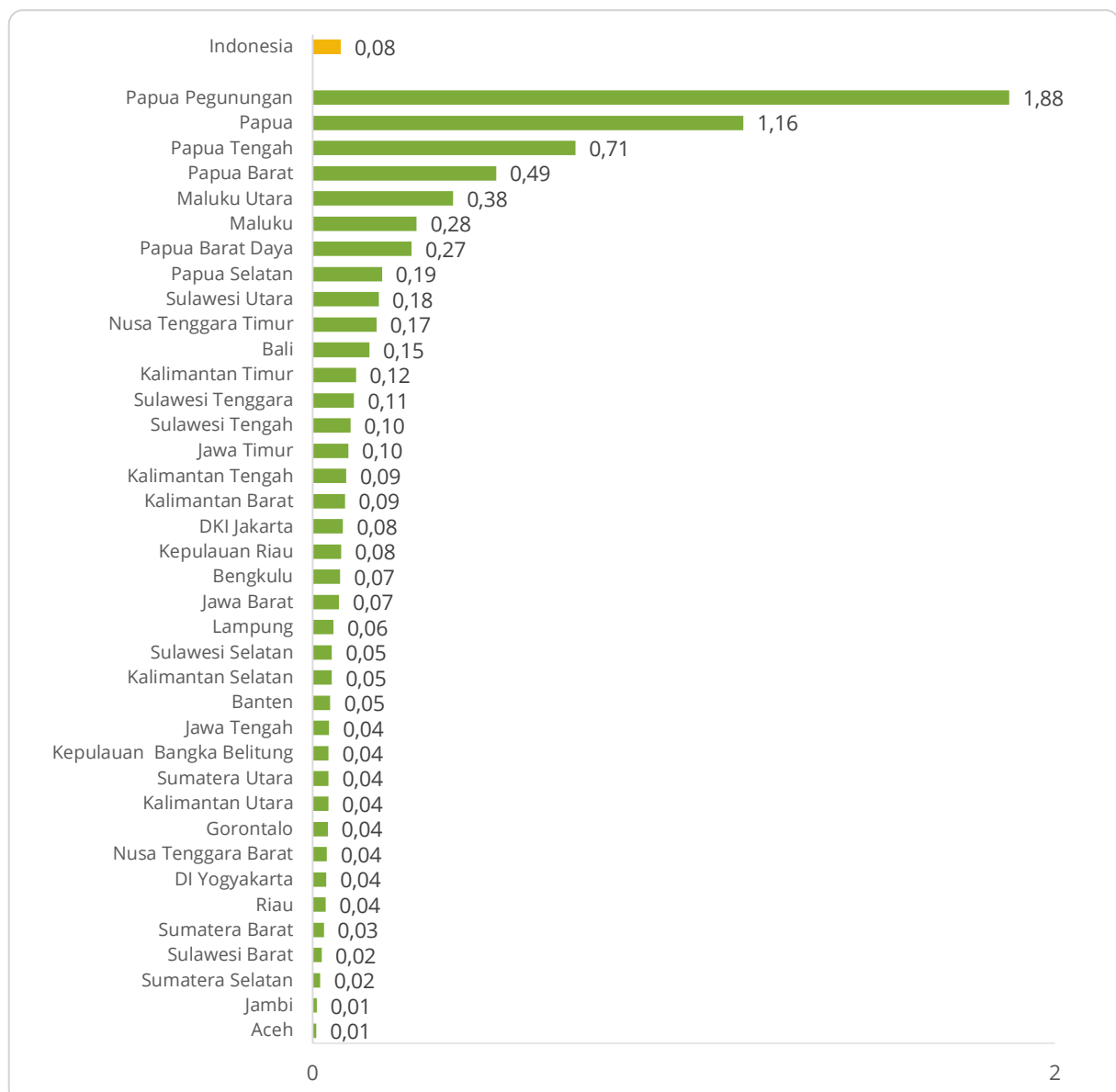
Penularan virus Hepatitis B secara umum terjadi secara vertikal (dari ibu yang positif menderita Hepatitis B kepada bayinya) dan horizontal (dari individu yang positif menderita Hepatitis B kepada individu lainnya). Pada daerah endemik seperti Indonesia penularan Hepatitis B umumnya terjadi secara vertikal terutama saat masa perinatal dan 95% bayi yang tertular saat masa perinatal akan menjadi Hepatitis B kronik.

Untuk mencegah penularan dari ibu ke anak tersebut telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya dengan melakukan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil menggunakan tes cepat/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) Hepatitis B *Surface* Antigen (HBsAg). HBsAg merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus Hepatitis B yang memberikan arti

adanya infeksi Hepatitis B. DDHB bertujuan menemukan sedini mungkin ibu hamil terinfeksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif), kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian upaya terhadap bayi dari ibu terdeteksi HBsAg Reaktif tersebut yang didahului dengan pemberian Vitamin K1, diikuti dengan vaksin Hepatitis B (HB0) dan HBIg (Hepatitis B *Imunoglobulin*) sebelum 24 Jam kelahiran. HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Persentase ibu hamil melaksanakan DDHB pada tahun 2024 menurut provinsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana sebesar 69,76% ibu hamil melaksanakan DDHB. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 68,4%. Provinsi dengan capaian tertinggi, yaitu Banten sebesar 101,07% DKI Jakarta sebesar 100,33%, dan Sumatera Selatan sebesar 93,70%.

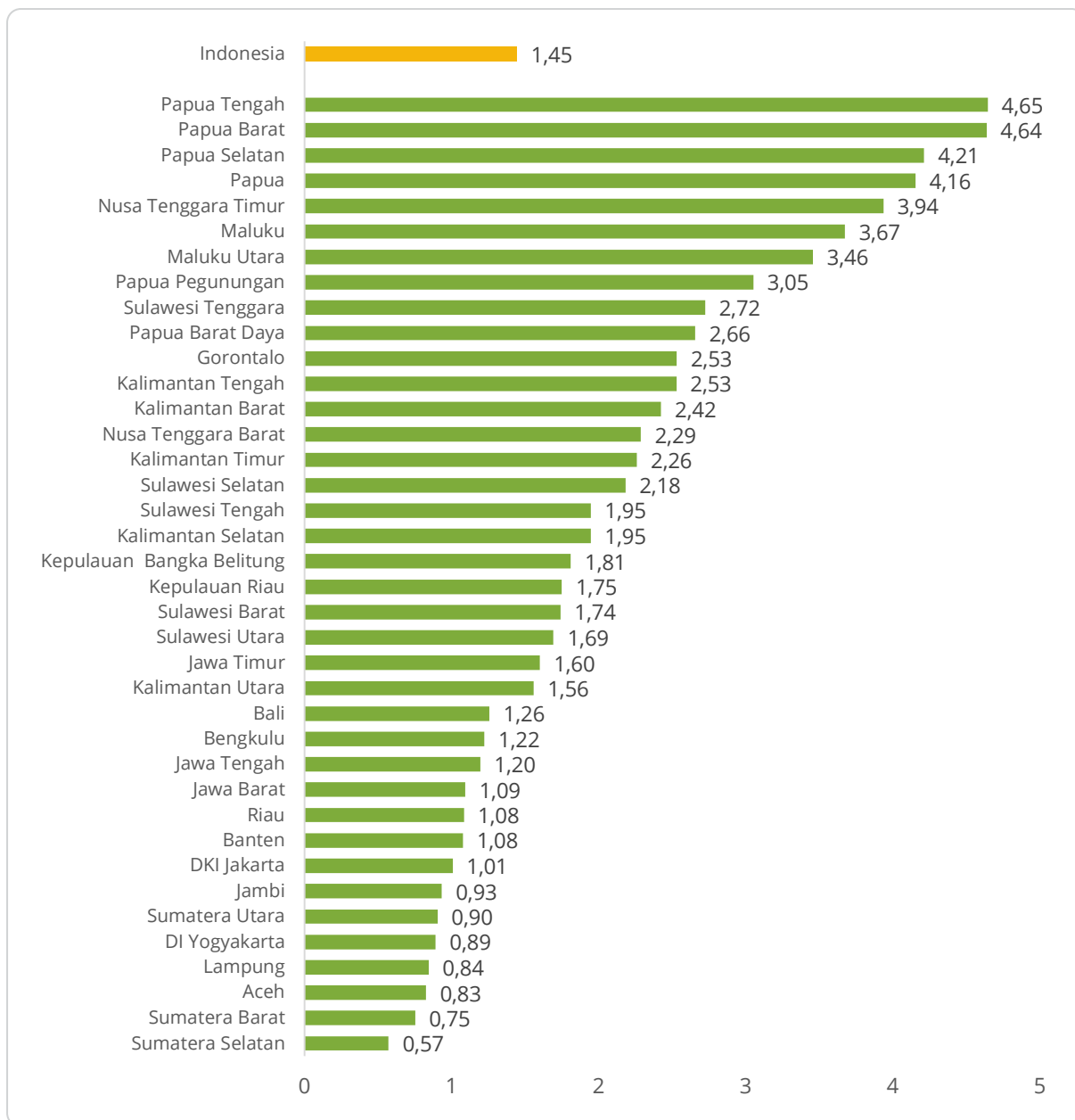
GAMBAR 5. 15
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Jumlah Ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B dengan menggunakan RDT HBsAg tahun 2024, yaitu sebanyak 3.396.010 orang dari 4.867.979 ibu hamil yang menjadi sasaran. Hasil pemeriksaan RDT HBsAg tahun 2024 menemukan sebanyak 59.097 atau 1,45% ibu hamil menunjukkan hasil reaktif.

GAMBAR 5. 16
PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



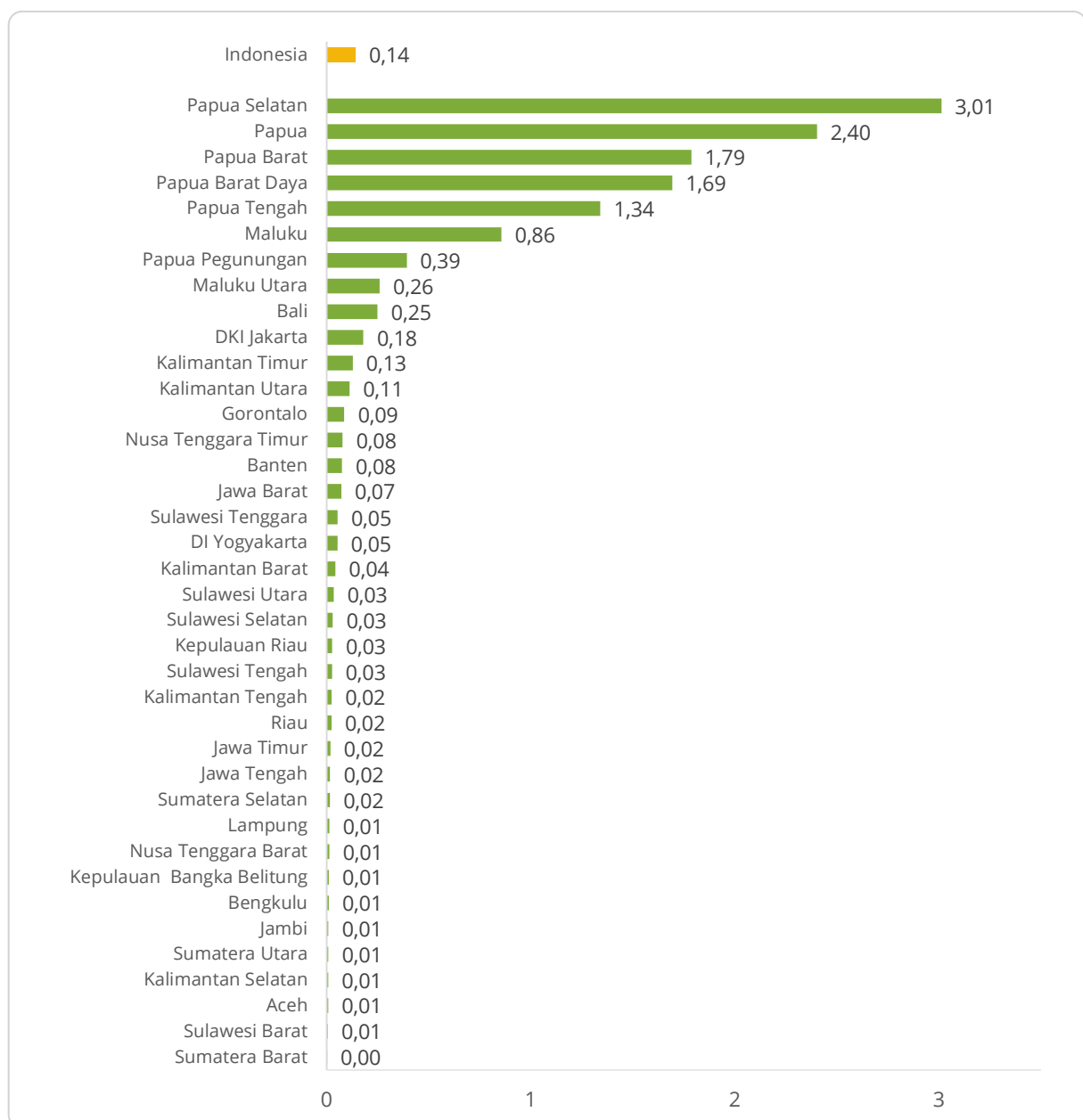
Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada gambar di atas, terlihat bahwa provinsi dengan ibu hamil yang hasil tesnya menunjukkan HBsAg reaktif tertinggi terdapat di Provinsi Papua Tengah dengan 4,65%, diikuti dengan Provinsi Papua Barat sebesar 4,64%, dan Provinsi Papua Selatan sebesar 4,21%. Data terkait deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 27.c.

c. Sifilis

Sifilis merupakan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang disebabkan oleh kuman *Treponema pallidum*. Apabila penyakit ini mengenai ibu hamil, maka kuman dapat ditularkan ke bayi melalui plasenta atau pada saat bersalin dan dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati, serta sifilis kongenital pada bayi. Semakin awal terjadi infeksi, risiko penularan ke bayi akan semakin tinggi. Pada perempuan yang telah menderita sifilis dalam beberapa tahun, hampir separuhnya dapat berpengaruh pada kehamilannya. Dari angka tersebut, separuhnya dapat berakibat lahir mati termasuk keguguran dan separuhnya lagi berakibat kematian perinatal atau kongenital sifilis dan BBLR. Oleh karena itu, ibu hamil diperiksa sifilis merupakan upaya program kesehatan untuk mencegah dampak yang lebih buruk.

GAMBAR 5. 17
PERSENTASE IBU HAMIL POSITIF SIFILIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

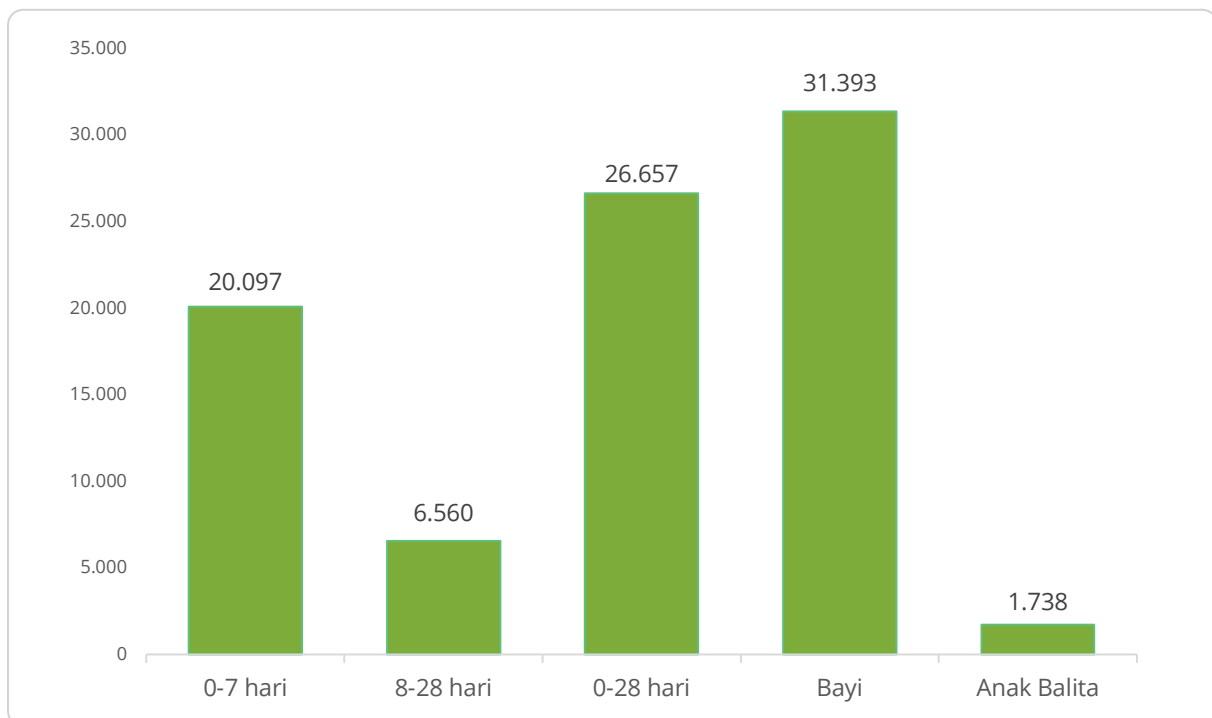
Pada tahun 2024 sebanyak 62,90% ibu hamil yang menjalani pemeriksaan Sifilis, dimana sebesar 0,14% ibu hamil dinyatakan positif dari keseluruhan target ibu hamil yang diperiksa sifilis. Provinsi dengan ibu hamil positif sifilis tertinggi adalah Provinsi Papua Selatan dengan persentase sebesar 3,01%, diikuti oleh Provinsi Papua sebesar 2,4% dan Provinsi Papua Barat sebesar 1,79%. Sumatera Barat merupakan provinsi dengan tingkat positif terendah, diikuti dengan Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Lampung. Data rinci terkait pemeriksaan Sifilis pada ibu hamil menurut provinsi terdapat pada Lampiran 27.d.

B. KESEHATAN ANAK

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya kesehatan anak dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya ini dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan dan kualitas hidup anak melalui upaya penurunan angka kematian, perbaikan gizi, pemenuhan standar pelayanan minimal pada bayi baru lahir, bayi, dan balita.

Tren Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia sudah mengalami penurunan, namun masih memerlukan upaya percepatan dan upaya untuk mempertahankan agar target 16/1000 kelahiran hidup dapat tercapai di akhir tahun 2024.

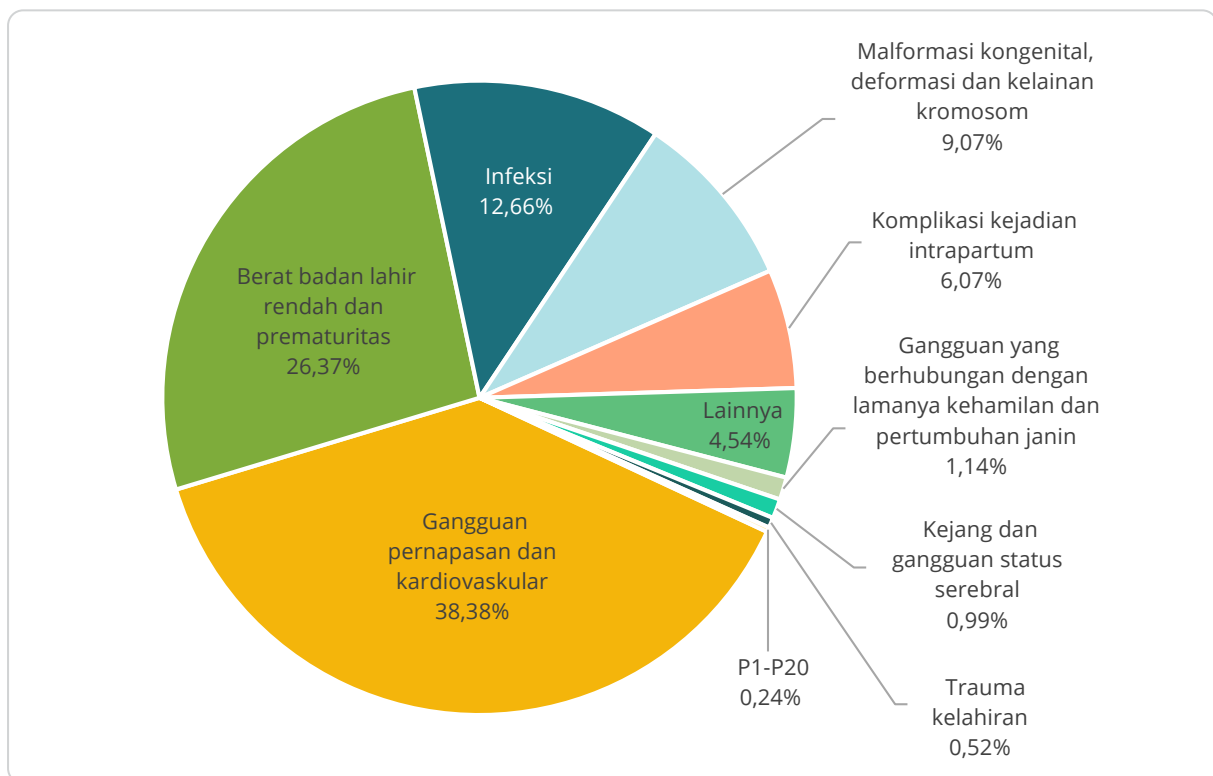
GAMBAR 5.18
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Seperti yang terlihat pada gambar 5.18 di atas, total kematian bayi dan anak balita adalah sebanyak 33.131 kematian. Sebagian besar kematian terjadi pada masa neonatal (0-7 hari) sebanyak 26.657 kematian (80,46%) dan kematian neonatal (8-28 hari) sebanyak 6.560 kematian (19,80%) dan Balita sebanyak 1.738 kematian (5,25%). Jumlah ini menurun dibandingkan dengan jumlah kematian balita pada tahun 2023 yang berjumlah 34.266 kematian.

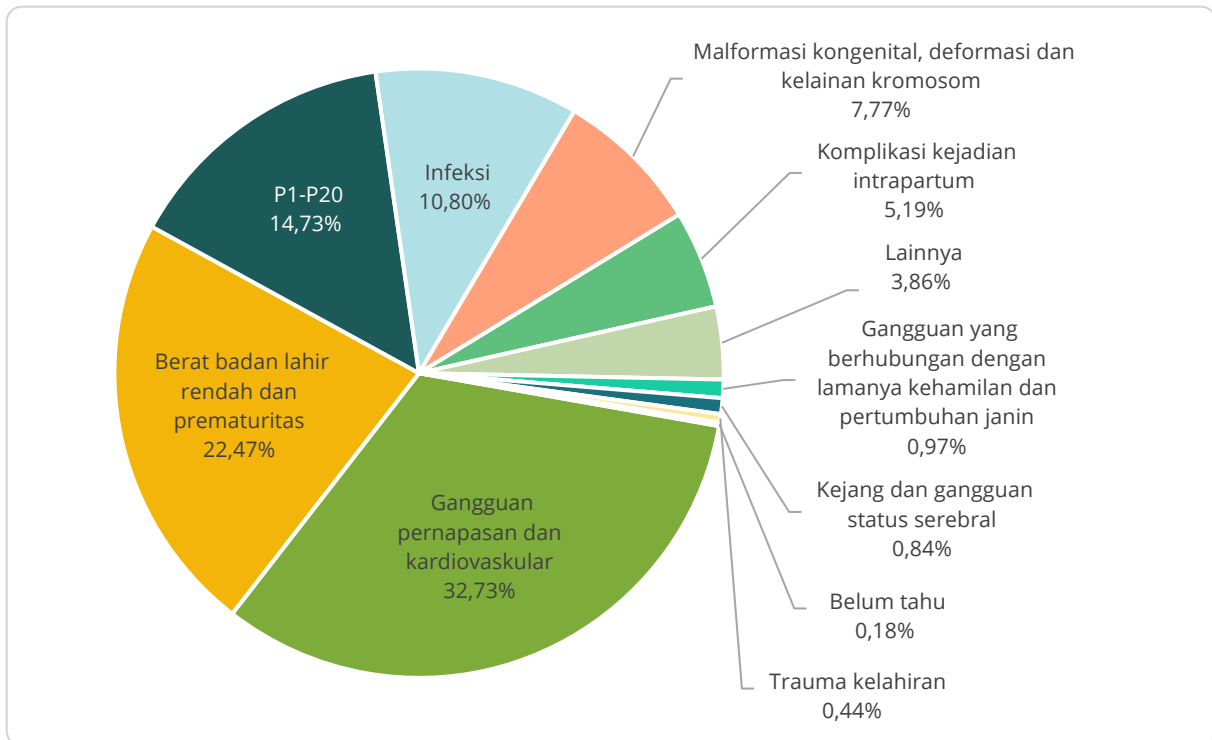
GAMBAR 5.19
PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Gambar 5.19 di atas menerangkan bahwa pada masa neonatal, penyebab kematian terbanyak pada tahun 2024 adalah gangguan pernapasan dan kardiovaskular sebesar (38,38%) dan kondisi berat badan lahir rendah dan prematuritas (26,37%). Penyebab kematian lainnya adalah infeksi (12,66%), malformasi, kongenital, deformasi dan kelainan kromosom (9,07%), Komplikasi kejadian intrapartum (6,07%), gangguan yang berhubungan dengan lamanya kehamilan dan pertumbuhan janin (1,14%), kejang dan gangguan status serebral (0,99%), trauma kehamilan (0,52%), P1-P2 (0,24%), serta untuk kondisi neonatal lainnya, kondisi neonatal yang tidak dapat diketahui secara spesifik, belum dan tidak diketahui penyebabnya sebesar, dan ragam dimasukkan ke dalam penyebab kematian lainnya yang mencapai 4,54%.

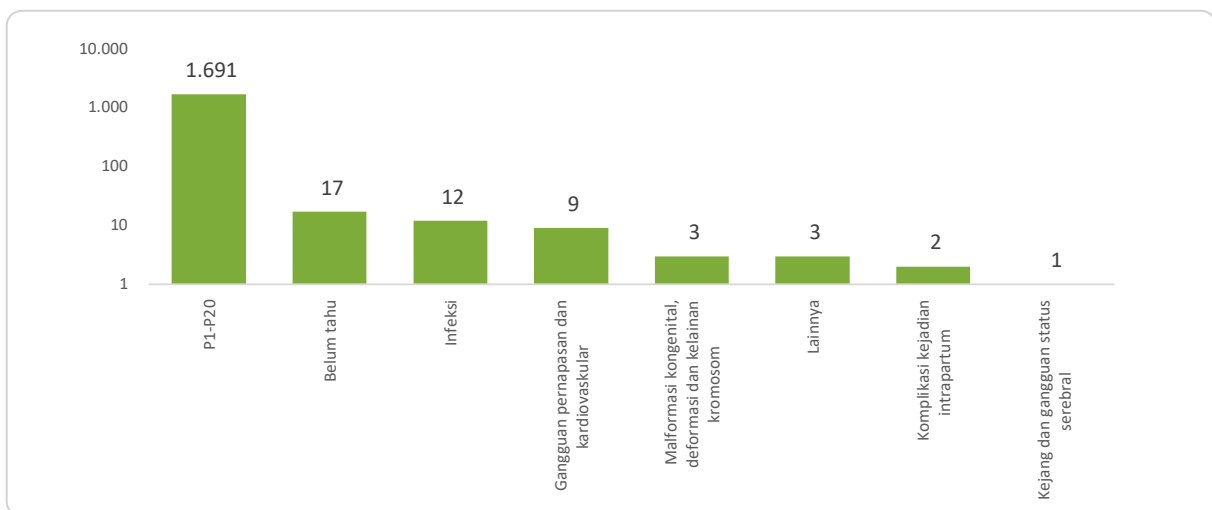
GAMBAR 5.20
PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Seperti Gambar 5.20 di atas, penyebab kematian terbesar pada post neonatal adalah Gangguan pernapasan dan kardiovaskular (32,73%), kondisi Berat Badan Lahir Rendah & Prematuritas (22,47%), P1-P20 (14,73%), Infeksi (10,80%), Malformasi, kongenital, deformasi dan kelainan kromosom (7,77%), Komplikasi kejadian Intrapartum (5,19%), Gangguan yang berhubungan dengan lamanya kehamilan dan pertumbuhan janin (0,97%), Kejang dan gangguan status serebral (0,84%), dan trauma kelahiran 0,45%, belum diketahui sebabnya sebanyak 0,18%, dan penyebab lainnya sebanyak 3,86%.

GAMBAR 5.21
PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Gambar 5.21 di atas, Penyebab kematian terbanyak pada balita kelompok usia 12-59 bulan, adalah P1-P20 sebanyak 1.691 (97,30%). Penyebab kematian lainnya adalah karena infeksi (0,69%), Gangguan pernafasan dan kardiovaskular (0,52%), Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom (0,17%), Komplikasi kejadian intrapartum (0,12%), serta Kejang dan gangguan status serebral (0,06%). Kemudian terdapat kategori belum diketahui sebabnya (0,98%), dan penyebab lainnya 0,17%).

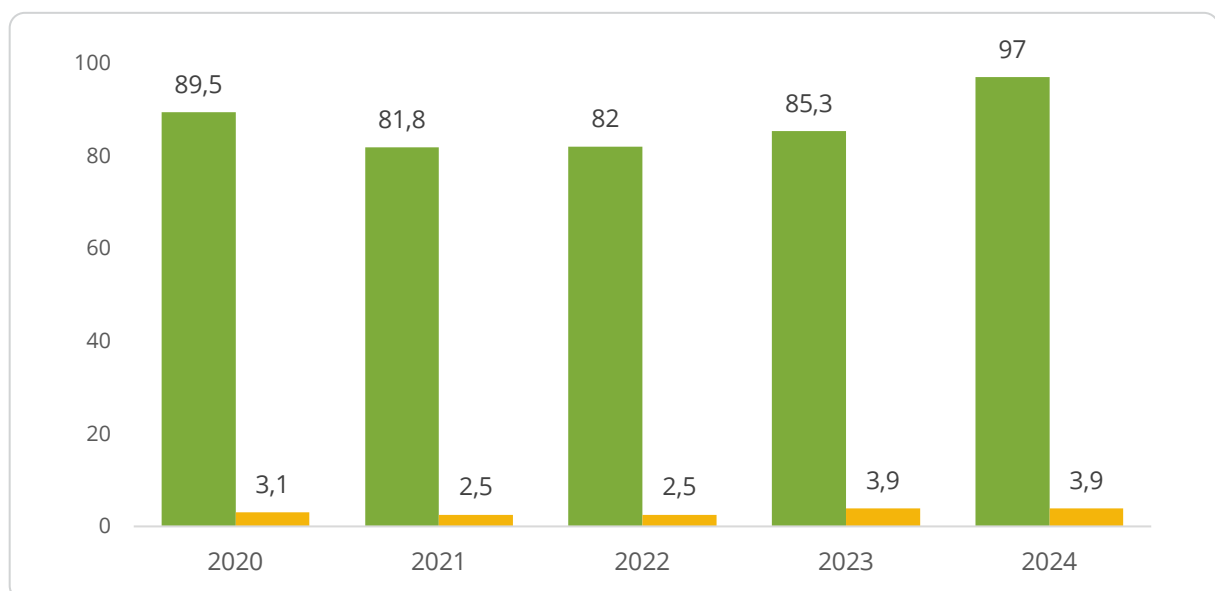
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal (0-28 Hari)

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia 28 hari memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Bila tidak dilakukan penanganan yang tepat, hal tersebut dapat berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada bayi baru lahir yang dimaksud adalah,

1. Pelayanan neonatal esensial melalui paling sedikitnya Kunjungan neonatal (KN) sebanyak 3 kali yang dilakukan bersamaan dengan Kunjungan Nifas ibu (KF),
2. Skrining bayi baru lahir (Skrining Hipotiroid Kongenital/SHK, Penyakit Jantung Bawaan/ PJK), dan
3. Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi kepada Ibu dengan menggunakan Buku KIA

GAMBAR 5.22
BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH DI INDONESIA TAHUN 2020-2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Gambar 5.22 diatas, gambaran BBLR di Indonesia berdasarkan penimbangan yang dilakukan terhadap bayi baru lahir hidup dan data dilaporkan dari 38 Provinsi, pada tahun 2024 terdapat 97% bayi baru lahir yang ditimbang berat badannya. Dari persentase tersebut, 3,9% bayi mengalami kondisi BBLR.

BBLR adalah kondisi bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram. Kondisi bayi BBLR disebabkan oleh kondisi ibu saat hamil (malnutrisi, keteraturan dan kelengkapan kunjungan ANC, anemia pada ibu hamil, Kurang Energi Kronik (KEK), dan lain-lain), kelahiran prematur, dan gangguan plasenta yang mengakibatkan gangguan pada proses transportasi nutrisi pada plasenta. Untuk itu menjadi sangat penting dalam mempersiapkan sedini mungkin kondisi ibu yang sehat dan layak hamil sejak dari calon pengantin dan masa remaja. Selain sebagai salah satu penyebab tingginya kematian pada bayi baru lahir, BBLR juga meningkatkan risiko stunting dan munculnya penyakit tidak menular di kemudian hari, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

Upaya pelayanan kesehatan esensial pada bayi baru lahir yang wajib diberikan dan dapat mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu kunjungan neonatal. Tujuan kunjungan neonatal untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan penyebab kematian dan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan pada bayi usia 0-28 hari, meliputi:

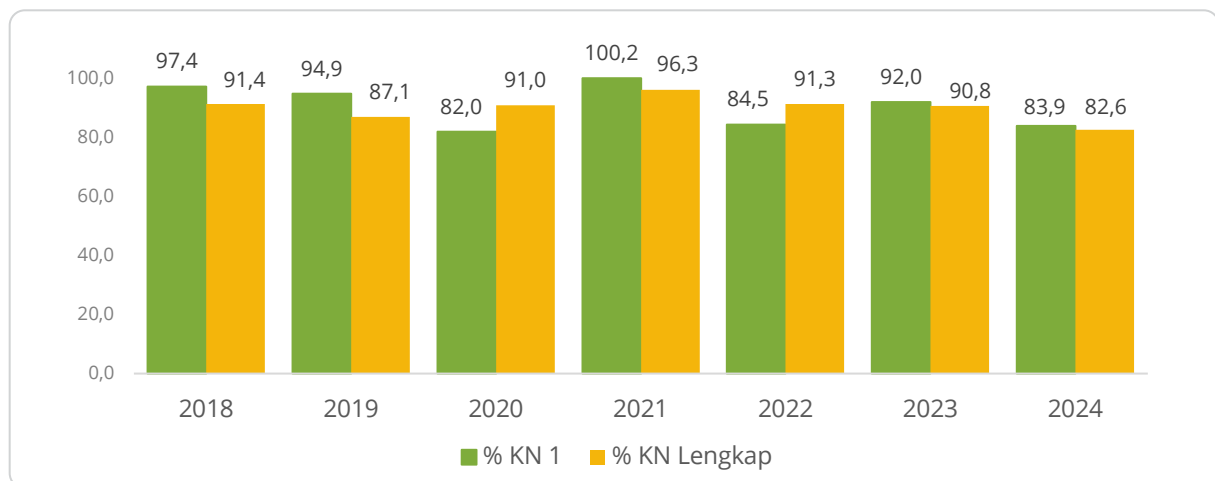
1. Pemotongan dan perawatan tali pusat;
2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
3. Pemberian vitamin K untuk mencegah perdarahan;
4. Pemberian salep/tetes mata;
5. Pemberian Imunisasi Hb0 untuk mencegah penyakit hepatitis;
6. Konseling perawatan bayi baru lahir;
7. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
8. Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA);
9. Memeriksa kesehatan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM).

Kunjungan neonatal dilakukan sebanyak 3 kali terdiri dari:

1. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada usia 6-48 jam;
2. Kunjungan Neonatal Kedua (KN2) pada usia 3-7 hari; dan
3. Kunjungan Neonatal Ketiga (KN3) pada usia 8-28 hari.

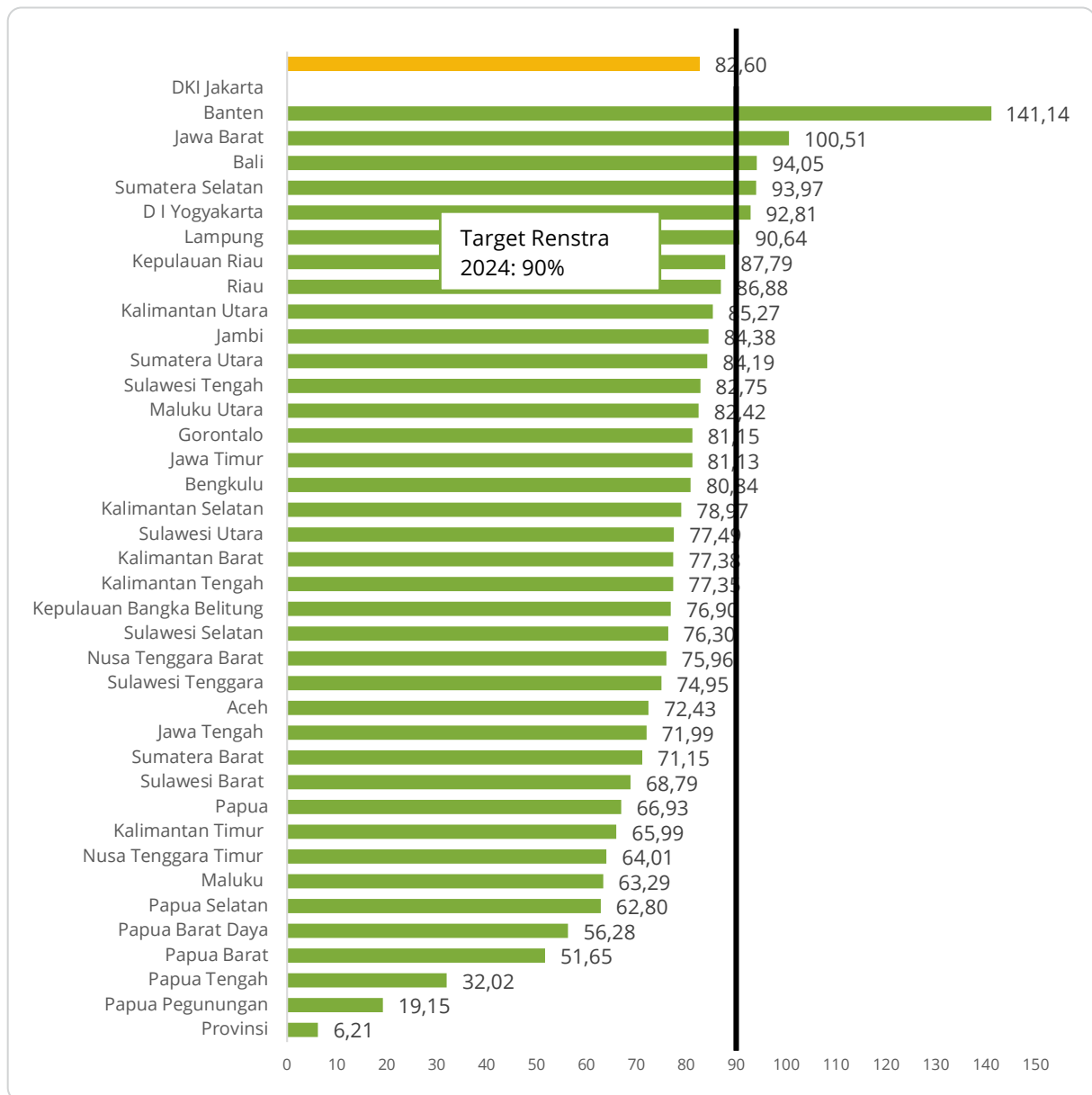
Cakupan kunjungan neonatal sebagai salah satu indikator yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Cakupan indikator yang diukur dan dipantau adalah KN1 dan cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap).

GAMBAR 5.23
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN 1) DAN KN LENGKAP
DI INDONESIA TAHUN 2018-2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

GAMBAR 5.24
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Penjelasan Gambar 5.24 diatas bahwa Cakupan KN lengkap secara nasional adalah 82,60% Cakupan per provinsi berkisar antara 6,21% di Papua Pegunungan hingga 141,14% di DKI Jakarta. Terdapat provinsi yang sasarannya lebih tinggi dari target Renstra 2024, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Bali, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Lampung (lebih dari 90%).

2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Kegiatan pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilaksanakan secara terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dengan standar minimal pelayanan sesuai dengan SPM tingkat kabupaten/kota untuk kesehatan balita meliputi penimbangan berat badan setiap bulan minimal 8x, pengukuran panjang badan/tinggi badan minimal 2x setahun, pemantauan perkembangan minimal 2x setahun, pemberian vitamin A (usia 6-59 bulan), imunisasi dasar lengkap dan lanjutan, dan pelayanan balita sakit dengan pendekatan MTBS.

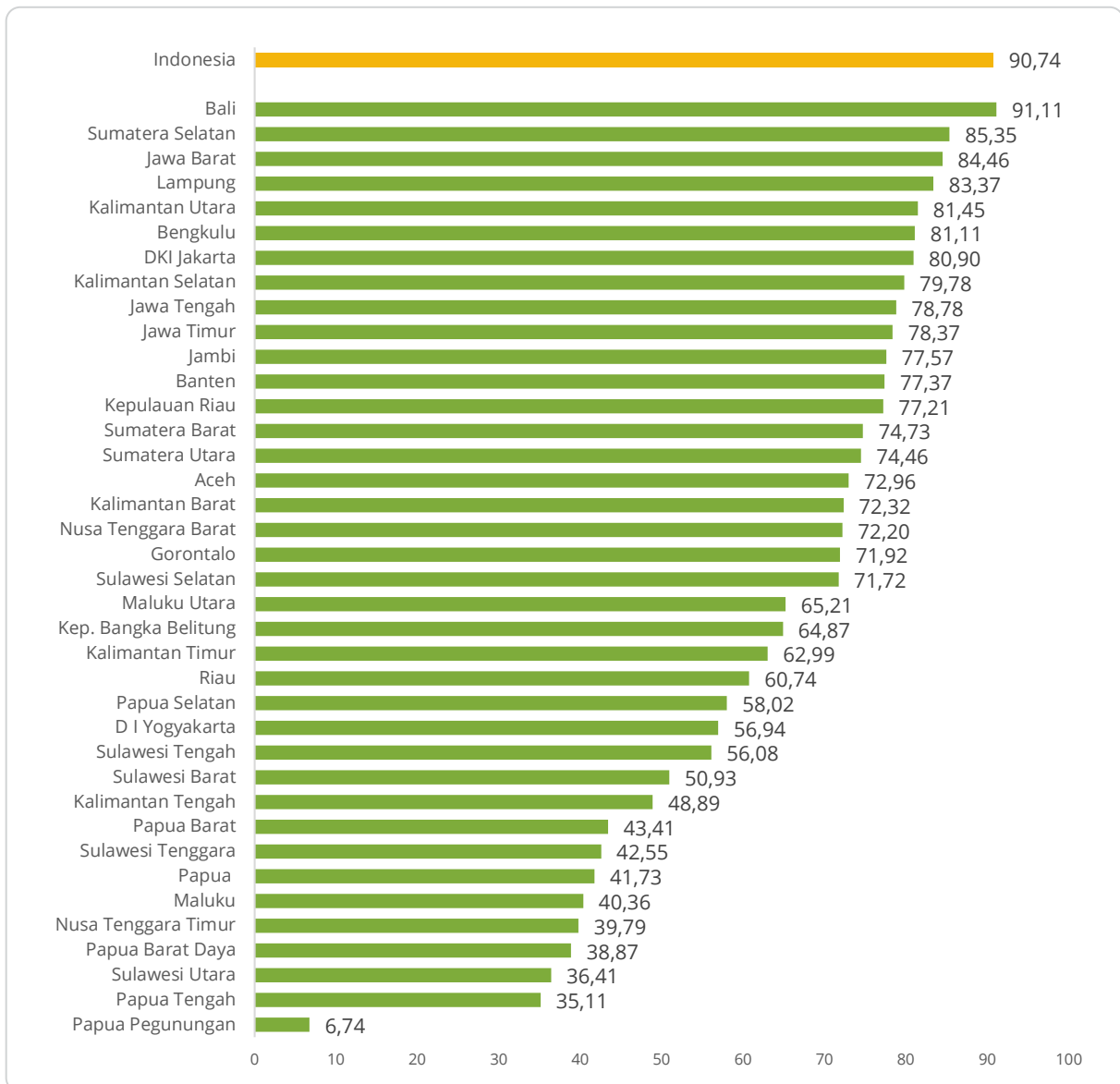
Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, menurunkan prevalensi stunting dan wasting, meningkatkan kualitas hidup balita, sehingga semua hak anak dapat terpenuhi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah home-base record untuk memastikan Continuum of Care (COC) ibu dan anak, serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan, media komunikasi informasi, dan edukasi.

Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes, persentase balita memiliki Buku KIA di Indonesia pada tahun 2024 adalah 90,74%. Angka ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 80%. Jika dilihat per provinsi, persentase balita memiliki Buku KIA terendah yakni pada Provinsi Papua Pegunungan (6,74%) dan provinsi tertinggi Bali (91,11%). Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah buku KIA yang disediakan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah belum dapat mengadakan buku KIA untuk memenuhi kebutuhan. Persentase Baliat memiliki Buku KIA dapat dilihat pada Grafik 5.25.

GAMBAR 5.25
BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



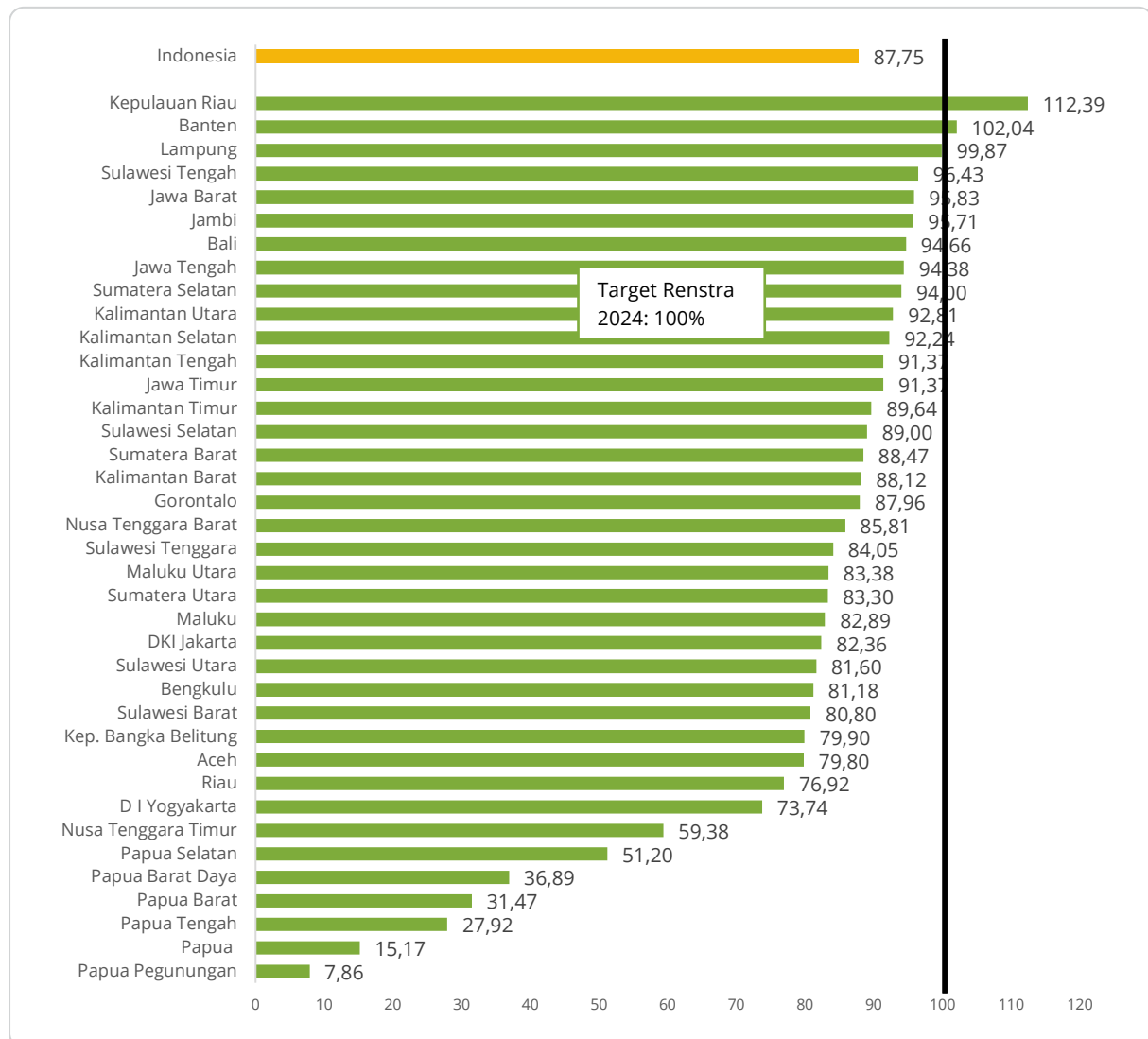
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Upaya pemenuhan layanan esensial utama usia bayi dan balita adalah pemberian ASI eksklusif dan vitamin A, serta upaya preventif untuk pelayanan kesehatan balita salah satunya dengan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan agar dapat mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti balita bermasalah gizi (stunting, wasting, gizi buruk, obesitas) selanjutnya untuk dilakukan tatalaksana yang sesuai atau dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan.

Indikator keberhasilan dalam hal ini diukur dengan melihat persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan total sasaran balita. Secara nasional, indikator ini menunjukkan tren peningkatan, dimana pada tahun 2022 sebesar 78,3%, tahun 2023 sebesar 82,3%, dan pada tahun 2024 mencapai 87,75%, namun sampai dengan akhir tahun Renstra belum mencapai target Renstra sebesar 100%. Namun, Provinsi Kepulauan Riau dan Banten telah mencapai target Renstra tahun 2024, seperti terlihat pada Gambar 5.26.

Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal penting melalui penguatan pelaksanaan Posyandu dan kunjungan rumah untuk mencari sasaran yang tidak datang ke pelayanan dan belum lengkap pelayanan yang diterima balita, peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader masyarakat dan pemantauan mandiri ibu/keluarga dengan menggunakan buku KIA.

GAMBAR 5.26
BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



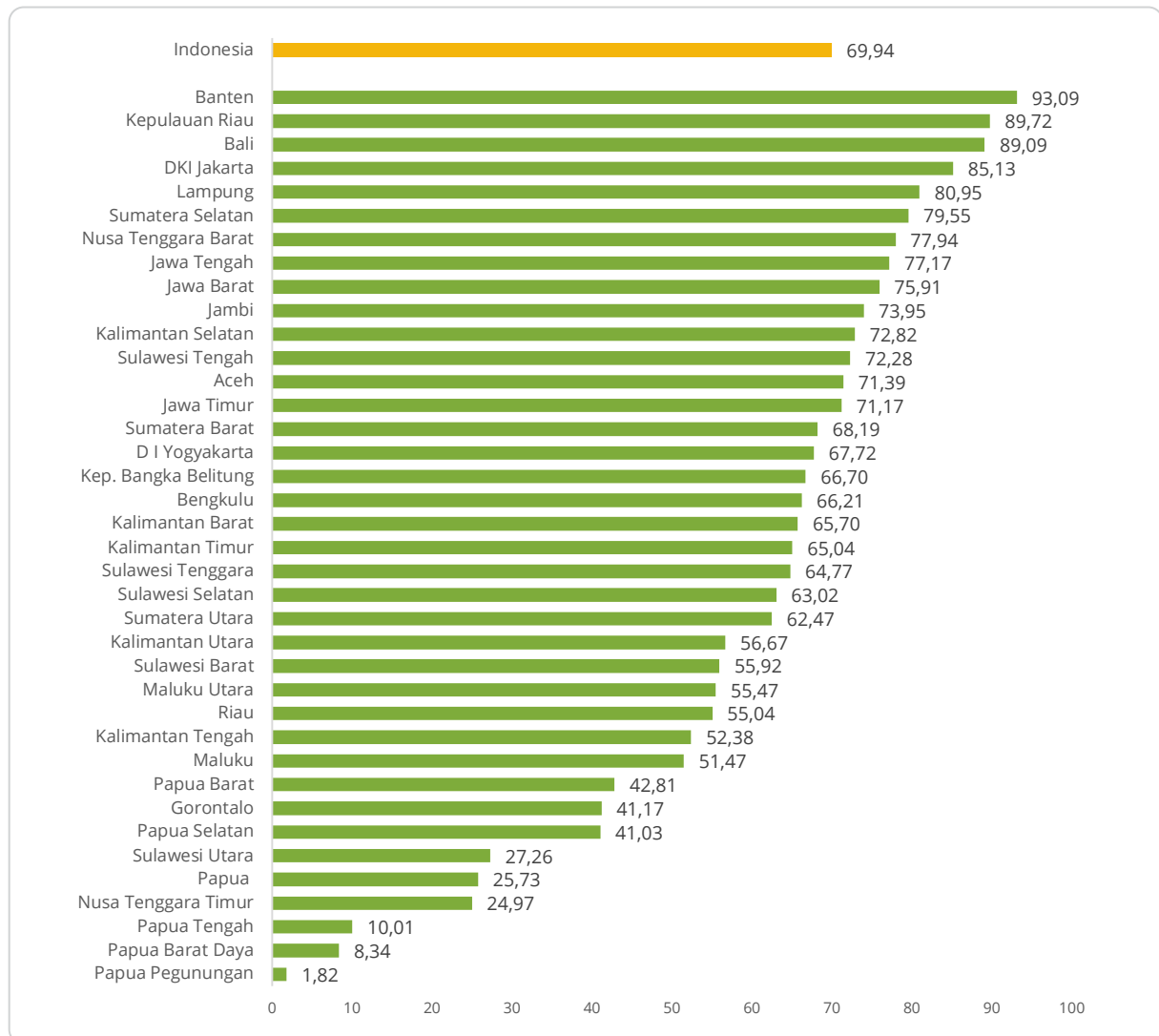
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan Gambar 5.26 diatas terlihat bahwa ketimpangan antarwilayah masih perlu mendapat perhatian. Intervensi khusus di daerah dengan cakupan rendah, terutama Papua Pegunungan yang hanya mencapai 7,86%. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin hak tumbuh kembang anak secara merata di seluruh Indonesia diantaranya:

1. Pemetaan wilayah cakupan rendah untuk intervensi khusus dan pendampingan.
2. Penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan dalam pemantauan pertumbuhan anak.
3. Evaluasi data cakupan >100% agar tidak terjadi duplikasi atau kesalahan pencatatan. Peningkatan akses layanan kesehatan di daerah tertinggal melalui mobile clinic dan inovasi digital.

Pada gambar 5.27 di bawah menunjukkan persentase balita yang dilayani oleh SDIDTK secara nasional pada tahun 2024, yakni sebesar 69,94%, menurun sedikit dari tahun 2023 yang mencapai 70,83%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Banten dengan capaian 93,09%, sementara Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase terendah yaitu 1,82%.

GAMBAR 5.27
BALITA DILAYANI STIMULASI, DETEKSI, DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



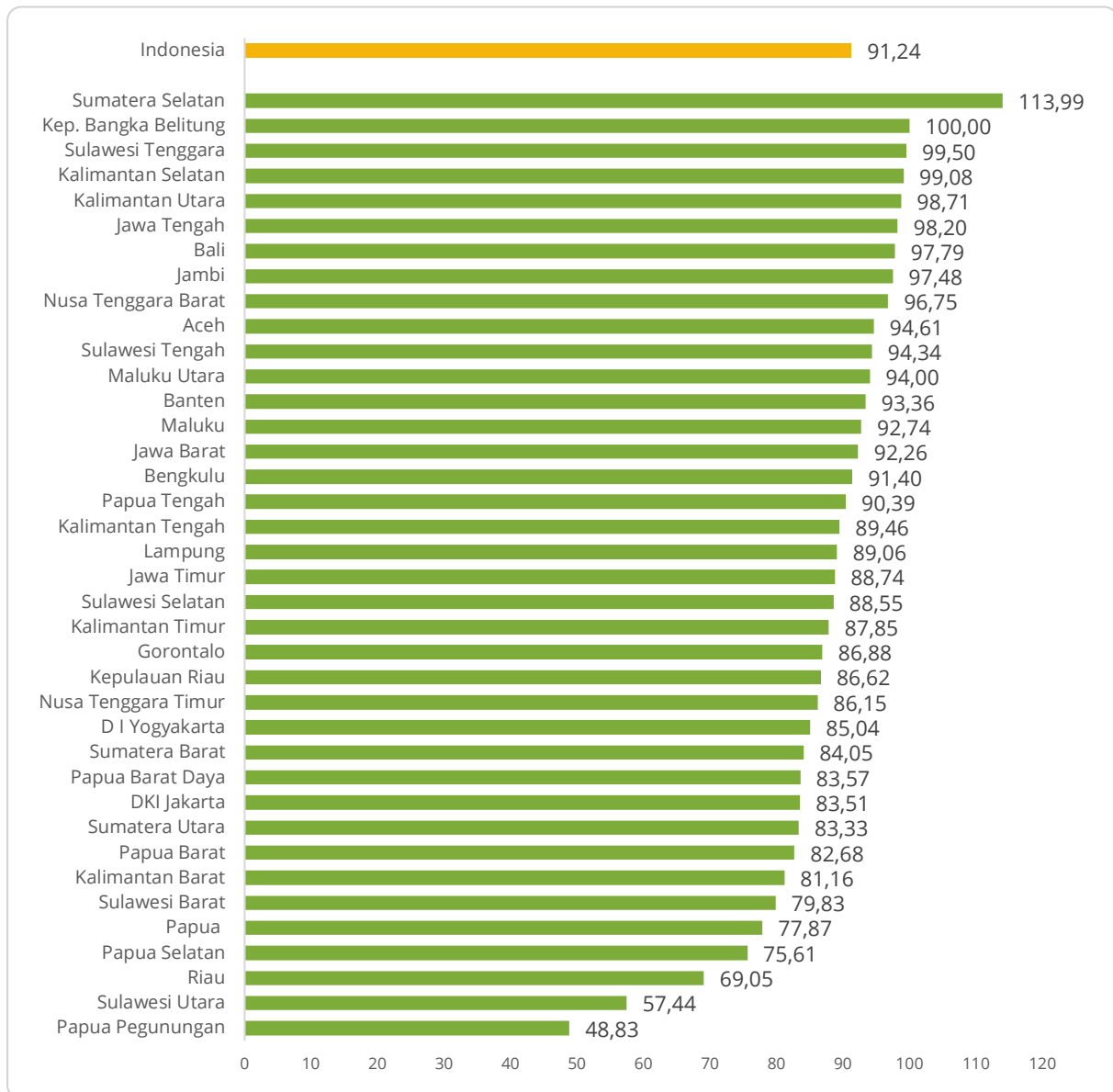
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan oleh petugas kesehatan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di puskesmas.

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) merupakan pendekatan pelayanan komprehensif dan terintegrasi terhadap penyebab utama kematian balita yang sering dijumpai, seperti pneumonia, diare, campak, malaria, atau kombinasi dari penyakit-penyakit tersebut. Selain itu, penyakit-penyakit tersebut sering kali dikaitkan dengan kondisi gizi kurang atau gizi buruk.

Implementasi MTBS dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten/kota.

GAMBAR 5.28
BALITA DILAYANI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Gambar 5.28 di bawah menunjukkan persentase balita yang dilayani oleh MTBS secara nasional pada tahun 2024, mencapai 91,24%. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan 2023 mencapai 87,7%. Hal ini disebabkan penanganan Balita Sakit sudah menggunakan pendekatan MTBS sesuai dengan prosedur yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu, sehingga dapat menekan angka kesakitan pada balita.

3. Imunisasi

Arah pembangunan kesehatan saat ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dilaksanakannya program imunisasi. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan suatu penyakit, orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia, pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling cost-effective. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan herd immunity. Pemberian imunisasi dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang diperkirakan sebanyak 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam PD3I, antara lain Hepatitis B, TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak rubela, radang selaput otak dan radang paru-paru.

Program imunisasi yang dilakukan pemerintah mencakup beberapa jenis vaksinasi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Beberapa program imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL): Program ini mencakup serangkaian vaksinasi dasar yang diberikan kepada bayi dan anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seperti imunisasi Hepatitis B, BCG (Tuberkulosis), DPT-HB-Hib (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type b), polio, campak, dan rubella.
2. Imunisasi Tambahan dan Lanjutan: Selain imunisasi dasar, terdapat juga program imunisasi tambahan dan lanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kekebalan individu terhadap penyakit tertentu, seperti vaksinasi influenza, HPV (Human Papillomavirus), meningokokus, dan lain sebagainya.
3. Imunisasi Rutin: Pemerintah juga menyelenggarakan program imunisasi rutin yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik di puskesmas, posyandu, sekolah, maupun tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

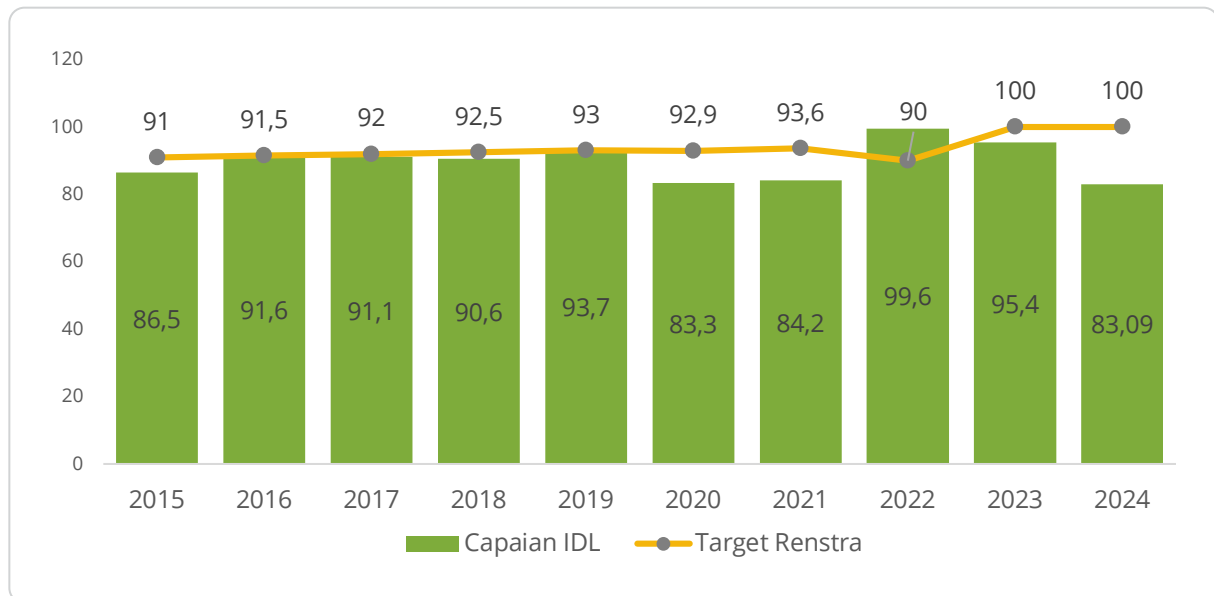
Di Indonesia, setiap bayi usia 0-11 bulan diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yang terdiri dari:

1. Satu dosis Hepatitis B yang diberikan segera setelah lahir;
2. Satu dosis BCG untuk mencegah tuberkulosis;
3. Tiga dosis DPT-HB-HiB untuk mencegah difteri, pertussis, tetanus hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B;
4. Empat dosis polio tetes atau *Oral Polio Vaccine (OPV)*;
5. Satu dosis polio suntik atau *Inactivated Polio Vaccine (IPV)*; dan
6. Satu dosis Campak Rubela.

Penentuan jenis imunisasi dan jadwal pemberian ini didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Untuk beberapa daerah terpilih sesuai kajian epidemiologi, analisis beban penyakit dan rekomendasi ahli, ada tambahan imunisasi tertentu, yaitu *Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)* dan *Japanese Encephalitis*. Implementasi pemberian

imunisasi *Japanese Encephalitis* belum berlaku secara nasional, sehingga tidak diperhitungkan sebagai komponen imunisasi dasar lengkap pada bayi.

GAMBAR 5.29
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
DI INDONESIA TAHUN 2013-2024



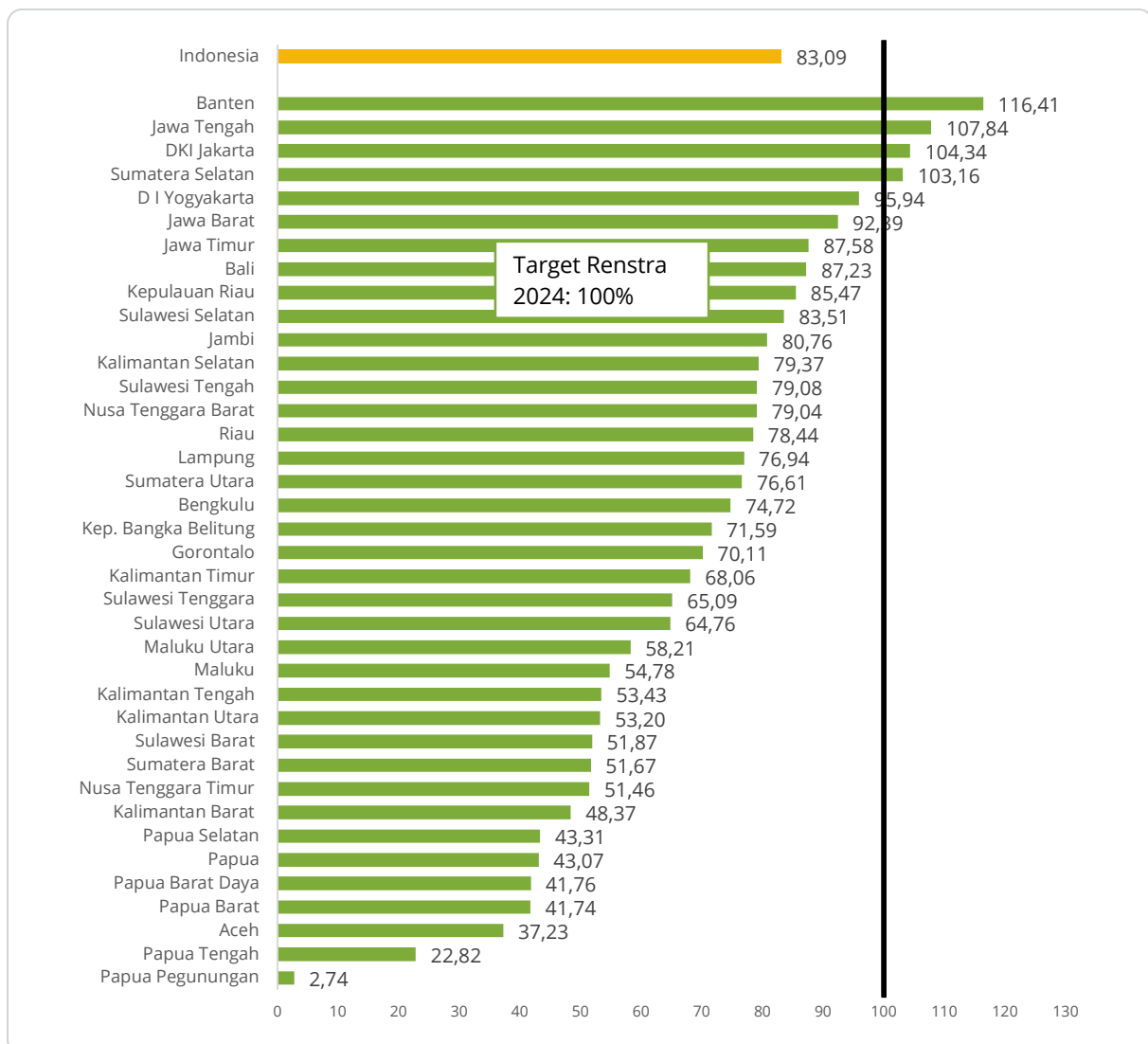
Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada Gambar 5.29 dapat terlihat bahwa cakupan imunisasi terus mendurun sejak tahun 2022 setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi tidak mencapai target renstra yang pada tahun 2023 dan 2024 mentargetkan seluruh bayi dilakukan imunisasi dasar lengkap.

Beberapa kemungkinan faktor penyebab, diantaranya ketidakseimbangan distribusi vaksin dan sumber daya di tingkat daerah, hambatan geografis dan aksesibilitas di wilayah terpencil, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi, masalah pencatatan dan pelaporan, dampak lanjutan "*pandemic*" terhadap system kesehatan dasar yang belum pulih sepenuhnya.

Langkah-langkah seperti: penguatan program imunisasi di daerah dengan cakupan rendah, evaluasi menyeluruh terhadap penurunan capaian tiap daerah, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi guna meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, koordinasi lintas sector pemerintah pusat, daerah dan mitra pembangunan untuk mengakselerasi pencapaian target nasional.

GAMBAR 5.30
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada gambar 5.30 di atas, diketahui bahwa provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah Banten (116,41%). Sedangkan provinsi dengan capaian terendah, yaitu Papua Pegunungan (2,74%). Rincian data mengenai imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2024 terdapat pada Lampiran 43.a

b. Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak

Setiap anak yang telah mendapatkan kesempatan pertama imunisasi harus menyelesaikan rangkaian dosis sesuai jadwal agar kekebalan tubuh yang didapat melalui imunisasi dapat terbentuk secara optimal. Jika anak tersebut tidak menyelesaikannya secara lengkap maka disebut sebagai *Drop Out (DO)*. Angka *DO* ini menjadi indikator pemanfaatan layanan imunisasi. Pemanfaatan layanan imunisasi adalah kesempatan masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi.

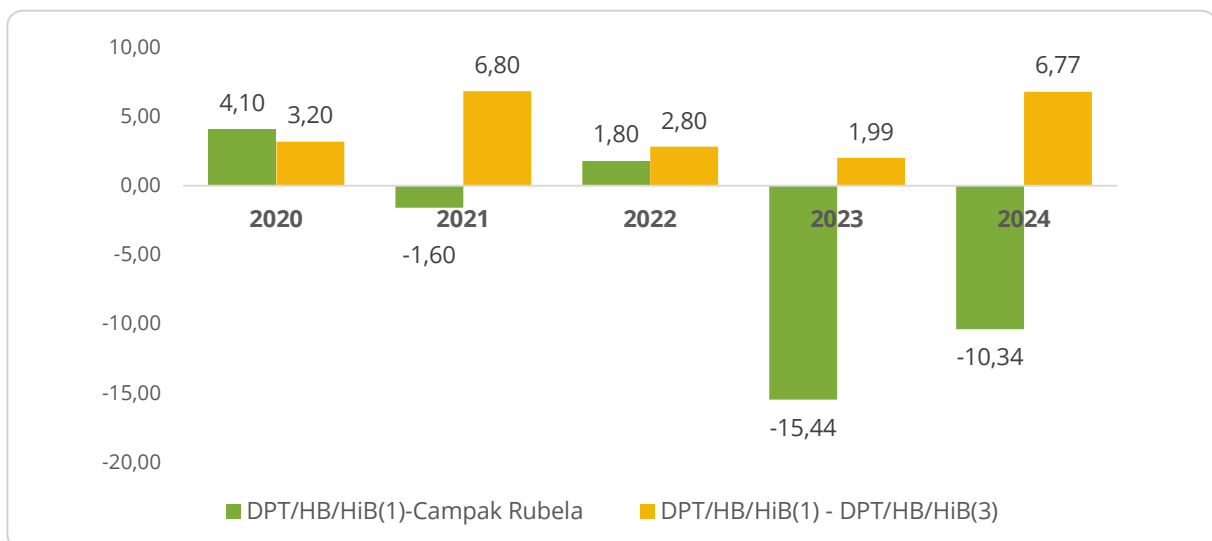
Untuk mengetahui angka *DO* pada bayi, dapat dilakukan penghitungan menggunakan *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1.

Angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3. Sedangkan, angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi Campak Rubela 1. Pemanfaatan layanan imunisasi dianggap baik apabila angka *DO* <5%, sehingga angka *DO* dari DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diharapkan tidak melebihi 5%.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, angka *DO* DPT-HB-Hib1 dengan Campak Rubela 1 berada di bawah batas maksimal 5%, tapi cenderung mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2021, angka *DO* DPT-HB-Hib1 dengan Campak Rubela 1 berada di ambang batas minimal (nilai minus). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang diimunisasi Campak Rubela 1 lebih banyak dibandingkan jumlah anak yang diimunisasi DPT-HB-Hib1. Pada saat anak memasuki usia 9 bulan, orang tua mudah untuk mengingat jadwal imunisasi Campak Rubela 1, sehingga cenderung membawa anaknya untuk imunisasi. Selain itu, efek samping DPT-HB-Hib1 seringkali menyebabkan orang tua melewatkan jadwal imunisasi tersebut.

Tren angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 cenderung fluktuatif sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, dengan tahun 2023 jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

GAMBAR 5.31
ANGKA DROP OUT (DO) IMUNISASI PADA BAYI TAHUN 2022-2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada gambar 5.31 di atas, Angka Drop Out (DO) menggambarkan selisih cakupan antara imunisasi dosis awal dan dosis lanjutan, dalam hal ini antara DPT-HB-Hib1-Campak dan DPT-HB-Hib3. DO tinggi mengindikasikan rendahnya kesinambungan layanan imunisasi, yang dapat berdampak pada ketidakefektifan perlindungan imunologis bayi terhadap penyakit menular. Tren DO Tahun 2022–2024:

- 2022: angka DO relatif moderat, berada pada kisaran 1,80 hingga 2,80.
- 2023: terjadi penurunan tajam secara nasional, dengan rate mencapai -15,44 di beberapa wilayah dan 1,99 di wilayah lainnya. Nilai negatif ini mencerminkan adanya anomali data, kemungkinan karena rekonsiliasi cakupan, input data tidak sinkron, atau estimasi sasaran tidak akurat.
- 2024: menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan angka DO berada di rentang -10,34

hingga 6,77. Hal ini mengindikasikan perbaikan di beberapa wilayah, tetapi masih ada tantangan konsistensi layanan dan pelaporan.

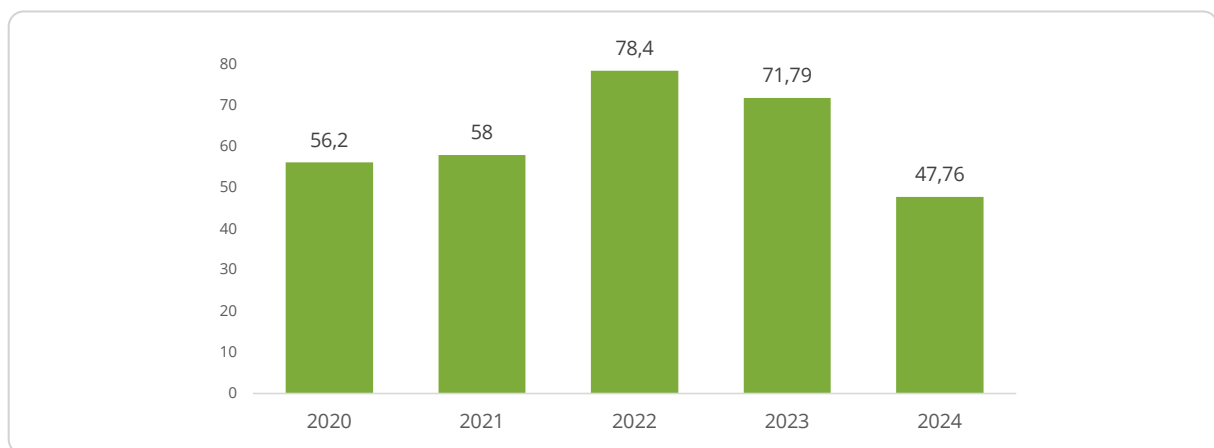
Rincian data mengenai imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2024 terdapat pada Lampiran 43.a.

c. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah salah satu indikator penting untuk mengukur pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Hal ini mengindikasikan sejauh mana pelayanan imunisasi dasar telah tersedia dan dapat diakses secara merata di berbagai daerah.

Ketika persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah berhasil memberikan pelayanan imunisasi dasar yang cukup baik kepada bayi-bayi di daerah tersebut. Ini bisa mengindikasikan adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan, kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, serta ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai di sektor kesehatan.

GAMBAR 5.32
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP
PADA BAYI TAHUN 2020-2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

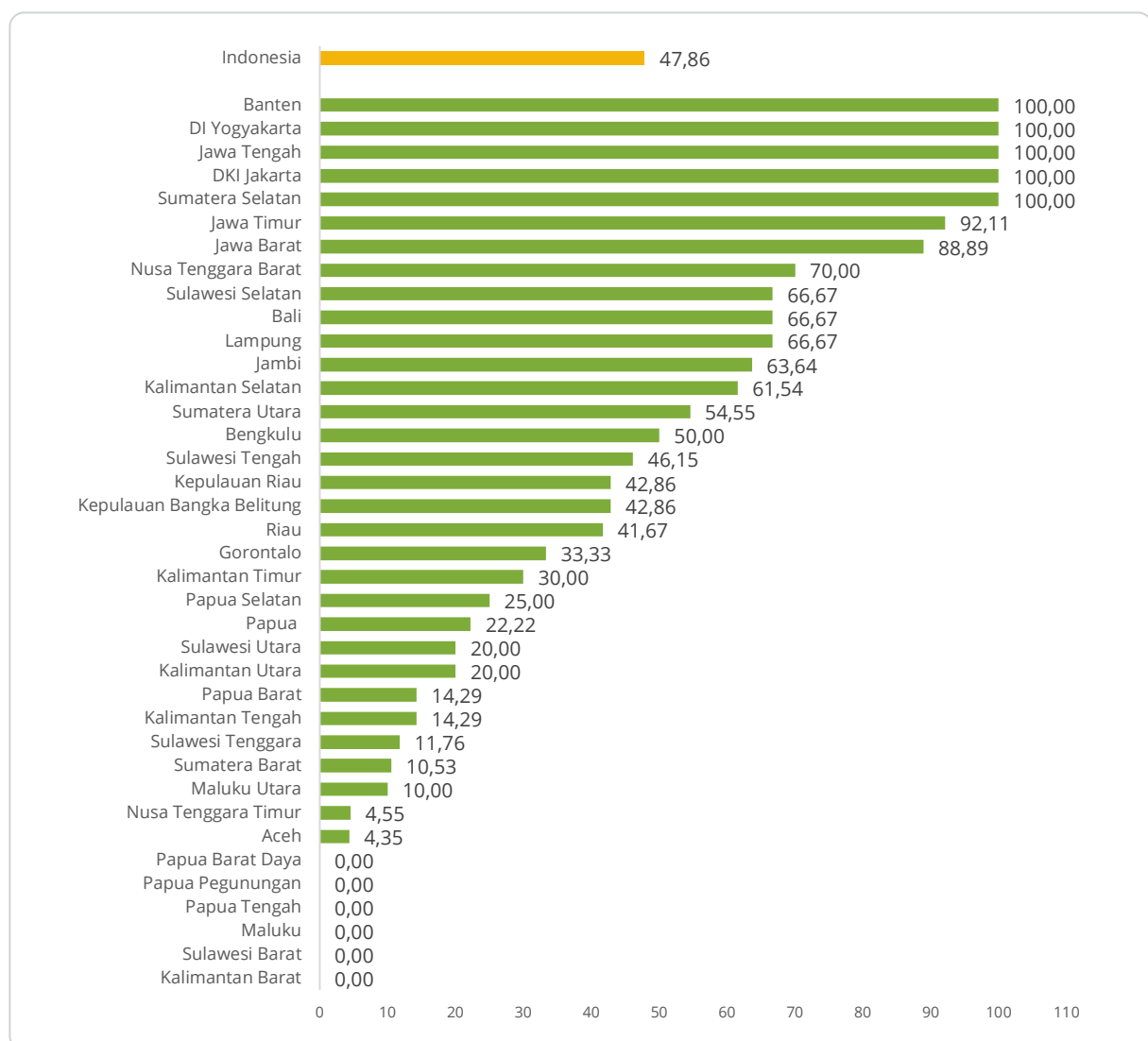
Kabupaten/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2024 yang hanya mencapai 47,76%, hal ini mencerminkan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya imunisasi dalam melindungi mereka dari penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, dapat saja terjadi bahwa data yang dikumpulkan pada saat ini belum merupakan hasil akhir, karena dilihat dengan tren data tahun 2022 dan 2023 yang angkanya masih bisa meningkat di tahun 2025 ini, dapat disimpulkan bahwa data tahun 2024 ini masih bergerak. Evaluasi terhadap pencatatan yang belum real time harus dilakukan untuk meningkatkan data yang lebih akurat.

Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap selama tiga tahun terakhir, seperti yang disebutkan, dapat dilihat pada Lampiran 43.c. Data ini memberikan penjelasan tentang progres imunisasi di setiap wilayah, serta memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap upaya pemerataan dan peningkatan mutu layanan imunisasi di seluruh negeri. Dengan memahami tren ini, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil

untuk terus meningkatkan cakupan imunisasi dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.

Pada Gambar 5.33 dapat diketahui, jumlah Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang telah mencapai 85% Imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2024 dengan capaian 47,86%, hanya 7 Provinsi yang 85% kabupaten/kotanya mencapai target 80% IDL pada bayi. Pada tahun 2024 juga terdapat 6 Provinsi yang data capaiannya 0%. Hal ini harus menjadi perhatian serius dalam pengelolaan imunisasi secara program maupun secara pencatatan dan pelaporan. Imunisasi Dasar Lengkap selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran 43.c.

GAMBAR 5.33
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP
PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



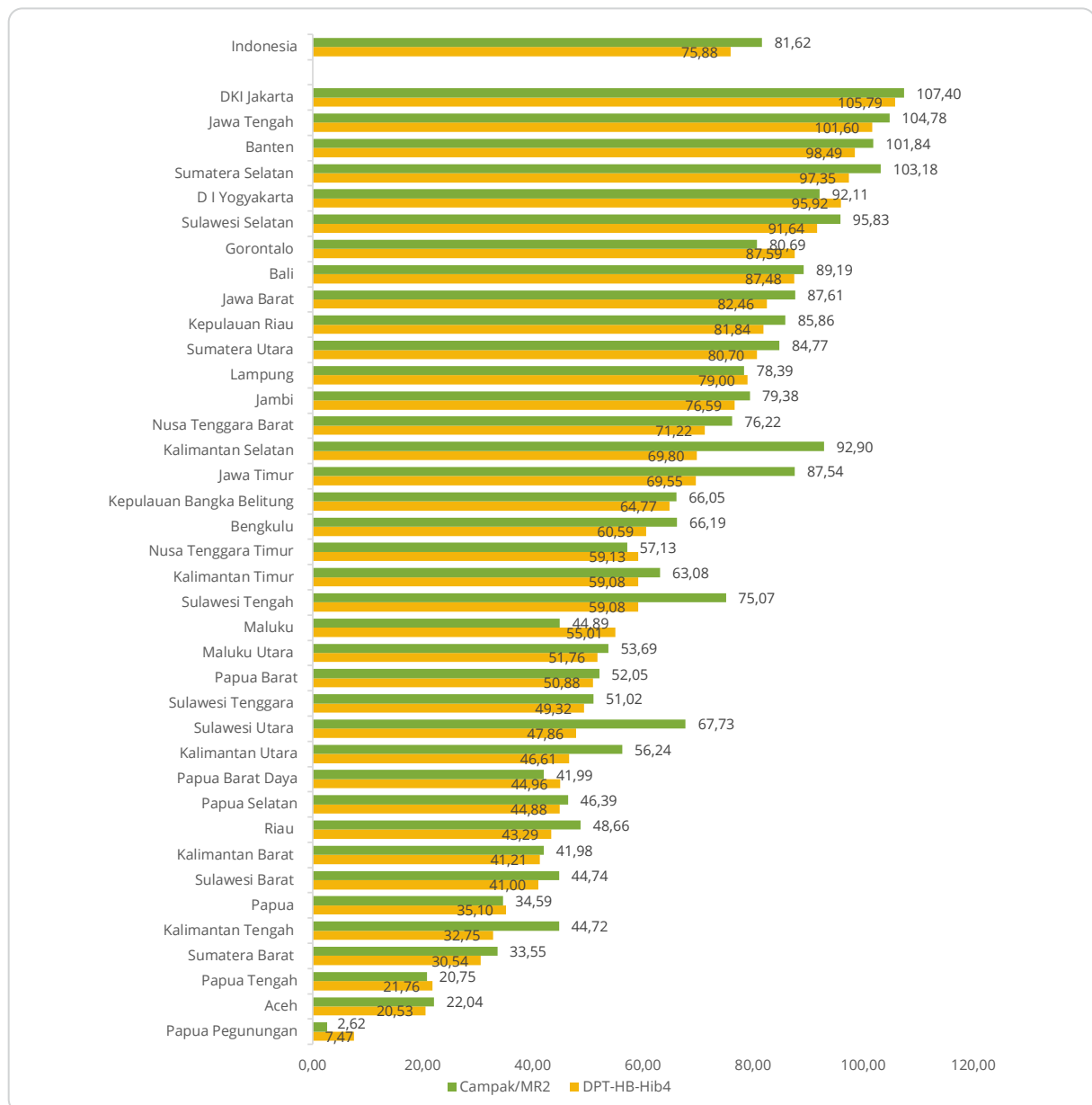
Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

d. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta (bawah dua tahun) diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Beberapa jenis imunisasi dasar yang diberikan pada saat bayi memerlukan dosis lanjutan (*booster*) untuk

meningkatkan kekebalannya, salah satunya melalui pemberian imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan masing-masing 1 dosis DPT-HB-HiB dan Campak Rubela kepada anak usia 18-24 bulan.

GAMBAR 5. 34
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2
PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

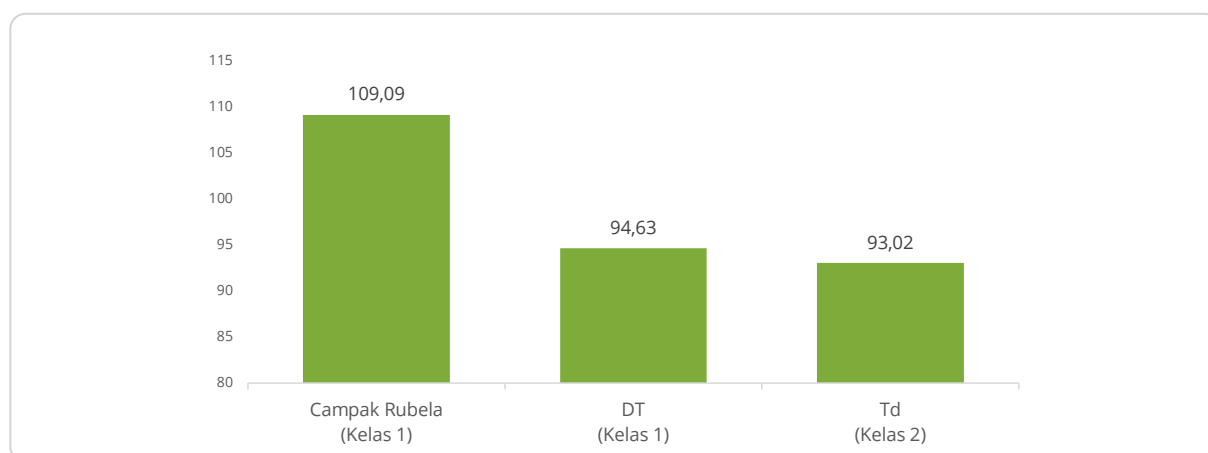
Dari Gambar 5.36 di atas, secara nasional cakupan imunisasi Campak Rubela 2 pada anak usia 18-24 bulan tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan imunisasi DPT-HB-HiB4 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten merupakan 3 provinsi yang memiliki cakupan tertinggi baik untuk cakupan imunisasi campak rubela maupun untuk imunisasi DPT-HB-HiB4, sedangkan Provinsi Papua

Pegunungan merupakan Provinsi dengan cakupan terendah untuk imunisasi Campak Rubela dan imunisasi DPT-HB-Hib4. Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-HiB4 dan Campak Rubela 2 pada anak baduta dapat dilihat pada Lampiran 44.a.

e. Imunisasi Anak Sekolah

Selain imunisasi lanjutan pada baduta, untuk mempertahankan tingkat kekebalan pada anak sehingga dapat terlindungi dari PD3I, juga dilakukan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah. Pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dilakukan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan sasaran anak usia sekolah dasar (SD). Jenis imunisasi yang diberikan pada pelaksanaan BIAS, yaitu Campak Rubela, Tetanus dan Difteri. Pada daerah tertentu yang menjadi lokus pelaksanaan program demonstrasi imunisasi Human Papilloma Virus (HPV), imunisasi HPV ditambahkan pada kegiatan BIAS dengan sasaran siswa perempuan kelas 5 dan 6. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pelaksanaan imunisasi pada anak sekolah diberikan pada anak SD/MI/ sederajat usia kelas 1 (Campak Rubela dan DT), kelas 2 (Td) dan kelas 5 (Td). Pada masa pandemi COVID-19, pelaksanaan BIAS menjadi sangat terpengaruh dan tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya pelaksanaan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

GAMBAR 5.35
CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, cakupan imunisasi campak rubela untuk anak kelas 1 mencapai 109,09%, angka ini meningkat dari cakupan tahun 2023 yang mencapai 93,78%, sedangkan untuk imunisasi DT kelas 1 dan imunisasi Td untuk kelas 2 juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang masing-masing secara berurutan hanya mencapai 90,32% dan 91,82%.

4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

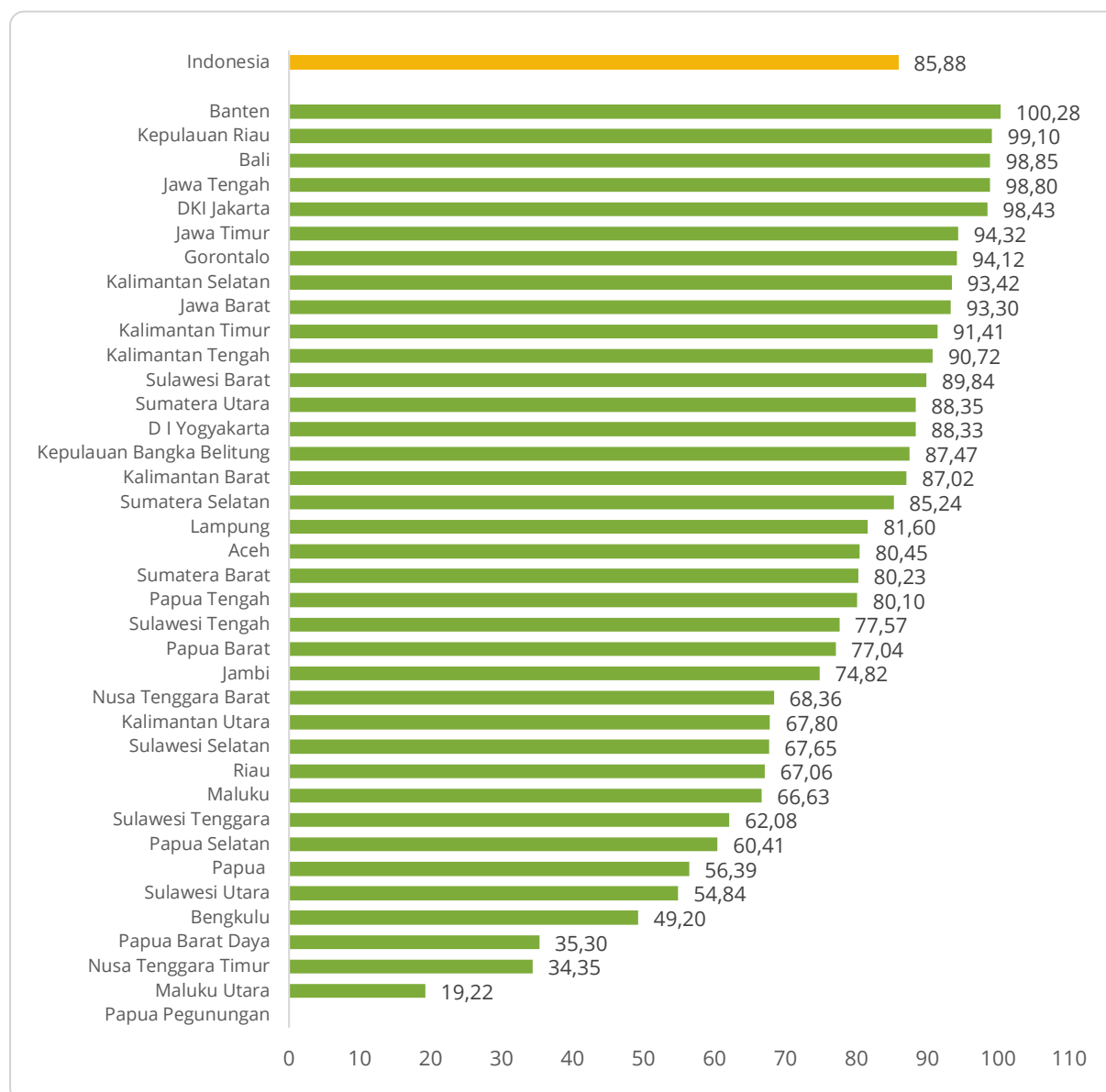
Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader kesehatan sekolah, dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, pemeriksaan tajam penglihatan, dan pemeriksaan tajam pendengaran.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di sekolah juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan. (lihat Gambar 5.36)

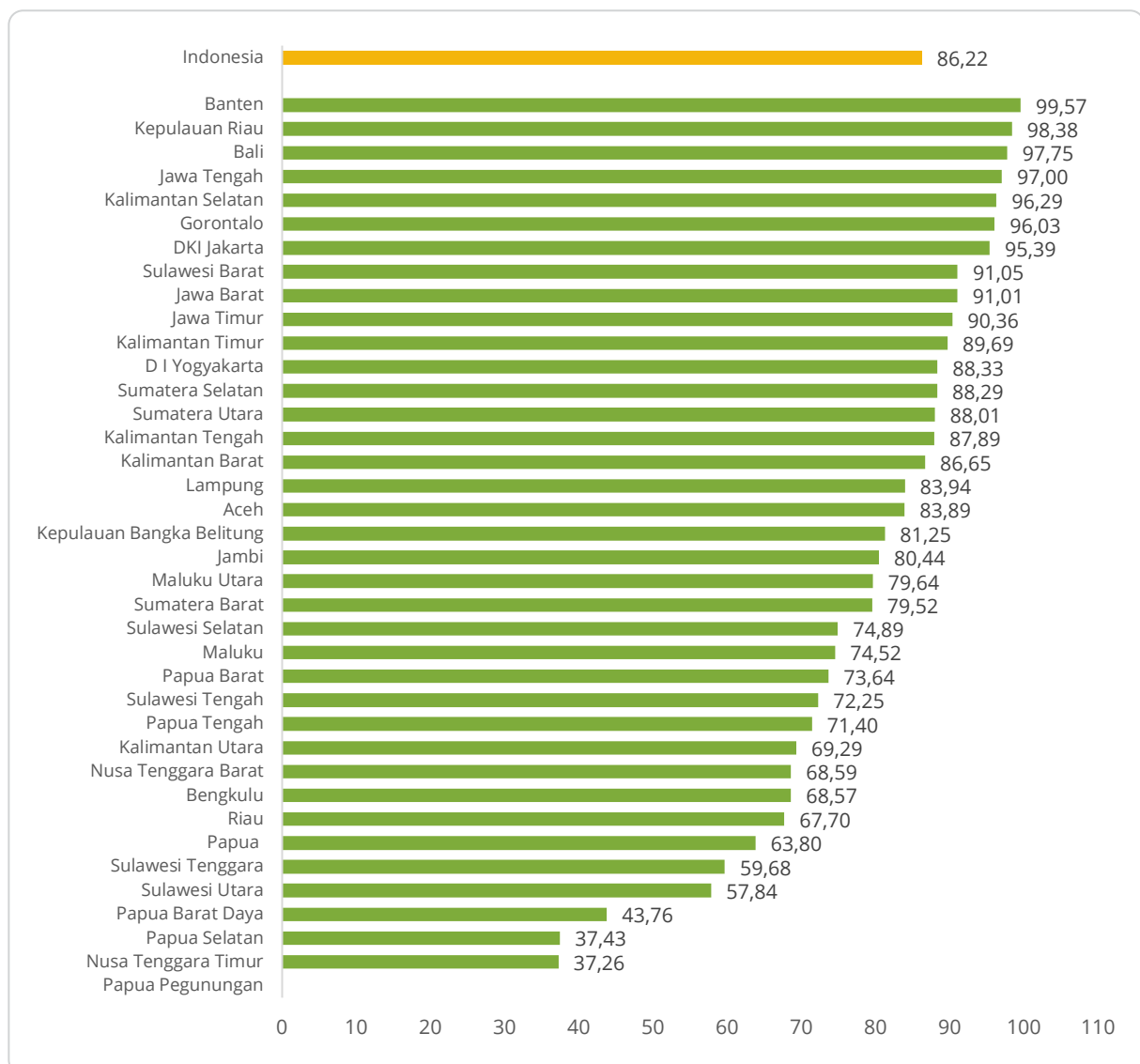
GAMBAR 5.36
CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, cakupan nasional sekolah SD/MI yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta didik mencapai 85,88%. Persentase sebaran cakupan antar Provinsi adalah 11 dari 38 provinsi (sekitar 26,95%) mencapai cakupan 90% atau lebih, yang menunjukkan tingkat kepedulian dan kesiapan tinggi terhadap kesehatan siswa. Provinsi Banten menjadi satu-satunya yang mencapai cakupan 100%, menandakan bahwa seluruh SD/MI di provinsi ini telah menyediakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Sepuluh provinsi lainnya berada pada kisaran capaian 80–90%, masih tergolong baik dan menunjukkan keseriusan dalam penerapan program kesehatan sekolah. Cakupan terendah ada pada Provinsi Maluku Utara dengan capaian di bawah 20% (19,22%), sedangkan tidak ada laporan capaian dari Provinsi Papua Pegunungan.

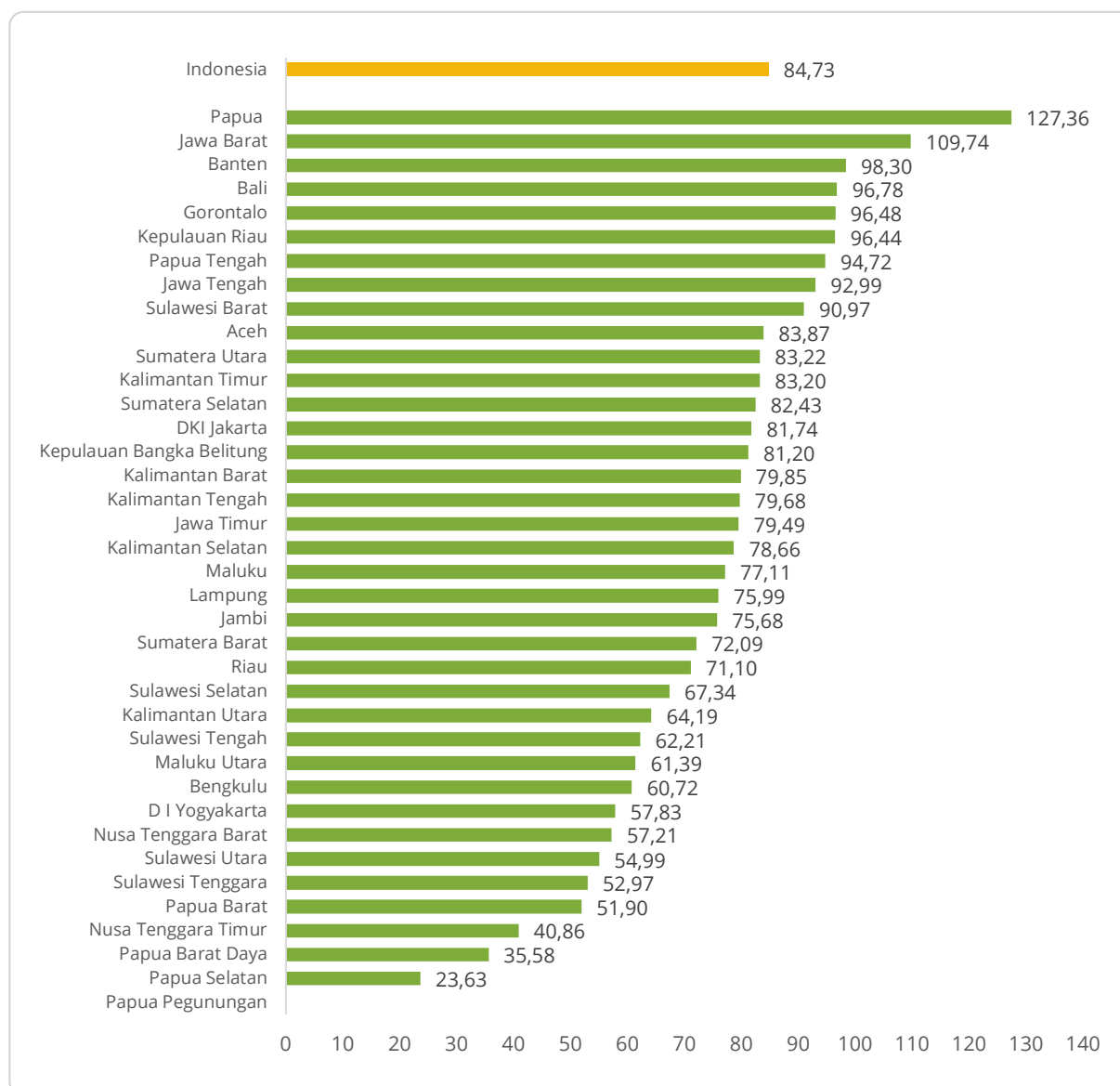
GAMBAR 5.37
CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Cakupan nasional SMP/MTS yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta didik mencapai 86,22%. Provinsi yang mencapai cakupan sama dengan dan lebih dari 90% adalah 10 dari 38 provinsi (sekitar 26,31%). Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Provinsi Banten dengan 99,57%, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98,38%, serta Provinsi Bali dengan 97,75%. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki capaian paling rendah dengan 37,26% dan diikuti oleh Papua Selatan dengan capaian 37,43%, sedangkan tidak ada laporan capaian dari Provinsi Papua Pegunungan.

GAMBAR 5.38
CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Dengan cakupan sebesar 84,73% pada tahun 2024, pelayanan kesehatan di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) menunjukkan cukupnya upaya peningkatan kesehatan di tingkat pendidikan menengah atas. Lebih dari 80% SMA/MA di sebagian besar provinsi telah menyediakan layanan kesehatan bagi para siswa, mencerminkan komitmen untuk mendukung kesehatan remaja di masa transisi yang sangat penting ini.

Namun demikian, masih terdapat beberapa provinsi dengan cakupan pelayanan kesehatan di sekolah pada kisaran 60–80%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan ketersediaan layanan kesehatan di beberapa wilayah, yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Peningkatan cakupan di daerah-daerah tersebut penting agar lebih banyak siswa dapat memperoleh manfaat dari program-program kesehatan di lingkungan sekolah.

Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan terarah terhadap cakupan pelayanan kesehatan di sekolah, diharapkan dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Langkah ini akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan remaja secara menyeluruh, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat, aman, dan produktif.

C. GIZI

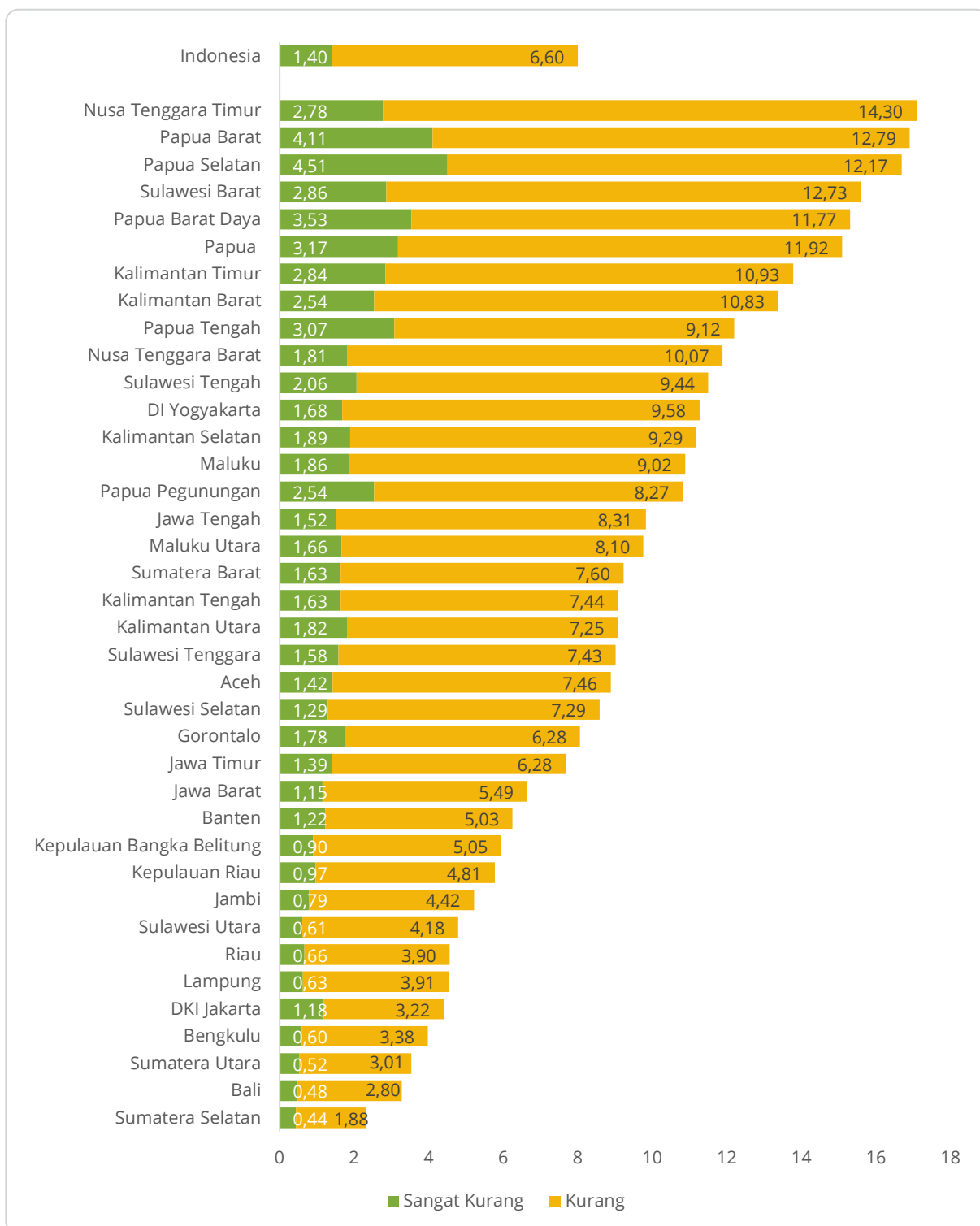
Pembahasan ini berisi status gizi balita beserta pencegahan dan penanganan masalah gizi, di antaranya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita gizi kurang.

1. Status Gizi Balita

Standar antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai status gizi anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Adapun standar antropometri yang digunakan terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan WHO Reference 2007 untuk anak 5-18 tahun.

Gambar 5.39 menunjukkan provinsi dengan persentase berat badan kurang (termasuk berat badan kurang dan sangat kurang) paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase berat badan kurang paling rendah adalah Provinsi Sumatera Selatan. Secara nasional persentase berat badan kurang adalah 6,60% dan berat badan sangat kurang adalah 1,40%. Persentase selengkapnya untuk persentase baduta menurut status gizi dengan indeks BB/U di setiap provinsi dapat dilihat pada lampiran 48.a.

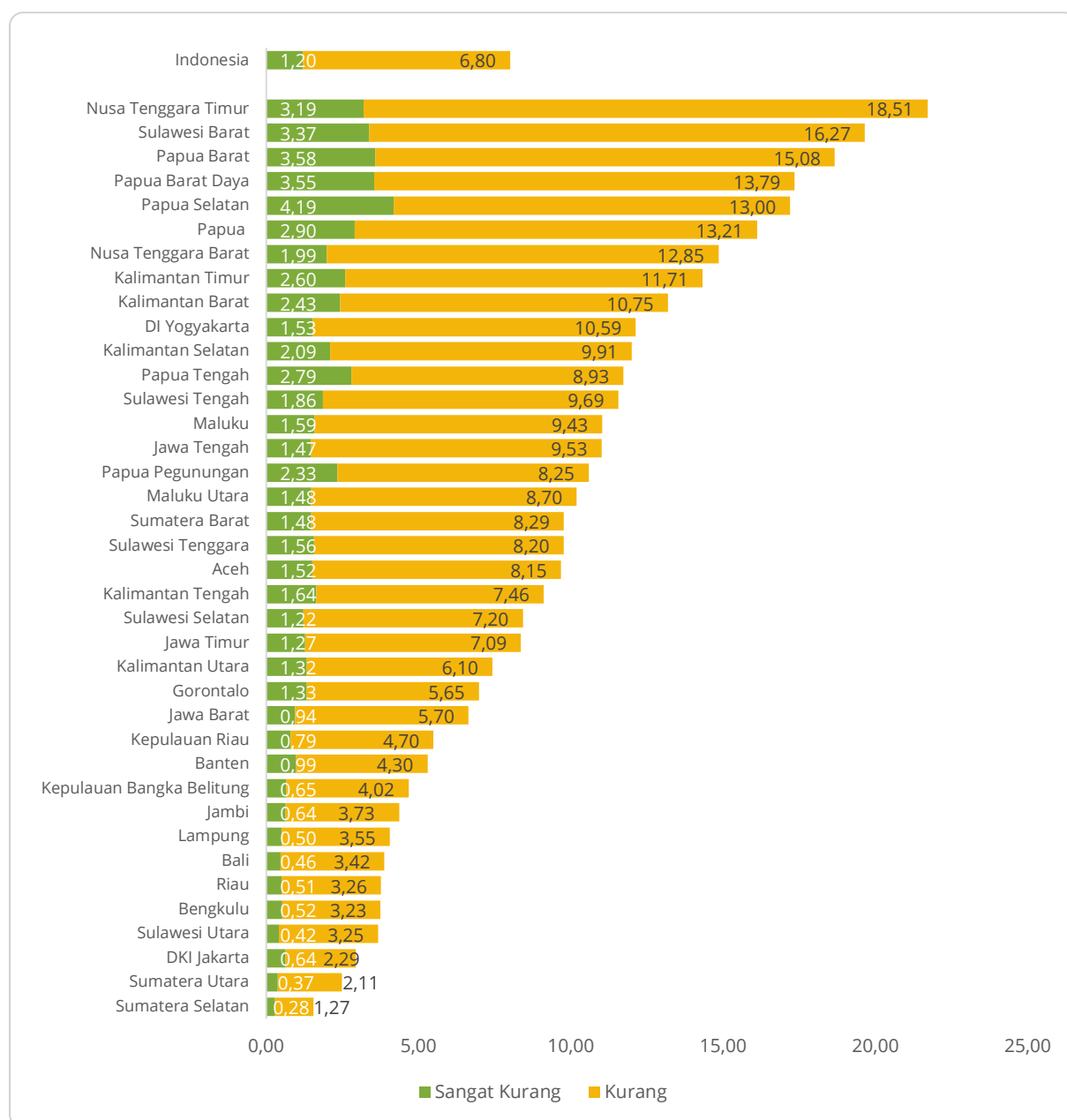
GAMBAR 5.39
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Pada Balita usia 0-59 bulan, seperti pada Gambar 5.40 menunjukkan provinsi dengan persentase berat badan kurang (termasuk berat badan kurang dan sangat kurang) paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (21,7%), sedangkan provinsi dengan persentase berat badan kurang paling rendah adalah (termasuk berat badan kurang dan sangat kurang) Provinsi Sumatera Selatan (1,55%). Secara nasional persentase berat badan kurang adalah 6,60% dan berat badan sangat kurang adalah 1,40%. Persentase selengkapnya untuk persentase Balita menurut status gizi dengan indeks BB/U di setiap provinsi dapat dilihat pada lampiran 48.b.

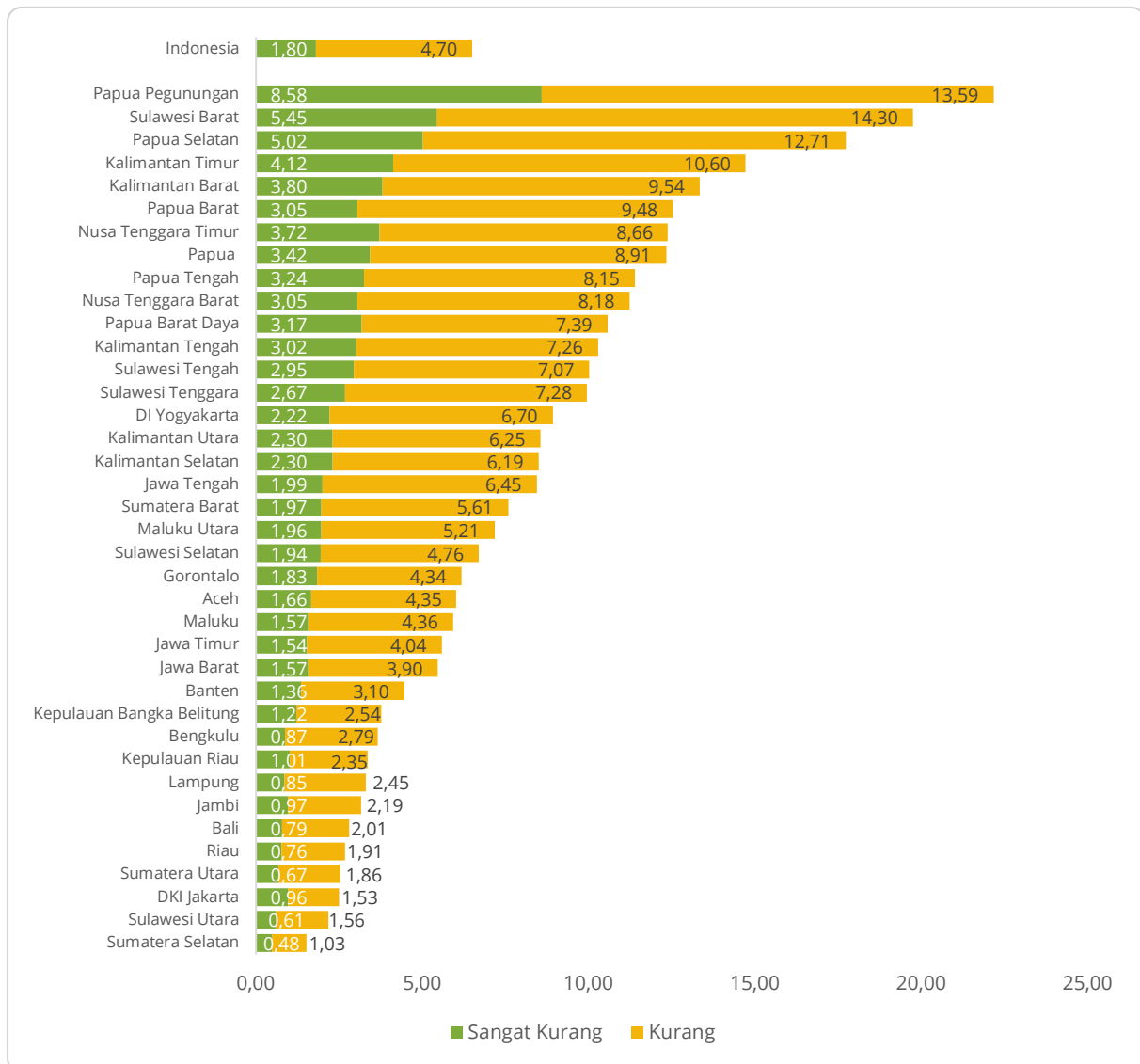
GAMBAR 5.40
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG
PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Status gizi pada balita berdasarkan Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) meliputi kategori sangat pendek dan pendek. Provinsi dengan persentase baduta sangat pendek dan pendek tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan 22,17%, sedangkan provinsi dengan persentase baduta sangat pendek dan pendek terendah adalah Sumatera Selatan dengan 1,51%. Persentase nasional menunjukkan bahwa 1,8% baduta berkategori sangat pendek dan 4,70% baduta masuk kategori pendek seperti terlihat pada Gambar 5.41.

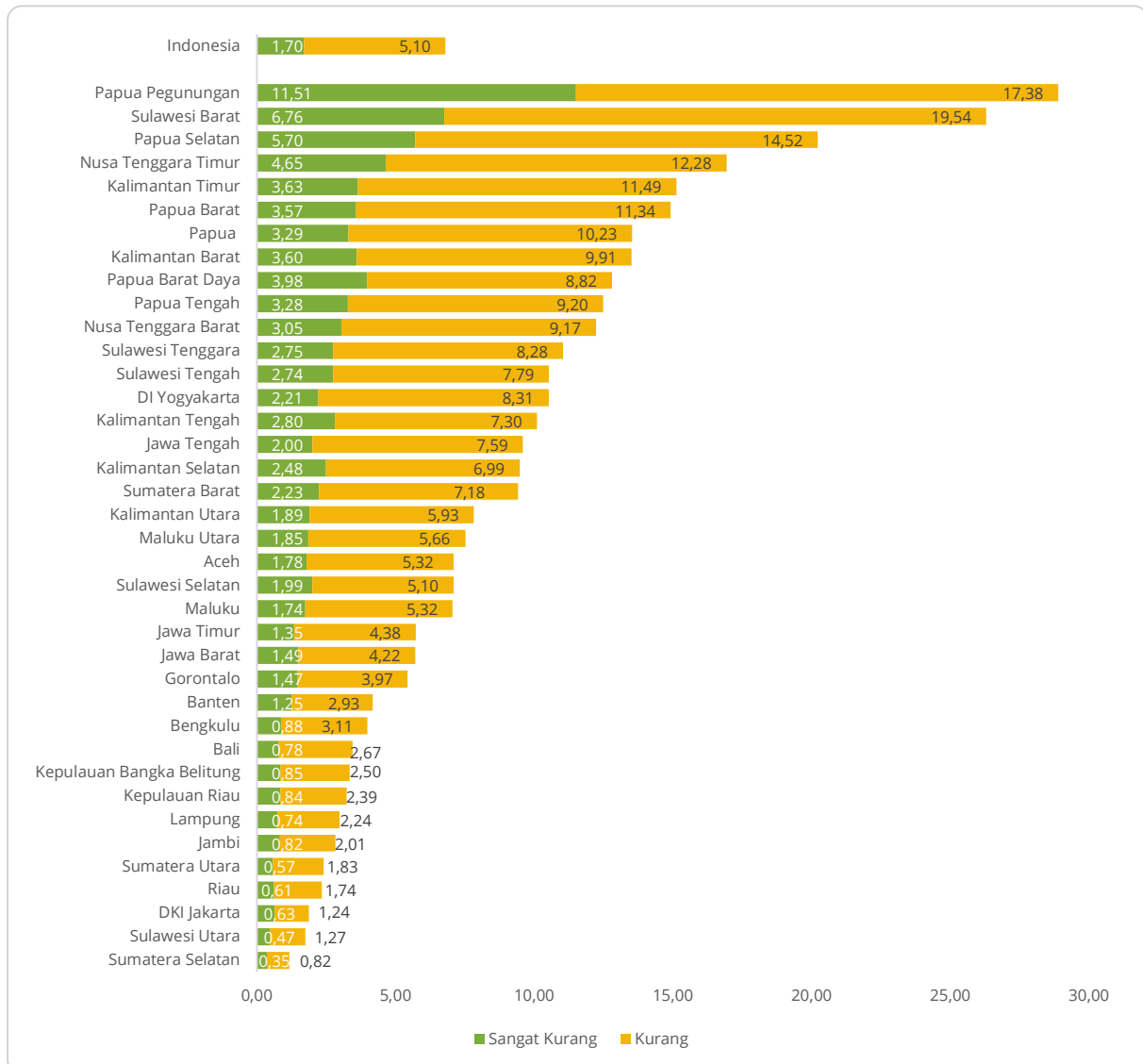
GAMBAR 5.41
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Untuk usia balita, secara nasional persentase balita sangat pendek sebesar 1,70% dan balita pendek sebesar 5,10%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk kategori tinggi badan sangat pendek dan pendek pada balita adalah Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan (lihat Gambar 5.42).

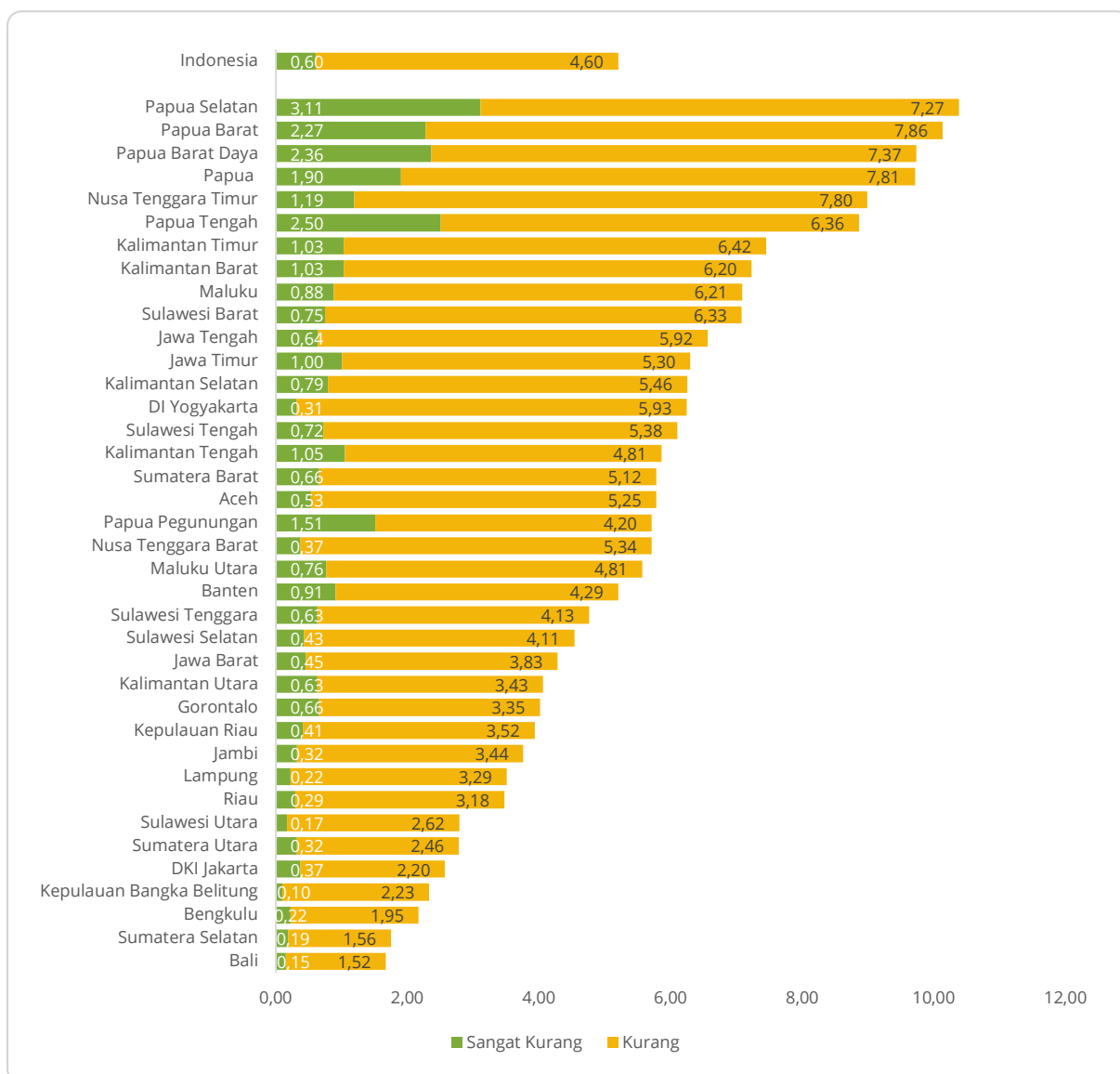
GAMBAR 5.42
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Masalah gizi pada baduta berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) meliputi kategori gizi buruk dan gizi kurang. Pada Gambar 5.43 dapat dilihat bahwa secara nasional, persentase baduta dengan gizi buruk sebesar 0,60% dan baduta dengan gizi kurang sebesar 4,60%. Provinsi dengan baduta gizi kurang dan gizi buruk tertinggi adalah Provinsi Papua Selatan dan terendah adalah Provinsi Bali. Secara keseluruhan data presentase status gizi balita berdasarkan BB/TB dapat dilihat pada lampiran 48.e.

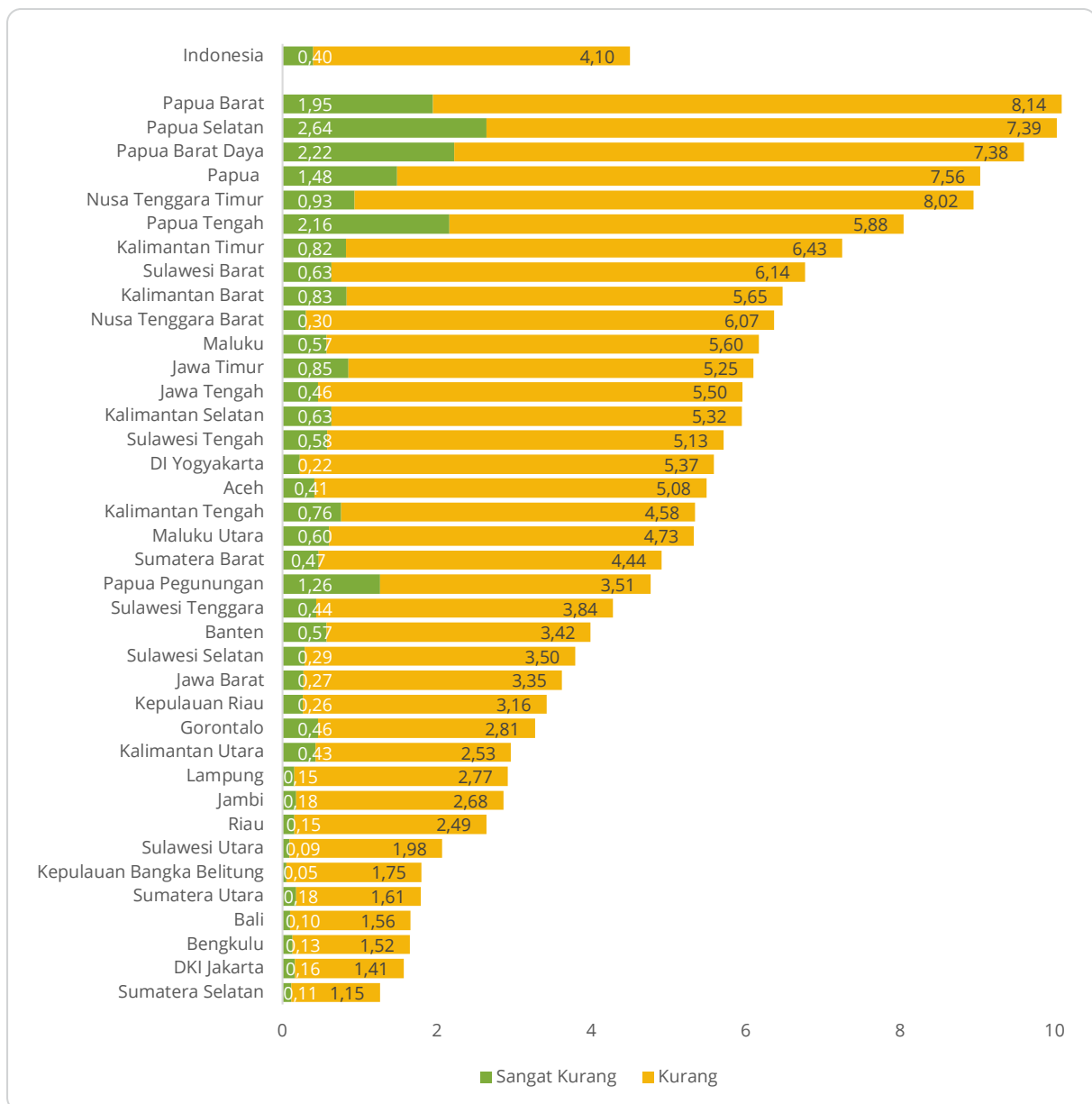
GAMBAR 5.43
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan pengukuran indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) secara nasional pada balita usia 0-59 bulan, persentase balita gizi buruk sebesar 0,40% dan balita gizi kurang sebesar 4,10%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita adalah Provinsi Papua Barat, diikuti oleh Provinsi Papua Selatan, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan (lihat Gambar 5.44)

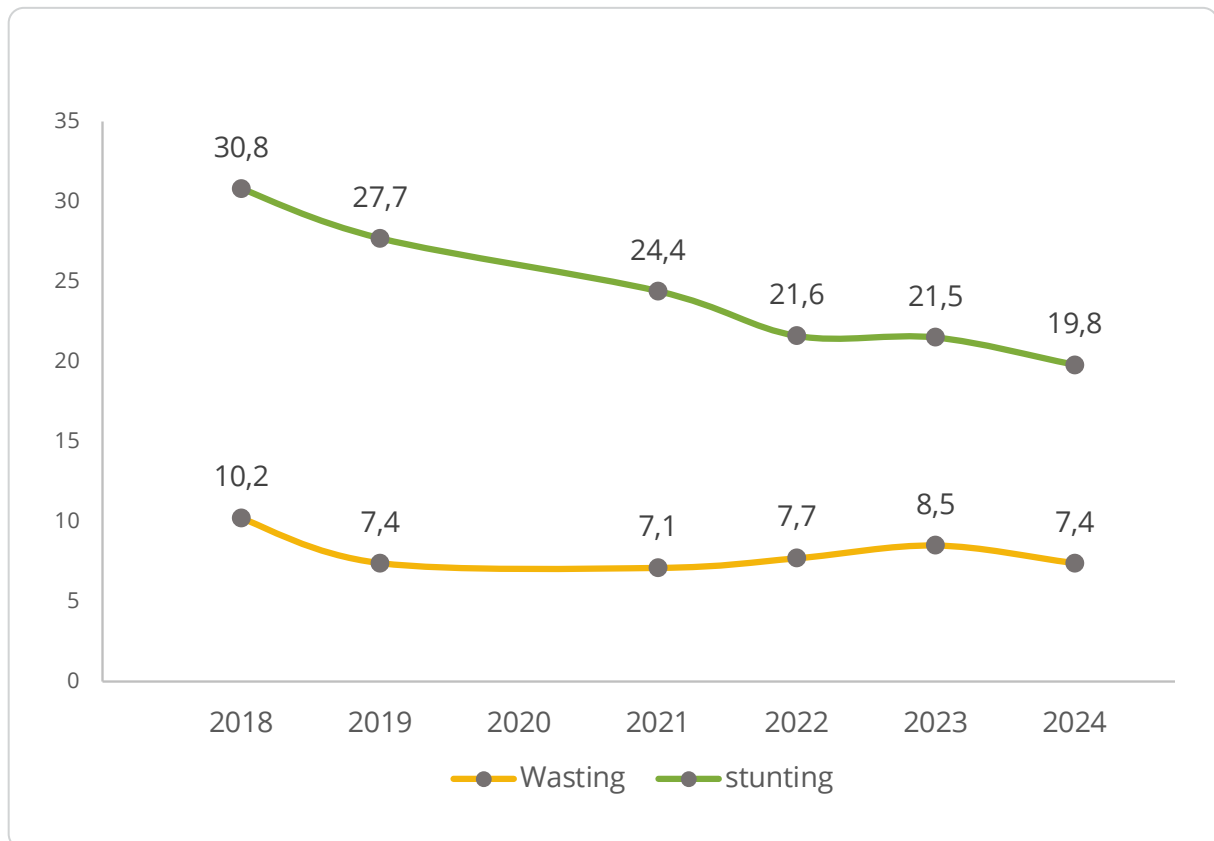
GAMBAR 5.44
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Pada Gambar 5.45 terlihat bahwa prevalensi stunting (sangat pendek dan pendek) dan wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita usia 0-59 bulan sejak 2018-2023 cenderung mengalami penurunan, meskipun untuk wasting mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun apada 2024, prevalensinya berhasil turun kembali. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang baik dalam upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk penurunan angka stunting dan wasting.

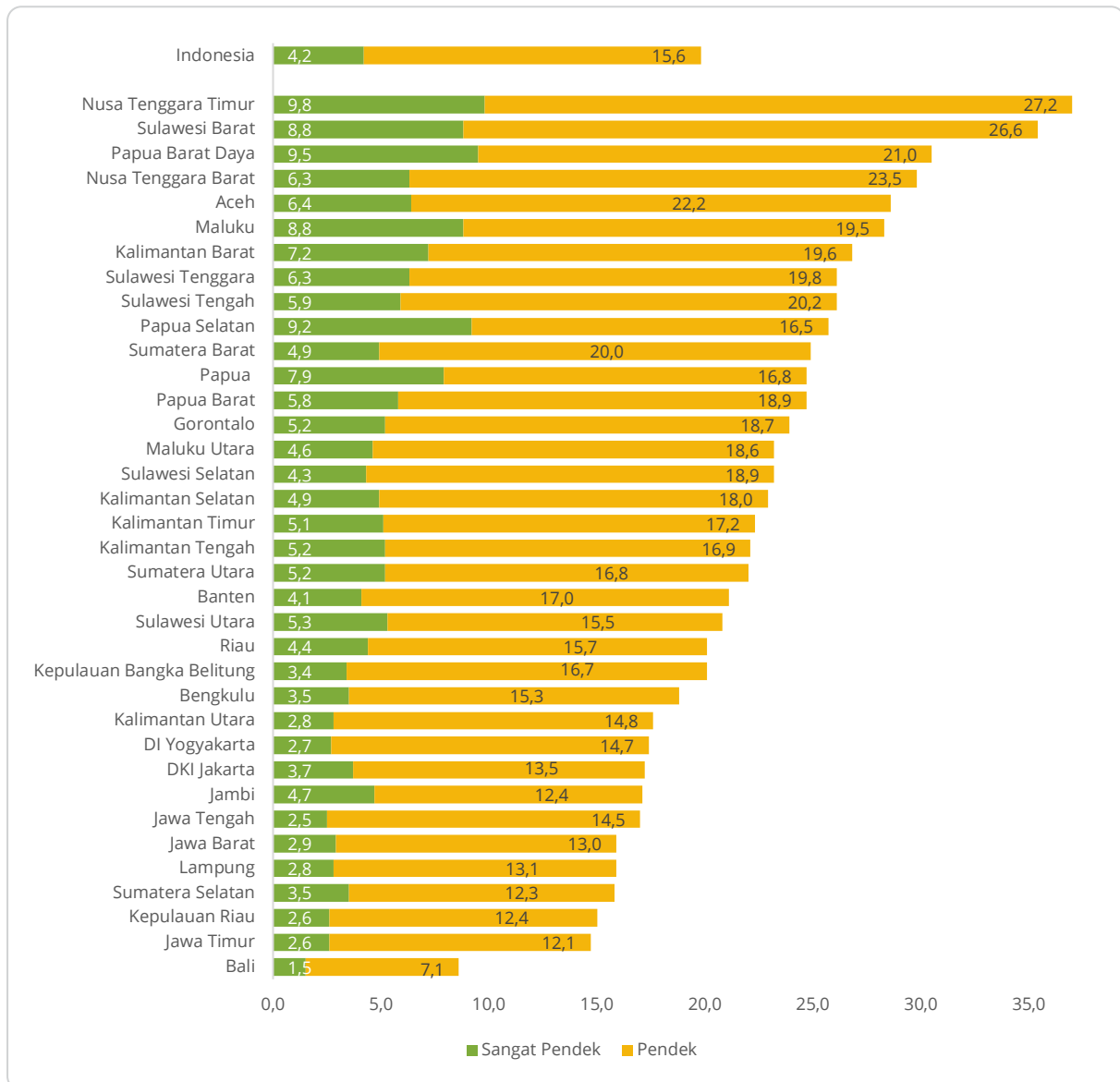
GAMBAR 5.45
PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (STUNTING) DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG (WASTING) PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA
TAHUN 2018-2024



Sumber: Kemenkes PSG 2017, Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021-2024

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, diketahui bahwa prevalensi balita sangat pendek dan pendek tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya, sedangkan terendah adalah Provinsi Bali (Gambar 5.46).

GAMBAR 5.46
PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: SSGI 2024, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kemenkes RI, 2024

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat dalam upaya penerapan gizi seimbang perlu dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), mengonsumsi menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

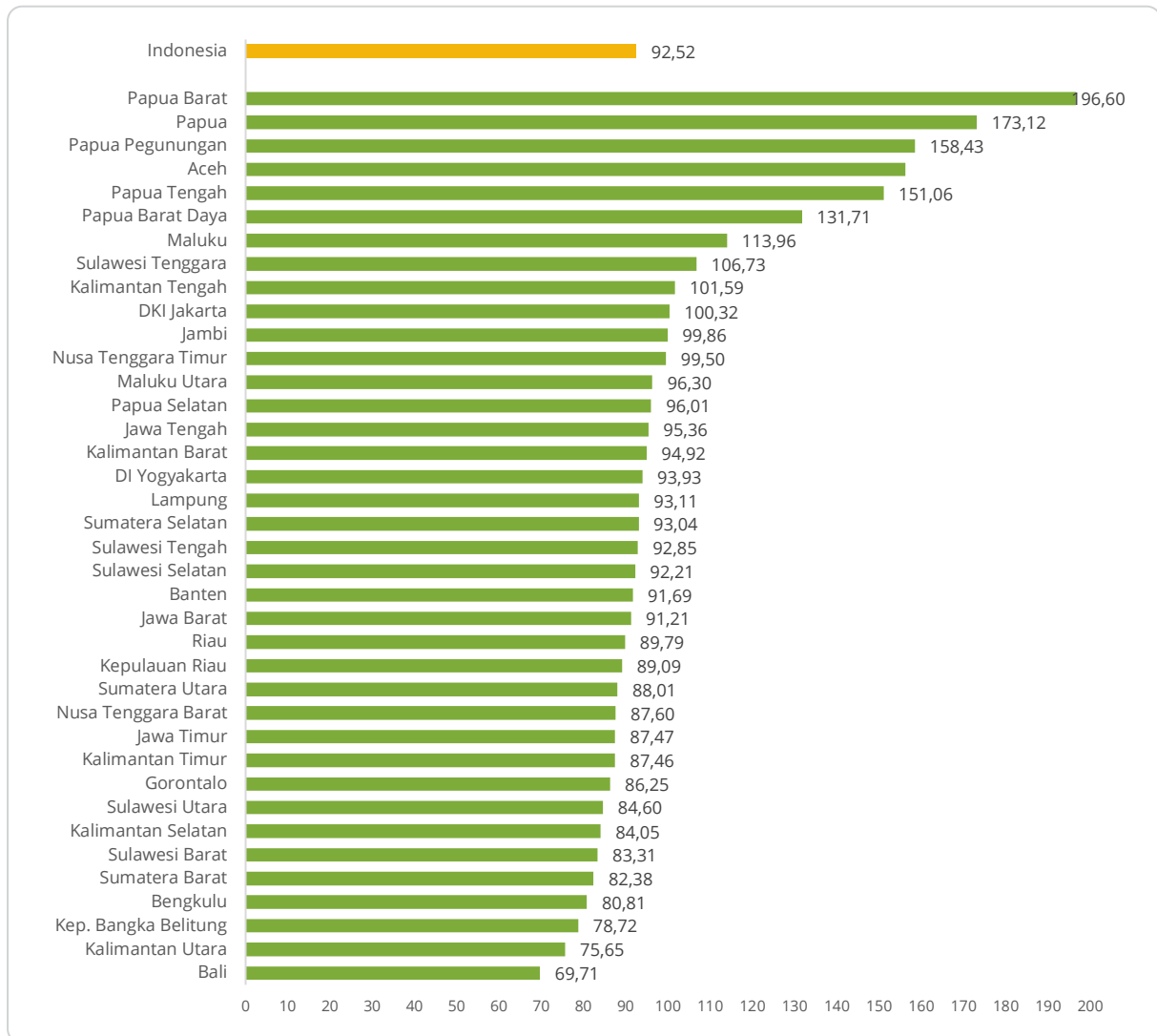
a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Beberapa manfaat IMD di antaranya, mengurangi angka kematian bayi, membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil, bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI (Air Susu Ibu) dari payudara. Inisiasi Menyusu Dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui.

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pada tahun 2024 persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD secara nasional sebesar 92,52%. Provinsi dengan persentase bayi baru lahir mendapat IMD tertinggi adalah Provinsi Papua Barat (196,60%) sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bali (69,71%). Target nasional IMD tahun 2024 sebesar 55%, sehingga seluruh provinsi telah mencapai target. (Lihat Gambar 5.47)

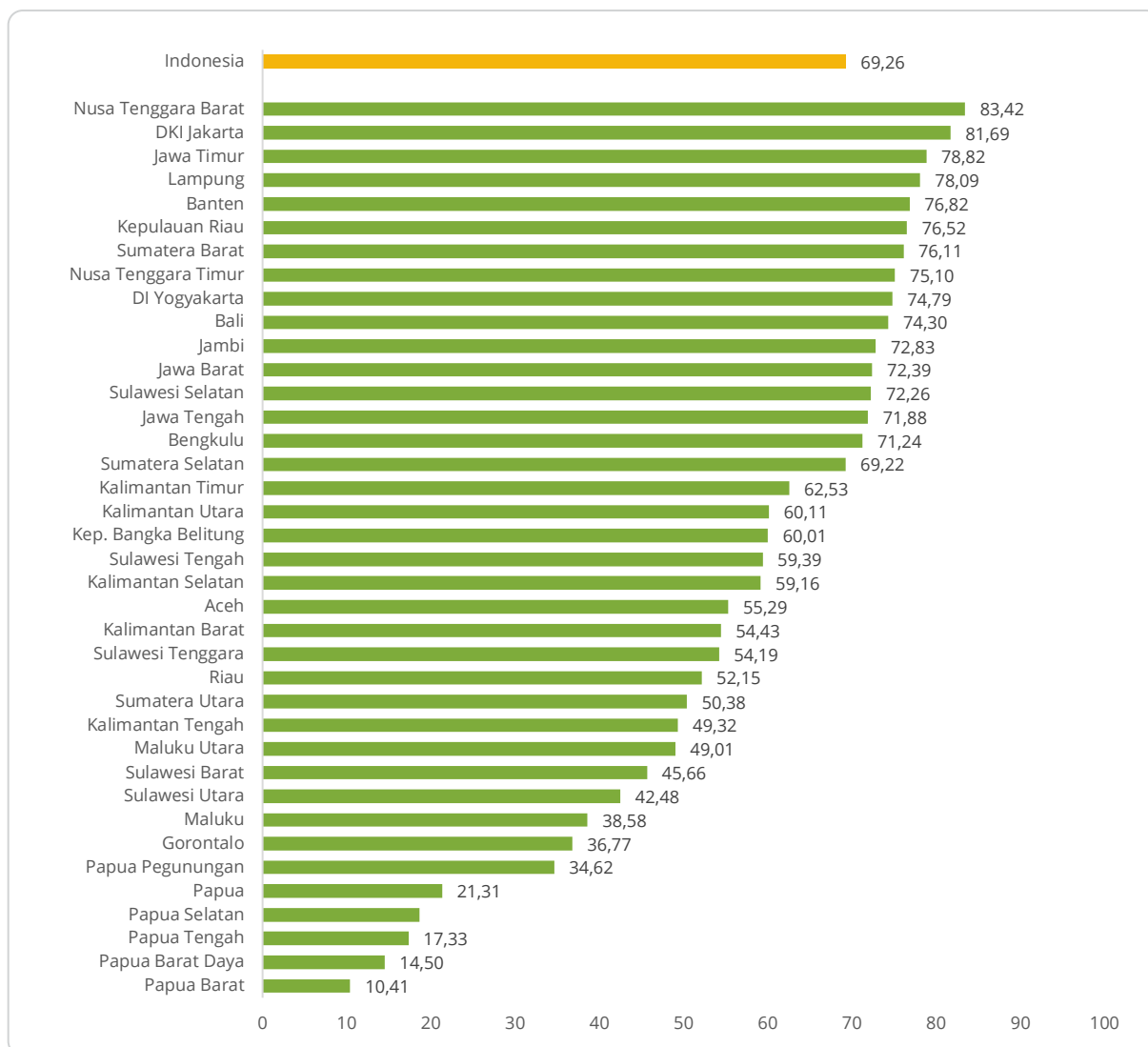
GAMBAR 5.47
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Cakupan bayi berusia 6 bulan mendapat ASI eksklusif tahun 2024 adalah 69,26%. Persentase cakupan pemberian ASI eksklusif tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (83,42%), sedangkan persentase terendah di Provinsi Papua Barat (10,4%). Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 39.

GAMBAR 5.48
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



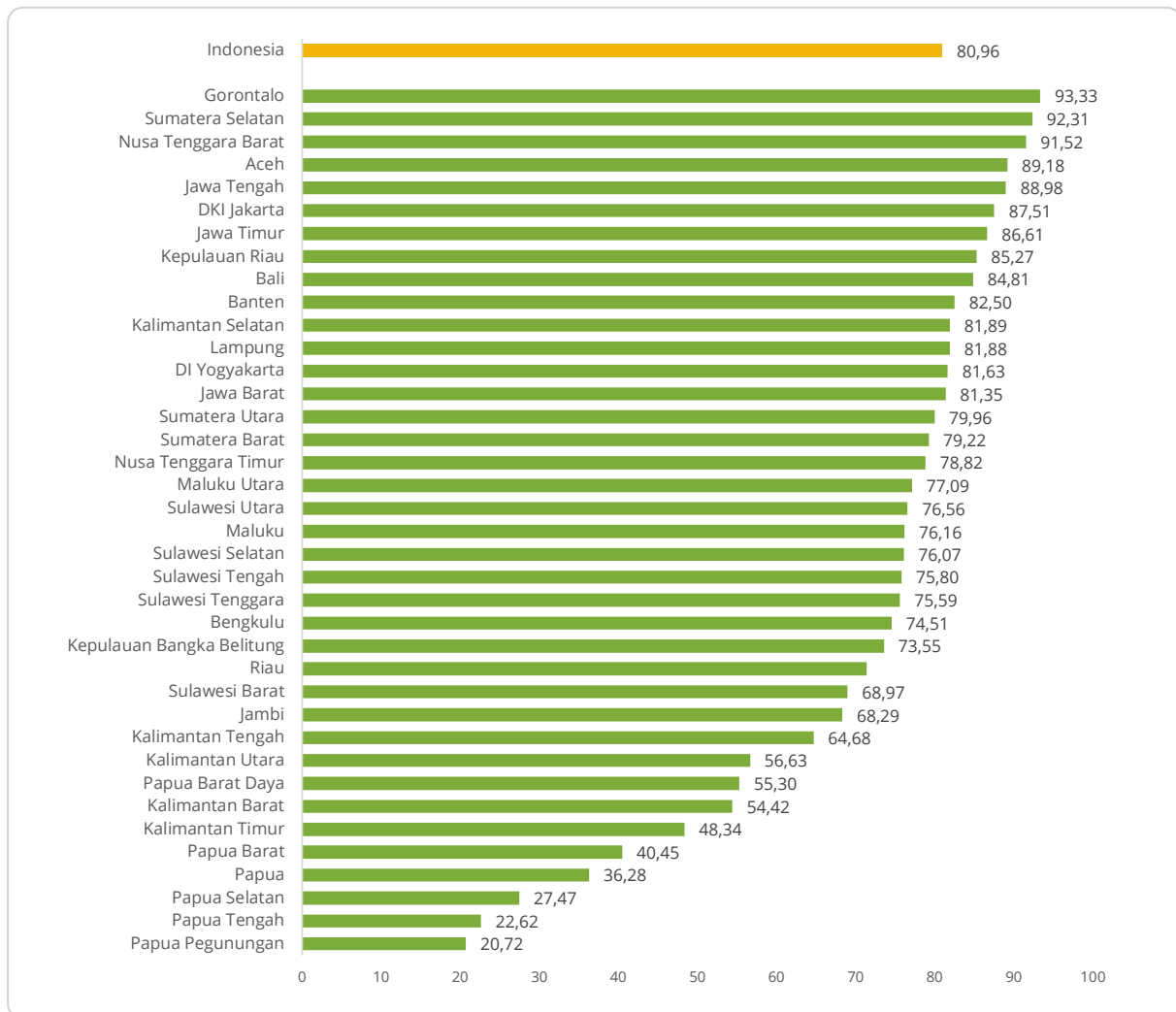
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

b. Penimbangan Balita

Penimbangan balita merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan balita adalah bagian dari kegiatan rutin pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada pelayanan gizi dan kesehatan di Puskesmas. Pemantauan pertumbuhan balita juga berfungsi sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan pada balita. Melalui penimbangan balita tersebut dapat diketahui status gizi balita yang bermasalah sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai dengan permasalahannya.

Persentase rata-rata balita yang ditimbang di Indonesia pada tahun 2024 adalah 80,96% anak per bulan. Persentase tertinggi dicapai oleh Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 93,33%, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebesar 20,72%. Data lebih lengkap mengenai rata-rata balita yang ditimbang per bulan dapat dilihat di lampiran 47.

GAMBAR 5.49
PERSENTASE BALITA DITIMBANG PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

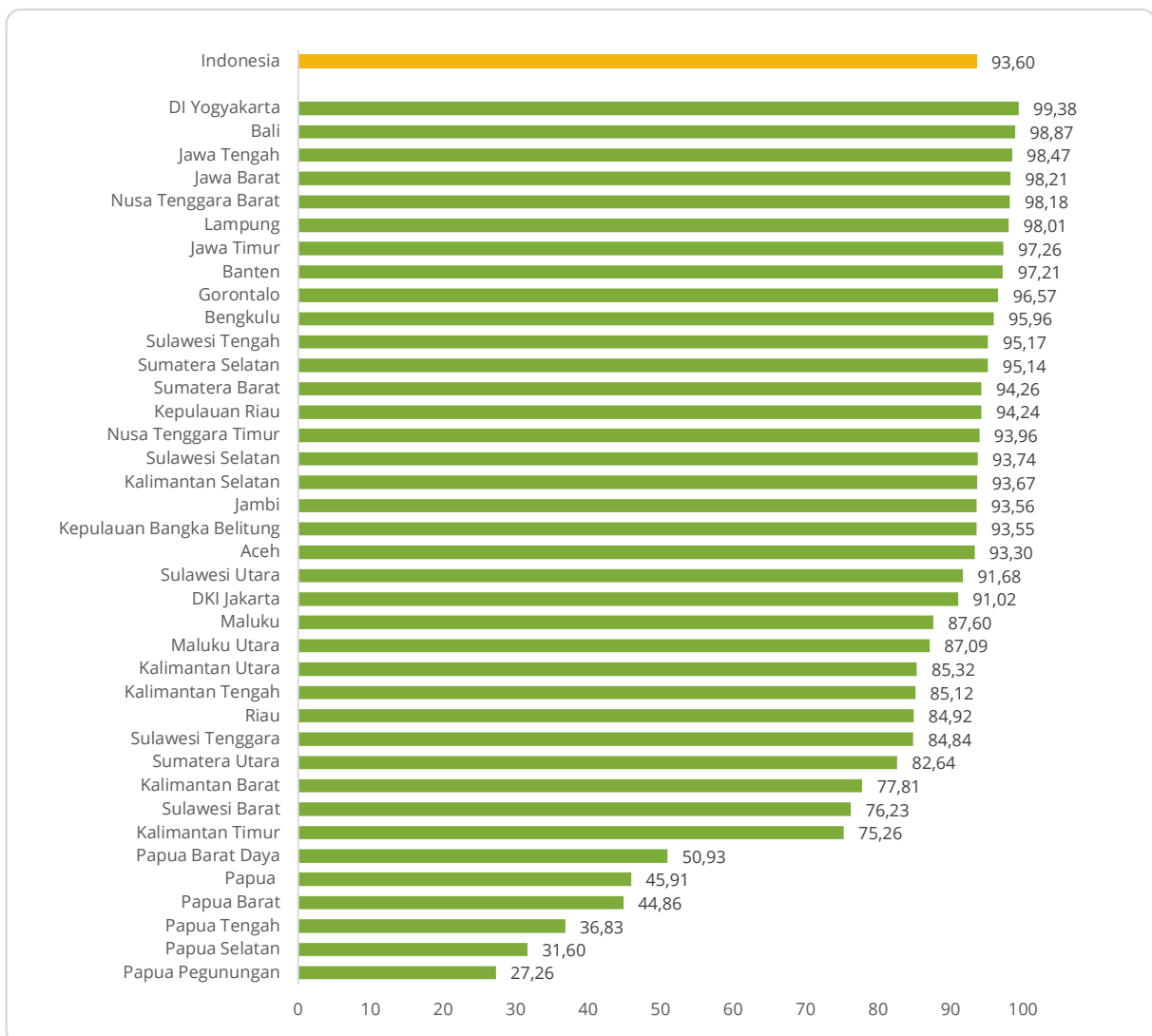
Vitamin A merupakan zat gizi penting yang terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pertumbuhan sel darah merah, sel limfosit, antibodi juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Adapun vitamin A juga bisa mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan serta mencegah anemia pada ibu nifas. Sedangkan apabila anak kekurangan vitamin A, maka anak bisa menjadi rentan terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernafasan atas, campak, dan diare.

Kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (nipple) yang dapat digunting, tidak transparan (opaque), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.

Gambar 5.50 memperlihatkan bahwa cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2024 yaitu sebesar 93,60%. Persentase cakupan pemberian vitamin A tertinggi dicapai Provinsi DI Yogyakarta (99,38%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (27,26%).

GAMBAR 5.50
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

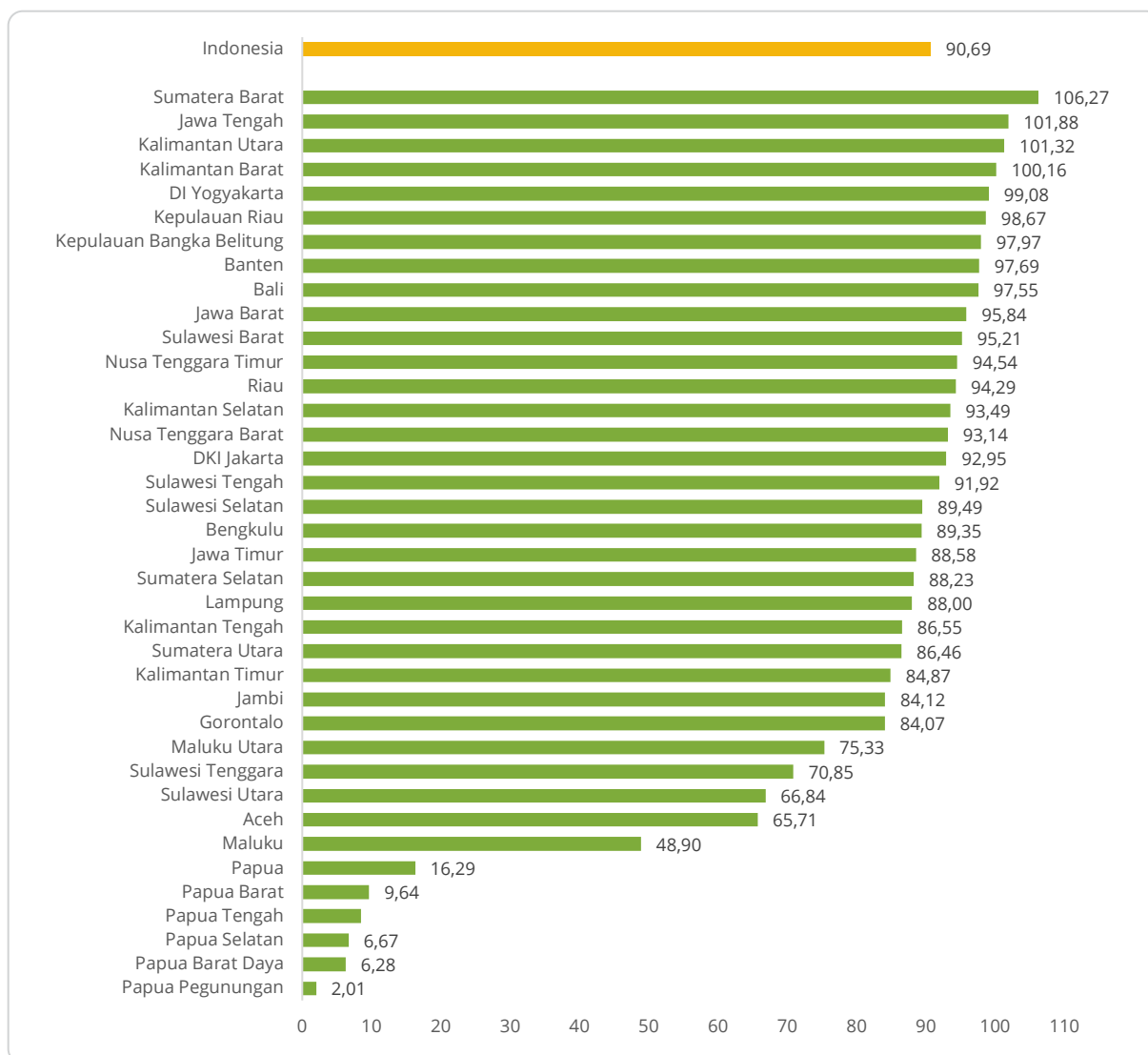
Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada semua kelompok umur mulai dari balita sampai usia lanjut. Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia dikarenakan siklus menstruasi setiap bulan. Anemia dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan produktivitas. Anemia yang terjadi pada rematri juga dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak.

Penanganan dan pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menunjang pembentukan sel darah merah sebagai pencegahan, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Konsumsi makanan beraneka ragam dan kaya akan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C seperti yang terdapat pada hati, daging, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau gelap, buah-buahan, dsb. Namun tidak semua masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Indonesia pada tahun 2024 adalah 90,69%. Cakupan pemberian TTD pada remaja putri tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat (106,27%), sedangkan persentase terendah oleh Provinsi Papua Pegunungan (2,01%), data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.a.

GAMBAR 5.51
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

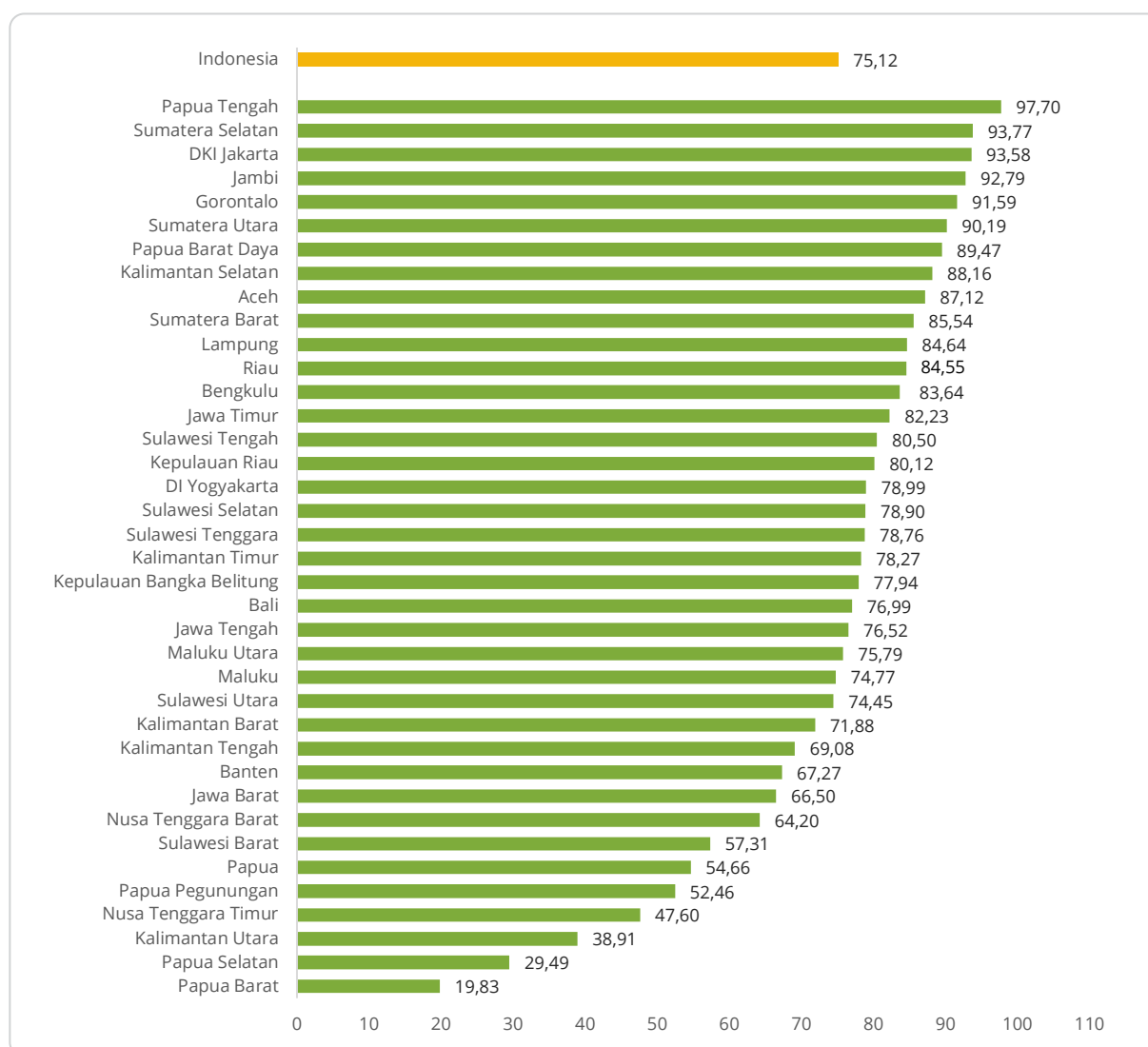


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Gizi Kurang

Gambar 5.52 menunjukkan bahwan Ibu hamil dengan KEK berisiko mengalami partus lama, perdarahan, hingga kematian ibu dan bayi, serta melahirkan bayi prematur, BBLR, atau cacat. Penanggulangannya melalui pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mencukupi kebutuhan gizi, bukan menggantikan makanan utama. Cakupan nasional PMT bagi ibu hamil risiko KEK tahun 2024 tercatat 75,12%.

GAMBAR 5.52
CAKUPAN IBU HAMIL RESIKO KURANG ENERGI KRONIK (KEK) MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

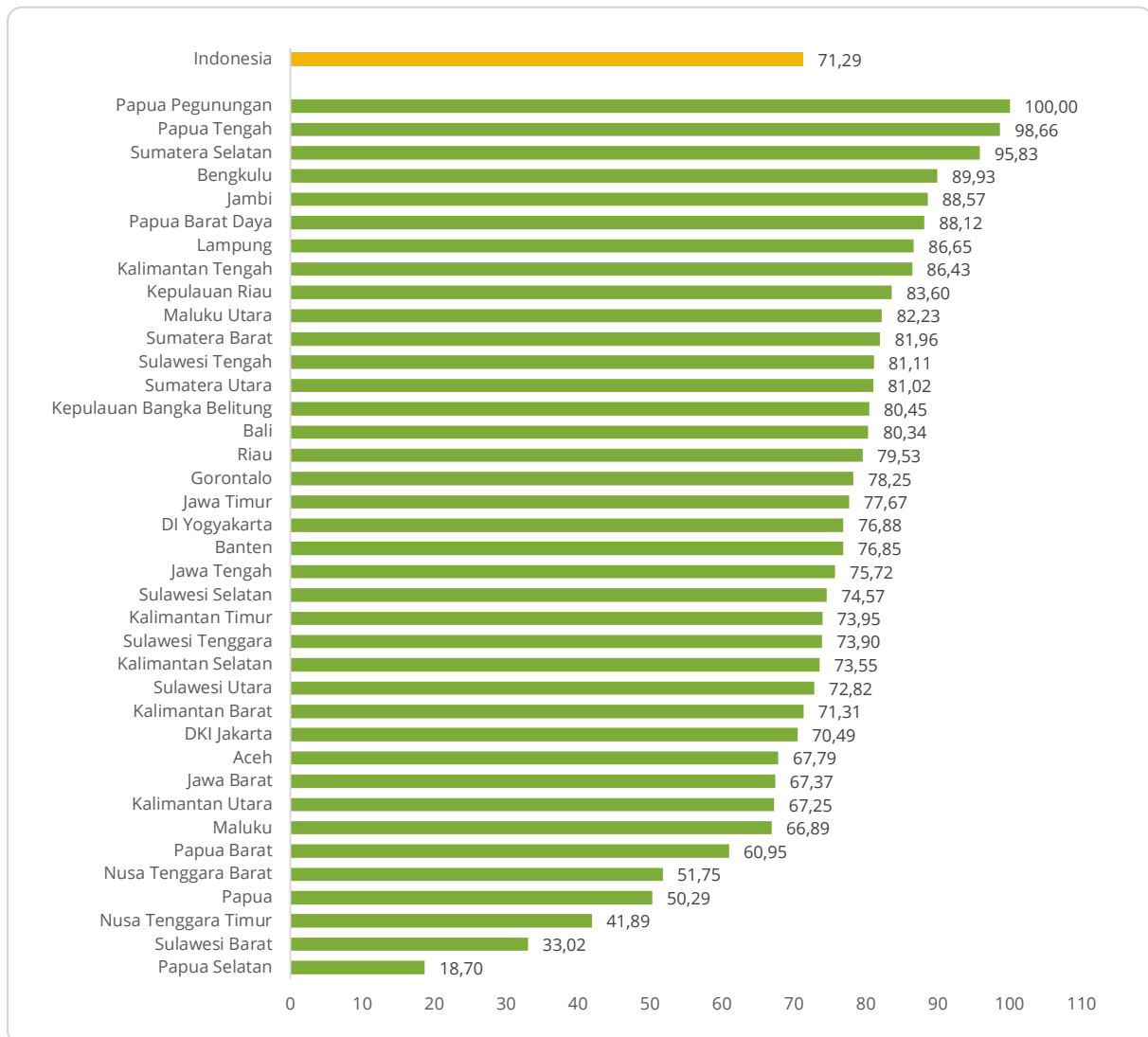


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Langkah ini diperlukan untuk memastikan intervensi gizi bagi ibu hamil KEK tepat sasaran, merata, dan berdampak nyata, dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Pada tahun 2024, cakupan nasional pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang di Indonesia mencapai 71,29%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar balita yang teridentifikasi mengalami gizi kurang telah mendapatkan intervensi berupa PMT, meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.

GAMBAR 5.53
CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Cakupan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang di Provinsi di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa Papua Pegunungan mencapai cakupan sempurna (100%), sementara Papua Selatan tertinggal jauh (18,70%). Perlu upaya khusus untuk mengatasi ketimpangan ini agar seluruh balita gizi kurang di Indonesia mendapat intervensi yang setara dan efektif dalam mendukung tumbuh kembang mereka. Data terkait pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil berisiko KEK dapat dilihat pada lampiran 28.b.

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT



BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi, dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut menyebar dari penderita TBC melalui udara. Kuman TBC ini biasanya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang selain paru (ekstra paru). Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Sekitar 89% TBC diderita oleh orang dewasa (56,5% laki-laki dan 32,5% perempuan) dan 11% diderita oleh anak-anak. Sampai saat ini, TBC masih merupakan penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS, dan merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Sebagian besar estimasi kematian yang disebabkan TBC tercatat di empat negara, yaitu India, Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Jumlah kematian akibat TBC (di antara pasien HIV negatif) secara global pada tahun 2023 sebesar 1,09 juta, hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 1,1 juta (WHO Global TB report, 2024)

Indonesia juga merupakan negara peringkat ke-2 penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 10% dibandingkan seluruh kasus di dunia. Secara global, diperkirakan 10,8 juta orang menderita TBC pada tahun 2023. (WHO Global TB report, 2024).

Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan insiden kasus dan mortalitas/kematian, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Insiden Tuberkulosis

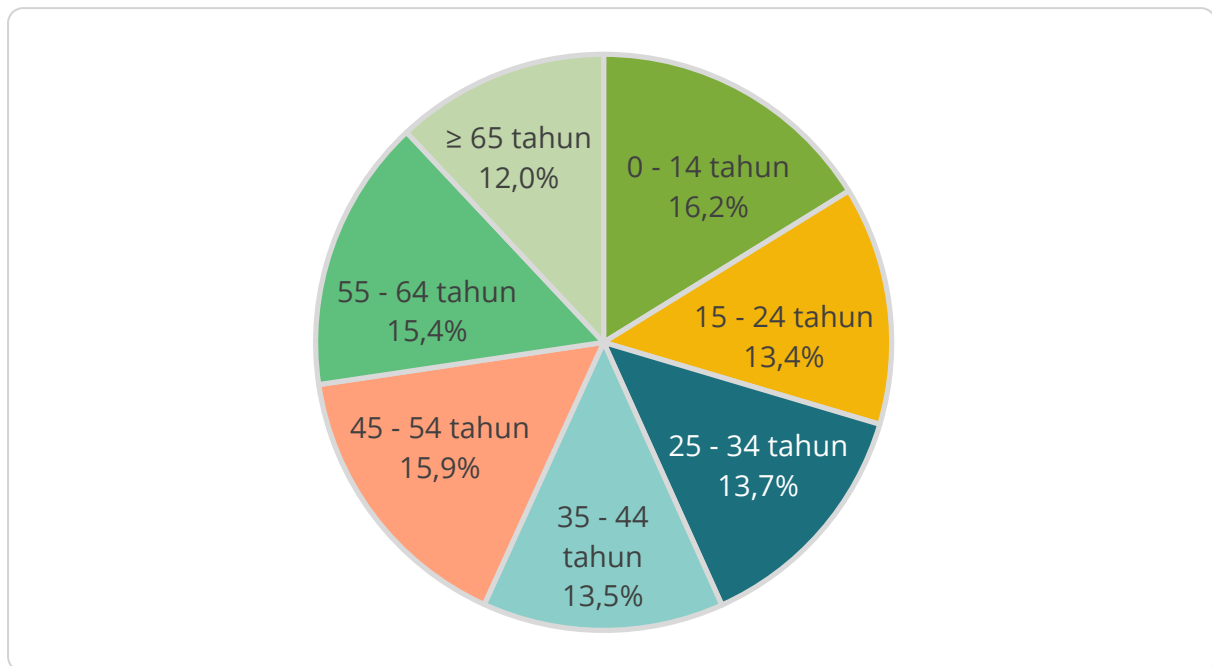
Menurut WHO Global Tuberculosis Report tahun 2024, pada tahun 2023 estimasi angka insiden TBC di Indonesia sebesar 387 per 100.000 penduduk, meningkat sedikit jika dibandingkan dengan angka insiden TBC tahun 2022 yaitu sebesar 386 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian TBC tahun 2023 sebesar 44 per 100.000 penduduk.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2024 jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 856.420 kasus, meningkat cukup tinggi bila dibandingkan semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2023 yaitu sebesar 821.200 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dari jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan baik secara nasional maupun provinsi. Secara nasional jumlah kasus pada laki-laki sebesar 57,9% dan 42,1% pada perempuan. Gambar 6.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kasus TBC terbanyak ditemukan pada kelompok umur anak 0-14 tahun yaitu sebesar 16,2%, diikuti kelompok umur 45-54 tahun (15,9%) dan 55-64 tahun (15,4%).

GAMBAR 6.1
KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

c. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada tahun 2024 adalah 78,6%, meningkat dari tahun 2023 yaitu 77,5%. Namun angka cakupan ini masih belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2024 yaitu 90%.

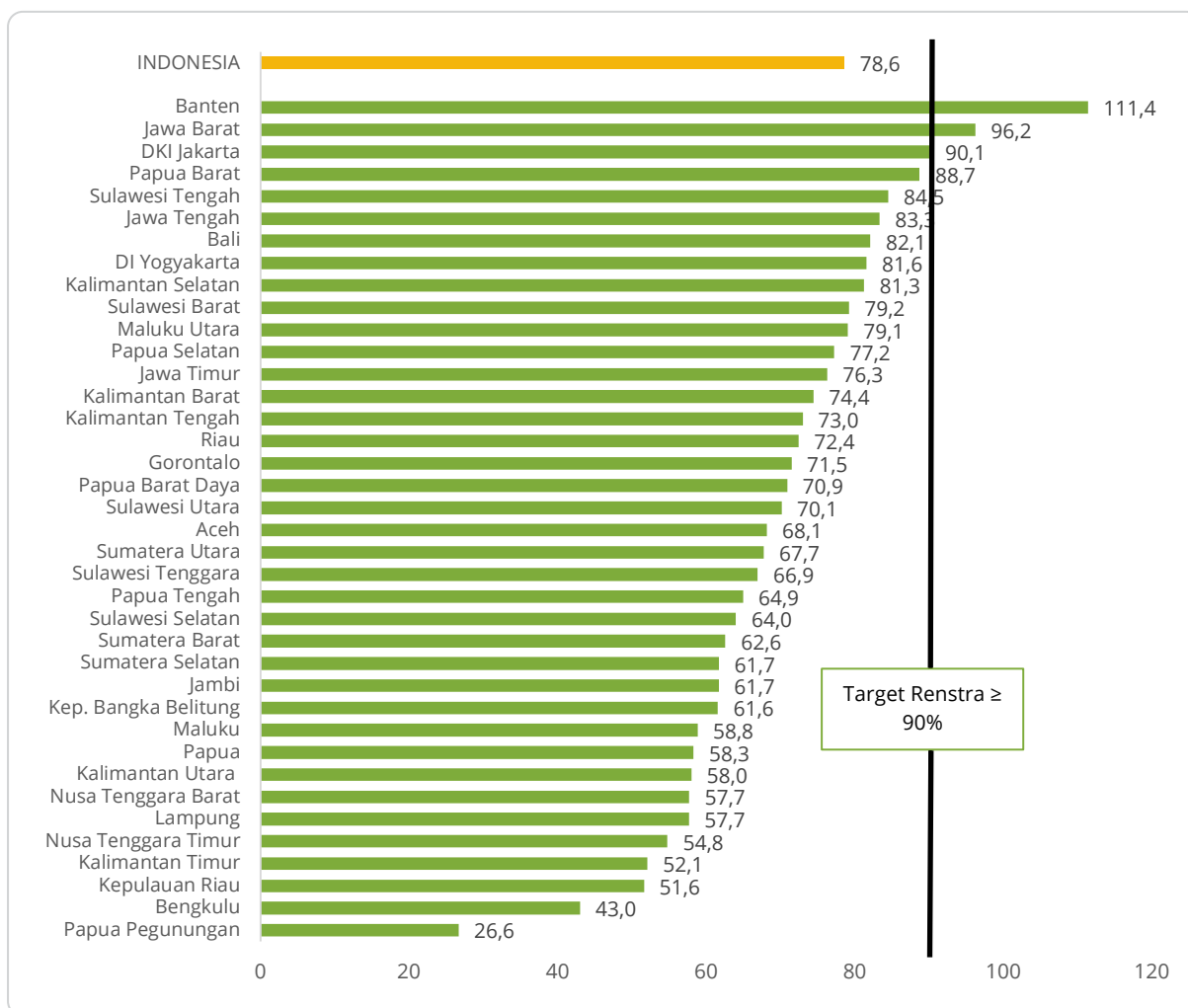
GAMBAR 6.2
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DI INDONESIA
TAHUN 2015-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat tiga provinsi yang telah mencapai target cakupan penemuan kasus tuberkulosis $\geq 90\%$ yaitu Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Kondisi ini menunjukkan penurunan dari tahun 2023 yaitu ada sembilan provinsi yang mencapai target $\geq 85\%$.

GAMBAR 6.3
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

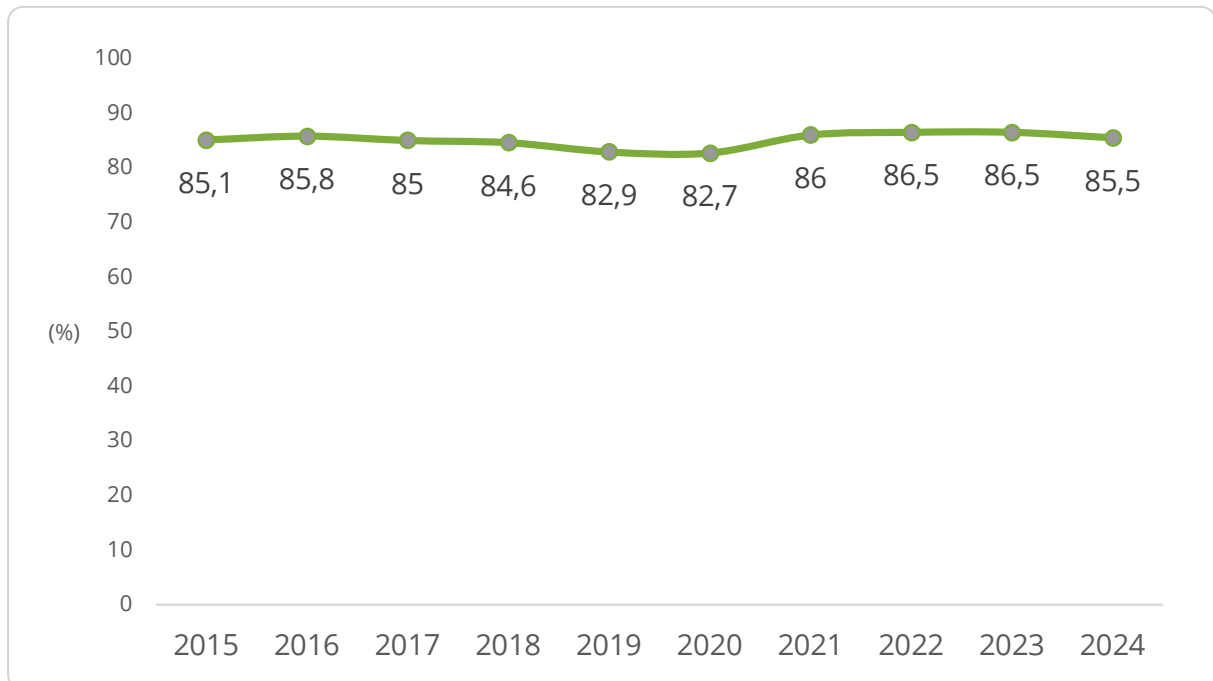


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

d. Angka Keberhasilan Pengobatan (*Treatment Success Rate/TSR*)

Angka keberhasilan pengobatan (*Treatment Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus Tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2024 adalah 85,5%. Angka ini masih belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2024 yaitu 90%.

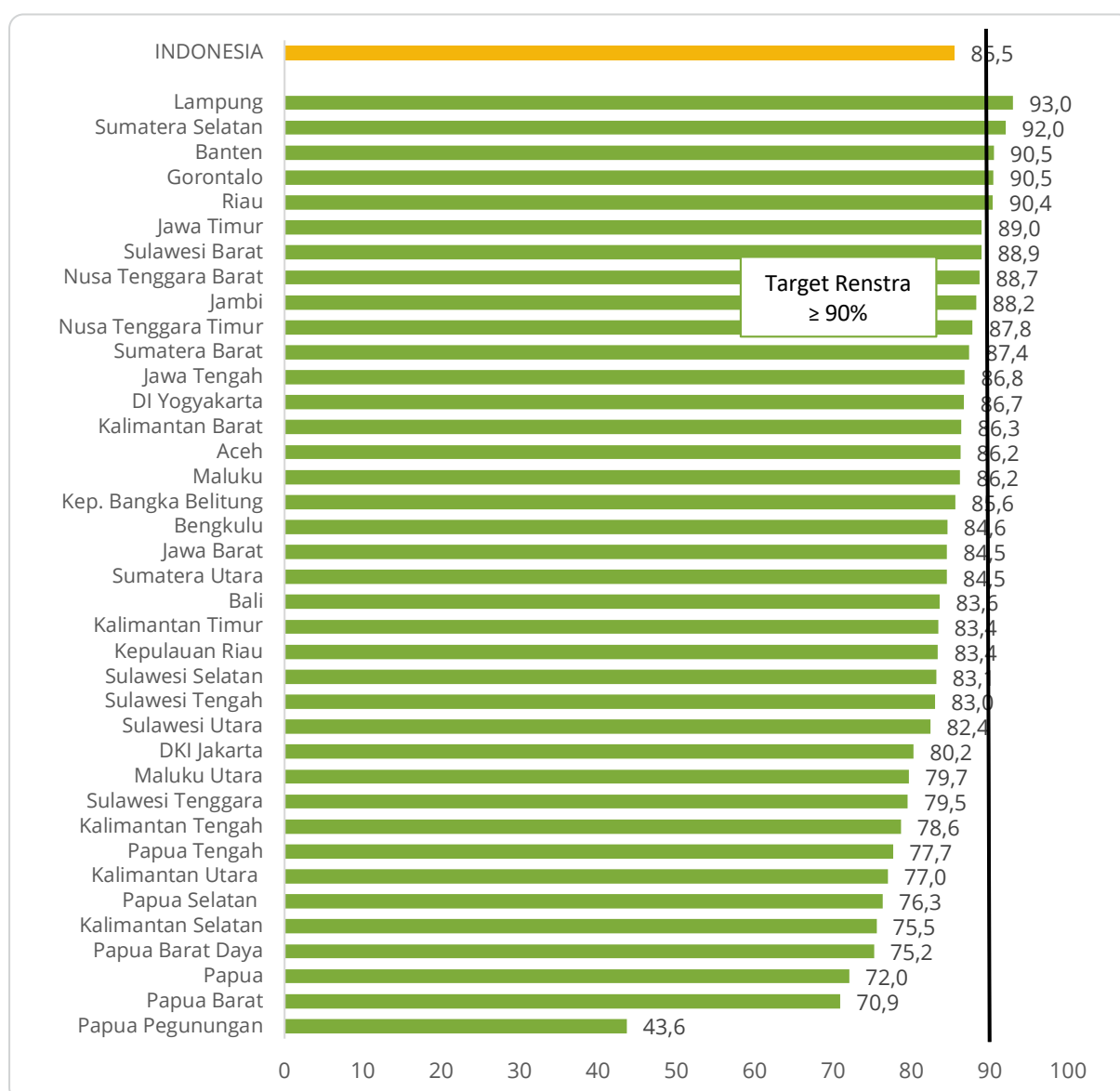
GAMBAR 6.4
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2015-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus Tuberkulosis minimal 90% pada tahun 2024 sebanyak lima provinsi, yaitu Lampung (93%), Sumatera Selatan (92%), Banten (90,5%), Gorontalo (90,5%), dan Riau (90,4%).

GAMBAR 6.5
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

2. HIV dan AIDS

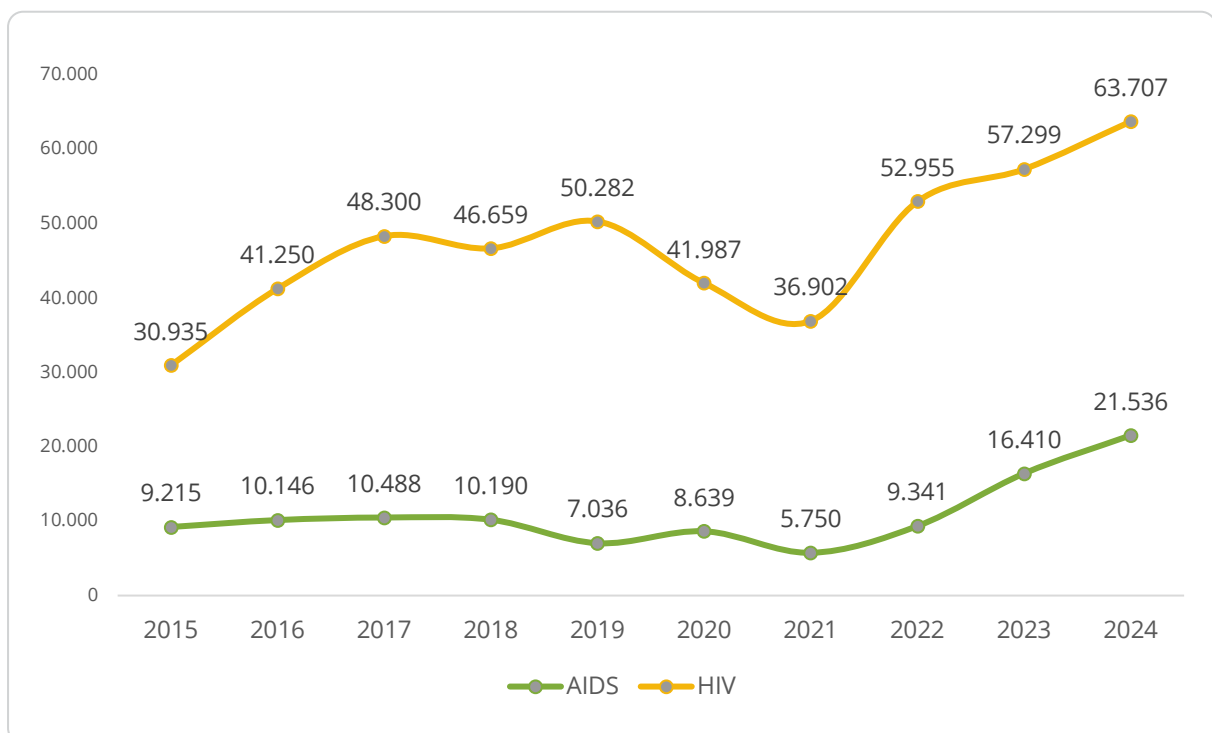
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.

Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada

HIV stadium lanjut (AIDS). Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: (1) menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; (2) menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; (3) menurunkan stigma dan diskriminasi.

Dari Gambar 6.6 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan selama sebelas tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2024 dilaporkan sebanyak 63.707 kasus HIV dan 21.536 kasus AIDS. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tren tiga tahun terakhir. Penurunan kasus yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi sehingga terbatasnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Dari segi penyedia pelayanan, peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan menyebabkan beberapa tenaga kesehatan di layanan diperbantukan untuk membantu penanganan COVID-19, sehingga kegiatan operasional penemuan dan penjangkauan kasus menjadi terhambat. Selain itu pada tahun 2021 tenaga kesehatan di layanan membantu pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

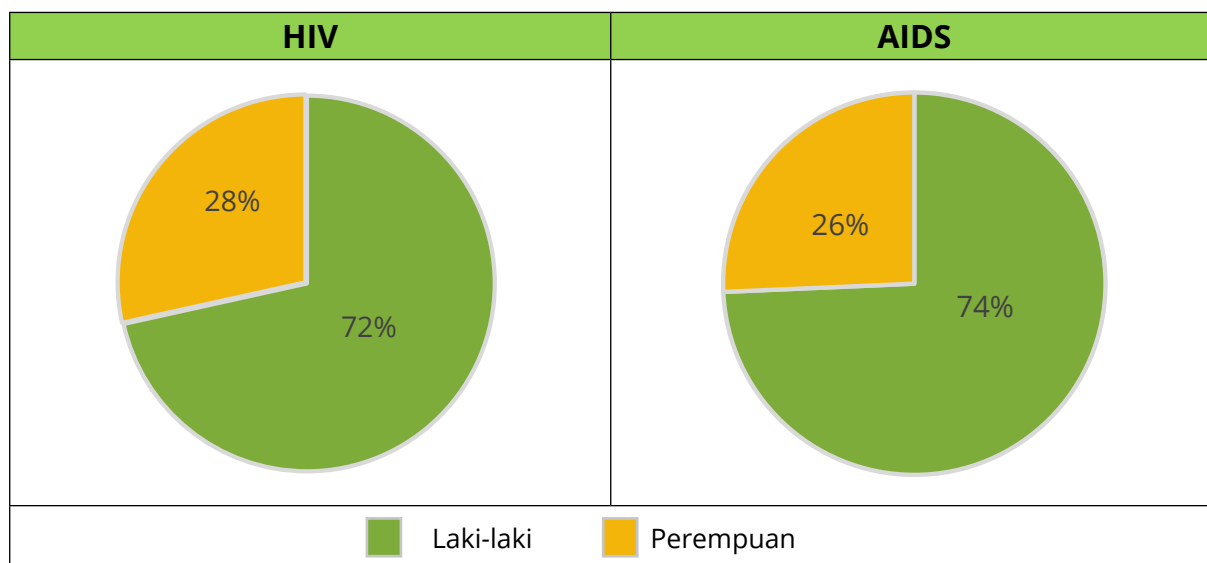
GAMBAR 6.6
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA
TAHUN 2015-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus HIV dan AIDS pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Kesenjangan proporsi kasus kelompok laki-laki yang hampir tiga kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.7 berikut ini.

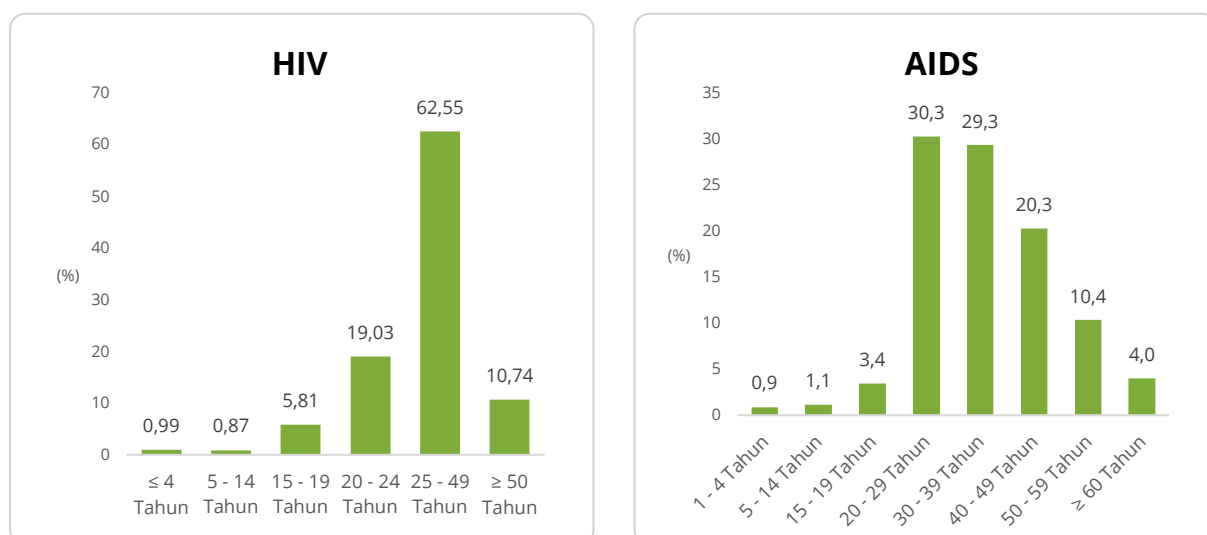
GAMBAR 6.7
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2024 menurut kelompok umur seperti digambarkan pada Gambar 6.8 berikut ini.

GAMBAR 6.8
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif 20-49 tahun. Hal ini disebabkan oleh rentang usia produktif lebih rentan terhadap perilaku beresiko seperti perilaku seks yang tidak aman dan penggunaan NAPZA suntik. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia 1-4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Penanggulangan HIV dan AIDS pada anak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Namun, masih adanya tantangan pengobatan seperti pengobatan pertama bagi anak dengan HIV yang saat ini hanya tersedia di unit pediatrik di Rumah Sakit dan regimen ART yang tidak ramah anak menyebabkan kurang optimalnya pengobatan HIV sehingga terjadi perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan global *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

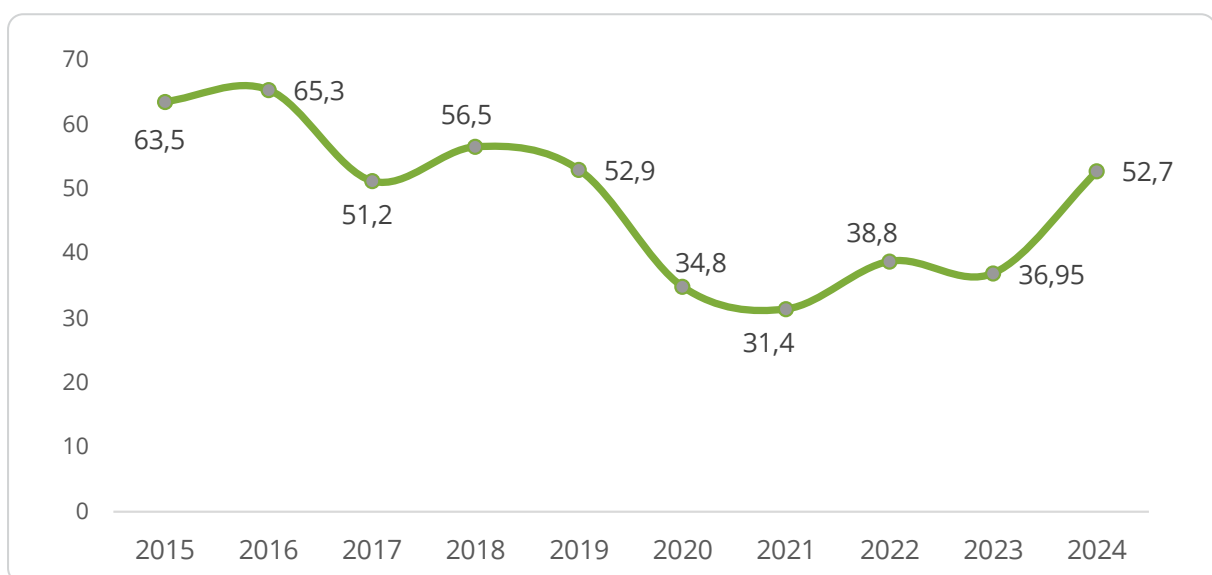
3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan parasit. Sampai saat ini program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita karena penyakit pneumonia memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian balita. Diharapkan dengan penemuan kasus dan pengobatan pneumonia yang sudah sesuai standar dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian balita akibat pneumonia.

Pneumonia masih menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas utama karena infeksi pada bayi dan anak di dunia. Pada tahun 2019, kasus pneumonia menyumbang 740.180 (14%) kasus kematian anak usia di bawah 5 tahun (Balita) (WHO 2021). Sekitar 2.200 anak meninggal setiap hari akibat pneumonia (IVAC 2020; UNICEF 2019a). Pneumonia juga menjadi penyebab kematian Balita terbesar di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI 2020; UNICEF 2019b). Pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 19.000 anak meninggal dunia akibat pneumonia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2015-2024 dapat dilihat pada Gambar 6.9.

GAMBAR 6.9
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2015-2024

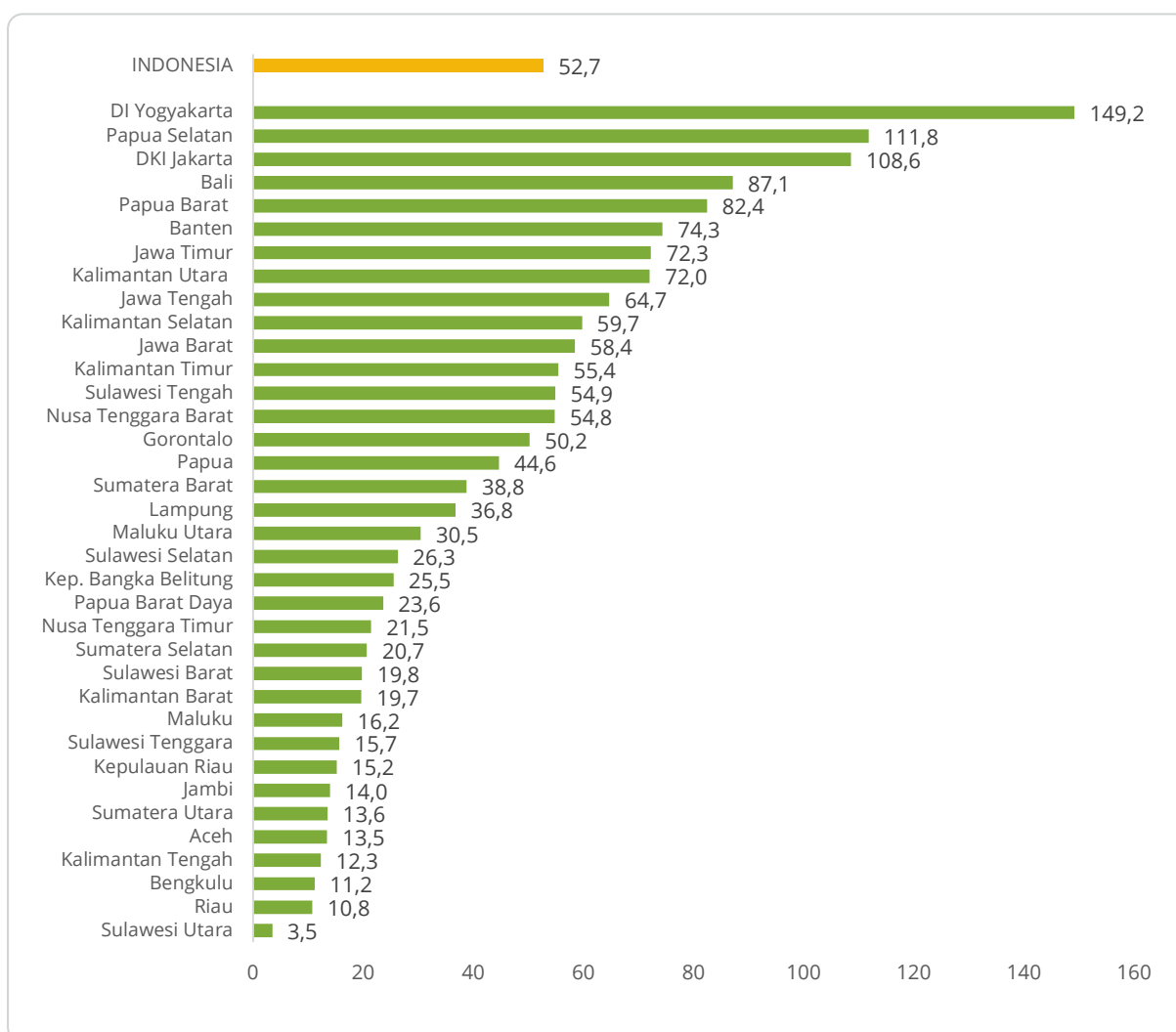


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Tren cakupan penemuan pneumonia pada balita selama sepuluh tahun terakhir cukup fluktuatif. Cakupan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,3%. Sejak tahun 2015 terdapat perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%, hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2015 cakupannya tinggi. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2020-2021 jika dibandingkan dengan cakupan 5 tahun terakhir, penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19, dimana adanya stigma pada penderita COVID-19 yang berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas di Puskesmas.

Pada tahun 2024, cakupan penemuan pneumonia pada balita meningkat kembali yaitu sebesar 52,7%. Provinsi dengan cakupan penemuan pneumonia pada balita tertinggi adalah DI Yogyakarta (149,2%), Papua Selatan (111,8%), dan DKI Jakarta (108,6%). Cakupan yang lebih dari 100% disebabkan adanya peningkatan penemuan dari estimasi kasus pneumonia. Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan tidak ada pelaporan penemuan pneumonia.

GAMBAR 6.10
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

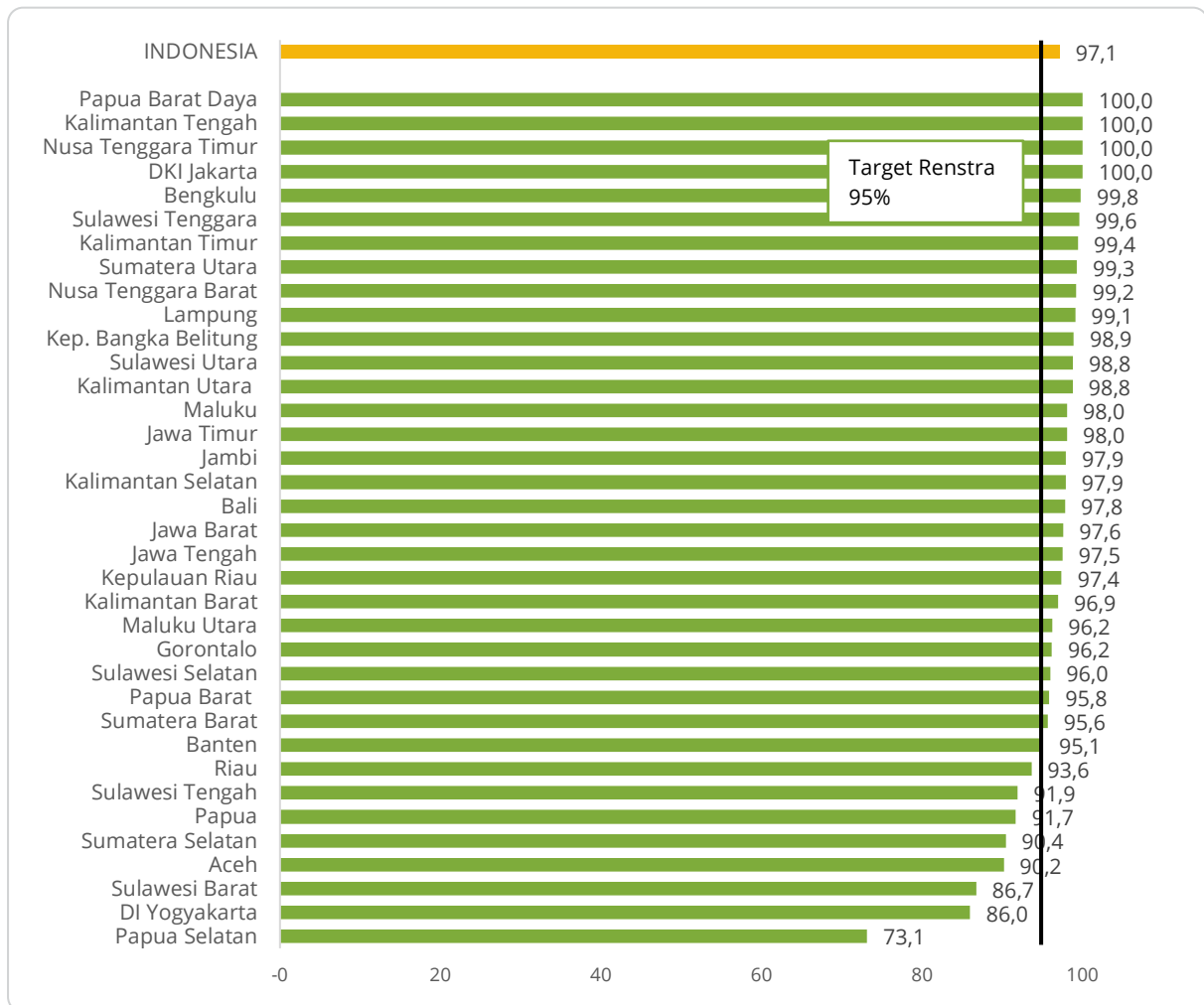


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Tata laksana pneumonia standar mengalami perluasan definisi menjadi penemuan kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik. Target persentase pengobatan kasus

pneumonia sesuai standar dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2024 adalah 95%. Secara nasional, persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar tahun 2024 sebesar 97,1%, artinya sudah memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan. Jika dilihat berdasarkan provinsi, ada delapan provinsi yang belum mencapai target 95%.

GAMBAR 6.11
PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,12%. Angka kematian akibat pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir tiga kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1 – 4 tahun. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 58.

4. Hepatitis

Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah infeksi Virus Hepatitis A (VHA), virus hepatiits b (VHB), Virus Hepatitis C (VHC), Virus Hepatitis D (VHD) dan Virus hepatitis E (VHE).

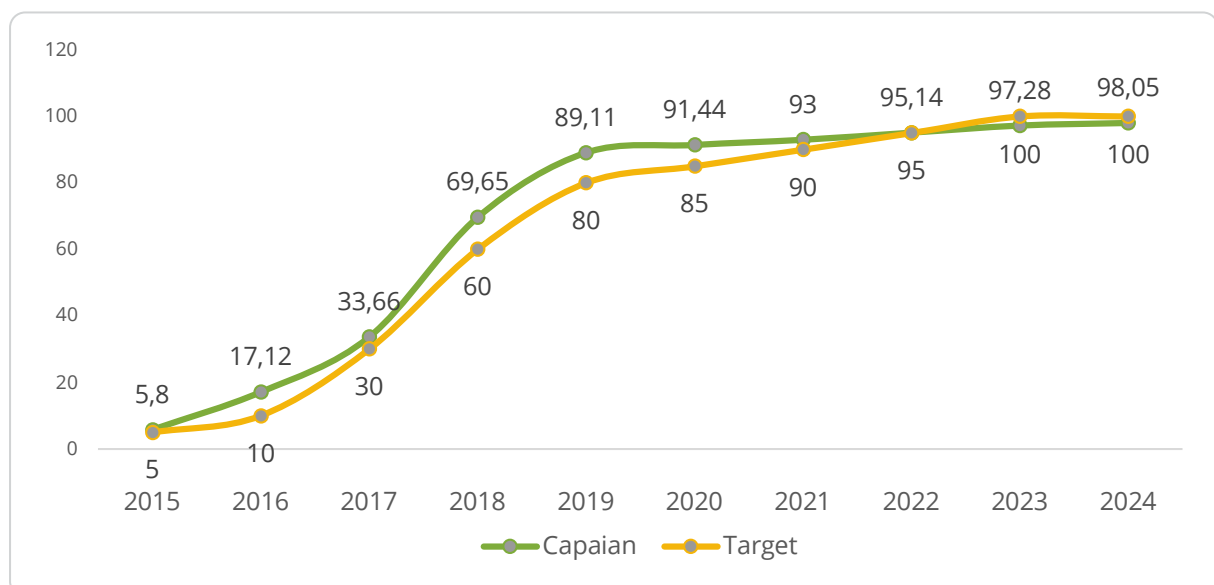
Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi hepatitis A, B, C, D dan E pada semua kelompok umur di Indonesia adalah 0,12%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, provinsi dengan prevalensi hepatitis tertinggi adalah Papua Tengah (0,88%) dan provinsi dengan prevalensi hepatitis terendah adalah Riau (0,06%).

Meskipun ke lima jenis virus tersebut menyebabkan penyakit hati, tapi virus tersebut berbeda dalam hal penularan, tingkat keparahan penyakit dan pencegahan. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Sementara hepatitis B dan C merupakan jenis virus hepatitis yang menyebabkan penyakit kronis dan penyebab paling umum terjadinya sirosis hati, kanker hati dan kematian.

Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, Proporsi HBsAg reaktif (Hepatitis B) , pada semua umur sebesar 2,4% dan bila dilihat berdasarkan usia, proporsi tertinggi ada pada kategori usia 35-44, 45-54 dan 55- 64 tahun masing-masing 3,6% dan proporsi terendah ada pada usia 0-4 tahun sebesar 0,1%

Indikator kegiatan hepatitis saat ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2015-2019, Tahun 2015 – 2019 indikator kinerja hepatitis adalah Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B saja, tahun 2020 -2024 ditambah dengan Deteksi Dini Hepatitis C sehingga indikator di tahun 2020 – 2024 adalah persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko. Gambar 6.12 menunjukkan kenaikan target per tahun yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator. Pada tahun 2024 capaian indikator belum mencapai target Renstra tahun 2024 (100%), yaitu 98,05%.

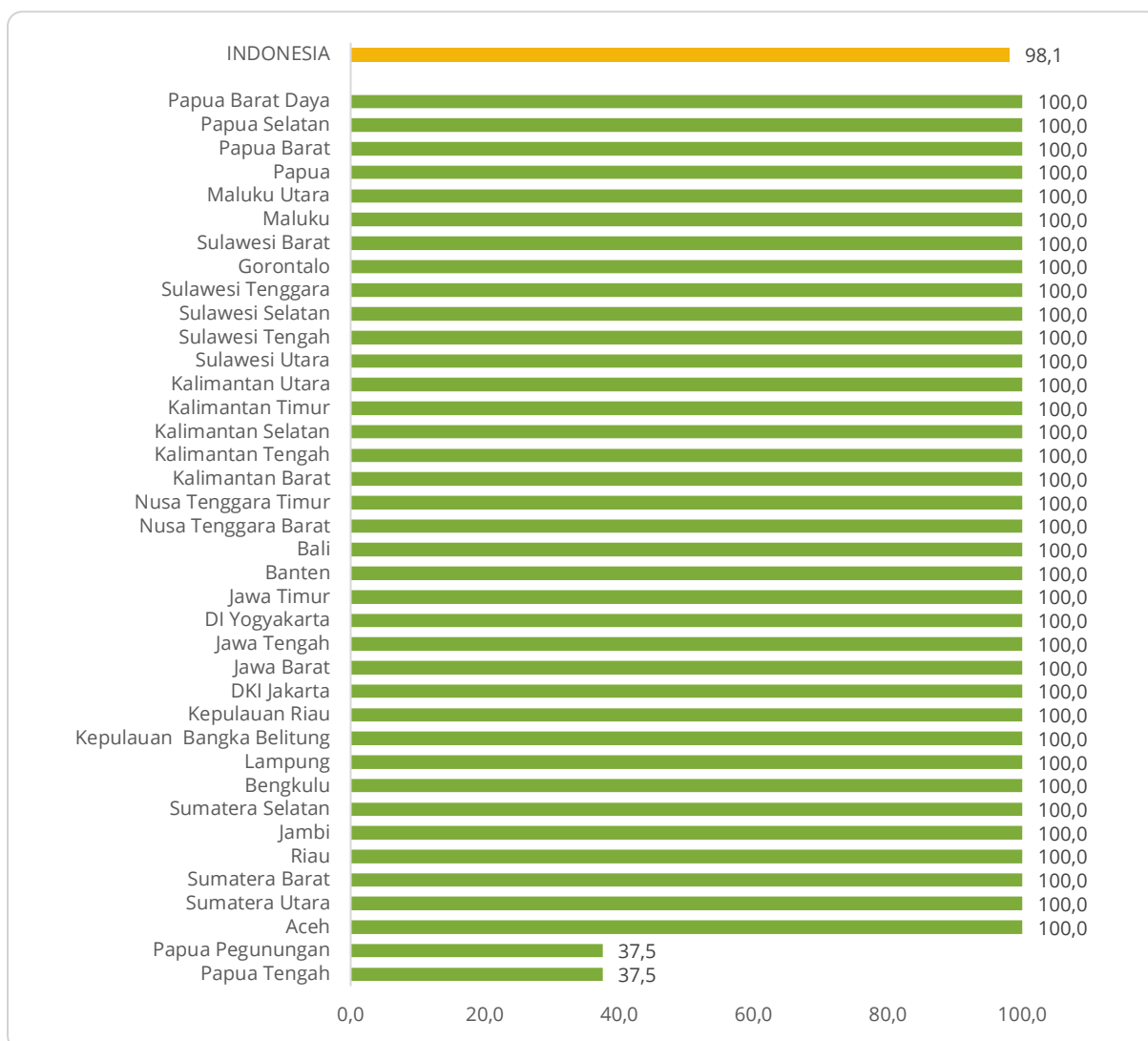
GAMBAR 6.12
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B DAN HEPATITIS C DI INDONESIA TAHUN 2015-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Dari 38 provinsi sebanyak 36 provinsi sudah mencapai 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C, hanya dua provinsi yang belum mencapai 100%.

GAMBAR 6.13
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

5. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diare pada semua kelompok umur sebesar 2%, pada balita sebesar 4,9%, dan pada bayi sebesar 3,9%. Sementara pada *Sample Registration System* tahun 2018, diare tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian pada neonatus sebesar 7% dan pada bayi usia 28 hari sebesar 6%.

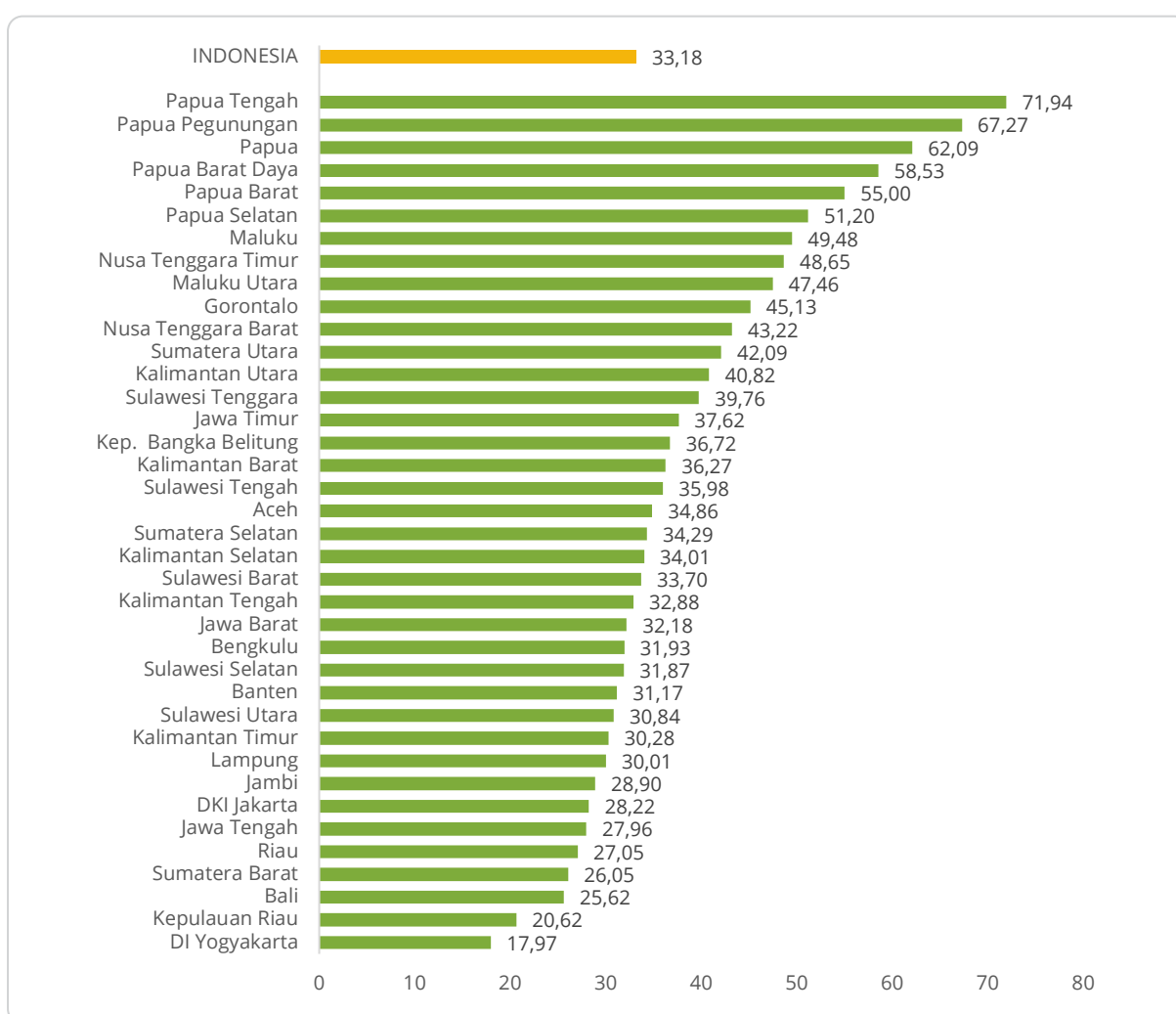
a. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran pelayanan penderita diare pada semua umur ditargetkan sebesar 10% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

Jumlah penderita diare yang dilayani di fasilitas kesehatan di Indonesia tahun 2024 adalah 1.014.133 orang pada kelompok umur balita dan 3.056.072 orang pada semua kelompok umur. Pada kelompok umur balita, provinsi dengan jumlah tertinggi kasus dilayani adalah Jawa Barat (213.663 balita), Jawa Timur (163.769 balita), dan Jawa Tengah (130.750 balita).

Jika dibandingkan dengan kasus diare pada semua kelompok umur, proporsi tertinggi kasus diare balita yang dilayani di fasilitas kesehatan adalah Papua Tengah (71,94%), Papua Pegunungan (67,27%), dan Papua (62,09%). Proporsi terendah adalah DI Yogyakarta (17,97%), Kepulauan Riau (20,62%), dan Bali (25,62%). Peningkatan cakupan pelayanan diare disebabkan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melakukan pencatatan dan pelaporan kasus diare.

GAMBAR 6.14
PROPORSI BALITA PADA KASUS DIARE YANG DILAYANI DI FASILITAS KESEHATAN (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

b. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit untuk penderita semua umur, maka target penggunaan oralit sebesar 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas. Tahun 2024 secara nasional penggunaan oralit pada penderita diare semua umur sebesar 92,2%.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pemberi layanan di puskesmas belum memberikan oralit/zink sesuai standar tata laksana pada penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit/zink sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta mencegah terjadinya diare berulang diare pada tiga bulan berikutnya. Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2024 cakupan rata-rata pemberian oralit dan zink pada balita diare sebesar 92,05%.

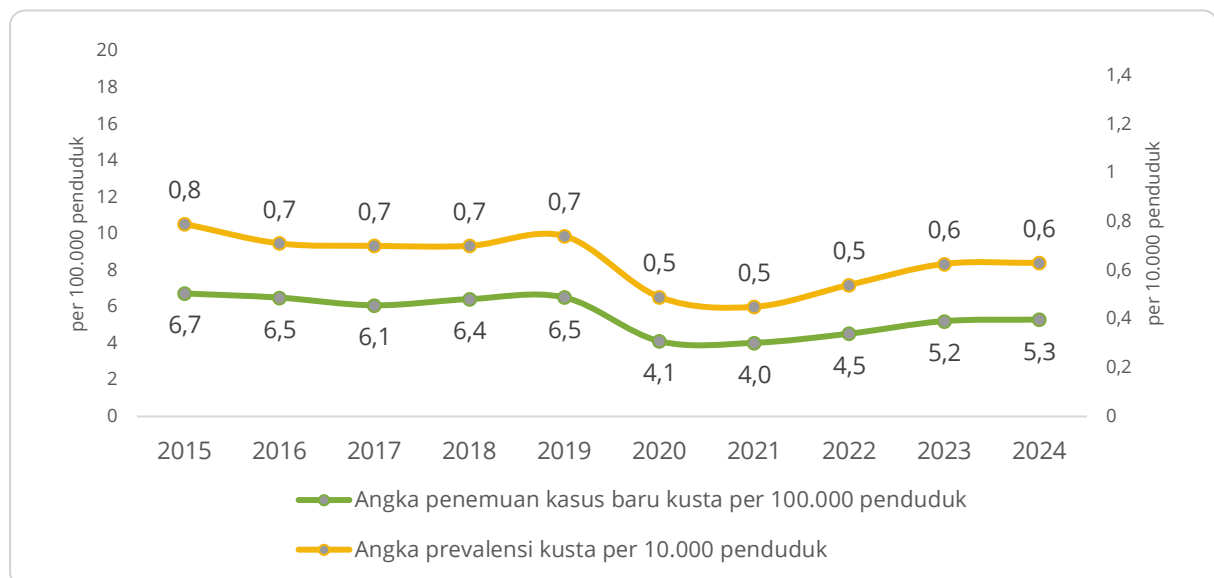
6. Kusta

Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri, *Mycobacterium leprae*. Penyakit kusta bersifat kronis, menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh lain kecuali saraf pusat. Terlambatnya dalam deteksi dini dan tatalaksana kasus kusta dapat mengakibatkan kecacatan, pada mata, tangan, dan kaki.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 0,63 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 5,3 kasus per 100.000 penduduk. Tren angka kejadian kusta dapat dilihat pada Gambar 6.15. Selama sepuluh tahun terakhir terlihat rasio prevalensi angka penemuan kasus kusta baru tren relatif menurun, tetapi kembali menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022. Pada tahun 2024 dilaporkan terdapat 14.698 kasus baru kusta yang hampir 90% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (MB).

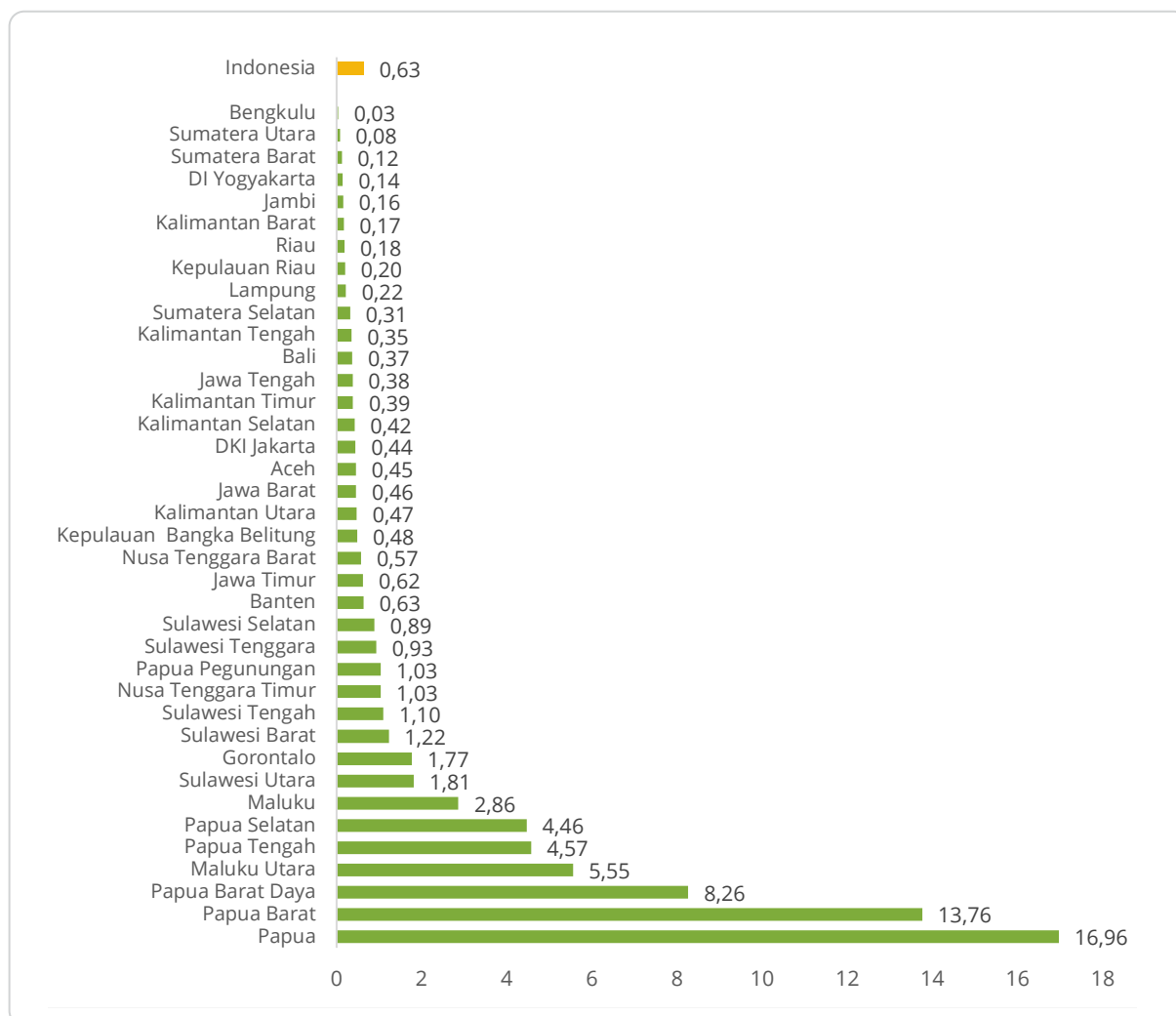
GAMBAR 6.15
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2015-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Provinsi dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2024 sebanyak 25 provinsi dari 38 provinsi telah mencapai eliminasi kusta. Terdapat 13 provinsi yang belum mencapai eliminasi pada tahun 2024.

GAMBAR 6.16
PREVALENSI KUSTA PER 10.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

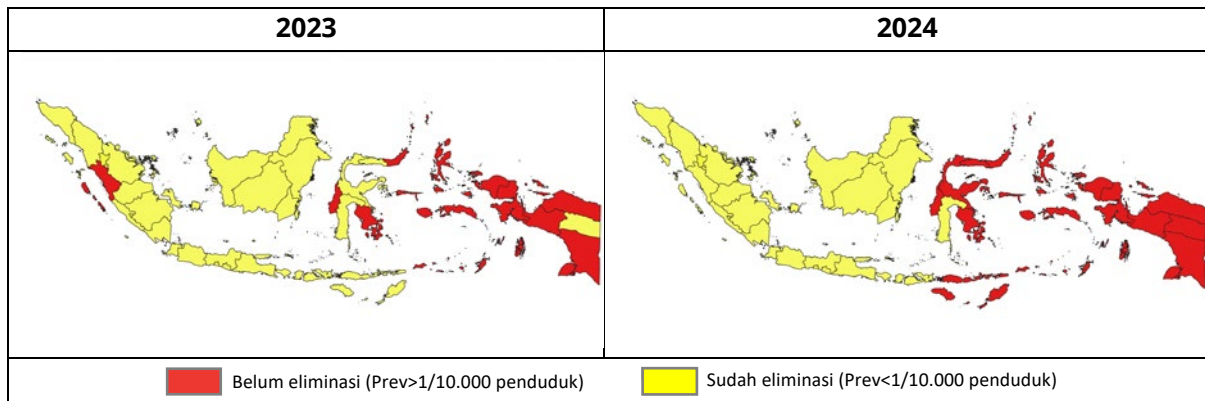


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Jika daerah eliminasi disajikan secara spasial, daerah yang berwarna hijau menandai provinsi yang sudah berstatus eliminasi kusta, sedangkan daerah yang berwarna merah menandai provinsi yang berstatus belum eliminasi kusta. Seluruh provinsi yang belum mencapai eliminasi terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia Timur yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Barat.

Jumlah kabupaten/kota yang sudah mencapai eliminasi adalah 395 kabupaten/kota (76,85%). Jumlah ini belum mencapai target eliminasi kusta tahun 2024 yaitu 514 kabupaten/kota dikarenakan berbagai kendala baik dari sumber daya manusia dan logistik *multi drug therapy* (MDT). Disamping stigma dan diskriminasi yang masih tinggi serta kurangnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan merupakan permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penanggulangan kusta.

GAMBAR 6.17
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023 DAN 2024

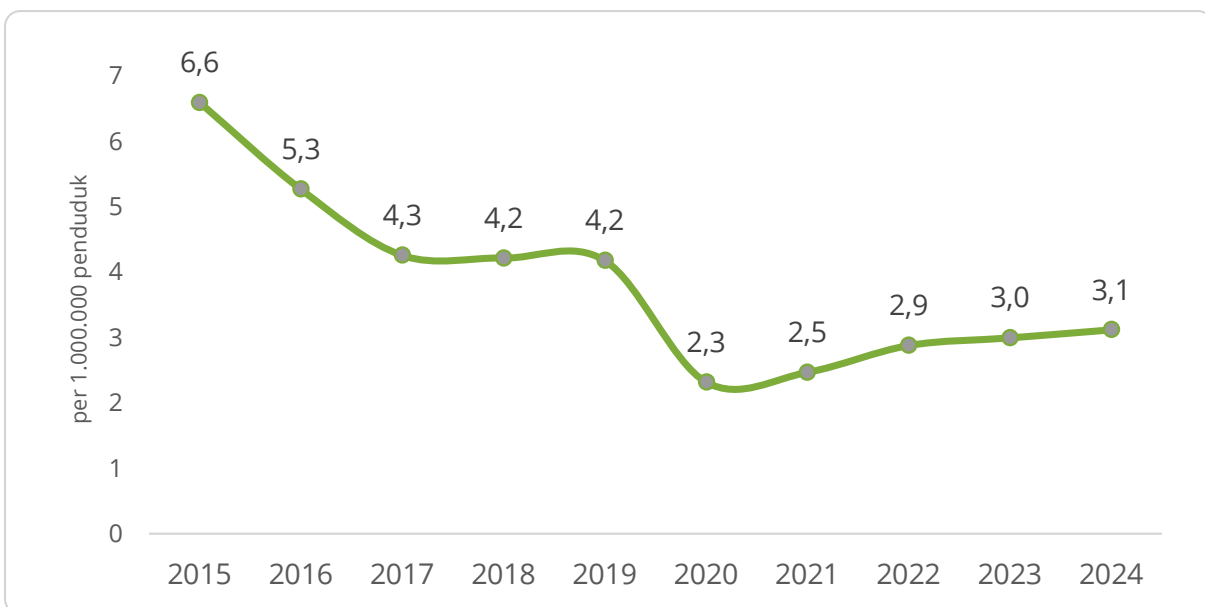


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

b. Angka Disabilitas Tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini yaitu angka disabilitas tingkat 2. Pada tahun 2024 angka disabilitas tingkat 2 sebesar 3,1 per 1.000.000 penduduk. Angka ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

GAMBAR 6.18
ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK
DI INDONESIA TAHUN 2015-2024

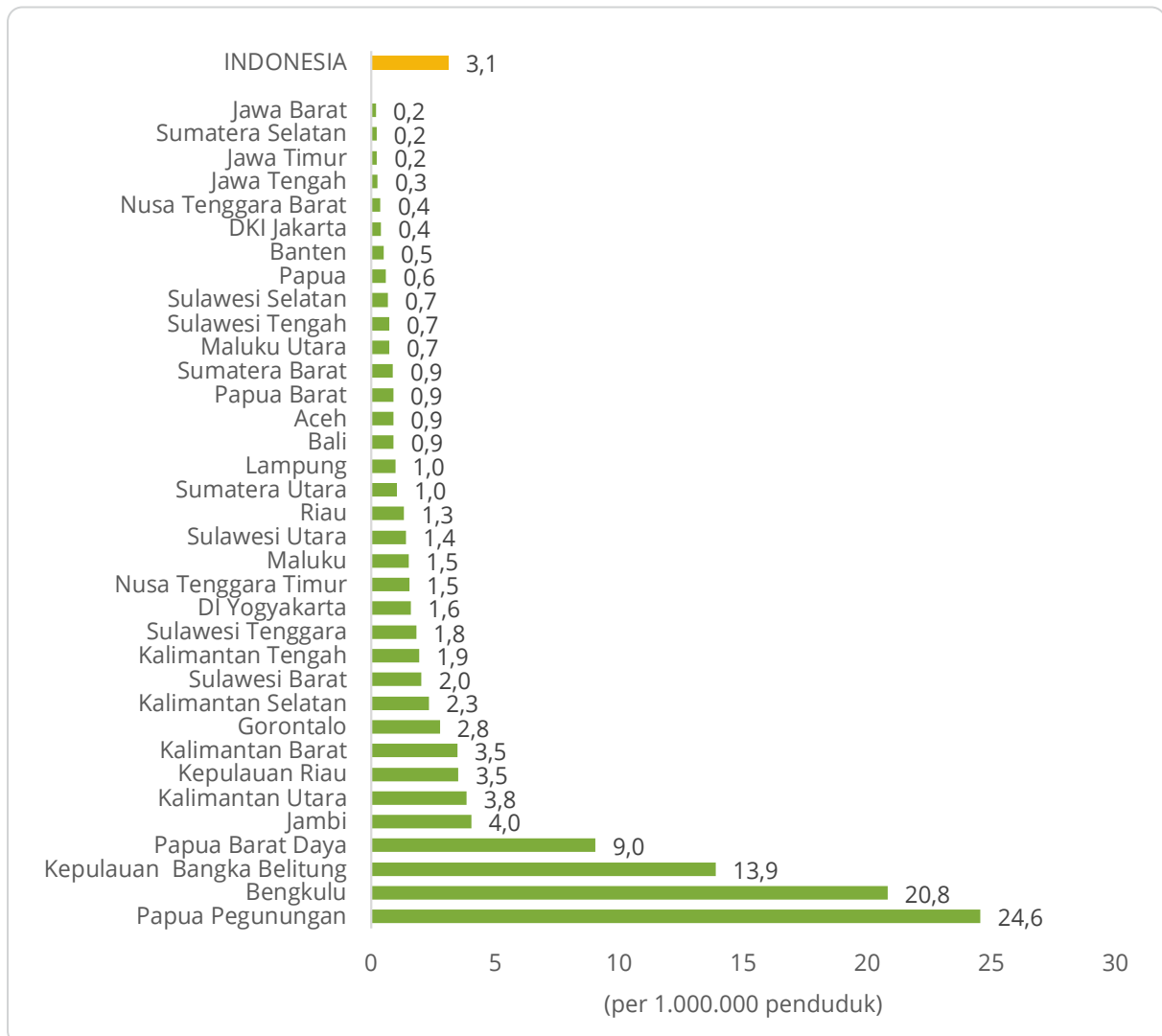


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan provinsi, tidak ditemukan kasus kusta baru dengan disabilitas tingkat 2 di Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur. Angka disabilitas 2 tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yaitu 24,6 per 1.000.000 penduduk. Target program di tahun 2024

angka disabilitas tingkat 2 adalah <1 per 1.000.000 penduduk. Pada tahun 2023, hanya tujuh provinsi yang dapat mencapai target tersebut yaitu Papua Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Sedangkan tahun 2024, jumlah provinsi yang mencapai target sebanyak 7 provinsi, diantaranya terdapat di 4 provinsi yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Aceh, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

GAMBAR 6.19
ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2024

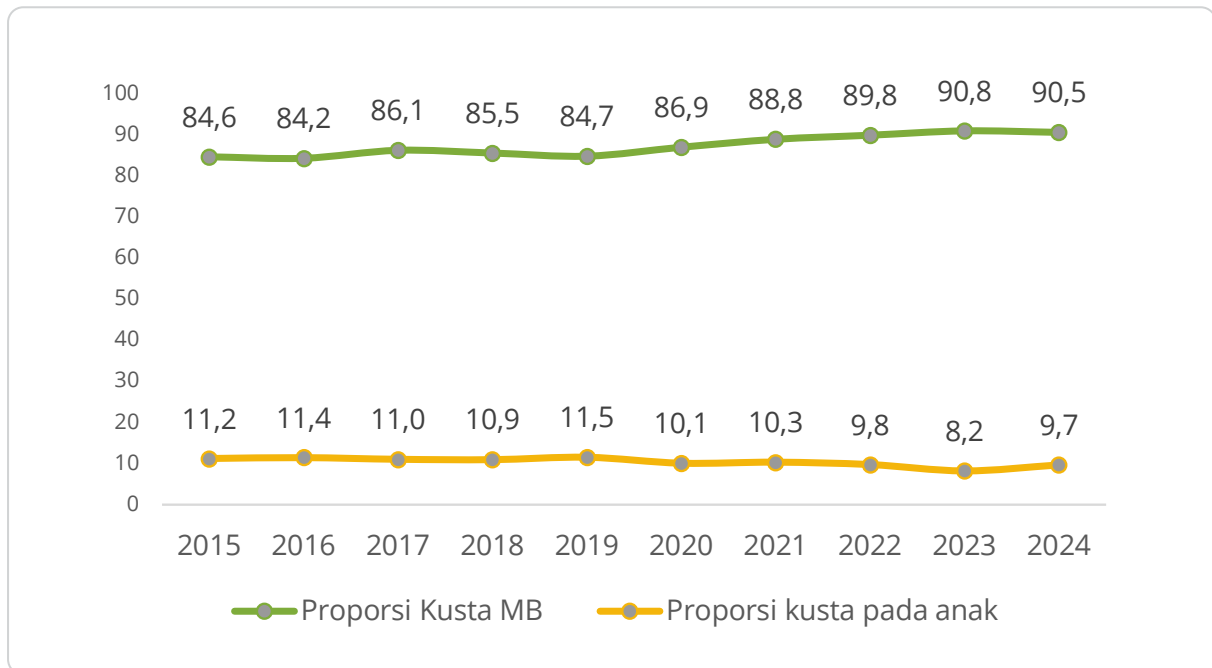


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

c. Proporsi Kusta Multibasiler (MB) dan Proporsi Kusta Baru pada Anak

Proporsi kusta MB dan proporsi kusta pada anak (0-14 tahun) di antara kasus baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penularan di masyarakat.

GAMBAR 6.20
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2015 - 2024. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2024 yaitu Bengkulu (100%), Maluku (97,67%), Gorontalo (97,64%), dan Bali (97,48%). Jumlah kasus baru pada Provinsi Bengkulu hanya 7 kasus tetapi seluruhnya merupakan kusta MB.

Proporsi kusta pada anak kembali meningkat pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,7%. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Tengah (53,2%), Papua Barat (25,8%), dan Papua (24,1%). Data terkait penyakit kusta selengkapnya terdapat pada Lampiran 64 - 67.

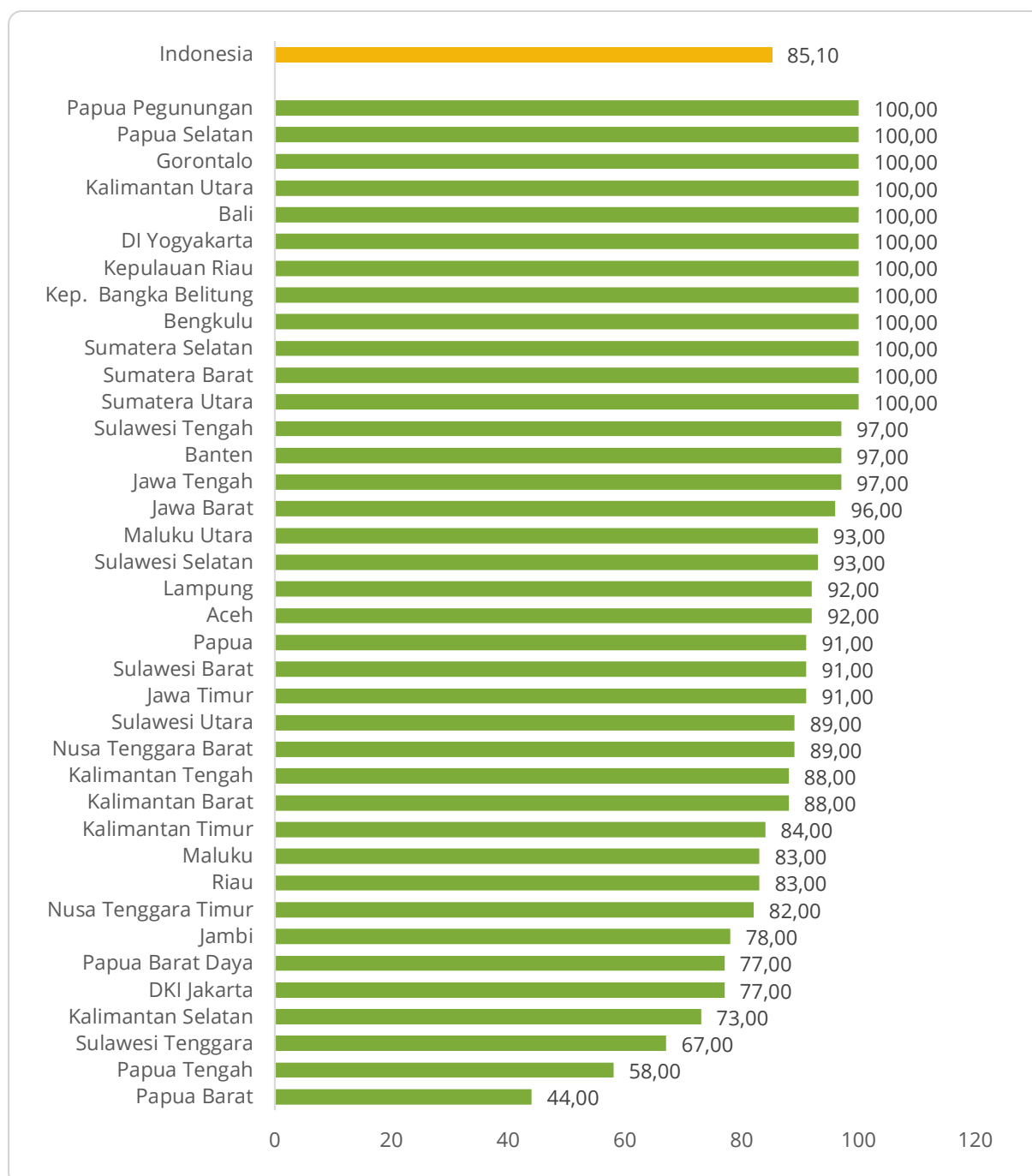
d. Penderita Kusta Selesai Berobat (*Release From Treatment/RFT*)

Indikator persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (*RFT rate*) sangat penting digunakan dalam menilai kualitas tatalaksana penderita dan kepatuhan penderita dalam minum obat. Indikator tersebut merupakan indikator tahunan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan penderita yang memulai pengobatan MDT pada periode kohort yang sama.

Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu merupakan jumlah penderita baru kusta (PB/MB) dari periode kohort 1 (satu) tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (PB menyelesaikan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan/ MB menyelesaikan 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan) dinyatakan dalam persentase.

Pada tahun 2024, cakupan RFT di Indonesia sudah cukup tinggi, namun masih masih di bawah target nasional yaitu $\geq 90\%$, yaitu untuk kusta PB sebesar 85,1% dan kusta MB sebesar 83,9%. Penderita kusta PB yang telah selesai berobat di tahun 2024 adalah penderita kusta yang tercatat pada kohort sejak tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Sebanyak 12 provinsi telah mencapai 100% persentase penderita kusta PB yang selesai berobat.

GAMBAR 6.21
CAKUPAN RFT KUSTA PB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Penderita kusta MB yang tercatat selesai berobat di tahun 2024 adalah penderita kusta MB yang tercatat pada kohort sejak 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Provinsi dengan cakupan tertinggi kusta MB selesai berobat adalah Bali dengan jumlah penderita kusta MB selesai berobat sebanyak 94 orang. Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua Barat dengan persentase sebesar 31%.

GAMBAR 6.22
CAKUPAN RFT KUSTA MB MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini masih mengancam dunia karena dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan menjadi sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, 2017). Dengan memberikan imunisasi secara tepat waktu, maka masyarakat dapat tetap terlindung dan terjadinya wabah PD3I dapat dicegah. Untuk mendapatkan perlindungan seumur hidup, seseorang perlu mendapatkan imunisasi sesuai dosis dan jadwal secara terus menerus dan berkesinambungan. Selain **imunisasi rutin**, yaitu imunisasi bayi, imunisasi anak bawah dua tahun (baduta), imunisasi anak usia sekolah dan imunisasi dewasa, juga dikenal **imunisasi kejar, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus**. Imunisasi kejar diberikan pada bayi, baduta dan anak usia sekolah yang belum mendapatkan dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi rutin. Imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu, sementara itu imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan PD3I. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
2. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi;
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas surveilans PD3I dalam rangka meningkatkan kinerja surveilans AFP dan campak-rubela serta pengendalian difteri;
4. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan petunjuk teknis surveilans PD3I
5. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) surveilans PD3I;
6. Melakukan sosialisasi tentang PD3I kepada lintas program dan lintas sektor terkait serta organisasi profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, PAEI, dll)
7. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komite Ahli Nasional PD3I, untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka mencapai target eradikasi polio, eliminasi campak-rubela/ CRS serta pengendalian difteri dan strategi penanggulangan KLB.
8. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium difteri, campak-rubela/CRS, dan polio;
9. Melakukan pendampingan penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah sebagai berikut:

1. Tetanus Neonatorum

Tetanus Neonatorum (TN) merupakan penyakit tetanus yang menyerang neonatus (bayi usia <28 hari). Walaupun disebut sebagai *silent killer*, penyakit ini bisa dicegah melalui pemberian vaksin Tetanus Toxoid (TT) secara tepat waktu, selain menjaga kebersihan tempat praktik bersalin, serta proses persalinan, dan perawatan tali pusat yang bersih dan aman. Penyebab utama dari

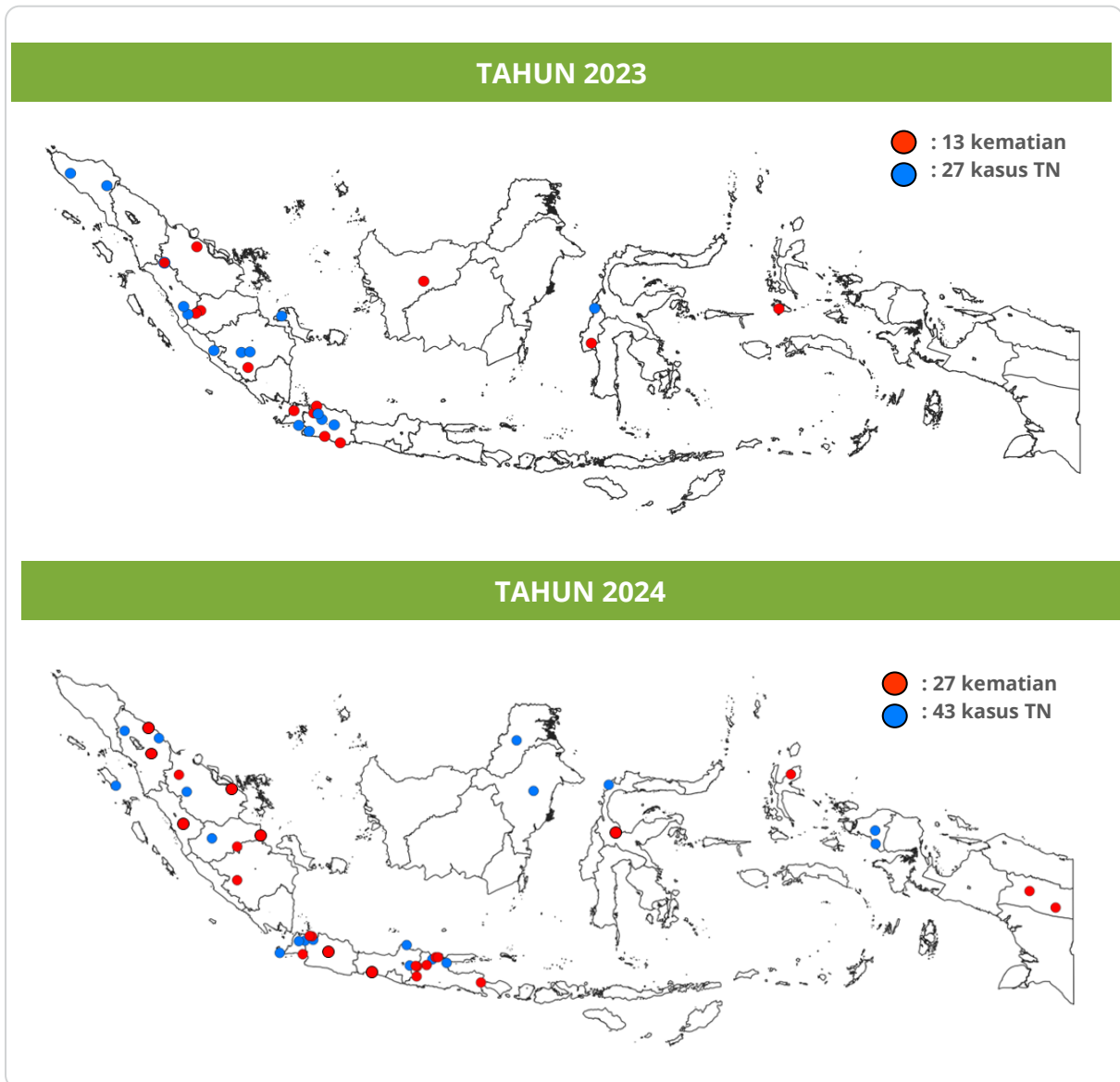
penyakit ini adalah infeksi bakteri *Clostridium tetani*, yaitu bakteri yang menghasilkan racun yang dapat menyerang otak dan sistem saraf pusat. Bakteri ini biasa ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Bakteri *Clostridium tetani* bisa menginfeksi seseorang, melalui luka goresan, sobekan, atau luka tusukan yang disebabkan oleh benda-benda yang terkontaminasi. Tetanus tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, tetapi pada bayi yang baru lahir tetanus neonatorum terjadi oleh karena bakteri ini masuk ke dalam tubuh bayi melalui praktik persalinan yang tidak higienis, seperti memotong dan merawat tali pusat yang tidak bersih atau steril. Persalinan yang dilakukan oleh penolong persalinan dengan tangan yang tidak steril dan terkontaminasi juga merupakan faktor risiko terjadinya kasus tetanus neonatorum. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 3-10 hari. Tanda dan gejala biasanya muncul pada hari ke-3 sampai 28 setelah kelahiran (rata-rata 7 hari setelah kelahiran). Apabila masa inkubasi kurang dari 7 hari, prognosis penyakit akan lebih buruk dan mempunyai angka kematian yang tinggi.

Indonesia pada tahun 2016 berhasil mencapai status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (TMN) dan menjadi negara terakhir di Wilayah Regional Asia Tenggara WHO yang divalidasi untuk eliminasi TMN. Eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau *Maternal and Neonatal Tetanus Elimination* (MNTE) didefinisikan sebagai situasi dimana kejadian kasus TN < per 1000 kelahiran hidup di setiap kabupaten/kota. Saat ini Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan status eliminasi TMN. Ada 4 strategi yang direkomendasikan oleh WHO untuk dapat mempertahankan status eliminasi TMN, yaitu penguatan imunisasi rutin, pemberian imunisasi tetanus tambahan (*Supplementary Immunization Activities/SIA*) di wilayah-wilayah risiko tinggi dengan menargetkan wanita usia subur, mempromosikan persalinan dan perawatan tali pusat yang bersih, dan penguatan surveilans TN.

Pada penyakit tetanus, kekebalan tidak bisa didapat setelah terjadi infeksi. Kekebalan terhadap penyakit tetanus hanya dapat diperoleh melalui kekebalan buatan secara pasif dengan suntikan anti tetanus serum dan/atau secara aktif dengan pemberian imunisasi yang mengandung tetanus (jenis vaksin yang diberikan sesuai usia). Jadwal imunisasi tetanus dengan vaksin yang mengandung tetanus toxoid saat ini di Indonesia adalah DPT-HB-Hib (umur 2, 3, 4, dan 18 bulan), DT (SD/ sederajat Kelas 1), Td 2 dosis (SD/ sederajat kelas 2 dan 5), dan Td WUS (15-39 tahun).

Selama tahun 2021-2024, jumlah kasus TN secara terus menerus mengalami peningkatan. Jumlah kasus TN pada tahun 2024 sebanyak 43 kasus, meningkat dari jumlah kasus pada tahun 2023 yaitu 27 kasus, tahun 2022 sebanyak 21 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 11 kasus. Angka *Case Fatality Rate (CFR)* pada tahun 2024 meningkat tajam yaitu 62,8% dibandingkan dengan CFR tahun 2023 yaitu sebesar 48,1%. Kasus TN tersebar pada 17 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Provinsi Jawa Timur (13 kasus). Dari 17 provinsi tersebut, terdapat 12 provinsi dengan kasus kematian TN. Sebaran kasus TN dapat dilihat pada Gambar 6.23 di bawah ini.

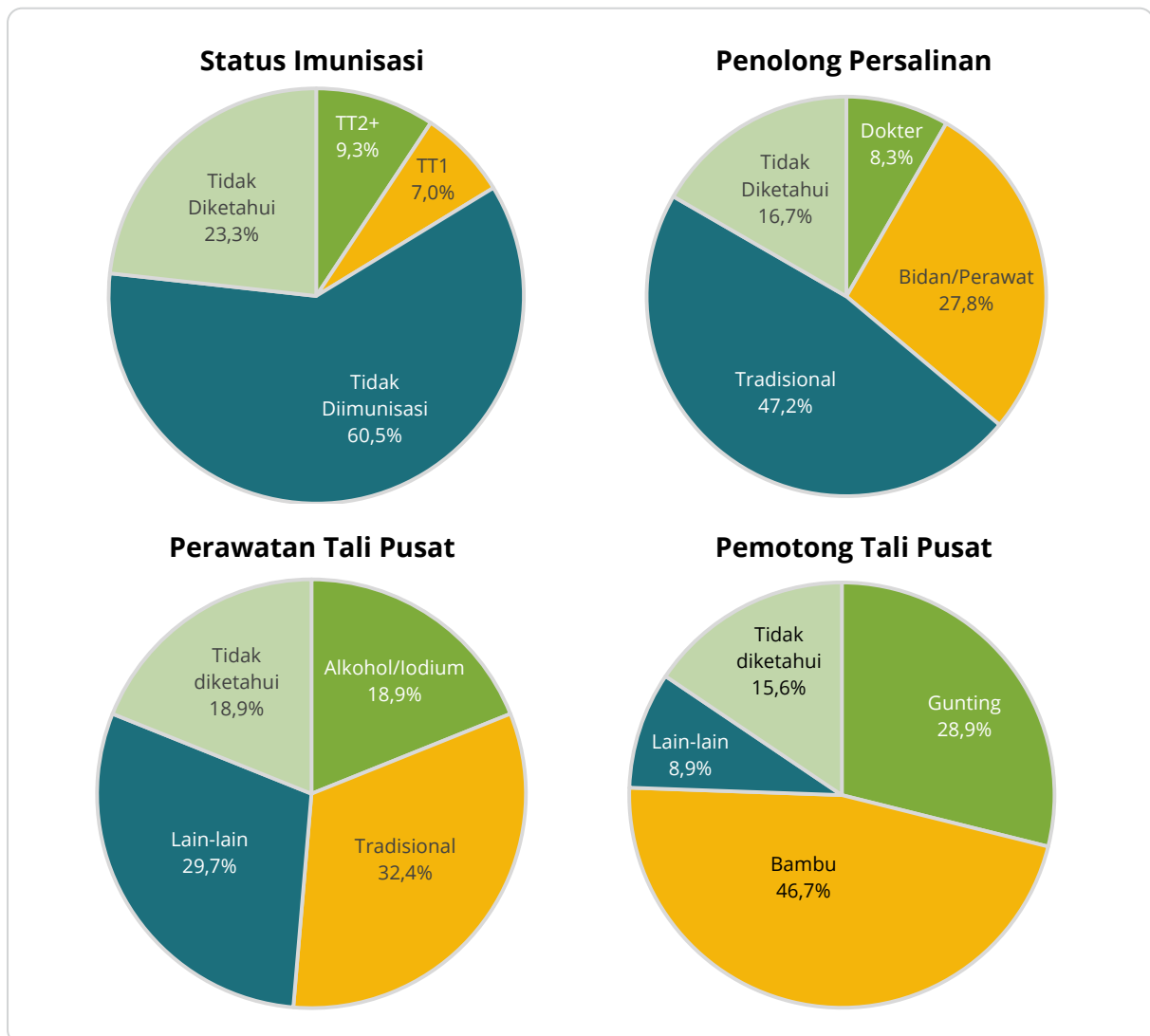
GAMBAR 6.23
SEBARAN KASUS *TETANUS NEONATORUM* PER PROVINSI
TAHUN 2023 - 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan faktor risiko terjadinya kasus TN, dari 43 kasus yang terjadi pada tahun 2024, proporsi kasus dominan terjadi pada penderita yang tidak diimunisasi sebanyak 26 kasus (60,5%), penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga tradisional sebanyak 17 kasus (47,2%), perawatan tali pusat yang dilakukan secara tradisional sebanyak 12 kasus (32,4%), alat pemotong tali pusat yang menggunakan bambu sebanyak 21 kasus (46,7%). Dari keseluruhan kasus TN, mayoritas penderita tidak dirawat di rumah sakit, yaitu sebanyak 37 penderita (71,2%). Jika mengacu pada proporsi kasus TN berdasarkan faktor risiko maka kita dapat melihat bahwa tingginya kenaikan kasus TN pada tahun 2024 disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi, praktik persalinan yang tidak higienis, dan perawatan tali pusat yang tidak bersih.

GAMBAR 6.24
PROPORSI KASUS *TETANUS NEONATORUM* MENURUT FAKTOR RISIKO
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

2. Campak

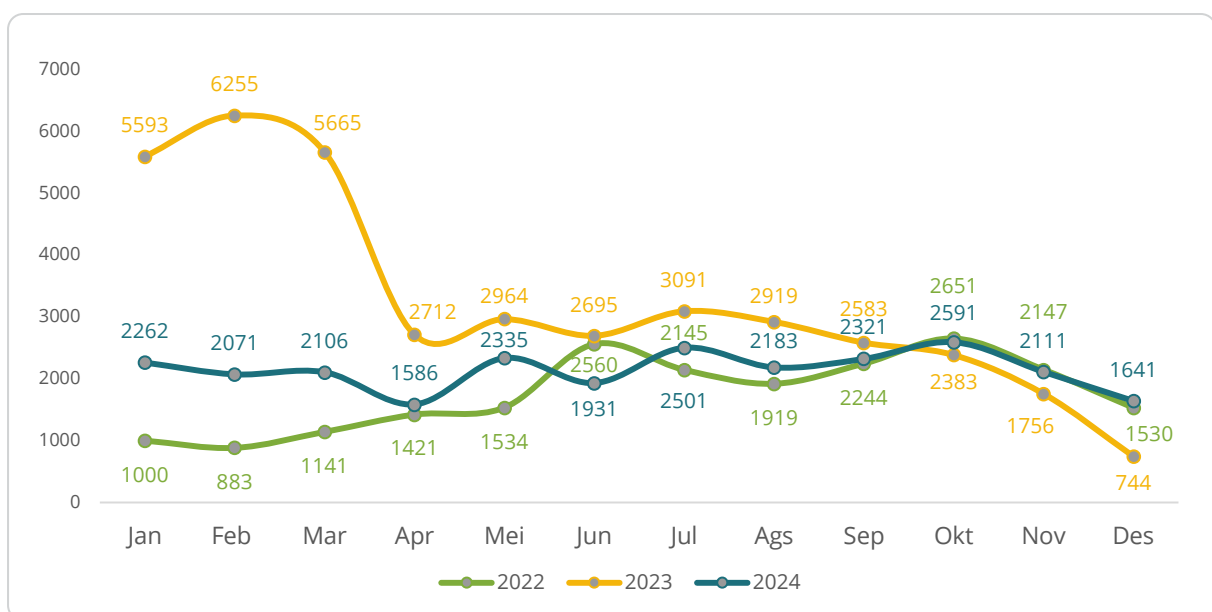
Penyakit campak yang biasanya juga dikenal sebagai morbili atau *measles* merupakan penyakit yang sangat menular disebabkan oleh virus dari *genus Morbillivirus* dan termasuk golongan *Paramyxovirus*. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Campak akan menyerang hampir 100% anak yang tidak kebal terhadap virus tersebut. Manusia diperkirakan satu-satunya reservoir, walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak berperan dalam penyebaran. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Masa inkubasi penyakit campak adalah 7-18 hari, rata-rata 10 hari. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut.

Beberapa hari kemudian, akan muncul ruam maculopapular, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, *ensefalitis* (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti *pneumonia*. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Suspek campak adalah setiap kasus dengan gejala minimal demam dan ruam *maculopapular*, kecuali sudah terbukti secara laboratorium disebabkan oleh penyakit lain. Penemuan kasus suspek campak merupakan salah satu strategi surveilans yang dilakukan untuk menemukan kasus campak lebih dini sehingga bisa terhindar dari komplikasi dan kematian. Pada tahun 2024 terdapat kasus suspek campak sebanyak 25.639 kasus dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah kasus suspek campak pada tahun 2023 sebanyak 39.360 kasus. Penurunan kasus ini didukung oleh upaya program dalam meningkatkan cakupan imunisasi campak setelah terjadinya penurunan cakupan imunisasi pada masa pembatasan sosial saat pandemi COVID-19.

Gambar 6.25 memperlihatkan kasus suspek campak per bulan yang terjadi di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Kasus suspek campak meningkat drastis pada awal tahun 2023. Kondisi ini mulai menurun pada bulan April, dan cenderung menurun sampai dengan Desember 2023. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kondisi ini cukup berbeda, dimana pada tahun 2022 jumlah kasus suspek campak di akhir tahun cenderung meningkat. Penurunan pada akhir tahun 2023 ini disebabkan oleh penemuan kasus dan pelaporan yang kurang optimal. Pada tahun 2024, tren kasus suspek campak setiap bulannya cenderung tidak terlalu berbeda setiap bulannya.

GAMBAR 6.25
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2022-2024

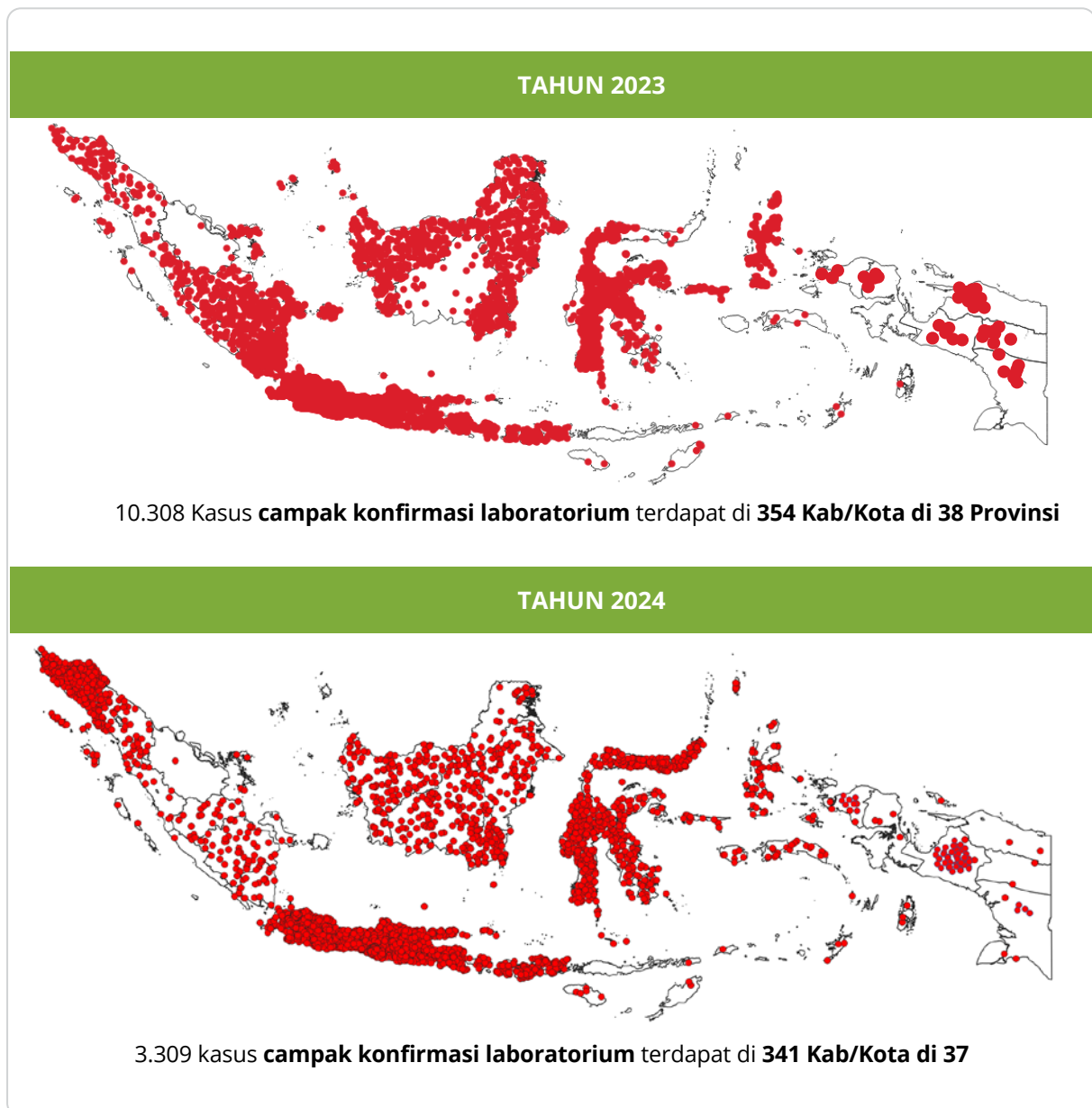


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Upaya surveilans untuk menemukan kasus suspek campak, ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa kasus campak. Pada tahun 2024, dari seluruh kasus suspek campak yang dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh data kasus campak konfirmasi laboratorium sebanyak 3.309 kasus (12,9% dari kasus suspek campak) dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus campak tahun 2024 mengalami penurunan kasus jika dibandingkan dengan kasus campak tahun 2023 yaitu sebanyak 10.308 kasus. Hal ini disebabkan oleh peningkatan cakupan imunisasi Campak Rubela (MR) di Indonesia.

Gambar 6.26 memperlihatkan perbandingan sebaran kasus campak konfirmasi laboratorium pada tahun 2023 dan 2024.

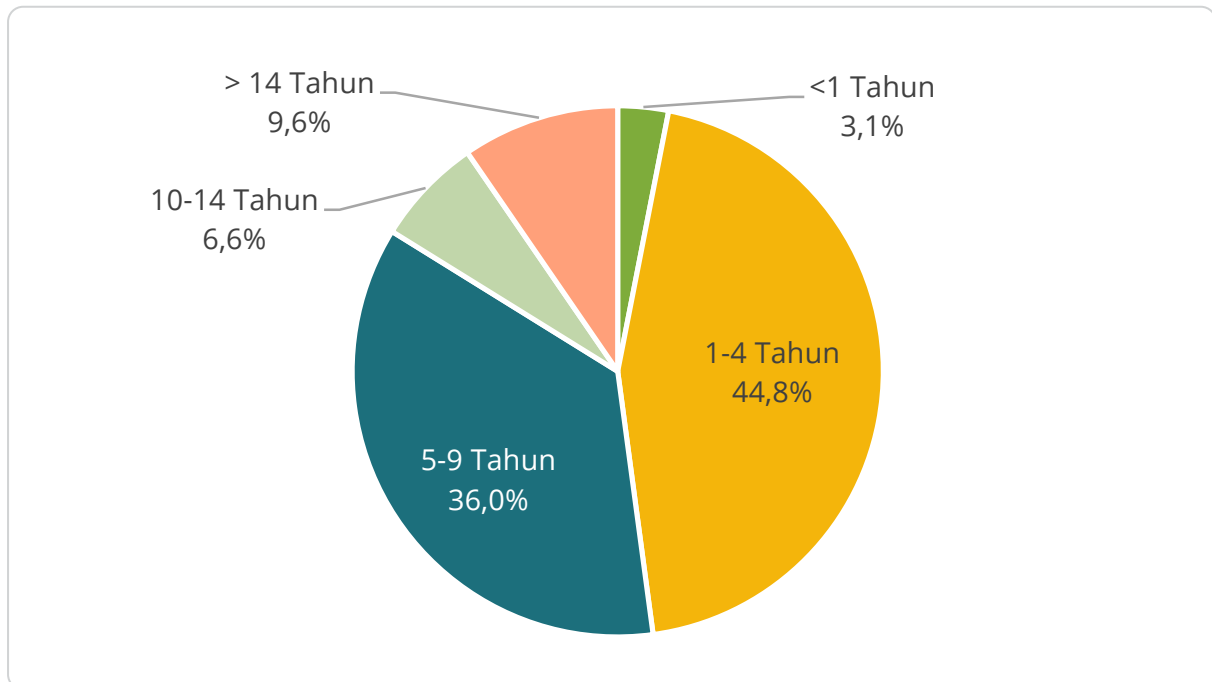
GAMBAR 6.26
PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2023 - 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Gambar 6.27 memperlihatkan proporsi kasus campak berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024. Proporsi kasus campak terbesar pada kelompok umur 1-4 tahun sebanyak 1.482 kasus (44,8%), diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 1.190 (36%). Proporsi kasus paling rendah ditemukan pada kelompok umur <1 tahun sebesar 3,1%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 kasus pada kelompok umur >14 tahun meningkat proporsinya, sedangkan kasus pada kelompok umur < 1 tahun justru mengalami penurunan signifikan.

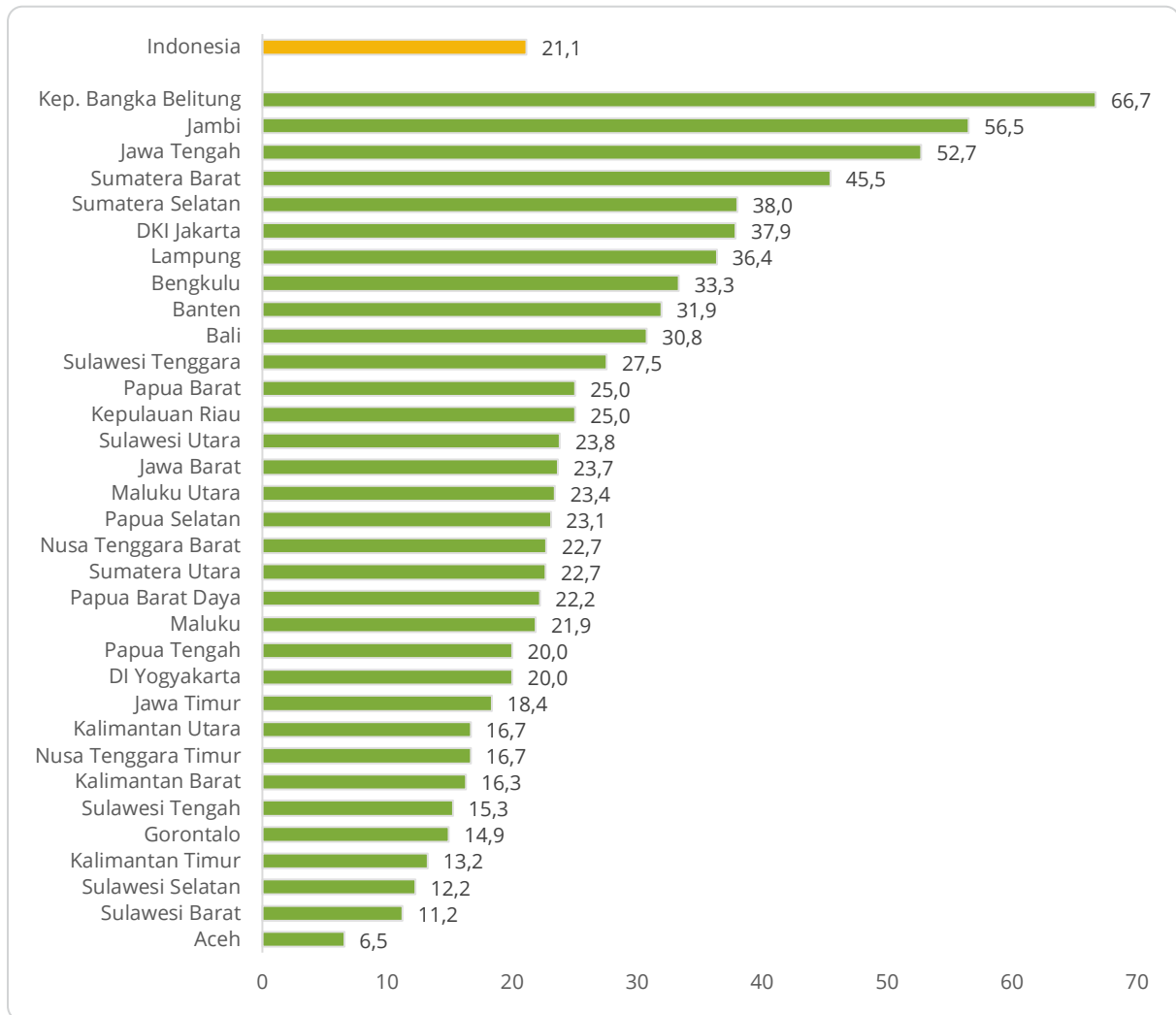
GAMBAR 6.27
PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Gambar 6.28 memperlihatkan proporsi kasus campak konfirmasi laboratorium yang sudah mendapatkan vaksinasi. Di Indonesia, proporsi kasus campak yang sudah mendapatkan imunisasi pada tahun 2024 sebesar 21,1%. Proporsi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 17,2%. Mengacu pada data tersebut, maka dapat diartikan bahwa dari seluruh kasus campak konfirmasi laboratorium, ada sebanyak 78,9% kasus yang belum mendapatkan vaksin campak. Cakupan imunisasi campak pada kasus campak, masih jauh dari target cakupan imunisasi campak dosis pertama dan kedua minimal 95%. Dari 38 provinsi dengan kasus campak konfirmasi laboratorium, urutan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (66,7%), diikuti oleh Jambi (56,5%), dan Jawa Tengah (52,7%). Ada lima provinsi dengan proporsi kasus campak yang diimunisasi 0%, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan.

GAMBAR 6.28
PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI
DI INDONESIA TAHUN 2024

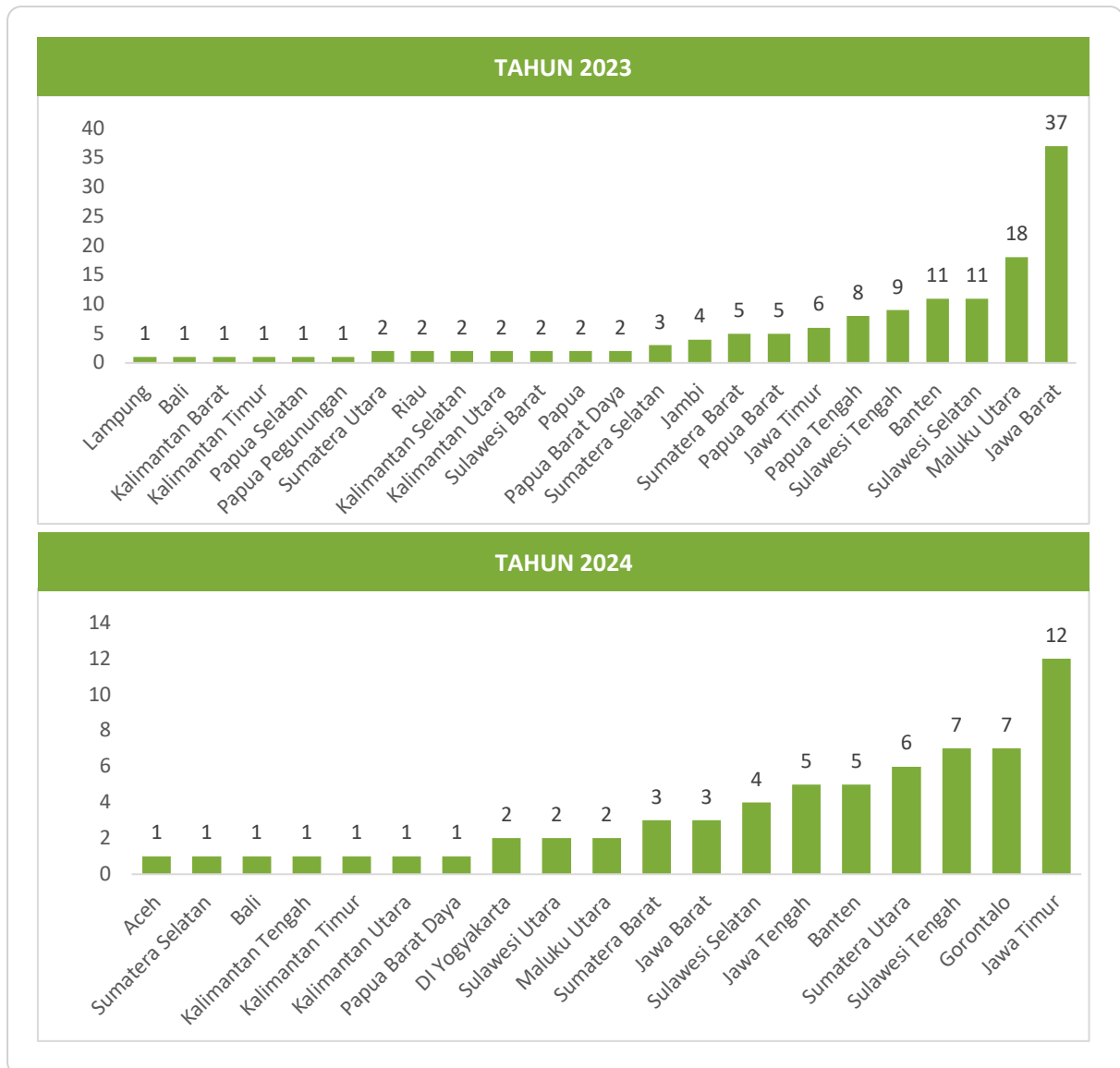


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Apabila terjadi lima atau lebih kasus suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok, dan telah dibuktikan adanya hubungan epidemiologis di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) suspek campak. Setiap kasus suspek campak dilakukan penyelidikan epidemiologi menyeluruh (*fully investigated*) dalam waktu 2x24 jam.

Pada tahun 2024, dari 25.639 kasus suspek campak yang terjadi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terjadi kejadian KLB suspek campak yang terbagi dalam 65 kali di 19 provinsi dengan jumlah kasus sebanyak 626. Kejadian KLB suspek campak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan kejadian KLB suspek campak pada tahun 2023 sebanyak 137 kali di 24 provinsi dengan jumlah kasus sebanyak 2.268. Dari 38 provinsi, terdapat 13 provinsi yang mengalami kejadian KLB suspek campak pada tahun 2023 dan 2024 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. (Gambar 6.29).

GAMBAR 6.29
FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 - 2024



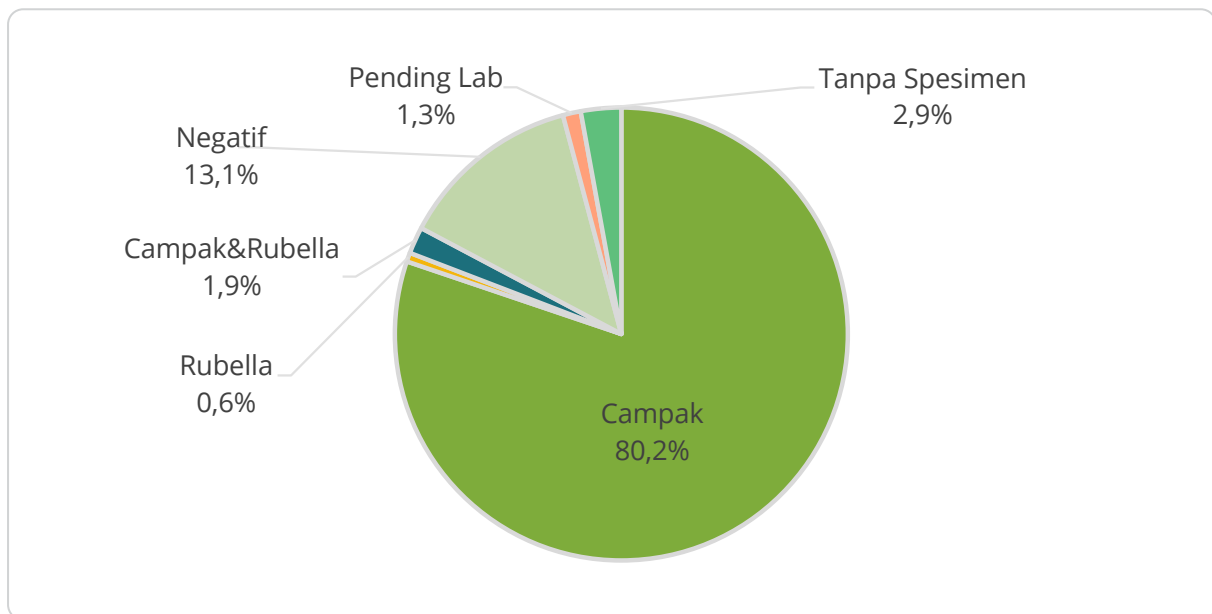
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

KLB suspek campak paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 12 kali. Dari keseluruhan KLB suspek campak, tidak ada kasus kematian yang terjadi. Pelaporan penanganan kasus KLB yang ditangani <24 jam sudah 100%, sehingga kasus KLB suspek campak dapat ditangani lebih cepat dan tanggap.

Pada Gambar 6.30, dari seluruh KLB suspek campak yang dilakukan pemeriksaan laboratorium maka dapat dilihat distribusi KLB yang terjadi. Kejadian KLB campak konfirmasi laboratorium terjadi sebanyak 53 kali dengan kasus sebanyak 502 (80,2%), kejadian KLB rubela sebanyak 1 kali dengan kasus sebanyak 4 (0,6%), KLB gabungan rubela dan campak sebanyak 1 kali dengan kasus sebanyak 12 (1,9%), dan yang bukan merupakan KLB kasus campak/rubella/gabungan sebanyak 7 kali dengan kasus sebanyak 82 (13,1%). Hingga data disajikan, dari keseluruhan kasus KLB suspek campak masih ada kasus yang statusnya masih pending laboratorium (tidak dilakukan uji laboratorium) sebesar

1,3% dan kasus yang tanpa spesimen sebesar 2,9%. Hal ini disebabkan oleh orangtua tidak mau anaknya diambil spesimen dan petugas yang belum menjelaskan secara maksimal.

GAMBAR 6.30
DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

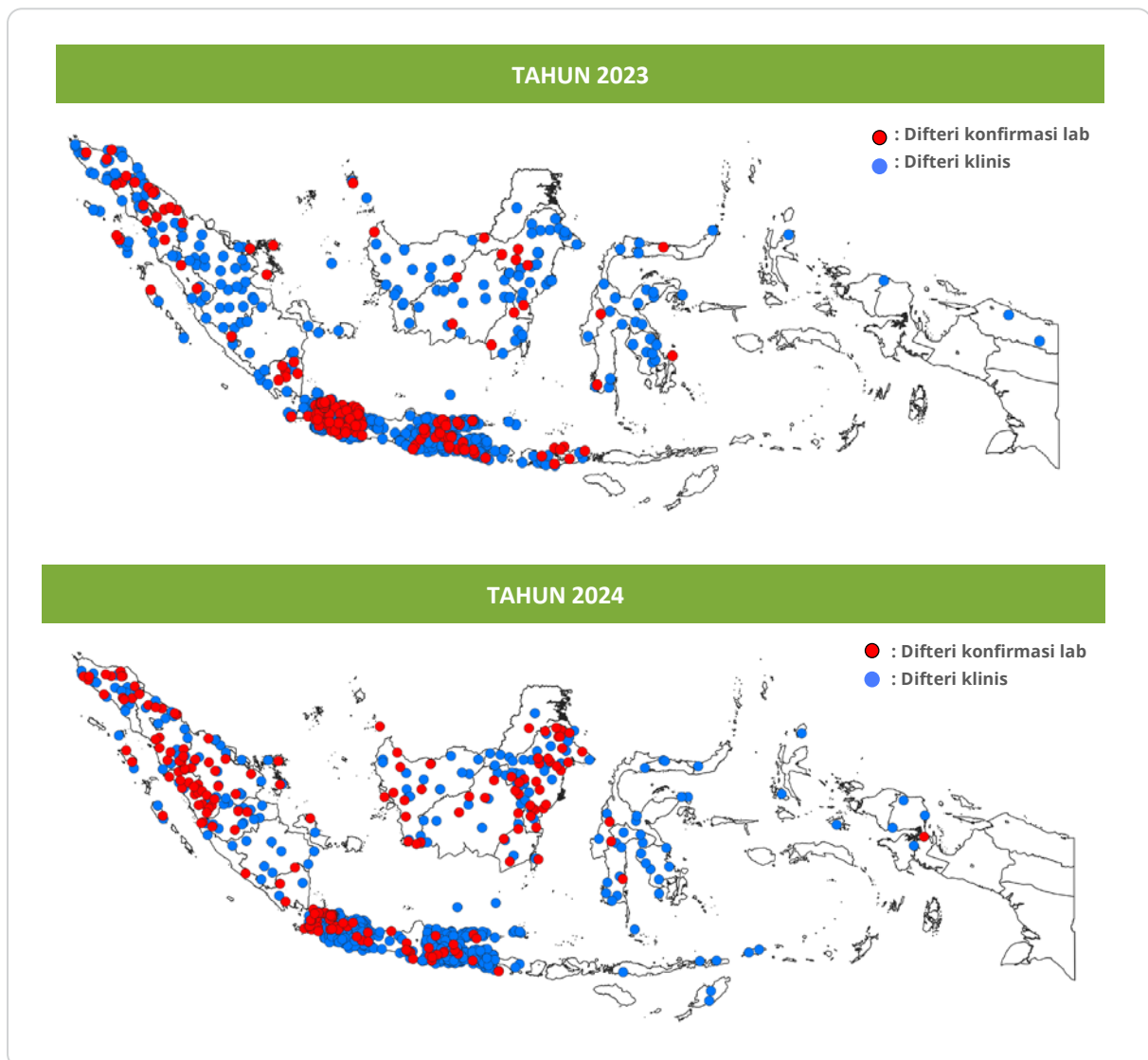
3. Difteri

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae strain toksigenik*. Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit. Apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian sekitar 50%, sedangkan dengan terapi angka kematiannya sekitar 10% (CDC *Manual for the Surveillance of Vaccine Preventable Diseases*, 2017). Angka kematian difteri rata rata 5 – 10% pada anak usia kurang 5 tahun dan 20% pada dewasa diatas 40 tahun (CDC Atlanta, 2016).

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 tahun 2010. Setiap satu kasus suspek difteri dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai demam atau tanpa demam dan adanya *pseudomembran* putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi harus dilaporkan dalam 24 jam dan dilakukan segera penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan. Kegiatan penanggulangan KLB difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, program imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait. (Pedoman Surveilans Difteri, 2019)

Pada tahun 2024, kasus difteri menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali 5 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Jumlah kasus difteri pada tahun 2024 sebanyak 943 kasus. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari kasus difteri yang terjadi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 949 kasus.

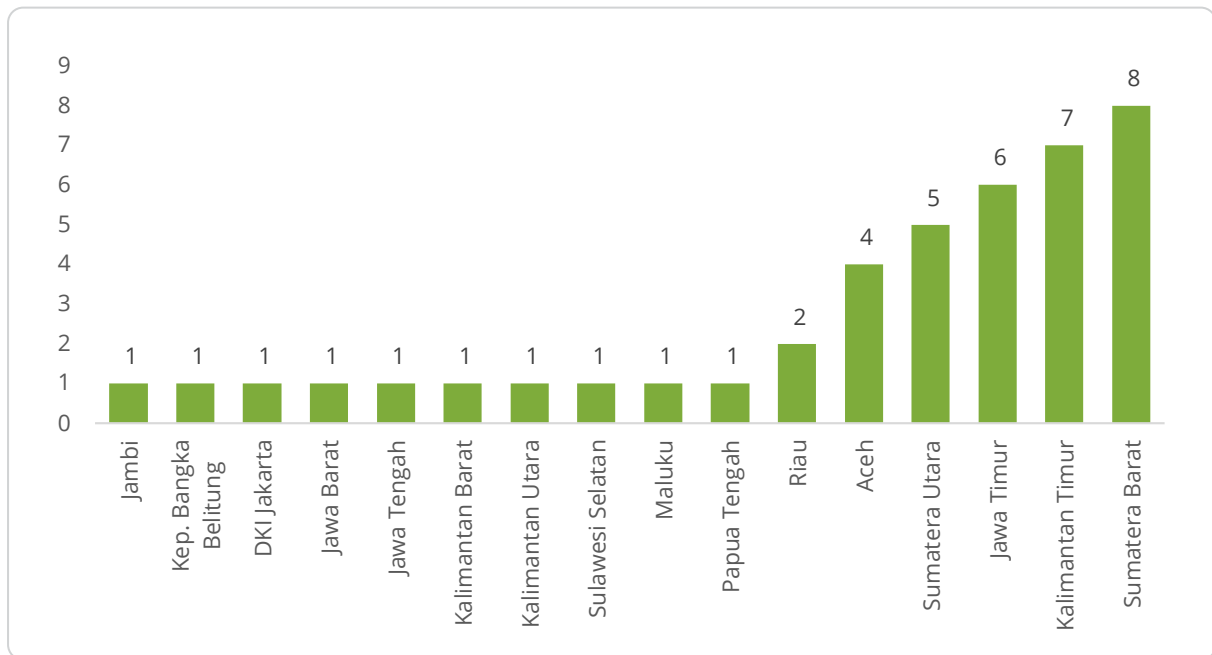
GAMBAR 6.31
SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2023-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024 terjadi 42 kematian kasus difteri di 16 provinsi. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yaitu 68 kasus kematian. Kasus kematian paling tinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 kasus, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 7 kasus dan Jawa Timur sebanyak 6 kasus. Pada tahun 2024, angka *CFR* pada kasus difteri di Indonesia sebesar 4,5%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar 7,2%. Dari 16 provinsi dengan kasus meninggal difteri, angka *CFR* paling tinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 50%, diikuti Kalimantan Utara dan Maluku sebesar 33,3%.

GAMBAR 6.32
KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

KLB difteri terjadi jika suatu wilayah kab/kota dinyatakan KLB difteri jika ditemukan satu suspek difteri dengan konfirmasi laboratorium kultur positif atau jika ditemukan suspek difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus kultur positif.

Kebijakan dalam penanggulangan difteri antara lain:

1. Setiap KLB harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian
2. Dilakukan tatalaksana kasus di rumah sakit dengan menerapkan prinsip kewaspadaan seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang tersendiri/isolasi, dan mengurangi kontak erat kasus dengan orang lain
3. Setiap suspek difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kultur
4. Setiap kontak erat diberi kemoprofilaksis, dan imunisasi pada saat penyelidikan epidemiologi
5. Pengambilan spesimen pada kontak erat dapat dilakukan jika diperlukan sesuai dengan kajian epidemiologi
6. Setiap suspek difteri dilakukan *Outbreak Response Immunization (ORI)* atau respon pemberian imunisasi pada KLB sesegera mungkin. Sebaiknya luas wilayah *ORI* dilakukan untuk satu (1) kabupaten/kota tetapi jika tidak memungkinkan karena sesuatu hal maka *ORI* minimal dilakukan satu (1) kecamatan dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi dan interval *ORI* 0-1-6 bulan
7. *ORI* dilanjutkan sampai selesai walaupun status KLB difteri di suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan telah berakhir.

4. Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (AFP)*/Lumpuh Layu Akut

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus poliomyelitis. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. Satu dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara yang lumpuh, 5-10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan.

Pada bulan Mei 2012, sidang World Health Assembly (WHA) mendeklarasikan bahwa pencapaian eradikasi polio merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global dan menetapkan agar Direktur Jenderal WHO menyusun strategi eradikasi polio yang komprehensif. Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian Eradikasi Polio Global, telah disetujui oleh Badan Eksekutif WHO pada Januari 2013. Dalam rencana strategis tersebut dibutuhkan komitmen global bahwa setiap negara perlu melaksanakan strategis yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian dari *trivalent Oral Polio Vaccine (tOPV)* menjadi *bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV)*, introduksi *Inactivated Polio Vaccine (IPV)* dan penarikan seluruh vaksin polio oral (*OPV*), surveilans *AFP (Acute Flaccid Paralysis)*, dan pengamanan virus polio di laboratorium (*Laboratory Containment*). Sebagai kelanjutannya, WHO juga telah menyusun Rencana Strategis 2019 – 2023 yang berisi 3 tujuan utama yaitu eradikasi, integrasi serta sertifikasi dan pengamanan virus polio.

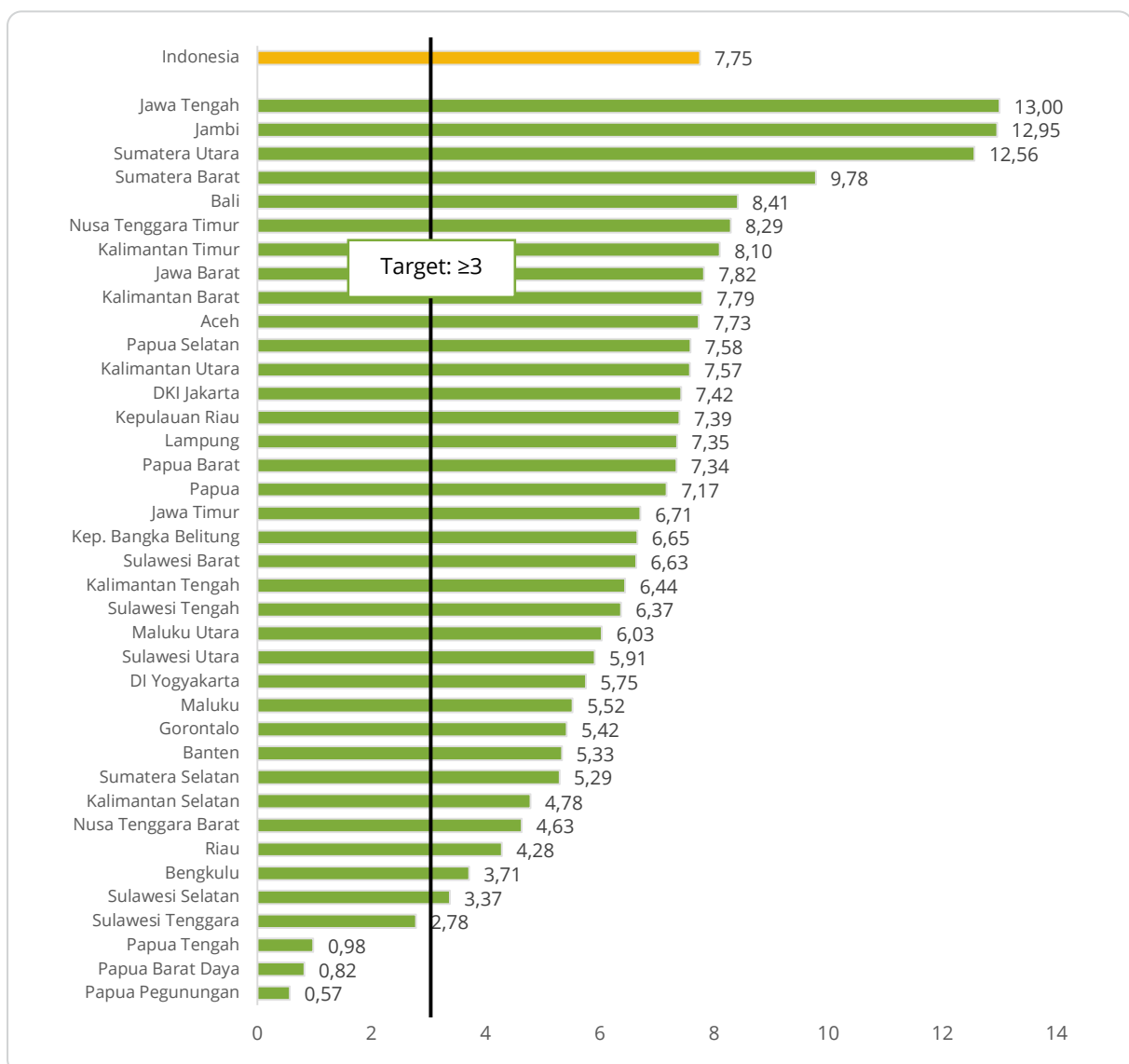
Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat *vaccine derived polio virus (VDPV)* tipe 1 di Yahukimo, Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan *bOPV*. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layu mendadak (*acute flaccid paralysis/AFP*) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio dapat dilakukan melalui surveilans *AFP*, dimana semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans *AFP* merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio. Surveilans *AFP* juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Indikator surveilans *AFP* adalah *non-polio AFP rate*, yaitu kasus lumpuh layu akut yang terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa yang diduga disebabkan oleh virus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan target *non-polio AFP rate* sebesar minimal 2/100.000 populasi penduduk usia kurang dari 15 tahun. Namun, dikarenakan adanya KLB pada tahun 2022 sehingga target *non-polio AFP rate* tahun 2023 dinaikkan menjadi minimal 3/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2023, secara nasional *non-polio AFP rate* sebesar 6,18/100.000 populasi penduduk kurang dari 15 tahun. Dapat diartikan bahwa secara nasional, Indonesia telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan kinerja surveilans *AFP* untuk menemukan kasus *AFP* sudah sangat baik sehingga diharapkan tidak ada kasus *AFP* yang belum terjaring. Angka capaian tahun 2023 ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,05/100.000 populasi penduduk kurang dari 15 tahun.

Pada tahun 2024 seluruh provinsi telah melaporkan kasus AFP. Dari 38 provinsi di Indonesia, hampir semua provinsi sudah mencapai standar minimal penemuan *non-polio AFP rate* sebesar ≥ 3 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun, kecuali empat provinsi. Angka capaian tertinggi ada di Provinsi Jawa Tengah diikuti Jambi dan Sumatera Utara. Empat provinsi yang belum berhasil mencapai standar minimal yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Capaian *non-polio AFP rate* yang paling rendah adalah Papua Pegunungan sebesar 0,57 per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun.

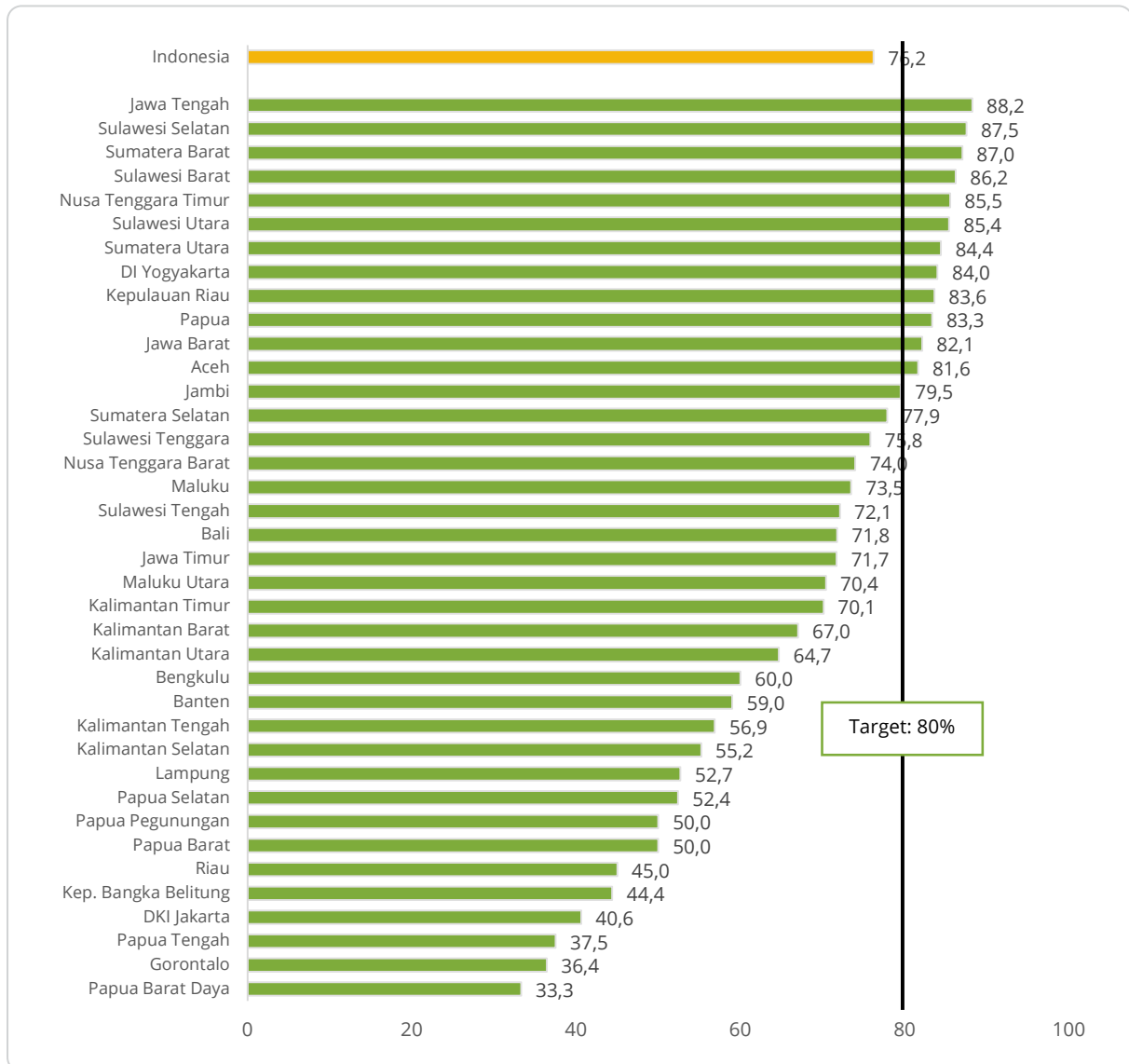
GAMBAR 6.33
NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK <15 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio pada kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan surveilans AFP. Semua kasus AFP seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus AFP harus memenuhi standar spesimen adekuat dengan persyaratan yaitu volume cukup 8-10 gr, spesimen kondisi baik (tidak bocor, suhu dingin 4-8^o C), dua spesimen didapatkan ≤14 hari setelah munculnya kelumpuhan dengan waktu pengambilan spesimen pertama dan kedua jeda waktu minimal 24 jam.

GAMBAR 6.34
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Persentase spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 76,2% dari target sebesar 80%, walaupun sudah sedikit meningkat dibandingkan dengan persentase spesimen adekuat pada tahun 2023 sebesar 74%. Selama 6 tahun terakhir pemeriksaan spesimen tinja dengan spesimen adekuat cenderung tidak mencapai target. Pada tahun 2024, dari 38 provinsi hanya terdapat 12 provinsi yang telah mencapai standar spesimen adekuat. Provinsi dengan

persentase spesimen adekuat AFP yang tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 88,2%. Provinsi dengan persentase spesimen adekuat yang paling rendah adalah Papua Barat Daya sebesar 33,3%. Persentase spesimen adekuat AFP menurut provinsi tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 6.34.

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 68-70.

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah Dengue. Kasus DBD pertama di Indonesia dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968. Sejak pertama kali ditemukan kasus ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Vektor penular penyakit ini berasal dari jenis nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Nyamuk *Aedes* menyukai genangan atau tempat penampungan air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang, atau tempat sampah sebagai tempat perindukan. Karakteristik vektor penular menentukan persebaran dan waktu kejadian infeksi. Habitat nyamuk *Aedes* pada umumnya berada di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, serta suhu panas dan lembab. Karakteristik dan perilaku vektor tersebut dapat menjelaskan adanya kecenderungan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan seiring dengan bermunculannya tempat perindukan. Selain mempengaruhi banyaknya kasus, karakteristik dan perilaku nyamuk *Aedes* juga menjadi landasan upaya pengendalian penyakit DBD melalui intervensi lingkungan dan perilaku individu dan masyarakat. Upaya pengendalian tersebut di antaranya melalui kampanye 3M (Menguras, Menutup, dan Memanfaatkan) dan 3M plus (memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di dalam kamar, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air).

a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Diagnosa kasus DBD ditegakkan dengan anamnesis perjalanan penyakit, gejala klinis, pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang konfirmasi diagnosis. Pasien terduga DBD akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit $< 100.000/\text{mm}^3$ dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit $> 20\%$.

Pada tahun 2024 terdapat 257.271 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 1.461 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 114.720 kasus dan 894 kematian.

Dalam pengendalian penyakit DBD, digunakan beberapa indikator untuk kegiatan pemantauan. Dua indikator utama yang digunakan adalah *Incidence Rate* per 100.000 penduduk dan *Case Fatality Rate*.

GAMBAR 6.35
INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE
DI INDONESIA TAHUN 2015-2024



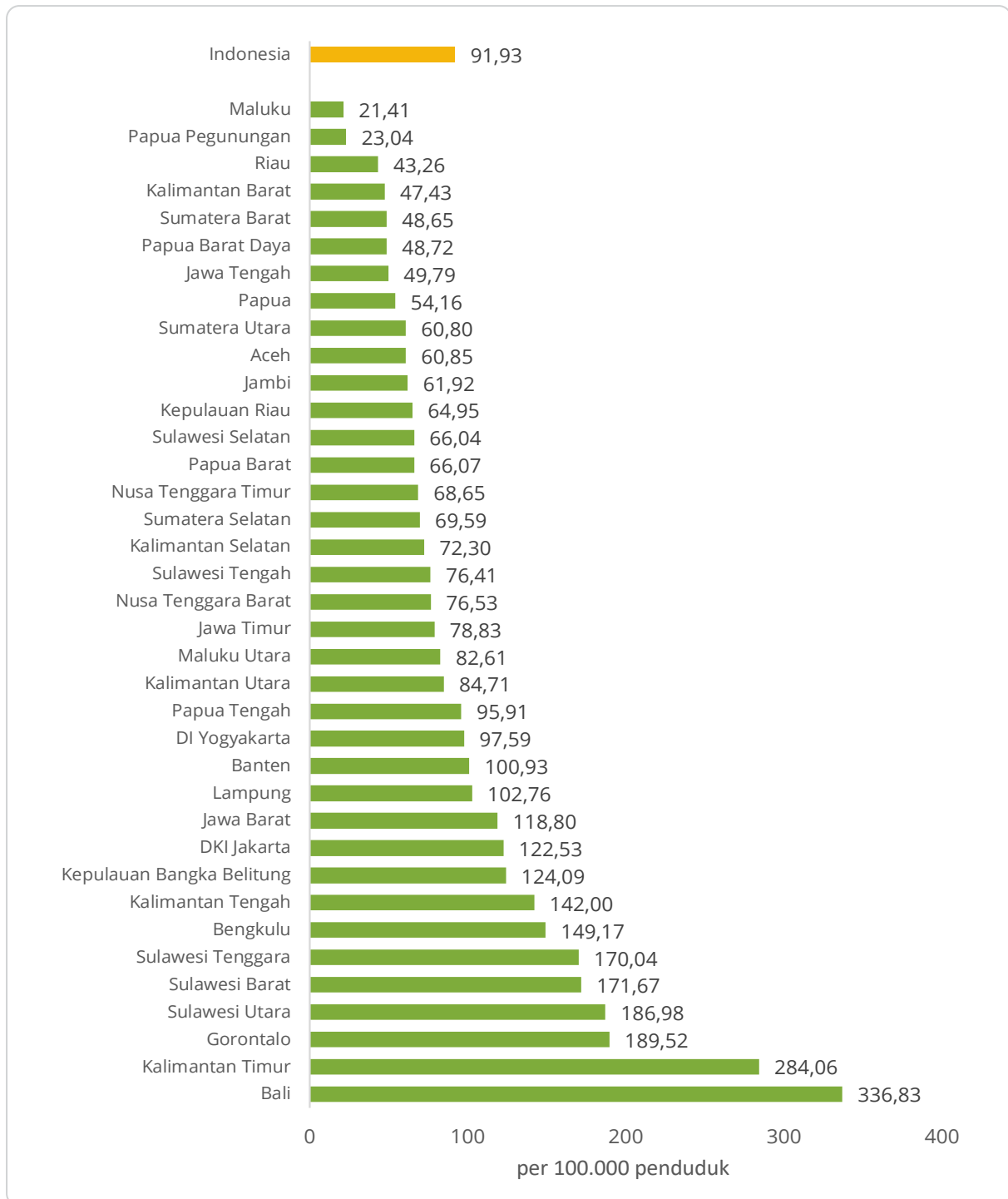
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk mengalami lonjakan pada tahun 2024 setelah adanya penurunan insiden pada tahun 2023. Beberapa penyebab tingginya morbiditas DBD antara lain pengaruh perubahan iklim (fenomena El Nino) yang melanda hampir seluruh bagian dunia mengakibatkan peningkatan suhu dan berefek pada perubahan bionomik nyamuk sebagai vektor Dengue. Peningkatan suhu menyebabkan semakin meningkatnya frekuensi gigitan nyamuk. Saat suhu normal nyamuk menggigit setiap 4-5 hari sekali dan seiring dengan meningkatnya suhu, nyamuk menggigit setiap 2 hari. Hal ini dapat menyebabkan semakin meningkatnya penyebaran infeksi Dengue.

Faktor lain yang menyebabkan peningkatan insidens adalah penambahan ketersediaan RDT Dengue Combo di Puskesmas. Hal ini membuat semakin banyak kasus Dengue terdeteksi dan tercatat dalam laporan kasus Dengue. Penambahan RDT Dengue Combo di Puskesmas bertujuan agar semakin cepat kasus Dengue terdeteksi maka akan segera ditangani yang akan dapat mencegah kematian akibat Dengue. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanda, gejala dan penularan dengue sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan kasus dengue di fasyankes yang menimbulkan kematian.

Selain itu banyak faktor lain yang mempengaruhi peningkatan insidens DBD, diantaranya: (1) Maraknya media sosial berpengaruh pada menurunnya fokus masyarakat terhadap isu kesehatan termasuk pencegahan Dengue; (2) PSN 3M Plus belum menjadi kegiatan prioritas di daerah dalam pencegahan penanggulangan dengue di Indonesia; (3) Belum optimalnya sistem kewaspadaan dini yang disebabkan karena perbedaan pemahaman definisi kasus dan kurangnya koordinasi antara petugas surveilans dan penanggung jawab program DBD di daerah, (4) Program pencegahan dan pengendalian Dengue masih belum menjadi prioritas sehingga proporsi anggaran masih belum memadai di tingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota dan provinsi; dan (5) Belum optimalnya penerapan inovasi baru strategi teknologi pengendalian dengue melalui implementasi nyamuk ber *Wolbachia*.

GAMBAR 6.36
ANGKA KESAKITAN (INCIDENCE RATE/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

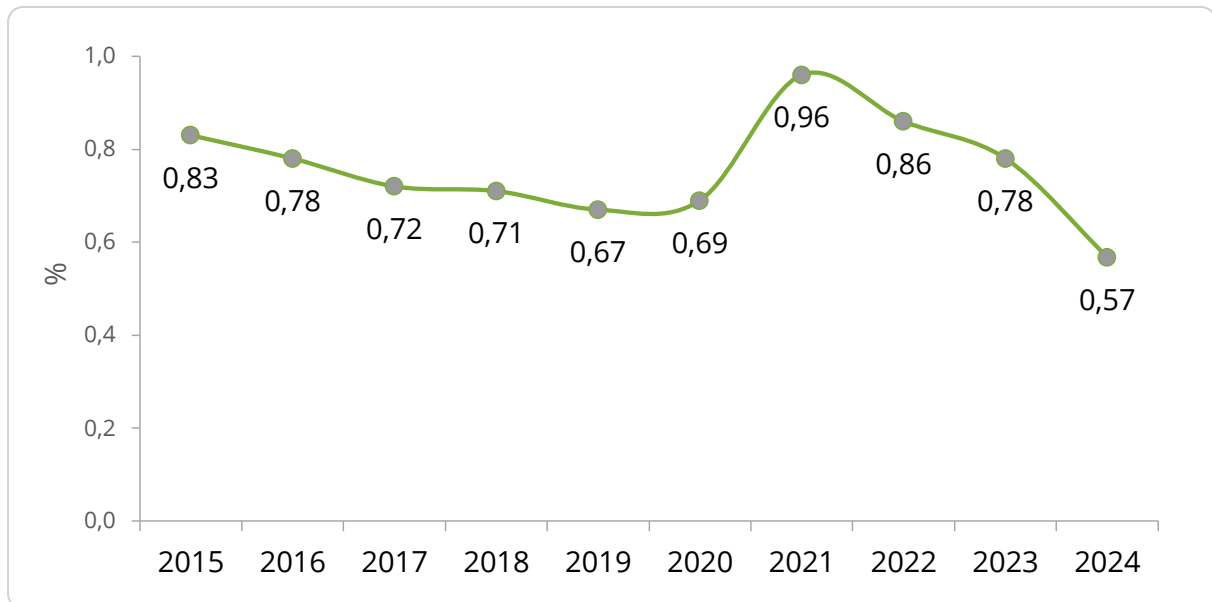


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional IR DBD tahun 2024 sebesar 91,93 per 100.000 penduduk, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional sebesar ≤ 10 per 100.000 penduduk. Hampir seluruh provinsi memiliki IR DBD >10 per 100.000 penduduk, kecuali Papua Selatan. Tidak ada pelaporan kasus pada Provinsi Papua Selatan. Provinsi dengan IR DBD tertinggi adalah Bali dan Kalimantan Timur.

Kasus DBD yang terlambat mendapatkan perawatan dapat menyebabkan fatalitas seperti kematian. Proporsi kematian terhadap seluruh kasus DBD atau yang dikenal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengendalian DBD.

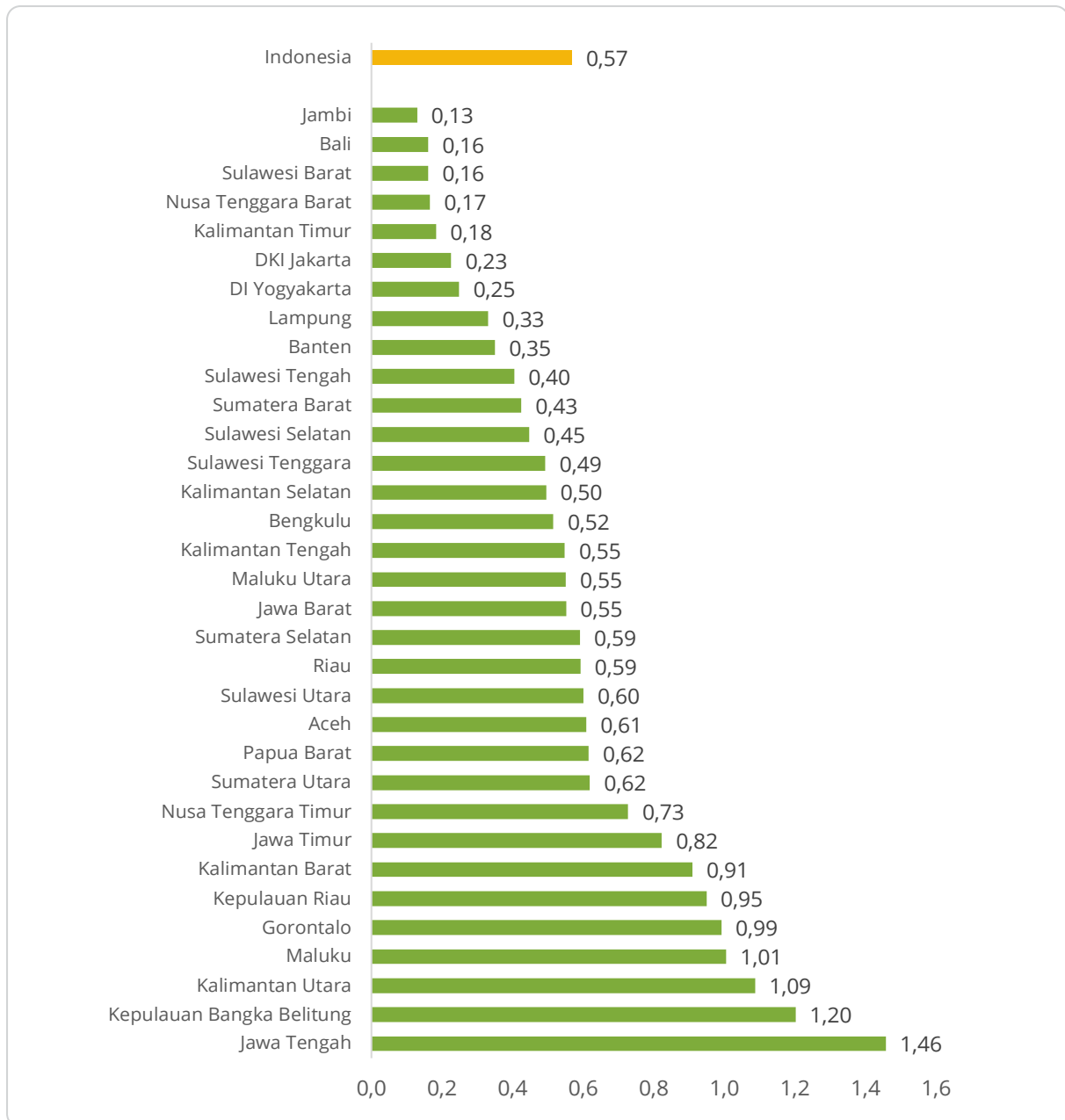
GAMBAR 6.37
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA
TAHUN 2015-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2015-2020 CFR DBD di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan. Peningkatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,96% dan kembali mengalami penurunan hingga tahun 2024 yaitu sebesar 0,57%. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan pada perawatan pasien DBD baik dari sisi ketepatan waktu penanganan maupun kualitas pelayanan kesehatan.

GAMBAR 6.38
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



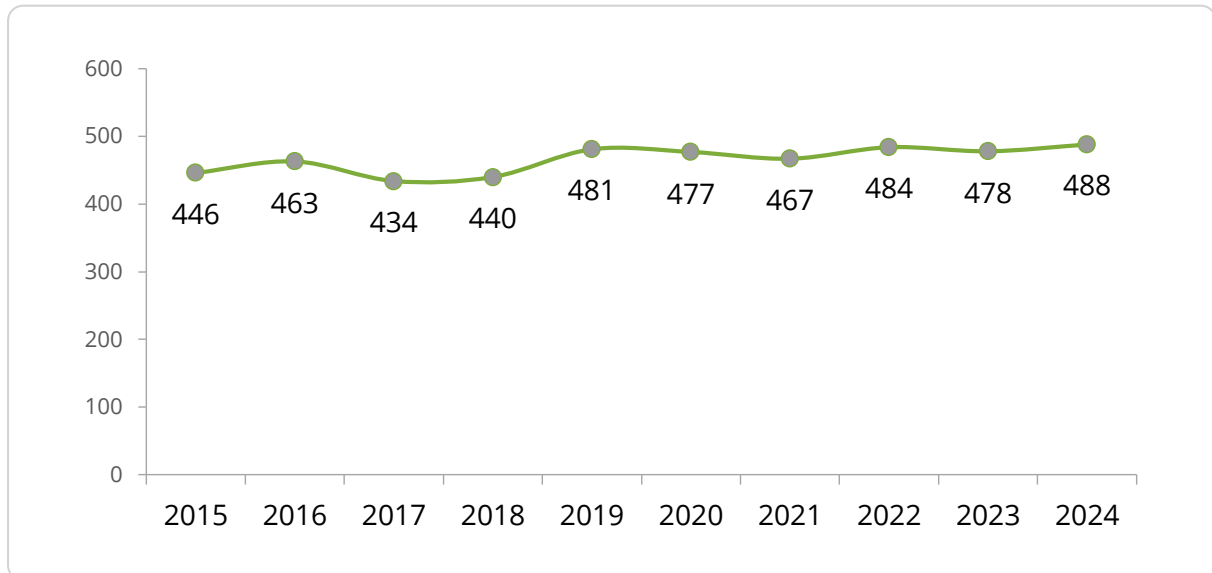
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional CFR DBD tahun 2024 adalah 0,57%. Angka ini menurun dibandingkan periode sebelumnya. CFR tinggi jika melampaui angka 1%. Terdapat empat provinsi yang memiliki CFR di atas 1%. Pertolongan segera untuk mencegah dan mengurangi keparahan dan komplikasi yang menyebabkan kematian diperlukan untuk menurunkan CFR. Diperlukan upaya tindak lanjut tata laksana kasus yg adekuat, edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya Dengue untuk mencegah keterlambatan penanganan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat secara dini mengenali gejala dan tanda bahaya Dengue. Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pengunungan, dan Papua Barat Daya tidak terdapat kasus kematian DBD (CFR 0%).

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Penyebaran kasus DBD di Indonesia dapat dipantau melalui banyaknya kabupaten/kota dengan status terjangkit DBD. Pada tahun 2024 terdapat 488 (94,9%) kabupaten/kota yang terjangkit DBD di Indonesia.

GAMBAR 6.39
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2015-2024

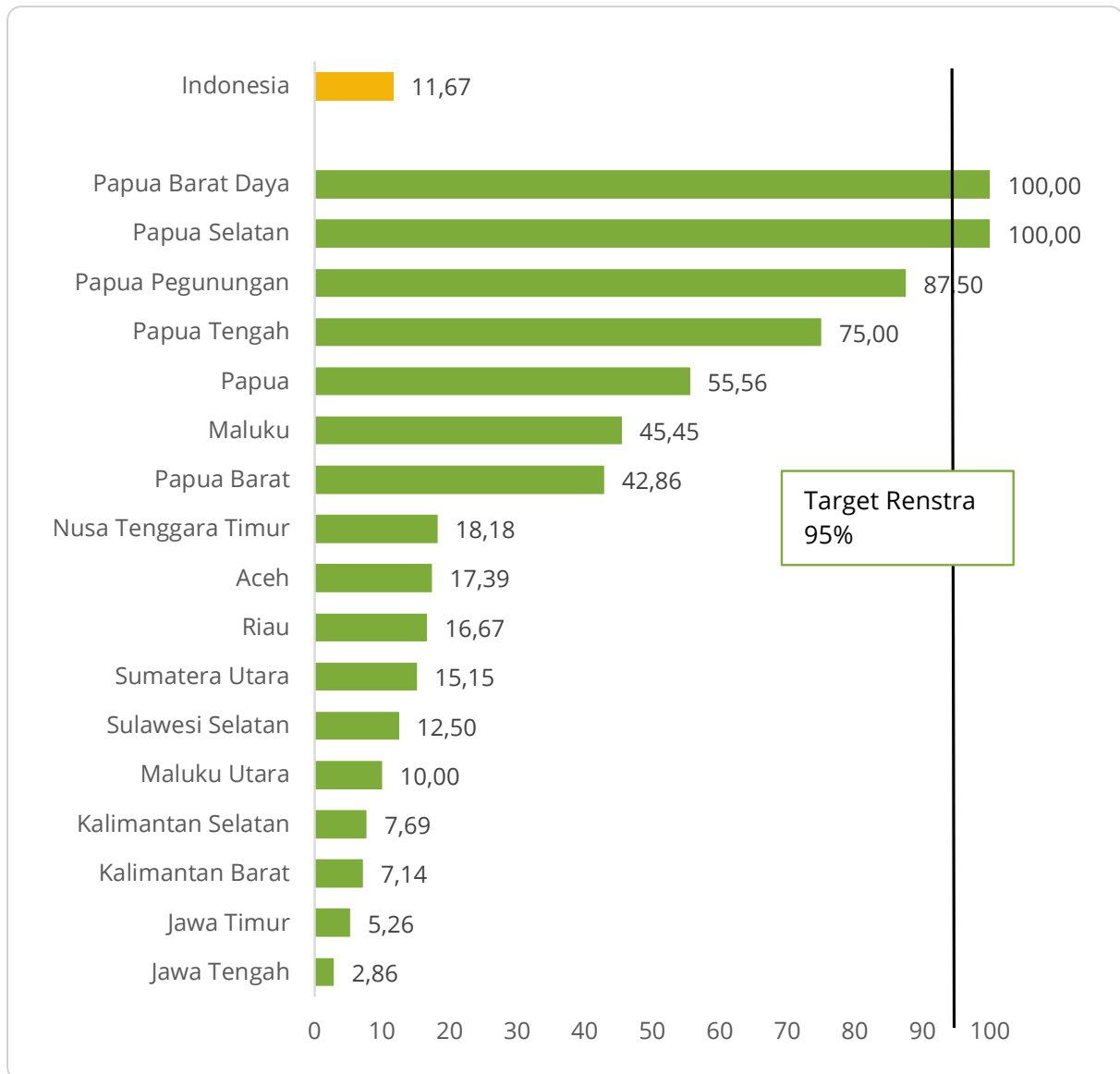


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2024 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat hingga sebesar 488 kabupaten/kota pada tahun 2024.

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, salah satu indikator Rencana Strategis tahun 2020 - 2024, yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 60 kabupaten/kota (11,67%) yang mencapai IR DBD ≤ 10 /100.000 penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa target program tahun 2024 sebesar 95% kabupaten/kota dengan IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk belum tercapai.

GAMBAR 6.40
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD ≤ 10 PER 100.000 PENDUDUK
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024 hanya dua provinsi yang memenuhi target nasional persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk yaitu Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

c. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue

Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue adalah upaya penyelidikan penularan penyakit Dengue yang meliputi kegiatan pencarian atau identifikasi kasus Dengue dan/atau kasus suspek infeksi Dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular Dengue di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum yang berada dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. PE bertujuan untuk mengetahui potensi penularan dan penyebaran Dengue lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita atau fokus penularan. PE harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah adanya laporan kasus atau terduga Dengue.

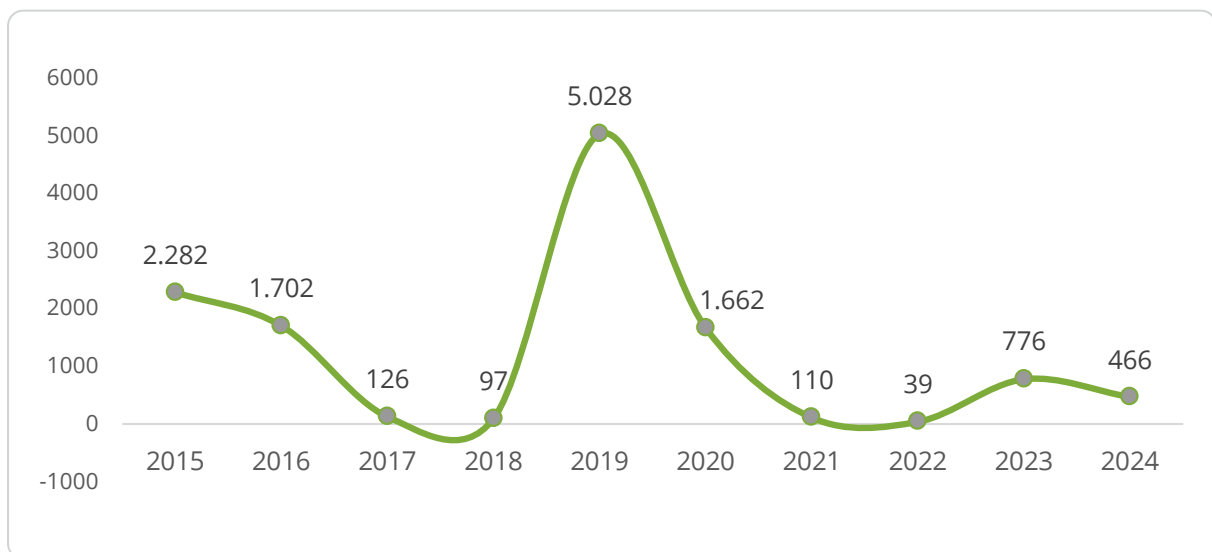
2. Chikungunya

Demam Chikungunya (demam chik) ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Gejala utama demam chik adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD.

a. Kesakitan dan Kematian Akibat Chikungunya

Pada tahun 2024 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 466 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebanyak 776 kasus. Terdapat 5 provinsi yang melaporkan data Chikungunya pada tahun 2024. Provinsi dengan kasus tertinggi yaitu Jawa Timur sebanyak 254 kasus. Jumlah kasus Chikungunya pada tahun 2015-2024 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.41
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2015-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus chikungunya antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya.

b. Penyelidikan Epidemiologi Pada Chikungunya

Penyelidikan epidemiologi (PE) bertujuan untuk mengetahui potensi dan penyebaran Chikungunya lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita. PE pada Chikungunya adalah kegiatan pencarian penderita atau terduga demam chikungunya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular di tempat tinggal penderita dan rumah/ bangunan sekitar, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.

3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya

Pengendalian faktor risiko yang paling efektif adalah pengendalian vektor terpadu baik secara fisik, kimiawi dan biologi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan Pengendalian Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. PSN 3M Plus merupakan upaya pemberantasan sarang nyamuk secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Kegiatan PSN 3M meliputi menguras bak mandi atau bak penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan memanfaatkan Kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.

Kegiatan Plus meliputi: mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat-tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon, dan lainnya, menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, dan cara spesifik lainnya di masing-masing daerah.

Keberhasilan kegiatan PSN 3M Plus antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ). Jika $ABJ \geq 95\%$ diharapkan penularan DBD dan Chikungunya dapat dicegah atau dikurangi. Upaya pemberantasan vektor penyakit DBD dan Chikungunya hanya dapat berhasil apabila seluruh masyarakat berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

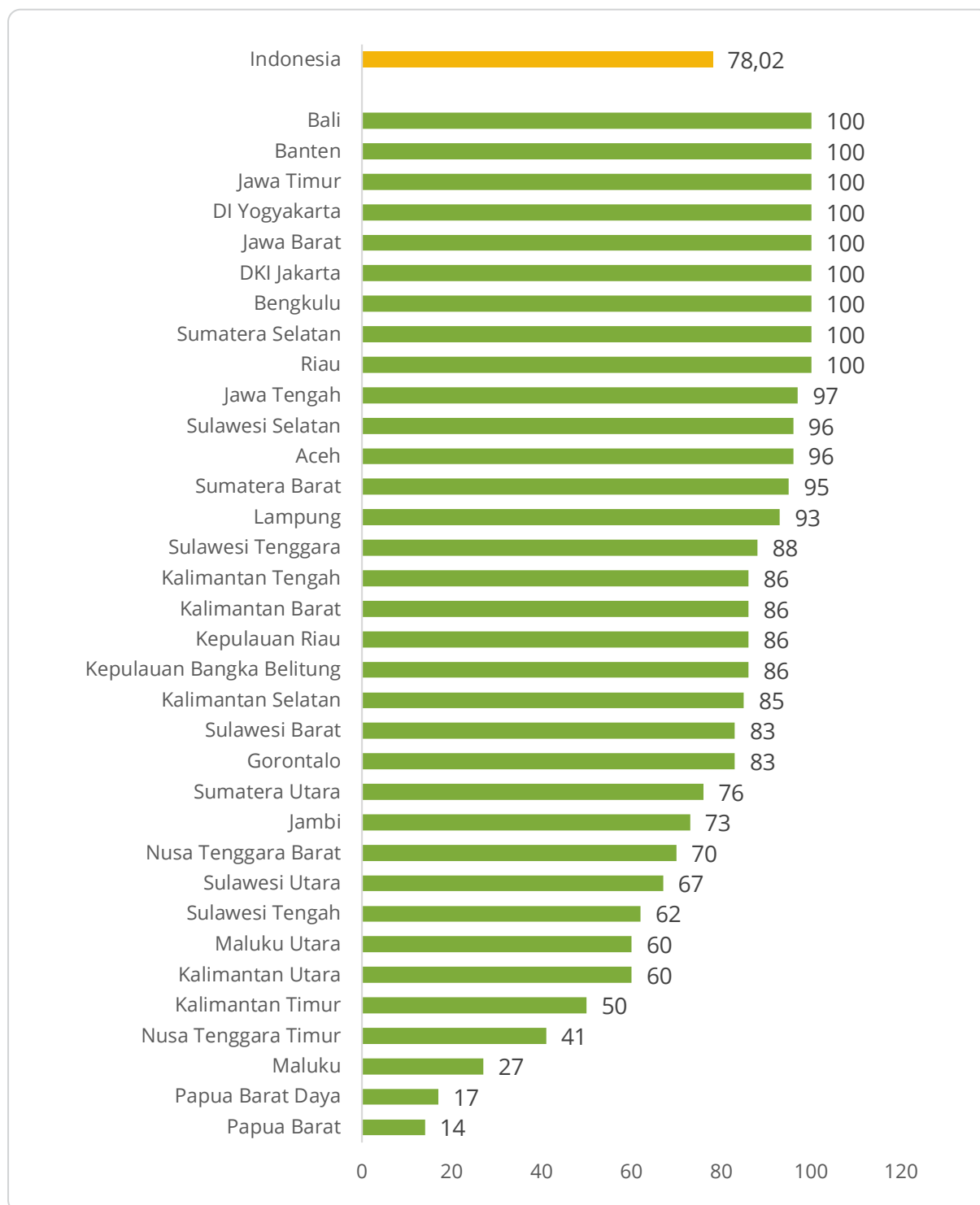
4. Malaria

Terkait dengan pengendalian Malaria di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Target ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia”.

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut *Plasmodium*. *Plasmodium* menginfeksi manusia melalui vektor penular nyamuk *Anopheles*. Bersama dengan HIV AIDS dan Tuberkulosis, pengendalian malaria menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai tujuan global yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030.

Pada tahun 2024, terdapat sembilan provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya ditetapkan sebagai wilayah bebas malaria, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Selain itu, terdapat empat provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berstatus eliminasi malaria, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Papua tersebut yang memiliki status endemis rendah. Dengan adanya intervensi yang efektif status tersebut bisa ditingkatkan menjadi bebas malaria.

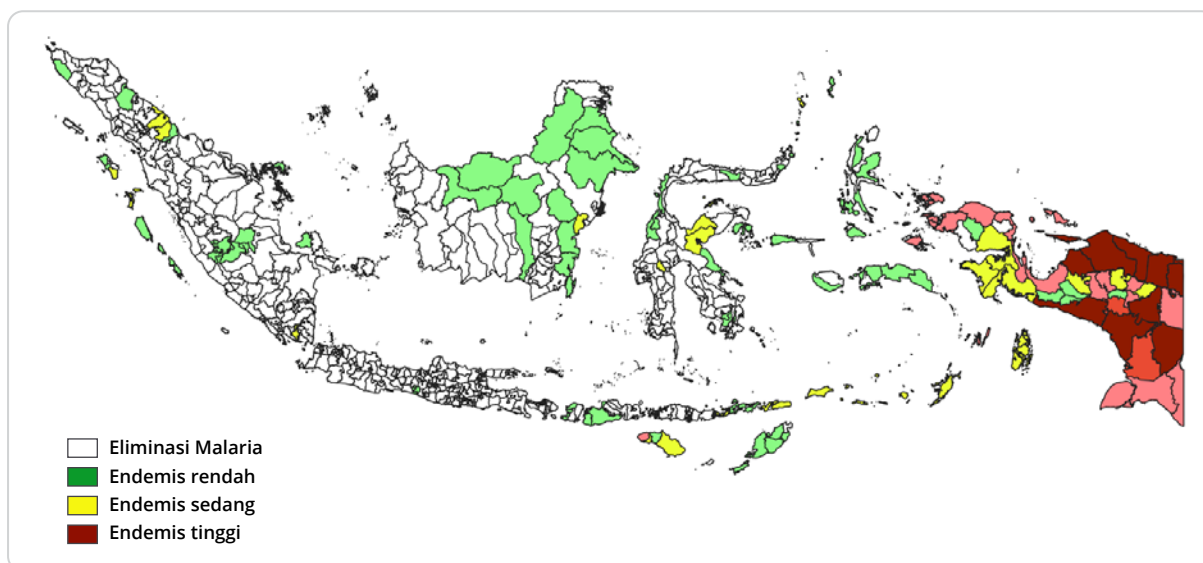
GAMBAR 6.42
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Eliminasi malaria dapat diupayakan melalui peningkatan persentase konfirmasi sediaan darah dan persentase pengobatan standar. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 sebanyak 78,02% kabupaten/kota di Indonesia atau sebanyak 401 kabupaten/kota telah berstatus bebas malaria.

GAMBAR 6.43
PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berstatus eliminasi malaria tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sebagian besar kabupaten/kota dengan status endemis tinggi terdapat pada enam provinsi di Pulau Papua. Hanya satu kabupaten di luar Papua dengan tingkat endemis tinggi yaitu Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penentuan tingkat endemisitas di antaranya ditentukan berdasarkan nilai *Annual Parasite Incidence* (API) per 1000 penduduk. Wilayah endemis rendah jika API <1 per 1000 penduduk, endemis sedang jika API sebesar 1-5 per 1000 penduduk, dan endemis tinggi jika API >5 per 1000 penduduk. Pada tahun 2024 terdapat 401 kabupaten/kota (78,02%) bebas malaria, 60 kabupaten/kota (11,67%) berstatus endemis rendah, 23 kabupaten/kota (4,47%) berstatus endemis sedang, dan 30 kabupaten/kota (5,84%) berstatus endemis tinggi.

a. Angka Kesakitan Malaria

Morbiditas malaria dapat diketahui dengan menilai indikator *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk. Indikator ini diperoleh dengan menghitung proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tertentu. Indonesia berhasil menekan API menjadi kurang dari 1 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, terus terjadi peningkatan sejak tahun 2021 hingga API pada tahun 2024 mencapai 1,9 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan pemeriksaan kasus malaria yang cukup signifikan menjadi 4.353.097 dengan kasus positif sebesar 543.965.

GAMBAR 6.44
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API*)
PER 1.000 PENDUDUK Di INDONESIA TAHUN 2015-2024

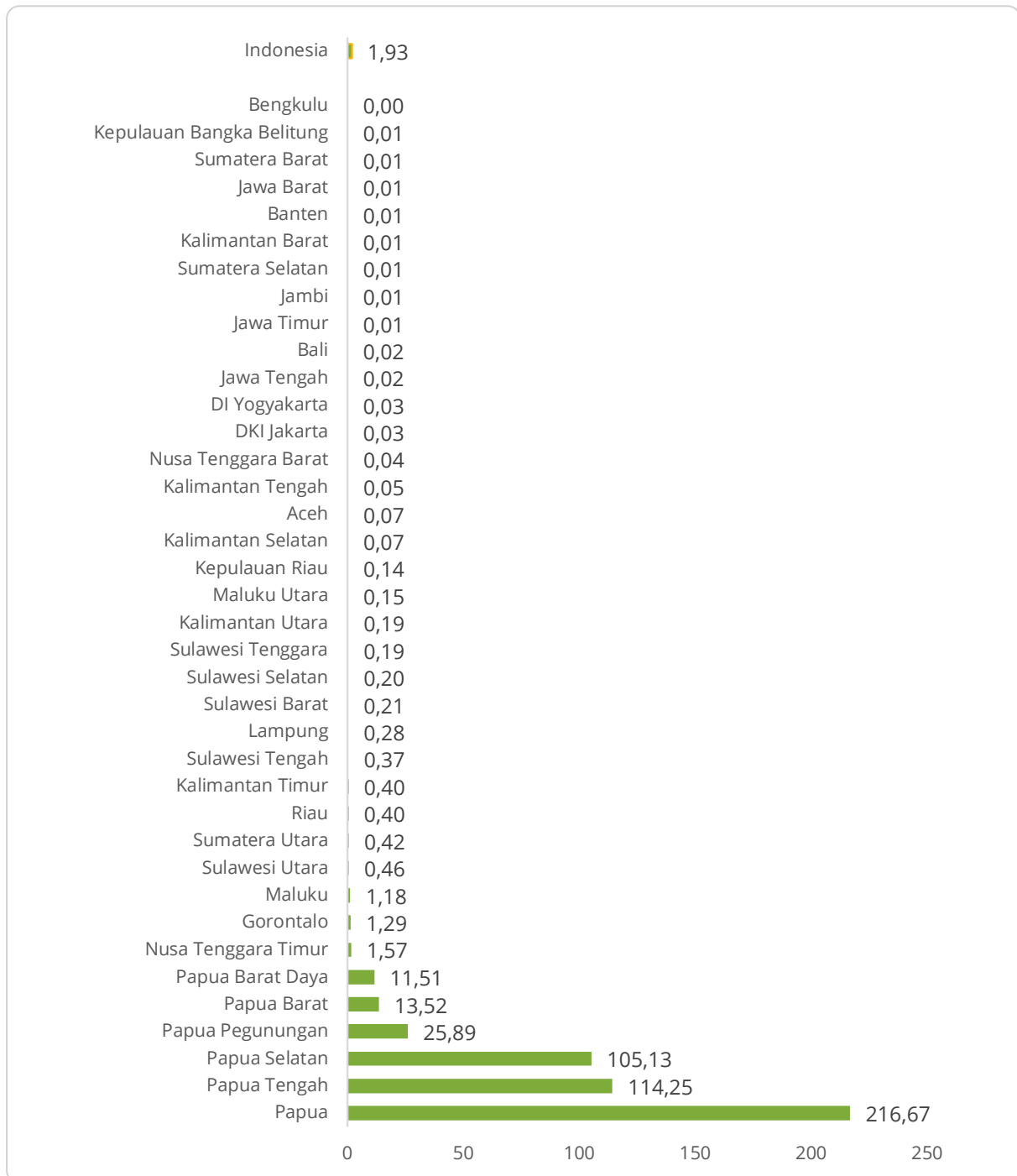


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Dari 4.357.950 suspek malaria tahun 2024 yang dilaporkan, sebanyak 99,89% di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium, 45,86% diperiksa secara mikroskopis dan 54,14% menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT), dengan capaian *Positivity Rate* (PR) sebesar 12,5% dari angka PR yang ditargetkan <5%.

Sebanyak 76,32% provinsi di Indonesia telah mampu menekan API malaria hingga kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan API malaria tertinggi. Hal ini sejalan dengan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan status endemis tinggi. Tingginya API di Provinsi Papua sebesar 216,67 per 1.000 penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh provinsi, menggambarkan kontribusi yang signifikan terhadap API di tingkat nasional. API pada tingkat nasional dan provinsi di tahun 2024 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.45
ANGKA KESAKITAN MALARIA (API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria yang standar dan efektif sampai saat ini masih menggunakan *Artemisinin-based Combination Therapy* (ACT) ditambah primakuin. Pengobatan dilakukan pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum habis. Pemerintah menetapkan target persentase pengobatan ACT sebesar $\geq 95\%$.

GAMBAR 6.46
PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada gambar di atas dapat diketahui hanya sebagian provinsi di Indonesia yang memenuhi target pengobatan standar $\geq 95\%$, yaitu sebanyak 16 provinsi (42,1%). Selain itu masih terdapat 22 provinsi dengan persentase pengobatan standar kurang dari 95%, dengan provinsi terendah yaitu DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Data dan informasi lebih rinci tentang penyakit Malaria terdapat pada Lampiran 73.a, 73.b, dan 73.c.

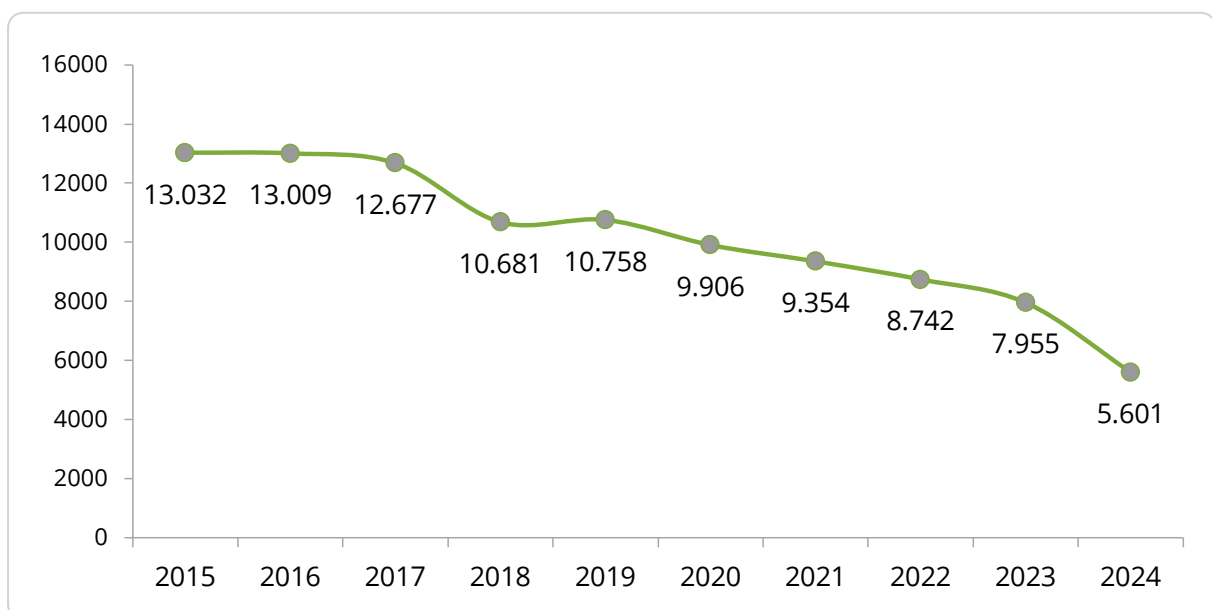
5. Filariasis

Filariasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing *Filaria* dan ditularkan dengan perantara nyamuk. Cacing *Filaria* yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk akan merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae dan scrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung, penyakit yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas kerja penderita dan beban keluarga. Cacing penyebab *Filaria* yang tersebar di Indonesia terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*.

Secara Global, diperkirakan jumlah kasus kronis filariasis adalah sebanyak 36 juta kasus. Sebanyak 657 juta penduduk di 39 negara masih beresiko tertular filariasis sehingga membutuhkan obat pencegahan untuk memutus rantai penularan (WHO 2023). Dalam Pertemuan ke 73 World Health Assembly (WHA) secara Virtual tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Diseases /NTDs) tahun 2021–2030. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah mentargetkan eliminasi filariasis pada tahun 2030.

Di Indonesia, pada tahun 2024 terdapat 5.601 kasus kronis Filariasis yang tersebar di 38 provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis setelah dilakukan validasi data dan konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus Filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

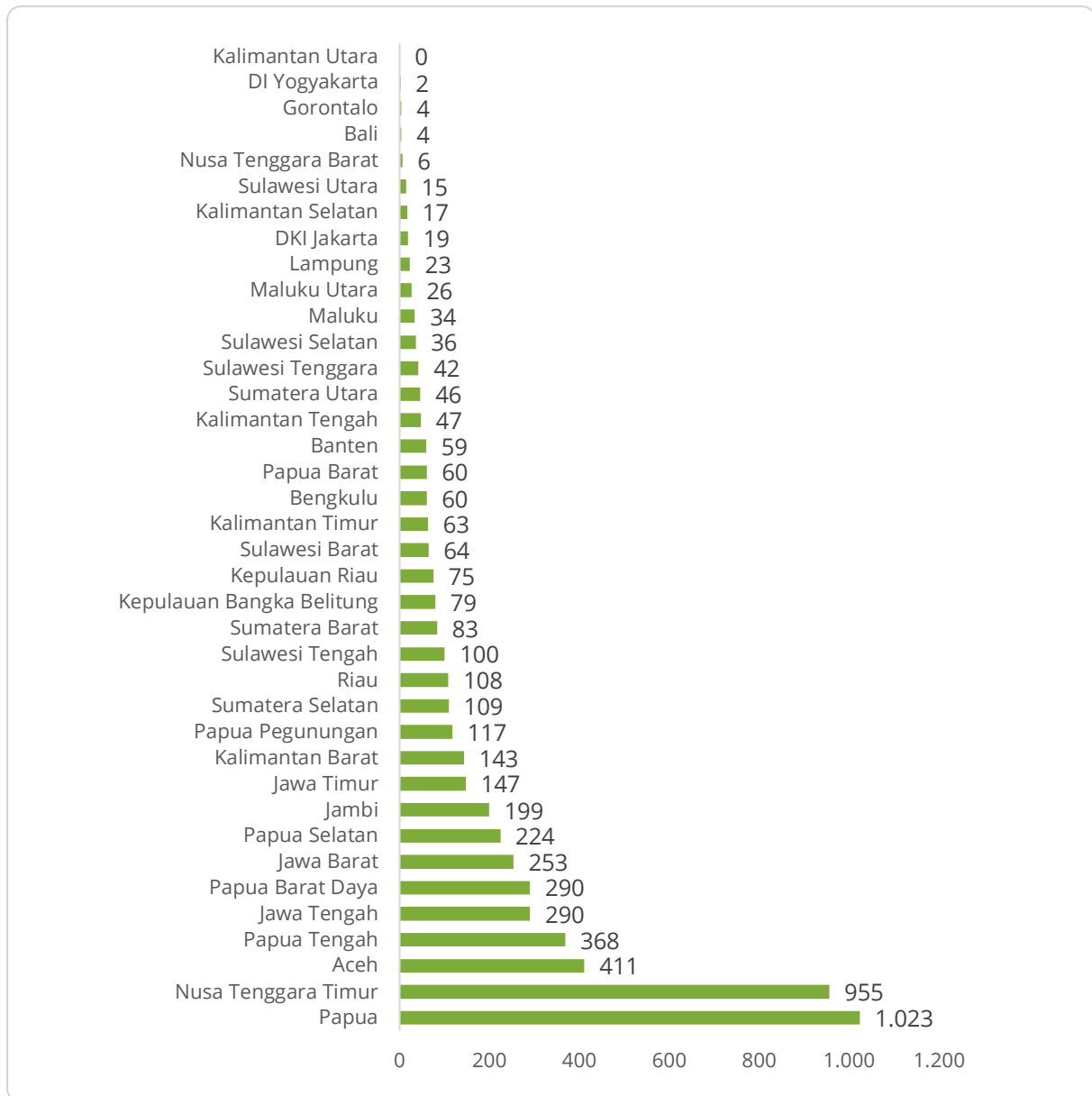
GAMBAR 6.47
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Provinsi dengan kasus kronis Filariasis tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua sebanyak 1.023 kasus dan Nusa Tenggara Timur 955 kasus. Provinsi dengan kasus Filariasis terendah adalah DI Yogyakarta dengan total 6 kasus. Provinsi Kalimantan Utara tidak ada kasus kronis filariasis.

GAMBAR 6.48
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

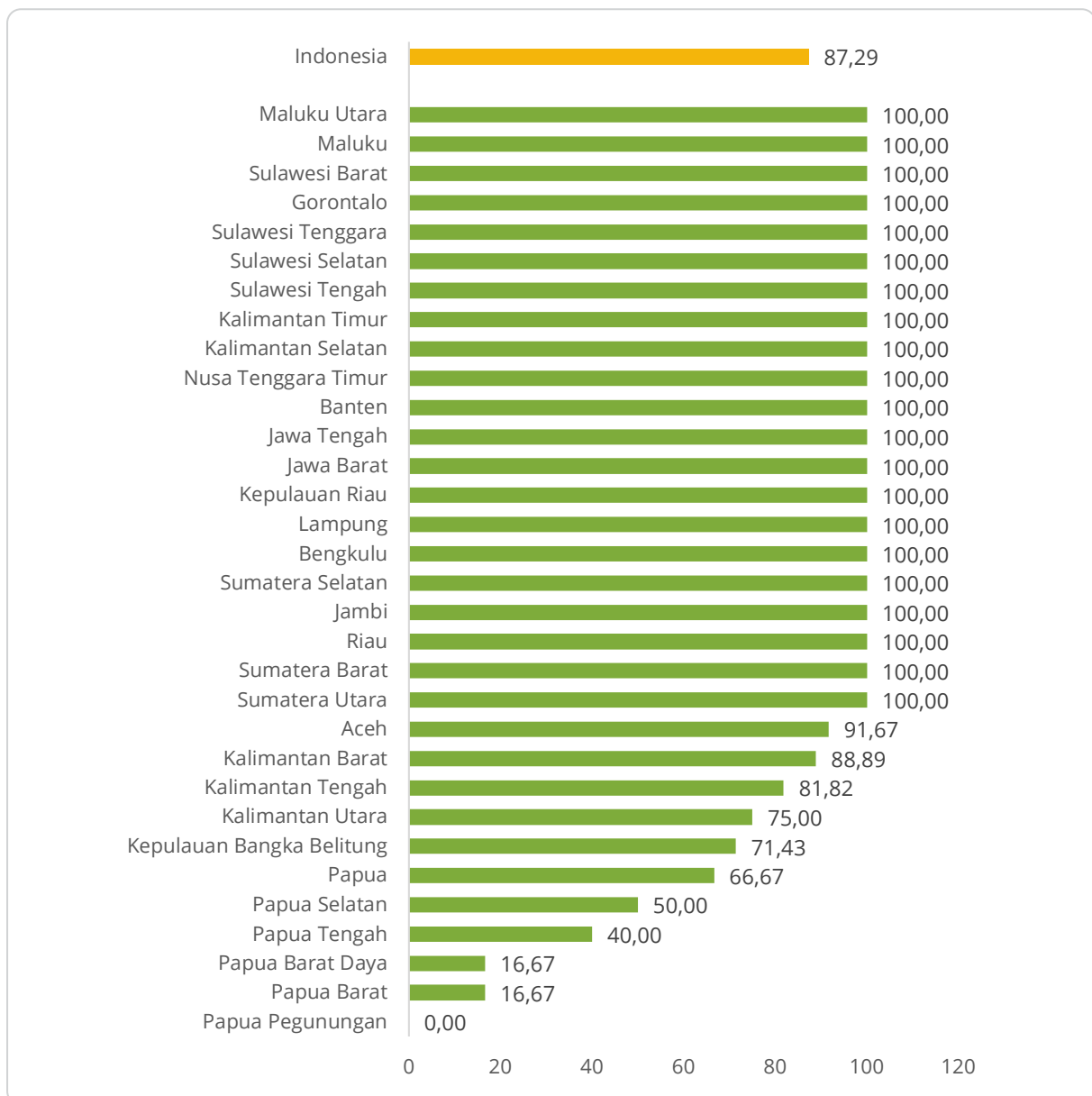


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keberhasilan program pengendalian Filariasis dapat diketahui di antaranya dengan melihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi $< 1\%$. Indonesia telah menetapkan 236 kabupaten/kota di 32 provinsi sebagai daerah endemis filariasis. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis Filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam menuju

eliminasi filariasis, pemerintah menetapkan dua program utama yaitu melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Filariasis untuk memutus rantai penularan Filariasis pada penduduk di semua Kabupaten/Kota Endemis Filariasis serta yang kedua adalah tatalaksana kasus kronis filariasis di fasyankes.

GAMBAR 6.49
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA
YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



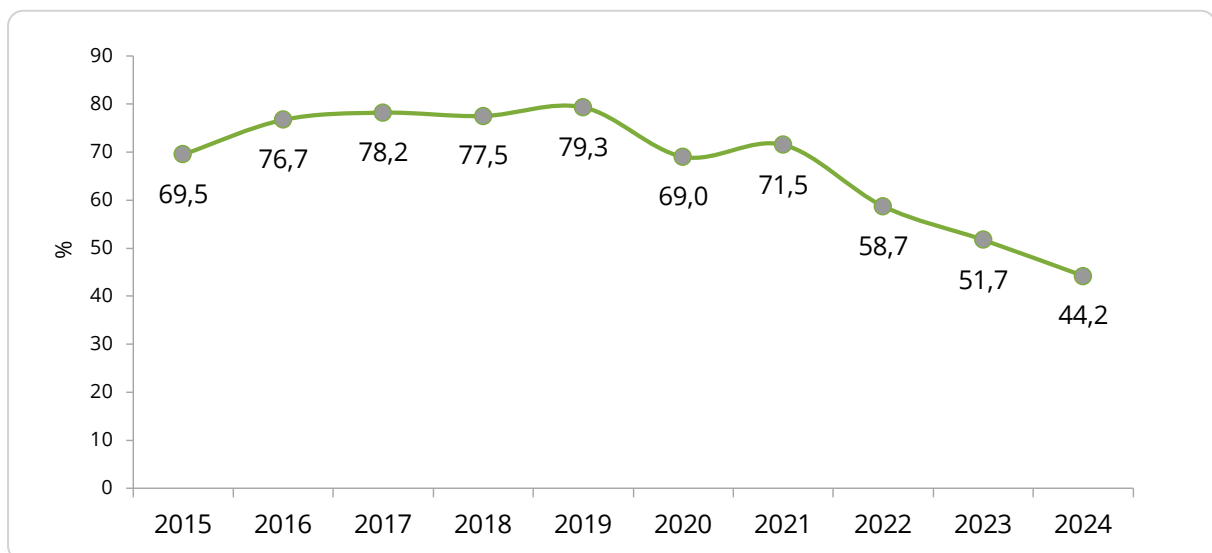
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Indikator keberhasilan pengendalian Filariasis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%. Pada tahun 2024 jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% sebanyak 206 kabupaten/kota dan belum memenuhi target indikator yaitu 30 kabupaten/kota endemis.

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase kabupaten/kota endemis filaria yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% sebesar 87,3%. Terdapat 21 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya mencapai 100%. Provinsi Papua Pegunungan belum ada kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1%.

Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dilaksanakan setahun sekali selama lima tahun berturut-turut dengan cakupan minimal 65%. Seluruh kabupaten/kota endemis Filariasis telah memulai tahapan POPM filariasis dengan waktu yang berbeda-beda. Pada tahun 2024 sebanyak 22 (9,3%) kabupaten/kota endemis masih melaksanakan POPM Filariasis. Sedangkan sisanya yaitu 214 kabupaten/kota endemis telah menyelesaikan putaran POPM filariasis selama 5 tahun dan memasuki masa surveilans eliminasi dan pasca eliminasi.

GAMBAR 6.50
CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA
TAHUN 2015 - 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan Filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Selama periode tahun 2015 sampai 2019 tren cakupan penduduk minum obat Filariasis di kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis cenderung meningkat. Namun tahun 2019-2024 cenderung menurun menjadi 44,16% pada tahun 2024. Dari 22 kabupaten/kota endemis filariasis yang masih melaksanakan POPM, sebanyak 17 kabupaten/kota diantaranya berada di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kondisi geografis serta faktor keamanan menjadi penyebab menurunnya cakupan POPM filariasis pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 sebanyak 7 kabupaten/kota melaksanakan POPM Filariasis menggunakan obat Diethylcarbamazine (DEC) dan Albendazole (DA) dan sebanyak 10 kabupaten/kota menggunakan tiga macam kombinasi obat yaitu kombinasi DEC, Albendazole dan Ivermectine (IDA). Terdapat 4 kabupaten yang tidak melaporkan data cakupan POPM filariasis tahun 2024, yaitu 2 kabupaten di Papua Pegunungan, 1 kabupaten di Papua Tengah, dan 1 kabupaten di Papua Barat Daya.

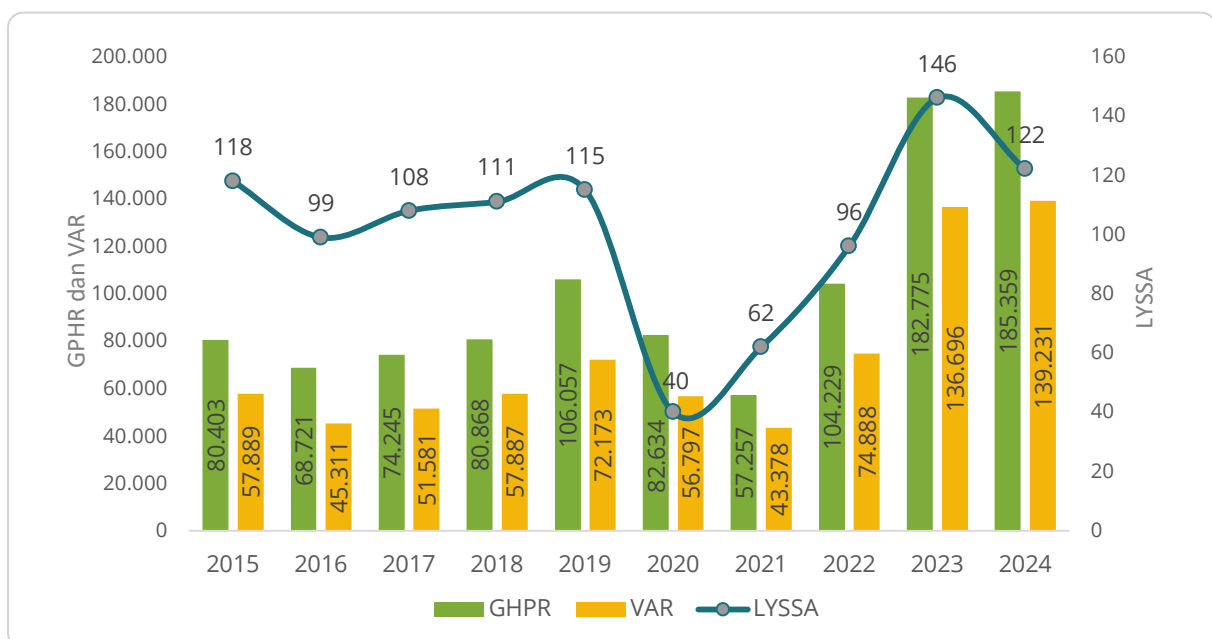
6. Rabies

Rabies merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus dari golongan *Rhabdovirus*. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala. Selain bagi manusia, rabies dapat menyebabkan kesakitan dan kematian bagi hewan penular tersebut.

Permasalahan Rabies dapat diketahui melalui kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR), dan kasus kematian (LYSSA). Kasus GHPR yang dilaporkan diarahkan untuk mendapatkan VAR. Kasus GHPR yang mengalami kematian dan ditemukan adanya sero positif pada hewan penularnya menjadi landasan penentuan daerah rabies.

Sampai dengan tahun 2024 terdapat 12 provinsi yang telah dinyatakan sebagai wilayah bebas Rabies, yaitu yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

GAMBAR 6.51
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2015 – 2024

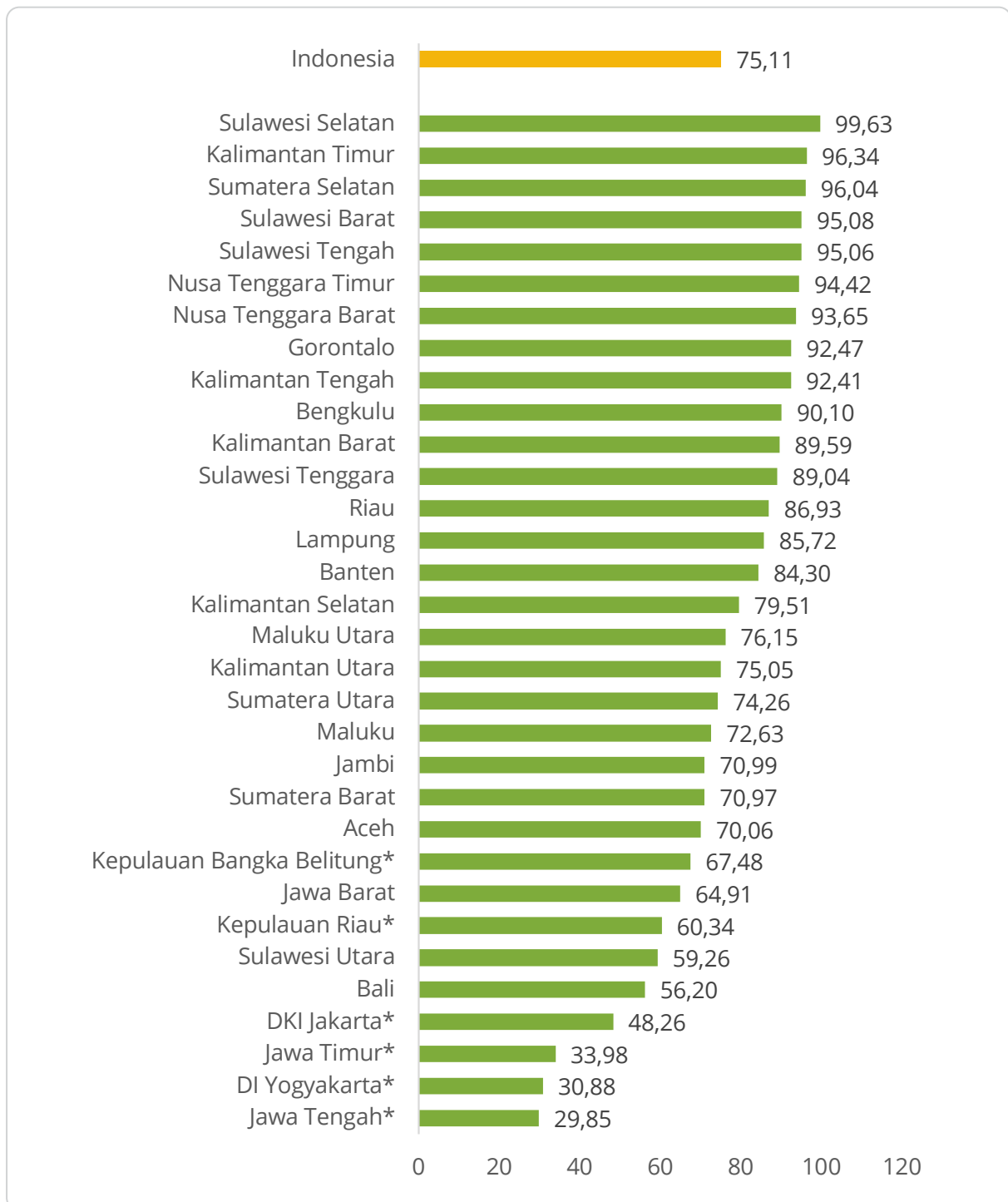


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan grafik kecenderungan GHPR, VAR dan LYSSA yang disajikan di atas, kasus GHPR tertinggi dilaporkan pada tahun 2024 sebesar 185.359 kasus. Kasus GHPR pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus VAR yang dilaporkan pada tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 136.696 menjadi 139.231 kasus. Namun kasus kematian (LYSSA) mengalami penurunan dari 146 menjadi 122 kasus.

Pada tahun 2024 kasus GHPR paling banyak dilaporkan oleh Provinsi Bali sebesar 57.943 kasus, Nusa Tenggara Timur sebesar 30.267 kasus, dan Sumatera Utara sebesar 11.377 kasus. Kasus GHPR harus segera mendapatkan tatalaksana, di antaranya dengan pemberian VAR. Berikut ini disajikan persentase pemberian VAR terhadap kasus GHPR.

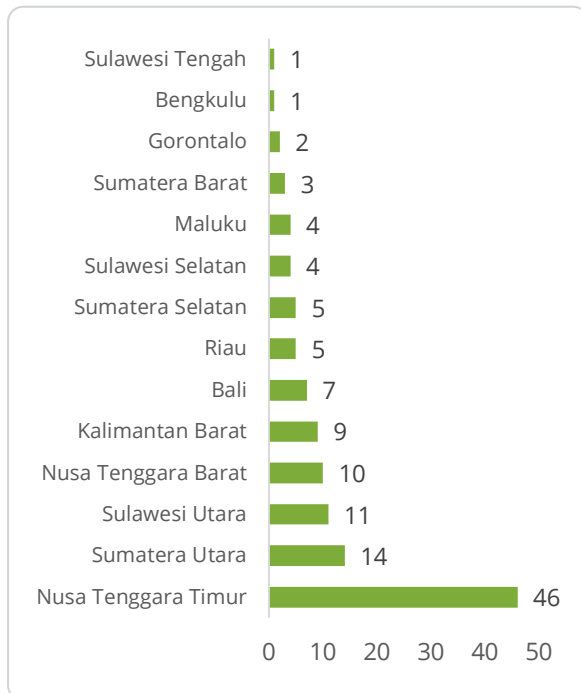
GAMBAR 6.52
PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR
DI INDONESIA TAHUN 2024



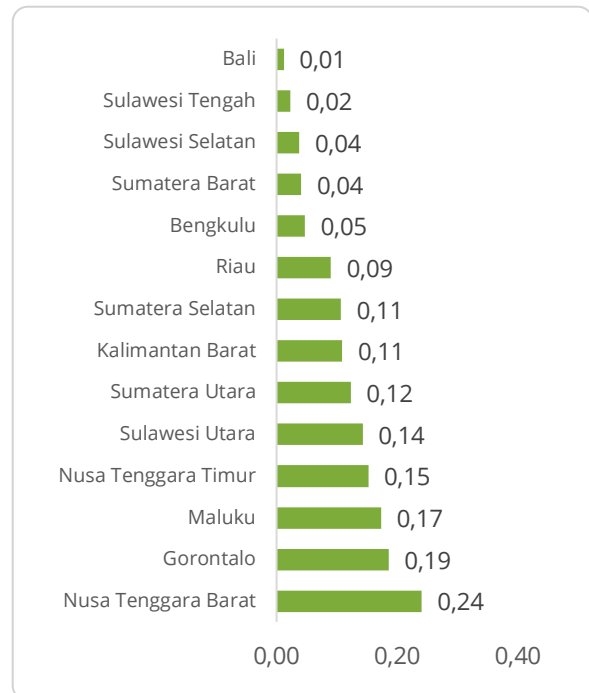
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Capaian pemberian VAR tertinggi yaitu Sulawesi Selatan sebesar 99,63% dan capaian pemberian VAR terendah di Jawa Tengah sebesar 29,85%. Provinsi Bali, NTT dan Sumatera Utara yang melaporkan kasus GHPR tertinggi masing-masing memiliki persentase 56,2%, 94,42% dan 74,26%. Dengan tingginya kasus GHPR, seharusnya diperlukan capaian pemberian VAR yang tinggi. Penatalaksanaan kasus yang efektif dan pemberian VAR dapat mencegah kematian karena Rabies.

GAMBAR 6.53
JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA)
DI INDONESIA TAHUN 2024



GAMBAR 6.54
PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES TERHADAP
KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

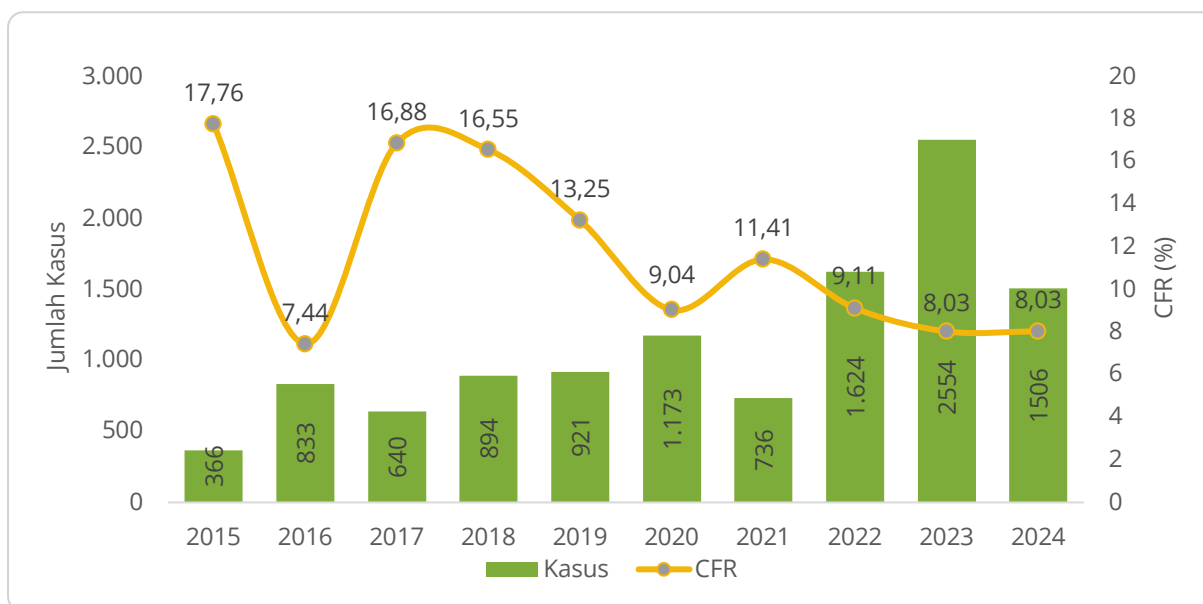
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara melaporkan kasus kematian akibat rabies lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Jika dilihat berdasarkan proporsi kematian akibat rabies terhadap kasus GHPR, proporsi tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku dengan masing-masing persentase sebesar 0,24%, 0,19% dan 0,17%. Apabila dibandingkan dengan persentase VAR terhadap kasus GHPR, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo memiliki persentase di atas 90%. Kematian akibat rabies diakibatkan keterlambatan penatalaksanaan kasus dan pemberian VAR.

7. Leptospirosis

Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri *Leptospira sp.* Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung antara manusia dengan urine hewan yang telah terinfeksi bakteri *Leptospira*. Tingginya biaya pemeriksaan laboratorium dan metode diagnosis menyebabkan tidak semua kasus dapat dilaporkan.

Pada tahun 2024 ditemukan adanya 1.506 kasus Leptospirosis di Indonesia yang dilaporkan oleh enam belas provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Maluku, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Gorontalo, dan Kalimantan Barat. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan tersebut, terdapat 121 kasus meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 8,03%.

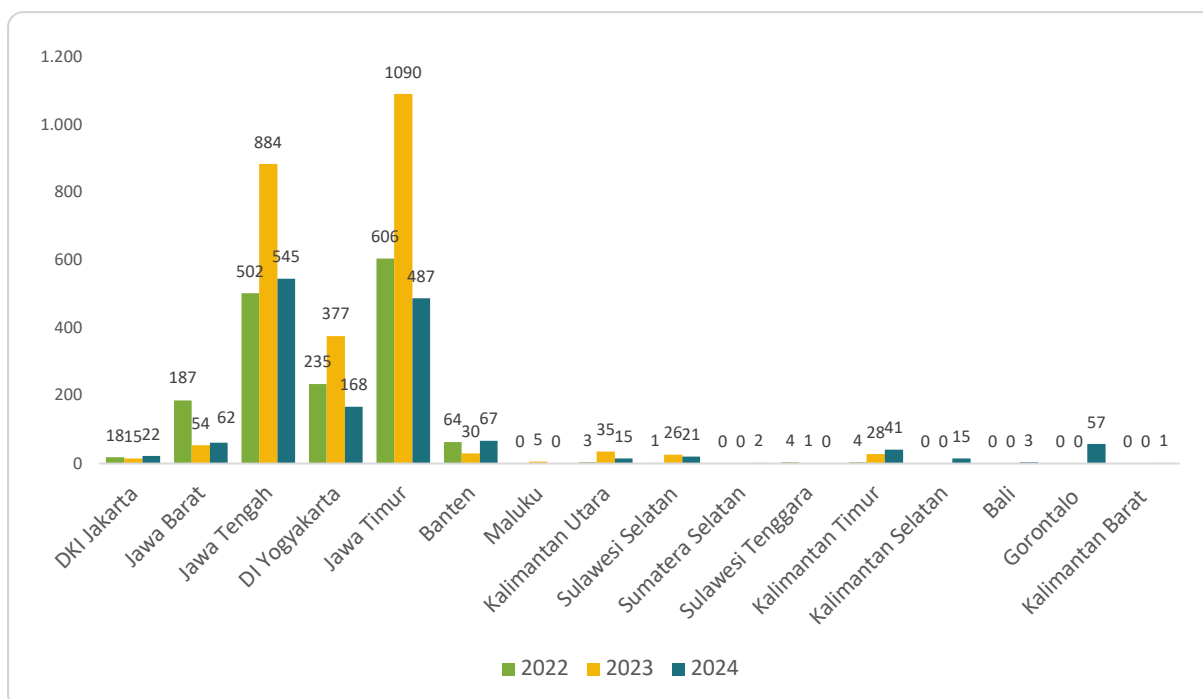
GAMBAR 6.55
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2015 – 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Kasus Leptospirosis tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari 2.554 kasus menjadi 1.506 kasus. Sedangkan CFR menurun sedikit dari 8,06 % menjadi 8,03%. Hal ini dapat disebabkan karena kecepatan dalam mendeteksi dini dan merespon kasus yang ditemukan.

GAMBAR 6.56
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2022 – 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Timur melaporkan peningkatan kasus. Penurunan kasus signifikan terjadi di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo pada tahun 2022 dan 2023 tidak ditemukan kasus Leptospirosis tetapi pada tahun 2024 melaporkan adanya kasus leptospirosis.

Kasus dan kematian akibat Leptospirosis memerlukan upaya pengendalian yang selama ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan NSPK Pengendalian Leptospirosis,
2. Penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik melalui pelatihan, sosialisasi, orientasi dan *workshop*,
4. Penguatan surveilans zoonosis berbasis laboratorium seperti Surveilans Sentinel Leptospirosis di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
5. Penguatan surveilans leptospirosis terpadu lintas sektor Kabupten Demak Provinsi Jawa Tengah
6. Penguatan tata laksana sesuai standar dan prosedur,
7. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB,
8. Pengendalian faktor risiko secara terpadu yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor meliputi sektor kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar,
9. Penyediaan logistik (*Rapid Diagnostik Test*).

D. SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING

1. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons

Sebagai upaya pencegahan dan deteksi awal penyakit terutama yang berpotensi menjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB), Kementerian Kesehatan membentuk Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR)/*Early Warning Alert Response and System* (EWARS). SKDR merupakan sistem yang berfungsi untuk mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan secara mingguan yang berbasis pelaporan elektronik. SKDR dapat menampilkan *alert* atau sinyal peringatan dini jika ada peningkatan kasus penyakit yang melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah. Sinyal peringatan dini yang muncul pada sistem adalah notifikasi pra KLB yang akan mendorong petugas untuk melakukan respon cepat agar tidak terjadi KLB.

Tujuan penyelenggaraan SKDR adalah:

1. Menyelenggarakan deteksi dini penyakit menular berpotensi KLB
2. Memberikan input kepada program dan sektor terkait untuk melakukan respon pengendalian penyakit menular berpotensi KLB
3. Meminimalkan kesakitan dan atau kematian akibat penyakit menular berpotensi KLB.
4. Memonitor kecenderungan atau tren penyakit menular berpotensi KLB.
5. Menilai dampak program pencegahan dan pengendalian penyakit menular berpotensi KLB

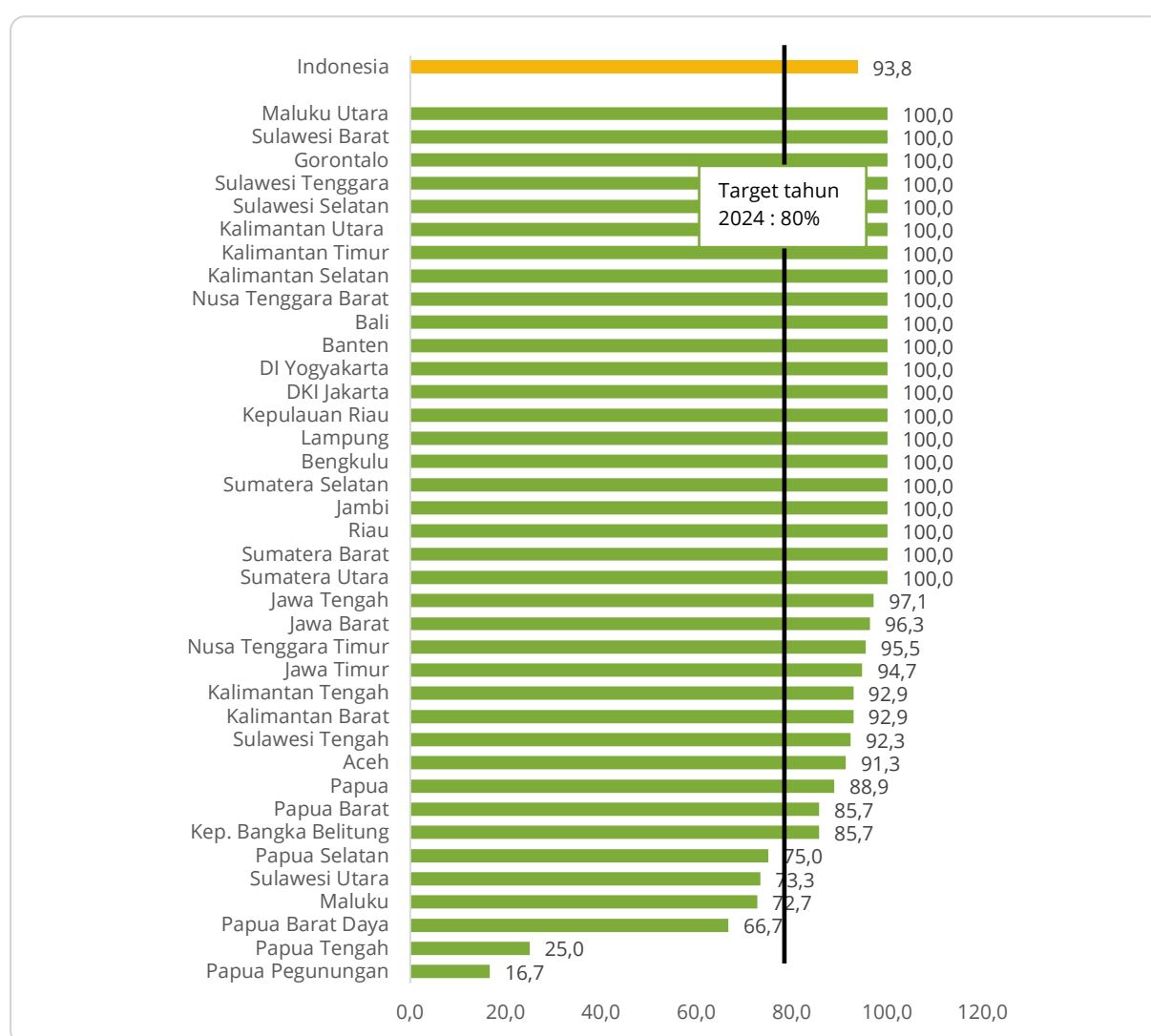
Pelaksanaan SKDR dilakukan secara rutin dan berjenjang mulai dari fasilitas Kesehatan hingga ke pusat. Sasaran populasi dalam penyelenggaraan SKDR adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, Rumah Sakit, dan Laboratorium. Populasi juga dapat berdasarkan wilayah

administrasi mulai dari wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Populasi digunakan untuk membandingkan besaran masalah (jumlah kasus per jumlah populasi dikali konstanta) dari penyakit potensial KLB dalam SKDR antar wilayah.

Pada tahun 2024, secara nasional kelengkapan laporan SKDR sebesar 94,46%, dengan ketepatan laporan 88%. Jumlah *alert* yang muncul sebanyak 249.955 *alert*, jumlah *alert* yang telah diverifikasi atau direspons sebanyak 240.822 *alert* (96,34%), dan jumlah *alert* yang diverifikasi/respons dalam 24 jam sebanyak 213.584 (85,44%).

Indikator terkait kewaspadaan dini dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan adalah kabupaten/kota melakukan respon minimal 80% terhadap sinyal kewaspadaan (*alert system*) yang muncul. Secara nasional, 93,8% kabupaten/kota sudah melakukan respon minimal 80% terhadap sinyal kewaspadaan pada tahun 2024. Angka ini sudah mencapai target tahun 2024 yaitu 80%. Sebanyak 32 provinsi sudah melebihi target. Provinsi yang belum mencapai target 80% yaitu Papua Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

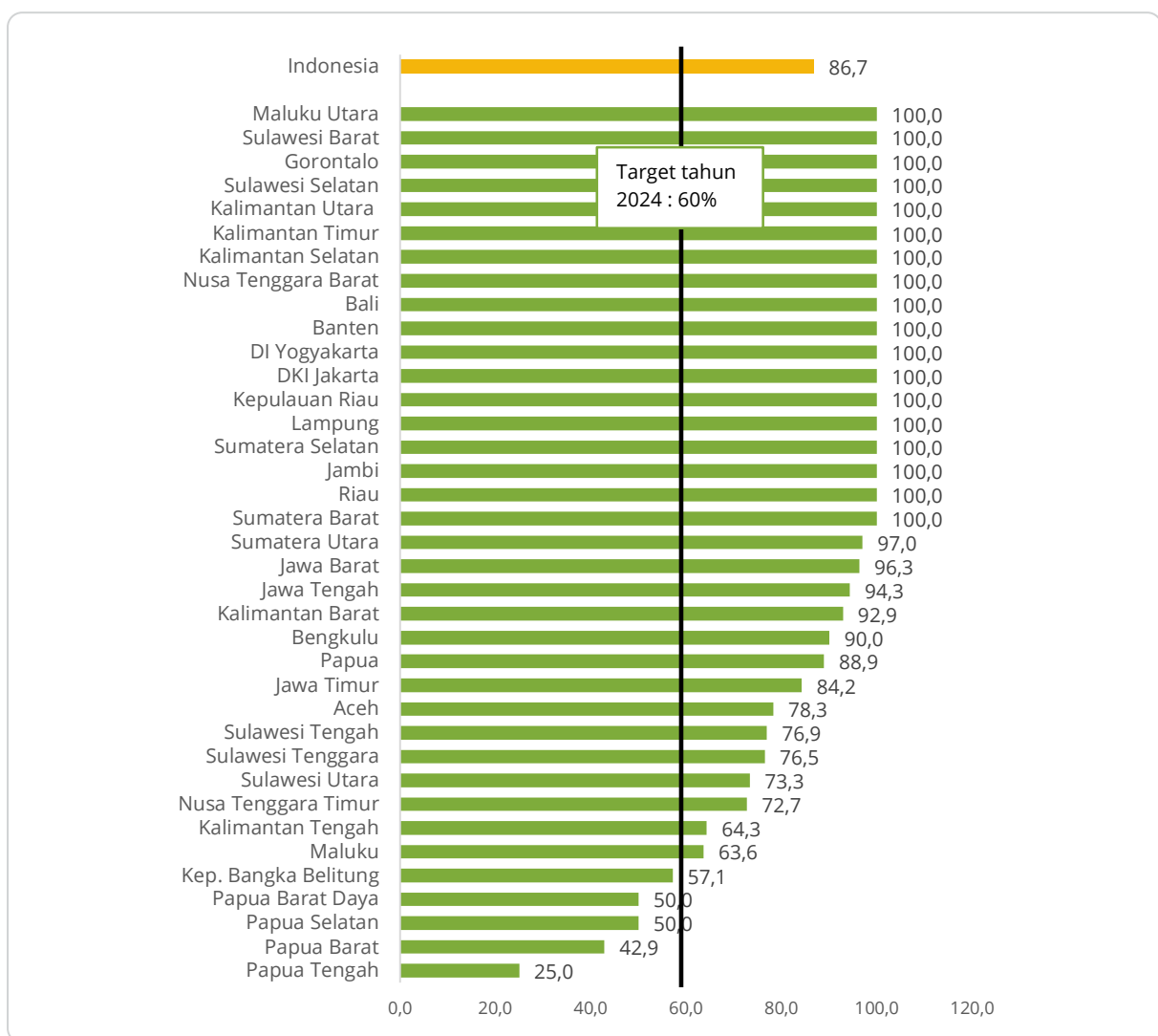
GAMBAR 6.57
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON MINIMAL 80% TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Dalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, target indikator tahun 2024 adalah 60% Kabupaten/Kota melakukan respon verifikasi sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu < 24 jam minimal 50%. Secara nasional, 86,7% kabupaten/kota sudah melakukan respon verifikasi sinyal yang muncul di SKDR < 24 jam minimal 50% dari sinyal kewaspadaan yang muncul di SKDR. Angka ini sudah melampaui target tahun 2024 yaitu 60%. Sebanyak 32 provinsi sudah mencapai target. Provinsi yang belum mencapai target adalah Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Belum ada kabupaten/kota di Papua Pegunungan yang sudah melakukan respon verifikasi sinyal yang muncul di SKDR < 24 jam (0%).

GAMBAR 6.58
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON <24 JAM MINIMAL 50%
TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

2. Situasi Penyakit Infeksi Emerging

Penyakit infeksi emerging merupakan penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia yang berasal dari virus, bakteri, atau parasit. Sebagian besar penyakit infeksi emerging ditularkan ke manusia dari hewan (penyakit zoonosa). Penyakit infeksi emerging dapat berupa penyakit menular baru (*new emerging infectious disease*) penyakit infeksi yang muncul dan menyerang suatu populasi manusia untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun kasusnya meningkat dengan sangat cepat atau menyebar meluas ke daerah geografis baru. Selain itu dapat berupa penyakit menular lama muncul kembali (*reemerging infectious diseases*) yaitu penyakit infeksi di suatu daerah yang kasusnya sudah sangat menurun atau terkontrol, tapi kemudian meningkat lagi kejadiannya, dan seringkali dalam bentuk klinis lebih berat atau fatal.

Penyakit infeksi emerging menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB)/wabah/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/pandemi. Dampak adanya kejadian ini berdampak multisektor, tidak hanya menyebabkan tingkat kesakitan dan kematian tinggi, namun berdampak ekonomi dan sosial. Hal ini sudah dialami dunia ketika COVID 19 melanda dan ditetapkan sebagai pandemi pada tahun 2020.

Indonesia merupakan hotspot penyakit infeksi emerging mengingat berbagai faktor risiko telah ditemukan di Indonesia seperti alih fungsi lahan, tingginya mobilitas penduduk, banyaknya pintu masuk antar negara, dan keberadaan vektor dan reservoir telah dilaporkan. Sementara itu keberadaan penyakit infeksi emerging pada manusia masih belum banyak diketahui. Oleh karena itu diperlukan kesiapsiagaan penyakit infeksi emerging di Indonesia baik melalui pengamatan situasi maupun pemetaan risiko.

Berbagai penyakit infeksi emerging telah dilaporkan pada tahun 2024 diantaranya COVID 19, Mpox, Legionellosis, dan Polio. Pada Juni 2023 Presiden Indonesia telah menetapkan berakhirnya status pandemi dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi penyakit endemi. Status endemi ini bukan berarti COVID-19 telah hilang, melainkan berada dalam situasi yang terkendali, masih ada kemungkinan munculnya varian/subvarian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus atau kematian. Total kasus COVID-19 di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 6.831.125 kasus konfirmasi dan 148.049 kematian yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Pada tahun 2024, Indonesia melaporkan sebanyak 8.624 kasus konfirmasi dan 93 kematian. Lima provinsi yang melaporkan kasus konfirmasi terbanyak pada tahun 2024 di antaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta.

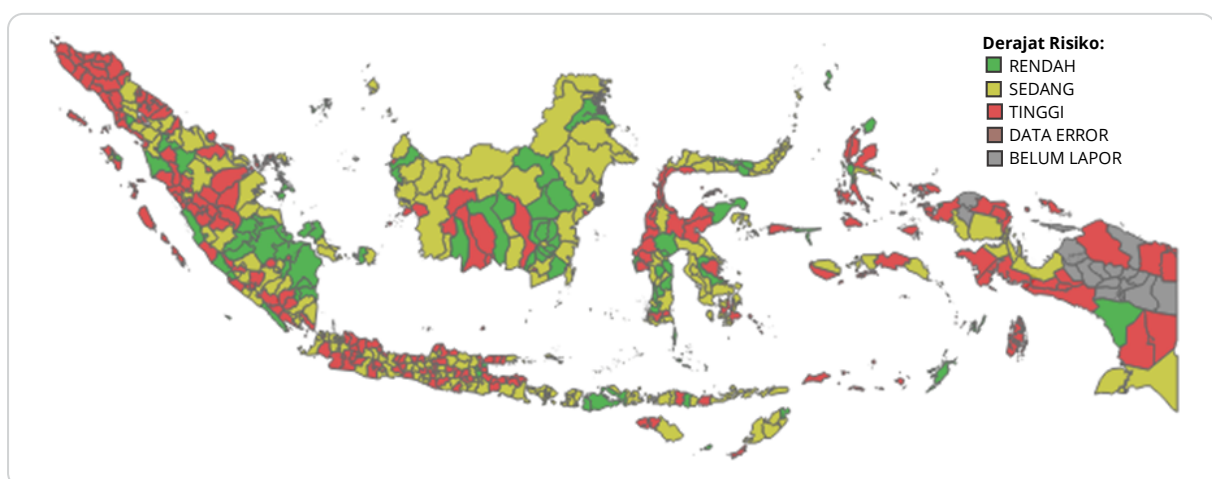
Indonesia melaporkan kasus Mpox (*Monkeypox*) pertama pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2023 terkonfirmasi sebanyak 74 kasus. Pada tahun 2024 kasus mpox yang dilaporkan sebanyak 14 kasus yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta (8 kasus), Banten (2 kasus) DI Yogyakarta (2 kasus), Jawa Barat (1 kasus), Jawa Timur (1 kasus). Berdasarkan persebaran karakteristik kasus mpox pada tahun 2024, sebagian besar kasus berjenis kelamin laki-laki (86% atau 12 kasus), berada pada kelompok usia 30-39 tahun (50% atau 7 kasus), memiliki orientasi seksual lelaki seks lelaki/LSL (50% atau 7 kasus), dan memiliki kondisi penyerta HIV (57% atau 8 kasus). Total kasus kumulatif Mpox sejak tahun 2022 hingga 31 Desember 2024 sebanyak 88 kasus.

Suspek Legionellosis pada tahun 2024 dilaporkan sebanyak 126 suspek dengan 75 kasus suspek di Jawa Barat, 41 kasus suspek di Bali, 6 kasus suspek di Kep. Riau, 3 kasus suspek di

DKI Jakarta, dan 1 kasus suspek di Banten melalui pelaksanaan surveilans sentinel. Pada tahun 2024 dilaporkan total 16 kasus konfirmasi Legionellosis di Indonesia yang berasal dari Jawa Barat (10 kasus konfirmasi), Kepulauan Riau (4 kasus konfirmasi), dan Bali (2 kasus konfirmasi). Berdasarkan persebaran karakteristik kasus Legionellosis pada tahun 2024, sebagian besar kasus berjenis kelamin laki-laki (56% atau 9 kasus) dan pada kelompok usia 19-59 tahun (38% atau 6 kasus). Seluruh kasus Legionellosis pada tahun 2024 memiliki riwayat kontak dengan air yang kemungkinan terkontaminasi bakteri *Legionella pneumophilla*.

Indonesia terakhir melaporkan tambahan 1 kasus polio tipe cVDPV2-n di Halmahera Selatan, Maluku Utara dengan onset 15 Mei 2024. Total kasus Polio di Indonesia tahun 2024 sebanyak 7 kasus cVDPV2 yang berasal dari Papua Pegunungan (1 kasus), Papua Selatan (3 kasus), Papua Tengah (1 kasus), Banten (1 kasus), dan Maluku Utara (1 kasus). Selain itu, ditemukan cVDPV2 pada 14 anak sehat yang terdiri dari 3 anak di Papua Pegunungan, 8 anak di Papua Tengah, 1 anak di Banten, dan 2 anak di Papua Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan risiko penyakit Polio pada tahun 2024 di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 195 Kabupaten/Kota dengan risiko tinggi (39,16%), 226 kabupaten/kota dengan risiko sedang (45,38%), dan 77 kabupaten/kota dengan risiko rendah (15,46%). Informasi lebih lanjut dapat diakses pada <https://petarisikopie.id>

GAMBAR 6.59
HASIL PEMETAAN RISIKO PENYAKIT POLIO MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

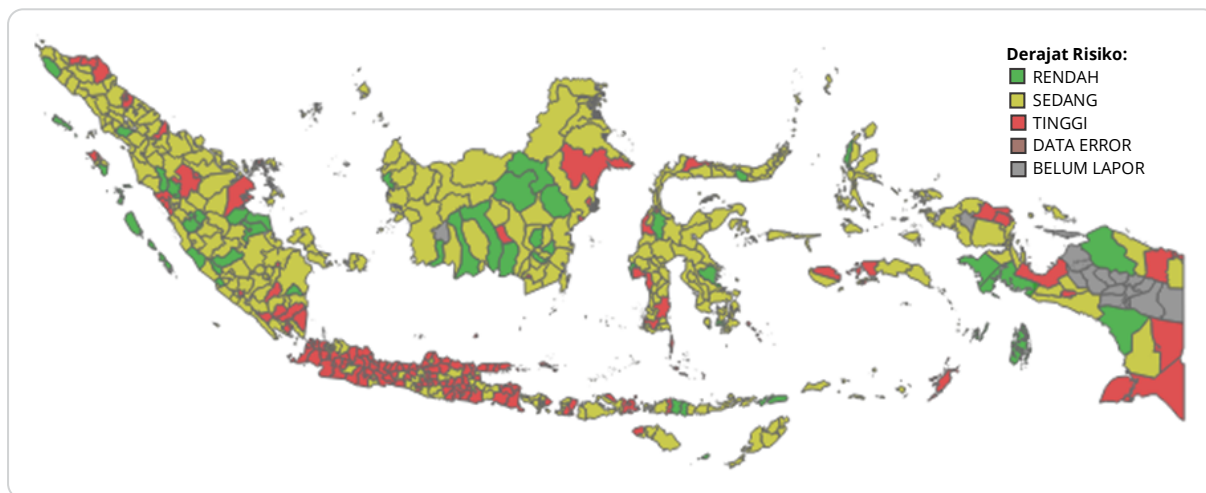
Penyakit infeksi emerging yang pernah melanda Indonesia tetapi tidak ada pelaporan hingga tahun 2024 adalah Avian Influenza (H5N1) dan penyakit virus West Nile. Indonesia pernah melaporkan kasus Avian Influenza (H5N1) pada tahun 2005-2017 dengan total 200 kasus dengan 168 kematian (CFR: 84%). Sejak tahun 2018 belum ada pelaporan kasus baru pada manusia.

Berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan oleh Myint, et al (2014), kasus konfirmasi penyakit virus West Nile pernah dilaporkan di Jawa Barat, Indonesia pada tahun 2004. Namun, hingga saat ini, belum ada pelaporan kasus penyakit virus West Nile secara resmi.

Penyakit infeksi emerging yang saat ini ada di dunia tetap belum ada pelaporan kasus di Indonesia diantaranya Avian Influenza (H5N6 dan H9N2), MERS-CoV, meningitis meningokokus, penyakit virus Nipah, demam Lassa, penyakit virus Ebola, dan penyakit virus Marburg. Berdasarkan hasil pemetaan risiko penyakit MERS pada tahun 2024 di seluruh kabupaten/kota di Indonesia,

terdapat 138 Kabupaten/Kota dengan risiko tinggi (27,7%), 317 kabupaten/kota dengan risiko sedang (63,5%), dan 44 kabupaten/kota dengan risiko rendah (8,8%). Informasi lebih lanjut dapat diakses pada <https://petarisikopie.id>

GAMBAR 6.60
HASIL PEMETAAN RISIKO PENYAKIT MERS MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

E. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi telah menjadi bagian dari beban ganda epidemiologi di dunia sejak beberapa dekade terakhir. Berbeda dengan penyakit menular, penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Badan kesehatan dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya terhadap 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang mengacu pada klasifikasi internasional penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) mengelompokkan penyakit ini berdasarkan sistem dan organ tubuh menjadi 12 jenis penyakit yaitu:

1. Penyakit keganasan;
2. Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
3. Penyakit sistem saraf;
4. Penyakit sistem pernapasan;
5. Penyakit sistem sirkulasi;
6. Penyakit mata dan adnexa;
7. Penyakit telinga dan mastoid;
8. Penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
9. Penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
10. Penyakit sistem genitourinaria;
11. Penyakit gangguan mental dan perilaku;
12. Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.

Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat. Kemunculan COVID-19 sebagai *new-emerging disease* telah menyadarkan banyak pihak terhadap pentingnya pengendalian penyakit tidak menular, karena penyakit ini merupakan salah satu komorbid yang berperan dalam meningkatkan keparahan COVID-19.

Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah.

Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus yang menitikberatkan pada faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Upaya pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di $\geq 80\%$ Puskesmas

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian PTM di tingkat nasional, sejalan dengan pendekatan global dan regional. Salah satu program yang telah dan masih terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini sebagai upaya dalam mendukung pencapaian target SPM dan pencapaian target indikator Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, yaitu meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM.

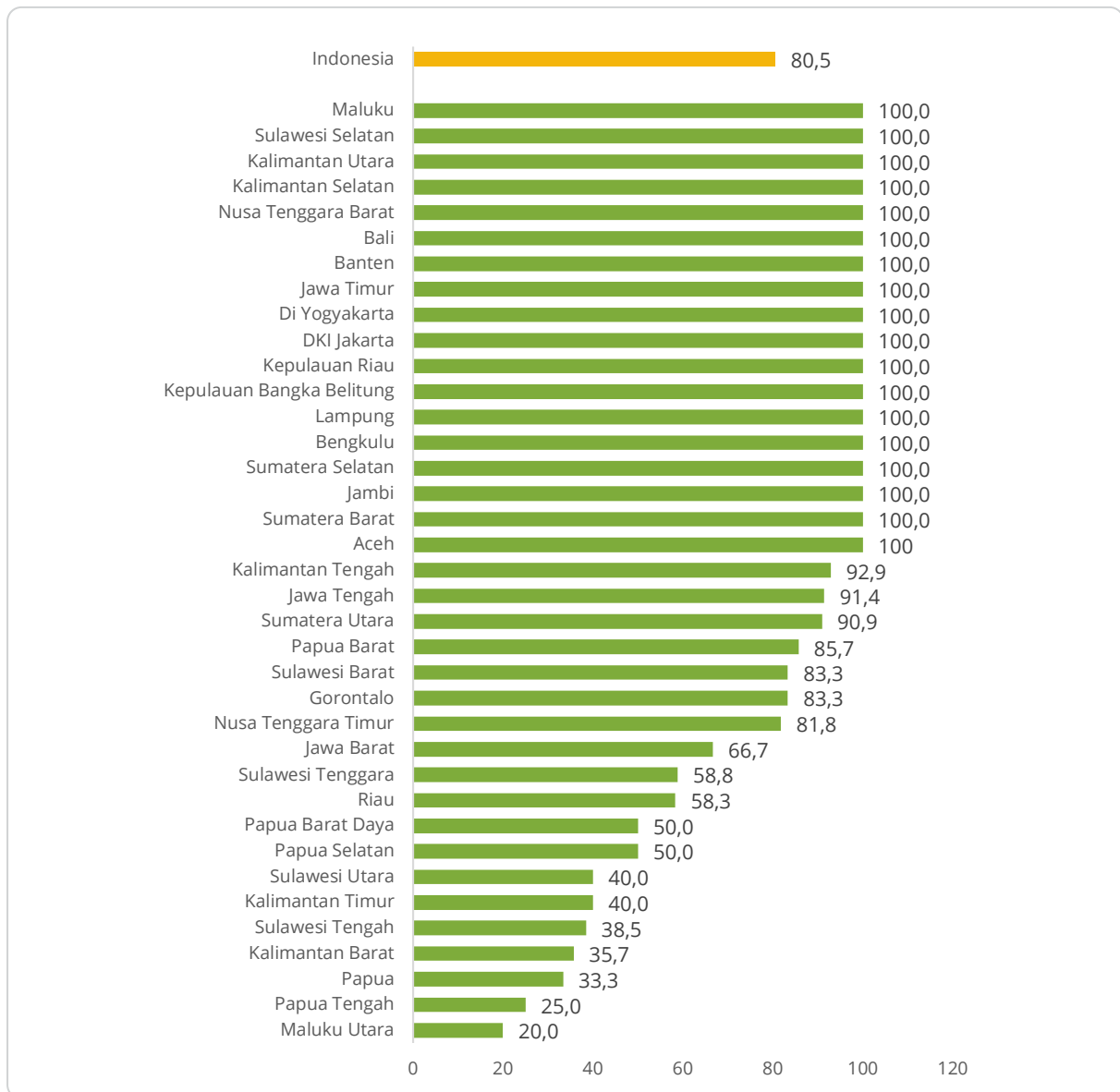
PANDU PTM di FKTP merupakan upaya pencegahan, pengendalian dan tatalaksana hipertensi dan diabetes melitus serta PTM lainnya yang dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan faktor risiko, menggunakan algoritma PANDU PTM dan tabel prediksi risiko PTM. Algoritma PANDU PTM merupakan alur pikir dalam melakukan pelayanan terpadu PTM di FKTP. Dalam algoritma dijelaskan tentang tahapan pelayanan bagi pengunjung Puskesmas yang berusia 15 tahun keatas. Tahapan diawali dari identifikasi faktor risiko hingga diagnosis dan tata laksana yang dalam salah satu prosesnya menggunakan tabel prediksi risiko PTM. Sedangkan dalam kaitan dengan tatalaksana penyakit yang bersifat spesifik, PANDU PTM tetap mengacu pada pedoman tata laksana penyakit yang berlaku.

Untuk memperkuat pelaksanaan PANDU PTM di daerah, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang melakukan PANDU PTM di $\geq 80\%$ Puskesmas. Puskesmas PANDU PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila 80% atau lebih Puskesmas telah melakukan PANDU PTM.

Pada tahun 2024, sebanyak 414 kabupaten/kota atau 80,5% dari 514 total kabupaten/kota yang menjadi target indikator melakukan pelayanan terpadu PTM di $\geq 80\%$ Puskesmas. Terdapat 25 provinsi dari 38 provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan jumlah Puskesmas menerapkan

PANDU PTM >80%, dan sebanyak 18 provinsi memiliki capaian melebihi 100% dari target kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Dua belas provinsi lainnya dengan capaian <80% dan Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki kabupaten/kota dengan jumlah Puskesmas menerapkan PANDU PTM >80% dikarenakan belum ada laporan yang dikirimkan melalui Direktorat P2PTM.

GAMBAR 6.61
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM
DI ≥80% PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

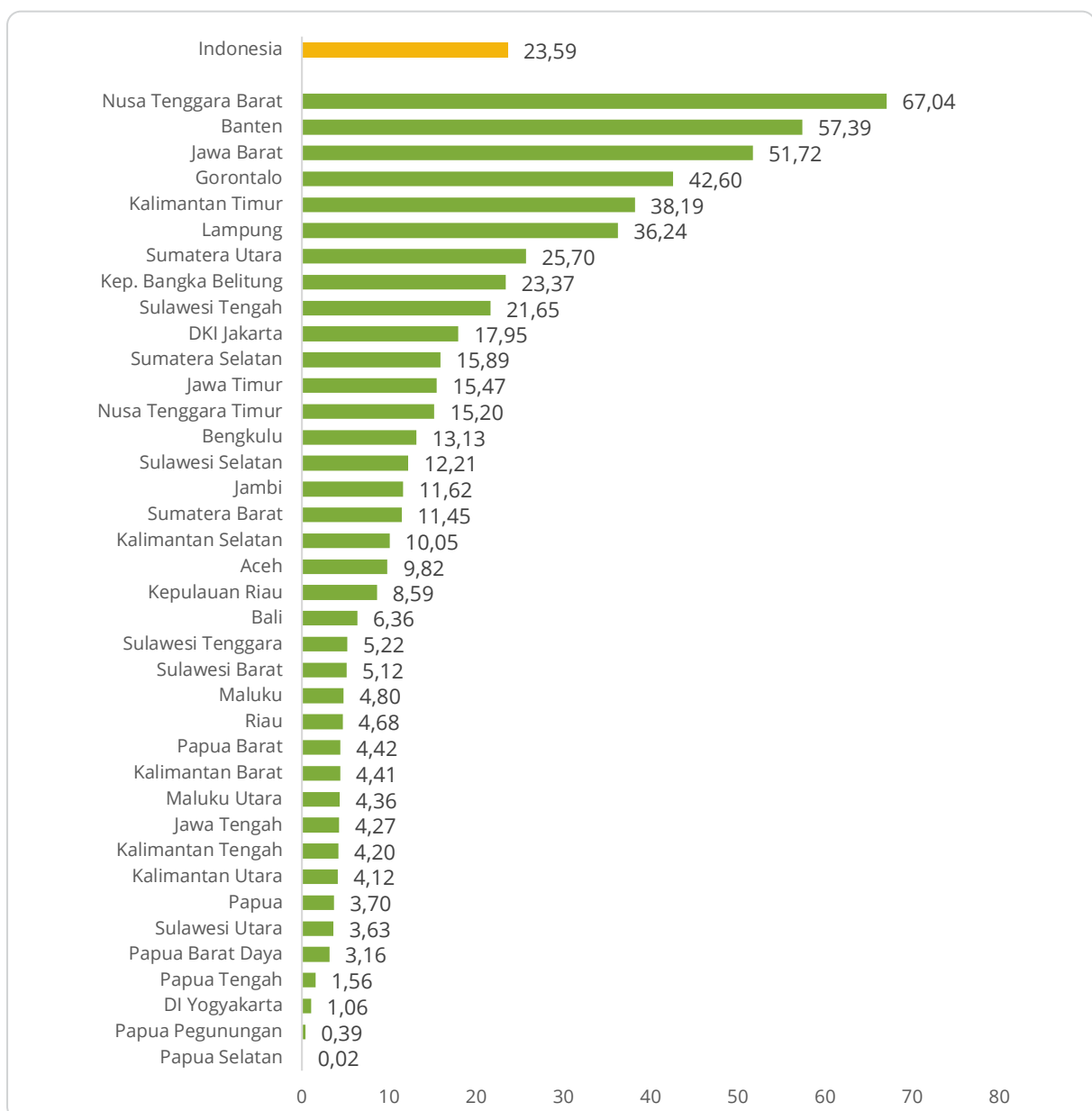
2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker terbanyak di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan oleh terlambatnya diagnosis dan tatalaksana. Hampir 70% pasien kanker dideteksi pada stadium lanjut. Hal ini sangat disayangkan, bila kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum terjadinya kanker

(lesi prakanker) dan dapat diterapi sehingga tidak menjadi kanker. Kanker payudara bisa dicegah dengan tindakan yang sederhana dan efektif yaitu Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS), bila ditemukan benjolan pada payudara segera diterapi sebelum berkembang menjadi kanker stadium lanjut. Oleh karena itu, deteksi dini merupakan hal yang penting dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, meningkatkan kesintasan dan mengurangi beban pembiayaan akibat penyakit kanker.

Program deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia dilakukan dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan metode SADANIS di FKTP, yaitu pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk di RS atau FKTRL dilakukan dengan menggunakan Ultrasonografi (USG) atau mammografi.

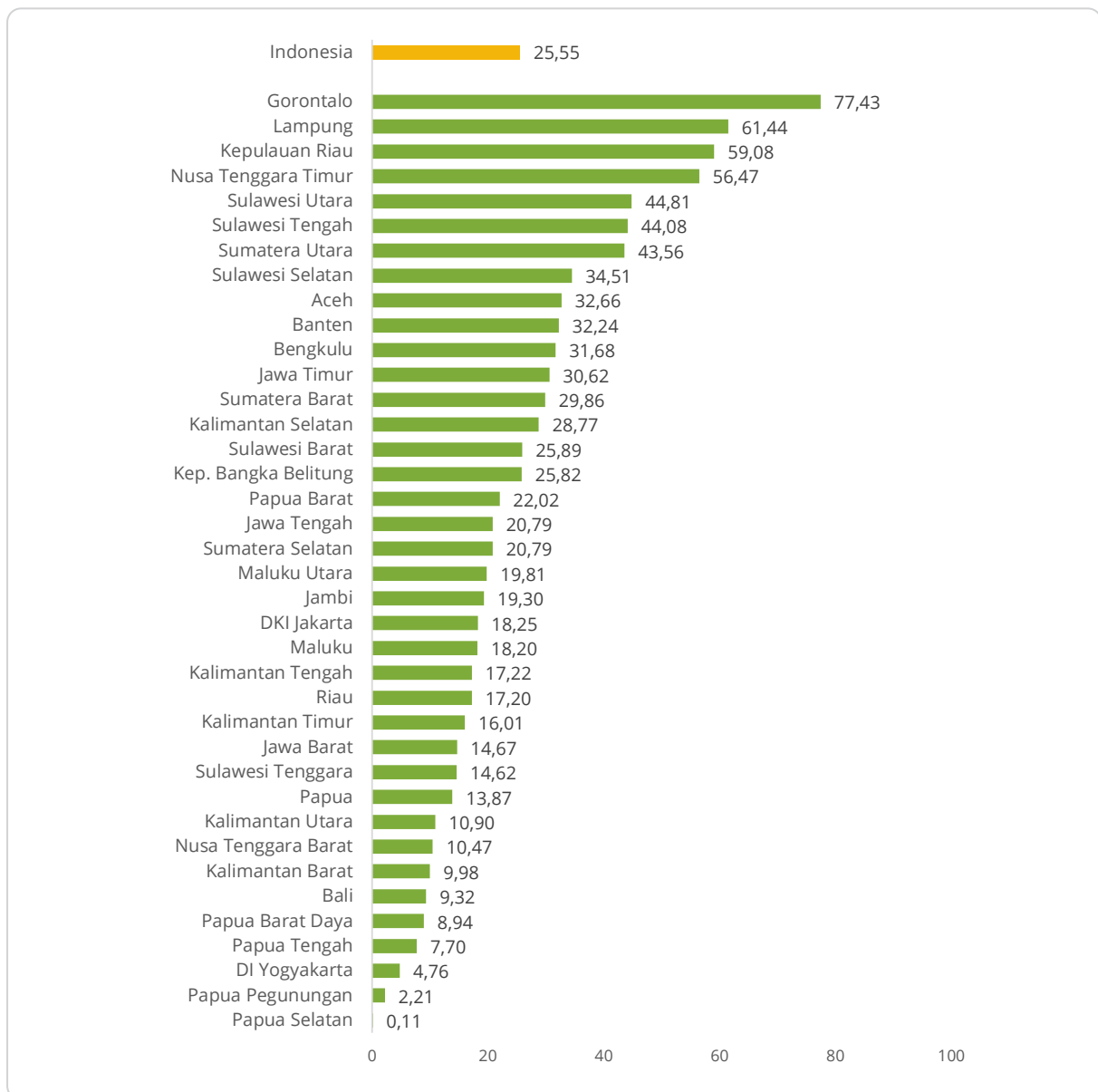
GAMBAR 6.62
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA)
DI INDONESIA TAHUN 2022-2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada kurun waktu 2022-2024, sebanyak 10.009.516 perempuan usia 30-50 tahun atau 23,59% dari sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. Deteksi dini tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 67,04%, diikuti oleh Banten sebesar 57,39%, dan Jawa Barat sebesar 51,72%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua Selatan (0,02%) dan Papua Pegunungan (0,39%).

GAMBAR 6.63
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS)
DI INDONESIA TAHUN 2022-2024

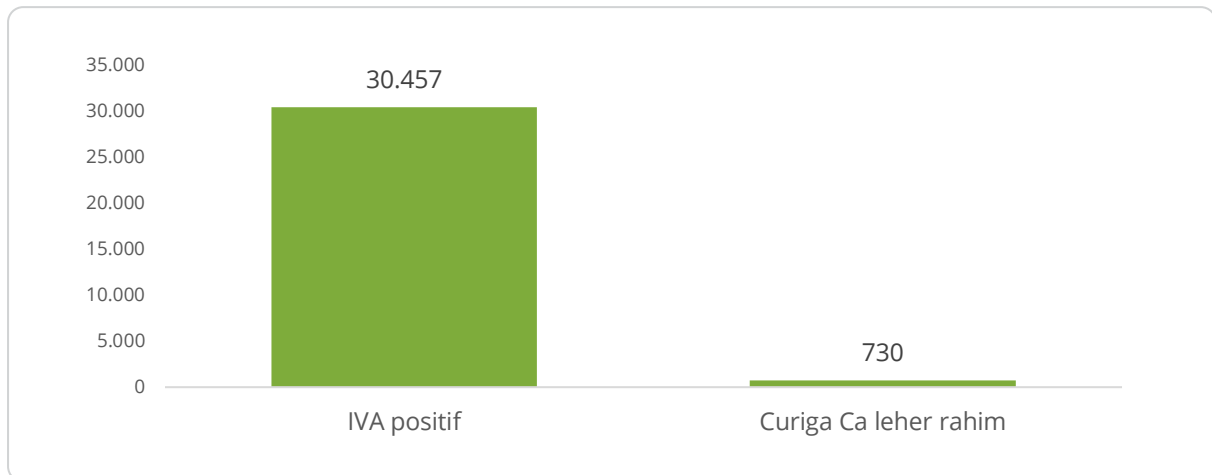


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada kurun waktu 2022-2024, sebanyak 10.840.839 perempuan usia 30-50 tahun atau 25,55% dari sasaran telah melakukan deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan SADANIS. SADANIS tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Gorontalo sebesar 77,43%, diikuti oleh Lampung sebesar 61,44%, dan Kepulauan Riau sebesar 59,08%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua Selatan (0,11%) dan Papua Pegunungan (2,21%).

Provinsi dengan cakupan deteksi dini yang rendah dikhawatirkan akan mengalami peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim dan payudara. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan deteksi dini di wilayah dengan cakupan yang masih rendah.

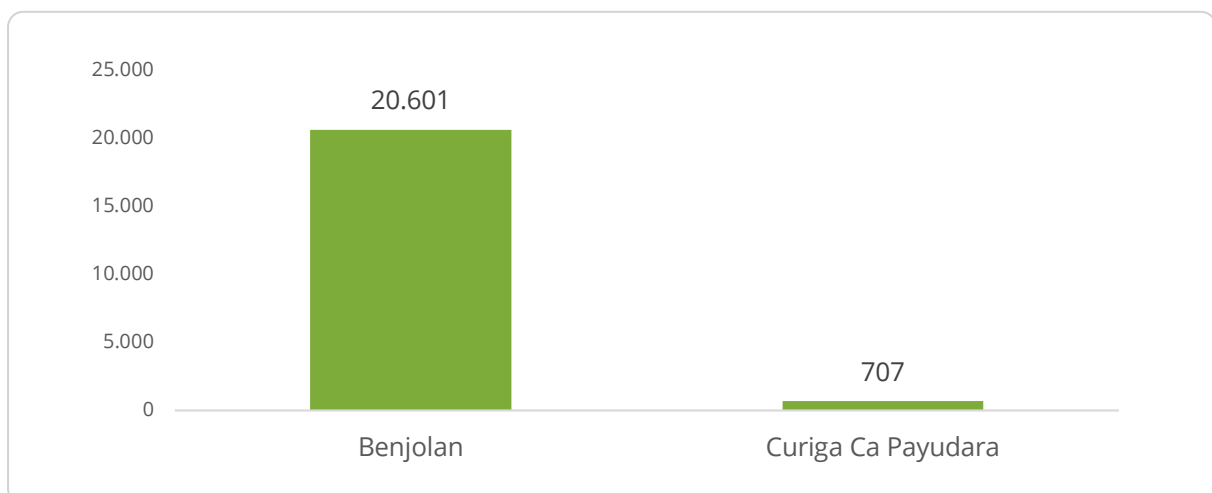
GAMBAR 6.64
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, hasil pemeriksaan IVA positif sebanyak 30.457 (0,63%) dan yang dicurigai kanker leher rahim sebanyak 730 (0,02%) dari 4.809.389 perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksi dini kanker leher rahim.

GAMBAR 6.65
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

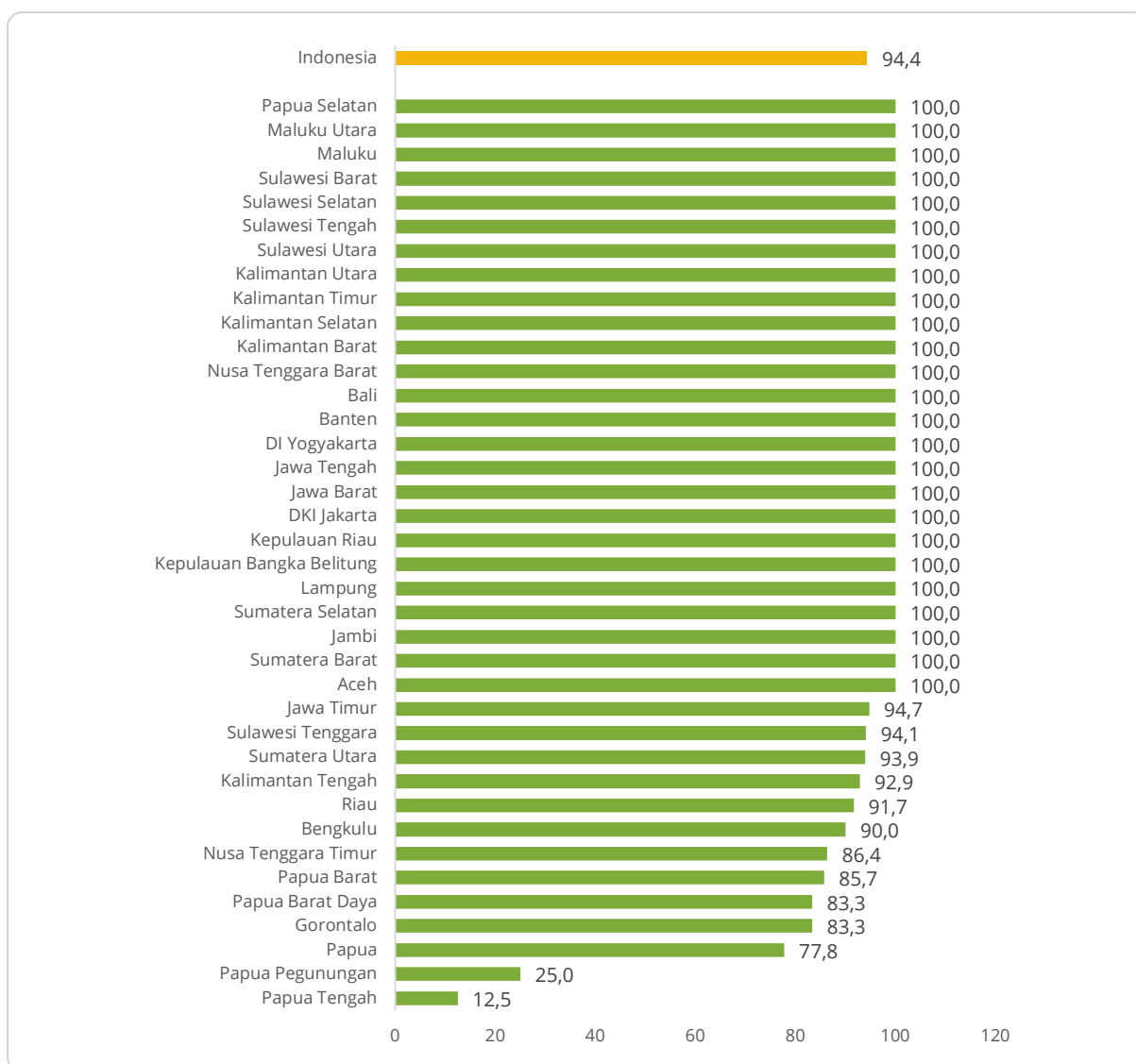
Pada tahun 2024, dari 4.553.875 perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksi dini kanker payudara sebanyak 20.601 (0,45%) ditemukan benjolan dan sebanyak 707 (0,02%) yang dicurigai kanker payudara.

3. Pengendalian Konsumsi Tembakau

Perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko yang diintervensi pada pengendalian penyakit tidak menular. Salah satu upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yaitu melalui pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Dengan indikator ini diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, bebas dari paparan asap rokok, berkualitas, dan produktif.

Untuk memperkuat implementasi KTR, Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KTR. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kumulatif kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan/atau terdapat lebih dari 40% tatanan yang memenuhi indikator penerapan KTR (3 dari 7 tatanan). Sebanyak 485 kabupaten/kota (94,4%) telah menerapkan KTR sampai dengan tahun 2024. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 458 kabupaten/kota.

GAMBAR 6.66
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI INDONESIA TAHUN 2024

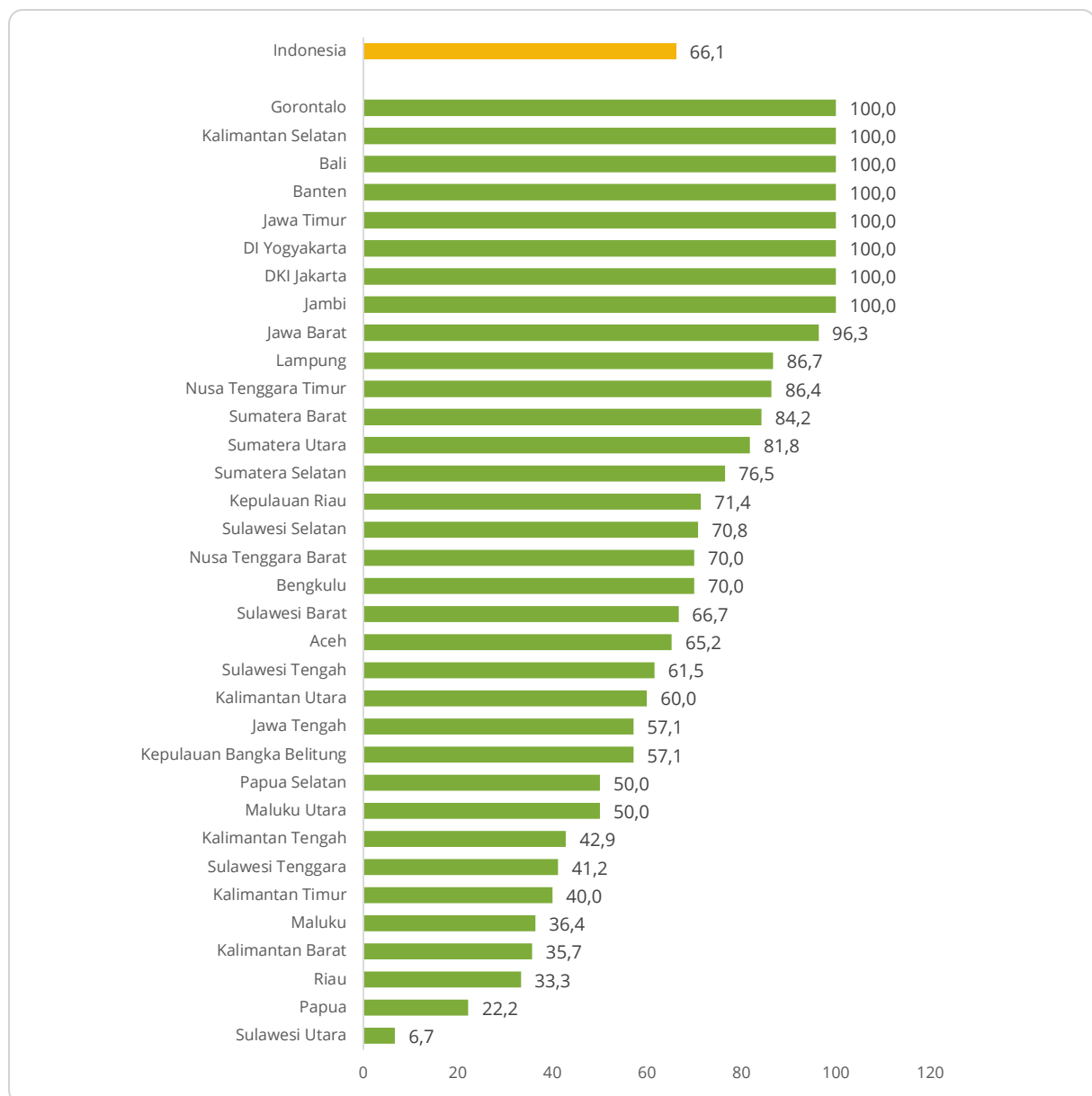


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menerapkan KTR meningkat menjadi 25 provinsi di tahun 2024. Tiga provinsi yang masih memiliki persentase kabupaten/kota menerapkan KTR kurang dari 50% yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Selain penerapan KTR, pemerintah mengembangkan inovasi berupa layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Layanan ini merupakan upaya promotif, preventif dan tatalaksana pengendalian konsumsi rokok dengan membantu masyarakat untuk berhenti merokok dari gejala putus nikotin yang dilaksanakan di FKTP, salah satunya di Puskesmas. Puskesmas layanan UBM adalah Puskesmas yang melaksanakan layanan konseling UBM. Strategi ini ditempuh untuk menurunkan prevalensi perokok usia 10-18 tahun. Diharapkan, kabupaten/kota di Indonesia menyelenggarakan layanan UBM di $\geq 40\%$ Puskesmas.

GAMBAR 6.67
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS
YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan layanan UBM di $\geq 40\%$ Puskesmas ada sebanyak 340 kabupaten/kota, meningkat dari tahun 2023. Delapan provinsi sudah mencapai 100 kabupaten/kota yang melaksanakan layanan UBM di $\geq 40\%$ Puskesmas, yaitu Gorontalo, Kalimantan Selatan, Bali, Banten, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jambi. Namun empat provinsi belum melaksanakan layanan UBM atau tidak melaporkan kegiatan yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

4. Deteksi Dini Gangguan Indra

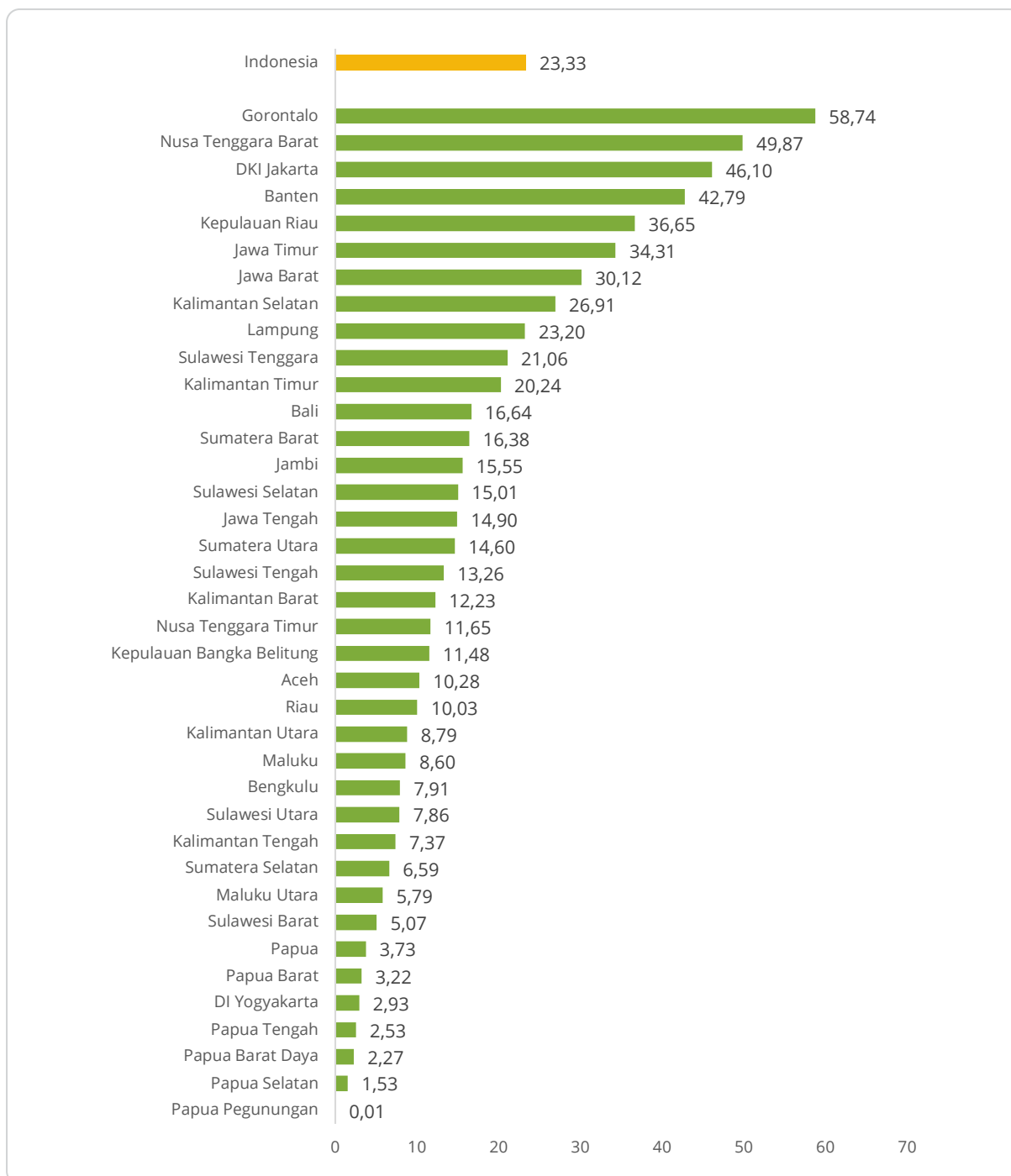
Upaya penanggulangan gangguan indera dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sejalan dengan enam pilar transformasi sistem kesehatan, khususnya untuk mewujudkan transformasi layanan primer pada pengendalian penyakit tidak menular, maka upaya deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan program utama dalam rangka penemuan kasus secara dini. Upaya ini dilakukan agar kasus yang ditemukan segera mendapatkan intervensi atau penanganan dini untuk menekan angka kesakitan, kematian dan disabilitas akibat gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.

Sasaran program mengacu pada siklus hidup dan pendekatan keluarga, sehingga pelaksanaan deteksi dini dilakukan terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas program dan lintas sektor terkait. Di era desentralisasi, deteksi dini gangguan indera diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Deteksi dini gangguan indera adalah kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan atau gangguan pendengaran merupakan salah satu skrining yang masuk dalam skrining PTM prioritas. Sasaran yang diharapkan adalah pada kelompok usia 7-15 tahun dan >15 tahun. Data deteksi dini gangguan indera diperoleh dari pencatatan dan pelaporan pada pelayanan kesehatan maupun dari kegiatan pengelola program di Kemenkes dan lintas sektor, yang saat ini dilakukan secara sistem melalui Aplikasi Sehat Indonesia-Ku (ASIK) dan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) secara terintegrasi.

Pada tahun 2024 hampir seluruh kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada sasaran usia 7-15 tahun dan >15 tahun dengan capaian sebesar 23,3%. Capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 70% dari sasaran deteksi dini.

GAMBAR 6.68
PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-15 DAN >15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING PTM PRIORITAS
(DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA) TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, provinsi dengan persentase tertinggi penduduk 7-15 tahun dan > 15 tahun yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera adalah Gorontalo (58,74%), Nusa Tenggara Barat (49,87%), dan DKI Jakarta (46,1%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Beberapa provinsi tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah agar pada tahun-tahun berikutnya kegiatan deteksi dini gangguan indera dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

5. Deteksi Dini Obesitas

Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidak seimbangan asupan energi (*energy intake*) dengan energi yang digunakan (*energy expenditure*) dalam waktu lama (WHO, 2000). Obesitas telah menjadi masalah global yang berdampak pada 2 milyar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia. Pada tahun 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan hidup dengan obesitas (setara dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia). Prevalensi obesitas global lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan jumlah terbesar orang dengan obesitas berada di negara berkembang, di mana beban ganda malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya secara efektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh IMT yang tinggi pada tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan lebih tinggi setiap tahun. Ini berarti lebih dari 20% dari semua tahun kehidupan sehat yang hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis yang dapat dicegah. Jika kita ingin mengatasi PTM yang dapat dicegah, maka keberhasilan dalam mengatasi obesitas sangat penting. Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan, dari 10,5% di tahun 2007 menjadi 21,8% di tahun 2018. Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular (5,87% dari total kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84% dari total kematian).

Berdasarkan data-data tersebut, maka upaya pengendalian obesitas menjadi sangat strategis dalam mencegah terjadinya penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya mengendalikan peningkatan prevalensi obesitas adalah dengan melakukan deteksi dini faktor risiko PTM melalui upaya-upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kementerian/Lembaga, TNI dan POLRI, institusi Pendidikan dan pihak swasta. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit telah menyusun strategi untuk menemukan faktor risiko obesitas dengan melakukan deteksi dini faktor risiko PTM secara masif di 514 Kabupaten/Kota sebagai indikator kinerja program tahun 2022-2024, yaitu Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM dengan cara penghitungan berdasarkan jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. Pada tahun 2024, indikator tersebut ditargetkan mencapai 514 kab/kota di Indonesia yang akan dipantau melalui Aplikasi Sehat Indonesia ku (ASIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi PTM.

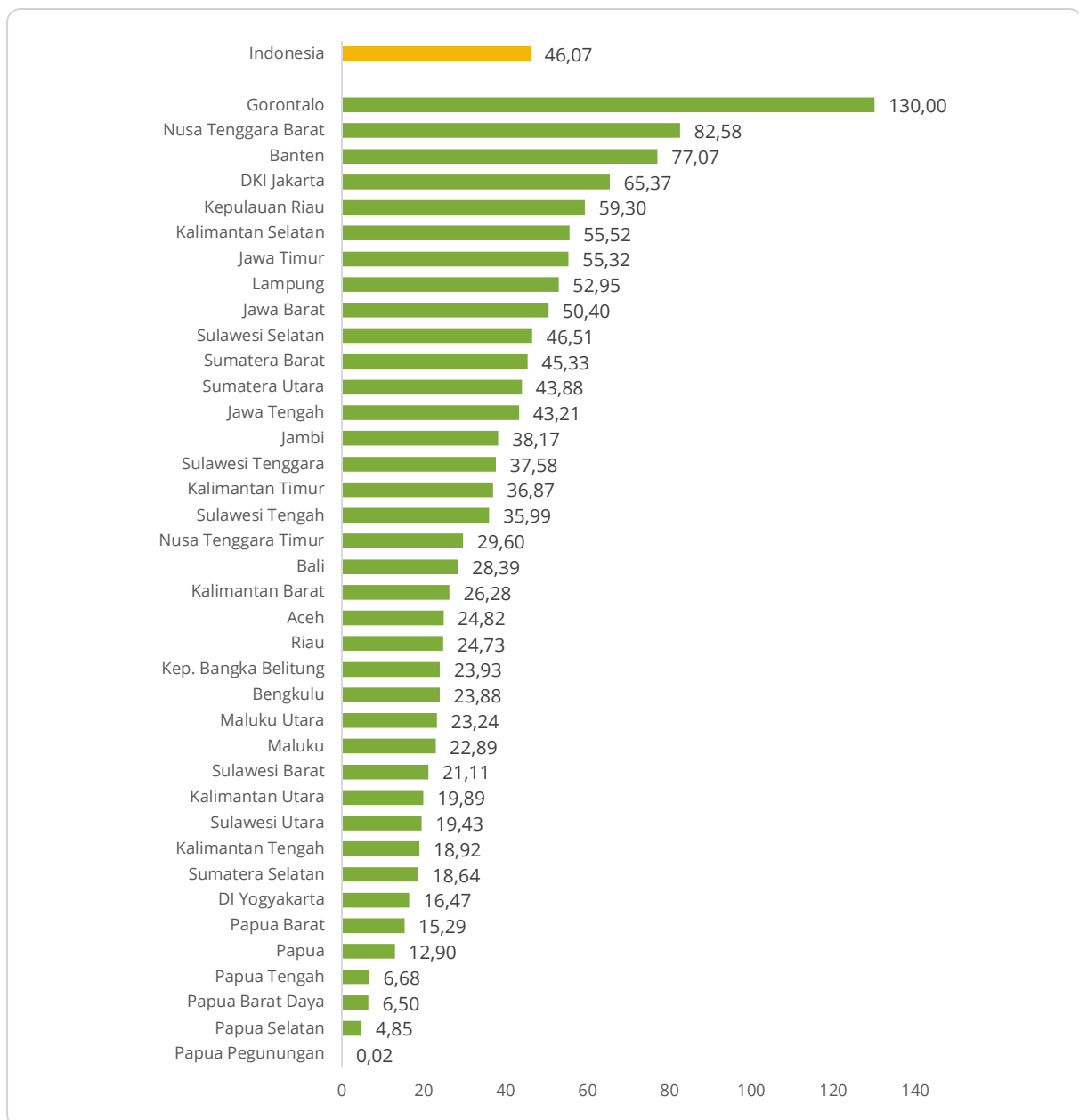
Definisi Operasional Indikator prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥ 18 tahun adalah kasus obesitas pada penduduk usia ≥ 18 tahun dengan kategori IMT > 27 pada periode tertentu. Indikator ini dihitung dari jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun dengan IMT > 27 dibagi dengan total penduduk usia ≥ 18 tahun di kali 100 persen, pada periode tertentu.

Obesitas merupakan penyakit, sekaligus merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular lain yang mendorong munculnya faktor metabolik (penyakit jantung, diabetes, kanker, hipertensi, dislipidemia). Prevalensi obesitas (Indeks Masa Tubuh (IMT) ≥ 27) meningkat dari 21,8% pada tahun 2018 menjadi 23,4% pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan prevalensi obesitas sentral dari 31% di tahun 2018 menjadi 36,8% di tahun 2023 (Survei Kesehatan Indonesia, 2023).

Sasaran penduduk untuk program deteksi dini obesitas adalah 70% dari sasaran penduduk usia ≥ 18 tahun. Pada tahun 2024, persentase penduduk usia ≥ 18 tahun yang telah dilakukan

deteksi dini obesitas di Indonesia sebesar 46,1% atau sekitar 58.316.042 orang. Provinsi persentase tertinggi penduduk usia ≥ 18 tahun yang melaksanakan deteksi dini obesitas adalah Gorontalo dengan persentase lebih dari 100%, artinya sudah melebihi target 70% sasaran yang ditetapkan. Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan (0,02%).

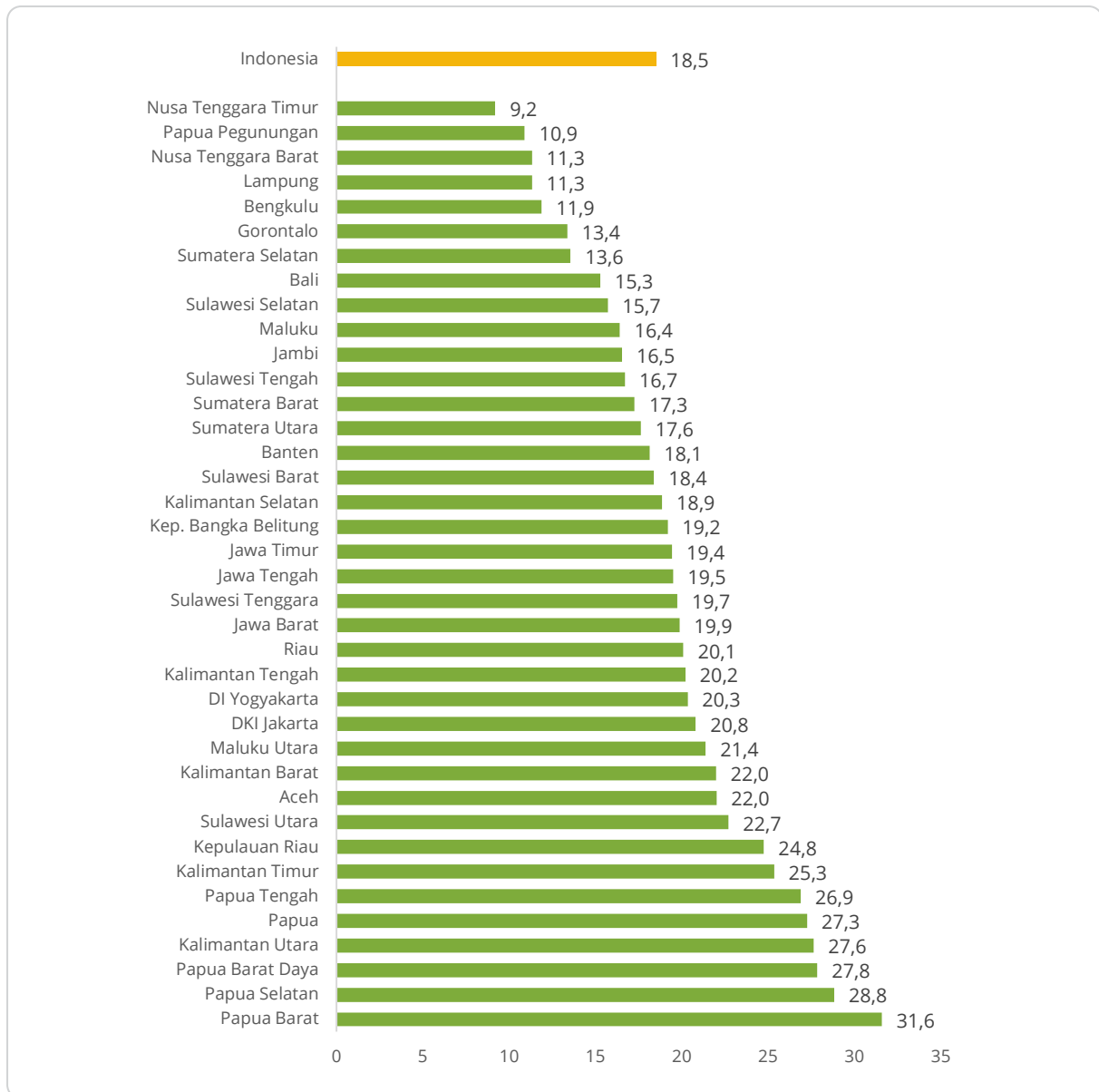
GAMBAR 6.69
PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 18 TAHUN YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI OBESITAS
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Dari hasil deteksi dini, diketahui bahwa proporsi penduduk usia ≥ 18 tahun yang obesitas di Indonesia pada tahun 2024 adalah 18,5%. Provinsi dengan proporsi terendah penduduk usia ≥ 18 tahun yang obesitas adalah Nusa Tenggara Timur (9,2%), sedangkan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Papua Barat (31,6%), Papua Selatan (28,8%), dan Papua Barat Daya (27,8%).

GAMBAR 6.70
PROPORSI PENDUDUK USIA >18 TAHUN YANG OBESITAS BERDASARKAN
HASIL DETEKSI DINI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

F. KESEHATAN JIWA DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Kesehatan jiwa mempunyai peran yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), yang apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan ketergantungan yang ditandai antara lain dengan dosis penggunaan yang semakin besar, kesulitan mengontrol keinginan untuk menggunakan NAPZA, muncul gejala putus zat jika penggunaan dihentikan, hingga tetap menggunakan NAPZA meskipun mengetahui dampak buruknya.

Diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan obat. Gangguan ini memberikan kontribusi 14% dari beban penyakit global. Sekitar 154 juta diantaranya menderita depresi. Pada 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun mengalami masalah psikologis. Depresi penyebab utama disabilitas pada remaja. Depresi dapat menjadi penyebab bunuh diri, dan bunuh diri merupakan penyebab ke-4 kematian pada remaja di dunia. Kebanyakan dari gangguan psikologis tersebut tidak disadari dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganan yang tidak tepat dan lambat pada kasus-kasus depresi dapat menimbulkan kematian akibat bunuh diri (Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023).

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pendekatan kesehatan jiwa secara global saat ini mulai bergeser dari layanan institusional menjadi berbasis masyarakat dengan mendekatkan akses layanan kesehatan jiwa tidak hanya di fasilitas layanan kesehatan, namun juga di fasilitas lain di luar sektor kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tetap mengedepankan upaya promotif dan preventif. Upaya promotif preventif dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa, dan perlunya skrining awal agar gejala kesehatan jiwa dapat diatasi sebelum menjadi parah.

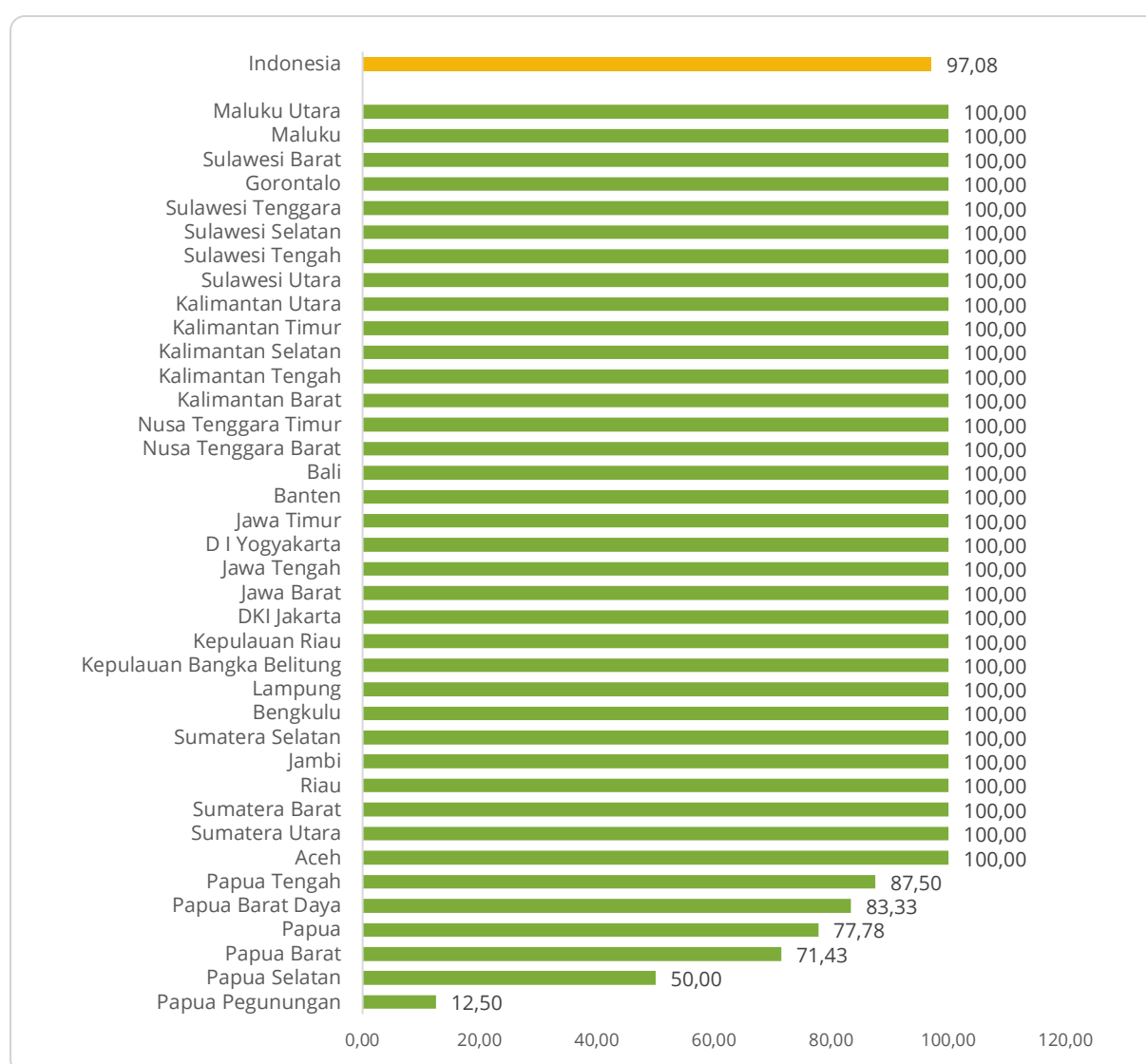
a. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa

Deteksi dini merupakan langkah awal yang penting untuk menyaring antara individu yang sehat dengan individu yang memiliki indikasi terhadap permasalahan kesehatan jiwa pada populasi. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam hal ini gangguan jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan. Dengan begitu diharapkan dapat mencegah dan/atau memperlambat proses perjalanan penyakit sehingga terjadinya hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang dikaitkan dengan perilaku) dan disabilitas dapat dicegah. Skrining masalah kesehatan jiwa dilakukan agar penduduk yang mengalami masalah kesehatan jiwa dapat ditemukan dan mendapat layanan preventif dan/atau layanan tindak lanjut lainnya lebih dini. Penduduk dengan kondisi sehat jiwa dapat diupayakan tetap sehat dengan mendapat upaya promosi kesehatan jiwa.

Saat ini di Indonesia dilakukan skrining kesehatan jiwa pada komunitas seperti di perkantoran, sekolah-sekolah, masyarakat umum dan kelompok masyarakat lainnya. Jika pada saat skrining ditemukan individu dengan masalah kesehatan jiwa dapat berkonsultasi kepada guru di sekolah, bagian kepegawaian di kantor atau kader kesehatan. Bila membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Melalui program skrining kesehatan jiwa ini dapat menurunkan masalah-masalah kesehatan jiwa.

Kategori kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa adalah kabupaten/kota yang telah menerapkan deteksi dini dengan menggunakan instrumen yaitu *SDQ* atau *SRQ-20*, atau *ASSIST* dan melaporkan data tersebut pada Sistem Informasi Kesehatan Jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 6.71
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA
TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan gambar di atas, persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa/NAPZA di Indonesia sebesar 97,08%. Angka capaian ini mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 94,4%. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 32 provinsi diantaranya melaporkan bahwa seluruh kabupaten/kota di wilayah kerjanya sudah melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa, dan seluruh provinsi dengan kabupaten/kota yang belum 100% melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa berada di Papua. Mengacu pada data kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 kabupaten/kota, maka angka ini menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota tersebut ada sebanyak 499 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa/NAPZA, dan 15 kabupaten/kota lainnya belum melaksanakan program ini. Seluruh kabupaten/kota yang belum melaksanakan program tersebut lokasinya tersebar di enam provinsi yang ada di Papua. Data tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebanyak 14 kabupaten/kota apabila dibandingkan dengan data tahun 2023.

Dua provinsi dengan capaian paling rendah yaitu Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Kedua provinsi ini merupakan provinsi yang masih baru pemekaran pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan juga tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan deteksi dini yang kemungkinan disebabkan oleh karena memiliki kendala keterbatasan SDM pelaksana.

b. Persentase Penduduk Usia ≥ 15 Tahun dengan Risiko Masalah Jiwa yang Mendapatkan Skrining

Program skrining kesehatan jiwa saat ini difokuskan pada penduduk berisiko masalah kesehatan jiwa mulai usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan hasil SKI 2023, prevalensi masalah kesehatan jiwa dalam satu bulan terakhir pada penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar prevalensi 2,0%. Prevalensi depresi untuk seluruh usia di Indonesia sebesar 1,4%. Prevalensi penduduk dengan gejala depresi tertinggi terdapat pada kelompok anak muda (usia 15-24 tahun) sebesar 2%. Angka prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah, tidak bekerja, tempat tinggal di perkotaan, dan status ekonomi terbawah. Survei mengenai kesehatan jiwa ada remaja di Indonesia tahun 2022 mendapatkan hasil 5,5% remaja usia 10-17 tahun mengalami gangguan mental. Sebanyak 1% remaja mengalami depresi, 3,7% cemas, *post traumatic syndrome disorder (PTSD)* 0,9%, dan *Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)* sebanyak 0,5%.

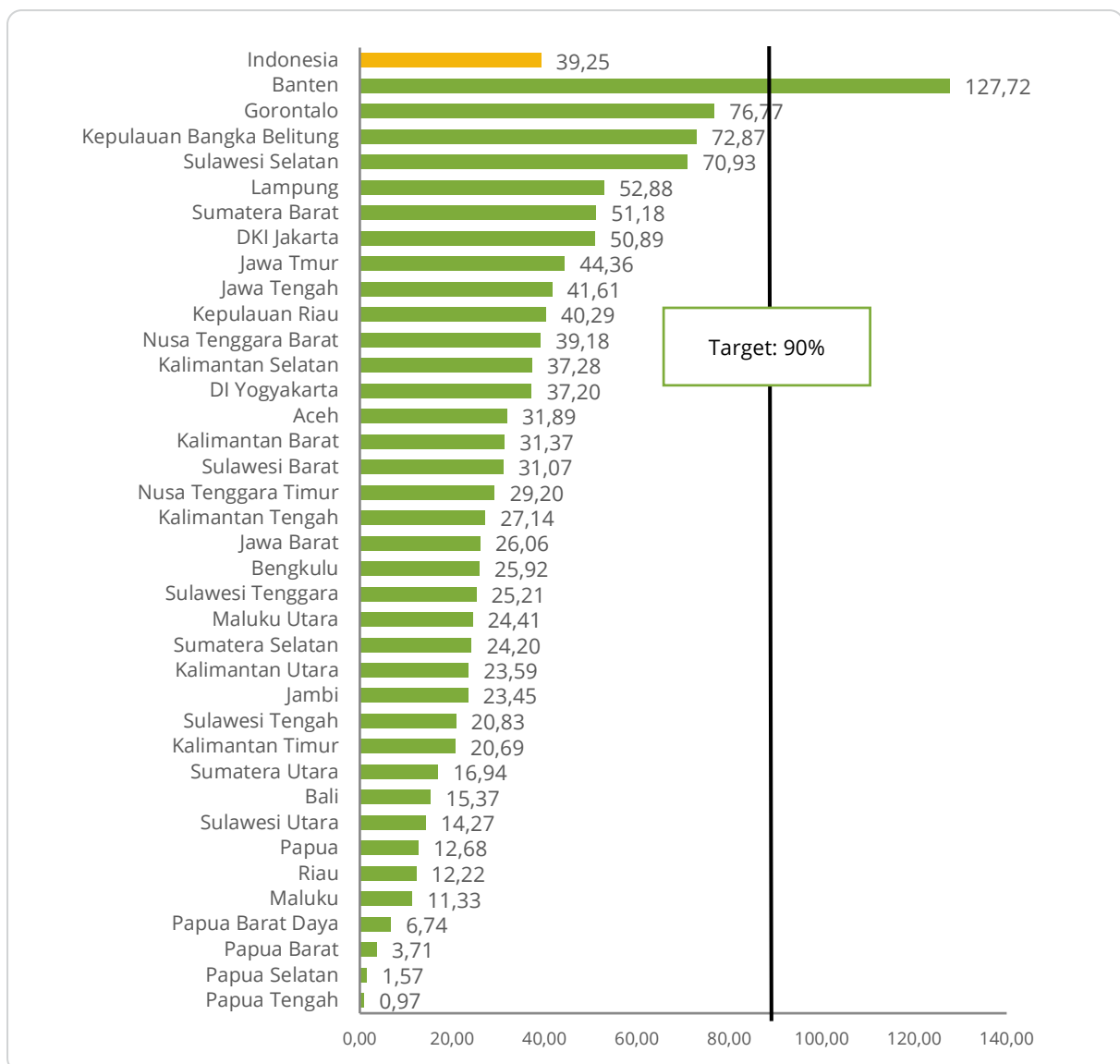
Persentase penduduk usia ≥ 15 Tahun dengan risiko masalah jiwa yang mendapatkan skrining adalah persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan layanan skrining dengan menggunakan instrumen SDQ (untuk usia 15-18 tahun) dan/atau SRQ-20 (usia diatas 18 tahun) dan/atau ASSIST (bagi kelompok sasaran yang memiliki kecenderungan penyalahguna NAPZA).

Program skrining kesehatan jiwa menggunakan tiga jenis instrumen skrining. Pada kelompok usia 15-18 tahun skrining menggunakan instrumen *Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)*, pada kelompok usia > 18 tahun dengan menggunakan instrumen *Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20)*, dan skrining penyalahgunaan NAPZA pada kelompok usia mulai 15 tahun ke atas dengan menggunakan instrumen *Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)*. Penyelenggaraan skrining kesehatan jiwa ini dilaksanakan berbasis masyarakat, berbasis institusi dan berbasis Fasilitas Layanan Kesehatan Primer (FKTP).

Berdasarkan Permenkes 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, skrining dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau kader kesehatan dan/atau guru terlatih pada kelompok berisiko berdasarkan siklus hidup dalam kurun waktu 1 tahun. Kelompok berisiko

masalah kesehatan jiwa berdasarkan siklus hidup yang menjadi sasaran program antara lain: remaja (siswa baru dan Tingkat akhir SMP dan SMA; santri remaja dengan disabilitas; korban tindak kekerasan; korban dan penyintas bencana alam); dewasa (mahasiswa baru dan tingkat akhir perguruan tinggi; ibu hamil dan postpartum; ibu dengan anak balita; orang tua tunggal; pekerja migran; keluarga/pendamping ODGJ; pendamping lansia; warga binaan di lapas; pekerja dengan sistem shift; lansia yang hidup sendiri/hanya dengan pasangannya; lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang; penghuni panti sosial; dan pasien dengan penyakit kronis.

GAMBAR 6.72
PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN DENGAN RISIKO MASALAH JIWA YANG MENDAPATKAN SKRINING TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah jiwa yang mendapatkan skrining diperoleh dengan melihat perbandingan antara penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah jiwa yang mendapatkan skrining dengan estimasi penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa. Target capaian yang sudah ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

Pada gambar 6.72, persentase penduduk di Indonesia usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining adalah sebesar 39,25%. Angka capaian ini masih jauh dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 90%, walaupun sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 16,4%. Jika dibandingkan dengan data persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini (gambar 6.73), program deteksi dini kesehatan jiwa yang dilaksanakan oleh 97,1% kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya menjangkau 39,35% penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah jiwa, sehingga sekitar 60,75% kelompok penduduk berisiko masalah kesehatan jiwa lainnya belum tersaring antara individu yang sehat dengan individu yang memiliki indikasi terhadap permasalahan kesehatan jiwa.

Berdasarkan gambar 6.72, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia hanya Provinsi Banten yang berhasil mencapai target bahkan hingga mencapai 127,72%, diikuti enam provinsi lainnya dengan capaian diatas 50% dan selebihnya masih berada dibawah 50%. Dari 37 provinsi yang melaporkan data capaian skrining, angka capaian yang paling rendah ada di Provinsi Papua Tengah. Dalam data SKI 2023, prevalensi masalah kesehatan jiwa pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Provinsi Papua Tengah mencapai 2,9%. Berdasarkan capaian yang diperoleh tersebut, tentu cakupan ini masih jauh dari sasaran berisiko yang ditargetkan. Provinsi lainnya di Papua yaitu Provinsi Papua Pegunungan yang tidak tergambarkan dalam grafik tersebut, menunjukkan tidak adanya laporan data pada Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIMKESWA). Namun, dalam kegiatan Desk Data dan Evaluasi Pemanfaatan Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat semester 1 Tahun 2024 pada tanggal 6 - 9 Agustus 2024 di Kota Makassar, upaya skrining dikonfirmasi telah dilakukan di 1 dari 8 kabupaten/kota (12,50%) di Provinsi Papua Pegunungan walau dalam pelaksanaannya masih minim dilakukan dan pencatatannya masih belum tercatat dengan baik. Secara bukti temuan dari SKI 2023, Provinsi Papua Pegunungan tercatat memiliki prevalensi masalah kesehatan jiwa pada penduduk umur 15 tahun sebesar 3,0%, yang melebihi angka prevalensi nasional.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target adalah:

1. Kesehatan jiwa di daerah belum dianggap prioritas sehingga dukungan pemangku kepentingan di daerah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan skrining kesehatan jiwa belum optimal
2. Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pelaporan data rutin yang dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan Jiwa sehingga ada beberapa kabupaten/kota yang belum optimal melaporkan hasil kegiatan skrining
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas kesehatan jiwa di Puskesmas dalam menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa dan melakukan intervensi hasil skrining kesehatan jiwa
4. Belum meluasnya cakupan pelaksanaan skrining (belum menjangkau seluruh masyarakat) didasarkan pada anggaran yang terbatas di beberapa daerah
5. Masih adanya stigma di masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak melakukan skrining kesehatan jiwa untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwanya

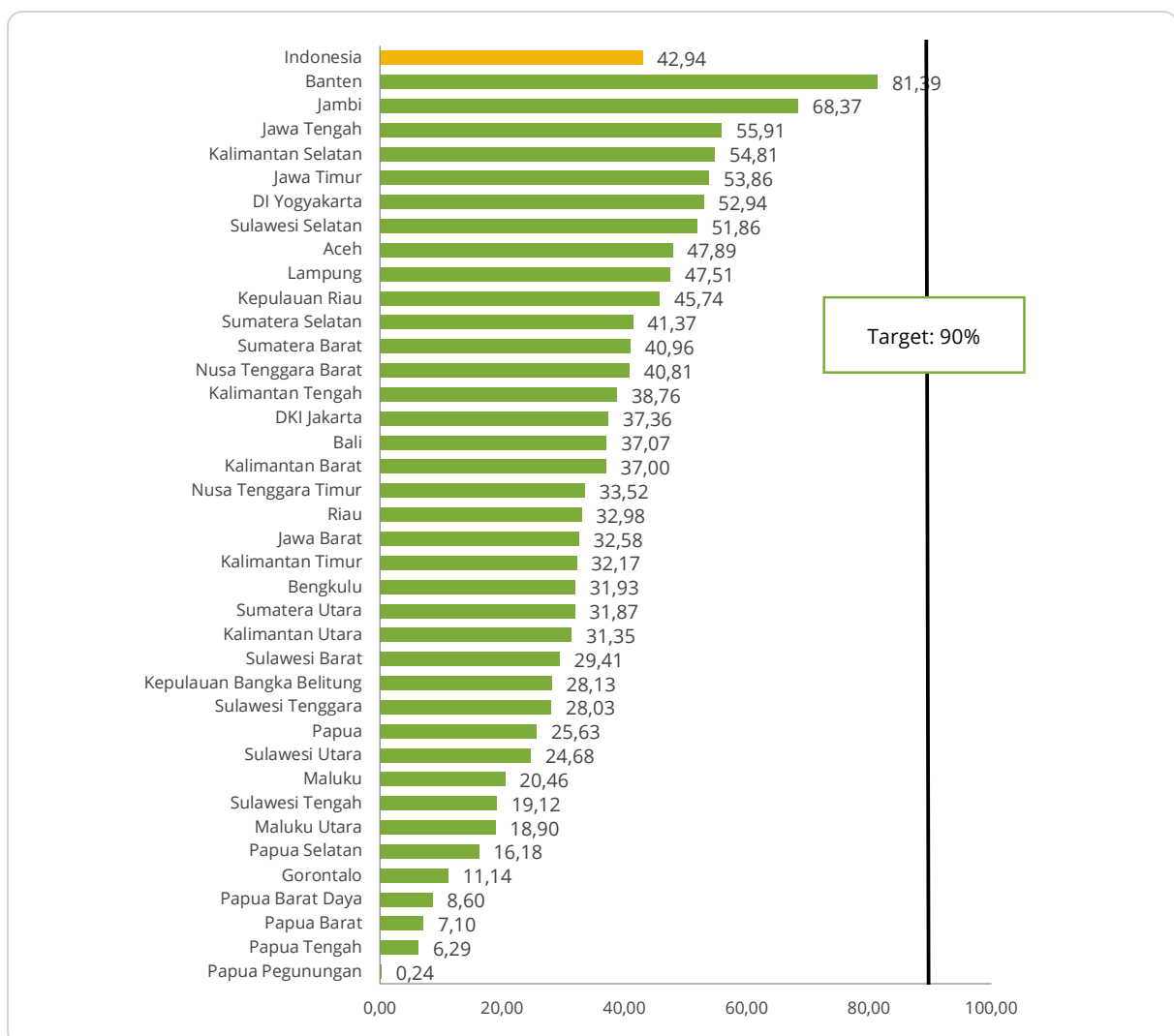
c. Persentase Penyandang Gangguan Jiwa yang Memperoleh Layanan di Fasyankes

Pelayanan kesehatan jiwa pada penyandang gangguan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat, kinerjanya diukur dengan indikator persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Jiwa Tahun 2023, 2023).

Konsep gangguan jiwa dari PPDGJ III yang merujuk ke DSM-III adalah sindrom atau pola perilaku, atau psikologi seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment/ disability*) di dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikis, atau biologis, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.

Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di fasyankes adalah persentase penyandang gangguan depresi, ansietas, dan skizofrenia yang memperoleh layanan di fasyankes dengan kriteria: sesuai dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Edisi III (1981) Nakes (UU No. 36 Tahun 2014) tentang tenaga kesehatan terlatih membuat pencatatan dan pelaporan. Jumlah sasaran merupakan estimasi yang diperoleh berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2024 ada sebanyak 2.004.280 jiwa dan dari besar sasaran tersebut target yang perlu dipenuhi pada tahun 2024 sebanyak 1.803.852 jiwa (90%).

GAMBAR 6.73
PERSENTASE PENYANDANG GANGGUAN JIWA YANG MEMPEROLEH LAYANAN DI FASYANKES
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Data penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di fasyankes seperti yang dapat dilihat pada gambar 6.75 diperoleh dari laporan Puskesmas yang ada di Indonesia pada Sistem Informasi Kesehatan Jiwa. Berdasarkan data tersebut, penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes yang ada di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 42,94%. Angka capaian secara nasional maupun per provinsi belum ada yang berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan angka capaian pada tahun 2023, capaian pada tahun 2024 terlihat meningkat, tetapi apabila dibandingkan dengan proporsi antara capaian dengan target pada tahun 2023 (capaian 32,7% dari target sebesar 60%), maka proporsi antara capaian dengan target tahun 2024 masih lebih rendah daripada tahun 2023.

Lebih lanjut, orang dengan gangguan depresi yang juga disoroti dalam Laporan SKI 2023, menunjukkan tiga provinsi dengan prevalensi penduduk dengan gangguan depresi tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat (3,3%), Kalimantan Timur (2,2%), dan Banten (1,7%). Ketiganya berdasarkan indikator ini memiliki cakupan layanan depresi yang cukup rendah, Provinsi Jawa Barat sekitar 7,68% dari 32,58%, Kalimantan Timur sekitar 1,15% dari 32,17%, dan Banten sekitar 4,03% dari 81,39%. Dua dari provinsi ini juga masih menunjukkan angka capaian upaya skrining yang masih rendah, Provinsi Jawa Barat 26,06% dan Kalimantan Timur 20,69%. Sedangkan, Provinsi Banten yang berada di urutan ketiga sudah menunjukkan upaya pelaksanaan skrining yang telah mencapai lebih dari 100% sasaran skrining.

Depresi merupakan permasalahan kesehatan jiwa yang cukup besar dan dapat menyebabkan bunuh diri pada anak muda. Kelompok anak muda walaupun mempunyai prevalensi depresi tertinggi namun kelompok ini paling sedikit yang mendapatkan pengobatan. Data SKI 2023, hanya 10,4% anak muda dengan depresi yang mencari pengobatan. Penanganan yang tidak tepat dan lambat pada kasus-kasus depresi dapat menimbulkan kematian akibat bunuh diri. Oleh karena itu upaya layanan penyandang gangguan jiwa di fasyankes perlu ditingkatkan.

Tantangan pelaksanaan program penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di fasyankes ini dinilai cukup kompleks dimulai dari kesenjangan pengobatan hingga data kasus gangguan jiwa yang dilaporkan pada sistem informasi kesehatan jiwa. Kesenjangan pengobatan (*treatment gap*) merepresentasikan perbedaan besaran prevalensi penyakit dengan proporsi individu sakit yang mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan. Kesenjangan ini dapat dilatarbelakangi oleh faktor predisposisi, faktor ketersediaan fasilitas, sarana, dan akses, dan faktor pendorong dari lingkungan sosial. Kompleksitas faktor yang menjadi kausalitas kesenjangan dapat diatasi dengan menerapkan strategi yang tepat. Ketepatan ini dapat dihubungkan dengan data sebagai basis bukti ilmiah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang tidak melaporkan kasus gangguan jiwa pada sistem informasi. Maka dari itu, peningkatan akses layanan kesehatan jiwa untuk menurunkan kesenjangan pengobatan gangguan jiwa dan peningkatan pelaporan data oleh petugas menjadi tuntutan yang perlu dipenuhi oleh fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia guna menghasilkan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan berkelanjutan.

d. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Layanan

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria

diagnosis yang ditetapkan. Lebih detail, ODGJ berat adalah orang yang mendapatkan diagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, RSU dengan layanan Kesehatan Jiwa, RSJ). Gangguan jiwa psikosis/skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang umumnya ditandai dengan penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi, disertai efek yang tidak wajar (*inappropriate*) atau tumpul (*blunted*). Kesadaran yang jernih (*clear consciousness*) dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang kemudian. Gejala khas psikosis/skizofrenia berupa adanya waham atau halusinasi yang menetap selama satu bulan atau lebih, disertai perilaku aneh seperti *katatonik* atau *agresivitas*, serta gejala negatif yang berdampak signifikan kepada kualitas hidup keseluruhan.

Orang dengan gangguan jiwa memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, diantaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), mendapatkan informasi dan edukasi, serta tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. Stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia pada penderita skizofrenia seperti pemasangan sering terjadi. Lebih dari 2/3 penderita psikosis di dunia tidak menerima layanan kesehatan mental spesialis.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka prevalensi rumah tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah sebesar 6,7 permil. Angka ini menunjukkan bahwa per 1000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia/psikosis. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, proporsi rumah tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia yang pernah dipasung sebesar 6,6%, proporsi rumah tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia yang berobat 1 bulan terakhir dan berobat rutin 1 bulan terakhir di fasilitas kesehatan sebesar 55,9%

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dari 492.040 estimasi target sasaran ada sebanyak 668.608 (135,88%) penyandang gangguan jiwa berat yang ada di Indonesia yang memperoleh layanan di fasyankes sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Angka capaian lebih dari 100% ini disebabkan oleh karena penentuan target sasaran berdasarkan angka estimasi bukan angka pasti berdasarkan kenyataan di lapangan. Dari 668.608 penderita tersebut, sebanyak 625.331 (93,53%) adalah penderita skizofrenia dan 43.277 (6,47%) adalah penderita psikotik akut. Angka capaian ini apabila dibandingkan dengan data SKI 2023, berdasarkan data jenis fasilitas pelayanan yang pernah dimanfaatkan rumah tangga memiliki ART gangguan jiwa psikosis/skizofrenia ada sebanyak 60,7% yang sudah memanfaatkan pelayanan hanya di fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 31,0% hanya di fasilitas pelayanan kesehatan dan non kesehatan, tetapi masih ada sebanyak 7,9% yang tidak berobat baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun non kesehatan. Kasus gangguan jiwa berat juga berkaitan dengan kejadian pasung di Indonesia. Diketahui total kasus pasung yang dilaporkan dalam SIMKESWA sampai dengan tahun 2024 ada sebanyak 1.794 kasus. Jumlah kasus pasung tersebut juga berpotensi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan di dalam sistem. Hal ini didukung oleh besaran rata-rata puskesmas yang melaporkan data pada SIMKESWA sepanjang tahun 2024 yang hanya sekitar 21% puskesmas melaporkan data pasung.

Kesenjangan pengobatan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan pelaporan data masih tinggi. Peningkatan akses pelayanan kesehatan jiwa untuk menurunkan kesenjangan pengobatan gangguan jiwa dan pelaporan data, menjadi tuntutan baik secara global maupun regional dengan penyediaan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan kontinu di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menjamin hak dan mengatur kewajiban penyalahguna dan pecandu narkoba untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis pada penyalahguna NAPZA merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba dari ketergantungan narkoba. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor.

Wajib lapor merupakan suatu kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan /atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba. Di Indonesia, ada sebanyak 905 IPWL dengan 657 IPWL diantaranya merupakan milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, yang dapat mengajukan klaim pembiayaan pelayanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA yang dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis berasal dari penyalahguna yang datang secara sukarela dan/atau pembantaran, dan/atau kasus putusan pengadilan dan/atau mendapatkan rehabilitasi medis rawat jalan dan/atau rawat inap di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Metode penemuan kasus penyalahguna NAPZA dilakukan skrining dengan menggunakan instrumen ASSIST. ASSIST, yang dikeluarkan oleh WHO, merupakan instrumen yang dirancang secara khusus untuk digunakan secara internasional pada pusat layanan kesehatan primer. Pelaksanaan skrining dengan menggunakan metode ASSIST dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dengan instrumen ASSIST perlu dilakukan kegiatan pelatihan atau orientasi untuk meningkatkan kapasitas bagi tenaga kesehatan di puskesmas, guru Bimbingan Konseling di sekolah, serta unit kepegawaian (*Human Resources Department/ HRD*). Upaya lanjutan dilakukan terhadap hasil deteksi dini ASSIST dengan intervensi singkat melalui diskusi sederhana dan singkat dengan pasien mengenai skor ASSIST dan intervensi lanjutan. Pada upaya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dilakukan juga pemeriksaan dengan menggunakan metode *rapid test urine* untuk mengetahui kandungan narkoba; memberikan edukasi kepada masyarakat; meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba; mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba; dan mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan narkoba. (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2023). Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dapat dilakukan pada kelompok berisiko. Kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama

dengan sekolah dan tempat kerja, deteksi dini penyalahgunaan NAPZA menggunakan ASSIST, dan membuka layanan deteksi dini NAPZA.

Pada tahun 2023, target sasaran penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis adalah 11.000 orang dan diperoleh capaian sebanyak 13.472 (122,5%) orang penyalahguna NAPZA yang mendapat rehabilitasi medis. Pada tahun 2024, dari target sebesar 11.500, diperoleh capaian 18.474 atau sekitar 160,64%. Walaupun angka capaian secara nasional sudah tinggi, tetapi gap antar provinsi masih cukup signifikan. Data dari 33 provinsi yang memberikan laporan, sebanyak enam provinsi angka capaiannya sudah lebih dari 200% tetapi di sisi lain masih ada lima provinsi yang capaiannya dibawah 10%. Kelima provinsi tersebut adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Provinsi yang baru pemekaran tahun 2023 yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, belum memiliki IPWL dan fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan satelit program terapi rumatan metadona sehingga datanya masih tergabung dengan provinsi sebelumnya.

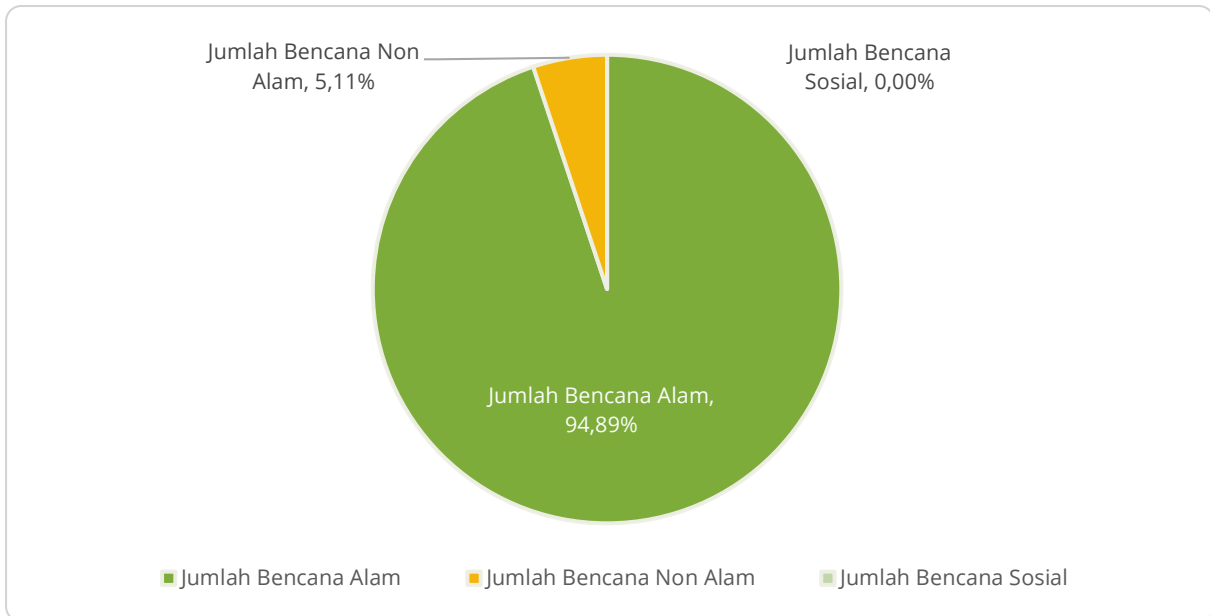
Capaian layanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA pada tiga tahun terakhir sudah berada diatas 100% dan setiap tahunnya semakin meningkat. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh penyalahguna NAPZA yang berasal dari penyalahguna yang datang secara sukarela dan/atau pembantaran, dan/atau kasus putusan pengadilan dan/atau telah mendapatkan rehabilitasi medis rawat jalan dan/atau rawat inap di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Angka capaian yang melebihi 100% selama tiga tahun terakhir, kemungkinan disebabkan penetapan target sasaran lebih kecil dari kasus yang terjadi di lapangan.

G. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Sepanjang tahun 2024 terdapat 235 kejadian berdampak krisis kesehatan di Indonesia. Jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2023, dimana pada tahun 2023 terdapat 347 kejadian berdampak krisis kesehatan. Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian definisi untuk kejadian berdampak krisis kesehatan pada sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah/presiden atau adanya aktivasi klaster kesehatan atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/terjadi pengungsian yang disertai adanya mobilisasi sumber daya kesehatan.

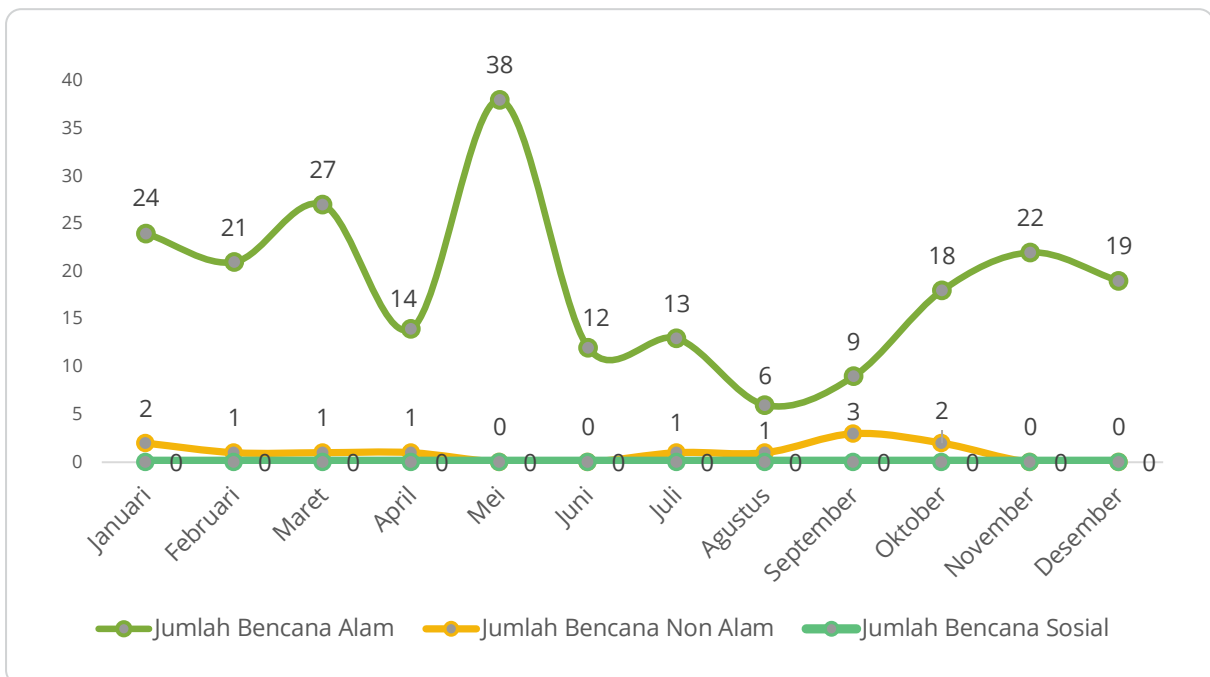
GAMBAR 6.74
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2025

Pada tahun 2024 kejadian berdampak krisis kesehatan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam dengan persentase 94,89%, kemudian disusul oleh bencana non alam dengan persentase 5,11 % sedangkan untuk bencana sosial tidak ada kejadian.

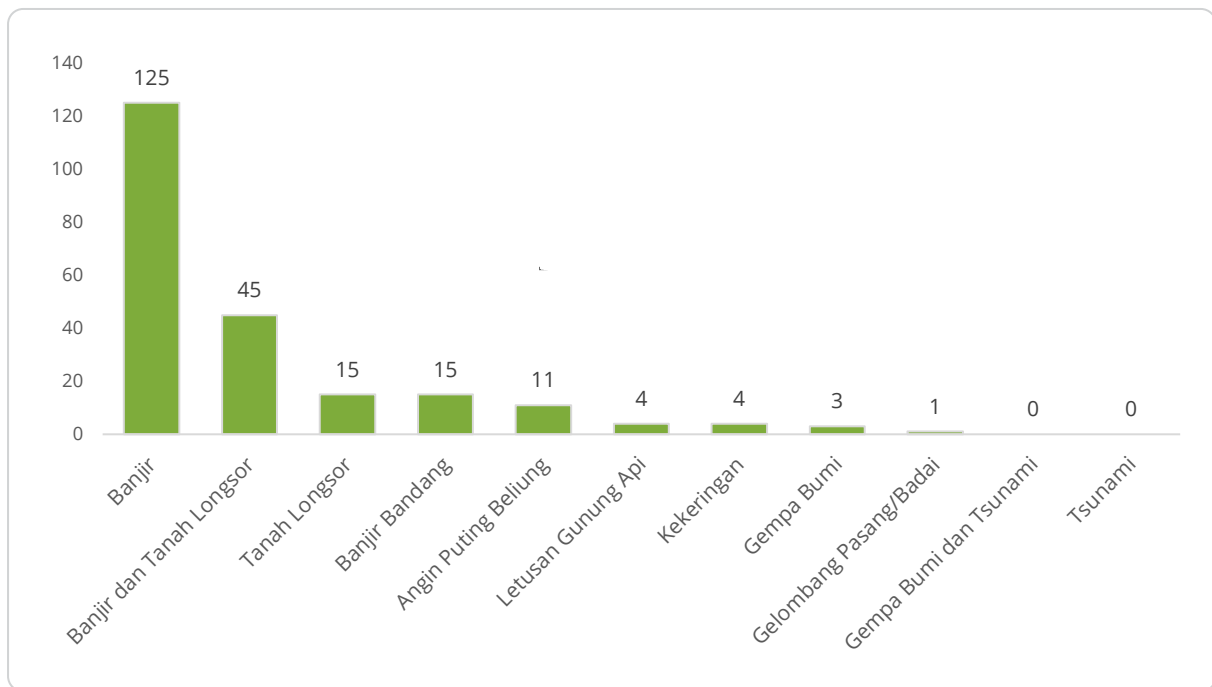
GAMBAR 6.75
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN
DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2025

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa tidak ada kejadian berdampak krisis kesehatan yang disebabkan oleh bencana sosial. Sebagian besar kejadian berdampak krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia tahun 2024 disebabkan oleh bencana alam dengan frekuensi tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan 38 kejadian. Sedangkan untuk bencana non alam frekuensi tertinggi terjadi di bulan September dengan 3 kejadian. Secara keseluruhan, frekuensi tertinggi kejadian berdampak krisis kesehatan terjadi pada bulan Mei dan terendah pada bulan Agustus.

GAMBAR 6.76
JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2024



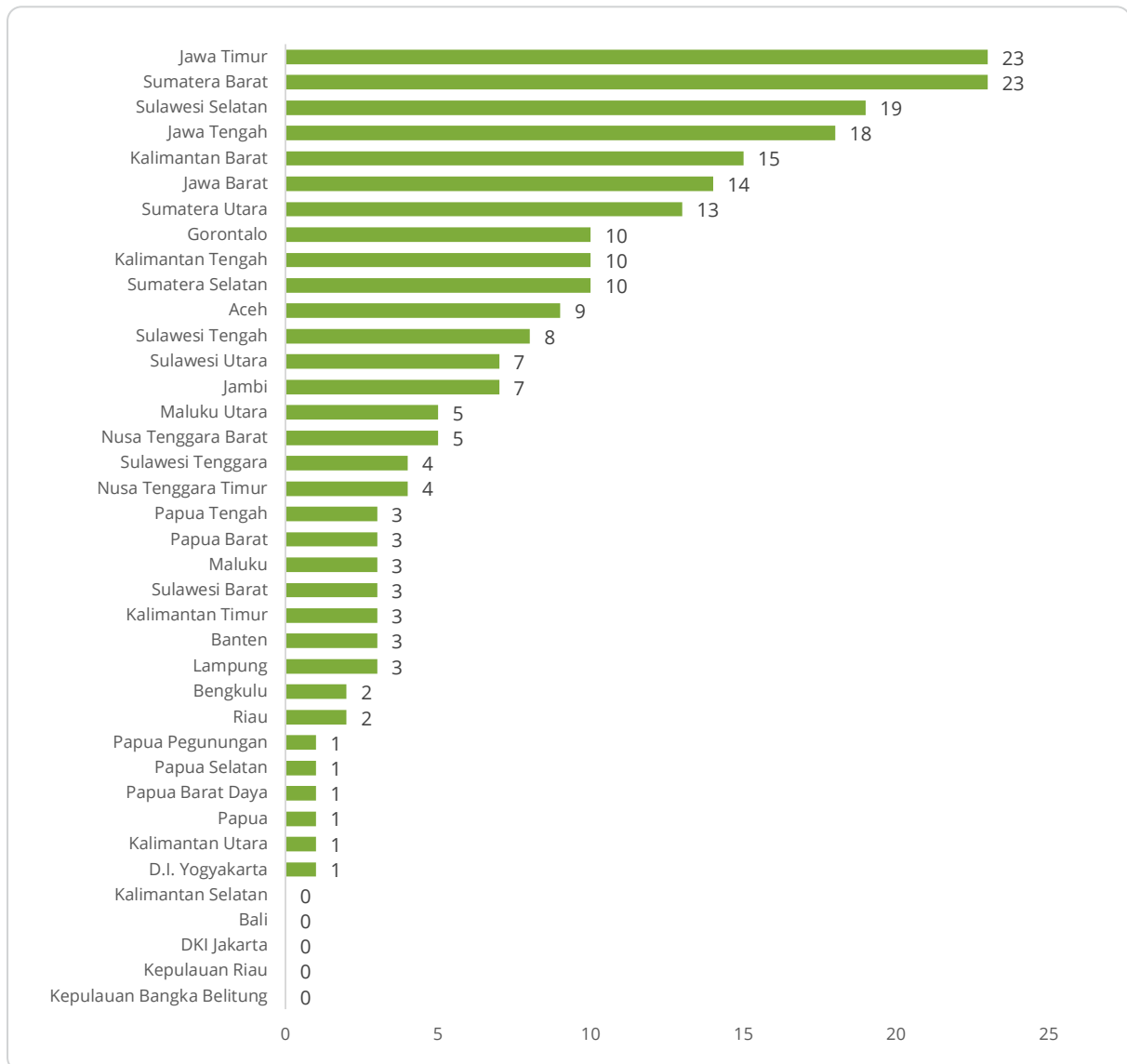
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2025

Dari 235 kejadian bencana yang berdampak krisis kesehatan sepanjang tahun 2024, banjir menjadi kejadian bencana alam dengan frekuensi tertinggi 125 kejadian disusul banjir dan tanah longsor dengan frekuensi 45 kejadian.

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2024 adalah kebakaran hutan dan lahan dengan 6 kejadian, disusul oleh penyakit dengan 2 kejadian dan kebakaran dengan 2 kejadian.

Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2024 tidak ada kejadian bencana sosial yang berdampak pada krisis kesehatan.

GAMBAR 6.77
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, 2025

Jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 235 kejadian. Jika dilihat dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat merupakan provinsi yang mengalami kejadian bencana berdampak krisis kesehatan terbanyak yaitu 23 kejadian, diikuti Sulawesi Selatan dengan 19 kejadian dan Jawa Tengah dengan 18 kejadian bencana. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan, Bali, Kepulauan Riau dan Kepulauan Belitung tidak mengalami kejadian bencana berdampak krisis kesehatan.

TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2024

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banjir	125	25	76	71	39.052	122.372
2	Letusan Gunung Api	4	3	9	210	18.797	34.279
3	Gempa Bumi	3	3	1	29	221	37.765
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	15	7	35	11	295	4.258
6	Banjir Bandang	15	8	46	25	1.677	3.769
7	Kekeringan	4	3	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	11	7	11	1	18	0
9	Gelombang Pasang/ Badai	1	1	0	0	0	0
10	Banjir dan Tanah Longsor	45	17	136	131	30.287	139.658
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		223	27	314	478	90.347	342101
1	Kebakaran	2	1	1	0	14	0
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	6	2	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0
6	Penyakit	3	2	12	18	2.687	1.851
7	Keracunan	0	0	0	0	0	0
8	Gagal Teknologi	1	1	0	0	15	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		12	8	13	18	2.716	1.851
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		0	0	0	0	0	0
Indonesia		235	-	327	496	93.063	343.952

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2025

Jumlah kejadian bencana alam berdampak krisis kesehatan tahun 2024 sebanyak 223 kejadian dengan jumlah korban meninggal sebanyak 314 orang, luka berat 478, luka ringan 90347 orang dan pengungsi sebanyak 342.101 orang, sedangkan untuk kejadian bencana non alam yang berdampak krisis Kesehatan ada 12 kejadian dengan jumlah korban meninggal 13 orang, korban luka berat 18 orang, korban luka ringan 2716 orang dan pengungsi sebanyak 1851 orang. Untuk bencana sosial memang tidak ada kejadian yang berdampak krisis kesehatan.

H. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji dan umrah agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat ajaran agama Islam, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan saja dari aspek umum dan ibadah, tetapi juga dari aspek kesehatan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji melingkupi kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam rangka menjamin kesiapan jemaah sebelum keberangkatan, diperlukan adanya kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual. Sejak tahun 2018, penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mulai menerapkan konsep Istitaah yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji. Permenkes ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan istitaah kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten/kota.

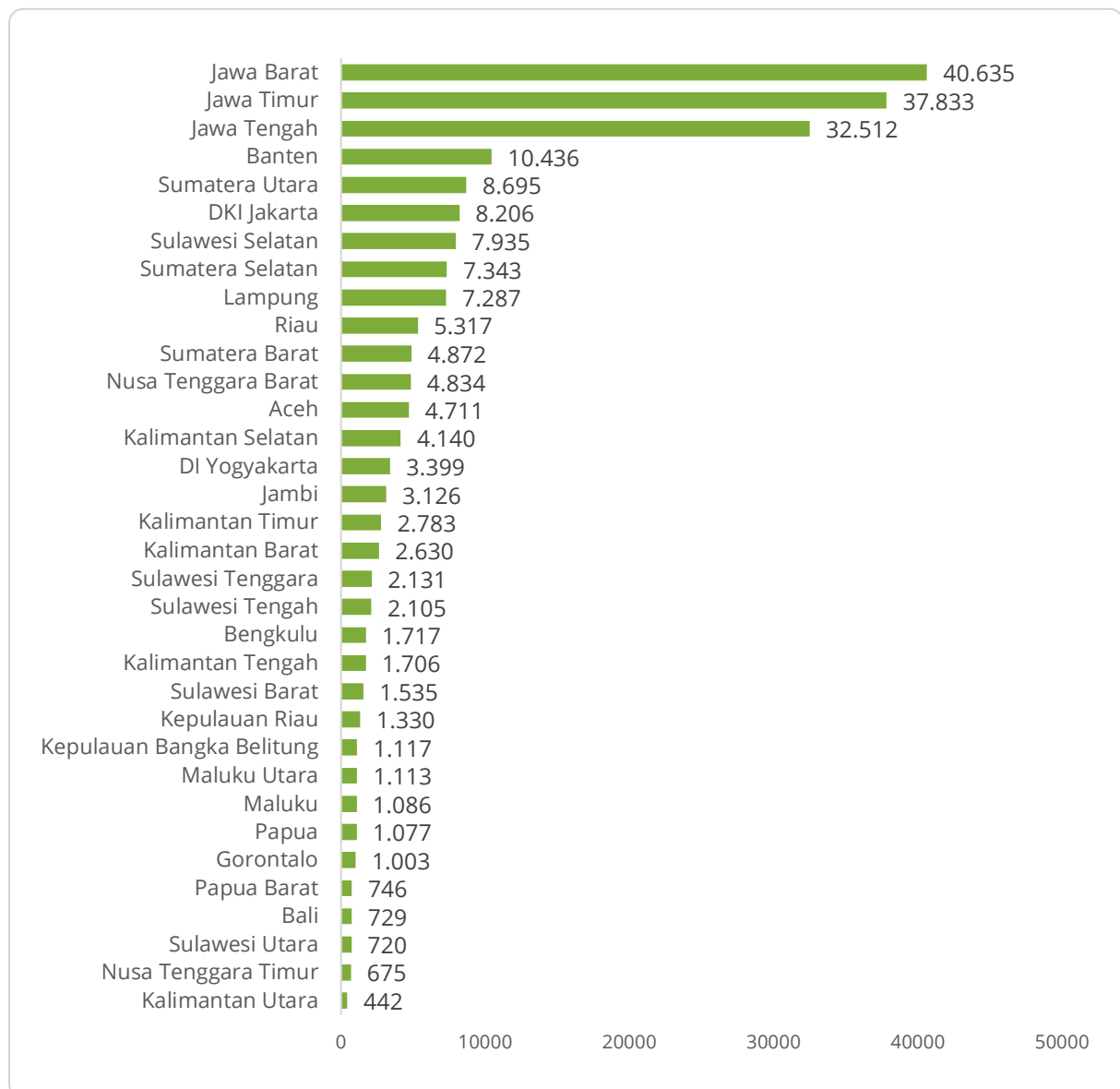
Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan yang terdiri dari Tim Asistensi, Tim Manajerial, Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP), Tim Gerak Cepat (TGC), serta Tim Pendukung Kesehatan (TPK). PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan paradigma penguatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan kuratif serta pola pendekatan deteksi dini kasus kesehatan dan pelayanan respon kegawatdaruratan. Penyelenggaraan kesehatan haji dengan konsep tersebut merupakan konsep operasional kesehatan haji yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 -2019 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2023.

Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah Arab Saudi menutup sementara pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji yang berasal dari luar negeri pada tahun 2020 dan 2021, ibadah haji hanya dibolehkan untuk penduduk yang bermukim di wilayah Arab Saudi. Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyiapkan kesehatan dan kebugaran jemaah haji asal Indonesia selama status pandemi tahun 2020-2021 yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji. Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi pandemi pada 2022, maka pemerintah Arab Saudi pada tahun 2022 mulai menerima jemaah haji yang berasal dari luar negeri, termasuk dari Indonesia.

1. PROFIL JEMAAH HAJI INDONESIA

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia memberangkatkan 215.926 jemaah haji reguler. Provinsi dengan jumlah jemaah haji terbanyak juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan 40.635 jemaah, yang diikuti dengan Jawa Timur dengan 37.833 jemaah, dan Jawa Tengah dengan 32.512 jemaah. Sedangkan provinsi dengan jumlah jemaah haji paling sedikit berasal dari Provinsi Kalimantan Utara (442 jemaah), Nusa Tenggara Timur (675 jemaah), dan Sulawesi Utara (720 jemaah).

GAMBAR 6.78
JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

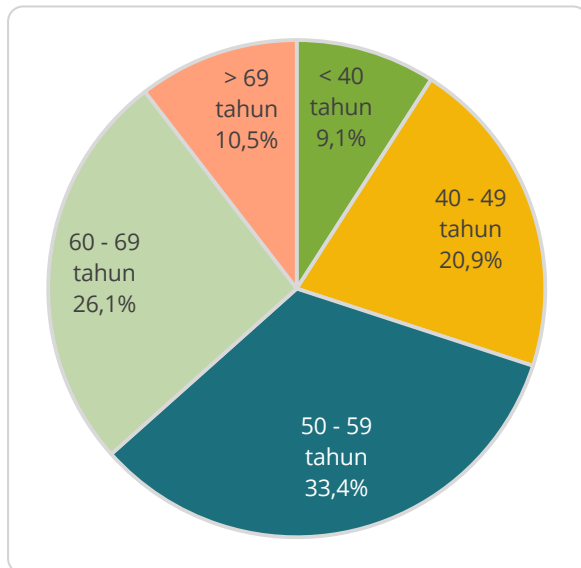


Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

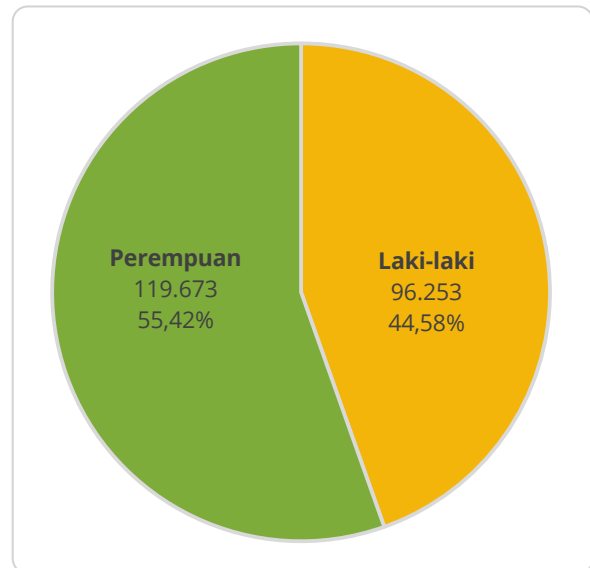
Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2024 menurut kelompok umur, sebagian besar berada pada kelompok umur 50-59 tahun, yaitu sebesar 33,4% atau sebanyak 72.073 jemaah. Kelompok umur terbanyak kedua adalah 60-69 tahun sebesar 26,1% yaitu sebanyak 56.443 jemaah. Jika dijumlahkan, sebesar 59,5% jemaah haji reguler Indonesia yang berangkat pada

tahun 2024 berumur diatas 50 tahun. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok populasi pra lansia (lanjut usia) dan lansia merupakan kelompok rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah, PPIH, TKHI, dan juga pihak lain yang terkait.

GAMBAR 6.79
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2024



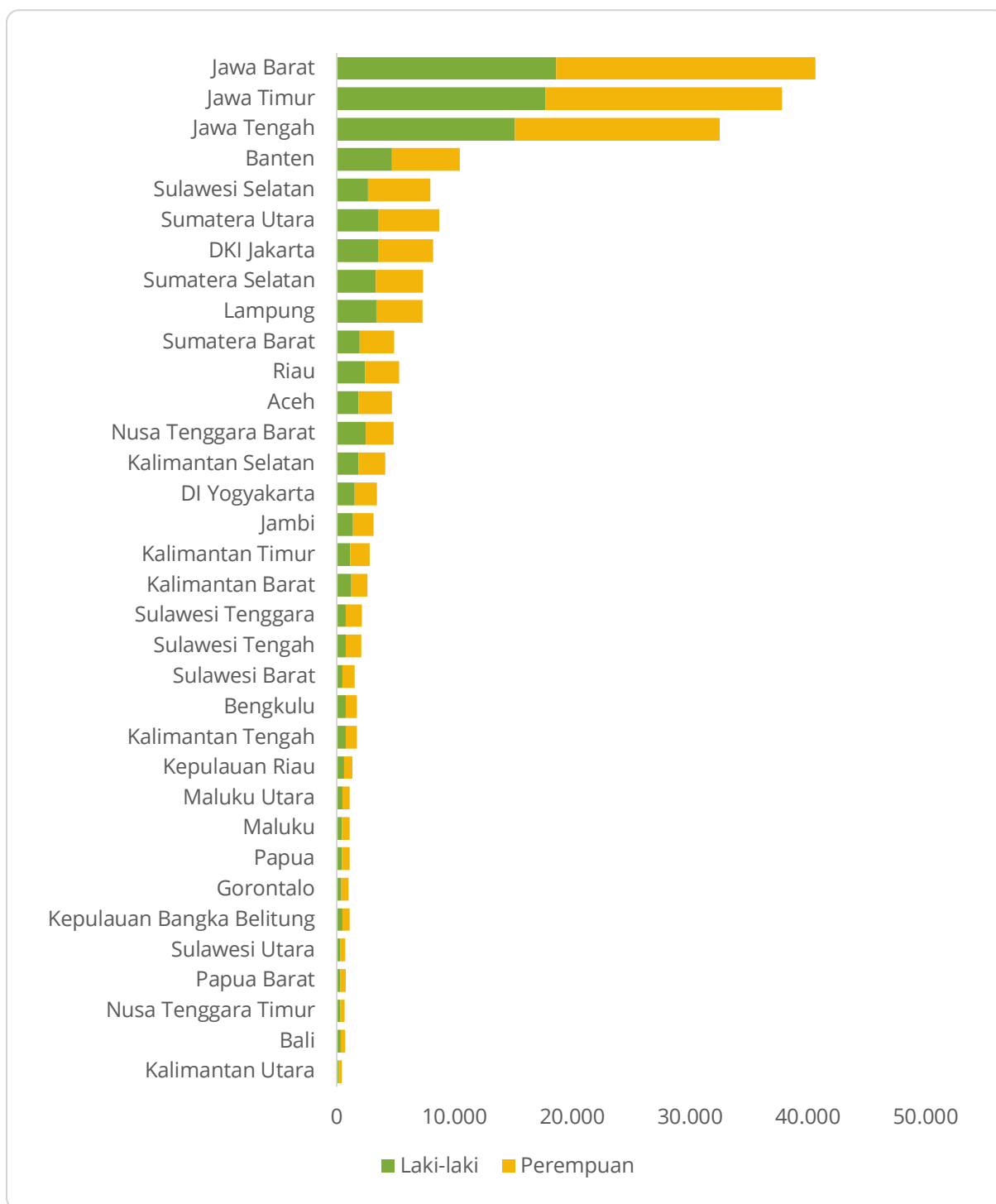
GAMBAR 6.80
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2024



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

Dari 215.926 jemaah haji Indonesia di tahun 2024, sebesar 55,4% diantaranya atau sebanyak 119.673 jemaah berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya atau sebanyak 96.253 jemaah merupakan jemaah laki-laki. Data tersebut memberikan tantangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara haji untuk dapat lebih memperhatikan fasilitas/pelayanan kepada para jemaah perempuan.

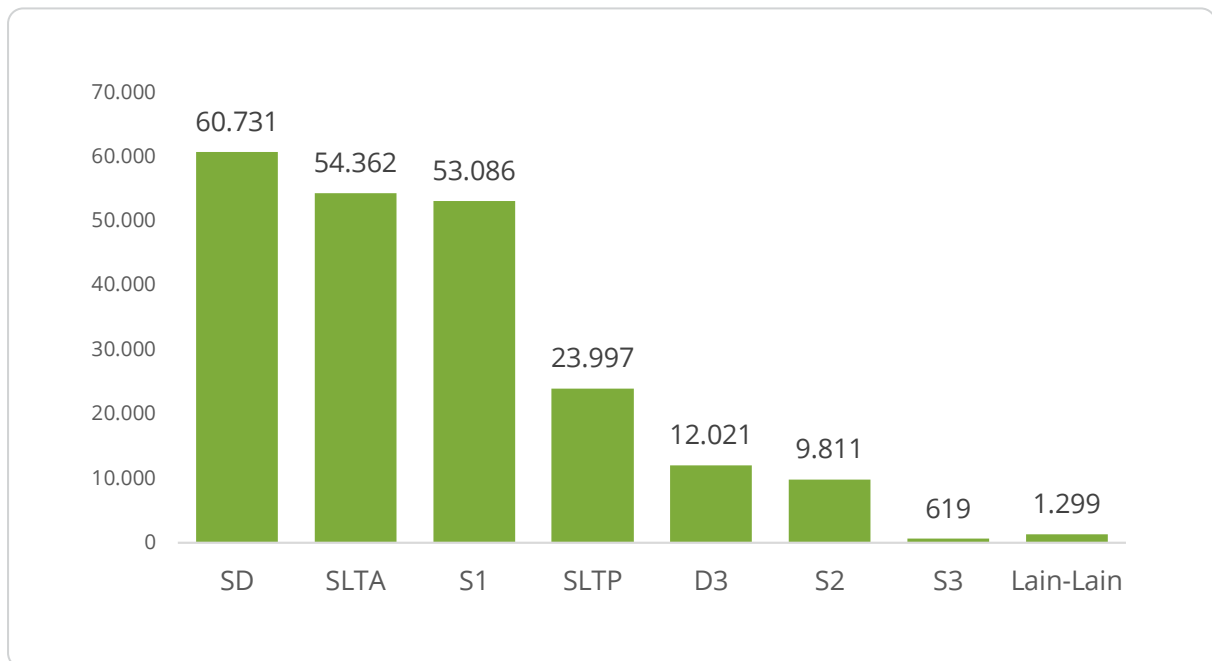
GAMBAR 6.81
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
DAN PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, kelompok jemaah haji dengan pendidikan SD merupakan yang terbanyak yaitu sebesar 28,1% atau sebanyak 60,731 jemaah diikuti oleh pendidikan SLTA sebanyak 25,2% atau 54,362 jemaah dan pendidikan SI sebanyak 24,6% atau 53,086 jemaah.

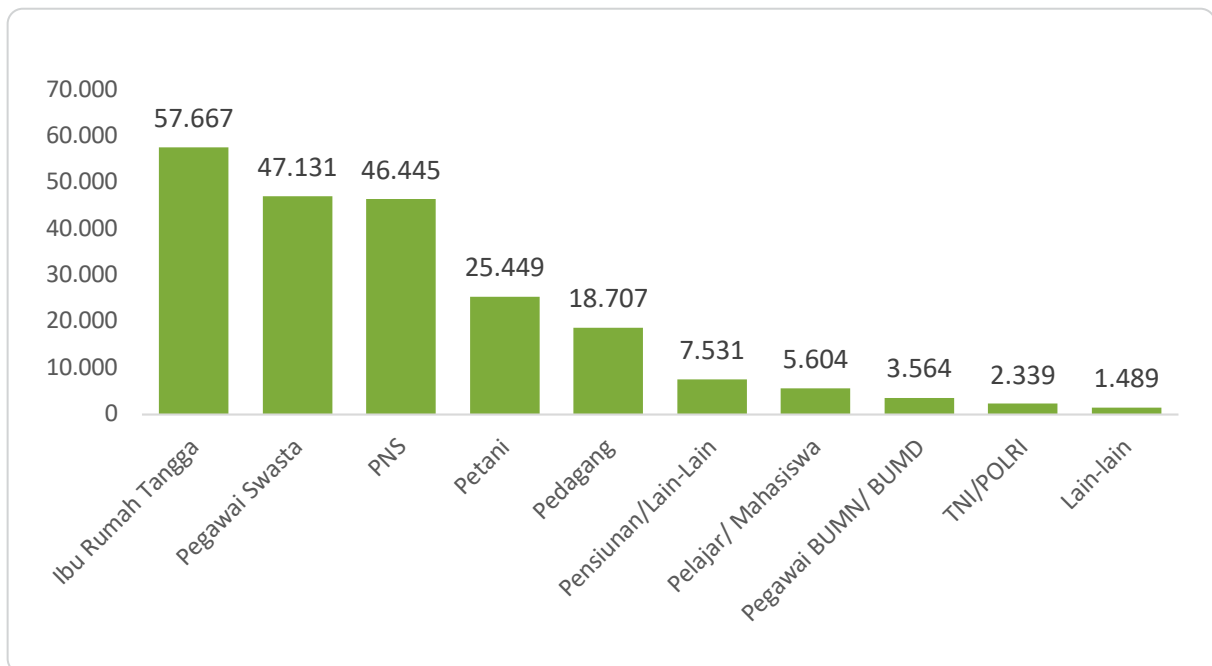
GAMBAR 6.82
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2024



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

Berdasarkan jenis pekerjaannya, proporsi terbesar pekerjaan jemaah haji Indonesia pada tahun 2024 adalah ibu rumah tangga (26,7%), pegawai swasta (21,8%), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) (21,5%). Proporsi terkecil kelompok pekerjaan jemaah haji adalah TNI/POLRI (1,1%) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (1,7%).

GAMBAR 6.83
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2024



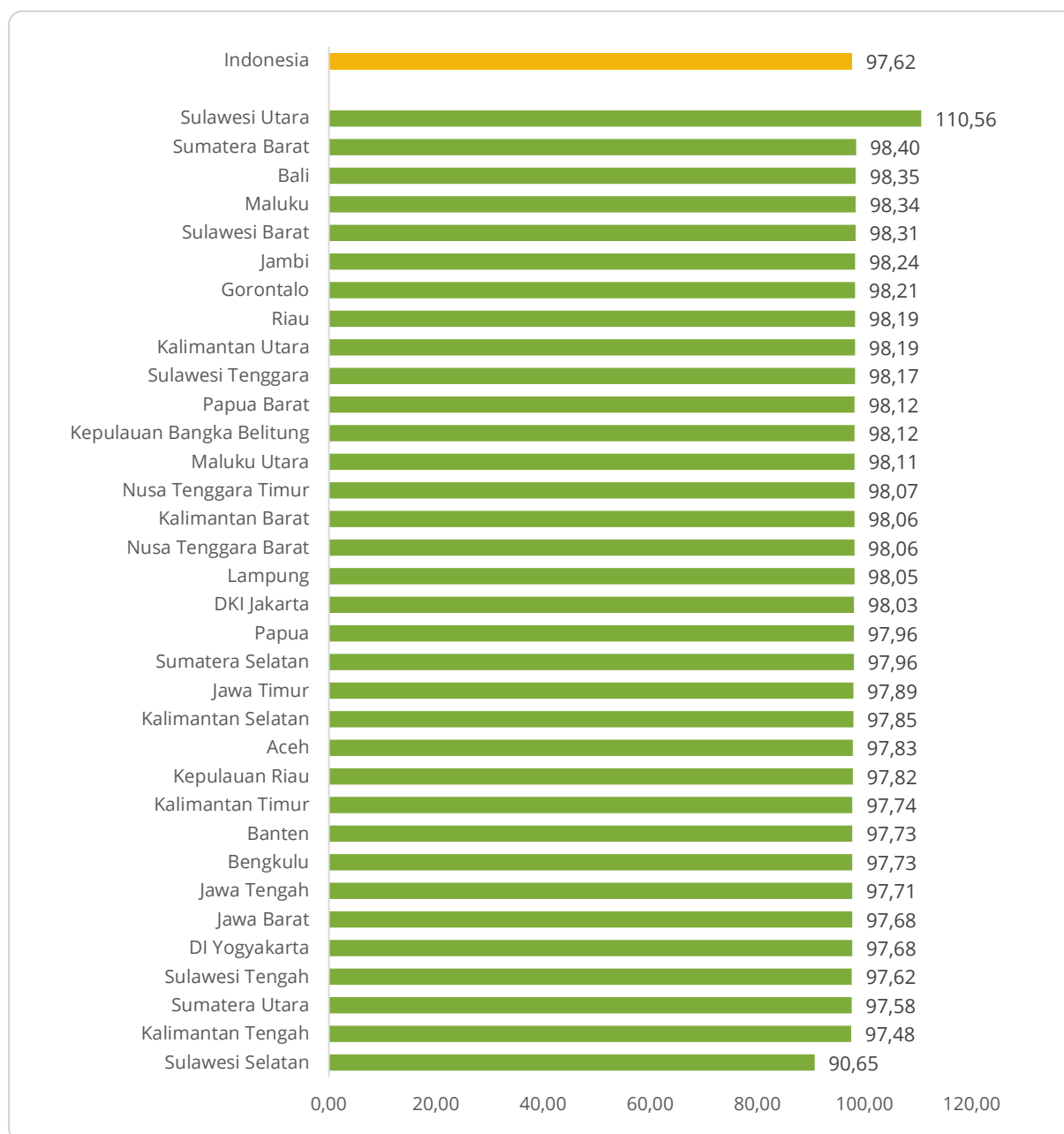
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

2. PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar yang diinput kedalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) sebelum operasional haji. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Haji, terdapat tiga tahapan pemeriksaan kesehatan untuk jemaah haji. Namun, tidak berarti bahwa seluruh jemaah haji harus melalui ketiga tahapan tersebut. Jika pada pemeriksaan tahap pertama jemaah haji tersebut dinyatakan sehat/tidak berisiko tinggi (risti), maka pemeriksaan kesehatan tahap kedua tidak perlu dilakukan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilaksanakan di Puskesmas, pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilaksanakan di rumah sakit, dan pemeriksaan tahap ketiga dilaksanakan di asrama haji. Setiap proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji menuju istitaah dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di kabupaten/kota dan asrama haji.

Pada tahun 2024 Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 209.880 jemaah haji dengan capaian pemeriksaan sebesar 97,62%. Belum semua provinsi dapat memenuhi target yang sebesar 100%. Provinsi dengan persentase pemeriksaan kesehatan terendah ialah Sulawesi Selatan (90,65%). Masih terdapat sekitar 2,4% jemaah haji yang tidak melakukan pemeriksaan.

GAMBAR 6.84
CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2024



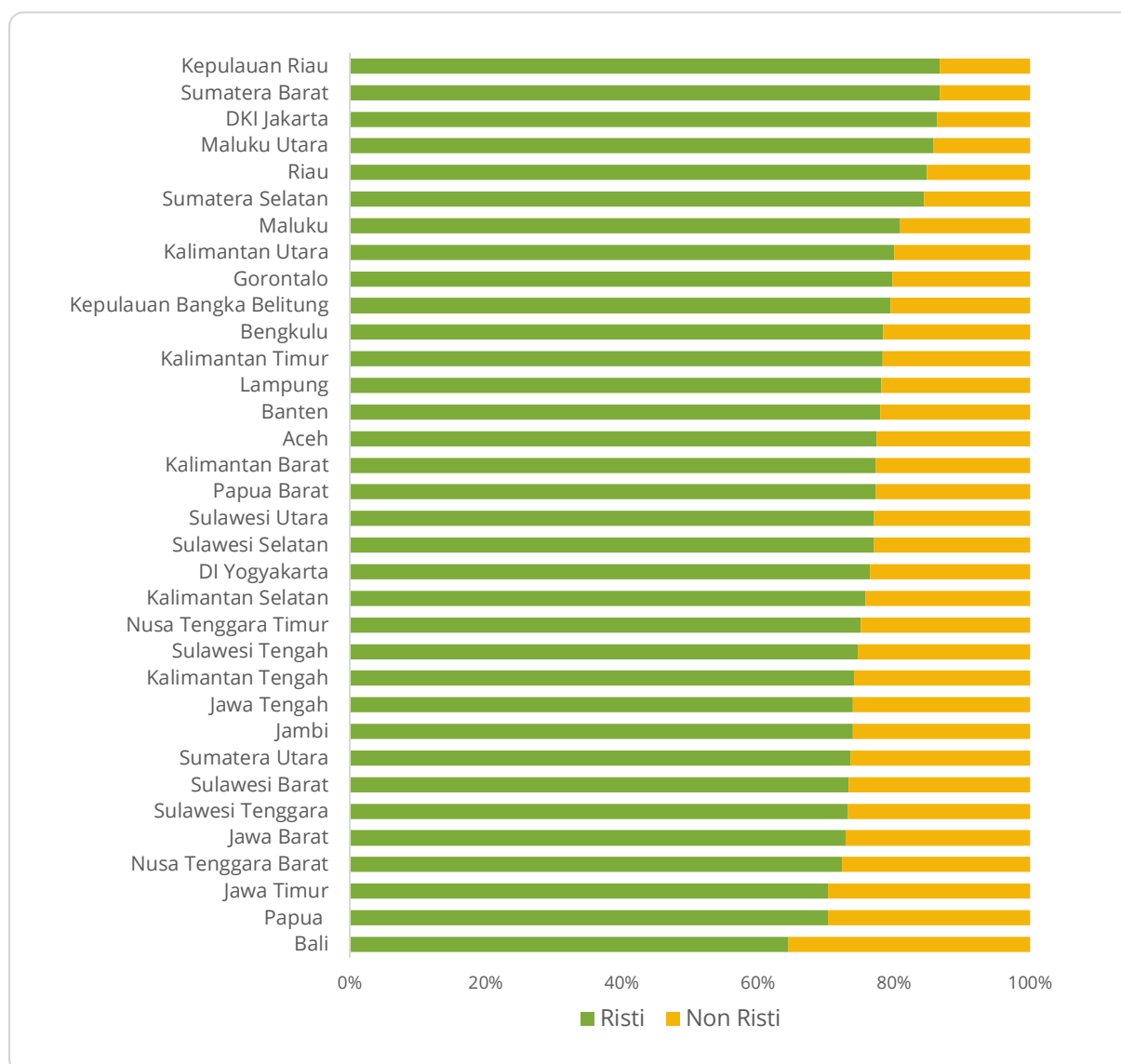
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

3. PEMBINAAN JEMAAH HAJI

Istitaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan istitaah kesehatan haji yang merupakan kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur, diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Melalui implementasi istitaah juga, faktor risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, jemaah haji tergolong risti jika memenuhi tiga kriteria, yaitu berusia ≥ 60 tahun dengan penyakit, berusia < 60 tahun dengan penyakit, dan berusia > 60 tahun tanpa penyakit.

GAMBAR 6.85
PROPORSI JEMAAH HAJI RISIKO TINGGI DAN NON RISIKO TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

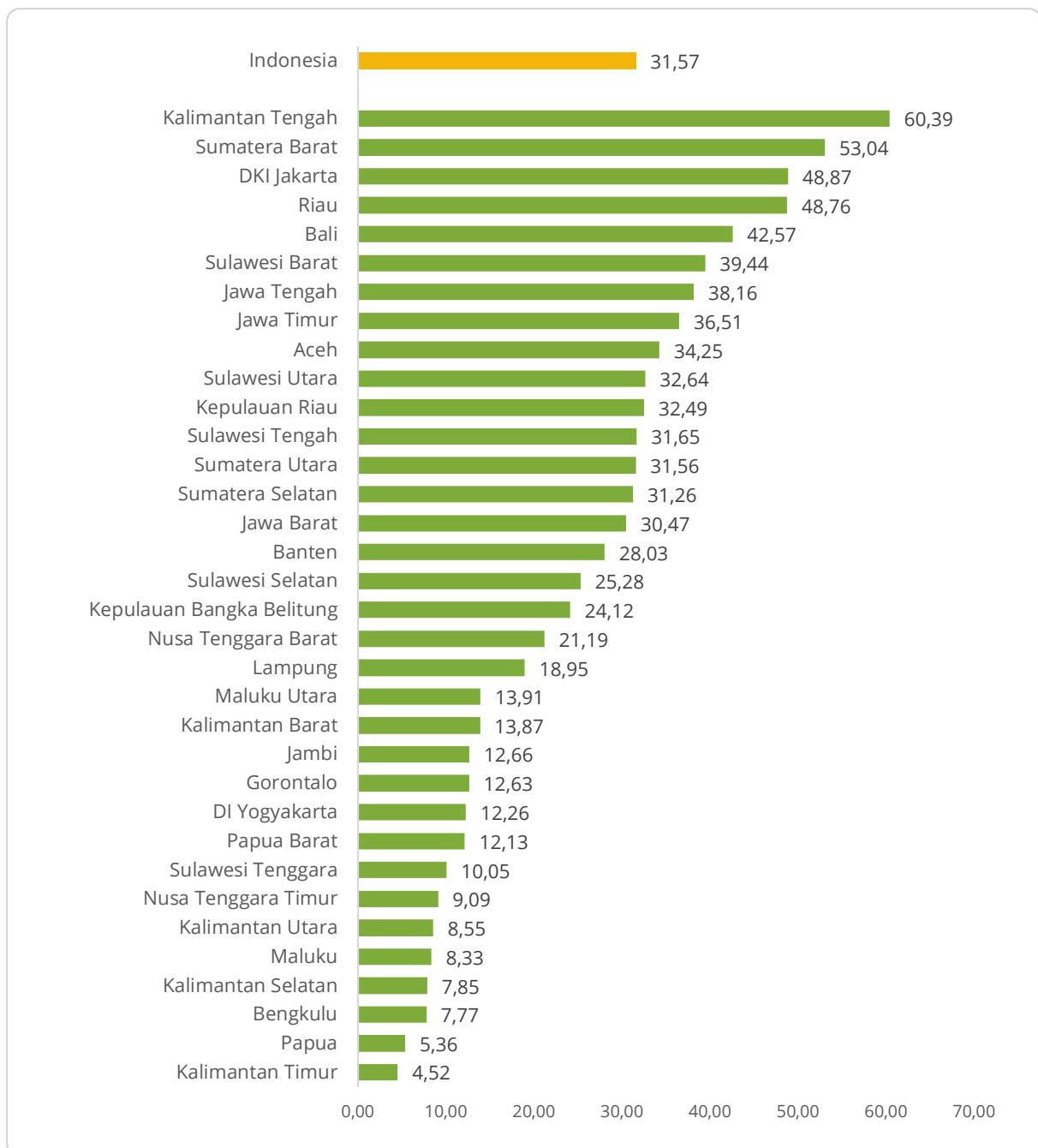


Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, sebagian besar (75,6%) jemaah haji Indonesia merupakan jemaah haji risti. Provinsi dengan proporsi terbesar jemaah haji risti adalah Kepulauan Riau (86,7%), Sumatera Barat (86,67%), dan DKI Jakarta (86,36%). Provinsi dengan proporsi terkecil jemaah haji risti adalah Bali (64,44%), Papua (70,24%), dan Jawa Timur (70,26%).

Besarnya persentase dan jumlah jemaah haji risti pada tahun 2024 menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara kesehatan haji harus memberikan perhatian yang lebih terhadap pelayanan kesehatan jemaah haji. Kementerian Kesehatan melakukan program pembinaan kepada jemaah haji termasuk kepada jemaah haji risti. Provinsi dengan persentase tertinggi jumlah Jemaah risti yang dibina adalah Kalimantan Tengah (60,39%) dan Sumatera Barat (53,04%), sedangkan persentase terendah adalah Kalimantan Timur (4,52%) dan Papua (5,36%).

GAMBAR 6.86
PROPORSI JEMAAH HAJI RISIKO TINGGI YANG DIBINA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

4. POLA MORBIDITAS DAN MORTALITAS JEMAAH HAJI

Masa operasional pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dimulai dari pemberangkatan jemaah haji atau embarkasi, pra Armuzna, Armuzna, dan pasca Armuzna, berlanjut hingga pengembalian jemaah haji ke Indonesia atau ke debarkasi. Armuzna sendiri merupakan singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ketiganya merupakan nama tempat yang terkait dengan inti pelaksanaan kewajiban ibadah haji.

Pada tahun 2024, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum keberangkatan, diketahui bahwa sepuluh penyakit berisiko tinggi terbanyak yang diderita oleh jemaah haji yaitu diantaranya *Hypertensive diseases/I10* sebanyak 40,454 kasus, *Pure hypercholesterolaemia /E78.0* (16,079 kasus), dan *Hyperlipidaemia, unspecified /E78.5* (13.159 kasus).

TABEL 6.2
SEPULUH PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER
DI INDONESIA TAHUN 2024

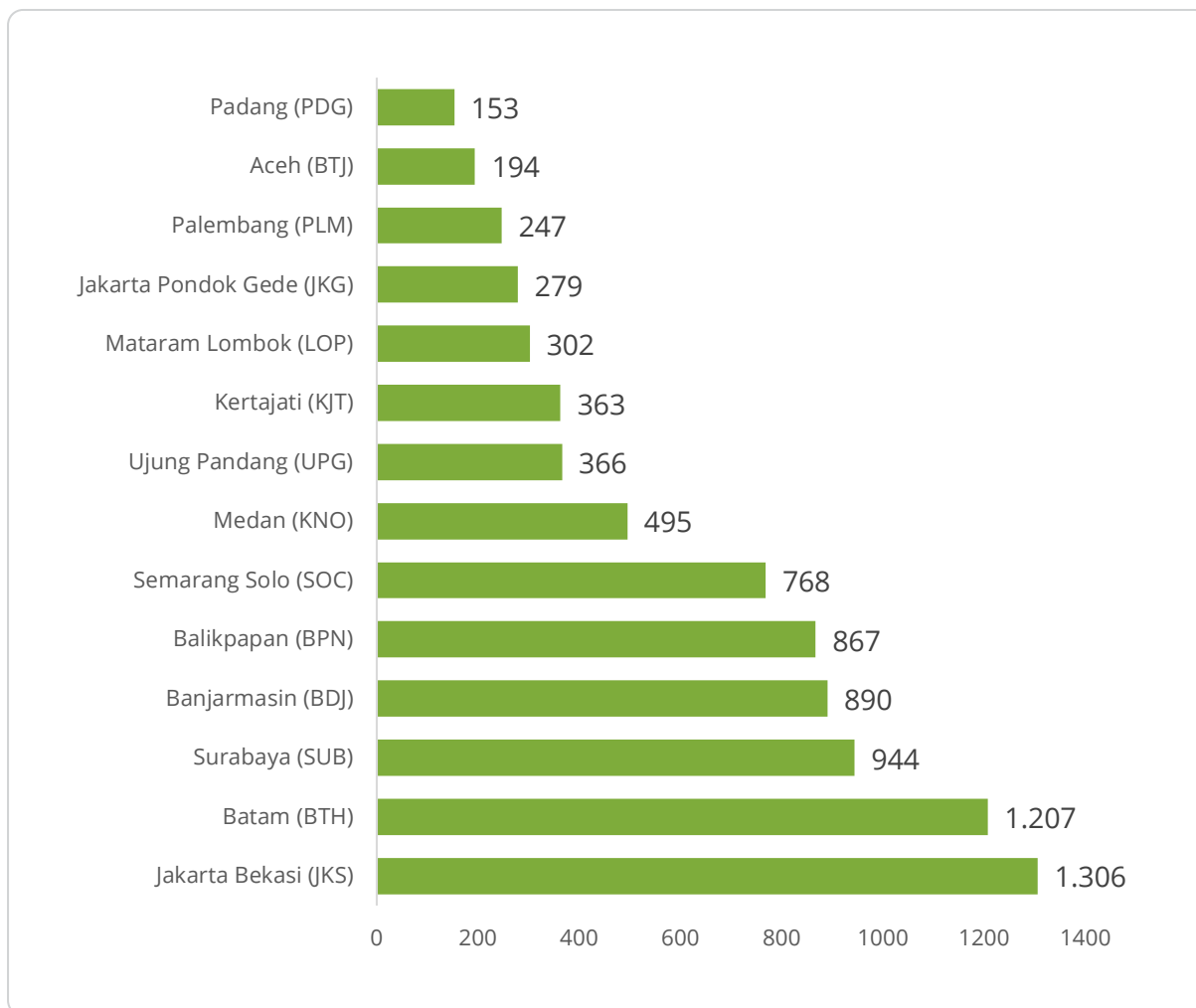
No	Nama Penyakit	Kode ICD-X	Jumlah Kasus
1	<i>Essential (primary) hypertension</i>	I10	40.454
2	<i>Pure hypercholesterolaemia</i>	E78.0	16.079
3	<i>Hyperlipidaemia, unspecified</i>	E78.5	13.159
4	<i>General examination and investigation of perons withuot reported diagnosis</i>	E10-E14	17.536
5	<i>Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias</i>	E78	8.412
6	<i>Cardiomegaly</i>	I51.7	6.533
7	<i>Hypertensive heart disease</i>	I11	3.737
8	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications</i>	E11.9	2.885
9	<i>Obesity</i>	E66	2.036
10	<i>Pure hyperglyceridaemia</i>	E78.1	1.757

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024 (pemeriksaan kedua)

Jumlah tenaga kesehatan yang ditugaskan didalam setiap kloter terdiri dari tiga orang, yaitu satu dokter dan dua perawat. Ketiga orang tenaga kesehatan tersebut bisa melayani 350-400 jemaah haji dalam kloternya masing-masing. Semakin sering jemaah haji berobat kepada tenaga kesehatan yang bertugas, semakin panjang waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan untuk melayani jemaah. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengurangi frekuensi berobat jalan para jemaah haji.

Pada tahun 2024, jumlah terendah jemaah haji yang rawat jalan berasal dari embarkasi Padang (PDG) (153 jemaah) dan Aceh (BTJ) (194%), sedangkan jumlah terbanyak berasal dari embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) (1.306 jemaah) dan Batam (BTH) (1.207 jemaah). Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan di tanah air sebelum keberangkatan jemaah haji.

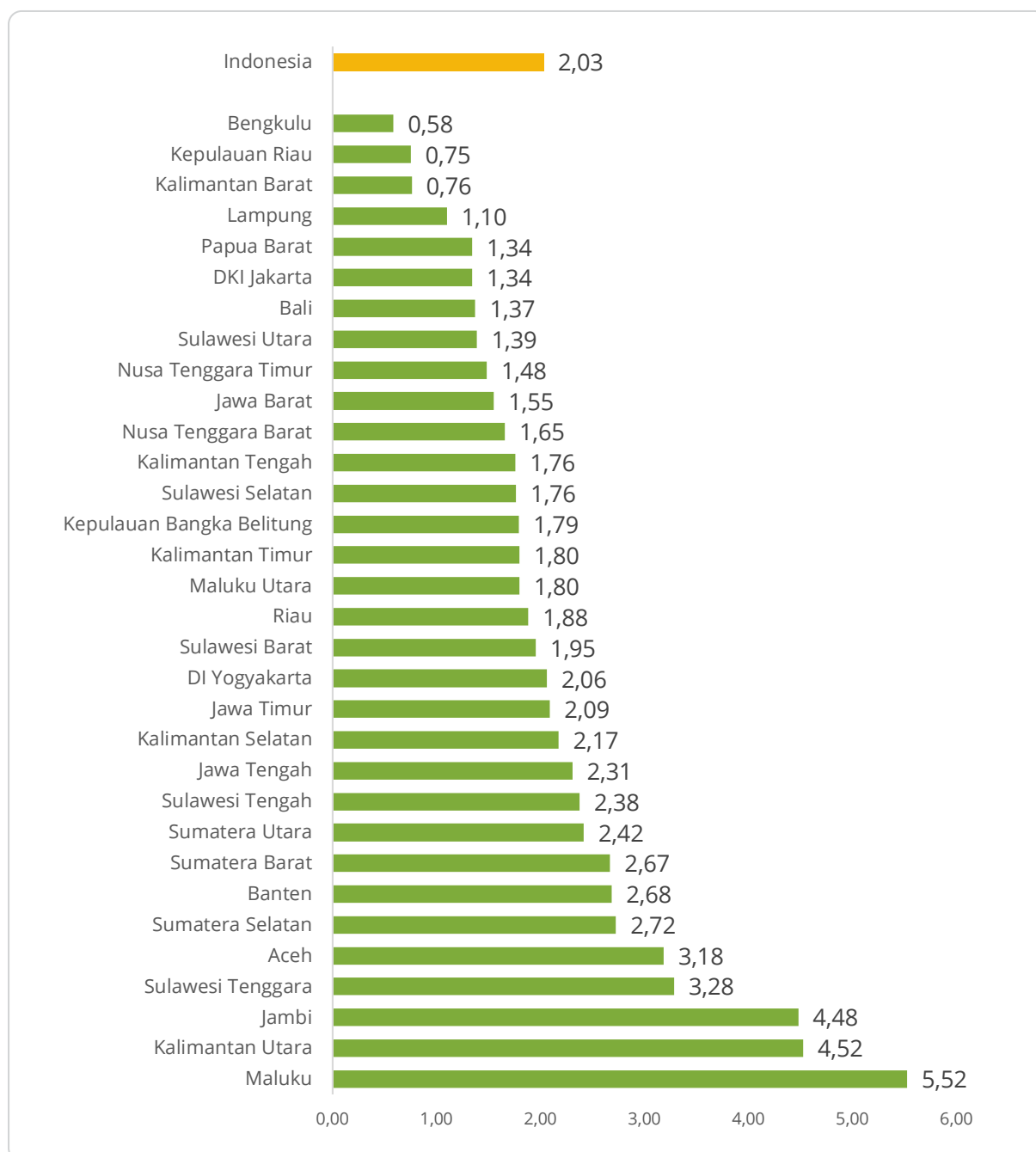
GAMBAR 6.87
JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT EMBARKASI
TAHUN 2024



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

Meski pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan terhadap jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, tetapi masih terdapat jemaah haji yang wafat di tanah suci. Terdapat 438 jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun 2024. Jumlah terbanyak jemaah haji yang wafat berasal dari Provinsi Jawa Timur (79 jemaah), Jawa Tengah (75 jemaah), dan Jawa Barat (63 jemaah). Provinsi dengan jumlah terendah jemaah haji yang wafat adalah Bengkulu (1 jemaah), Kepulauan Riau (1 jemaah), dan Kalimantan Barat (2 jemaah).

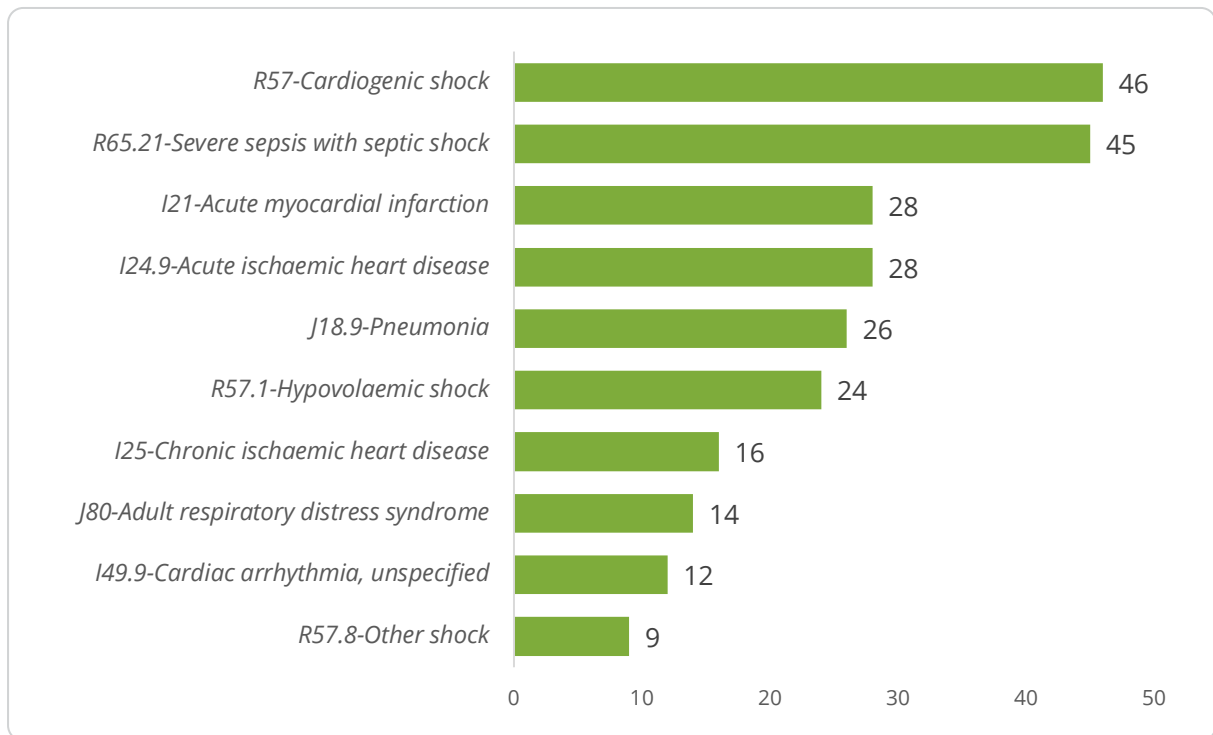
GAMBAR 6.88
PROPORSI JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

Dari seluruh jemaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci, terdapat sepuluh penyakit terbanyak penyebab kematian jemaah haji pada tahun 2024. Penyakit penyebab kematian terbanyak pada jemaah haji reguler tahun 2024 yaitu Cardiogenic Shock (46 jemaah), Severe sepsis with septic shock (45 jemaah), Acute ischaemic heart disease (28 jemaah), Acute myocardial infarction, unspecified (28 jemaah), Pneumonia (26 jemaah), Hypovolaemic shock (24 jemaah), Chronic ischaemic heart disease (16 jemaah), Adult respiratory distress syndrome (14 jemaah), Cardiac arrhythmia (12 jemaah), Other shick (9 jemaah).

GAMBAR 6.89
SEPULUH PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER
INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2025

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN



BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa Upaya Kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada media lingkungan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan pada lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Begitu juga dalam rangka penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada proses pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, hal ini di atur secara detail dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks. Kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (perindustrian, lingkungan hidup, pertanian, pekerjaan umum- perumahan rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

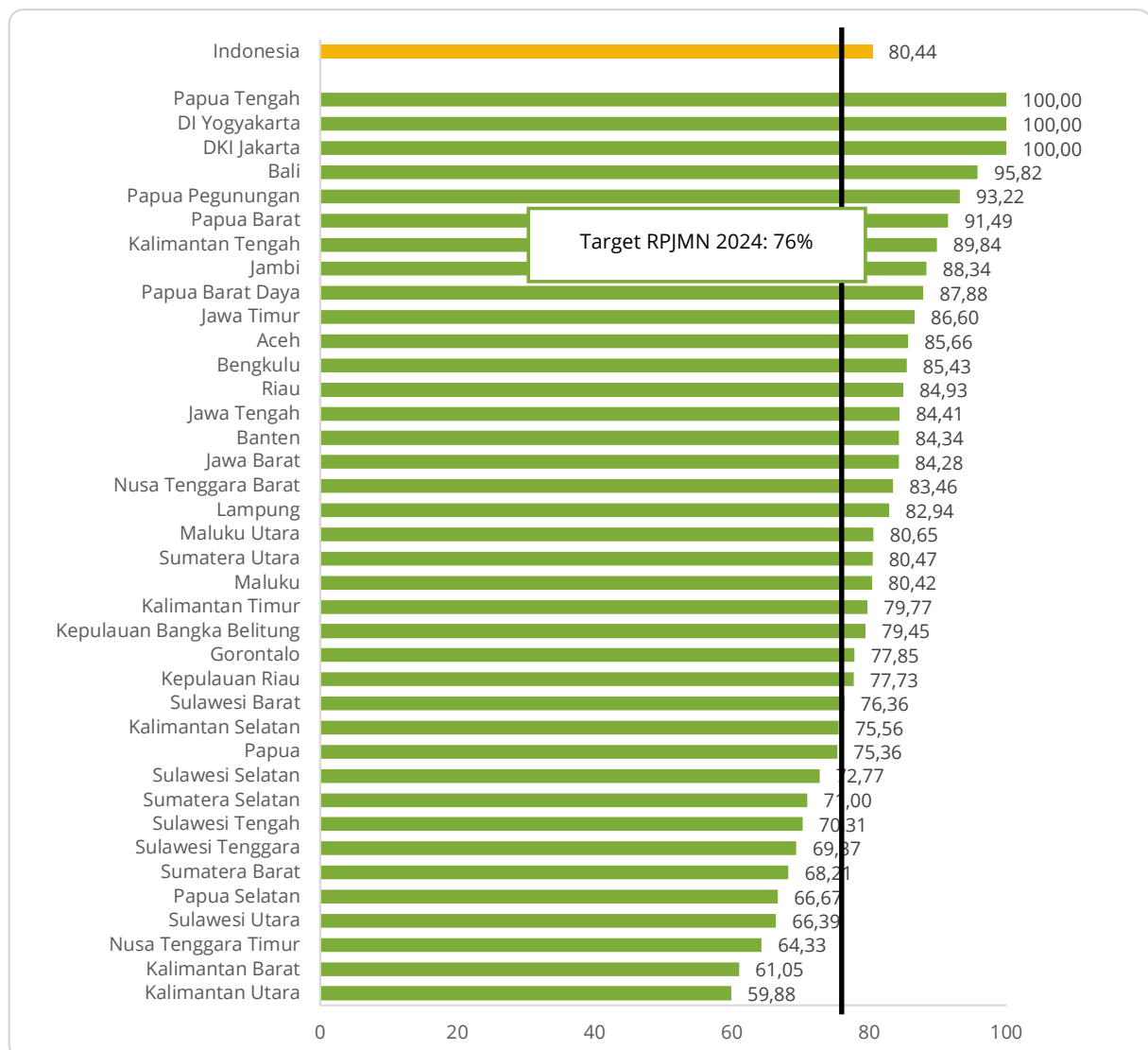
A. AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan terkait Persyaratan Kualitas

Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan secara internal dilakukan oleh pelaksana penyelenggara air minum yaitu Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh tenaga Sanitarian Puskesmas.

GAMBAR 7.1
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional, jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar tahun 2024 sebesar 28.578 dari jumlah keseluruhan total sarana air minum yang sebanyak 35.525 (Gambar 7.1) dengan capaian presentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar tahun 2024 sebesar 80,44%. Angka capaian pengawasan kualitas air minum ini sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, Renstra tahun 2024 sebesar 76%. Terdapat 3 (tiga) Provinsi dengan capaian persentase 100% dalam pengawasan kualitas air minum yaitu Papua Tengah, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi terendah dalam pengawasan kualitas air minum yaitu Kalimantan Utara (59,88%), Kalimantan Barat (61,05%) dan Nusa Tenggara Timur (64,33). Rincian lebih lengkap mengenai persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dapat dilihat di Lampiran tabel 79.a.

Menurut Statistik Indonesia, BPS (2025), rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah:

1. Sumber air minum utama berupa leding, air terlindungi, atau air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung;
2. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan bermerk atau air isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

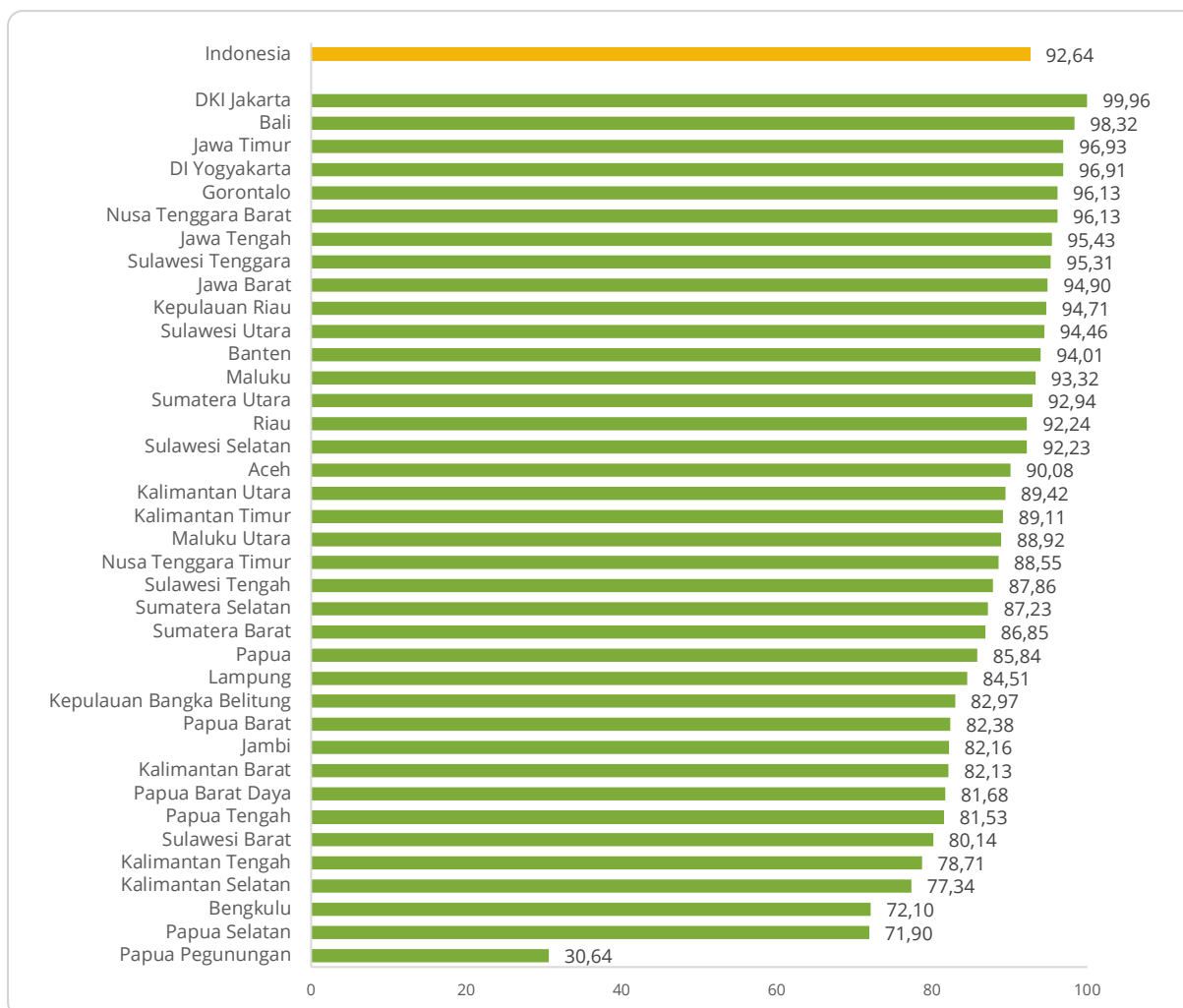
TABEL 7.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA
YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2024

No	Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Provinsi
1	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	56,06	25,93	43,62
2	Leding	10,21	7,54	9,11
3	Sumur Bor/Pompa	16,35	16,74	16,51
4	Sumur Terlindung	10,63	19,89	14,45
5	Sumur Tak Terlindung	1,06	3,54	2,09
6	Mata Air Terlindung, Air Hujan	5,12	20,41	11,43
7	Mata Air Tak terlindung, Air Permukaan, Lainnya	0,56	5,97	2,79

Sumber: Stastistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik , 2024

Data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS (2024), sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerk, air isi ulang (43,62%), sumur bor/pompa (16,51%), dan sumur terlindung (14,45%). Pada daerah perkotaan maupun perdesaan, air kemasan bermerk, air isi ulang merupakan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan, untuk perkotaan sebesar 56,06% dan untuk perdesaan sebesar 25,93%. Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1.

GAMBAR 7.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2025

Secara nasional, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 92,64% (Gambar 7.2). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu DKI Jakarta (99,96%), Bali (98,32%), dan Jawa Timur (96,93%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan (30,64%), Papua Selatan (71,90%), dan Bengkulu (72,10%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 79.b.

B. AKSES SANITASI LAYAK

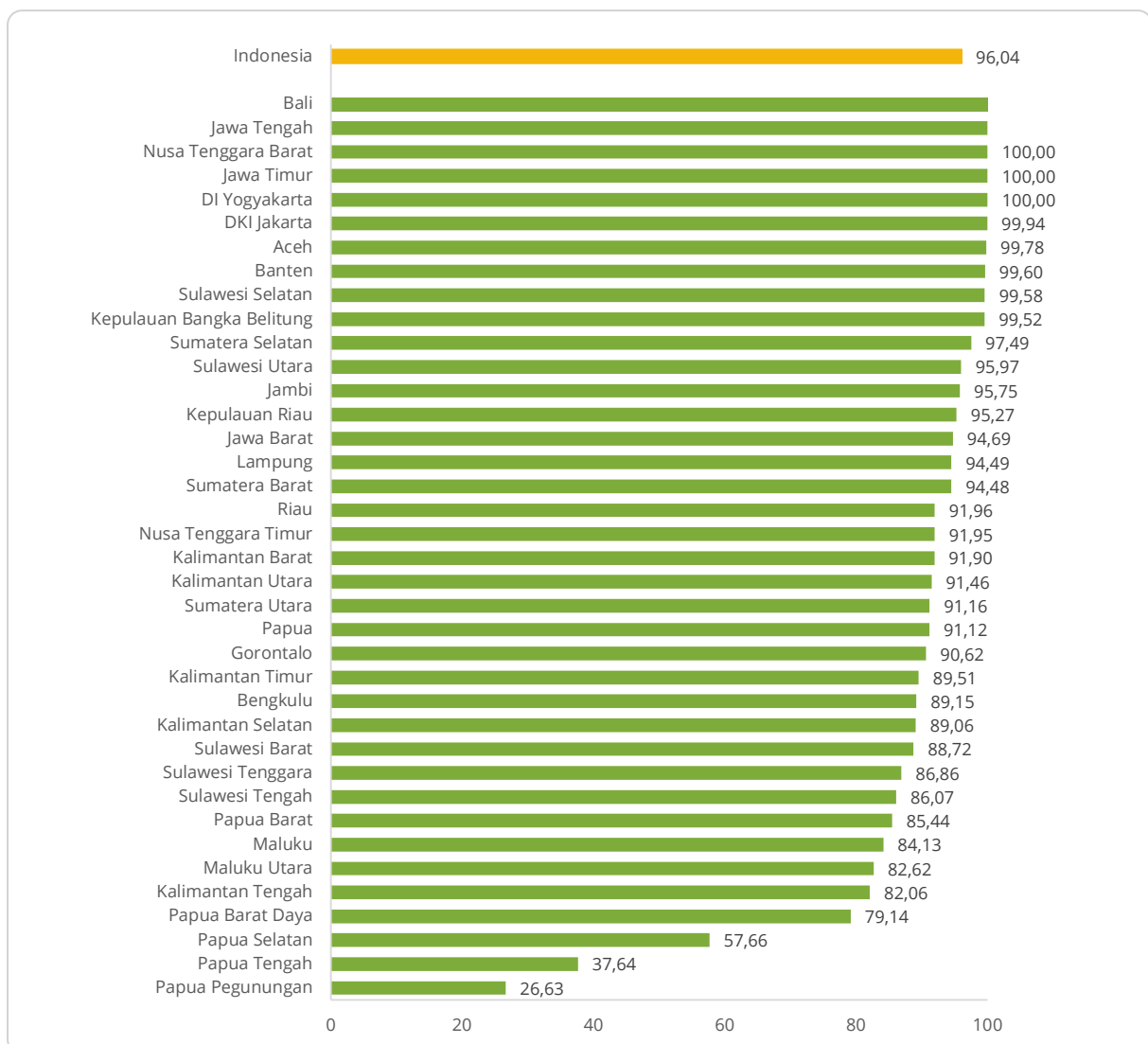
Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya

kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Strategi penyelenggaraan STBM yang meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Peningkatan penyediaan layanan sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang aman dan layak.

Pendataan yang dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas meliputi Kepala Keluarga (KK) dengan akses terhadap penggunaan layanan sanitasi (aman, layak, sharing/numpang dan belum layak) yang tergambar dalam gambar 7.3

GAMBAR 7.3
PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP
FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia tahun 2024 adalah 96,04% sedangkan yang belum mengakses sebesar 3,96%. Terdapat

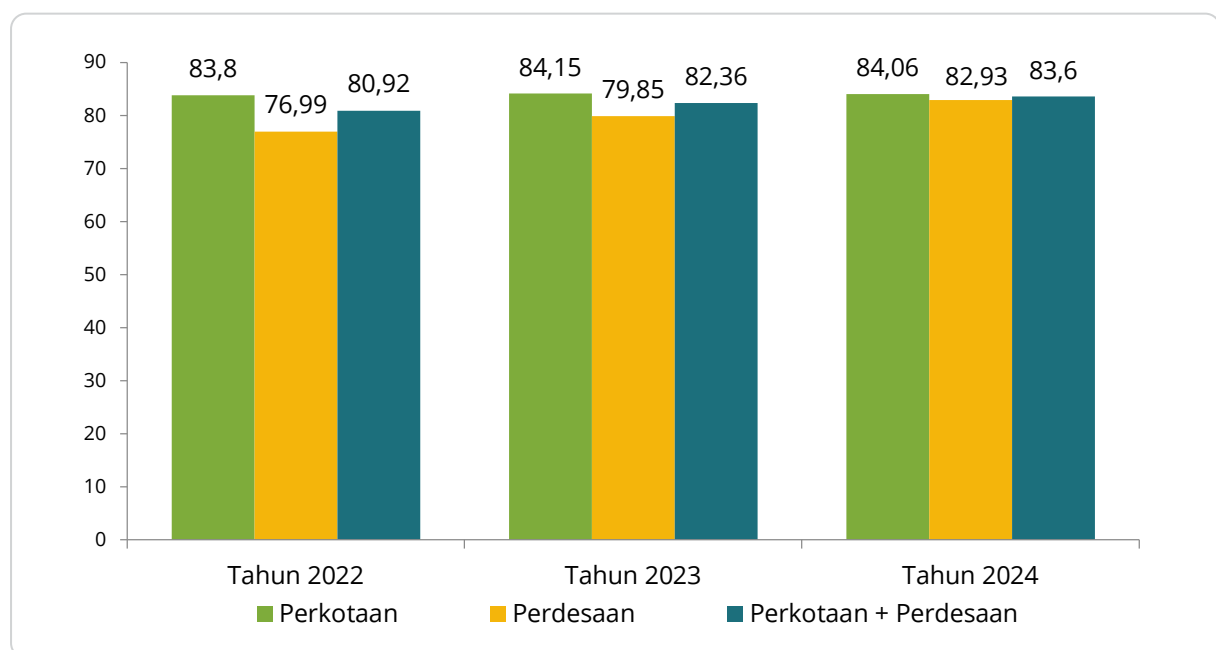
5 (lima) Provinsi dengan persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) mencapai 100% yaitu Provinsi Bali, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta . Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (26,63%), Papua Tengah (37,64%), dan Papua Selatan (57,66%). Rincian lengkap mengenai keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dapat dilihat pada Lampiran 80.

Untuk memenuhi hak asasi manusia, setiap penduduk idealnya memiliki akses ke sanitasi layak. Menurut Statistik Indonesia, BPS (2025), definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain:

- Kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Instalasi/ Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal.
- Untuk daerah perdesaan, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke tangka septic atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL) atau lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, ataupun di MCK Komunal.

Pentingnya akses sanitasi layak di semua kalangan masyarakat berkaitan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk Indonesia.

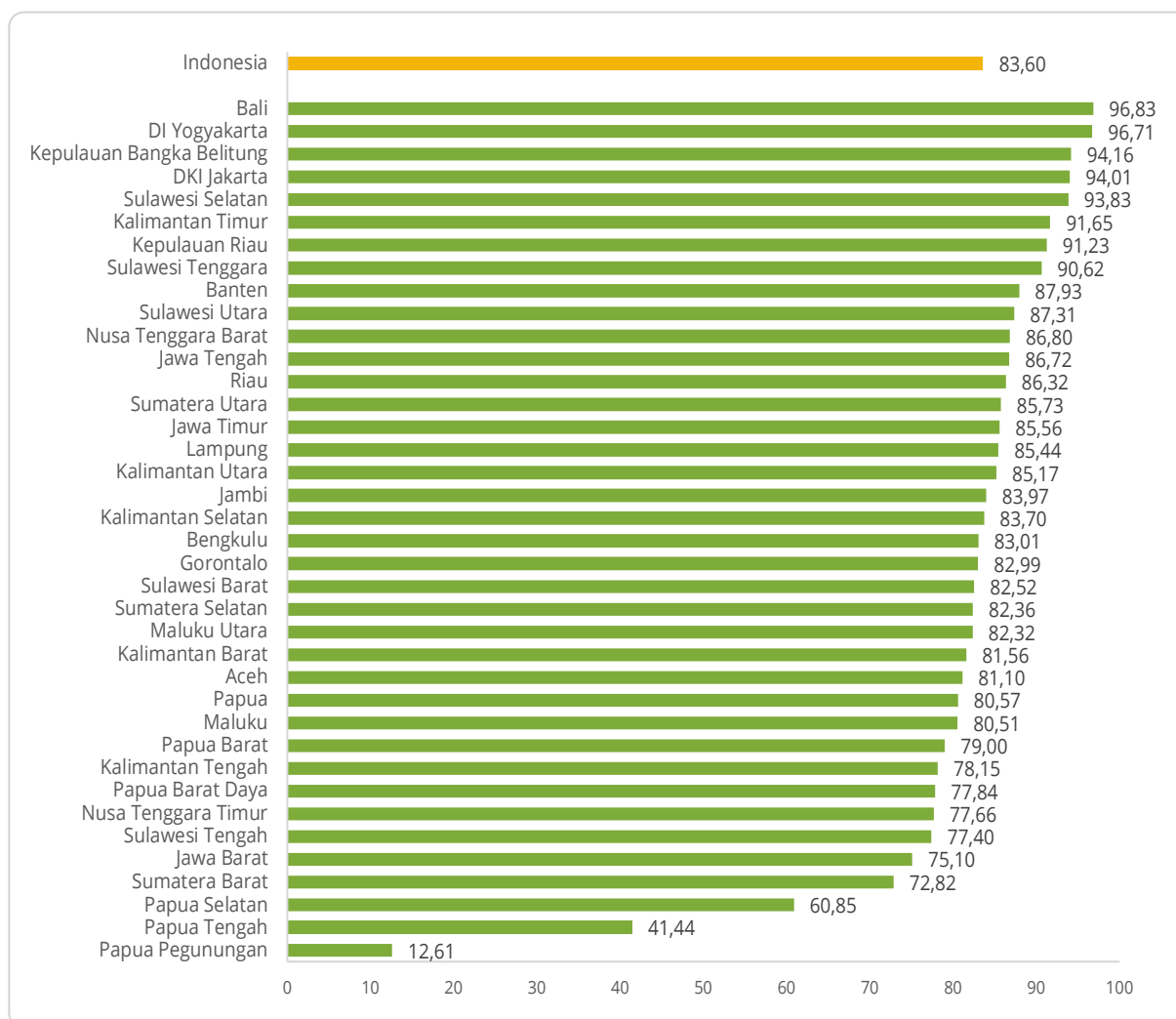
GAMBAR 7.4
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 7.4 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2024 sebesar 2,68%. Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (84,06%) dan (82,93%). Selama periode ini, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar (5,94%) sedangkan daerah perkotaan (0,26%).

GAMBAR 7.5
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2025

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 83,60% (Gambar 7.5). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu Provinsi Bali (96,83%), DI Yogyakarta (96,71%), dan Kepulauan Bangka Belitung (94,16%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (12,61%), Papua Tengah (41,44%), dan Papua Selatan (60,85%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Lampiran 81.a.

C. DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

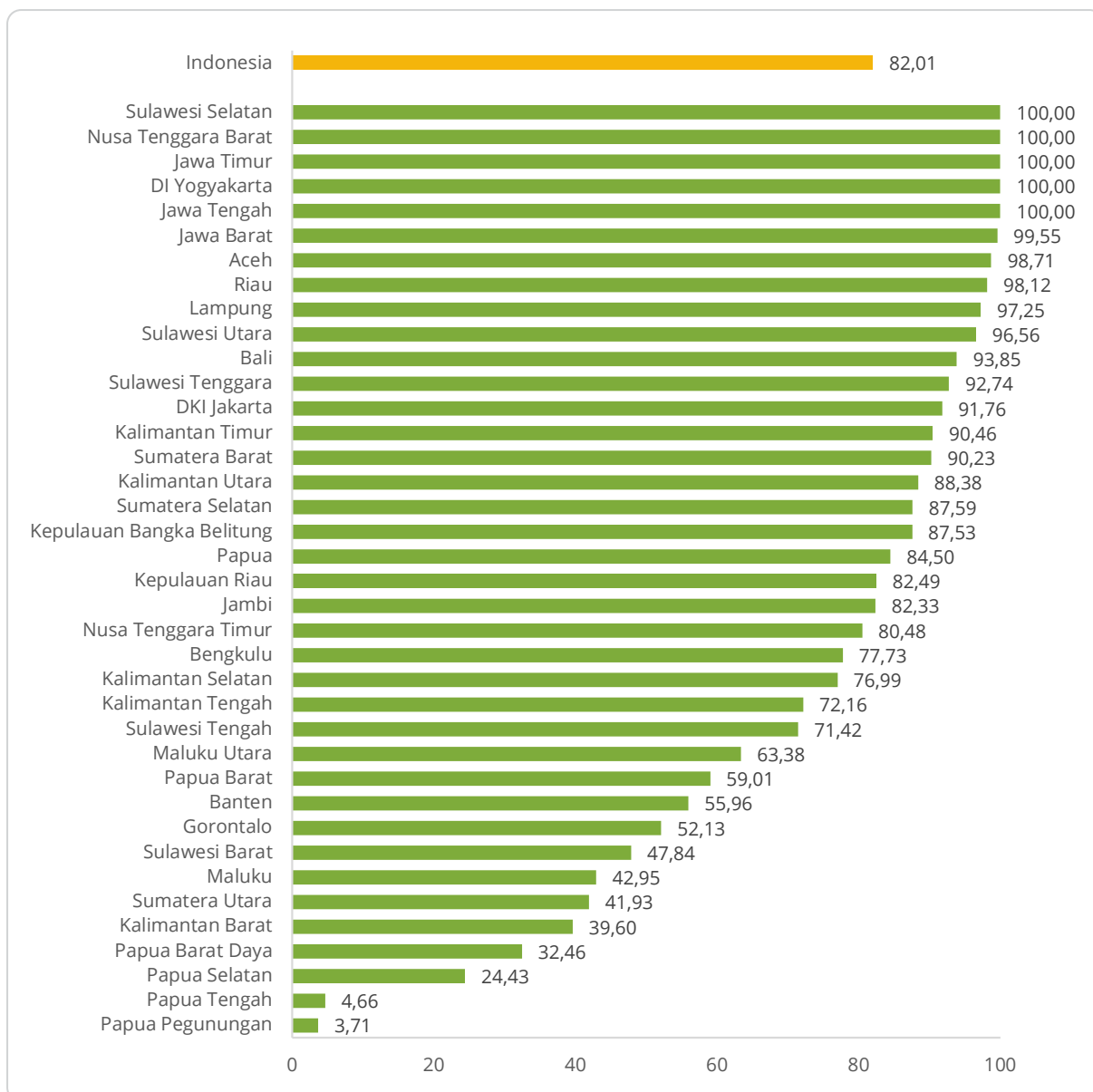
Tujuan penyelenggaraan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 3 adalah untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan mewujudkan pengembangan serta pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan.

Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, dimana salah satu kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Pemerintah menargetkan akses masyarakat pada perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau meningkat pada tahun 2024. Hal ini termasuk target 90% sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman, dan ketiadaan rumah tangga yang BAB sembarangan di tempat terbuka yang menjadi target RPJMN tahun 2024 adalah 90% desa/kelurahan SBS. Upaya tersebut dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM dengan pengertian yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan, dimana outputnya terdiri dari lima pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga.

Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Hal ini merupakan hasil dari adanya perubahan perilaku di masyarakat dalam hal sanitasi berkelanjutan. Adapun capaian desa/kelurahan SBS pada tahun 2024 tercapai 82,01%.

Tangga layanan sanitasi menurut Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Lingkungan dan sektor yang berperan dalam pembangunan sanitasi di daerah adalah Buang Air Besar Sembarangan Terbuka (BABS terbuka), Buang Air Besar Sembarangan Tertutup (BABS tertutup) / Akses sanitasi tidak layak, Akses sanitasi layak bersama, Akses sanitasi layak sendiri dan Akses sanitasi aman.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional, persentase desa/kelurahan SBS tahun 2024 adalah 82,01%. Terdapat 5 (lima) Provinsi yang telah mencapai 100% persentase desa/kelurahan SBS yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan SBS adalah Provinsi Papua Pegunungan (3,71%), Papua Tengah (4,66%), dan Papua Selatan (24,43%). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan SBS tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 81.b.

D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

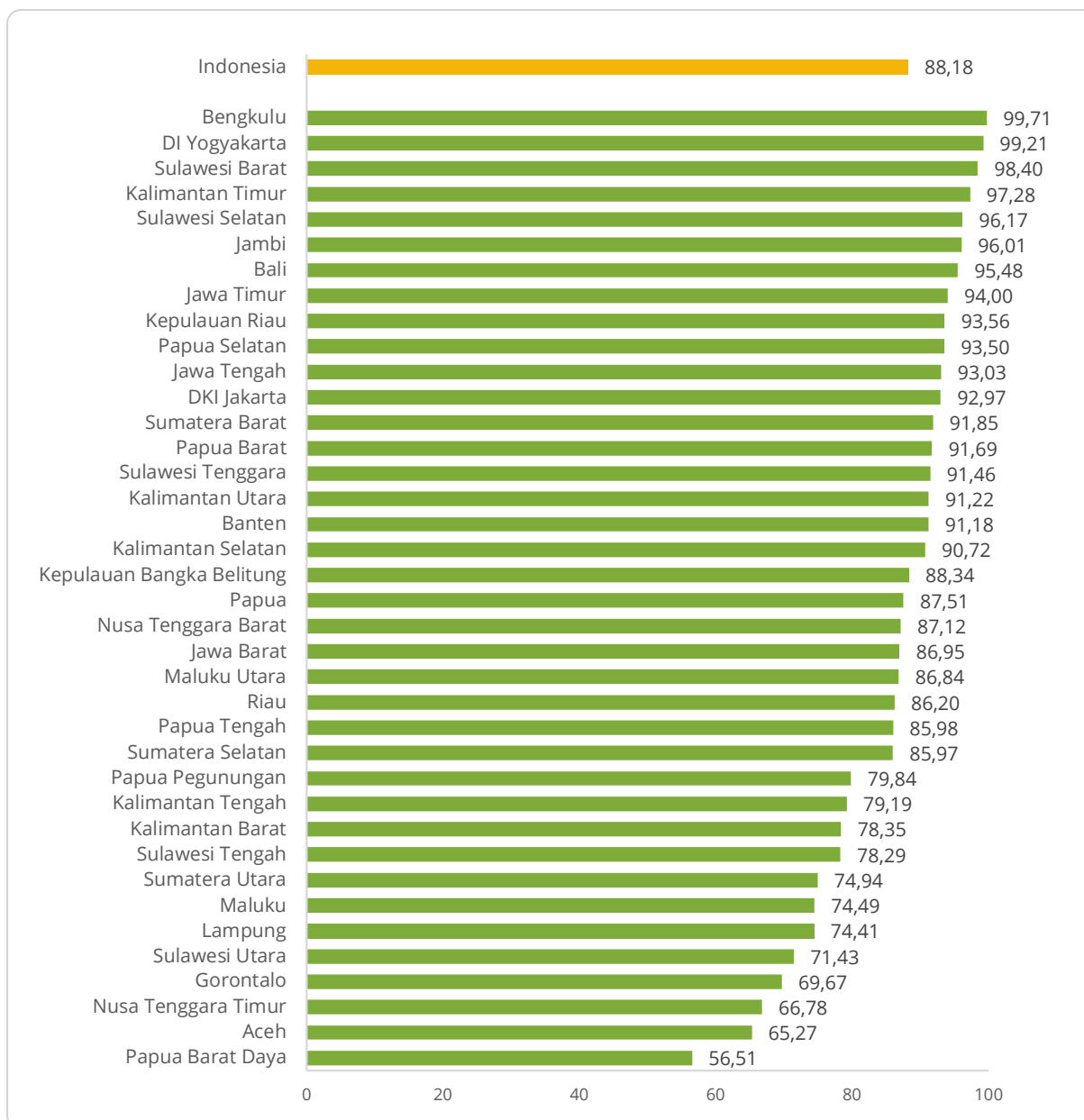
TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah TFU yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Ruang lingkup pengawasan pada TFU telah ditetapkan yaitu pada tiga lokus yang menjadi prioritas sesuai dengan indikator Renstra Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2020 – 2024, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai standar minimal pada 3 (tiga) lokus dari tempat dan fasilitas umum tersebut, yaitu:

1. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;
2. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya;
3. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di Kementerian Perdagangan.

TFU dinyatakan telah dilakukan pengawasan sesuai standar apabila telah dilakukan IKL dengan mengisi form yang sudah ditentukan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan dengan peralatan pendukung (*Sanitarian Kit*) yang tersedia di Puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit akibat lingkungan dan selanjutnya memberikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut pada sektor terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mewujudkan TFU yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN
SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional, persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar pada tahun 2024 adalah 88,18%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Bengkulu (99,71%), DI Yogyakarta (99,21%), dan Sulawesi Barat (98,40%). Provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Papua Barat Daya (56,51%), Aceh (65,27%), dan Nusa Tenggara Timur (66,78%). Rincian lengkap tentang persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 82.

E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

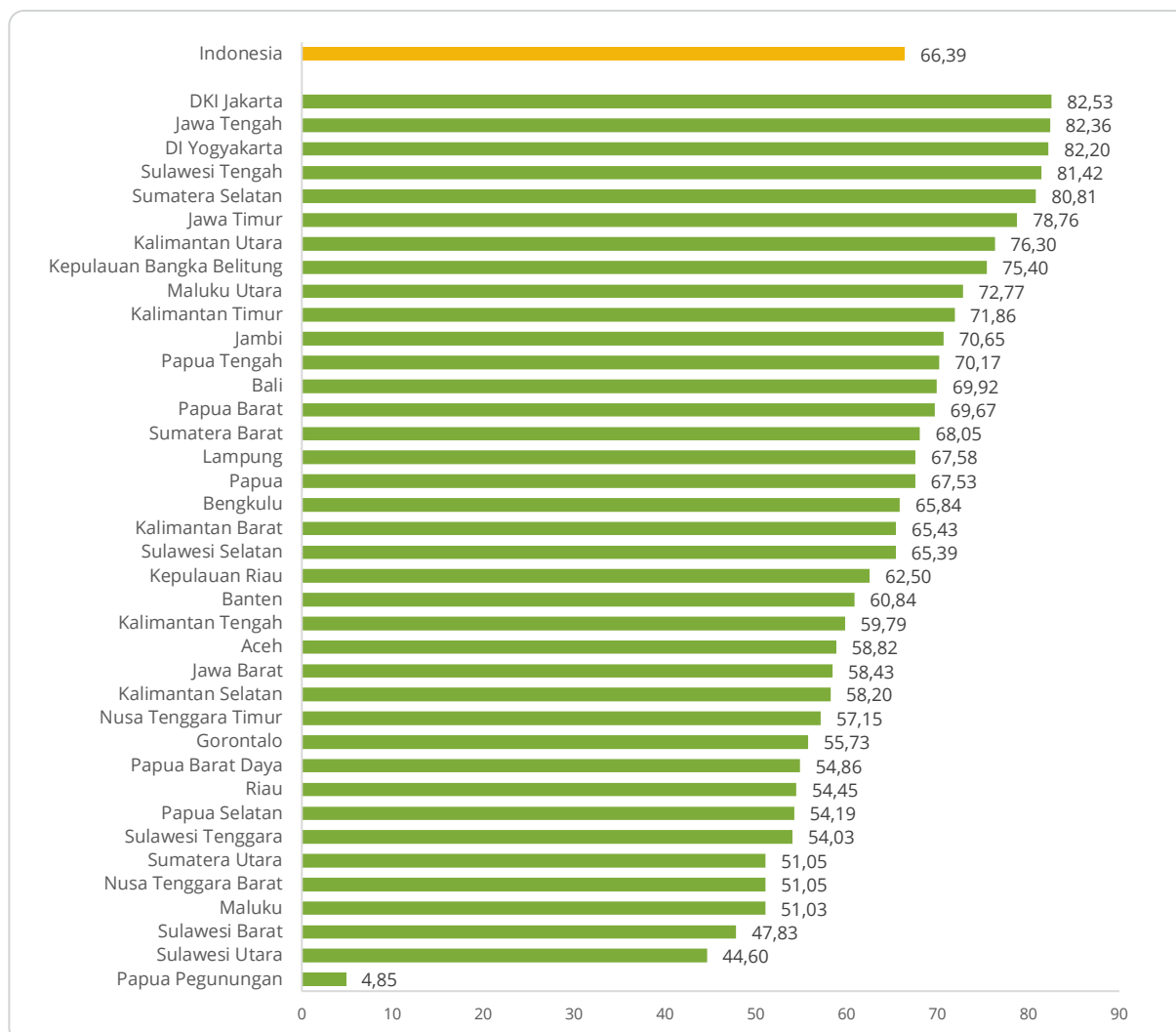
Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun non komersial. TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, yaitu jasa boga/katering, restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM), rumah makan, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dapur gerai pangan jajanan, dan sentra gerai pangan jajanan/kantin/sejenisnya.

Penguatan peraturan terkait keamanan pangan khususnya pangan olahan siap saji terus dilakukan. Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Kedua peraturan tersebut diantaranya mengatur Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Label pengawasan higiene sanitasi pangan.

Dalam rangka memastikan TPP memenuhi syarat higiene sanitasi, maka perlu dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh petugas puskesmas, Pengelola TPP seharusnya melakukan penilaian mandiri terkait kondisi higiene sanitasinya dengan mengisi Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) yang sudah disusun/dibuat oleh Pemilik/pengelola/Penanggung jawab/pengusaha Tempat Pengelolaan Pangan agar TPP tersebut mendapatkan gambaran kondisi higiene sanitasi dan dapat melakukan perbaikan kualitas TPP secara mandiri sebelum petugas datang untuk melakukan pengawasan eksternal.

Apabila hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) TPP yang wajib memiliki label pengawasan sudah memenuhi syarat dan sudah dilakukan penyuluhan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan, maka sebaiknya dinas kesehatan/puskesmas segera memberikan stiker Label Pengawasan HSP. Sementara TPP yang kewajibannya adalah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), maka sebaiknya dinas kesehatan melakukan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah dan penanggung jawab TPP serta mendorong mereka untuk segera memenuhi persyaratan lainnya dan mengajukan SLHS melalui sistem OSS.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional, persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar pada tahun 2024 adalah 66,39%. Provinsi dengan persentase tertinggi TPP yang memenuhi syarat sesuai standar adalah Provinsi DKI Jakarta (82,53%), Jawa Tengah (82,36%), dan DI Yogyakarta (82,20%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (4,85%), Sulawesi Utara (44,60%), dan Sulawesi Barat (47,83%). Rincian lengkap tentang persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 83.a.

F. KABUPATEN/ KOTA SEHAT

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam PMK nomor 13 tahun 2022, indikator jumlah Kabupaten/ Kota Sehat didefinisikan sebagai Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi.

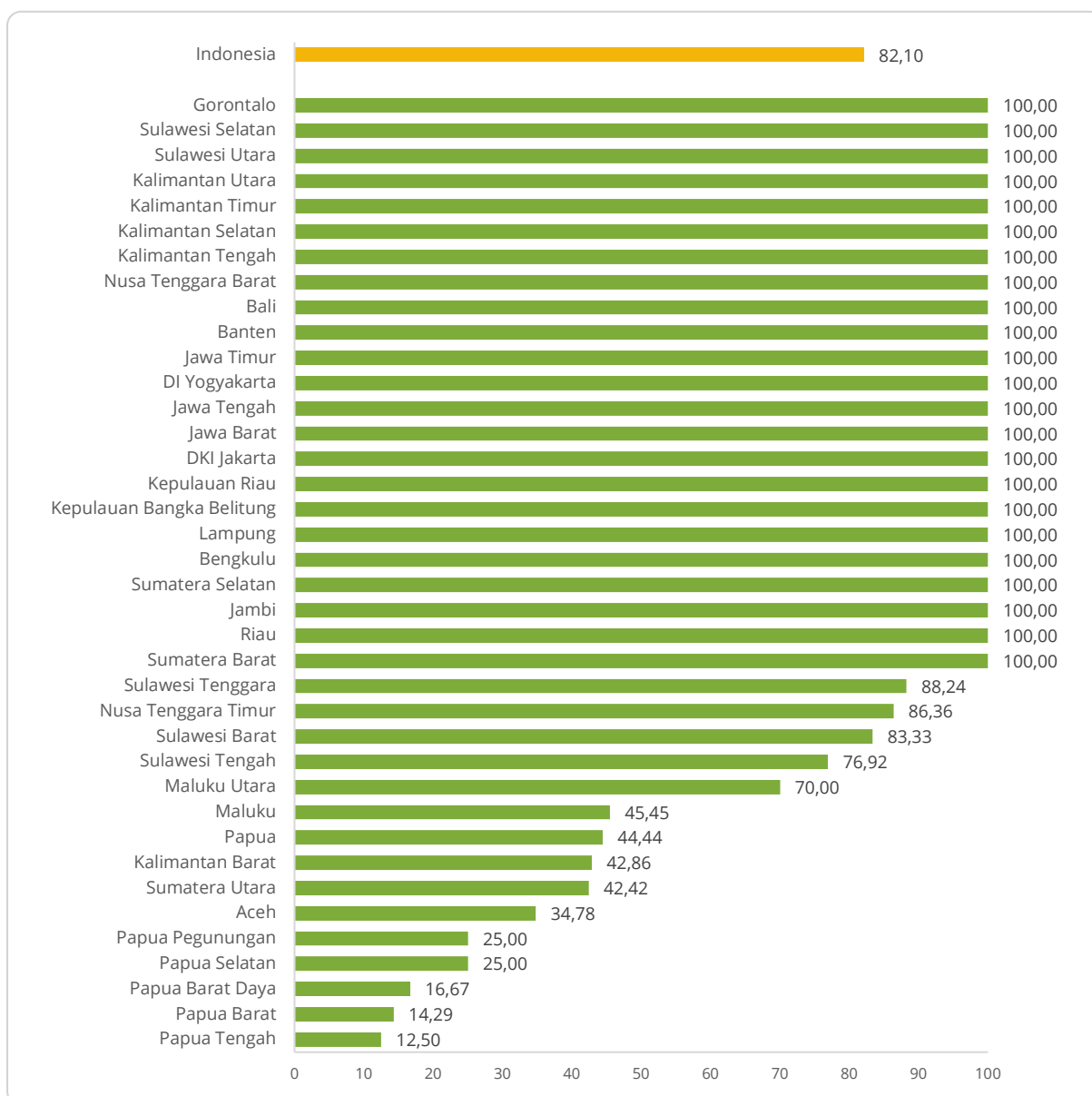
Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “Forum Kabupaten/Kota Sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, tatanan KKS dikelompokkan menjadi:

1. Kehidupan masyarakat sehat mandiri;
2. Permukiman dan fasilitas umum;
3. Satuan pendidikan;
4. Pasar;
5. Perkantoran dan perindustrian;
6. Pariwisata;
7. Transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
8. Perlindungan sosial; dan
9. Penanggulangan bencana.

Kabupaten/Kota yang memenuhi implementasi keseluruhan tatanan akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (*Swasti Saba*) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi usulan Kabupaten/Kota yang akan mengikuti penghargaan ini dilakukan oleh Tim Pembina KKS Provinsi sebelum dikirimkan ke Pusat. Penghargaan memiliki 3 kategori, yaitu penghargaan Swasti Saba Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi minimal 80% Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 71% -80%, Swasti Saba Wiwerda diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi minimal 90% Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 81%-90%, Swasti Saba Wistara diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi 100% Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan minimal 91%.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 422 kabupaten/kota (82,10%) (Gambar 7.10). Terdapat 23 (Dua puluh tiga) provinsi dengan persentase Kabupaten/Kota Sehat telah mencapai 100%. Provinsi dengan persentase terendah kabupaten/kota Sehat yaitu Provinsi Papua Tengah (12,50%), Papua Barat (14,29%) dan Papua Barat Daya (16,67%).

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya:

1. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan tatanan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
2. Kurang optimalnya peran dari tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor atau OPD untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat.
4. Masih kurangnya advokasi kegiatan KKS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait untuk memperkuat implementasi penyelenggaraan KKS.

G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Fasilitas pelayanan kesehatan pasti menimbulkan limbah medis yang merupakan semua sisa kegiatan dari pelayanan kesehatan yang sudah tidak digunakan dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis berbentuk padat terdiri dari limbah infeksius, patologi, tajam, farmasi, sitoksis, kimiawi, radioaktif, kontainer bertekanan, dan logam berat. Limbah medis berbentuk cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah berbentuk gas umumnya berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, generator listrik, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Standar pengelolaan limbah medis dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2022 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang berisi tahapan pengelolaan limbah medis padat termasuk:

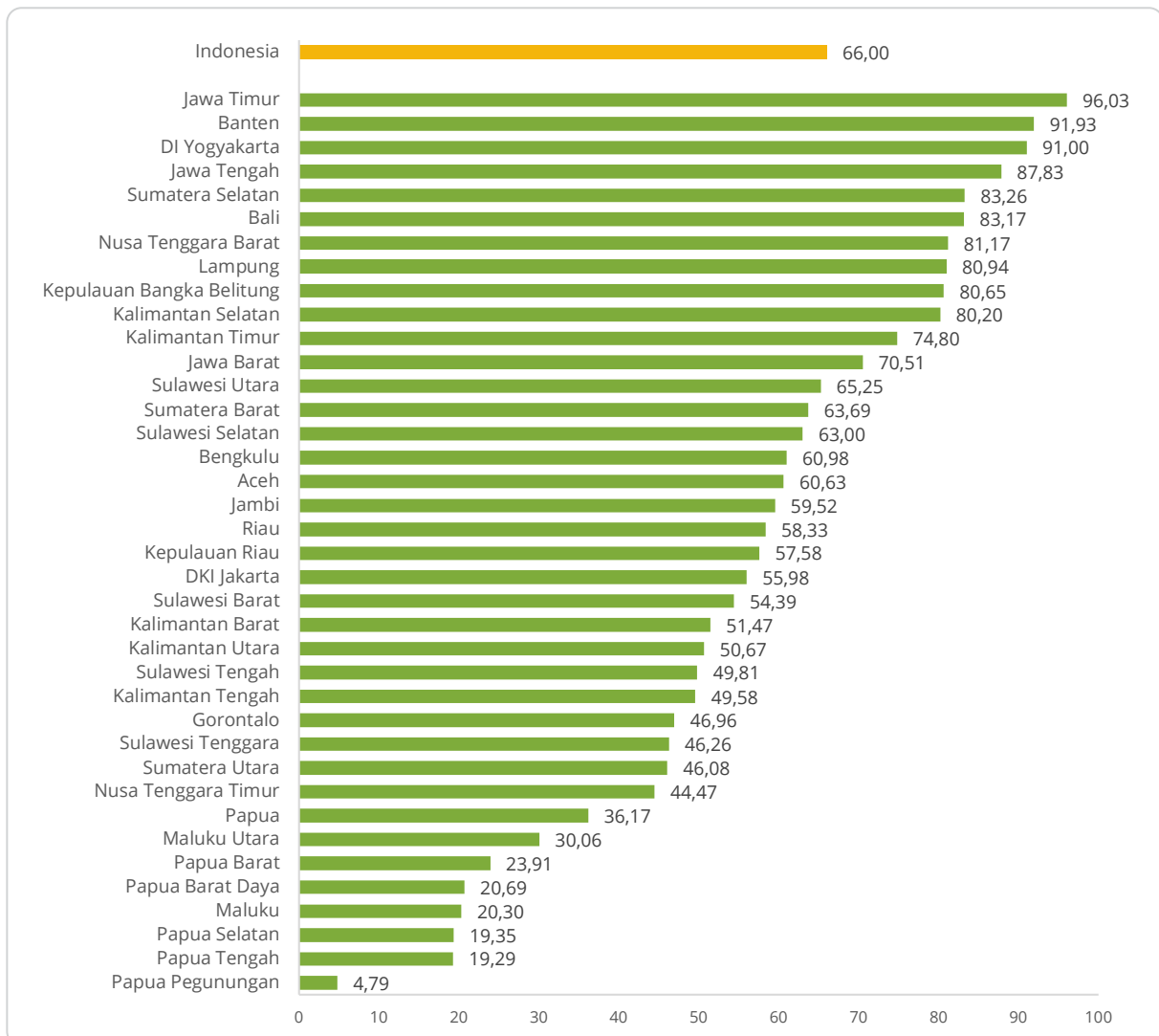
1. Pencegahan dan pengurangan;
2. Pemilahan dan pewadahan;
3. Pengumpulan dan penyimpanan;
4. Pengangkutan dan pengolahan.

Tahapan pengelolaan limbah medis cair termasuk:

1. Sumber dan penyaluran;
2. Pengolahan dan pembuangan.

Definisi operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang mengelola limbah medis adalah RS dan Puskesmas yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) yang berizin serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin. Pada tahun 2024, jumlah Fasyankes (rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar mencapai 8.907 Fasyankes dari 13.496 total Fasyankes di seluruh Indonesia.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2025; Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional persentase Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2024 adalah 66,00% (Gambar 7.11). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 46,6%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur (96,03%), Banten (91,93%) dan DI Yogyakarta (91,00%) Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (4,79%), Papua Tengah (19,29%), dan Papua Selatan (19,35%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 83.c.

H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

GERMAS merupakan berbagai upaya intervensi komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*. Melalui

pembudayaan GERMAS, *continuum of care* dilakukan secara terpadu melalui pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan aksi multisektor.

GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. GERMAS bertujuan menciptakan masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, lingkungan bersih, dan berkurangnya biaya berobat.

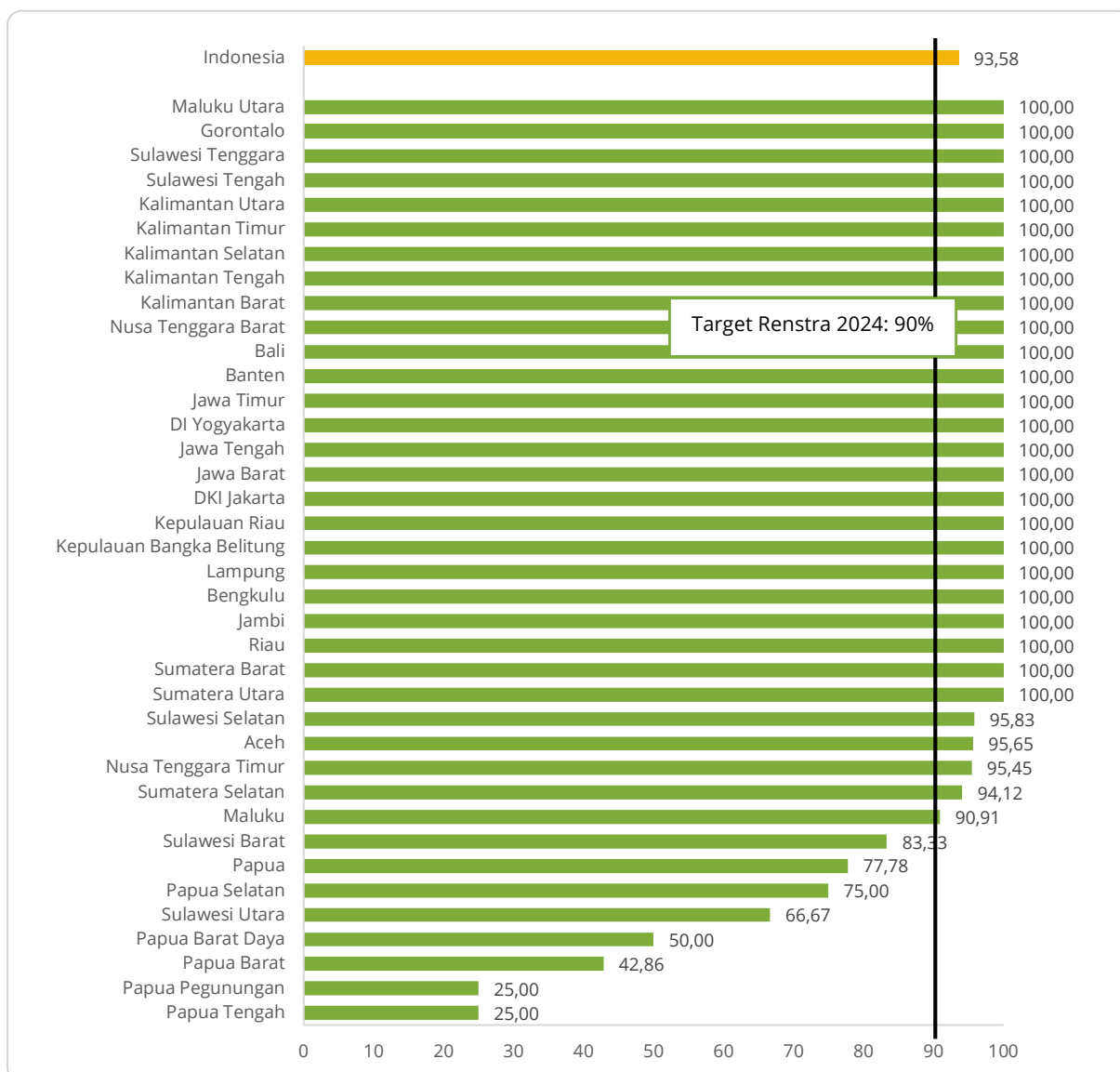
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS, meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas serta menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

GERMAS tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mempraktikkan pola hidup sehat. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan advokasi yang kuat kepada lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat yang mampu menghasilkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Sejak dikeluarkannya Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 terdapat perubahan definisi operasional sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dengan kriteria : - Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan berwawasan kesehatan - Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dalam mendukung Germas, minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial.	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) bila memiliki regulasi terkait Germas, dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan berikut: - Melaksanakan kampanye Germas tema prioritas - Memiliki kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja - Memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional

GAMBAR 7.11
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

Pada tahun 2024, sebanyak 481 kabupaten/kota (93,58%) telah melaksanakan kebijakan Germas (Gambar 7.12). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2024 yaitu 90% kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas. Terdapat 8 (delapan) provinsi yang belum mencapai target renstra 90% kab/kota menerapkan kebijakan Germas. Terdapat 25 (duapuluh lima) provinsi yang mencapai 100% Kabupaten/Kota melaksanakan Kebijakan Germas Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota melaksanakan kebijakan Germas tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 83.d.

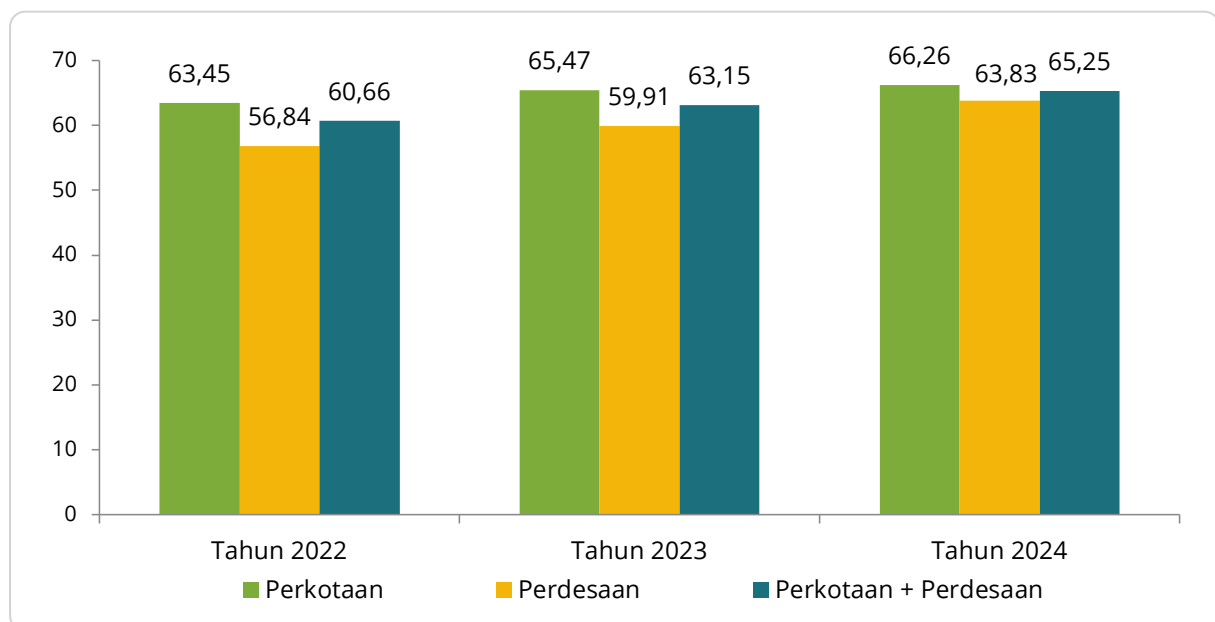
I. PERUMAHAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Menurut WHO (*World Health Organization*), pengertian perumahan (*housing*) adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Klasifikasi rumah layak huni menurut Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS 2024, tempat tinggal dikatakan rumah layak huni jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*)
Ketahanan bangunan dilihat dari bahan bangunan utama atap, lantai, dan dinding rumah terluas yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah beton, genteng, seng, atau kayu/sirap.
 - b. Bahan bangunan utama dinding rumah terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu.
 - c. Bahan bangunan utama lantai rumah terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah.
2. Kecukupan luas lantai (*sufficient living area*) yaitu luas lantai per kapita minimal 7,2 m².
3. Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
4. Memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

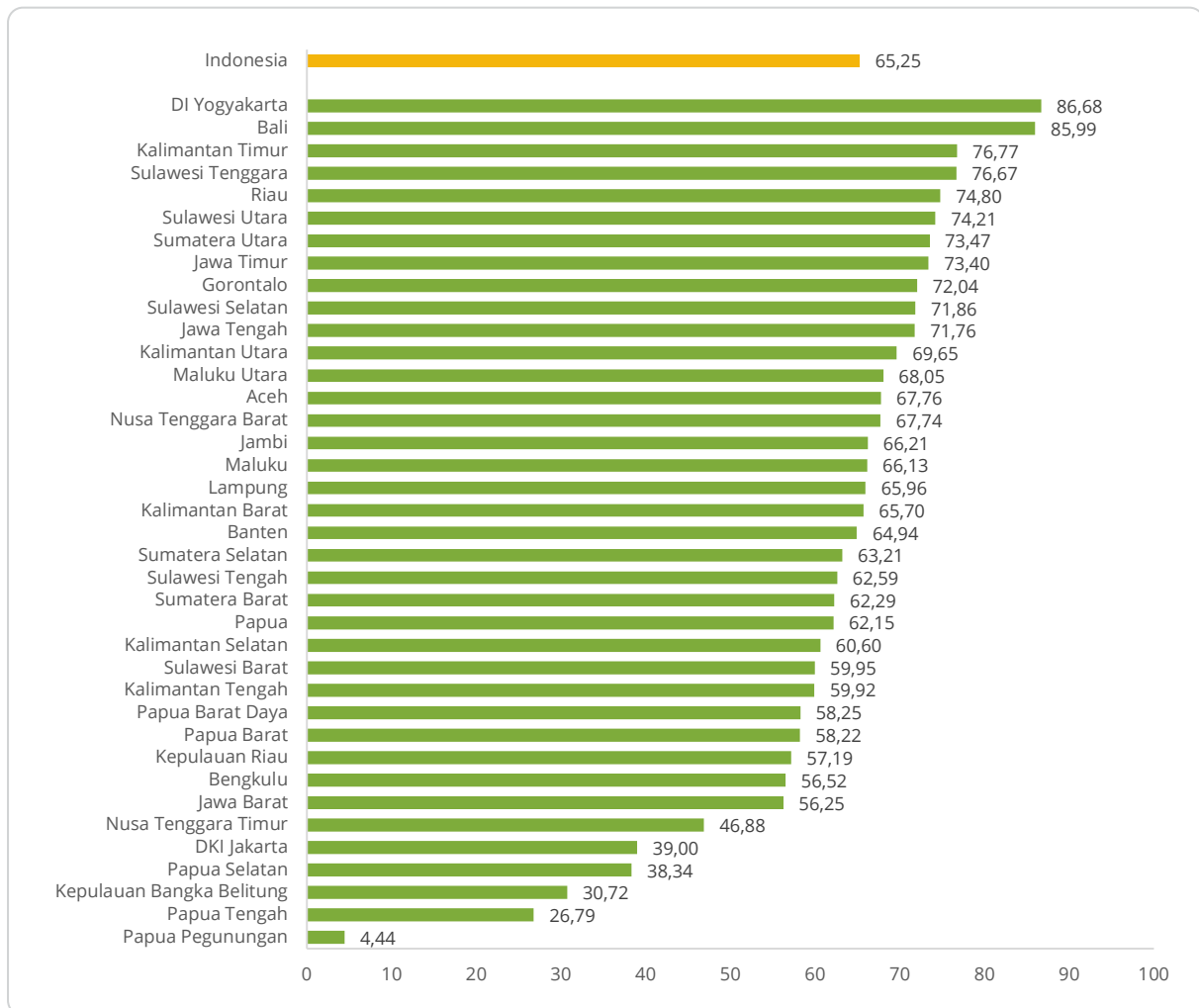
GAMBAR 7.12
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 7.13 menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni pada tahun 2024 sebesar 65,25%. Selama periode tahun 2022 - 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,59%. Persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (66,26%) dan (63,83%).

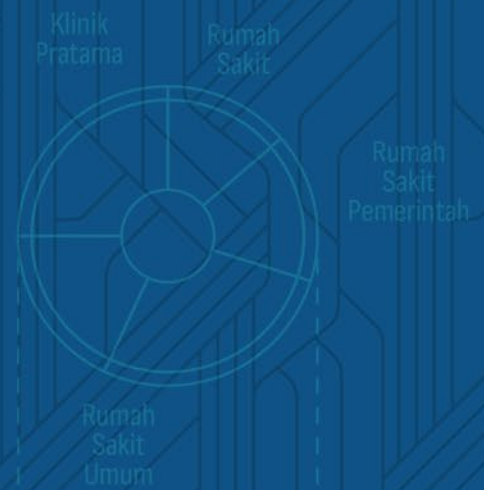
GAMBAR 7.13
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024



Sumber: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, Badan Pusat Statistik, 2024.

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 65,25% (Gambar 7.14). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak yaitu Provinsi DI Yogyakarta (86,68%), Bali (85,99%) dan Kalimantan Timur (76,77%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan (4,44%), Papua Tengah (26,79%), dan Kepulauan Bangka Belitung (30,72%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 83.e.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODM0Izl=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-desa--persen-.html> (9 Desember 2024)
- Badan Pusat Statistik, 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MiMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-menurut-klasifikasi-desa--persen-.html> (2 Desember 2024)
- Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/statictable/2023/03/31/2219/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html> (Akses Mei 2023)
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Pendidikan, Volume 13, 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2025. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*
- Badan Pusat Statistik, 2025. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV - 2024*
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2013. *Dasar Hukum Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Dalam Negeri, 2025. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*

- Kementerian Kesehatan RI. 2024. Permenkes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- Kementerian Kesehatan RI. 2024. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2024 Direktorat Kesehatan Jiwa, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2024. Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023: Potret Indonesia Sehat, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI, 2024. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025.
- Kementerian Kesehatan, 2023. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan\ Tahun 2015-2019*. Jakarta: kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Surveilans Accute Flaccid Paralysis (AFP)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman dan Tatalaksana Covid-19 Edisi 2 Agustus 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Pedoman Surveilans Campak - Rubela*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Petunjuk Teknis Surveilans Tetanus Neonatorum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Profil Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Laporan Perkembangan Kasus AIDS dan PIMS Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *National Health Accounts Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.

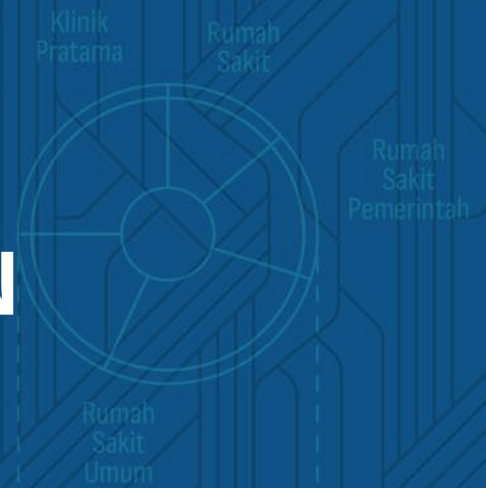
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.181/M/KPT/2016: Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Sosial. 2022. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 241/HUK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan November Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2011. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Kurnianingsih, Titik (2012). *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. www.dpr.go.id
- Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 184*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4765/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- UNICEF. 2023. *Executive Summary, The State of The World's Children 2023, For Every Child Vaccination*, Florence, Italy: UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight.
- UNICEF. 2023. *Indonesia Targetkan Daerah dengan Cakupan Vaksinasi Rendah untuk Atasi Penurunan Imunisasi Anak*. [Online]. Available at : <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-targetkan-daerah-dengan-cakupan-vaksinasi-rendah-untuk-atasi-penurunan>. [Accessed 15 Mei 2023]
- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases*.
- World Health Organization. *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
- World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication*.
- World Health Organization. 2021. *Global Tuberculosis Report 2021*. Geneva: WHO
- World Health Organization. 2018. *Tetanus*.
- <https://www.bps.go.id/>
- <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

* * *

LAMPIRAN



Lampiran 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Luas Wilayah (km2)	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (juta jiwa/per km2)
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
(1)	(2)	(3,000)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Aceh	56.835,019	18	5	23	290	0	6500	2.815.060	2.808.419	5.623.479	100,24	98,94
2	Sumatera Utara	72.437,755	25	8	33	455	693	5417	7.828.098	7.812.807	15.640.905	100,20	215,92
3	Sumatera Barat	42.107,674	12	7	19	179	230	1035	2.923.132	2.897.227	5.820.359	100,89	138,23
4	Riau	89.900,780	10	2	12	172	271	1591	3.625.379	3.473.918	7.099.297	104,36	78,97
5	Jambi	49.023,037	9	2	11	144	171	1414	1.952.872	1.881.567	3.834.439	103,79	78,22
6	Sumatera Selatan	86.771,918	13	4	17	241	403	2856	4.616.445	4.448.245	9.064.690	103,78	104,47
7	Bengkulu	20.122,210	9	1	10	129	172	1341	1.086.715	1.041.242	2.127.957	104,37	105,75
8	Lampung	33.570,758	13	2	15	229	205	2446	4.668.816	4.475.447	9.144.263	104,32	272,39
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.670,225	6	1	7	47	84	309	794.861	754.701	1.549.562	105,32	92,95
10	Kepulauan Riau	8.170,375	5	2	7	80	144	275	1.155.100	1.116.790	2.271.890	103,43	278,06
11	DKI Jakarta	661,530	1	5	6	44	267	0	5.537.335	5.500.881	11.038.216	100,66	16.685,89
12	Jawa Barat	37.053,331	18	9	27	627	646	5311	25.997.794	25.318.584	51.316.378	102,68	1.384,93
13	Jawa Tengah	34.347,428	29	6	35	576	753	7810	19.340.389	19.090.256	38.430.645	101,31	1.118,88
14	DI Yogyakarta	3.170,363	4	1	5	78	46	392	1.853.487	1.889.878	3.743.365	98,07	1.180,74
15	Jawa Timur	48.055,876	29	9	38	666	773	7721	20.894.359	21.025.547	41.919.906	99,38	872,32
16	Banten	9.355,763	4	4	8	155	314	1238	6.543.019	6.338.355	12.881.374	103,23	1.376,84
17	Bali	5.582,827	8	1	9	57	80	636	2.193.831	2.181.432	4.375.263	100,57	783,70
18	Nusa Tenggara Barat	19.631,991	8	2	10	117	145	1021	2.870.780	2.880.515	5.751.295	99,66	292,96
19	Nusa Tenggara Timur	46.378,105	21	1	22	315	305	3137	2.850.092	2.850.680	5.700.772	99,98	122,92
20	Kalimantan Barat	147.018,063	12	2	14	174	99	2046	2.902.699	2.743.569	5.646.268	105,80	38,41
21	Kalimantan Tengah	153.430,363	13	1	14	136	139	1432	1.459.913	1.365.377	2.825.290	106,92	18,41
22	Kalimantan Selatan	37.125,426	11	2	13	156	144	1872	2.176.733	2.128.548	4.305.281	102,26	115,97
23	Kalimantan Timur	126.951,758	7	3	10	105	197	841	2.138.665	1.984.638	4.123.303	107,76	32,48
24	Kalimantan Utara	69.900,886	4	1	5	55	35	447	403.628	366.999	770.627	109,98	11,02
25	Sulawesi Utara	14.488,429	11	4	15	171	332	1507	1.351.734	1.293.557	2.645.291	104,50	182,58
26	Sulawesi Tengah	61.496,983	12	1	13	177	175	1842	1.652.891	1.566.603	3.219.494	105,51	52,35
27	Sulawesi Selatan	45.323,975	21	3	24	313	793	2266	4.729.375	4.798.901	9.528.276	98,55	210,23
28	Sulawesi Tenggara	36.139,303	15	2	17	221	377	1908	1.427.378	1.397.211	2.824.589	102,16	78,16
29	Gorontalo	12.024,982	5	1	6	77	72	657	631.495	619.465	1.250.960	101,94	104,03
30	Sulawesi Barat	16.590,667	6	0	6	69	73	575	744.533	722.208	1.466.741	103,09	88,41
31	Maluku	46.133,832	9	2	11	119	35	1200	969.012	966.574	1.935.586	100,25	41,96
32	Maluku Utara	31.465,977	8	2	10	118	118	1067	729.780	664.451	1.394.231	109,83	44,31
33	Papua	81.383,315	8	1	9	105	51	948	574.173	528.187	1.102.360	108,71	13,55
34	Papua Barat	60.308,590	7	0	7	91	21	803	297.017	279.238	576.255	106,37	9,56
35	Papua Selatan	117.858,969	4	0	4	82	13	677	292.552	269.668	562.220	108,49	4,77
36	Papua Tengah	61.079,587	8	0	8	131	36	1172	723.511	645.601	1.369.112	112,07	22,42
37	Papua Pegunungan	52.508,656	8	0	8	252	10	2617	786.734	683.784	1.470.518	115,06	28,01
38	Papua Barat Daya	39.103,058	5	1	6	132	74	939	324.005	299.181	623.186	108,30	15,94
Indonesia		1.890.179,784	416	98	514	7.285	8.496	75.266	143.863.392	141.110.251	284.973.643	101,95	150,77

Sumber: - Kementerian Dalam Negeri, 2025
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Lampiran 2.a

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2024**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0 - 4	11.554,4	11.083,7	22.638,1	104,2
2	5 - 9	11.236,4	10.748,2	21.984,6	104,5
3	10 - 14	11.279,1	10.757,9	22.037,0	104,8
4	15 - 19	11.408,7	10.707,7	22.116,4	106,5
5	20 - 24	11.440,1	10.810,0	22.250,1	105,8
6	25 - 29	11.531,3	10.994,3	22.525,6	104,9
7	30 - 34	11.283,3	10.855,8	22.139,1	103,9
8	35 - 39	10.930,7	10.645,8	21.576,5	102,7
9	40 - 44	10.351,4	10.184,9	20.536,3	101,6
10	45 - 49	9.702,9	9.667,2	19.370,1	100,4
11	50 - 54	8.595,5	8.639,6	17.235,1	99,5
12	55 - 59	7.327,2	7.443,6	14.770,8	98,4
13	60 - 64	5.877,3	6.053,4	11.930,7	97,1
14	65 - 69	4.348,0	4.541,1	8.889,1	95,7
15	70 - 74	2.870,8	3.117,1	5.987,9	92,1
16	75+	2.451,7	3.164,9	5.616,6	77,5
Indonesia		142.188,8	139.415,2	281.604	102,0
Angka Beban Tanggungan (<i>Dependency Ratio</i>)					

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS 2025

Lampiran 2.b

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)	
		2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	5.482,5	5.554,8
2	Sumatera Utara	15.386,6	15.588,5
3	Sumatera Barat	5.757,2	5.836,2
4	Riau	6.642,9	6.728,1
5	Jambi	3.679,2	3.724,3
6	Sumatera Selatan	8.743,5	8.837,3
7	Bengkulu	2.086,0	2.112,2
8	Lampung	9.314,0	9.419,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.511,9	1.531,5
10	Kepulauan Riau	2.152,6	2.183,3
11	DKI Jakarta	10.672,1	10.684,9
12	Jawa Barat	49.860,3	50.345,2
13	Jawa Tengah	37.541,0	37.892,3
14	DI Yogyakarta	3.736,5	3.759,5
15	Jawa Timur	41.527,9	41.814,5
16	Banten	12.307,7	12.431,4
17	Bali	4.404,3	4.433,3
18	Nusa Tenggara Barat	5.560,3	5.646,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.569,1	5.656,0
20	Kalimantan Barat	5.623,3	5.695,5
21	Kalimantan Tengah	2.773,7	2.809,7
22	Kalimantan Selatan	4.222,3	4.273,4
23	Kalimantan Timur	3.909,7	4.045,9
24	Kalimantan Utara	730,0	739,8
25	Sulawesi Utara	2.681,5	2.701,8
26	Sulawesi Tengah	3.086,8	3.121,8
27	Sulawesi Selatan	9.362,3	9.463,4
28	Sulawesi Tenggara	2.749,0	2.793,1
29	Gorontalo	1.213,2	1.227,8
30	Sulawesi Barat	1.481,1	1.503,2
31	Maluku	1.920,5	1.945,6
32	Maluku Utara	1.337,1	1.355,6
33	Papua	4.482,7	1.060,6
34	Papua Barat	1.187,3	578,7
35	Papua Selatan		542,1
36	Papua Tengah		1.472,9
37	Papua Pegunungan		1.467,0
38	Papua Barat Daya		627,1
Indonesia		278.696,2	281.603,9

Sumber : * Statistik Indonesia, BPS 2025

Lampiran 2.c

**JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2024**

No	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Bayi (0 tahun)	2.360.790	2.257.759	4.618.549
2	Jumlah Batita (0-2 tahun)	6.993.939	6.705.319	13.699.258
3	Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)	9.193.563	8.825.967	18.019.530
4	Jumlah Balita (0 - 4 tahun)	11.554.353	11.083.726	22.638.079
5	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)	4.502.304	4.311.294	8.813.598
6	Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)	2.242.411	2.143.632	4.386.043
7	Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)	13.480.477	12.888.797	26.369.274
8	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)	34.069.780	32.589.875	66.659.655
9	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)	98.448.324	96.002.254	194.450.578
10	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)	9.670.543	10.823.023	20.493.566
11	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)		73.865.611	73.865.611
12	Jumlah Wanita Usia Subur Imunisasi (15-39 tahun)		54.013.506	54.013.506,0

Sumber : Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan, Kepmenkes HK.01.07/Menkes/140/2024

Lampiran 3.a

**JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2001 - 2024**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364.527,0	343.647,0
2	September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372.114,0	350.420,0
3	Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385.621,0	361.496,0
4	September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400.995,0	370.910,0
5	Maret 2018	10,14	15,80	25,94	7,02	13,20	9,82	415.614,0	383.908,0
6	September 2018	10,13	15,54	25,67	6,89	13,10	9,66	425.770,0	392.154,0
7	Maret 2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41	442.062,0	404.398,0
8	September 2019	9,86	14,93	24,79	6,56	12,60	9,22	458.380,0	418.515,0
9	Maret 2020	11,16	15,26	26,42	7,38	12,82	9,78	471.822,0	433.281,0
10	September 2020	12,04	15,51	27,55	7,88	13,20	10,19	475.477,0	437.902,0
11	Maret 2021	12,18	15,37	27,54	7,89	13,10	10,14	489.848,0	450.185,0
12	September 2021	11,86	14,64	26,50	7,60	12,53	9,71	502.730,0	464.474,0
13	Maret 2022	11,82	14,34	26,16	7,50	12,29	9,54	521.494,0	484.209,0
14	September 2022	11,98	14,38	26,36	7,53	12,36	9,57	552.349,0	513.170,0
15	Maret 2023	11,74	14,16	25,90	7,29	12,22	9,36	569.299,0	525.050,0
16	Maret 2024	11,64	13,58	25,22	7,09	11,79	9,03	601.871,0	556.874,0
17	September 2024	11,05	13,01	24,06	6,66	11,34	8,57	615.763,0	566.655,0

Sumber : Statistik Indonesia 2025, BPS

Keterangan: Data bulan September 2023 tidak tersedia karena kegiatan Susenas September 2023 tidak diselenggarakan

Lampiran 3.b

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2024

No	Provinsi	Semester II (September)								
		Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	704.200	168,71	8,37	645.687	550,25	14,99	665.855	718,96	12,64
2	Sumatera Utara	674.427	623,78	7,01	614.445	487,14	7,44	648.336	1.110,92	7,19
3	Sumatera Barat	731.235	125,69	4,16	697.052	189,75	6,79	714.991	315,44	5,42
4	Riau	746.476	183,28	6,11	673.431	289,76	6,52	702.620	473	6,36
5	Jambi	754.235	120,63	9,60	612.745	152,08	6,08	658.100	272,71	7,26
6	Sumatera Selatan	603.305	310,04	9,02	541.821	638,81	11,43	564.462	948,85	10,51
7	Bengkulu	742.765	86,71	12,32	642.620	174,44	12,63	672.816	261,15	12,52
8	Lampung	655.653	239,51	7,91	571.802	699,80	12,04	599.018	939,31	10,62
9	Kepulauan Bangka Belitung	903.322	37,09	4,09	938.001	41,49	6,49	917.673	78,58	5,08
10	Kepulauan Riau	812.294	102,23	4,36	764.885	22,72	8,55	807.602	124,95	4,78
11	DKI Jakarta	846.085	449,07	4,14	0	0,00	0,00	846.085	449,07	4,14
12	Jawa Barat	537.457	2.780,46	6,65	527.645	887,89	8,85	535.509	3.668,35	7,08
13	Jawa Tengah	532.913	1.683,75	8,83	508.298	1.712,59	10,45	521.093	3.396,34	9,58
14	DI Yogyakarta	642.099	316,81	10,11	531.516	113,66	11,31	613.370	430,47	10,40
15	Jawa Timur	565.284	1.589,12	6,83	525.955	2.304,70	13,19	547.751	3.893,82	9,56
16	Banten	684.205	606,52	5,57	600.404	170,98	6,20	667.403	777,50	5,70
17	Bali	600.260	112,93	3,32	526.833	63,29	5,11	580.306	176,22	3,80
18	Nusa Tenggara Barat	554.327	338,74	11,64	525.027	319,86	12,21	540.339	658,60	11,91
19	Nusa Tenggara Timur	645.346	126,91	8,11	495.180	981,02	23,02	533.944	1.107,93	19,02
20	Kalimantan Barat	659.658	94,82	4,62	581.931	239,17	7,26	611.320	333,99	6,25
21	Kalimantan Tengah	619.613	65,34	5,22	657.942	83,90	5,29	641.524	149,24	5,26
22	Kalimantan Selatan	658.002	81,22	3,59	629.413	98,98	4,46	644.107	180,20	4,02
23	Kalimantan Timur	862.414	118,19	4,41	833.539	93,69	8,00	853.997	211,88	5,51
24	Kalimantan Utara	904.171	25,06	5,07	823.347	16,05	5,96	876.375	41,11	5,38
25	Sulawesi Utara	522.165	59,45	4,07	498.100	113,85	10,14	511.710	173,30	6,70
26	Sulawesi Tengah	621.778	79,85	7,34	601.981	278,48	12,90	608.687	358,33	11,04
27	Sulawesi Selatan	491.078	228,59	5,21	447.672	483,17	10,11	467.991	711,76	7,77
28	Sulawesi Tenggara	493.453	75,77	6,78	460.567	229,50	13,07	473.343	305,27	10,63
29	Gorontalo	495.325	28,49	4,99	480.307	141,54	21,62	487.578	170,03	13,87
30	Sulawesi Barat	467.996	24,55	8,33	458.416	131,36	11,32	460.283	155,91	10,71
31	Maluku	760.478	38,83	4,59	722.619	255,16	25,08	739.818	293,99	15,78
32	Maluku Utara	677.285	24,21	6,27	623.790	55,48	5,93	639.337	79,69	6,03
33	Papua	787.183	31,85	5,93	593.469	129,21	36,57	708.811	161,06	18,09
34	Papua Barat	944.616	15,18	9,50	753.746	93,11	26,34	816.613	108,29	21,09
35	Papua Selatan	681.536	7,14	3,65	454.091	95,88	28,47		103,02	19,35
36	Papua Tengah	959.039	13,47	5,27	745.530	274,06	34,86		287,53	27,60
37	Papua Pegunungan	1.377.464	9,64	12,11	1.058.697	321,48	31,00		331,12	29,66
38	Papua Barat Daya	810.708	22,96	8,03	772.812	73,85	25,90	791.570	96,81	16,95
Indonesia		615.763	11.046,59	6,66	566.655	13.008,15	11,34	595.242	24.054,74	8,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (Susenas September 2024)

Lampiran 3.c

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Semester I (Maret)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1,58	3,18	2,62	0,40	0,88	0,71
2	Sumatera Utara	1,16	1,31	1,23	0,27	0,34	0,30
3	Sumatera Barat	0,61	0,89	0,74	0,12	0,17	0,15
4	Riau	0,99	0,97	0,97	0,21	0,21	0,21
5	Jambi	1,49	0,85	1,06	0,37	0,19	0,25
6	Sumatera Selatan	1,69	2,01	1,89	0,39	0,50	0,46
7	Bengkulu	2,44	1,94	2,11	0,62	0,42	0,49
8	Lampung	1,11	1,75	1,53	0,25	0,37	0,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,47	0,93	0,66	0,12	0,21	0,16
10	Kepulauan Riau	0,66	1,12	0,70	0,14	0,23	0,15
11	DKI Jakarta***	0,65	-	0,65	0,13	-	0,13
12	Jawa Barat	1,15	1,45	1,21	0,28	0,33	0,29
13	Jawa Tengah	1,51	1,79	1,64	0,35	0,40	0,37
14	DI Yogyakarta	1,73	2,28	1,87	0,42	0,54	0,45
15	Jawa Timur	0,98	2,13	1,48	0,20	0,46	0,31
16	Banten	0,95	1,04	0,97	0,24	0,26	0,25
17	Bali	0,43	0,69	0,50	0,07	0,13	0,09
18	Nusa Tenggara Barat	2,42	2,46	2,44	0,60	0,63	0,61
19	Nusa Tenggara Timur	1,19	4,21	3,41	0,24	1,07	0,85
20	Kalimantan Barat	0,46	1,10	0,86	0,08	0,24	0,18
21	Kalimantan Tengah	0,81	0,76	0,78	0,22	0,16	0,19
22	Kalimantan Selatan	0,50	0,65	0,57	0,10	0,14	0,12
23	Kalimantan Timur	0,62	1,21	0,80	0,12	0,23	0,15
24	Kalimantan Utara	0,65	1,12	0,82	0,14	0,28	0,19
25	Sulawesi Utara	0,69	1,61	1,10	0,14	0,36	0,24
26	Sulawesi Tengah	1,44	2,43	2,10	0,36	0,62	0,53
27	Sulawesi Selatan	0,76	1,96	1,39	0,16	0,50	0,34
28	Sulawesi Tenggara	1,25	2,60	2,08	0,31	0,73	0,56
29	Gorontalo	0,51	4,87	2,88	0,09	1,35	0,78
30	Sulawesi Barat	1,57	1,92	1,85	0,38	0,46	0,45
31	Maluku	0,93	4,78	3,10	0,26	1,37	0,89
32	Maluku Utara	0,94	0,87	0,89	0,19	0,19	0,19
33	Papua	1,09	8,39	4,01	0,28	2,71	1,25
34	Papua Barat	0,93	5,87	4,35	0,18	1,77	1,28
35	Papua Selatan	0,44	5,59	3,71	0,10	1,65	1,08
36	Papua Tengah	0,83	7,61	5,96	0,23	2,36	1,84
37	Papua Pegunungan	2,72	6,47	6,21	0,60	1,69	1,62
38	Papua Barat Daya	1,29	7,48	4,38	0,32	2,86	1,59
Indonesia		1,10	1,98	1,46	0,25	0,48	0,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (Susenas September 2024)

Keterangan: - Data bulan September 2023 tidak tersedia karena kegiatan Susenas September 2023 tidak diselenggarakan.

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

Lampiran 3.d

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020- 2024

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0,319	0,323	0,291	0,296	0,294
2	Sumatera Utara	0,314	0,313	0,326	0,309	0,306
3	Sumatera Barat	0,301	0,300	0,292	0,280	0,287
4	Riau	0,321	0,327	0,323	0,324	0,306
5	Jambi	0,316	0,315	0,335	0,343	0,315
6	Sumatera Selatan	0,338	0,340	0,330	0,338	0,331
7	Bengkulu	0,323	0,321	0,315	0,333	0,343
8	Lampung	0,320	0,314	0,313	0,324	0,301
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,257	0,247	0,255	0,245	0,235
10	Kepulauan Riau	0,334	0,339	0,325	0,340	0,357
11	DKI Jakarta	0,400	0,411	0,412	0,431	0,431
12	Jawa Barat	0,398	0,406	0,412	0,425	0,428
13	Jawa Tengah	0,359	0,368	0,366	0,369	0,364
14	DI Yogyakarta	0,437	0,436	0,459	0,449	0,428
15	Jawa Timur	0,364	0,364	0,365	0,387	0,373
16	Banten	0,365	0,363	0,377	0,368	0,359
17	Bali	0,369	0,375	0,362	0,362	0,348
18	Nusa Tenggara Barat	0,386	0,384	0,374	0,375	0,364
19	Nusa Tenggara Timur	0,356	0,339	0,340	0,325	0,316
20	Kalimantan Barat	0,325	0,315	0,311	0,321	0,314
21	Kalimantan Tengah	0,320	0,320	0,309	0,317	0,304
22	Kalimantan Selatan	0,351	0,325	0,309	0,313	0,298
23	Kalimantan Timur	0,335	0,331	0,317	0,322	0,310
24	Kalimantan Utara	0,300	0,285	0,270	0,277	0,259
25	Sulawesi Utara	0,368	0,359	0,359	0,370	0,347
26	Sulawesi Tengah	0,321	0,326	0,305	0,304	0,309
27	Sulawesi Selatan	0,382	0,377	0,365	0,377	0,360
28	Sulawesi Tenggara	0,388	0,394	0,366	0,371	0,365
29	Gorontalo	0,406	0,409	0,423	0,417	0,413
30	Sulawesi Barat	0,356	0,366	0,371	0,351	0,330
31	Maluku	0,326	0,316	0,306	0,288	0,291
32	Maluku Utara	0,290	0,278	0,309	0,300	0,296
33	Papua	0,395	0,396	0,393	0,386	0,405
34	Papua Barat	0,376	0,374	0,384	0,370	0,385
35	Papua Selatan	-	-	-	-	0,424
36	Papua Tengah	-	-	-	-	0,355
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	0,346
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	0,347
Indonesia		0,385	0,381	0,381	0,388	0,390

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (Susenas September 2024)

Keterangan: - Indeks Gini pada tahun 2024 merupakan Indeks Gini pada bulan September 2024

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 3.e

**RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS
DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 2024**

No	Kelompok Barang	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	88.417	103.512	94.641
2	Umbi-umbian	7.283	10.338	8.542
3	Ikan/udang/cumi/kerang	60.361	53.822	57.665
4	Daging	42.006	28.622	36.488
5	Telur dan susu	44.365	28.386	37.776
6	Sayur-sayuran	60.665	59.021	59.988
7	Kacang-kacangan	15.864	13.080	14.716
8	Buah-buahan	44.966	34.539	40.667
9	Minyak dan kelapa	17.984	18.710	18.283
10	Bahan minuman	20.469	21.930	21.071
11	Bumbu-bumbuan	15.710	14.410	15.174
12	Konsumsi lainnya	14.257	12.182	13.402
13	Makanan dan minuman jadi	285.676	172.234	238.902
14	Rokok	91.826	98.253	94.476
	Makanan	809.849	669.039	751.789
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	483.435	261.076	391.751
16	Aneka barang dan jasa	232.747	105.609	180.325
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	40.384	28.434	35.457
18	Barang tahan lama	62.412	38.481	52.545
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	75.497	38.790	60.362
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	33.105	21.516	28.326
	Bukan Makanan	927.580	493.906	748.767
	Total Pengeluaran	1.737.429	1.162.945	1.500.556

Sumber : Statistik Indonesia 2025, BPS

Lampiran 3.f

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024

No	Provinsi	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
		TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5,97	6,17	5,75	6,03	5,56	5,75
2	Sumatera Utara	5,47	6,16	5,24	5,89	5,10	5,60
3	Sumatera Barat	6,17	6,28	5,90	5,94	5,79	5,75
4	Riau	4,40	4,37	4,25	4,23	3,85	3,70
5	Jambi	4,70	4,59	4,50	4,53	4,45	4,48
6	Sumatera Selatan	4,74	4,63	4,53	4,11	3,97	3,86
7	Bengkulu	3,39	3,59	3,21	3,42	3,17	3,11
8	Lampung	4,31	4,52	4,18	4,23	4,12	4,19
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,18	4,77	3,89	4,56	3,85	4,63
10	Kepulauan Riau	8,02	8,23	7,61	6,80	6,94	6,39
11	DKI Jakarta	8,00	7,18	7,57	6,53	6,03	6,21
12	Jawa Barat	8,35	8,31	7,89	7,44	6,91	6,75
13	Jawa Tengah	5,75	5,57	5,24	5,13	4,39	4,78
14	DI Yogyakarta	3,73	4,06	3,58	3,69	3,24	3,48
15	Jawa Timur	4,81	5,49	4,33	4,88	3,74	4,19
16	Banten	8,53	8,09	7,97	7,52	7,02	6,68
17	Bali	4,84	4,80	3,73	2,69	1,87	1,79
18	Nusa Tenggara Barat	3,92	2,89	3,73	2,80	3,30	2,73
19	Nusa Tenggara Timur	3,30	3,54	3,10	3,14	3,17	3,02
20	Kalimantan Barat	4,86	5,11	4,52	5,05	4,20	4,86
21	Kalimantan Tengah	4,20	4,26	3,84	4,10	3,67	4,01
22	Kalimantan Selatan	4,20	4,74	3,95	4,31	3,89	4,20
23	Kalimantan Timur	6,77	5,71	6,37	5,31	5,75	5,14
24	Kalimantan Utara	4,62	4,33	4,10	4,01	4,01	3,90
25	Sulawesi Utara	6,51	6,61	6,19	6,10	5,98	5,85
26	Sulawesi Tengah	3,67	3,00	3,49	2,95	3,15	2,94
27	Sulawesi Selatan	5,75	4,51	5,26	4,33	4,90	4,19
28	Sulawesi Tenggara	3,86	3,36	3,66	3,15	3,22	3,09
29	Gorontalo	3,25	2,58	3,07	3,06	3,05	3,13
30	Sulawesi Barat	3,11	2,34	3,04	2,27	3,02	2,68
31	Maluku	6,44	6,88	6,08	6,31	5,96	6,11
32	Maluku Utara	4,98	3,98	4,60	4,31	4,16	4,03
33	Papua	3,60	2,83	3,49	2,67	5,81	6,48
34	Papua Barat	5,78	5,37	5,53	5,38	4,31	4,13
35	Papua Selatan	-	-	-	-	4,75	4,05
36	Papua Tengah	-	-	-	-	2,49	2,75
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	1,18	1,32
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	6,02	6,48
Indonesia		5.83	5.86	5,45	5,32	4,82	4,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 3.g

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024

No	Provinsi	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)
1	Aceh	9,79	9,89	9,95
2	Sumatera Utara	9,99	10,07	10,18
3	Sumatera Barat	9,51	9,59	9,72
4	Riau	9,54	9,60	9,69
5	Jambi	9,07	9,16	9,26
6	Sumatera Selatan	8,82	8,90	8,98
7	Bengkulu	9,28	9,35	9,40
8	Lampung	8,61	8,72	8,80
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,57	8,66	8,78
10	Kepulauan Riau	10,46	10,52	10,65
11	DKI Jakarta	11,30	11,42	11,49
12	Jawa Barat	9,14	9,16	9,24
13	Jawa Tengah	8,38	8,44	8,47
14	DI Yogyakarta	10,07	10,16	10,23
15	Jawa Timur	8,50	8,53	8,69
16	Banten	9,46	9,48	9,55
17	Bali	9,74	9,74	9,87
18	Nusa Tenggara Barat	8,31	8,39	8,50
19	Nusa Tenggara Timur	8,25	8,31	8,48
20	Kalimantan Barat	8,10	8,17	8,28
21	Kalimantan Tengah	9,03	9,07	9,17
22	Kalimantan Selatan	8,89	8,95	9,02
23	Kalimantan Timur	10,13	10,17	10,22
24	Kalimantan Utara	9,45	9,53	9,58
25	Sulawesi Utara	9,87	9,94	10,02
26	Sulawesi Tengah	9,17	9,22	9,28
27	Sulawesi Selatan	9,09	9,12	9,22
28	Sulawesi Tenggara	9,59	9,62	9,74
29	Gorontalo	8,39	8,48	8,64
30	Sulawesi Barat	8,47	8,48	8,56
31	Maluku	10,37	10,38	10,44
32	Maluku Utara	9,60	9,61	9,70
34	Papua	7,31	7,34	10,70
33	Papua Barat	10,14	10,14	9,87
35	Papua Selatan	-	-	8,99
36	Papua Tengah	-	-	6,17
37	Papua Pegunungan	-	-	5,10
38	Papua Barat Daya	-	-	10,48
Indonesia		9,08	9,13	9,22

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 3.h

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF)
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020 - 2024

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	99,00	99,10	98,90	99,03	98,80	97,52	97,39	97,60	97,67	97,88	98,25	98,24	98,25	98,34	98,34
2	Sumatera Utara	99,54	99,54	99,50	99,49	99,50	98,79	98,84	98,73	98,85	98,68	99,16	99,19	99,11	99,17	99,09
3	Sumatera Barat	99,46	99,54	99,65	99,65	99,60	98,90	99,00	98,93	98,98	99,14	99,17	99,26	99,29	99,31	99,37
4	Riau	99,57	99,46	99,46	99,60	99,53	98,86	98,92	98,88	98,75	98,86	99,23	99,20	99,18	99,18	99,20
5	Jambi	98,90	98,68	98,77	98,89	98,88	97,45	97,47	97,41	97,42	97,15	98,19	98,08	98,10	98,16	98,02
6	Sumatera Selatan	99,30	99,28	99,16	99,24	99,09	98,19	98,27	98,12	98,20	98,26	98,75	98,78	98,65	98,73	98,68
7	Bengkulu	99,07	98,89	98,56	98,74	98,82	96,90	96,83	97,01	97,01	96,97	98,01	97,88	97,80	97,89	97,91
8	Lampung	98,45	98,51	98,05	98,26	98,19	95,96	95,98	96,41	96,37	96,49	97,24	97,28	97,25	97,33	97,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	98,82	99,05	98,72	98,98	99,12	97,26	97,08	97,58	97,47	97,25	98,08	98,10	98,17	98,24	98,20
10	Kepulauan Riau	99,45	99,26	99,48	99,35	99,46	98,53	98,92	98,56	98,74	98,92	99,00	99,09	99,02	99,05	99,20
11	DKI Jakarta	99,81	99,79	99,83	99,74	99,78	99,57	99,67	99,55	99,65	99,52	99,69	99,73	99,69	99,69	99,65
12	Jawa Barat	99,30	99,29	99,03	99,14	98,99	97,96	97,93	97,93	97,88	98,13	98,63	98,62	98,49	98,51	98,57
13	Jawa Tengah	96,23	96,26	96,20	96,68	96,55	91,11	91,39	92,34	92,06	92,51	93,62	93,79	94,26	94,34	94,50
14	DI Yogyakarta	97,40	97,46	97,15	97,46	97,73	92,86	93,05	93,21	93,77	93,64	95,09	95,22	95,15	95,59	95,65
15	Jawa Timur	95,19	95,15	95,41	96,10	95,89	89,92	90,06	91,28	91,39	92,44	92,50	92,56	93,32	93,70	94,13
16	Banten	98,87	98,84	98,76	99,10	98,92	96,86	96,69	97,54	97,36	97,88	97,88	97,78	98,16	98,23	98,41
17	Bali	96,99	97,39	97,45	97,57	97,86	92,59	92,59	93,61	93,63	93,71	94,80	95,00	95,53	95,61	95,79
18	Nusa Tenggara Barat	91,19	91,02	91,38	92,05	92,70	84,34	83,95	86,59	86,31	87,07	87,60	87,39	88,97	89,11	89,83
19	Nusa Tenggara Timur	94,22	94,84	95,26	96,14	95,75	92,45	92,91	94,01	94,13	94,57	93,31	93,85	94,63	95,11	95,15
20	Kalimantan Barat	95,91	95,87	95,48	96,56	96,42	90,83	90,88	92,36	92,99	93,60	93,41	93,41	93,96	94,79	95,03
21	Kalimantan Tengah	99,65	99,34	99,43	99,27	99,17	98,69	98,83	98,78	98,78	98,47	99,20	99,10	99,12	99,03	98,83
22	Kalimantan Selatan	99,15	99,15	99,07	99,10	99,03	97,75	97,37	97,63	97,64	97,65	98,45	98,27	98,36	98,37	98,34
23	Kalimantan Timur	99,44	99,30	99,42	99,46	99,15	98,44	98,48	98,49	98,54	98,75	98,97	98,90	98,97	99,01	98,96
24	Kalimantan Utara	97,52	97,00	98,26	98,34	98,09	95,71	96,04	97,09	97,17	96,57	96,66	96,55	97,71	97,78	97,37
25	Sulawesi Utara	99,82	99,82	99,79	99,78	99,83	99,76	99,78	99,84	99,80	99,65	99,79	99,80	99,81	99,79	99,75
26	Sulawesi Tengah	98,77	98,82	98,46	98,63	98,83	97,70	97,73	97,63	97,65	97,86	98,24	98,28	98,05	98,14	98,35
27	Sulawesi Selatan	93,83	93,88	94,32	95,23	95,18	91,39	91,19	92,35	92,53	93,11	92,56	92,49	93,31	93,83	94,11
28	Sulawesi Tenggara	96,86	96,77	96,69	97,44	97,30	93,14	93,12	94,88	94,66	95,29	95,00	94,94	95,79	96,03	96,29
29	Gorontalo	98,64	98,78	98,40	98,47	98,47	98,86	98,72	98,44	98,52	98,62	98,75	98,75	98,42	98,49	98,55
30	Sulawesi Barat	94,84	95,08	95,72	95,67	96,20	91,51	91,09	91,84	92,99	93,81	93,17	93,09	93,82	94,33	95,00
31	Maluku	99,66	99,46	99,56	99,59	99,79	99,17	99,38	99,24	99,35	99,28	99,42	99,42	99,40	99,47	99,53
32	Maluku Utara	99,20	99,42	99,18	99,47	99,08	98,33	97,98	98,35	98,15	98,53	98,77	98,71	98,78	98,81	98,80
33	Papua	82,49	81,33	82,96	85,80	98,94	72,69	76,17	79,18	82,47	97,76	77,90	78,89	81,19	84,22	98,37
34	Papua Barat	98,26	98,67	98,06	98,42	98,20	96,67	97,08	97,18	97,21	97,54	97,52	97,91	97,64	97,84	97,84
35	Papua Selatan	-	-	-	-	95,48	-	-	-	-	92,88	-	-	-	-	94,21
36	Papua Tengah	-	-	-	-	86,20	-	-	-	-	83,01	-	-	-	-	84,69
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	72,69	-	-	-	-	67,83	-	-	-	-	70,37
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	98,36	-	-	-	-	97,29	-	-	-	-	97,84
Indonesia		97,45	97,43	97,42	97,77	97,69	94,55	94,65	95,26	95,29	95,66	96,00	96,04	96,35	96,53	96,67

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 3.i

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024

No	Provinsi	2022				2023				2024			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	99,44	97,96	83,10	34,31	99,43	97,72	83,41	35,24	99,42	97,77	81,55	34,81
2	Sumatera Utara	99,50	96,78	78,66	29,06	99,51	96,76	79,25	31,08	99,50	97,35	78,59	30,22
3	Sumatera Barat	99,55	96,52	83,71	39,39	99,76	96,79	84,33	42,19	99,71	96,80	84,40	42,75
4	Riau	99,61	95,72	77,32	30,23	99,65	95,89	78,15	32,32	99,67	95,94	78,49	31,34
5	Jambi	99,33	96,20	72,53	25,10	99,49	96,01	72,46	25,79	99,61	96,25	71,97	25,85
6	Sumatera Selatan	99,38	95,06	70,93	19,82	99,41	95,27	71,71	21,49	99,39	95,45	70,80	20,11
7	Bengkulu	99,49	97,73	79,31	33,04	99,42	97,91	79,57	34,05	99,51	97,93	79,07	35,13
8	Lampung	99,56	95,63	71,14	22,37	99,61	95,93	71,74	23,51	99,50	96,07	72,35	22,53
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,41	93,00	68,42	18,88	99,51	93,20	69,53	19,38	99,66	93,52	72,69	19,74
10	Kepulauan Riau	99,28	99,01	84,54	22,66	99,29	99,07	84,97	22,43	99,47	98,91	85,56	26,28
11	DKI Jakarta	99,44	97,95	72,10	27,23	99,49	98,17	72,50	28,43	99,25	98,36	79,95	32,98
12	Jawa Barat	99,39	95,27	68,66	24,82	99,40	95,75	68,58	26,45	99,46	95,86	71,15	26,59
13	Jawa Tengah	99,58	96,77	70,82	25,03	99,57	97,08	70,87	26,52	99,57	97,12	71,60	25,61
14	DI Yogyakarta	99,59	99,01	89,95	56,69	99,63	98,88	91,17	55,80	99,65	98,90	90,36	54,17
15	Jawa Timur	99,14	97,64	73,40	26,87	99,28	97,64	74,07	28,59	99,34	97,68	76,44	28,88
16	Banten	99,33	96,39	69,22	23,67	99,43	96,65	69,64	24,85	99,52	96,67	71,91	26,04
17	Bali	99,55	97,85	83,84	32,90	99,61	97,95	84,73	34,31	99,65	98,79	85,17	35,39
18	Nusa Tenggara Barat	99,17	97,74	77,43	26,93	99,46	97,95	77,46	28,45	99,47	97,86	77,81	28,88
19	Nusa Tenggara Timur	98,59	94,83	75,55	32,12	98,62	94,89	75,93	33,03	98,81	94,76	75,75	33,24
20	Kalimantan Barat	98,73	92,64	68,72	25,88	98,81	92,92	69,25	27,42	99,00	93,05	69,39	26,98
21	Kalimantan Tengah	99,20	94,61	66,32	24,94	99,13	95,21	66,32	25,49	99,32	95,24	68,33	24,12
22	Kalimantan Selatan	99,43	94,01	69,88	27,64	99,30	94,12	69,95	29,09	99,30	93,70	72,31	29,45
23	Kalimantan Timur	99,57	98,75	81,43	33,40	99,64	98,71	81,50	34,75	99,69	98,73	81,84	33,43
24	Kalimantan Utara	98,98	97,03	76,50	29,01	99,22	96,96	77,03	30,83	98,97	96,57	78,89	30,71
25	Sulawesi Utara	99,34	94,86	74,33	24,41	99,34	95,00	74,55	25,88	99,37	96,24	72,48	25,83
26	Sulawesi Tengah	98,22	93,02	75,84	29,79	98,34	93,13	76,29	30,31	98,47	94,12	74,16	30,38
27	Sulawesi Selatan	99,43	93,20	70,81	35,79	99,49	93,22	71,00	37,89	99,50	93,41	73,17	37,02
28	Sulawesi Tenggara	99,05	94,80	74,53	33,98	99,20	95,00	74,60	33,59	99,06	95,76	75,73	33,37
29	Gorontalo	98,93	91,83	71,68	34,04	98,69	91,85	71,70	35,50	98,79	91,35	72,70	34,43
30	Sulawesi Barat	98,40	89,39	70,85	25,02	98,31	89,47	71,57	25,42	98,49	91,24	72,09	25,32
31	Maluku	99,55	97,69	79,03	43,43	99,59	97,97	79,90	40,27	99,49	97,83	77,70	39,58
32	Maluku Utara	99,13	97,59	77,70	32,65	99,12	97,51	78,38	32,19	99,11	96,68	76,02	29,50
33	Papua	84,35	81,66	65,93	25,12	83,61	80,91	64,15	26,06	97,09	96,98	80,38	38,17
34	Papua Barat	98,27	97,37	80,56	34,98	98,41	97,42	80,58	35,74	97,60	95,61	75,32	31,18
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	90,47	85,51	71,68	31,73
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	74,63	68,42	47,65	17,96
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	79,98	73,12	56,09	17,84
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	99,17	95,82	81,14	37,35
Indonesia		99,10	95,92	73,15	27,61	99,16	96,10	73,42	28,96	99,19	96,17	74,64	29,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 3.j

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2024

No	Provinsi	2020			2021			2022			2023			2024		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	108,70	97,79	90,90	108,10	97,74	92,63	108,34	95,02	92,53	108,48	95,51	93,80	108,57	94,30	96,60
2	Sumatera Utara	108,53	91,68	94,68	107,85	91,87	96,75	108,31	90,31	97,23	106,85	92,11	98,02	108,11	91,79	97,43
3	Sumatera Barat	108,68	92,33	90,01	108,66	93,24	90,38	108,47	92,57	90,66	108,03	92,66	92,00	107,74	96,24	93,65
4	Riau	105,89	94,89	84,61	105,52	95,25	84,11	105,82	94,45	84,85	105,35	92,91	85,12	107,47	92,63	87,69
5	Jambi	109,39	88,91	83,71	109,48	88,96	84,47	109,55	87,84	84,33	108,29	88,20	85,23	107,13	89,97	85,18
6	Sumatera Selatan	111,58	88,78	81,73	111,39	89,44	82,30	112,00	89,41	81,11	110,51	89,78	82,26	107,41	85,46	85,20
7	Bengkulu	109,22	91,32	94,14	109,31	92,11	93,79	109,23	90,79	93,97	107,67	93,10	94,53	107,16	92,24	97,41
8	Lampung	105,93	92,56	85,84	105,63	93,12	88,38	105,91	92,37	87,40	105,31	91,19	89,12	104,60	90,85	89,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	107,43	88,19	87,15	107,16	88,44	86,49	107,26	87,85	86,50	106,09	88,51	88,28	106,47	88,74	87,02
10	Kepulauan Riau	106,31	93,97	87,53	106,60	94,12	86,31	106,26	93,27	87,08	105,96	92,58	90,58	105,55	92,82	95,73
11	DKI Jakarta	103,43	91,74	76,87	103,17	91,56	77,08	103,34	89,89	76,91	103,63	95,78	77,40	102,49	98,63	78,52
12	Jawa Barat	104,72	91,75	78,26	104,57	93,33	78,10	104,55	93,46	78,86	104,53	94,69	79,07	102,99	95,60	80,56
13	Jawa Tengah	106,32	93,21	86,83	106,40	94,00	86,65	106,19	94,05	86,83	105,01	92,80	87,84	103,86	90,89	88,54
14	DI Yogyakarta	105,96	95,44	89,30	105,15	95,54	90,50	104,96	94,02	89,93	104,52	94,28	90,82	102,11	98,43	91,88
15	Jawa Timur	104,35	96,40	85,24	104,52	97,17	87,55	104,68	95,95	87,37	103,71	94,74	89,26	102,54	93,89	88,67
16	Banten	107,24	92,76	73,35	106,91	94,88	75,66	106,89	94,05	75,49	106,96	95,71	75,02	107,04	93,32	79,42
17	Bali	102,87	97,40	88,67	103,09	98,68	89,87	103,16	96,23	90,82	102,70	98,18	93,40	104,51	95,25	94,16
18	Nusa Tenggara Barat	107,02	93,59	91,77	107,23	93,72	93,75	107,21	92,59	93,68	107,07	93,32	93,23	105,80	92,28	95,79
19	Nusa Tenggara Timur	113,40	89,85	84,70	113,55	90,78	86,36	113,36	89,88	86,38	111,35	90,41	88,66	110,58	91,73	89,20
20	Kalimantan Barat	111,53	85,22	84,51	111,01	85,45	85,21	111,84	84,59	84,79	109,46	84,49	88,52	109,71	83,94	86,33
21	Kalimantan Tengah	108,49	90,61	82,29	108,21	91,07	83,07	107,39	89,70	83,97	106,98	88,06	85,63	106,34	88,28	86,17
22	Kalimantan Selatan	107,28	86,31	79,10	107,14	86,04	80,77	107,18	86,40	80,97	107,41	86,44	82,21	105,32	90,22	82,17
23	Kalimantan Timur	105,75	92,17	95,23	105,26	92,03	95,52	105,21	91,47	95,09	106,46	92,28	95,16	105,31	91,72	98,75
24	Kalimantan Utara	100,54	101,47	98,31	99,78	100,90	96,55	100,70	99,85	97,57	101,52	97,60	97,78	103,23	96,35	95,36
25	Sulawesi Utara	106,62	90,63	86,83	106,56	90,45	86,17	106,48	89,63	86,03	105,41	90,12	86,03	107,21	89,45	86,12
26	Sulawesi Tengah	103,95	91,98	88,42	103,68	93,17	88,06	103,55	92,86	87,99	102,66	93,06	88,69	103,16	90,64	88,39
27	Sulawesi Selatan	106,99	86,23	86,44	106,85	86,82	87,07	106,71	86,19	86,49	106,65	87,15	88,04	105,98	86,57	90,49
28	Sulawesi Tenggara	107,97	87,10	87,74	108,22	87,54	89,50	108,48	86,04	89,14	108,23	85,28	90,31	107,33	85,61	91,83
29	Gorontalo	109,48	79,25	88,65	108,44	79,37	87,97	108,70	79,37	87,83	108,75	79,66	89,11	105,52	82,15	89,80
30	Sulawesi Barat	106,05	84,67	84,36	105,09	85,27	87,81	106,08	84,58	87,86	104,23	84,95	89,18	104,78	82,07	86,07
31	Maluku	110,08	91,08	95,95	110,79	90,57	95,74	111,05	87,85	95,96	108,90	90,35	95,96	107,62	88,79	95,86
32	Maluku Utara	108,71	88,28	93,44	108,07	87,99	95,04	108,05	88,35	95,40	107,81	88,17	95,64	106,94	92,44	91,01
33	Papua	91,27	81,24	76,55	93,07	81,68	75,05	94,26	83,51	77,06	91,10	81,91	73,90	103,25	100,21	92,15
34	Papua Barat	110,17	90,79	97,72	111,02	90,55	97,25	110,42	90,45	97,71	109,24	91,41	96,79	108,57	90,92	93,26
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,01	82,56	80,28
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,02	76,94	53,66
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,98	76,56	64,27
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,03	92,48	98,09
Indonesia		106,32	92,06	84,53	106,20	92,80	85,23	106,27	92,11	85,49	105,62	92,51	86,34	104,82	92,21	87,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 3.k

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/Sederajat	SMP / Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)	SD/Sederajat	SMP / Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)	SD/Sederajat	SMP / Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	108,50	95,65	91,58	39,54	108,64	92,95	101,96	45,48	108,57	94,30	96,60	42,48
2	Sumatera Utara	107,81	91,54	93,22	28,15	108,43	92,06	101,79	35,18	108,11	91,79	97,43	31,63
3	Sumatera Barat	107,01	95,22	89,76	36,54	108,48	97,28	97,64	50,64	107,74	96,24	93,65	43,29
4	Riau	108,45	90,42	85,83	32,48	106,49	94,87	89,63	37,44	107,47	92,63	87,69	34,86
5	Jambi	106,97	86,47	83,83	27,29	107,29	93,56	86,52	36,83	107,13	89,97	85,18	31,89
6	Sumatera Selatan	108,94	86,08	76,71	24,06	105,88	84,88	94,38	28,94	107,41	85,46	85,20	26,41
7	Bengkulu	106,18	92,24	93,63	35,52	108,16	92,25	101,15	40,08	107,16	92,24	97,41	37,79
8	Lampung	104,43	88,39	90,38	19,68	104,77	93,28	88,68	24,98	104,60	90,85	89,54	22,29
9	Kepulauan Bangka Belitung	106,89	92,19	75,97	20,62	106,05	85,43	99,60	19,66	106,47	88,74	87,02	20,14
10	Kepulauan Riau	106,02	92,12	91,03	25,86	105,08	93,58	100,29	35,61	105,55	92,82	95,73	30,48
11	DKI Jakarta	103,32	98,91	79,55	37,27	101,65	98,34	77,47	46,28	102,49	98,63	78,52	41,98
12	Jawa Barat	103,69	95,12	80,04	25,50	102,27	96,10	81,08	29,09	102,99	95,60	80,56	27,21
13	Jawa Tengah	104,51	90,58	87,84	23,51	103,20	91,22	89,27	29,34	103,86	90,89	88,54	26,37
14	DI Yogyakarta	101,76	94,76	92,87	71,30	102,51	101,98	90,79	76,45	102,11	98,43	91,88	73,90
15	Jawa Timur	102,53	94,10	87,31	27,63	102,55	93,67	90,09	36,05	102,54	93,89	88,67	31,85
16	Banten	106,82	91,98	79,30	29,15	107,27	94,75	79,54	35,74	107,04	93,32	79,42	32,40
17	Bali	106,32	93,05	90,93	35,39	102,50	97,50	97,85	40,97	104,51	95,25	94,16	38,15
18	Nusa Tenggara Barat	106,81	91,75	89,31	33,94	104,74	92,81	102,18	35,71	105,80	92,28	95,79	34,80
19	Nusa Tenggara Timur	111,18	91,79	82,16	31,04	109,98	91,67	96,33	31,91	110,58	91,73	89,20	31,47
20	Kalimantan Barat	108,79	80,86	84,68	23,73	110,70	86,99	87,98	26,29	109,71	83,94	86,33	24,99
21	Kalimantan Tengah	107,48	85,38	82,87	24,17	105,19	91,54	89,55	31,05	106,34	88,28	86,17	27,49
22	Kalimantan Selatan	106,16	91,06	81,00	23,61	104,50	89,35	83,36	32,80	105,32	90,22	82,17	28,06
23	Kalimantan Timur	105,93	90,05	98,48	35,14	104,67	93,56	99,05	45,10	105,31	91,72	98,75	40,03
24	Kalimantan Utara	103,11	100,09	89,33	21,66	103,34	92,93	101,97	34,90	103,23	96,35	95,36	27,98
25	Sulawesi Utara	106,19	88,75	84,80	24,73	108,27	90,24	87,44	45,27	107,21	89,45	86,12	34,75
26	Sulawesi Tengah	101,64	90,01	82,58	38,03	104,75	91,31	94,32	42,71	103,16	90,64	88,39	40,38
27	Sulawesi Selatan	105,96	84,76	85,66	36,90	106,01	88,39	95,32	46,85	105,98	86,57	90,49	41,83
28	Sulawesi Tenggara	106,66	83,86	88,03	40,59	108,03	87,41	95,95	45,23	107,33	85,61	91,83	42,95
29	Gorontalo	104,31	81,48	84,36	32,39	106,84	82,83	94,67	39,09	105,52	82,15	89,80	35,68
30	Sulawesi Barat	106,19	81,21	82,79	22,75	103,33	82,84	89,38	38,73	104,78	82,07	86,07	30,41
31	Maluku	107,68	89,71	90,83	43,70	107,56	87,77	101,25	52,04	107,62	88,79	95,86	47,91
32	Maluku Utara	108,59	90,35	87,60	43,62	105,18	94,48	94,52	40,79	106,94	92,44	91,01	42,22
33	Papua	102,31	106,34	85,84	33,25	104,23	94,29	99,33	38,51	103,25	100,21	92,15	35,63
34	Papua Barat	107,79	94,54	90,49	22,60	109,46	87,30	96,13	33,27	108,57	90,92	93,26	27,52
35	Papua Selatan	100,18	83,26	87,24	28,12	107,90	81,83	72,62	21,84	104,01	82,56	80,28	25,07
36	Papua Tengah	74,01	74,69	53,61	14,63	74,04	79,90	53,72	16,33	74,02	76,94	53,66	15,45
37	Papua Pegunungan	79,27	79,74	64,14	13,23	82,81	73,35	64,42	11,10	80,98	76,56	64,27	12,23
38	Papua Barat Daya	111,48	84,90	95,70	34,88	104,50	102,62	100,47	38,69	108,03	92,48	98,09	36,71
Indonesia		105,11	91,62	85,21	28,89	104,51	92,83	89,43	35,23	104,82	92,21	87,29	32,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 3.n

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023-2024

No	Provinsi	IPM		Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	74,70	75,36	73,06	73,20	14,38	14,39	9,55	9,64	10.334	10.811
2	Sumatera Utara	75,13	76,76	73,67	73,90	13,48	13,49	9,82	9,93	11.049	11.460
3	Sumatera Barat	75,64	76,43	74,14	74,37	14,11	14,30	9,28	9,44	11.380	11.718
4	Riau	74,95	75,67	74,18	74,41	13,30	13,42	9,32	9,43	11.448	11.857
5	Jambi	73,73	74,36	73,84	74,06	13,13	13,14	8,81	8,90	11.160	11.621
6	Sumatera Selatan	73,18	73,84	74,04	74,26	12,63	12,64	8,50	8,57	11.472	12.015
7	Bengkulu	74,30	74,91	73,11	73,31	13,74	13,75	9,03	9,04	11.172	11.733
8	Lampung	72,48	73,13	74,17	74,39	12,77	12,78	8,29	8,36	10.769	11.258
9	Kepulauan Bangka Belitung	74,09	74,55	73,90	74,12	12,31	12,49	8,25	8,33	13.589	13.667
10	Kepulauan Riau	79,08	79,89	74,90	75,12	13,05	13,27	10,41	10,50	14.998	15.573
11	DKI Jakarta	83,55	84,15	75,81	75,99	13,33	13,51	11,45	11,49	19.373	19.953
12	Jawa Barat	74,24	74,92	74,91	75,16	12,68	12,80	8,83	8,87	11.695	12.157
13	Jawa Tengah	73,39	73,87	74,69	74,91	12,85	12,86	8,01	8,02	11.835	12.276
14	DI Yogyakarta	81,09	81,62	75,18	75,36	15,66	15,70	9,83	9,92	14.924	15.361
15	Jawa Timur	74,65	75,35	74,87	75,07	13,38	13,43	8,11	8,28	12.421	12.852
16	Banten	75,77	76,35	74,77	74,97	13,09	13,10	9,15	9,23	12.601	13.097
17	Bali	78,01	78,63	74,88	75,10	13,58	13,62	9,45	9,54	14.382	14.920
18	Nusa Tenggara Barat	72,37	73,10	72,02	72,25	13,97	13,98	7,74	7,87	11.095	11.606
19	Nusa Tenggara Timur	68,40	69,14	71,57	71,83	13,22	13,23	7,82	8,02	8.248	8.534
20	Kalimantan Barat	70,47	71,19	73,71	73,94	12,67	12,68	7,71	7,78	9.810	10.321
21	Kalimantan Tengah	73,73	74,28	73,54	73,73	12,76	12,77	8,73	8,81	11.878	12.303
22	Kalimantan Selatan	74,66	75,19	73,97	74,18	12,86	12,87	8,55	8,62	12.953	13.399
23	Kalimantan Timur	78,20	78,79	74,72	74,94	14,02	14,03	9,99	10,02	13.202	13.793
24	Kalimantan Utara	72,88	73,41	73,54	73,57	13,20	13,21	9,34	9,35	9.734	10.197
25	Sulawesi Utara	75,04	75,68	73,85	74,08	12,96	12,97	9,77	9,84	11.497	11.998
26	Sulawesi Tengah	71,66	72,24	70,66	70,84	13,33	13,34	8,96	9,04	10.149	10.536
27	Sulawesi Selatan	74,60	75,18	73,63	73,83	13,54	13,55	8,76	8,86	11.841	12.275
28	Sulawesi Tenggara	72,94	73,62	71,79	71,88	13,70	13,71	9,31	9,42	10.117	10.606
29	Gorontalo	71,25	72,01	70,50	70,73	13,16	13,17	8,10	8,29	11.069	11.539
30	Sulawesi Barat	69,80	70,46	70,76	71,03	12,88	12,89	8,13	8,15	9.718	10.208
31	Maluku	72,75	73,40	70,45	70,68	14,08	14,09	10,20	10,26	9.278	9.684
32	Maluku Utara	70,98	71,84	70,76	71,05	13,74	13,75	9,26	9,37	8.834	9.320
33	Papua	63,01	73,83	68,17	70,47	11,15	13,72	7,15	9,82	7.562	11.037
34	Papua Barat	67,47	67,69	68,51	68,47	13,34	13,17	7,93	7,86	8.404	8.805
35	Papua Selatan	-	68,86	-	68,46	-	12,67	-	8,38	-	9.756
36	Papua Tengah	-	60,25	-	68,18	-	9,63	-	6,12	-	7.809
37	Papua Pegunungan	-	54,43	-	67,39	-	9,97	-	4,21	-	5.707
38	Papua Barat Daya	-	69,65	-	70,02	-	13,88	-	8,39	-	8.733
Indonesia		74,39	75,02	73,93	74,15	13,15	13,21	8,77	8,85	11.899	12.341

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Catatan:

Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Lampiran 3.1

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2024

No	Provinsi	2020			2021			2022			2023			2024		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/Pak et B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	99,03	86,87	70,70	98,95	86,95	70,80	99,07	88,21	71,16	98,97	84,85	71,70	97,96	84,22	70,94
2	Sumatera Utara	97,73	80,56	68,00	97,69	81,13	67,99	98,00	81,84	68,27	97,95	82,09	68,67	97,68	82,15	69,72
3	Sumatera Barat	98,80	78,41	68,90	98,82	78,75	68,99	98,80	78,86	68,38	98,89	80,22	69,18	98,89	82,94	72,50
4	Riau	97,73	80,48	64,01	97,85	80,52	64,00	97,80	80,43	63,87	98,13	80,76	64,81	98,45	81,14	68,04
5	Jambi	99,11	79,93	61,38	99,41	79,88	61,56	99,33	79,93	60,73	99,33	80,23	60,60	98,17	79,65	62,48
6	Sumatera Selatan	97,91	77,97	60,45	98,00	78,31	60,53	98,08	78,68	61,00	98,12	79,12	61,24	97,53	77,58	62,70
7	Bengkulu	98,65	79,77	65,82	98,61	80,25	66,08	98,60	80,25	66,61	98,61	81,08	67,09	98,33	82,36	69,14
8	Lampung	99,16	81,17	59,58	99,10	82,03	60,31	99,29	82,07	61,96	99,22	80,64	62,84	98,33	81,40	64,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,73	74,59	58,82	97,89	74,60	58,79	98,01	74,68	59,65	98,11	77,00	60,72	98,29	77,59	61,71
10	Kepulauan Riau	99,16	86,47	73,45	99,26	86,60	73,36	99,20	86,76	73,54	99,29	86,78	74,11	98,71	87,10	77,54
11	DKI Jakarta	98,05	82,47	60,42	98,22	83,01	60,53	98,37	84,22	60,88	98,44	84,95	60,81	98,39	88,67	64,85
12	Jawa Barat	98,37	82,06	57,90	98,37	82,88	58,58	98,29	82,80	58,60	98,20	83,61	59,01	98,53	84,61	60,68
13	Jawa Tengah	97,90	80,53	59,74	98,22	80,99	60,46	98,39	81,02	61,17	98,46	81,56	61,46	98,39	81,03	62,56
14	DI Yogyakarta	99,59	83,98	70,98	99,44	83,62	71,42	99,43	85,28	74,50	99,36	85,62	76,37	99,43	90,14	77,86
15	Jawa Timur	97,99	83,53	62,24	97,90	83,80	62,63	98,09	83,80	62,10	98,04	83,91	62,59	98,81	84,52	64,77
16	Banten	97,95	82,73	59,06	98,15	84,28	59,69	97,93	84,67	59,54	97,97	85,43	60,42	98,09	83,68	63,50
17	Bali	96,84	87,26	73,29	97,20	87,11	74,82	97,46	86,88	74,73	97,77	84,78	75,60	98,70	86,30	74,19
18	Nusa Tenggara Barat	98,78	84,98	66,81	98,81	85,28	67,09	98,83	86,05	67,61	98,76	84,03	68,04	98,57	83,55	71,09
19	Nusa Tenggara Timur	96,09	69,82	54,09	96,04	69,99	54,29	96,08	70,05	56,00	95,98	73,47	58,15	97,01	73,72	60,73
20	Kalimantan Barat	97,36	67,42	51,70	97,42	68,11	51,77	97,52	68,32	51,87	97,70	70,85	54,76	98,60	72,90	57,18
21	Kalimantan Tengah	99,11	78,45	54,08	99,01	78,80	54,25	99,11	78,75	55,69	99,05	79,07	55,63	98,35	80,49	58,05
22	Kalimantan Selatan	98,76	75,51	58,25	98,94	75,88	58,37	99,12	76,28	59,61	99,14	77,44	59,83	98,68	78,14	60,26
23	Kalimantan Timur	98,44	81,28	69,00	98,36	81,30	69,29	98,45	82,65	69,10	98,53	83,36	69,89	98,59	83,70	72,37
24	Kalimantan Utara	93,46	79,09	64,75	93,38	79,21	65,37	93,69	79,38	65,65	94,73	80,53	66,70	95,18	81,61	67,90
25	Sulawesi Utara	95,13	74,82	63,43	95,39	74,94	63,33	95,44	76,11	63,30	95,68	76,56	63,86	95,87	77,27	65,47
26	Sulawesi Tengah	93,24	74,42	65,02	93,33	74,99	65,44	93,25	75,63	65,72	93,31	76,80	66,18	94,84	77,55	65,62
27	Sulawesi Selatan	97,98	76,17	60,32	98,26	77,02	60,35	98,41	77,42	60,44	98,41	77,98	60,57	97,81	76,84	62,71
28	Sulawesi Tenggara	97,70	77,64	63,41	98,15	77,86	63,70	98,27	77,77	64,11	98,48	76,54	64,00	97,33	77,12	66,66
29	Gorontalo	98,50	70,68	57,86	98,65	71,15	58,21	98,74	71,66	58,47	98,69	73,55	60,18	98,20	72,51	61,23
30	Sulawesi Barat	95,80	69,98	58,05	95,68	70,03	59,77	95,81	70,34	60,24	95,92	72,39	61,17	96,82	71,77	62,10
31	Maluku	96,85	75,15	64,81	96,92	75,53	64,71	96,90	78,37	64,57	97,27	78,58	66,16	97,27	79,72	69,61
32	Maluku Utara	97,21	76,90	64,25	97,20	77,03	64,11	97,27	77,41	65,35	97,36	78,53	65,75	96,41	79,34	68,02
33	Papua	79,34	57,95	44,73	80,38	57,93	44,41	81,66	59,14	47,63	80,67	60,23	48,32	92,52	75,41	61,33
34	Papua Barat	93,88	70,51	63,62	94,09	70,52	63,51	94,31	71,38	63,66	94,52	74,70	65,92	95,15	72,10	61,18
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,86	52,03	44,79
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,03	57,49	36,84
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,40	58,83	45,60
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,39	72,31	68,52
Indonesia		97,69	80,12	61,25	97,80	80,59	61,65	97,88	80,89	61,97	97,89	81,35	62,53	97,94	81,73	64,32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 3.m

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2024

No	Provinsi	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	73,48	74,11	74,70	75,36
2	Sumatera Utara	73,84	74,51	75,13	75,76
3	Sumatera Barat	74,56	75,16	75,64	76,43
4	Riau	73,89	74,45	74,95	75,67
5	Jambi	72,62	73,11	73,73	74,36
6	Sumatera Selatan	71,83	72,48	73,18	73,84
7	Bengkulu	73,16	73,68	74,30	74,91
8	Lampung	71,25	71,79	72,48	73,13
9	Kepulauan Bangka Belitung	72,96	73,50	74,09	74,55
10	Kepulauan Riau	77,87	78,48	79,08	79,89
11	DKI Jakarta	82,25	82,77	83,55	84,15
12	Jawa Barat	72,96	73,63	74,24	74,92
13	Jawa Tengah	72,17	72,80	73,39	73,87
14	DI Yogyakarta	80,22	80,65	81,09	81,62
15	Jawa Timur	73,48	74,05	74,65	75,35
16	Banten	74,68	75,25	75,77	76,35
17	Bali	76,69	77,40	78,01	78,63
18	Nusa Tenggara Barat	70,86	71,65	72,37	73,10
19	Nusa Tenggara Timur	67,02	67,63	68,40	69,14
20	Kalimantan Barat	68,99	69,71	70,47	71,19
21	Kalimantan Tengah	72,81	73,17	73,73	74,28
22	Kalimantan Selatan	73,45	74,00	74,66	75,19
23	Kalimantan Timur	76,60	77,36	78,20	78,79
24	Kalimantan Utara	71,57	72,21	72,88	73,41
25	Sulawesi Utara	74,03	74,52	75,04	75,68
26	Sulawesi Tengah	70,54	71,01	71,66	72,24
27	Sulawesi Selatan	73,38	73,96	74,60	75,18
28	Sulawesi Tenggara	71,82	72,38	72,94	73,62
29	Gorontalo	69,82	70,62	71,25	72,01
30	Sulawesi Barat	68,64	69,19	69,80	70,46
31	Maluku	71,55	72,04	72,75	73,40
32	Maluku Utara	69,56	70,26	70,98	71,84
33	Papua	61,40	62,16	63,01	73,83
34	Papua Barat	66,11	66,72	67,47	67,69
35	Papua Selatan	-	-	-	68,86
36	Papua Tengah	-	-	-	60,25
37	Papua Pegunungan	-	-	-	54,43
38	Papua Barat Daya	-	-	-	69,65
Indonesia		73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Catatan:

Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Lampiran 4.a

**JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2020- 2024**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	359	360	362	365	366
2	Sumatera Utara	608	615	615	619	619
3	Sumatera Barat	276	279	280	280	280
4	Riau	231	234	238	239	241
5	Jambi	207	207	207	208	208
6	Sumatera Selatan	343	345	348	350	354
7	Bengkulu	179	179	179	179	179
8	Lampung	312	315	318	320	322
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	64	64
10	Kepulauan Riau	88	93	93	95	96
11	DKI Jakarta	315	315	315	44	44
12	Jawa Barat	1.083	1.086	1.100	1.100	1.106
13	Jawa Tengah	878	880	880	881	881
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	968	971	969	972	973
16	Banten	245	245	247	253	253
17	Bali	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	174	175	176	176	177
19	Nusa Tenggara Timur	410	421	429	435	440
20	Kalimantan Barat	246	247	248	249	249
21	Kalimantan Tengah	205	205	204	204	205
22	Kalimantan Selatan	236	237	241	242	242
23	Kalimantan Timur	187	188	188	188	188
24	Kalimantan Utara	55	56	57	58	58
25	Sulawesi Utara	195	198	199	199	201
26	Sulawesi Tengah	207	215	218	218	219
27	Sulawesi Selatan	461	469	472	474	474
28	Sulawesi Tenggara	292	293	302	307	308
29	Gorontalo	93	93	93	95	95
30	Sulawesi Barat	96	98	98	98	98
31	Maluku	215	222	228	229	241
32	Maluku Utara	147	147	148	150	150
33	Papua	428	437	454	121	123
34	Papua Barat	161	162	163	76	80
35	Papua Selatan	-	-	-	85	85
36	Papua Tengah	-	-	-	118	125
37	Papua Pegunungan	-	-	-	153	179
38	Papua Barat Daya	-	-	-	95	104
Indonesia		10.205	10.292	10.374	10.180	10.268

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.b

**JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2020 - 2024**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	181	180	179	171	174	178	180	183	194	192
2	Sumatera Utara	188	191	194	185	178	420	424	421	434	441
3	Sumatera Barat	111	113	115	109	108	165	166	165	171	172
4	Riau	102	109	116	118	120	129	125	122	121	121
5	Jambi	88	92	96	97	98	119	115	111	111	110
6	Sumatera Selatan	113	114	118	117	111	230	231	230	233	243
7	Bengkulu	52	53	52	52	52	127	126	127	127	127
8	Lampung	140	155	157	162	162	172	160	161	158	160
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	26	27	25	25	38	38	37	39	39
10	Kepulauan Riau	35	41	32	30	28	53	52	61	65	68
11	DKI Jakarta	6	6	6	2	2	309	309	309	42	42
12	Jawa Barat	299	299	309	276	278	784	787	791	824	828
13	Jawa Tengah	371	371	377	373	369	507	509	503	508	512
14	DI Yogyakarta	49	49	49	47	47	72	72	72	74	74
15	Jawa Timur	575	588	616	625	619	393	383	353	347	354
16	Banten	81	78	76	70	63	164	167	171	183	190
17	Bali	41	40	41	37	39	79	80	79	83	81
18	Nusa Tenggara Barat	142	143	146	144	152	32	32	30	32	25
19	Nusa Tenggara Timur	164	177	190	175	186	246	244	239	260	254
20	Kalimantan Barat	129	130	131	133	138	117	117	117	116	111
21	Kalimantan Tengah	86	87	88	87	86	119	118	116	117	119
22	Kalimantan Selatan	52	52	51	51	52	184	185	190	191	190
23	Kalimantan Timur	98	99	99	99	97	89	89	89	89	91
24	Kalimantan Utara	22	22	22	20	20	33	34	35	38	38
25	Sulawesi Utara	95	96	99	94	95	100	102	100	105	106
26	Sulawesi Tengah	104	104	110	116	120	103	111	108	102	99
27	Sulawesi Selatan	304	316	316	286	302	157	153	156	188	172
28	Sulawesi Tenggara	91	92	100	100	101	201	201	202	207	207
29	Gorontalo	26	27	27	25	25	67	66	66	70	70
30	Sulawesi Barat	60	61	61	45	55	36	37	37	53	43
31	Maluku	64	65	73	92	94	151	157	155	137	147
32	Maluku Utara	53	53	52	52	57	94	94	96	98	93
33	Papua	126	126	132	43	44	302	311	322	78	79
34	Papua Barat	45	45	45	26	26	116	117	118	50	54
35	Papua Selatan	-	-	-	59	59	-	-	-	26	26
36	Papua Tengah	-	-	-	26	29	-	-	-	92	96
37	Papua Pegunungan	-	-	-	23	23	-	-	-	130	156
38	Papua Barat Daya	-	-	-	18	18	-	-	-	77	86
Indonesia		4.119	4.200	4.302	4.210	4.252	6.086	6.092	6.072	5.970	6.016

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.c

**RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	366	290	1,26
2	Sumatera Utara	619	455	1,36
3	Sumatera Barat	280	179	1,56
4	Riau	241	172	1,40
5	Jambi	208	144	1,44
6	Sumatera Selatan	354	241	1,47
7	Bengkulu	179	129	1,39
8	Lampung	322	229	1,41
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,36
10	Kepulauan Riau	96	80	1,20
11	DKI Jakarta	44	44	1,00
12	Jawa Barat	1.106	627	1,76
13	Jawa Tengah	881	576	1,53
14	DI Yogyakarta	121	78	1,55
15	Jawa Timur	973	666	1,46
16	Banten	253	155	1,63
17	Bali	120	57	2,11
18	Nusa Tenggara Barat	177	117	1,51
19	Nusa Tenggara Timur	440	315	1,40
20	Kalimantan Barat	249	174	1,43
21	Kalimantan Tengah	205	136	1,51
22	Kalimantan Selatan	242	156	1,55
23	Kalimantan Timur	188	105	1,79
24	Kalimantan Utara	58	55	1,05
25	Sulawesi Utara	201	171	1,18
26	Sulawesi Tengah	219	175	1,25
27	Sulawesi Selatan	474	313	1,51
28	Sulawesi Tenggara	308	221	1,39
29	Gorontalo	95	77	1,23
30	Sulawesi Barat	98	69	1,42
31	Maluku	241	118	2,04
32	Maluku Utara	150	118	1,27
33	Papua	123	105	1,17
34	Papua Barat	80	86	0,93
35	Papua Selatan	85	82	1,04
36	Papua Tengah	125	131	0,95
37	Papua Pegunungan	179	252	0,71
38	Papua Barat Daya	104	132	0,79
Indonesia		10.268	7.277	1,41

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2024;

Jumlah kecamatan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.77 Tahun 2019

Lampiran 4.d

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
						Dasar	Madya	Utama	Paripurna	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	366	363	23	99,2	0	46	152	165	3
2	Sumatera Utara	619	619	33	100,0	11	68	247	293	0
3	Sumatera Barat	280	280	19	100,0	0	22	99	159	0
4	Riau	241	238	12	98,8	2	41	102	93	1
5	Jambi	208	208	11	100,0	0	24	116	68	0
6	Sumatera Selatan	354	350	17	98,9	0	14	134	202	0
7	Bengkulu	179	179	10	100,0	0	15	100	64	0
8	Lampung	322	320	15	99,4	0	14	157	149	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	100,0	0	0	9	55	0
10	Kepulauan Riau	96	93	7	96,9	2	8	28	55	3
11	DKI Jakarta	44	44	6	100,0	0	0	0	44	0
12	Jawa Barat	1.106	1.106	27	100,0	0	5	136	965	0
13	Jawa Tengah	881	881	35	100,0	0	3	43	835	0
14	DI Yogyakarta	121	121	5	100,0	0	0	2	119	0
15	Jawa Timur	973	973	38	100,0	0	0	54	919	0
16	Banten	253	253	8	100,0	1	7	59	186	0
17	Bali	120	120	9	100,0	0	0	11	109	0
18	Nusa Tenggara Barat	177	177	10	100,0	0	0	27	150	0
19	Nusa Tenggara Timur	440	434	22	98,6	11	99	156	168	1
20	Kalimantan Barat	249	249	14	100,0	0	15	86	148	0
21	Kalimantan Tengah	205	204	14	99,5	0	19	82	103	0
22	Kalimantan Selatan	242	242	13	100,0	0	15	75	152	0
23	Kalimantan Timur	188	188	10	100,0	0	0	27	161	0
24	Kalimantan Utara	58	52	5	89,7	0	6	9	37	6
25	Sulawesi Utara	201	198	15	98,5	1	40	78	79	1
26	Sulawesi Tengah	219	218	13	99,5	0	20	93	105	1
27	Sulawesi Selatan	474	473	24	99,8	0	5	96	372	1
28	Sulawesi Tenggara	308	307	17	99,7	0	42	146	119	1
29	Gorontalo	95	94	6	98,9	0	1	16	77	1
30	Sulawesi Barat	98	98	6	100,0	0	12	49	37	0
31	Maluku	241	225	11	93,4	7	55	101	62	15
32	Maluku Utara	150	150	10	100,0	1	45	60	44	0
33	Papua	123	111	9	90,2	13	39	37	22	11
34	Papua Barat	80	74	7	92,5	19	34	14	7	2
35	Papua Selatan	85	73	4	85,9	12	25	22	14	12
36	Papua Tengah	125	47	7	37,6	15	16	9	7	74
37	Papua Pegunungan	179	100	8	55,9	58	26	12	4	55
38	Papua Barat Daya	104	84	6	80,8	7	33	32	12	14
Indonesia		10.268	10.010	513	97,5	160	814	2.676	6.360	202

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.e

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas	% Memenuhi
		Belum Memenuhi	Memenuhi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	101	265	366	72,4
2	Sumatera Utara	403	216	619	34,9
3	Sumatera Barat	80	200	280	71,4
4	Riau	89	150	239	62,8
5	Jambi	89	119	208	57,2
6	Sumatera Selatan	187	163	350	46,6
7	Bengkulu	100	79	179	44,1
8	Lampung	216	104	320	32,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	17	47	64	73,4
10	Kepulauan Riau	41	55	96	57,3
11	DKI Jakarta	4	40	44	90,9
12	Jawa Barat	562	544	1.106	49,2
13	Jawa Tengah	185	696	881	79,0
14	DI Yogyakarta	23	98	121	81,0
15	Jawa Timur	340	633	973	65,1
16	Banten	135	118	253	46,6
17	Bali	41	79	120	65,8
18	Nusa Tenggara Barat	36	141	177	79,7
19	Nusa Tenggara Timur	277	158	435	36,3
20	Kalimantan Barat	153	96	249	38,6
21	Kalimantan Tengah	134	70	204	34,3
22	Kalimantan Selatan	54	188	242	77,7
23	Kalimantan Timur	60	128	188	68,1
24	Kalimantan Utara	27	31	58	53,5
25	Sulawesi Utara	127	72	199	36,2
26	Sulawesi Tengah	118	101	219	46,1
27	Sulawesi Selatan	139	335	474	70,7
28	Sulawesi Tenggara	162	146	308	47,4
29	Gorontalo	58	37	95	39,0
30	Sulawesi Barat	33	65	98	66,3
31	Maluku	204	36	240	15,0
32	Maluku Utara	106	44	150	29,3
33	Papua	109	13	122	10,7
34	Papua Barat	62	14	76	18,4
35	Papua Selatan	80	5	85	5,9
36	Papua Tengah	115	6	121	5,0
37	Papua Pegunungan	153	2	155	1,3
38	Papua Barat Daya	86	12	98	12,2
Indonesia		4.906	5.306	10.212	52,0

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2024

**) Perhitungan prosentase adalah jumlah puskesmas yang memenuhi dibanding jumlah puskesmas per provinsi (berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2024)

Lampiran 4.f

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas Baseline*)	% Dengan Dokter
		Tidak Ada Dokter	Ada Dokter		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	365	366	99,7
2	Sumatera Utara	5	614	619	99,2
3	Sumatera Barat	0	280	280	100,0
4	Riau	1	238	239	99,6
5	Jambi	0	208	208	100,0
6	Sumatera Selatan	6	344	350	98,3
7	Bengkulu	2	177	179	98,9
8	Lampung	2	318	320	99,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	2	94	96	97,9
11	DKI Jakarta	0	44	44	100,0
12	Jawa Barat	3	1.103	1.106	99,7
13	Jawa Tengah	3	878	881	99,7
14	DI Yogyakarta	0	121	121	100,0
15	Jawa Timur	6	967	973	99,4
16	Banten	0	253	253	100,0
17	Bali	0	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	0	177	177	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	20	415	435	95,4
20	Kalimantan Barat	5	244	249	98,0
21	Kalimantan Tengah	9	195	204	95,6
22	Kalimantan Selatan	1	241	242	99,6
23	Kalimantan Timur	1	187	188	99,5
24	Kalimantan Utara	1	57	58	98,3
25	Sulawesi Utara	1	198	199	99,5
26	Sulawesi Tengah	7	212	219	96,8
27	Sulawesi Selatan	9	465	474	98,1
28	Sulawesi Tenggara	9	299	308	97,1
29	Gorontalo	1	94	95	99,0
30	Sulawesi Barat	2	96	98	98,0
31	Maluku	29	211	240	87,9
32	Maluku Utara	15	135	150	90,0
33	Papua	17	105	122	86,1
34	Papua Barat	7	69	76	90,8
35	Papua Selatan	28	57	85	67,1
36	Papua Tengah	53	68	121	56,2
37	Papua Pegunungan	88	67	155	43,2
38	Papua Barat Daya	15	83	98	84,7
Indonesia		349	9.863	10.212	96,6

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2023

Lampiran 4.g

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan pembinaan kesehatan tradisional*	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan pembinaan kesehatan tradisional*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	22	95,7
2	Sumatera Utara	33	31	93,9
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	11	91,7
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	14	93,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	6	75,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	17	77,3
20	Kalimantan Barat	14	11	78,6
21	Kalimantan Tengah	14	12	85,7
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	4	80,0
25	Sulawesi Utara	15	11	73,3
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,3
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	4	66,7
30	Sulawesi Barat	6	5	83,3
31	Maluku	11	10	90,9
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua	9	5	55,6
34	Papua Barat	7	6	85,7
35	Papua Selatan	4	2	50,0
36	Papua Tengah	8	6	75,0
37	Papua Pegunungan	8	3	37,5
38	Papua Barat Daya	6	4	66,7
Indonesia		514	470	91,4

Sumber: Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: *) Kab/kota yg memiliki PKM yg melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

Lampiran 4.h

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama									
		Pemerintah*		TNI		POLRI		Masyarakat		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	305	54	3	0	6	0	59	9	373	63
2	Sumatera Utara	759	89	15	0	21	0	168	17	963	106
3	Sumatera Barat	212	39	3	0	8	0	54	12	277	51
4	Riau	388	39	4	0	6	0	148	13	546	52
5	Jambi	150	13	3	0	7	0	41	4	201	17
6	Sumatera Selatan	438	49	12	0	12	0	121	14	583	63
7	Bengkulu	103	8	1	0	4	0	16	2	124	10
8	Lampung	401	37	5	0	7	0	129	9	542	46
9	Kepulauan Bangka Belitung	86	14	0	0	3	0	15	8	104	22
10	Kepulauan Riau	218	41	4	0	2	0	63	12	287	53
11	DKI Jakarta	1235	611	20	0	10	0	373	249	1638	860
12	Jawa Barat	2413	440	20	0	13	0	926	137	3372	577
13	Jawa Tengah	1052	239	41	0	24	0	670	134	1787	373
14	DI Yogyakarta	213	68	7	0	5	0	98	25	323	93
15	Jawa Timur	1259	274	33	0	24	0	599	116	1915	390
16	Banten	936	180	2	0	4	0	316	43	1258	223
17	Bali	167	91	2	0	5	0	67	27	241	118
18	Nusa Tenggara Barat	160	34	2	0	8	0	33	9	203	43
19	Nusa Tenggara Timur	122	19	1	0	7	0	32	5	162	24
20	Kalimantan Barat	182	28	1	0	3	0	28	9	214	37
21	Kalimantan Tengah	153	14	1	0	7	0	27	6	188	20
22	Kalimantan Selatan	210	27	11	0	9	0	43	13	273	40
23	Kalimantan Timur	334	38	5	0	4	0	93	13	436	51
24	Kalimantan Utara	48	3	3	0	1	0	2	0	54	3
25	Sulawesi Utara	91	21	7	0	11	0	15	5	124	26
26	Sulawesi Tengah	111	10	3	0	4	0	17	7	135	17
27	Sulawesi Selatan	294	73	18	1	17	0	60	38	389	112
28	Sulawesi Tenggara	82	21	3	0	7	0	10	6	102	27
29	Gorontalo	50	4	3	0	0	0	10	4	63	8
30	Sulawesi Barat	26	1	2	0	2	0	5	1	35	2
31	Maluku	57	5	2	0	3	0	6	1	68	6
32	Maluku Utara	58	4	2	0	0	0	5	2	65	6
33	Papua	41	3	3	0	2	0	5	1	51	4
34	Papua Barat	16	4	2	0	1	0	3	1	22	5
35	Papua Selatan	2	0	0	0	0	0	5	0	7	0
36	Papua Tengah	6	1	1	0	0	0	2	0	9	1
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	9	0	0	0	0	0	1	0	10	0
Indonesia		12.387	2.596	245	1	247	0	4.265	952	17.144	3.549

Sumber: Data Klinik Tereistrasi Desember 2024, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024
Keterangan: * : Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Lampiran 4.i**UMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Tempat Praktik Mandiri Dokter	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	59	3
2	Sumatera Utara	113	11
3	Sumatera Barat	108	39
4	Riau	74	17
5	Jambi	64	19
6	Sumatera Selatan	226	35
7	Bengkulu	97	17
8	Lampung	115	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	6
10	Kepulauan Riau	7	1
11	DKI Jakarta	9	1
12	Jawa Barat	424	60
13	Jawa Tengah	1080	315
14	D.I. Yogyakarta	100	38
15	Jawa Timur	663	225
16	Banten	7	1
17	Bali	293	97
18	Nusa Tenggara Barat	93	14
19	Nusa Tenggara Timur	85	26
20	Kalimantan Barat	91	18
21	Kalimantan Tengah	59	8
22	Kalimantan Selatan	145	36
23	Kalimantan Timur	101	41
24	Kalimantan Utara	27	6
25	Sulawesi Utara	143	35
26	Sulawesi Tengah	40	9
27	Sulawesi Selatan	160	72
28	Sulawesi Tenggara	56	16
29	Gorontalo	22	8
30	Sulawesi Barat	34	9
31	Maluku	30	6
32	Maluku Utara	30	8
33	Papua	28	7
34	Papua Barat	5	0
35	Papua Selatan	0	0
36	Papua Tengah	11	3
37	Papua Pegunungan	0	0
38	Papua Barat Daya	13	2
Indonesia		4.639	1.214

Sumber: Data BPJS Kesehatan diolah oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.j

JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Kepemilikan/Pengelola										
		Sudah Terakreditasi				Belum Terakreditasi				Sudah Terakreditasi (iii)	Belum Terakreditasi (ii)	Jumlah
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Swasta	Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Swasta			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
1	Aceh	0	1	4	1	0	2	5	10	6	17	19
2	Sumatera Utara	0	1	2	16	1	1	4	24	19	30	51
3	Sumatera Barat	0	1	11	6	0	0	5	5	18	10	22
4	Riau	0	1	4	6	0	1	7	5	11	13	23
5	Jambi	0	1	5	5	0	1	5	2	11	8	15
6	Sumatera Selatan	1	0	11	9	2	0	8	8	21	18	30
7	Bengkulu	0	1	3	0	0	1	3	7	4	11	13
8	Lampung	0	1	1	0	0	0	1	11	2	12	20
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	5	1	0	0	2	3	6	5	9
10	Kepulauan Riau	0	0	0	6	1	0	2	8	6	11	17
11	DKI Jakarta	2	1	0	47	2	0	0	37	50	39	84
12	Jawa Barat	0	1	35	81	1	2	9	82	117	94	177
13	Jawa Tengah	0	0	49	67	2	0	9	63	116	74	164
14	DI Yogyakarta	0	2	6	13	0	1	1	6	21	8	25
15	Jawa Timur	1	0	35	89	0	1	9	62	125	72	175
16	Banten	0	2	9	20	0	0	2	44	31	46	68
17	Bali	0	1	7	18	0	0	1	12	26	13	36
18	Nusa Tenggara Barat	0	2	6	4	0	0	2	6	12	8	18
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	4	4	0	1	8	8	9	17	23
20	Kalimantan Barat	0	1	9	6	0	1	4	10	16	15	27
21	Kalimantan Tengah	0	1	6	4	0	3	6	9	11	18	24
22	Kalimantan Selatan	0	2	3	6	2	0	4	14	11	20	26
23	Kalimantan Timur	0	1	6	12	0	1	1	7	19	9	22
24	Kalimantan Utara	0	0	3	1	0	0	1	1	4	2	5
25	Sulawesi Utara	0	2	0	7	1	0	3	6	9	10	18
26	Sulawesi Tengah	0	1	1	2	0	0	5	0	4	5	8
27	Sulawesi Selatan	1	0	10	8	1	1	12	12	19	26	39
28	Sulawesi Tenggara	0	2	5	2	0	1	4	3	9	8	15
29	Gorontalo	0	1	2	4	0	1	2	0	7	3	7
30	Sulawesi Barat	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2	3
31	Maluku	0	1	1	1	0	1	2	0	3	3	5
32	Maluku Utara	0	0	0	3	0	1	1	6	3	8	11
33	Papua	0	1	0	1	1	1	0	1	2	3	4
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		5	31	244	450	14	22	129	474	730	639	1.204

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 4.k

**JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah UTD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	0	2	2
2	Sumatera Utara	0	3	3
3	Sumatera Barat	0	0	0
4	Riau	0	1	1
5	Jambi	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0
7	Bengkulu	0	3	3
8	Lampung	1	5	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	2	2
10	Kepulauan Riau	0	2	2
11	DKI Jakarta	0	1	1
12	Jawa Barat	0	15	15
13	Jawa Tengah	0	26	26
14	DI Yogyakarta	0	5	5
15	Jawa Timur	1	29	30
16	Banten	0	5	5
17	Bali	0	8	8
18	Nusa Tenggara Barat	1	2	3
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	1
20	Kalimantan Barat	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	1	1
22	Kalimantan Selatan	0	1	1
23	Kalimantan Timur	0	1	1
24	Kalimantan Utara	0	1	1
25	Sulawesi Utara	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	2	2
27	Sulawesi Selatan	0	2	2
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0
29	Gorontalo	0	1	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0
31	Maluku	0	0	0
32	Maluku Utara	0	1	1
33	Papua	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0
Indonesia		3	120	123

Sumber: Data UTD Teregistrasi Desember 2024, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola													
		Kemenkes		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		TNI/POLRI		BUMN/Kementerian Lain		Swasta		Jumlah	
		RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	0	0	1	2	26	0	5	0	5	1	35	6	72	9
2	Sumatera Utara	1	0	2	3	41	0	9	0	8	1	124	21	185	25
3	Sumatera Barat	1	1	3	2	25	0	4	0	1	1	18	22	52	26
4	Riau	0	0	2	1	17	0	4	0	3	0	41	15	67	16
5	Jambi	0	0	1	1	19	0	2	0	0	0	19	2	41	3
6	Sumatera Selatan	2	0	1	3	32	0	4	0	3	0	29	14	71	17
7	Bengkulu	0	0	1	1	12	1	2	0	0	0	8	1	23	3
8	Lampung	0	0	2	1	16	0	2	0	0	0	43	18	63	19
9	Kepulauan Bangka	0	0	1	1	11	0	2	0	0	0	11	3	25	4
10	Kepulauan Riau	0	0	1	1	11	0	3	0	1	0	16	3	32	4
11	DKI Jakarta	3	7	30	1	0	0	9	2	8	3	89	38	139	51
12	Jawa Barat	1	4	4	2	63	1	15	0	6	1	284	49	373	57
13	Jawa Tengah	3	3	4	3	63	1	14	0	3	2	223	41	310	50
14	DI Yogyakarta	1	0	0	2	10	0	3	0	1	1	48	13	63	16
15	Jawa Timur	1	1	10	4	73	0	26	1	4	2	239	78	353	86
16	Banten	1	0	2	0	15	0	3	0	3	0	82	25	106	25
17	Bali	1	0	1	2	17	0	3	0	1	0	43	14	66	16
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	3	2	16	0	3	0	0	0	17	5	39	7
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	1	32	0	4	0	2	0	23	2	63	3
20	Kalimantan Barat	0	0	1	1	24	1	5	0	1	0	19	6	50	8
21	Kalimantan Tengah	0	0	2	1	19	0	2	0	0	0	7	2	30	3
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	2	16	0	4	0	1	0	19	7	42	9
23	Kalimantan Timur	0	0	3	2	19	1	4	0	1	1	23	8	50	12
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	11	0	3	0	1	0	1	0	17	0
25	Sulawesi Utara	2	0	3	3	19	1	4	0	0	1	22	3	50	8
26	Sulawesi Tengah	0	0	2	0	24	0	3	0	1	0	6	4	36	4
27	Sulawesi Selatan	3	1	4	4	42	1	6	1	2	2	43	17	100	26
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	2	18	0	2	0	1	0	14	2	36	4
29	Gorontalo	0	0	1	0	12	0	2	0	0	0	4	1	19	1
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	8	0	1	0	1	0	3	2	14	2
31	Maluku	1	0	2	1	16	0	3	0	0	0	7	0	29	1
32	Maluku Utara	0	0	2	1	13	0	2	0	0	0	4	1	21	2
33	Papua	0	0	2	1	9	0	4	0	0	0	2	0	17	1
34	Papua Barat	0	0	1	0	7	0	3	0	0	0	1	0	12	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	1	0	8	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	8	0	2	0	1	0	4	0	15	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	9	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	6	0	2	0	1	0	3	0	12	0
Indonesia		22	17	98	51	783	7	171	4	60	16	1.576	423	2.710	518

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024 per 2 Januari 2025

Lampiran 8.b

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D (Kelas D dan Kelas D Pratama)			Belum Ditetapkan Kelas		
		RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT
		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2	2,5	1.174	13	16,0	3.347	33	40,7	4.372	33	40,7	1.969	0	0,0	
2	Sumatera Utara	3	1,4	1.558	27	12,9	6.012	120	57,1	13.397	60	28,6	3.419	0	0,0	
3	Sumatera Barat	3	3,8	1.217	7	9,0	1.064	52	66,7	4.902	16	20,5	954	0	0,0	
4	Riau	2	2,4	609	6	7,2	1.685	48	57,8	5.450	27	32,5	1.481	0	0,0	
5	Jambi	0	0,0		4	9,1	952	24	54,5	2.937	15	34,1	686	1	2,3	0
6	Sumatera Selatan	2	2,3	1.109	7	8,0	1.649	54	61,4	5.952	25	28,4	1.557	0	0,0	
7	Bengkulu	0	0,0		2	7,7	434	16	61,5	1.721	8	30,8	474	0	0,0	
8	Lampung	2	2,4	1.182	5	6,1	997	56	68,3	5.895	19	23,2	1.126	0	0,0	
9	Kep. Bangka Belitung	0	0,0		2	6,9	341	16	55,2	1.685	11	37,9	494	0	0,0	
10	Kepulauan Riau	1	2,8	257	7	19,4	1.390	19	52,8	2.072	9	25,0	451	0	0,0	
11	DKI Jakarta	19	10,0	7.161	60	31,6	12.372	85	44,7	7.168	26	13,7	1.519	0	0,0	
12	Jawa Barat	10	2,3	3.307	79	18,4	21.428	259	60,2	29.907	82	19,1	4.969	0	0,0	
13	Jawa Tengah	11	3,1	5.417	34	9,4	10.015	194	53,9	23.938	121	33,6	8.077	0	0,0	
14	DI Yogyakarta	3	3,8	979	14	17,7	3.129	26	32,9	1.745	36	45,6	1.976	0	0,0	
15	Jawa Timur	7	1,6	4.513	63	14,4	16.030	227	51,7	22.286	142	32,3	9.177	0	0,0	
16	Banten	0	0,0		23	17,6	4.890	87	66,4	9.168	21	16,0	1.291	0	0,0	
17	Bali	3	3,7	1.101	12	14,6	2.254	53	64,6	4.821	14	17,1	771	0	0,0	
18	Nusa Tenggara Barat	1	2,2	763	4	8,7	943	24	52,2	2.590	17	37,0	1.064	0	0,0	
19	Nusa Tenggara Timur	0	0,0		3	4,5	773	32	48,5	3.904	30	45,5	1.578	1	1,5	30
20	Kalimantan Barat	1	1,7	592	4	6,9	1.380	31	53,4	3.402	22	37,9	1.206	0	0,0	
21	Kalimantan Tengah	0	0,0		4	12,1	990	20	60,6	2.248	9	27,3	276	0	0,0	
22	Kalimantan Selatan	2	3,9	780	7	13,7	1.275	27	52,9	3.550	15	29,4	828	0	0,0	
23	Kalimantan Timur	3	4,8	1.337	5	8,1	1.183	29	46,8	2.876	24	38,7	1.414	1	1,6	42
24	Kalimantan Utara	0	0,0		1	5,9	358	5	29,4	953	11	64,7	439	0	0,0	
25	Sulawesi Utara	1	1,7	721	6	10,3	1.151	36	62,1	4.090	15	25,9	1.160	0	0,0	
26	Sulawesi Tengah	0	0,0		4	10,0	1.148	23	57,5	3.040	13	32,5	619	0	0,0	
27	Sulawesi Selatan	3	2,4	1.239	28	22,2	5.965	68	54,0	7.753	27	21,4	1.508	0	0,0	
28	Sulawesi Tenggara	0	0,0		4	10,0	891	17	42,5	2.004	19	47,5	980	0	0,0	
29	Gorontalo	0	0,0		2	10,0	594	9	45,0	1.156	9	45,0	601	0	0,0	
30	Sulawesi Barat	0	0,0		1	6,3	435	8	50,0	850	7	43,8	437	0	0,0	
31	Maluku	0	0,0		3	10,0	599	10	33,3	1.288	17	56,7	1.001	0	0,0	
32	Maluku Utara	0	0,0		2	8,7	383	6	26,1	591	15	65,2	792	0	0,0	
33	Papua	0	0,0		2	11,1	369	10	55,6	1.589	6	33,3	294	0	0,0	
34	Papua Barat	0	0,0		0	0,0		7	58,3	724	5	41,7	294	0	0,0	
35	Papua Selatan	0	0,0		1	12,5	211	1	12,5	101	6	75,0	517	0	0,0	
36	Papua Tengah	0	0,0		0	0,0		4	26,7	703	10	66,7	304	1	6,7	0
37	Papua Pegunungan	0	0,0		0	0,0		1	11,1	216	7	77,8	356	1	11,1	0
38	Papua Barat Daya	0	0,0		0	0,0		3	25,0	451	9	75,0	563	0	0,0	
Indonesia		79	2,4	35.016	446	13,8	106.637	1.740	53,9	191.495	958	29,7	56.622	5	0,2	72

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024 per 2 Januari 2025

Lampiran 8.c

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2024

No	Provinsi	2023				2024			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2022	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2023	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.482.527	77	10216	1,9	5.554.815	81	10862	2,0
2	Sumatera Utara	15.386.640	212	24322	1,6	15.588.525	210	24386	1,6
3	Sumatera Barat	5.757.205	82	7977	1,4	5.836.156	78	8137	1,4
4	Riau	6.642.874	79	9252	1,4	6.728.053	83	9225	1,4
5	Jambi	3.679.169	42	4882	1,3	3.724.284	44	4575	1,2
6	Sumatera Selatan	8.743.522	85	10105	1,2	8.837.301	88	10267	1,2
7	Bengkulu	2.086.006	26	2633	1,3	2.112.235	26	2629	1,2
8	Lampung	9.313.986	81	9066	1,0	9.419.582	82	9200	1,0
9	Kep. Bangka Belitung	1.511.899	27	2475	1,6	1.531.530	29	2520	1,6
10	Kepulauan Riau	2.152.625	38	4205	2,0	2.183.292	36	4170	1,9
11	DKI Jakarta	10.672.100	196	27522	2,6	10.684.946	190	28220	2,6
12	Jawa Barat	49.860.330	414	56892	1,1	50.345.189	430	59611	1,2
13	Jawa Tengah	37.540.962	345	46793	1,2	37.892.283	360	47447	1,3
14	DI Yogyakarta	3.736.489	80	8054	2,2	3.759.503	79	7829	2,1
15	Jawa Timur	41.527.934	423	52159	1,3	41.814.499	439	52006	1,2
16	Banten	12.307.732	128	15106	1,2	12.431.391	131	15349	1,2
17	Bali	4.404.262	75	9196	2,1	4.433.262	82	8947	2,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.560.287	45	5692	1,0	5.646.015	46	5360	0,9
19	Nusa Tenggara Timur	5.569.068	59	6174	1,1	5.656.039	66	6285	1,1
20	Kalimantan Barat	5.623.328	56	6285	1,1	5.695.475	58	6580	1,2
21	Kalimantan Tengah	2.773.747	33	3597	1,3	2.809.698	33	3514	1,3
22	Kalimantan Selatan	4.222.333	52	6546	1,6	4.273.400	51	6433	1,5
23	Kalimantan Timur	3.909.741	58	6866	1,8	4.045.858	62	6852	1,7
24	Kalimantan Utara	730.010	16	1508	2,1	739.778	17	1750	2,4
25	Sulawesi Utara	2.681.535	57	7221	2,7	2.701.777	58	7122	2,6
26	Sulawesi Tengah	3.086.750	40	5023	1,6	3.121.753	40	4807	1,5
27	Sulawesi Selatan	9.362.290	125	16122	1,7	9.463.385	126	16465	1,7
28	Sulawesi Tenggara	2.749.014	43	3930	1,4	2.793.072	40	3875	1,4
29	Gorontalo	1.213.182	20	2263	1,9	1.227.794	20	2351	1,9
30	Sulawesi Barat	1.481.077	15	1604	1,1	1.503.232	16	1722	1,1
31	Maluku	1.920.462	30	3072	1,6	1.945.648	30	2888	1,5
32	Maluku Utara	1.337.148	23	1652	1,2	1.355.622	23	1766	1,3
33	Papua	1.047.098	19	2188	2,1	1.060.551	18	2252	2,1
34	Papua Barat	569.570	12	972	1,7	578.696	12	1018	1,8
35	Papua Selatan	534.416	8	736	-	542.075	8	829	1,5
36	Papua Tengah	1.452.806	13	1083	-	1.472.912	15	1007	0,7
37	Papua Pegunungan	1.448.372	9	516	-	1.467.046	9	572	0,4
38	Papua Barat Daya	617.697	12	913	-	627.127	12	1014	1,6
Indonesia		278.696.193	3.155,0	384.818	1,4	281.603.799	3.228,0	389.842	1,4

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024 per 2 Januari 2025
Ket : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS
2. Estimasi Jumlah Penduduk 2023: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 (BPS diolah Pusdatin)
3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

Lampiran 8.d

**PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C
YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C *)	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	14	8	57,1
2	Sumatera Utara	24	17	70,8
3	Sumatera Barat	17	14	82,4
4	Riau	10	9	90,0
5	Jambi	9	7	77,8
6	Sumatera Selatan	13	6	46,2
7	Bengkulu	9	6	66,7
8	Lampung	12	11	91,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	4	3	75,0
11	DKI Jakarta	0	0	0,0
12	Jawa Barat	15	13	86,7
13	Jawa Tengah	31	28	90,3
14	DI Yogyakarta	3	3	100,0
15	Jawa Timur	28	25	89,3
16	Banten	7	5	71,4
17	Bali	4	4	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	7	7	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	18	10	55,6
20	Kalimantan Barat	14	8	57,1
21	Kalimantan Tengah	10	6	60,0
22	Kalimantan Selatan	10	8	80,0
23	Kalimantan Timur	7	6	85,7
24	Kalimantan Utara	4	3	75,0
25	Sulawesi Utara	11	6	54,5
26	Sulawesi Tengah	11	4	36,4
27	Sulawesi Selatan	20	17	85,0
28	Sulawesi Tenggara	10	7	70,0
29	Gorontalo	5	4	80,0
30	Sulawesi Barat	3	1	33,3
31	Maluku	5	2	40,0
32	Maluku Utara	5	2	40,0
33	Papua	3	2	66,7
34	Papua Barat	5	3	60,0
35	Papua Selatan	0	0	0,0
36	Papua Tengah	3	1	33,3
37	Papua Pegunungan	1	1	100,0
38	Papua Barat Daya	3	2	66,7
Indonesia		362	265	73,2

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Jumlah Rumah Sakit yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2024

Lampiran 8.e

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	81	38	38	76	93,83
2	Sumatera Utara	210	60	138	198	94,29
3	Sumatera Barat	78	37	40	77	98,72
4	Riau	83	27	52	79	95,18
5	Jambi	44	18	20	38	86,36
6	Sumatera Selatan	88	42	41	83	94,32
7	Bengkulu	26	16	9	25	96,15
8	Lampung	82	20	60	80	97,56
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	15	13	28	96,55
10	Kepulauan Riau	36	17	19	36	100,00
11	DKI Jakarta	190	60	125	185	97,37
12	Jawa Barat	430	90	326	416	96,74
13	Jawa Tengah	360	91	256	347	96,39
14	DI Yogyakarta	79	18	61	79	100,00
15	Jawa Timur	439	118	306	424	96,58
16	Banten	131	22	105	127	96,95
17	Bali	82	23	54	77	93,90
18	Nusa Tenggara Barat	46	24	22	46	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	66	34	23	57	86,36
20	Kalimantan Barat	58	28	22	50	86,21
21	Kalimantan Tengah	33	24	9	33	100,00
22	Kalimantan Selatan	51	25	25	50	98,04
23	Kalimantan Timur	62	30	29	59	95,16
24	Kalimantan Utara	17	15	1	16	94,12
25	Sulawesi Utara	58	30	24	54	93,10
26	Sulawesi Tengah	40	28	10	38	95,00
27	Sulawesi Selatan	126	60	58	118	93,65
28	Sulawesi Tenggara	40	24	13	37	92,50
29	Gorontalo	20	13	5	18	90,00
30	Sulawesi Barat	16	10	5	15	93,75
31	Maluku	30	23	6	29	96,67
32	Maluku Utara	23	14	5	19	82,61
33	Papua	18	15	2	17	94,44
34	Papua Barat	12	11	1	12	100,00
35	Papua Selatan	8	6	1	7	-
36	Papua Tengah	15	6	3	9	-
37	Papua Pegunungan	9	7	0	7	-
38	Papua Barat Daya	12	7	3	10	-
Indonesia		3.228	1.146	1.930	3.076	95,3

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 8.f

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota	Target Kabupaten Kota	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			Jumlah Puskesmas yang Meningkatkan Aktivitas Fisik		
				Capaian	Persentase (Target)	Persentase	Jumlah Puskesmas	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	23	18	22	119,6	95,7	366	318	86,9
2	Sumatera Utara	33	26	33	125,0	100,0	619	508	82,1
3	Sumatera Barat	19	15	15	98,7	78,9	280	278	99,3
4	Riau	12	10	7	72,9	58,3	239	214	89,5
5	Jambi	11	9	9	102,3	81,8	208	167	80,3
6	Sumatera Selatan	17	14	16	117,6	94,1	350	302	86,3
7	Bengkulu	10	8	10	125,0	100,0	179	165	92,2
8	Lampung	15	12	7	58,3	46,7	320	287	89,7
9	Kep. Bangka Belitung	7	6	7	125,0	100,0	64	63	98,4
10	Kepulauan Riau	7	6	7	125,0	100,0	96	80	83,3
11	DKI Jakarta	6	5	6	125,0	100,0	44	44	100,0
12	Jawa Barat	27	22	27	125,0	100,0	1.106	1039	93,9
13	Jawa Tengah	35	28	33	117,9	94,3	881	867	98,4
14	DI Yogyakarta	5	4	5	125,0	100,0	121	121	100,0
15	Jawa Timur	38	30	36	118,4	94,7	24	24	100,0
16	Banten	8	6	8	125,0	100,0	253	250	98,8
17	Bali	9	7	9	125,0	100,0	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	10	125,0	100,0	177	164	92,7
19	Nusa Tenggara Timur	22	18	11	62,5	50,0	435	311	71,5
20	Kalimantan Barat	14	11	13	116,1	92,9	249	230	92,4
21	Kalimantan Tengah	14	11	9	80,4	64,3	204	112	54,9
22	Kalimantan Selatan	13	10	11	105,8	84,6	242	229	94,6
23	Kalimantan Timur	10	8	10	125,0	100,0	188	128	68,1
24	Kalimantan Utara	5	4	5	125,0	100,0	58	13	22,4
25	Sulawesi Utara	15	12	15	125,0	100,0	199	197	99,0
26	Sulawesi Tengah	13	10	7	67,3	53,8	219	133	60,7
27	Sulawesi Selatan	24	19	21	109,4	87,5	474	430	90,7
28	Sulawesi Tenggara	17	14	15	110,3	88,2	308	163	52,9
29	Gorontalo	6	5	5	104,2	83,3	95	87	91,6
30	Sulawesi Barat	6	5	6	125,0	100,0	98	28	28,6
31	Maluku	11	9	8	90,9	72,7	240	86	35,8
32	Maluku Utara	10	8	9	112,5	90,0	150	135	90,0
33	Papua	9	7	9	125,0	100,0	122	36	29,5
34	Papua Barat	7	6	2	35,7	28,6	76	9	11,8
35	Papua Selatan	4	3	4	125,0	100,0	85	43	50,6
36	Papua Tengah	8	6	0	0,0	0,0	122	0	0,0
37	Papua Pegunungan	6	5	0	0,0	0,0	155	15	9,7
38	Papua Barat Daya	8	6	0	0,0	0,0	98	16	16,3
Indonesia		514	411	427	103,8	83,1	9.264	7.412	80,0

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Laporan Provinsi s/d Januari 2025

Lampiran 8.g

JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja						Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Jumlah Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji	Jumlah Kelompok Olah Raga
		Puskesmas	Perusahaan	POS UKK	GP2SP	K3 Perkantoran	RS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	364	0	48	2	32	33	32	3610	23
2	Sumatera Utara	617	6	361	0	65	39	61	4203	33
3	Sumatera Barat	241	14	507	47	240	49	403	2212	19
4	Riau	138	2	194	2	4	52	500	3943	12
5	Jambi	166	837	393	39	33	53	190	968	577
6	Sumatera Selatan	323	33	543	89	304	102	395	4630	294
7	Bengkulu	179	273	789	7	105	55	70	1030	10
8	Lampung	125	58	208	35	73	42	193	3500	1.467
9	Kep. Bangka Belitung	64	29	161	11	27	20	44	679	7
10	Kepulauan Riau	96	20	133	14	174	35	220	734	7
11	DKI Jakarta	44	90	152	93	116	33	124	6731	6
12	Jawa Barat	1061	10440	2887	464	212	474	722	22662	27
13	Jawa Tengah	823	657	1781	262	216	309	2165	26778	9.941
14	DI Yogyakarta	121	96	282	24	36	80	226	1827	5
15	Jawa Timur	896	6469	1723	146	2608	346	1914	23084	38
16	Banten	234	234	519	49	118	135	124	4615	8
17	Bali	120	143	155	50	98	75	147	598	1.443
18	Nusa Tenggara Barat	176	88	736	65	130	35	73	2284	10
19	Nusa Tenggara Timur	234	68	974	7	53	26	77	280	22
20	Kalimantan Barat	232	191	421	30	67	50	120	1214	148
21	Kalimantan Tengah	131	64	149	54	121	24	67	869	14
22	Kalimantan Selatan	241	15	189	5	67	49	192	1896	13
23	Kalimantan Timur	182	82	125	20	67	29	234	920	10
24	Kalimantan Utara	47	58	45	46	84	9	12	414	5
25	Sulawesi Utara	199	18	146	70	245	15	148	718	15
26	Sulawesi Tengah	134	62	287	10	23	11	585	942	13
27	Sulawesi Selatan	426	1214	1063	45	767	108	448	3842	24
28	Sulawesi Tenggara	280	80	387	38	115	27	196	942	17
29	Gorontalo	91	17	185	67	530	17	105	633	6
30	Sulawesi Barat	93	31	239	8	35	11	57	660	6
31	Maluku	165	0	226	11	74	15	25	379	11
32	Maluku Utara	141	5	106	37	211	16	173	638	10
33	Papua	115	0	114	1	45	11	43	413	18
34	Papua Barat	25	102	23	14	13	1	1	282	7
35	Papua Selatan	71	6	2	-	1	7	10		4
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0		8
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0		8
38	Papua Barat Daya	6	0	1	1	1	1	5		6
Indonesia		8.601	21.502	16.254	1.863	7.110	2.394	10.101	129.130	14.292

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Data SITKO Januari 2025

Lampiran 8.i

**DAFTAR RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Sepenuhnya RME	Sebagian RME	Belum RME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	49	21	3
2	Sumatera Utara	139	55	13
3	Sumatera Barat	27	49	1
4	Riau	41	36	2
5	Jambi	22	16	4
6	Sumatera Selatan	60	22	2
7	Bengkulu	14	12	0
8	Lampung	51	29	0
9	Kep. Bangka Belitung	24	2	1
10	Kepulauan Riau	22	11	3
11	DKI Jakarta	146	43	0
12	Jawa Barat	315	97	0
13	Jawa Tengah	234	106	1
14	DI Yogyakarta	59	21	0
15	Jawa Timur	277	142	1
16	Banten	99	24	1
17	Bali	55	20	0
18	Nusa Tenggara Barat	26	19	0
19	Nusa Tenggara Timur	19	37	3
20	Kalimantan Barat	19	36	1
21	Kalimantan Tengah	19	13	1
22	Kalimantan Selatan	24	26	1
23	Kalimantan Timur	25	30	3
24	Kalimantan Utara	8	6	2
25	Sulawesi Utara	29	22	5
26	Sulawesi Tengah	16	21	3
27	Sulawesi Selatan	59	58	2
28	Sulawesi Tenggara	18	19	1
29	Gorontalo	10	8	2
30	Sulawesi Barat	8	6	1
31	Maluku	16	9	4
32	Maluku Utara	5	15	3
33	Papua	6	9	3
34	Papua Barat	2	9	1
35	Papua Selatan	1	6	1
36	Papua Tengah	2	10	1
37	Papua Pegunungan	0	6	3
38	Papua Barat Daya	3	8	1
Indonesia		1.949	1.079	74

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Ket: 1. Sepenuhnya RME adalah melaksanakan RME di 6 pelayanan (Pendaftaran, Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Unit Penunjang, Far
2. Sebagian RME adalah RME digunakan minimal pada 3 pelayanan dari total 6 pelayanan

Lampiran 9.a

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial**	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	361	341	94,46
2	Sumatera Utara	536	490	91,42
3	Sumatera Barat	279	279	100,00
4	Riau	203	196	96,55
5	Jambi	207	207	100,00
6	Sumatera Selatan	344	298	86,63
7	Bengkulu	178	176	98,88
8	Lampung	317	310	97,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,00
10	Kepulauan Riau	96	96	100,00
11	DKI Jakarta	318	315	99,06
12	Jawa Barat	1069	1060	99,16
13	Jawa Tengah	872	863	98,97
14	D.I. Yogyakarta	121	121	100,00
15	Jawa Timur	973	973	100,00
16	Banten	250	245	98,00
17	Bali	120	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	175	175	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	404	372	92,08
20	Kalimantan Barat	217	201	92,63
21	Kalimantan Tengah	191	178	93,19
22	Kalimantan Selatan	240	235	97,92
23	Kalimantan Timur	188	188	100,00
24	Kalimantan Utara	58	58	100,00
25	Sulawesi Utara	197	190	96,45
26	Sulawesi Tengah	217	213	98,16
27	Sulawesi Selatan	470	438	93,19
28	Sulawesi Tenggara	271	258	95,20
29	Gorontalo	87	85	97,70
30	Sulawesi Barat	85	78	91,76
31	Maluku	196	170	86,73
32	Maluku Utara	124	106	85,48
33	Papua	119	119	100,00
34	Papua Barat	63	55	87,30
35	Papua Selatan	74	70	94,59
36	Papua Tengah	61	35	57,38
37	Papua Pegunungan	83	82	98,80
38	Papua Barat Daya	67	49	73,13
Indonesia		9.895	9.509	96,10

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

**) isi dengan jumlah Puskesmas yang memiliki obat esensial ≥80%

Lampiran 9.b

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melapor	Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial*	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	23	14	60,87
2	Sumatera Utara	33	19	17	89,47
3	Sumatera Barat	19	19	18	94,74
4	Riau	12	9	7	77,78
5	Jambi	11	11	10	90,91
6	Sumatera Selatan	17	14	13	92,86
7	Bengkulu	10	10	10	100,00
8	Lampung	15	14	13	92,86
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	0	0	0,00
12	Jawa Barat	27	27	25	92,59
13	Jawa Tengah	35	33	28	84,85
14	D.I. Yogyakarta	5	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	38	100,00
16	Banten	8	7	5	71,43
17	Bali	9	9	8	88,89
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	9	90,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	18	15	83,33
20	Kalimantan Barat	14	13	12	92,31
21	Kalimantan Tengah	14	14	13	92,86
22	Kalimantan Selatan	13	12	11	91,67
23	Kalimantan Timur	10	10	9	90,00
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	12	10	83,33
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	23	12	52,17
28	Sulawesi Tenggara	17	17	15	88,24
29	Gorontalo	6	6	5	83,33
30	Sulawesi Barat	6	4	2	50,00
31	Maluku	11	11	8	72,73
32	Maluku Utara	10	8	6	75,00
33	Papua	9	9	8	88,89
34	Papua Barat	7	7	6	85,71
35	Papua Selatan	4	4	3	75,00
36	Papua Tengah	8	3	3	100,00
37	Papua Pegunungan	8	8	8	100,00
38	Papua Barat Daya	6	5	3	60,00
Indonesia		514	464	401	86,42

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: *) isi dengan jumlah kabupaten/kota yang memiliki obat esensial ≥85%

Lampiran 9.c

**PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah Kab/kota yang Melapor	Kab/kota dengan Ketersediaan Vaksin IDL	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	23	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	33	33	100,00
3	Sumatera Barat	19	19	19	100,00
4	Riau	12	12	8	66,67
5	Jambi	11	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	14	93,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	5	71,43
10	Kepulauan Riau	7	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	35	100,00
14	D.I. Yogyakarta	5	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	38	100,00
16	Banten	8	8	8	100,00
17	Bali	9	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	19	86,36
20	Kalimantan Barat	14	14	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	13	92,86
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	12	80,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	11	84,62
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	17	14	82,35
29	Gorontalo	6	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	5	83,33
31	Maluku	11	11	11	100,00
32	Maluku Utara	10	10	10	100,00
33	Papua	9	9	9	100,00
34	Papua Barat	7	7	4	57,14
35	Papua Selatan	4	4	4	100,00
36	Papua Tengah	8	8	6	75,00
37	Papua Pegunungan	8	8	8	100,00
38	Papua Barat Daya	6	6	6	100,00
Indonesia		514	514	489	95,14

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 9.d

JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	5	0
2	Sumatera Utara	104	71
3	Sumatera Barat	9	12
4	Riau	3	0
5	Jambi	3	1
6	Sumatera Selatan	3	0
7	Bengkulu	0	0
8	Lampung	8	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	1
10	Kepulauan Riau	1	3
11	DKI Jakarta	182	187
12	Jawa Barat	419	396
13	Jawa Tengah	193	134
14	D.I. Yogyakarta	31	10
15	Jawa Timur	185	147
16	Banten	75	1
17	Bali	18	17
18	Nusa Tenggara Barat	3	11
19	Nusa Tenggara Timur	4	3
20	Kalimantan Barat	5	0
21	Kalimantan Tengah	0	3
22	Kalimantan Selatan	5	2
23	Kalimantan Timur	3	0
24	Kalimantan Utara	1	1
25	Sulawesi Utara	4	4
26	Sulawesi Tengah	0	0
27	Sulawesi Selatan	23	12
28	Sulawesi Tenggara	1	1
29	Gorontalo	1	3
30	Sulawesi Barat	0	0
31	Maluku	14	15
32	Maluku Utara	0	0
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
35	Papua Selatan	0	0
36	Papua Tengah	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0
Indonesia		1.306	1.037

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 9.e

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Obat	Distributor Alat Kesehatan (DAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	30	510	490	34
2	Sumatera Utara	101	1608	1537	106
3	Sumatera Barat	47	603	273	64
4	Riau	58	812	525	34
5	Jambi	38	507	173	23
6	Sumatera Selatan	57	621	176	79
7	Bengkulu	19	281	107	19
8	Lampung	57	753	84	53
9	Kepulauan Bangka Belitung	19	304	77	11
10	Kepulauan Riau	38	301	155	64
11	DKI Jakarta	461	1950	397	1153
12	Jawa Barat	474	5110	1184	417
13	Jawa Tengah	304	4031	375	225
14	D.I. Yogyakarta	57	559	40	68
15	Jawa Timur	349	4524	469	336
16	Banten	165	1289	277	248
17	Bali	71	860	77	112
18	Nusa Tenggara Barat	26	712	98	25
19	Nusa Tenggara Timur	40	427	64	38
20	Kalimantan Barat	40	438	336	41
21	Kalimantan Tengah	11	387	219	9
22	Kalimantan Selatan	47	517	314	48
23	Kalimantan Timur	56	791	157	68
24	Kalimantan Utara	4	87	28	3
25	Sulawesi Utara	51	331	96	35
26	Sulawesi Tengah	33	503	216	25
27	Sulawesi Selatan	115	1333	273	127
28	Sulawesi Tenggara	54	655	108	21
29	Gorontalo	15	221	25	4
30	Sulawesi Barat	2	145	49	1
31	Maluku	13	179	85	18
32	Maluku Utara	5	139	20	7
33	Papua	38	178	33	74
34	Papua Barat	10	92	8	4
35	Papua Selatan	7	36	5	0
36	Papua Tengah	7	88	1	0
37	Papua Pegunungan	1	41	0	0
38	Papua Barat Daya	10	72	8	0
Indonesia		2.930	31.995	8.559	3.594

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 10

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF DAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

NO	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	% Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif*		% Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif*	
			Capaian	Persentase	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	23	23	100,0	22	95,7
2	Sumatera Utara	33	28	84,8	32	97,0
3	Sumatera Barat	19	17	89,5	18	94,7
4	Riau	12	12	100,0	12	100,0
5	Jambi	11	11	100,0	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0	15	100,0
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,0	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	5	83,3	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0	35	100,0
14	D.I. Yogyakarta	5	5	100,0	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0	38	100,0
16	Banten	8	8	100,0	7	87,5
17	Bali	9	9	100,0	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,0	6	27,3
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0	4	80,0
25	Sulawesi Utara	15	13	86,7	14	93,3
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	23	95,8	18	75,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0	17	100,0
29	Gorontalo	6	6	100,0	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0	5	83,3
31	Maluku	11	10	90,9	5	45,5
32	Maluku Utara	10	10	100,0	10	100,0
33	Papua	9	6	66,7	2	22,2
34	Papua Barat	7	0	-	-	-
35	Papua Selatan	4	1	25,0	1	25,0
36	Papua Tengah	8	0	-	-	-
37	Papua Pegunungan	8	0	-	-	-
38	Papua Barat Daya	6	0	-	-	-
Indonesia		514	467	90,9	439	85,4

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.a

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	ACEH	634	605	1.239	892	2.315	3.207	1.526	2.920	4.446	13	43	56	132	596	728	145	639	784
2	SUMATERA UTARA	1.519	1.138	2.657	2.317	4.381	6.698	3.836	5.519	9.355	49	107	156	330	1.264	1.594	379	1.371	1.750
3	SUMATERA BARAT	589	613	1.202	690	2.011	2.701	1.279	2.624	3.903	12	36	48	113	724	837	125	760	885
4	RIAU	779	525	1.304	1.083	2.629	3.712	1.862	3.154	5.016	20	47	67	134	762	896	154	809	963
5	JAMBI	263	212	475	464	1.138	1.602	727	1.350	2.077	12	15	27	69	280	349	81	295	376
6	SUMATERA SELATAN	679	622	1.301	1.007	2.359	3.366	1.686	2.981	4.667	22	40	62	123	540	663	145	580	725
7	BENGKULU	142	124	266	258	587	845	400	711	1.111	3	9	12	33	164	197	36	173	209
8	LAMPUNG	538	381	919	763	1.748	2.511	1.301	2.129	3.430	12	22	34	66	307	373	78	329	407
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	148	118	266	268	503	771	416	621	1.037	8	18	26	45	114	159	53	132	185
10	KEPULAUAN RIAU	326	216	542	483	989	1.472	809	1.205	2.014	18	19	37	87	307	394	105	326	431
11	DKI JAKARTA	4.272	4.039	8.311	3.565	7.967	11.532	7.837	12.006	19.843	355	848	1.203	774	3.307	4.081	1.129	4.155	5.284
12	JAWA BARAT	4.851	3.924	8.775	6.246	11.203	17.449	11.097	15.127	26.224	270	605	875	780	3.748	4.528	1.050	4.353	5.403
13	JAWA TENGAH	3.117	2.240	5.357	4.025	7.285	11.310	7.142	9.525	16.667	136	253	389	600	2.288	2.888	736	2.541	3.277
14	YOGYAKARTA	813	768	1.581	841	1.731	2.572	1.654	2.499	4.153	83	202	285	197	833	1.030	280	1.035	1.315
15	JAWA TIMUR	3.832	2.897	6.729	4.989	8.315	13.304	8.821	11.212	20.033	289	532	821	923	3.461	4.384	1.212	3.993	5.205
16	BANTEN	1.764	1.549	3.313	1.898	3.806	5.704	3.662	5.355	9.017	93	269	362	222	1.348	1.570	315	1.617	1.932
17	BALI	1.188	810	1.998	1.884	2.285	4.169	3.072	3.095	6.167	40	50	90	310	777	1.087	350	827	1.177
18	NUSA TENGGARA BARAT	315	241	556	565	1.059	1.624	880	1.300	2.180	11	24	35	74	261	335	85	285	370
19	NUSA TENGGARA TIMUR	252	245	497	526	1.011	1.537	778	1.256	2.034	4	16	20	61	234	295	65	250	315
20	KALIMANTAN BARAT	332	214	546	634	836	1.470	966	1.050	2.016	17	16	33	88	221	309	105	237	342
21	KALIMANTAN TENGAH	227	175	402	447	700	1.147	674	875	1.549	11	22	33	69	188	257	80	210	290
22	KALIMANTAN SELATAN	433	316	749	593	1.047	1.640	1.026	1.363	2.389	26	37	63	175	451	626	201	488	689
23	KALIMANTAN TIMUR	516	437	953	809	1.525	2.334	1.325	1.962	3.287	28	57	85	146	473	619	174	530	704
24	KALIMANTAN UTARA	95	67	162	192	262	454	287	329	616	8	14	22	35	60	95	43	74	117
25	SULAWESI UTARA	376	374	750	917	1.441	2.358	1.293	1.815	3.108	5	13	18	91	237	328	96	250	346
26	SULAWESI TENGAH	176	195	371	401	783	1.184	577	978	1.555	2	17	19	51	182	233	53	199	252
27	SULAWESI SELATAN	872	1.126	1.998	1.147	2.730	3.877	2.019	3.856	5.875	64	141	205	241	1.085	1.326	305	1.226	1.531
28	SULAWESI TENGGARA	170	173	343	364	846	1.210	534	1.019	1.553	12	23	35	63	283	346	75	306	381
29	GORONTALO	105	96	201	147	295	442	252	391	643	2	4	6	20	72	92	22	76	98
30	SULAWESI BARAT	62	86	148	102	251	353	164	337	501	3	14	17	32	107	139	35	121	156
31	MALUKU	94	128	222	223	537	760	317	665	982	5	11	16	32	98	130	37	109	146
32	MALUKU UTARA	82	77	159	205	321	526	287	398	685	6	5	11	34	72	106	40	77	117
33	PAPUA	108	116	224	195	415	610	303	531	834	2	8	10	19	53	72	21	61	82
34	PAPUA BARAT	48	37	85	121	192	313	169	229	398	0	4	4	16	35	51	16	39	55
35	PAPUA SELATAN	33	30	63	81	157	238	114	187	301	1	3	4	9	18	27	10	21	31
36	PAPUA TENGAH	56	42	98	128	194	322	184	236	420	1	3	4	11	34	45	12	37	49
37	PAPUA PEGUNUNGAN	24	22	46	84	103	187	108	125	233	0	0	0	6	23	29	6	23	29
38	PAPUA BARAT DAYA	60	34	94	91	203	294	151	237	388	0	4	4	18	37	55	18	41	59
Indonesia		29.890	25.012	54.902	39.645	76.160	115.805	69.535	101.172	170.707	1.643	3.551	5.194	6.229	25.044	31.273	7.872	28.595	36.467

Lampiran 11.b

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2024**

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	ACEH	1	3	4	268	978	1.246	269	981	1.250	0	0	0	68	382	450	68	382	450
2	SUMATERA UTARA	4	5	9	589	1.525	2.114	593	1.530	2.123	0	2	2	106	602	708	106	604	710
3	SUMATERA BARAT	2	10	12	175	674	849	177	684	861	0	0	0	44	379	423	44	379	423
4	RIAU	4	4	8	276	893	1.169	280	897	1.177	0	0	0	51	338	389	51	338	389
5	JAMBI	1	0	1	153	469	622	154	469	623	1	0	1	36	163	199	37	163	200
6	SUMATERA SELATAN	1	6	7	217	711	928	218	717	935	0	0	0	47	205	252	47	205	252
7	BENGKULU	0	0	0	110	266	376	110	266	376	0	0	0	19	104	123	19	104	123
8	LAMPUNG	3	14	17	265	688	953	268	702	970	0	0	0	28	169	197	28	169	197
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	92	175	267	92	175	267	0	0	0	0	24	57	81	24	57
10	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	130	344	474	130	344	474	0	0	0	25	99	124	25	99	124
11	DKI JAKARTA	1	7	8	292	864	1.156	293	871	1.164	0	0	0	34	167	201	34	167	201
12	JAWA BARAT	0	0	0	1.001	2.258	3.259	1.001	2.258	3.259	0	0	0	174	905	1.079	174	905	1.079
13	JAWA TENGAH	0	2	2	968	2.092	3.060	968	2.094	3.062	0	1	1	173	923	1.096	173	924	1.097
14	YOGYAKARTA	2	1	3	124	432	556	126	433	559	1	1	2	21	226	247	22	227	249
15	JAWA TIMUR	0	1	1	952	2.135	3.087	952	2.136	3.088	0	1	1	215	1.076	1.291	215	1.077	1.292
16	BANTEN	0	0	0	226	652	878	226	652	878	0	0	0	50	329	379	50	329	379
17	BALI	0	3	3	296	421	717	296	424	720	0	0	0	86	223	309	86	223	309
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	0	1	200	442	642	201	442	643	0	0	0	41	150	191	41	150	191
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	232	470	702	232	470	702	0	0	0	43	164	207	43	164	207
20	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	224	320	544	224	320	544	0	0	0	36	94	130	36	94	130
21	KALIMANTAN TENGAH	0	1	1	160	285	445	160	286	446	0	0	0	32	104	136	32	104	136
22	KALIMANTAN SELATAN	0	0	0	174	417	591	174	417	591	0	0	0	75	227	302	75	227	302
23	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	179	427	606	179	427	606	0	0	0	45	199	244	45	199	244
24	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	47	108	155	47	108	155	0	0	0	18	35	53	18	35	53
25	SULAWESI UTARA	0	1	1	169	502	671	169	503	672	0	0	0	38	112	150	38	112	150
26	SULAWESI TENGAH	0	0	0	142	356	498	142	356	498	0	0	0	26	129	155	26	129	155
27	SULAWESI SELATAN	0	3	3	235	924	1.159	235	927	1.162	0	0	0	87	551	638	87	551	638
28	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	163	465	628	163	465	628	0	0	0	39	200	239	39	200	239
29	GORONTALO	0	0	0	47	117	164	47	117	164	0	0	0	11	52	63	11	52	63
30	SULAWESI BARAT	0	0	0	59	149	208	59	149	208	0	0	0	22	82	104	22	82	104
31	MALUKU	0	0	0	78	259	337	78	259	337	0	0	0	12	53	65	12	53	65
32	MALUKU UTARA	0	0	0	79	157	236	79	157	236	0	0	0	24	49	73	24	49	73
33	PAPUA	0	1	1	48	152	200	48	153	201	0	0	0	5	29	34	5	29	34
34	PAPUA BARAT	0	0	0	55	78	133	55	78	133	0	0	0	7	22	29	7	22	29
35	PAPUA SELATAN	0	0	0	24	79	103	24	79	103	0	0	0	1	10	11	1	10	11
36	PAPUA TENGAH	0	0	0	47	89	136	47	89	136	0	0	0	1	19	20	1	19	20
37	PAPUA PEGUNYAN	0	0	0	44	52	96	44	52	96	0	0	0	3	15	18	3	15	18
38	PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	31	104	135	31	104	135	0	0	0	5	24	29	5	24	29
Indonesia		20	62	82	8.571	21.529	30.100	8.591	21.591	30.182	2	5	7	1.772	8.667	10.439	1.774	8.672	10.446

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 11.c

JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	ACEH	621	588	1.209	570	1.081	1.651	1.191	1.669	2.860	10	42	52	48	128	176	58	170	228
2	SUMATERA UTARA	1.490	1.098	2.588	1.291	1.917	3.208	2.781	3.015	5.796	31	92	123	107	331	438	138	423	561
3	SUMATERA BARAT	570	587	1.157	408	1.018	1.426	978	1.605	2.583	12	35	47	39	192	231	51	227	278
4	RIAU	752	508	1.260	501	1.032	1.533	1.253	1.540	2.793	17	41	58	50	152	202	67	193	260
5	JAMBI	256	209	465	221	478	699	477	687	1.164	10	15	25	17	54	71	27	69	96
6	SUMATERA SELATAN	671	608	1.279	607	1.220	1.827	1.278	1.828	3.106	20	37	57	29	152	181	49	189	238
7	BENGKULU	142	123	265	109	267	376	251	390	641	3	9	12	7	45	52	10	54	64
8	LAMPUNG	526	345	871	348	702	1.050	874	1.047	1.921	11	20	31	23	80	103	34	100	134
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	145	113	258	119	217	336	264	330	594	8	18	26	10	25	35	18	43	61
10	KEPULAUAN RIAU	317	209	526	205	378	583	522	587	1.109	11	18	29	14	54	68	25	72	97
11	DKI JAKARTA	4.022	3.660	7.682	1.516	2.923	4.439	5.538	6.583	12.121	254	570	824	201	776	977	455	1.346	1.801
12	JAWA BARAT	4.690	3.720	8.410	2.976	4.706	7.682	7.666	8.426	16.092	245	479	724	262	905	1.167	507	1.384	1.891
13	JAWA TENGAH	3.047	2.167	5.214	1.921	2.978	4.899	4.968	5.145	10.113	113	209	322	184	614	798	297	823	1.120
14	YOGYAKARTA	785	734	1.519	510	766	1.276	1.295	1.500	2.795	67	150	217	118	273	391	185	423	608
15	JAWA TIMUR	3.661	2.748	6.409	2.577	3.696	6.273	6.238	6.444	12.682	224	426	650	287	936	1.223	511	1.362	1.873
16	BANTEN	1.711	1.466	3.177	903	1.675	2.578	2.614	3.141	5.755	70	194	264	51	311	362	121	505	626
17	BALI	1.146	767	1.913	1.154	1.341	2.495	2.300	2.108	4.408	31	43	74	68	193	261	99	236	335
18	NUSA TENGGARA BARAT	306	238	544	298	490	788	604	728	1.332	9	24	33	20	77	97	29	101	130
19	NUSA TENGGARA TIMUR	250	241	491	253	445	698	503	686	1.189	4	15	19	12	54	66	16	69	85
20	KALIMANTAN BARAT	328	208	536	287	374	661	615	582	1.197	15	16	31	32	75	107	47	91	138
21	KALIMANTAN TENGAH	222	166	388	184	327	511	406	493	899	11	20	31	20	46	66	31	66	97
22	KALIMANTAN SELATAN	409	300	709	360	471	831	769	771	1.540	25	34	59	57	129	186	82	163	245
23	KALIMANTAN TIMUR	499	417	916	373	694	1.067	872	1.111	1.983	24	50	74	35	100	135	59	150	209
24	KALIMANTAN UTARA	90	66	156	97	131	228	187	197	384	7	14	21	7	16	23	14	30	44
25	SULAWESI UTARA	367	360	727	695	832	1.527	1.062	1.192	2.254	5	13	18	34	111	145	39	124	163
26	SULAWESI TENGAH	169	190	359	201	345	546	370	535	905	2	16	18	15	44	59	17	60	77
27	SULAWESI SELATAN	856	1.095	1.951	796	1.503	2.299	1.652	2.598	4.250	62	137	199	116	356	472	178	493	671
28	SULAWESI TENGGARA	164	167	331	198	356	554	362	523	885	12	22	34	26	81	107	38	103	141
29	GORONTALO	104	96	200	89	143	232	193	239	432	2	4	6	4	16	20	6	20	26
30	SULAWESI BARAT	62	85	147	39	89	128	101	174	275	3	14	17	7	20	27	10	34	44
31	MALUKU	91	123	214	100	247	347	191	370	561	3	11	14	9	26	35	12	37	49
32	MALUKU UTARA	79	76	155	74	134	208	153	210	363	6	5	11	10	22	32	16	27	43
33	PAPUA	106	113	219	119	218	337	225	331	556	2	8	10	9	19	28	11	27	38
34	PAPUA BARAT	48	37	85	53	97	150	101	134	235	0	4	4	7	10	17	7	14	21
35	PAPUA SELATAN	33	30	63	45	67	112	78	97	175	0	3	3	6	6	12	6	9	15
36	PAPUA TENGAH	52	41	93	55	70	125	107	111	218	1	3	4	4	8	12	5	11	16
37	PAPUA PEGUNUNGAN	24	22	46	34	51	85	58	73	131	0	0	0	3	10	13	3	10	13
38	PAPUA BARAT DAYA	59	34	93	47	93	140	106	127	233	0	3	3	10	12	22	10	15	25
Indonesia		28.870	23.755	52.625	20.333	33.572	53.905	49.203	57.327	106.530	1.330	2.814	4.144	1.958	6.459	8.417	3.288	9.273	12.561

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 11.d

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	ACEH	162	116	116	87	32	96	46	18	5	32.416	52	33.146
2	SUMATERA UTARA	309	293	288	184	70	170	131	67	2	44.912	123	46.549
3	SUMATERA BARAT	122	126	109	78	30	72	63	35	5	22.871	47	23.558
4	RIAU	138	150	126	105	49	82	46	26	5	24.277	58	25.062
5	JAMBI	61	58	39	35	21	34	24	11	2	13.189	25	13.499
6	SUMATERA SELATAN	167	167	119	88	40	70	40	40	3	29.069	57	29.860
7	BENGKULU	27	32	25	24	14	18	16	6	1	7.980	12	8.155
8	LAMPUNG	93	116	81	69	45	56	42	16	3	21.631	31	22.183
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	25	31	27	23	13	15	16	6	1	6.913	26	7.096
10	KEPULAUAN RIAU	55	55	60	48	24	43	24	11	2	10.077	29	10.428
11	DKI JAKARTA	723	671	726	323	322	506	210	125	32	91.840	824	96.302
12	JAWA BARAT	850	903	879	526	397	614	303	116	51	148.646	724	154.009
13	JAWA TENGAH	609	525	496	354	248	401	190	67	28	128.533	322	131.773
14	YOGYAKARTA	151	109	129	98	66	92	62	22	2	24.291	217	25.239
15	JAWA TIMUR	675	634	576	387	291	450	249	120	23	131.559	650	135.614
16	BANTEN	301	375	345	176	147	219	96	36	13	39.794	264	41.766
17	BALI	194	206	186	138	64	133	46	34	4	29.152	74	30.231
18	NUSA TENGGARA BARAT	56	58	52	41	29	38	27	12	1	17.747	33	18.094
19	NUSA TENGGARA TIMUR	71	66	53	47	28	46	26	10	4	16.918	19	17.288
20	KALIMANTAN BARAT	63	60	56	50	27	42	21	10	3	15.237	31	15.600
21	KALIMANTAN TENGAH	43	46	39	33	21	32	22	8	5	10.484	31	10.764
22	KALIMANTAN SELATAN	78	72	61	44	29	51	30	13	2	18.538	59	18.977
23	KALIMANTAN TIMUR	93	93	90	58	36	81	39	20	4	20.499	74	21.087
24	KALIMANTAN UTARA	17	19	18	16	10	11	6	2	1	4.898	21	5.019
25	SULAWESI UTARA	118	78	86	56	28	45	20	5	1	17.044	18	17.499
26	SULAWESI TENGAH	47	44	38	36	23	24	19	6	1	13.357	18	13.613
27	SULAWESI SELATAN	214	195	162	127	105	121	96	45	3	41.502	199	42.769
28	SULAWESI TENGGARA	47	36	32	26	19	26	17	3	1	10.766	34	11.007
29	GORONTALO	30	22	19	15	12	14	9	4	1	6.118	6	6.250
30	SULAWESI BARAT	18	12	13	14	8	9	12	1	1	4.202	17	4.307
31	MALUKU	24	19	23	22	13	15	16	6	0	7.744	14	7.896
32	MALUKU UTARA	19	20	23	15	5	13	8	3	1	5.414	11	5.532
33	PAPUA	21	20	22	24	12	17	13	2	1	5.849	10	5.991
34	PAPUA BARAT	13	11	10	11	5	8	7	1	0	3.284	4	3.354
35	PAPUA SELATAN	11	6	5	6	4	7	7	1	0	1.882	3	1.932
36	PAPUA TENGAH	16	11	12	8	7	9	7	1	0	2.716	4	2.791
37	PAPUA PEGUNUNGAN	5	5	6	7	4	2	6	0	1	1.233	0	1.269
38	PAPUA BARAT DAYA	11	14	12	10	5	5	4	2	0	2.423	3	2.489
Indonesia		5.677	5.474	5.159	3.409	2.303	3.687	2.016	911	213	1.035.005	4.144	1.067.998

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 11.e

**KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	10,1%	0,3%	89,6%	69,1%	6,6%	24,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2	Sumatera Utara	13,6%	0,8%	85,6%	57,2%	20,4%	22,5%	1,1%	0,0%	98,9%	0,2%	0,0%	99,8%
3	Sumatera Barat	15,0%	0,0%	85,0%	61,8%	3,6%	34,6%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
4	Riau	5,4%	0,4%	94,1%	54,0%	5,4%	40,6%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
5	Jambi	14,9%	0,0%	85,1%	75,5%	15,9%	8,7%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
6	Sumatera Selatan	24,6%	1,7%	73,7%	54,3%	37,4%	8,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
7	Bengkulu	36,9%	1,1%	62,0%	57,0%	38,5%	4,5%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
8	Lampung	14,4%	0,6%	85,0%	40,0%	51,6%	8,4%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
9	Kep. Bangka Belitung	4,7%	0,0%	95,3%	70,3%	7,8%	21,9%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10	Kepulauan Riau	8,3%	2,1%	89,6%	54,2%	15,6%	30,2%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
11	DKI Jakarta	0,0%	0,0%	100,0%	2,3%	0,0%	97,7%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
12	Jawa Barat	12,4%	0,3%	87,3%	64,6%	21,8%	13,7%	0,2%	0,0%	99,8%	0,0%	0,0%	100,0%
13	Jawa Tengah	7,6%	0,3%	92,1%	75,6%	6,0%	18,4%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
14	DI Yogyakarta	5,0%	0,0%	95,0%	51,2%	0,0%	48,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,8%	99,2%
15	Jawa Timur	14,2%	0,6%	85,2%	70,4%	3,6%	26,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
16	Banten	6,3%	0,0%	93,7%	41,9%	13,8%	44,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
17	Bali	1,7%	0,0%	98,3%	26,7%	0,8%	72,5%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
18	Nusa Tenggara Barat	9,6%	0,0%	90,4%	71,2%	14,7%	14,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
19	Nusa Tenggara Timur	63,2%	4,6%	32,2%	40,7%	55,6%	3,7%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
20	Kalimantan Barat	31,3%	2,0%	66,7%	48,2%	49,4%	2,4%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
21	Kalimantan Tengah	39,7%	4,4%	55,9%	49,5%	44,1%	6,4%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
22	Kalimantan Selatan	33,9%	0,4%	65,7%	71,1%	7,9%	21,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
23	Kalimantan Timur	23,9%	0,5%	75,5%	55,3%	15,4%	29,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
24	Kalimantan Utara	32,8%	1,7%	65,5%	70,7%	19,0%	10,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
25	Sulawesi Utara	21,1%	0,5%	78,4%	53,3%	38,7%	8,0%	0,0%	0,0%	100,0%	1,0%	0,0%	99,0%
26	Sulawesi Tengah	37,4%	3,2%	59,4%	53,4%	38,4%	8,2%	0,0%	0,5%	99,5%	0,5%	0,0%	99,5%
27	Sulawesi Selatan	24,7%	1,9%	73,4%	63,3%	4,0%	32,7%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
28	Sulawesi Tenggara	42,5%	2,9%	54,5%	57,5%	35,4%	7,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
29	Gorontalo	50,5%	1,1%	48,4%	61,1%	36,8%	2,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
30	Sulawesi Barat	38,8%	2,0%	59,2%	69,4%	17,3%	13,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
31	Maluku	50,8%	12,1%	37,1%	26,3%	73,3%	0,4%	0,4%	0,0%	99,6%	0,8%	0,4%	98,8%
32	Maluku Utara	46,0%	10,0%	44,0%	39,3%	57,3%	3,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
33	Papua	46,7%	13,9%	39,3%	24,6%	73,8%	1,6%	0,0%	1,6%	98,4%	1,6%	1,6%	96,7%
34	Papua Barat	56,6%	9,2%	34,2%	23,7%	68,4%	7,9%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
35	Papua Selatan	36,5%	32,9%	30,6%	9,4%	89,4%	1,2%	0,0%	2,4%	97,6%	1,2%	2,4%	96,5%
36	Papua Tengah	28,9%	43,8%	27,3%	10,7%	86,0%	3,3%	3,3%	0,8%	95,9%	11,6%	9,1%	79,3%
37	Papua Pegunungan	30,3%	56,8%	12,9%	10,3%	89,0%	0,6%	5,2%	3,2%	91,6%	20,0%	15,5%	64,5%
38	Papua Barat Daya	62,2%	15,3%	22,4%	25,5%	72,4%	2,0%	2,0%	0,0%	98,0%	1,0%	0,0%	99,0%
Indonesia		26,4%	6,0%	67,6%	49,0%	32,5%	18,5%	0,3%	0,2%	99,5%	1,0%	0,8%	98,2%

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 11.f

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL*
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kesehatan																Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	SUMATERA UTARA	4	34	159	0	35	1	2.066	2.398	246	321	61	114	26	148	157	0	5.766	750	6.516
2	SUMATERA BARAT	1	6	36	0	12	0	424	302	49	79	20	36	4	17	29	0	1.014	445	1.459
3	SUMATERA SELATAN	1	16	43	0	11	1	344	412	87	58	17	27	4	30	37	0	1.087	210	1.297
4	LAMPUNG	1	7	32	0	1	0	235	419	50	30	34	32	0	29	39	0	908	212	1.120
5	NUSA TENGGARA BARAT	1	17	91	2	9	0	484	294	112	44	16	54	1	64	85	0	1.273	441	1.714
6	NUSA TENGGARA TIMUR	13	151	693	5	142	3	7.997	6.166	1.044	1.359	678	914	56	765	833	0	20.806	4.180	24.986
7	SULAWESI TENGAH	3	51	187	2	37	6	1.732	1.594	317	646	215	158	13	59	151	0	5.168	809	5.977
8	MALUKU	6	37	232	4	36	2	3.383	1.887	292	717	348	387	12	54	264	0	7.655	1.051	8.706
9	MALUKU UTARA	2	8	41	1	6	0	620	552	85	226	36	66	2	18	63	0	1.724	208	1.932
10	PAPUA	4	15	84	2	11	0	940	397	93	125	54	82	3	22	121	0	1.949	450	2.399
11	PAPUA BARAT	4	25	111	0	15	0	935	574	123	161	45	84	5	28	116	0	2.222	637	2.859
12	PAPUA SELATAN	3	23	92	0	6	2	959	622	128	160	53	74	5	34	109	0	2.267	417	2.684
13	PAPUA TENGAH	7	51	159	2	18	1	1.789	754	200	282	63	83	9	31	151	0	3.593	1.084	4.677
14	PAPUA PEGUNUNGAN	8	46	187	0	29	1	1.543	669	206	313	79	85	6	20	117	63	3.364	982	4.346
15	PAPUA BARAT DAYA	4	44	138	2	18	1	1.258	743	162	246	80	145	5	28	112	0	2.982	698	3.680
Indonesia		62	531	2.285	20	386	18	24.709	17.783	3.194	4.767	1.799	2.341	151	1.347	2.384	63	61.778	12.574	74.352

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

*berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

Lampiran 11.g

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA MEDIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2.531	38	581	832	3.982
2	Sumatera Utara	5.892	121	1.821	1.855	9.689
3	Sumatera Barat	2.322	33	960	767	4.082
4	Riau	3.019	37	761	676	4.493
5	Jambi	1.391	11	231	298	1.931
6	Sumatera Selatan	2.432	33	592	825	3.882
7	Bengkulu	755	6	155	149	1.065
8	Lampung	1.922	19	241	459	2.641
9	Kepulauan Bangka Belitung	416	14	106	137	673
10	Kepulauan Riau	811	18	198	253	1.280
11	DKI Jakarta	9.308	639	2.985	5.376	18.308
12	Jawa Barat	13.374	479	3.694	4.131	21.678
13	Jawa Tengah	8.310	218	2.324	3.021	13.873
14	DI Yogyakarta	2.296	173	750	1.076	4.295
15	Jawa Timur	9.491	684	3.802	4.151	18.128
16	Banten	4.833	152	1.564	1.481	8.030
17	Bali	2.970	67	1.005	1.324	5.366
18	Nusa Tenggara Barat	1.195	20	233	312	1.760
19	Nusa Tenggara Timur	774	14	136	187	1.111
20	Kalimantan Barat	1.107	16	211	276	1.610
21	Kalimantan Tengah	755	10	210	200	1.175
22	Kalimantan Selatan	1.170	20	607	395	2.192
23	Kalimantan Timur	1.500	58	462	518	2.538
24	Kalimantan Utara	258	11	64	73	406
25	Sulawesi Utara	1.492	11	271	402	2.176
26	Sulawesi Tengah	871	8	112	198	1.189
27	Sulawesi Selatan	3.777	164	1.328	1.616	6.885
28	Sulawesi Tenggara	882	19	177	172	1.250
29	Gorontalo	293	4	45	97	439
30	Sulawesi Barat	182	9	69	59	319
31	Maluku	468	7	53	93	621
32	Maluku Utara	286	5	33	52	376
33	Papua	369	1	50	83	503
34	Papua Barat	11	0	3	0	14
35	Papua Selatan	15	0	1	0	16
36	Papua Tengah	823	6	91	163	1.083
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
Indonesia		88.301	3.125	25.926	31.707	149.059

Sumber: Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, 2025

Lampiran 11.h

**JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2024**

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	4.442	1.190	903	54	6.589
2	Sumatera Utara	11.104	3.022	2.728	227	17.081
3	Sumatera Barat	4.298	1.271	1.339	55	6.963
4	Riau	5.724	1.124	1.143	65	8.056
5	Jambi	2.372	454	388	23	3.237
6	Sumatera Selatan	4.769	1.306	833	59	6.967
7	Bengkulu	1.185	214	221	8	1.628
8	Lampung	3.446	785	384	31	4.646
9	Kepulauan Bangka Belitung	709	223	172	23	1.127
10	Kepulauan Riau	1.521	406	394	31	2.352
11	DKI Jakarta	18.288	8.702	5.290	1.231	33.511
12	Jawa Barat	25.084	6.772	6.401	907	39.164
13	Jawa Tengah	15.277	4.908	3.476	359	24.020
14	DI Yogyakarta	4.458	1.919	1.353	374	8.104
15	Jawa Timur	18.411	6.875	6.339	1.086	32.711
16	Banten	8.838	2.378	2.686	316	14.218
17	Bali	5.645	2.209	1.576	100	9.530
18	Nusa Tenggara Barat	2.029	469	330	29	2.857
19	Nusa Tenggara Timur	1.380	333	247	19	1.979
20	Kalimantan Barat	1.916	454	319	29	2.718
21	Kalimantan Tengah	1.275	302	264	23	1.864
22	Kalimantan Selatan	1.977	642	821	49	3.489
23	Kalimantan Timur	2.651	857	739	88	4.335
24	Kalimantan Utara	405	117	94	20	636
25	Sulawesi Utara	2.967	825	438	17	4.247
26	Sulawesi Tengah	1.475	290	189	20	1.974
27	Sulawesi Selatan	6.633	2.396	2.170	295	11.494
28	Sulawesi Tenggara	1.380	257	280	24	1.941
29	Gorontalo	420	149	82	6	657
30	Sulawesi Barat	262	87	108	16	473
31	Maluku	823	165	104	16	1.108
32	Maluku Utara	440	104	62	8	614
33	Papua	609	134	83	6	832
34	Papua Barat	12	0	2	0	14
35	Papua Selatan	15	0	1	0	16
36	Papua Tengah	1.469	274	166	15	1.924
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
Indonesia		163.709	51.613	42.125	5.629	263.076

Sumber: Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, 2025

Lampiran 11.i

JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5
1	Aceh	1	0	0
2	Sumatera Utara	15	1	0
3	Sumatera Barat	2	0	0
4	Riau	4	0	0
5	Jambi	4	0	0
6	Sumatera Selatan	3	1	0
7	Bengkulu	0	0	0
8	Lampung	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0
10	Kepulauan Riau	4	2	2
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	2	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0
15	Jawa Timur	3	0	0
16	Banten	2	0	0
17	Bali	3	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	3	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	3	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	2
21	Kalimantan Tengah	1	0	0
22	Kalimantan Selatan	3	0	0
23	Kalimantan Timur	13	2	1
24	Kalimantan Utara	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	7	3	0
27	Sulawesi Selatan	1	0	0
28	Sulawesi Tenggara	7	3	1
29	Gorontalo	0	1	0
30	Sulawesi Barat	4	1	0
31	Maluku	3	2	3
32	Maluku Utara	6	4	0
33	Papua	5	2	1
34	Papua Barat	0	1	0
35	Papua Selatan	NA	0	0
36	Papua Tengah	NA	0	0
37	Papua Pegunungan	NA	0	0
38	Papua Barat Daya	NA	0	0
Indonesia		106	23	10

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 11.j

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM
BATCH XXVII-XXIX PADA PERIODE I-III TAHUN 2024

No	Provinsi	Batch 27 (Periode I Tahun 2024)		Batch 28 (Periode II Tahun 2024)		Batch 29 (Periode III Tahun 2024)	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-5	-6
1	Aceh	2	3	0	0	2	2
2	Sumatera Utara	4	9	1	1	1	1
3	Sumatera Barat	0	0	1	1	2	4
4	Sumatera Selatan	0	0	0	0	1	1
5	Jambi	1	1	0	0	0	0
6	Lampung	1	1	2	3	0	0
7	Nusa Tenggara Timur	3	5	2	2	0	0
8	Kalimantan Tengah	1	2	0	0	0	0
9	Sulawesi Barat	1	1	0	0	1	1
10	Sulawesi Utara	0	0	1	2	1	1
11	Sulawesi Tengah	1	1	0	0	0	0
12	Sulawesi Selatan	2	3	0	0	0	0
13	Sulawesi Tenggara	1	1	0	0	0	0
14	Maluku	3	7	2	2	1	1
15	Maluku Utara	1	1	1	1	2	2
16	Papua	1	1	0	0	0	0
17	Papua Selatan	0	0	1	1	1	1
18	Papua Barat Daya	1	4	2	4	2	5
Indonesia		23	40	13	17	14	19

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.j.1

JUMLAH PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM
BATCH XXVII SAMPAI DENGAN BATCH XXIX/ PERIODE I SAMPAI DENGAN III
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Aceh	0	1	0	0	5	3	5	2	3	19
2	Sumatera Barat	2	0	0	0	2	3	4	3	2	16
3	Sumatera Utara	2	0	0	0	7	7	8	5	8	37
4	Sumatera Selatan	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
5	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jambi	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
7	Lampung	2	0	0	0	3	4	2	2	4	17
8	Nusa Tenggara Timur	3	1	0	0	5	5	4	6	6	30
9	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kalimantan Tengah	1	0	0	0	1	0	2	0	2	6
11	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sulawesi Barat	1	1	0	0	1	1	0	1	1	6
13	Sulawesi Utara	0	1	0	0	2	2	0	2	2	9
14	Sulawesi Selatan	1	2	0	0	2	1	2	1	3	12
15	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
16	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
17	Maluku	6	1	0	0	1	9	3	5	6	31
18	Maluku Utara	1	1	0	0	1	3	3	2	2	13
19	Papua	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4
20	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Papua Selatan	1	0	0	0	0	0	2	1	2	6
22	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Papua Barat Daya	4	1	0	0	5	13	8	5	9	45
Indonesia		26	9	0	0	39	52	46	38	53	263

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.j.2

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
BERBASIS INDIVIDU PERIODE I-V TAHUN 2024**

No	Provinsi	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
		Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Aceh	5	9	10	37	4	7	4	30	13	20
2	Sumatera Utara	9	17	12	72	7	13	7	37	22	76
3	Sumatera Barat	7	11	5	6	7	8	7	22	8	24
4	Riau	3	12	4	18	1	1	1	13	7	9
5	Jambi	4	14	6	23	4	4	4	13	5	20
6	Sumatera Selatan	1	1	2	11	4	6	4	8	9	22
7	Bengkulu	4	7	7	22	3	3	3	9	7	17
8	Lampung	4	8	7	24	3	3	3	12	9	18
9	Jawa Barat	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jawa Timur	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kep. Bangka Belitung	1	1	0	0	1	1	1	0	2	3
12	Kepulauan Riau	5	10	3	3	2	3	2	4	2	4
13	Kalimantan Barat	3	3	7	16	3	4	3	27	6	11
14	Kalimantan Tengah	4	6	9	31	2	2	2	21	6	9
15	Kalimantan Selatan	0	0	1	5	3	5	3	4	2	4
16	Kalimantan Timur	3	4	2	5	2	2	2	10	4	5
17	Kalimantan Utara	0	0	2	12	0	0	0	6	3	8
18	Gorontalo	5	7	3	10	2	4	2	10	4	4
19	Maluku	3	5	8	35	7	14	7	22	5	5
20	Maluku Utara	1	1	7	22	4	5	4	29	3	5
21	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	2	3	5	3	5	2	2
22	Nusa Tenggara Timur	9	24	13	54	11	26	11	31	8	18
23	Sulawesi Utara	2	2	6	33	4	8	4	18	7	21
24	Sulawesi Tengah	7	11	9	22	4	4	4	16	9	18
25	Sulawesi Selatan	3	7	11	42	6	6	6	17	10	22
26	Sulawesi Tenggara	7	10	13	51	8	14	8	35	11	30
27	Sulawesi Barat	0	0	3	8	4	5	4	12	1	2
28	Papua	0	0	2	3	2	4	2	3	2	2
29	Papua Barat	0	0	2	4	1	1	1	1	1	1
30	Papua Selatan	0	0	4	20	2	4	2	6	2	4
31	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua Barat Daya	1	1	4	11	3	4	3	14	3	5
Indonesia		97	179	163	602	107	166	107	435	173	389

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.k

**JUMLAH DOKTER INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Internship
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Aceh	68	58	78	93	297
2	Sumatera Utara	110	101	82	215	508
3	Sumatera Barat	90	77	48	108	323
4	Riau	82	58	32	111	283
5	Jambi	57	52	16	80	205
6	Sumatera Selatan	69	103	154	138	464
7	Bengkulu	45	28	54	51	178
8	Lampung	67	43	44	48	202
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	29	31	26	147
10	Kepulauan Riau	62	73	47	48	230
11	DKI Jakarta	46	64	158	128	396
12	Jawa Barat	294	165	254	429	1.142
13	Jawa Tengah	330	255	387	402	1.374
14	DI Yogyakarta	87	64	110	60	321
15	Jawa Timur	293	203	503	417	1.416
16	Banten	92	64	94	158	408
17	Bali	95	133	249	143	620
18	Nusa Tenggara Barat	64	49	96	39	248
19	Nusa Tenggara Timur	102	58	60	69	289
20	Kalimantan Barat	29	18	72	27	146
21	Kalimantan Tengah	43	13	16	32	104
22	Kalimantan Selatan	46	36	52	22	156
23	Kalimantan Timur	90	46	60	87	283
24	Kalimantan Utara	16	22	33	0	71
25	Sulawesi Utara	61	53	72	64	250
26	Sulawesi Tengah	66	0	28	49	143
27	Sulawesi Selatan	99	60	89	117	365
28	Sulawesi Tenggara	79	110	63	48	300
29	Gorontalo	20	12	6	25	63
30	Sulawesi Barat	8	12	7	12	39
31	Maluku	31	27	29	22	109
32	Maluku Utara	16	11	7	11	45
33	Papua	30	4	5	32	71
34	Papua Barat	0	0	16	0	16
35	Papua Selatan	7	0	0	7	14
36	Papua Tengah	0	16	0	10	26
37	Papua Pegunungan	0	0	4	0	4
38	Papua Barat Daya	29	7	0	0	36
Indonesia		2.784	2.124	3.056	3.328	11.292

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 11.1

**JUMLAH DOKTER GIGI INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Gigi Internship
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Aceh	10	20	9	26	65
2	Sumatera Utara	40	16	44	32	132
3	Sumatera Barat	78	56	61	45	240
4	Riau	10	0	18	0	28
5	Jambi	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	12	9	14	12	47
7	Bengkulu	7	0	0	14	21
8	Lampung	20	10	16	14	60
9	Kepulauan Bangka Belitung	12	4	0	8	24
10	Kepulauan Riau	8	0	0	9	17
11	DKI Jakarta	7	29	8	20	64
12	Jawa Barat	73	100	81	110	364
13	Jawa Tengah	135	110	146	167	558
14	DI Yogyakarta	28	66	30	70	194
15	Jawa Timur	88	80	95	105	368
16	Banten	42	0	50	0	92
17	Bali	56	20	40	46	162
18	Nusa Tenggara Barat	29	26	24	32	111
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	28	10	19	12	69
21	Kalimantan Tengah	0	0	8	0	8
22	Kalimantan Selatan	24	35	29	27	115
23	Kalimantan Timur	28	30	24	36	118
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	12	0	12
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	20	42	20	47	129
28	Sulawesi Tenggara	44	6	35	7	92
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	6	14	8	28
31	Maluku	18	6	9	16	49
32	Maluku Utara	0	0	0	7	7
33	Papua	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
Indonesia		817	681	806	870	3.174

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Spesialis Anak		Spesialis Obstetri dan Ginekologi		Spesialis Penyakit Dalam		Spesialis Bedah		Spesialis Anestesi		Spesialis Patologi Klinik		Spesialis Radiologi		Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		Spesialis Kedokteran Jiwa		Spesialis Mata		Spesialis Onkologi Radiasi		Spesialis Paru		Spesialis Patologi Anatomi		Spesialis Syaraf		Spesialis THT-KL		Total	
		PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN	PBL/ASN	PBTL-nonASN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18																
1	Aceh	10	0	2	0	2	0	3	0	2	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	32	
2	Sumatera Utara	0	1	3	2	0	1	2	3	0	2	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
3	Sumatera Barat	0	2	1	4	1	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	21	
4	Riau	0	4	3	2	0	4	1	2	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	28	
5	Jambi	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	9	
6	Sumatera Selatan	3	1	0	0	1	0	0	0	0	3	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
7	Bengkulu	2	2	0	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	14
8	Lampung	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	Kepulauan Riau	1	0	4	2	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	8
12	Jawa Barat	4	1	1	0	0	2	0	0	1		2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13
13	Jawa Tengah	3	1	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	21
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15	Jawa Timur	1	0	3	0	2	0	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	20
16	Banten	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	Bali	0	2	0	3	3	1	0	0	0	3	1	2		2	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22
18	Nusa Tenggara Barat	1	3	0	4		6	1	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
19	Nusa Tenggara Timur	1	4	2	6	1	4	0	2	1	6	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	40
20	Kalimantan Barat	2	4	1	2	1	4	1	2	3	2	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	31
21	Kalimantan Tengah	0	3	2	10	2	4	1	2	1	7	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
22	Kalimantan Selatan	2	1	1	5	3	4	1	4		2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27
23	Kalimantan Timur	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
24	Kalimantan Utara	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8
25	Sulawesi Utara	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
26	Sulawesi Tengah	0	1	2	5	0	4		5	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
27	Sulawesi Selatan	4	2	3	1		1	1		2	1	9	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	30
28	Sulawesi Tenggara	2	2	3	1	1	4	0	5	0	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
29	Gorontalo	0	1	0	2	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
30	Sulawesi Barat	0	0	0	1		2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
31	Maluku	0	2	0	2	1	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
32	Maluku Utara	2	5	0	5	1	1	0	3	1		1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
33	Papua	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
34	Papua Barat	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
35	Papua Selatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
36	Papua Tengah	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38	Papua Barat Daya	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
39	TNI/POLRI dan K/L lainnya	2	0	5	0	4	0	1	0	4	0	5	0	2	0	2	0	2		2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0	0	37
Indonesia		51	47	42	64	33	62	26	44	29	41	62	20	21	7	10	1	21	0	12	0	0	3	14	0	9	2	18	1	13	0	653	

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 12.a

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	ACEH	2.463	6.720	9.183	16.053	3.623	7.991	11.614	4.780	574	1.150	1.724	1.847	6.660	15.861	22.521	22.680
2	SUMATERA UTARA	2.399	5.726	8.125	18.220	3.791	11.444	15.235	5.955	703	1.645	2.348	3.818	6.893	18.815	25.708	27.993
3	SUMATERA BARAT	586	2.913	3.499	6.716	1.435	6.731	8.166	1.952	180	669	849	1.152	2.201	10.313	12.514	9.820
4	RIAU	982	3.016	3.998	6.264	1.922	5.654	7.576	2.425	467	1.010	1.477	2.744	3.371	9.680	13.051	11.433
5	JAMBI	930	2.453	3.383	5.200	1.236	3.309	4.545	1.537	282	511	793	1.354	2.448	6.273	8.721	8.091
6	SUMATERA SELATAN	1.579	5.051	6.630	11.807	2.117	7.610	9.727	2.998	606	1.356	1.962	1.865	4.302	14.017	18.319	16.670
7	BENGKULU	639	1.681	2.320	3.667	830	1.954	2.784	1.205	161	286	447	502	1.630	3.921	5.551	5.374
8	LAMPUNG	1.640	2.700	4.340	7.874	2.663	4.956	7.619	2.072	706	1.018	1.724	1.916	5.009	8.674	13.683	11.862
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	312	793	1.105	988	705	1.700	2.405	508	198	348	546	304	1.215	2.841	4.056	1.800
10	KEPULAUAN RIAU	300	891	1.191	1.473	803	2.778	3.581	906	229	515	744	770	1.332	4.184	5.516	3.149
11	DKI JAKARTA	398	773	1.171	1.075	6.171	25.956	32.127	3.608	1.485	4.140	5.625	2.812	8.054	30.869	38.923	7.495
12	JAWA BARAT	4.723	6.587	11.310	17.090	16.047	39.199	55.246	9.768	2.788	5.042	7.830	8.778	23.558	50.828	74.386	35.636
13	JAWA TENGAH	3.622	6.753	10.375	16.866	14.182	34.461	48.643	8.711	2.234	5.972	8.206	7.265	20.038	47.186	67.224	32.842
14	YOGYAKARTA	231	663	894	903	1.993	7.070	9.063	1.173	287	1.022	1.309	997	2.511	8.755	11.266	3.073
15	JAWA TIMUR	6.553	9.589	16.142	17.724	16.017	33.163	49.180	9.468	3.529	6.611	10.140	8.322	26.099	49.363	75.462	35.514
16	BANTEN	1.198	1.640	2.838	4.581	3.283	10.613	13.896	2.818	591	1.342	1.933	2.368	5.072	13.595	18.667	9.767
17	BALI	548	1.199	1.747	2.362	2.750	7.341	10.091	2.416	461	1.157	1.618	1.432	3.759	9.697	13.456	6.210
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.395	3.995	6.390	6.159	2.115	3.712	5.827	1.863	705	722	1.427	644	5.215	8.429	13.644	8.666
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.854	6.529	9.383	10.058	1.526	4.631	6.157	2.177	350	868	1.218	1.154	4.730	12.028	16.758	13.389
20	KALIMANTAN BARAT	2.059	2.527	4.586	4.549	2.029	4.013	6.042	1.430	831	851	1.682	1.338	4.919	7.391	12.310	7.317
21	KALIMANTAN TENGAH	1.405	2.067	3.472	3.193	1.211	2.383	3.594	1.045	721	851	1.572	1.257	3.337	5.301	8.638	5.495
22	KALIMANTAN SELATAN	1.096	1.763	2.859	3.926	2.557	4.018	6.575	1.675	505	577	1.082	552	4.158	6.358	10.516	6.153
23	KALIMANTAN TIMUR	816	1.805	2.621	2.607	2.005	5.533	7.538	1.615	689	1.118	1.807	1.460	3.510	8.456	11.966	5.682
24	KALIMANTAN UTARA	265	605	870	690	490	1.123	1.613	469	114	172	286	240	869	1.900	2.769	1.399
25	SULAWESI UTARA	485	2.456	2.941	2.027	1.576	5.579	7.155	1.176	155	470	625	232	2.216	8.505	10.721	3.435
26	SULAWESI TENGAH	1.159	2.843	4.002	4.986	1.371	3.698	5.069	1.868	317	560	877	594	2.847	7.101	9.948	7.448
27	SULAWESI SELATAN	1.909	8.727	10.636	14.757	3.154	12.624	15.778	4.898	738	1.986	2.724	2.607	5.801	23.337	29.138	22.262
28	SULAWESI TENGGARA	1.463	4.970	6.433	7.353	1.008	2.884	3.892	1.422	228	435	663	409	2.699	8.289	10.988	9.184
29	GORONTALO	330	967	1.297	1.509	676	1.656	2.332	798	117	176	293	127	1.123	2.799	3.922	2.434
30	SULAWESI BARAT	542	1.666	2.208	2.952	425	1.176	1.601	751	90	176	266	400	1.057	3.018	4.075	4.103
31	MALUKU	1.001	3.047	4.048	2.647	673	2.623	3.296	927	163	401	564	258	1.837	6.071	7.908	3.832
32	MALUKU UTARA	568	1.608	2.176	3.251	457	1.431	1.888	844	272	240	512	212	1.297	3.279	4.576	4.307
33	PAPUA	696	1.220	1.916	1.139	635	1.821	2.456	533	157	182	339	106	1.488	3.223	4.711	1.778
34	PAPUA BARAT	549	878	1.427	1.001	360	799	1.159	410	101	86	187	132	1.010	1.763	2.773	1.543
35	PAPUA SELATAN	323	534	857	694	153	567	720	278	78	81	159	82	554	1.182	1.736	1.054
36	PAPUA TENGAH	544	1.076	1.620	847	322	740	1.062	282	98	137	235	133	964	1.953	2.917	1.262
37	PAPUA PEGUNUNGAN	483	524	1.007	505	136	311	447	142	64	72	136	44	683	907	1.590	691
38	PAPUA BARAT DAYA	340	1.011	1.351	979	220	650	870	280	87	110	197	110	647	1.771	2.418	1.369
Indonesia		50.385	109.966	160.351	214.692	102.667	273.902	376.569	87.183	22.061	44.065	66.126	60.337	175.113	427.933	603.046	362.212

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 12.b

**JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteneknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika				Tenaga Kesehatan Tradisional			Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Kefarmasian		Total		
				Kesehatan Masyarakat	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Epidemiologi Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Entomologi Kesehatan	Fisioterapis	Terapis Okupasional	Terapis Wicara	Akupunktur Terapis	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Teknisi Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Optometris	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medikal	Ortotik Prostetik	Tenaga Kesehatan Pengobatan Tradisional		Tenaga Kesehatan Ramuan Jamu	Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental		Tenaga Vokasi Farmasi	Apoteker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
1	Aceh	20.604	19.561		0	0		4	1.202	1.123	386	4	2	0	484	0	16	159	7	94	1246	0	444	196	1.375	1	2	0	0	0	29	1.777	552	49.268
2	Sumatera Utara	22.563	25.928		0	0		1	545	1.128	487	10	23	5	840	1	14	354	5	144	822	0	780	305	2.223	12	5	0	0	3	41	2.433	1.350	60.022
3	Sumatera Barat	11.974	9.844		0	0		2	641	866	375	23	67	3	1.228	2	34	248	9	162	543	0	345	211	1.168	5	5	0	0	0	37	1.767	629	30.188
4	Riau	8.901	9.790		1	0		1	111	502	358	16	19	0	674	0	14	111	26	96	276	2	316	74	1.113	4	8	0	0	2	43	1.428	706	24.592
5	Jambi	7.510	6.766		0	0		0	383	224	226	4	3	5	194	1	6	54	4	60	505	0	147	33	926	0	3	0	0	0	20	919	446	18.439
6	Sumatera Selatan	16.551	15.463		2	0		2	781	986	382	16	19	9	607	0	54	153	13	185	703	1	463	73	1.885	3	7	0	0	0	37	1.931	745	41.071
7	Bengkulu	5.234	5.078		5	1		6	333	621	52	5	4	6	159	1	4	28	3	68	72	0	151	42	910	0	1	0	0	0	13	857	318	13.972
8	Lampung	10.978	10.136		0	0		4	663	495	210	30	32	17	246	2	16	85	80	153	505	1	425	82	1.431	3	6	0	0	0	24	861	625	27.110
9	Kep. Bangka Belitung	3.179	1.688		0	0		0	90	272	64	0	12	1	111	4	16	29	6	44	106	0	104	21	330	1	1	0	0	0	16	235	123	6.453
10	Kepulauan Riau	3.936	2.858		0	0		10	352	106	62	12	3	4	133	0	19	48	2	29	86	0	102	22	375	0	2	0	0	6	9	376	202	8.754
11	DKI Jakarta	30.268	10.420		3	1		1	1.238	1.263	1.002	157	203	76	1.146	58	160	616	121	125	1190	31	1.021	668	3.235	30	38	3	0	34	255	2.502	5.738	61.603
12	Jawa Barat	55.501	32.697		53	0		5	1.055	1.887	1.101	196	321	48	3.896	19	179	687	36	557	1564	4	1.724	398	7.146	16	28	2	4	15	254	7.729	3.496	120.618
13	Jawa Tengah	55.122	28.176		0	1		3	1.334	1.748	1.966	451	474	268	4.859	4	399	534	11	373	1316	2	2.035	817	6.039	36	190	1	80	3	214	7.995	2.686	117.137
14	DI Yogyakarta	9.350	3.365		0	0		0	406	537	294	33	32	12	1.078	0	132	59	3	80	363	0	339	158	979	3	1	0	1	1	147	1.006	682	19.061
15	Jawa Timur	55.632	31.293		13	0		6	1.356	2.821	1.001	101	127	165	4.317	0	261	645	161	236	1024	1	1.156	895	6.242	22	39	68	10	29	191	6.557	2.570	116.939
16	Banten	12.851	9.763		1	0		1	253	288	309	55	54	14	461	34	81	206	27	70	256	0	353	115	1.431	5	5	0	1	2	74	1.931	706	29.347
17	Bali	10.825	5.718		1	0		1	374	656	312	13	10	19	167	0	26	57	5	172	431	0	414	82	1.195	1	3	0	0	0	49	1.160	512	22.203
18	Nusa Tenggara Barat	9.765	6.270		0	0		7	271	710	243	17	11	1	553	6	96	41	3	129	403	0	215	99	1.346	9	1	0	0	1	24	1.092	382	21.695
19	Nusa Tenggara Timur	9.883	7.899		1	0		0	639	843	105	0	1	3	404	0	96	37	6	40	526	0	150	77	1.258	0	0	0	0	0	11	1.406	319	23.704
20	Kalimantan Barat	8.929	6.521		1	0		0	477	895	134	9	22	4	345	0	21	58	1	55	652	1	178	59	1.133	1	0	0	0	2	23	755	317	20.593
21	Kalimantan Tengah	6.001	4.287		0	0		0	129	412	76	12	6	5	158	0	19	22	8	35	197	0	123	30	765	0	0	0	0	0	21	662	306	13.274
22	Kalimantan Selatan	7.953	5.335		0	0		0	524	804	125	11	7	4	414	0	11	62	10	50	584	1	202	132	1.180	1	3	0	1	0	36	915	521	18.886
23	Kalimantan Timur	8.621	5.071		6	0		2	226	368	193	24	29	7	243	5	23	43	7	84	215	1	171	77	1.228	4	6	0	0	1	38	1.031	540	18.264
24	Kalimantan Utara	1.592	1.031		0	0		0	34	41	25	1	3	0	49	1	7	2	1	14	41	0	30	22	128	1	0	0	0	0	3	229	89	3.344
25	Sulawesi Utara	7.527	2.955		0	0		0	321	478	92	6	1	1	55	0	52	31	6	49	273	0	82	27	486	2	0	0	0	0	4	651	182	13.281
26	Sulawesi Tengah	6.669	5.814		0	0		3	381	448	90	2	0	0	73	15	42	14	4	61	178	0	122	35	573	1	0	0	0	0	10	947	314	15.796
27	Sulawesi Selatan	26.167	20.988		0	0		7	1.123	985	693	17	15	1	1.020	59	45	44	47	106	1269	0	617	252	2.991	18	6	1	0	0	28	3.353	1.312	61.164
28	Sulawesi Tenggara	7.600	6.921		0	0		0	354	716	88	3	0	1	298	9	26	14	9	66	469	1	103	119	1.240	3	0	0	0	0	9	927	623	19.599
29	Gorontalo	3.476	2.136		0	0		1	140	528	34	0	0	0	96	2	14	4	1	35	47	0	79	14	398	1	1	0	0	0	4	456	111	7.578
30	Sulawesi Barat	3.048	2.965		0	0		0	175	213	50	0	2	0	30	2	1	2	6	5	75	0	45	9	163	0	0	0	0	0	2	313	110	7.216
31	Maluku	4.460	2.342		0	0		0	379	411	41	0	1	0	35	4	13	8	4	21	65	0	60	17	587	1	0	0	0	0	5	191	81	8.726
32	Maluku Utara	2.822	2.861		0	0		1	204	346	26	5	0	0	36	13	10	2	11	27	69	0	59	13	543	0	0	0	0	0	1	348	95	7.492
33	Papua	4.529	2.521		0	0		1	233	241	54	2	1	0	70	1	4	9	7	38	40	0	55	21	959	1	0	0	0	0	6	640	352	9.785
34	Papua Barat	2.187	1.251		0	0		2	39	200	21	1	0	0	32	2	12	10	1	16	22	1	31	10	278	0	1	0	0	0	5	162	168	4.452
35	Papua Selatan	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	(blank)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.395	25.395	
Indonesia		462.208	315.712	0	87	3	0	71	16.766	24.162	10.677	1.236	1.504	679	24.511	245	1.923	4.476	651	3.479	16.133	47	12.641	5.205	53.259	185	362	75	97	99	1.683	55.542	53.303	1.067.021

Sumber : Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, 2025

Keterangan : - Jumlah STR yang diterbitkan pada tahun 2024

*Terdapat beberapa data apoteker yang provinsinya tidak terdefinisi, karena terdapat data apoteker lama yang belum diinputkan informasi provinsinya. Pada saat pembaruan STR di Satushehat SDMK, tidak tersedia kolom untuk pengisian provinsi, sehingga data tersebut tidak terdefinisi."

Lampiran 12.b

JUMLAH TENAGA KESEHATAN
YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI 2024
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2024

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan		Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteniknisan Medik							Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional			Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Kefarmasian		Total	
				Kesehatan Masyarakat	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja	Entomolog Kesehatan	Tenaga Sanitasi Lingkungan		Fisioterapis	Terapis Okupasional	Terapis Wicara	Akupunktur Terapis	Perakam Medis dan Informasi Kesehatan	Teknisi Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Optometris	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medik	Ortotik Prostetik	Tenaga Kesehatan Pengobatan Tradisional	Tenaga Kesehatan Ramuan Jamu Ramuan Jamu		Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	Tenaga Volensi Farmasi		Apoteker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
1	Aceh	30.289	29.760	1.508	969	423	6	11	1.906	1.829	659	5	3	0	663	1	27	258	7	169	1913	0	654	320	2.003	2	6	0	0	1	55	3.344	1.374	78.165
2	Sumatera Utara	38.167	49.735	1.327	913	130	17	10	1.187	2.294	1.004	21	46	7	1.326	3	24	592	15	289	1439	1	1.315	528	3.879	22	6	1	0	8	79	3.314	4.461	112.160
3	Sumatera Barat	19.796	17.322	746	344	99	17	10	1.245	2.002	796	43	150	7	1.990	3	53	457	22	297	1001	0	624	439	1.895	17	9	1	0	0	67	2.225	2.266	53.943
4	Riau	15.908	17.555	575	255	127	13	6	281	1.186	723	31	41	3	1.148	5	22	194	40	175	390	2	589	163	2.074	11	10	1	0	3	81	1.937	2.308	45.857
5	Jambi	12.498	11.796	356	233	76	17	11	716	659	391	9	8	5	289	2	6	102	12	113	881	0	259	55	1.588	2	5	0	0	0	42	1.340	1.349	32.820
6	Sumatera Selatan	24.710	25.777	603	766	143	3	9	1.485	1.698	672	28	38	12	866	2	72	251	22	286	1077	1	696	122	2.877	7	15	2	1	2	71	2.948	2.041	67.303
7	Bengkulu	8.133	8.073	287	537	22	11	10	604	1.132	101	7	5	14	305	1	6	44	5	129	114	0	235	76	1.452	3	1	0	0	0	25	1.095	959	23.386
8	Lampung	18.685	17.897	168	301	73	11	10	1.480	1.079	389	55	53	28	420	7	35	179	179	231	836	7	779	145	2.126	7	15	0	3	0	38	1.534	1.902	48.672
9	Kep. Bangka Belitung	5.055	2.704	71	126	15	28	2	158	471	127	2	21	2	168	5	27	48	14	67	167	0	159	38	493	8	1	0	0	1	26	591	428	11.023
10	Kepulauan Riau	6.124	4.942	117	88	52	18	26	660	247	112	22	8	7	205	0	25	70	8	61	159	3	190	47	579	1	3	2	0	6	30	524	743	15.079
11	DKI Jakarta	49.972	17.184	520	115	175	84	7	1.873	3.170	1.920	346	412	126	1.932	108	251	1.068	246	225	1719	54	2.069	1335	5.293	76	74	6	4	47	606	3.858	39.733	134.608
12	Jawa Barat	94.837	57.574	1.154	1.406	525	101	24	2.352	4.767	2.476	387	565	113	6.539	30	294	1.305	86	888	2924	11	3.184	811	11.838	82	74	2	7	22	583	11.617	15.872	222.450
13	Jawa Tengah	94.551	46.769	827	1.550	816	107	41	2.834	4.840	3.985	957	890	536	8.648	10	557	928	20	665	2373	5	3.360	1485	9.817	94	473	8	343	5	424	11.367	12.889	212.174
14	DI Yogyakarta	15.502	6.072	117	137	97	15	9	835	1.338	693	61	70	24	1.795	0	205	112	10	190	780	1	625	270	1.807	9	8	0	5	1	303	1.388	3.117	35.596
15	Jawa Timur	99.018	54.345	884	1.172	276	29	23	2.594	6.289	2.375	243	224	326	6.636	0	467	1.100	303	439	1910	2	2.127	1358	10.565	86	115	262	32	42	402	10.118	11.537	215.299
16	Banten	21.638	17.221	493	203	66	14	7	499	1.032	661	123	114	23	848	61	114	405	53	109	438	2	706	295	2.420	20	30	2	2	4	182	2.921	3.091	53.797
17	Bali	16.790	8.371	168	178	49	2	13	680	1.241	598	21	18	25	306	0	42	81	16	321	778	0	656	122	1.830	16	8	1	0	2	96	1.610	1.938	35.977
18	Nusa Tenggara Barat	15.966	10.801	138	545	73	8	14	617	1.578	440	26	23	3	1.057	7	132	86	7	191	700	0	444	229	2.477	16	5	3	1	1	49	1.969	1.291	38.897
19	Nusa Tenggara Timur	20.568	15.810	877	554	221	1	3	1.395	1.932	254	2	5	4	816	3	133	57	13	99	1103	1	309	152	2.364	2	0	0	0	0	15	1.764	1.186	49.643
20	Kalimantan Barat	15.412	10.619	201	353	116	34	7	917	1.405	281	13	29	6	560	0	32	104	1	90	1131	1	297	93	1.754	2	1	1	0	2	36	1.102	1.299	35.899
21	Kalimantan Tengah	10.443	7.179	174	200	51	3	2	227	894	156	24	12	5	277	0	32	32	13	73	313	1	211	71	1.227	3	2	0	1	0	37	996	994	23.653
22	Kalimantan Selatan	13.152	9.125	292	532	124	25	7	1.020	1.451	313	19	16	6	681	1	21	113	12	100	1034	2	356	196	2.076	5	6	0	1	0	66	2.012	1.764	34.528
23	Kalimantan Timur	14.482	8.551	163	368	181	12	6	404	757	411	49	50	8	392	6	33	89	10	119	285	2	316	117	2.126	8	10	0	1	1	75	1.582	2.074	32.688
24	Kalimantan Utara	3.259	1.942	77	58	60	4	1	112	130	53	2	3	0	71	1	11	6	1	23	90	0	70	38	264	1	0	0	0	0	15	390	365	7.047
25	Sulawesi Utara	14.286	5.071	330	213	289	6	4	725	966	231	12	5	3	85	0	68	37	7	90	557	0	172	43	829	6	6	0	0	0	12	1.027	661	25.741
26	Sulawesi Tengah	12.339	9.875	1.073	301	567	1	4	769	867	140	5	6	0	129	22	97	23	10	88	320	0	225	59	972	7	2	0	0	0	28	1.354	1.154	30.437
27	Sulawesi Selatan	42.015	35.755	687	531	828	70	27	2.071	2.121	1.336	28	22	3	1.647	91	62	96	102	183	2165	2	1.122	455	4.599	39	9	1	0	0	55	5.180	4.666	105.968
28	Sulawesi Tenggara	13.028	11.716	796	691	982	22	7	781	1.490	180	3	0	2	426	16	38	30	22	104	828	1	211	224	1.905	3	0	0	0	0	15	1.433	1.664	36.618
29	Gorontalo	5.058	3.191	427	118	265	17	3	225	905	46	1	2	0	157	4	25	6	1	43	85	0	119	25	561	2	1	0	0	0	10	614	371	12.282
30	Sulawesi Barat	5.023	5.321	115	123	90	1	1	353	444	63	0	2	0	61	4	1	5	10	9	119	0	80	18	280	2	0	0	0	0	6	514	359	13.004
31	Maluku	9.431	4.902	499	104	125	2	2	780	896	78	0	4	0	75	11	30	19	10	49	126	0	129	34	1.067	1	0	0	0	0	10	283	398	19.065
32	Maluku Utara	5.151	5.158	290	176	210	0	1	394	662	77	8	0	0	73	23	15	6	13	43	135	0	122	44	932	2	0	0	0	0	7	427	336	14.305
33	Papua	9.996	5.701	590	50	87	1	3	559	584	112	4	1	0	123	5	10	19	10	58	93	0	116	53	1.725	1	0	0	0	0	8	925	1.008	21.842
38	Papua Barat Daya																																	0
39	(blank)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.327	47.327
Indonesia		786.088	546.648	16.873	14.227	7.498	702	328	32.835	52.801	21.899	2.558	2.846	1.299	40.778	434	2.982	7.939	1.305	6.040	28.034	100	22.585	9.488	88.167	563	896	293	401	149	3.560	83.541	173.463	1.957.320

Sumber : Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, 2025

Keterangan: Tenaga Kesehatan yang masih registrasi aktif

Terdapat beberapa data apoteker yang provinsinya tidak terdefinisi, karena terdapat data apoteker lama yang belum diinputkan informasi provinsinya. Pada saat pembaruan STR di Satuschat SDMk, tidak tersedia kolom untuk pengisian provinsi, sehingga data tersebut tidak terdefinisi.

Lampiran 13.a

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	1.025	3.373	4.398	310	1.192	1.502	103	1.278	1.381
2	SUMATERA UTARA	616	3.082	3.698	239	667	906	102	1.350	1.452
3	SUMATERA BARAT	300	1.444	1.744	155	505	660	42	976	1.018
4	RIAU	393	1.360	1.753	147	335	482	43	736	779
5	JAMBI	330	963	1.293	155	350	505	52	476	528
6	SUMATERA SELATAN	545	2.217	2.762	208	816	1.024	72	1.020	1.092
7	BENGKULU	371	1.032	1.403	110	235	345	57	540	597
8	LAMPUNG	286	787	1.073	196	561	757	76	663	739
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	132	347	479	42	122	164	30	225	255
10	KEPULAUAN RIAU	138	356	494	110	224	334	28	216	244
11	DKI JAKARTA	188	575	763	222	435	657	118	1.147	1.265
12	JAWA BARAT	1.060	2.544	3.604	537	1.248	1.785	208	2.564	2.772
13	JAWA TENGAH	774	2.995	3.769	617	1.424	2.041	241	2.810	3.051
14	YOGYAKARTA	94	375	469	139	250	389	54	520	574
15	JAWA TIMUR	670	2.991	3.661	453	1.367	1.820	331	3.201	3.532
16	BANTEN	250	737	987	164	371	535	61	679	740
17	BALI	234	773	1.007	199	297	496	68	619	687
18	NUSA TENGGARA BARAT	372	840	1.212	203	421	624	146	1.020	1.166
19	NUSA TENGGARA TIMUR	897	1.639	2.536	533	727	1.260	352	1.298	1.650
20	KALIMANTAN BARAT	335	650	985	285	365	650	145	732	877
21	KALIMANTAN TENGAH	196	469	665	119	181	300	75	513	588
22	KALIMANTAN SELATAN	355	743	1.098	215	442	657	152	910	1.062
23	KALIMANTAN TIMUR	280	739	1.019	125	252	377	87	417	504
24	KALIMANTAN UTARA	112	237	349	53	81	134	27	115	142
25	SULAWESI UTARA	288	1.068	1.356	202	352	554	127	580	707
26	SULAWESI TENGAH	742	2.247	2.989	254	529	783	87	636	723
27	SULAWESI SELATAN	924	3.896	4.820	367	1.223	1.590	136	1.631	1.767
28	SULAWESI TENGGARA	783	3.007	3.790	239	596	835	140	1.069	1.209
29	GORONTALO	194	833	1.027	63	203	266	92	515	607
30	SULAWESI BARAT	188	700	888	95	194	289	23	336	359
31	MALUKU	394	1.107	1.501	279	430	709	101	696	797
32	MALUKU UTARA	337	1.223	1.560	105	217	322	41	499	540
33	PAPUA	192	454	646	111	132	243	58	298	356
34	PAPUA BARAT	114	278	392	50	59	109	31	179	210
35	PAPUA SELATAN	78	172	250	43	49	92	26	102	128
36	PAPUA TENGAH	132	276	408	65	79	144	21	113	134
37	PAPUA PEGUNUNGAN	122	191	313	43	36	79	13	72	85
38	PAPUA BARAT DAYA	92	332	424	53	87	140	23	213	236
Indonesia		14.533	47.052	61.585	7.505	17.054	24.559	3.589	30.964	34.553

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 13.b

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	538	2.223	2.761	171	837	1.008	63	807	870
2	SUMATERA UTARA	345	1.868	2.213	135	483	618	61	759	820
3	SUMATERA BARAT	141	739	880	93	320	413	22	575	597
4	RIAU	185	677	862	87	232	319	26	396	422
5	JAMBI	139	454	593	75	237	312	31	279	310
6	SUMATERA SELATAN	295	1.225	1.520	123	542	665	44	593	637
7	BENGKULU	209	560	769	74	167	241	24	330	354
8	LAMPUNG	185	494	679	115	374	489	55	424	479
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55	148	203	24	73	97	16	123	139
10	KEPULAUAN RIAU	55	158	213	42	132	174	14	116	130
11	DKI JAKARTA	19	112	131	48	64	112	11	135	146
12	JAWA BARAT	543	1.441	1.984	306	797	1.103	98	1.101	1.199
13	JAWA TENGAH	356	1.724	2.080	309	872	1.181	143	1.312	1.455
14	YOGYAKARTA	43	199	242	41	121	162	25	220	245
15	JAWA TIMUR	249	1.344	1.593	210	783	993	182	1.362	1.544
16	BANTEN	107	358	465	61	210	271	25	310	335
17	BALI	63	193	256	84	138	222	25	199	224
18	NUSA TENGGARA BARAT	228	545	773	132	310	442	107	674	781
19	NUSA TENGGARA TIMUR	636	1.103	1.739	387	588	975	264	988	1.252
20	KALIMANTAN BARAT	193	382	575	153	257	410	95	474	569
21	KALIMANTAN TENGAH	113	295	408	78	133	211	46	323	369
22	KALIMANTAN SELATAN	216	459	675	129	313	442	111	589	700
23	KALIMANTAN TIMUR	142	401	543	63	161	224	51	216	267
24	KALIMANTAN UTARA	52	119	171	29	50	79	15	62	77
25	SULAWESI UTARA	113	545	658	118	222	340	64	321	385
26	SULAWESI TENGAH	370	1.174	1.544	128	331	459	67	423	490
27	SULAWESI SELATAN	430	2.093	2.523	192	780	972	77	909	986
28	SULAWESI TENGGARA	502	1.925	2.427	166	468	634	104	806	910
29	GORONTALO	88	445	533	32	134	166	60	292	352
30	SULAWESI BARAT	95	467	562	65	147	212	21	230	251
31	MALUKU	208	674	882	177	292	469	71	474	545
32	MALUKU UTARA	180	742	922	64	169	233	33	334	367
33	PAPUA	91	249	340	74	87	161	39	164	203
34	PAPUA BARAT	59	152	211	37	44	81	18	117	135
35	PAPUA SELATAN	49	84	133	27	36	63	17	70	87
36	PAPUA TENGAH	70	189	259	49	63	112	10	76	86
37	PAPUA PEGUNUNGAN	73	124	197	28	27	55	9	46	55
38	PAPUA BARAT DAYA	62	223	285	35	64	99	15	172	187
Indonesia		7.497	26.307	33.804	4.161	11.058	15.219	2.159	16.801	18.977

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 13.c

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	86	253	339	224	611	835	28	432	460
2	SUMATERA UTARA	59	118	177	106	551	657	30	527	557
3	SUMATERA BARAT	44	127	171	64	288	352	18	360	378
4	RIAU	28	51	79	73	293	366	11	297	308
5	JAMBI	44	70	114	45	166	211	17	169	186
6	SUMATERA SELATAN	39	175	214	82	310	392	23	346	369
7	BENGKULU	21	41	62	56	230	286	25	181	206
8	LAMPUNG	41	113	154	27	110	137	13	198	211
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8	29	37	32	73	105	11	91	102
10	KEPULAUAN RIAU	18	47	65	16	58	74	13	96	109
11	DKI JAKARTA	80	176	256	92	243	335	87	747	834
12	JAWA BARAT	164	362	526	220	393	613	94	1.242	1.336
13	JAWA TENGAH	180	401	581	93	302	395	84	1.261	1.345
14	YOGYAKARTA	68	91	159	13	63	76	23	263	286
15	JAWA TIMUR	155	462	617	148	669	817	123	1.578	1.701
16	BANTEN	47	103	150	59	127	186	30	335	365
17	BALI	54	106	160	46	169	215	38	384	422
18	NUSA TENGGARA BARAT	33	68	101	49	121	170	30	308	338
19	NUSA TENGGARA TIMUR	75	89	164	82	220	302	62	258	320
20	KALIMANTAN BARAT	66	56	122	39	106	145	39	216	255
21	KALIMANTAN TENGAH	24	34	58	25	64	89	26	170	196
22	KALIMANTAN SELATAN	46	94	140	42	111	153	37	300	337
23	KALIMANTAN TIMUR	40	58	98	48	111	159	30	187	217
24	KALIMANTAN UTARA	13	17	30	24	49	73	11	50	61
25	SULAWESI UTARA	63	90	153	85	295	380	59	238	297
26	SULAWESI TENGAH	65	118	183	148	487	635	14	179	193
27	SULAWESI SELATAN	95	267	362	216	939	1.155	50	639	689
28	SULAWESI TENGGARA	31	72	103	82	459	541	21	223	244
29	GORONTALO	10	35	45	33	179	212	18	167	185
30	SULAWESI BARAT	16	27	43	24	85	109	2	90	92
31	MALUKU	48	76	124	64	201	265	24	167	191
32	MALUKU UTARA	19	28	47	54	245	299	4	135	139
33	PAPUA	19	25	44	28	89	117	16	125	141
34	PAPUA BARAT	6	11	17	27	83	110	11	56	67
35	PAPUA SELATAN	5	7	12	8	24	32	8	27	35
36	PAPUA TENGAH	10	7	17	21	46	67	10	30	40
37	PAPUA PEGUNUNGAN	13	5	18	13	43	56	4	21	25
38	PAPUA BARAT DAYA	7	13	20	12	54	66	7	40	47
Indonesia		1.840	3.922	5.762	2.520	8.667	11.187	1.151	12.133	13.284

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 14.a

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	ACEH	174	1.383	1.557	367	385	752	108	418	526	392	1.520	1.912
2	SUMATERA UTARA	320	1.889	2.209	456	599	1.055	196	312	508	385	1.400	1.785
3	SUMATERA BARAT	215	1.136	1.351	301	292	593	103	245	348	388	1.666	2.054
4	RIAU	201	1.188	1.389	223	289	512	124	315	439	306	826	1.132
5	JAMBI	166	841	1.007	108	122	230	43	172	215	129	649	778
6	SUMATERA SELATAN	271	1.437	1.708	286	332	618	90	316	406	351	1.288	1.639
7	BENGKULU	153	559	712	92	85	177	17	53	70	107	256	363
8	LAMPUNG	242	1.128	1.370	246	232	478	76	174	250	317	727	1.044
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	95	322	417	92	76	168	15	93	108	98	298	396
10	KEPULAUAN RIAU	107	422	529	130	127	257	35	101	136	126	321	447
11	DKI JAKARTA	1.214	3.682	4.896	1.351	1.221	2.572	669	1.154	1.823	1.294	2.844	4.138
12	JAWA BARAT	1.637	5.992	7.629	1.775	1.344	3.119	650	1.485	2.135	2.400	5.341	7.741
13	JAWA TENGAH	1.136	5.477	6.613	1.529	1.454	2.983	773	1.794	2.567	1.886	5.938	7.824
14	YOGYAKARTA	256	1.118	1.374	361	309	670	171	395	566	359	1.472	1.831
15	JAWA TIMUR	1.331	5.976	7.307	1.412	1.349	2.761	574	1.081	1.655	1.973	4.814	6.787
16	BANTEN	367	1.472	1.839	427	420	847	205	467	672	393	1.005	1.398
17	BALI	310	1.005	1.315	395	249	644	152	168	320	288	744	1.032
18	NUSA TENGGARA BARAT	328	1.305	1.633	296	207	503	80	213	293	549	1.008	1.557
19	NUSA TENGGARA TIMUR	387	1.293	1.680	209	161	370	50	152	202	393	1.252	1.645
20	KALIMANTAN BARAT	304	915	1.219	190	133	323	58	128	186	420	828	1.248
21	KALIMANTAN TENGAH	215	679	894	150	87	237	32	98	130	180	400	580
22	KALIMANTAN SELATAN	315	1.202	1.517	261	178	439	85	129	214	369	956	1.325
23	KALIMANTAN TIMUR	343	1.075	1.418	234	188	422	98	236	334	246	545	791
24	KALIMANTAN UTARA	76	183	259	66	39	105	14	30	44	74	113	187
25	SULAWESI UTARA	166	440	606	133	77	210	75	139	214	144	432	576
26	SULAWESI TENGAH	166	621	787	91	121	212	32	94	126	175	317	492
27	SULAWESI SELATAN	467	2.188	2.655	424	616	1.040	157	441	598	489	1.884	2.373
28	SULAWESI TENGGARA	192	1.009	1.201	102	159	261	23	122	145	187	740	927
29	GORONTALO	83	268	351	49	63	112	15	25	40	57	158	215
30	SULAWESI BARAT	57	197	254	30	57	87	8	46	54	40	131	171
31	MALUKU	108	535	643	47	77	124	14	60	74	56	154	210
32	MALUKU UTARA	145	491	636	61	96	157	20	47	67	66	179	245
33	PAPUA	150	462	612	43	27	70	12	38	50	41	97	138
34	PAPUA BARAT	76	206	282	29	36	65	5	16	21	30	80	110
35	PAPUA SELATAN	59	123	182	8	13	21	9	8	17	28	31	59
36	PAPUA TENGAH	79	176	255	27	15	42	5	12	17	23	45	68
37	PAPUA PEGUNUNGAN	40	68	108	6	3	9	3	3	6	7	13	20
38	PAPUA BARAT DAYA	50	137	187	13	18	31	4	8	12	16	61	77
Indonesia		12.001	48.600	60.601	12.020	11.256	23.276	4.800	10.788	15.588	14.782	40.533	55.315

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 14.b

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapihan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	ACEH	59	608	667	10	16	26	28	131	159	150	833	983
2	SUMATERA UTARA	89	619	708	4	7	11	11	11	22	101	600	701
3	SUMATERA BARAT	64	404	468	9	1	10	3	39	42	100	686	786
4	RIAU	51	382	433	1	11	12	7	50	57	64	315	379
5	JAMBI	49	292	341	0	0	0	3	15	18	59	328	387
6	SUMATERA SELATAN	90	502	592	2	6	8	2	22	24	76	575	651
7	BENGKULU	59	248	307	1	2	3	1	2	3	17	109	126
8	LAMPUNG	87	368	455	2	4	6	1	3	4	103	374	477
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21	105	126	2	0	2	1	1	2	35	123	158
10	KEPULAUAN RIAU	21	99	120	0	0	0	1	3	4	20	106	126
11	DKI JAKARTA	125	205	330	1	0	1	0	1	1	67	148	215
12	JAWA BARAT	300	1.195	1.495	5	14	19	12	20	32	436	1.420	1.856
13	JAWA TENGAH	245	1.283	1.528	19	18	37	76	196	272	415	1.750	2.165
14	YOGYAKARTA	34	219	253	0	3	3	23	38	61	62	334	396
15	JAWA TIMUR	265	1.380	1.645	7	14	21	35	54	89	409	1.349	1.758
16	BANTEN	57	235	292	3	2	5	0	3	3	59	247	306
17	BALI	44	156	200	5	1	6	2	0	2	51	223	274
18	NUSA TENGGARA BARAT	136	565	701	25	9	34	5	19	24	243	473	716
19	NUSA TENGGARA TIMUR	229	693	922	22	8	30	10	37	47	229	750	979
20	KALIMANTAN BARAT	94	373	467	5	1	6	0	3	3	198	437	635
21	KALIMANTAN TENGAH	78	261	339	1	0	1	1	0	1	80	198	278
22	KALIMANTAN SELATAN	97	427	524	1	0	1	5	9	14	142	500	642
23	KALIMANTAN TIMUR	73	294	367	0	0	0	4	14	18	62	183	245
24	KALIMANTAN UTARA	28	60	88	3	0	3	0	0	0	27	38	65
25	SULAWESI UTARA	43	116	159	4	2	6	5	21	26	31	220	251
26	SULAWESI TENGAH	66	270	336	3	0	3	5	4	9	58	151	209
27	SULAWESI SELATAN	120	833	953	5	7	12	6	26	32	162	829	991
28	SULAWESI TENGGARA	94	578	672	6	10	16	4	16	20	92	459	551
29	GORONTALO	29	113	142	0	0	0	0	0	0	12	60	72
30	SULAWESI BARAT	25	96	121	0	0	0	0	7	7	18	55	73
31	MALUKU	58	283	341	1	1	2	1	2	3	15	62	77
32	MALUKU UTARA	61	235	296	2	5	7	3	4	7	21	78	99
33	PAPUA	60	208	268	0	0	0	0	0	0	7	33	40
34	PAPUA BARAT	38	104	142	1	0	1	1	1	2	9	26	35
35	PAPUA SELATAN	36	62	98	0	0	0	1	2	3	2	9	11
36	PAPUA TENGAH	35	99	134	0	0	0	1	3	4	2	23	25
37	PAPUA PEGUNUNGAN	25	41	66	0	0	0	0	0	0	1	5	6
38	PAPUA BARAT DAYA	32	85	117	0	0	0	0	0	0	5	12	17
Indonesia		3.117	14.096	17.213	150	142	292	258	757	1.015	3.640	14.121	17.761

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 14.c

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapihan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	100	679	779	341	353	694	74	278	352	220	634	854
2	Sumatera Utara	144	974	1.118	398	544	942	174	290	464	261	732	993
3	Sumatera Barat	126	618	744	288	289	577	91	188	279	245	867	1.112
4	Riau	121	677	798	215	262	477	111	250	361	199	439	638
5	Jambi	92	402	494	101	121	222	34	153	187	56	283	339
6	Sumatera Selatan	137	755	892	269	314	583	86	290	376	248	603	851
7	Bengkulu	78	233	311	90	82	172	16	50	66	84	138	222
8	Lampung	130	589	719	235	219	454	63	151	214	173	293	466
9	Kep. Bangka Belitung	52	161	213	88	72	160	14	70	84	55	158	213
10	Kepulauan Riau	57	239	296	124	110	234	30	93	123	88	189	277
11	DKI Jakarta	767	2.261	3.028	1.187	990	2.177	488	806	1.294	960	1.922	2.882
12	Jawa Barat	1.062	3.598	4.660	1.672	1.227	2.899	572	1.321	1.893	1.634	3.207	4.841
13	Jawa Tengah	680	3.034	3.714	1.419	1.317	2.736	591	1.265	1.856	1.251	3.424	4.675
14	DI Yogyakarta	148	609	757	344	279	623	135	279	414	257	937	1.194
15	Jawa Timur	814	3.186	4.000	1.288	1.224	2.512	491	869	1.360	1.205	2.812	4.017
16	Banten	240	985	1.225	403	398	801	184	421	605	264	620	884
17	Bali	202	633	835	366	222	588	118	122	240	184	398	582
18	Nusa Tenggara Barat	147	578	725	247	178	425	69	182	251	289	487	776
19	Nusa Tenggara Timur	131	452	583	178	148	326	41	102	143	153	449	602
20	Kalimantan Barat	157	398	555	177	123	300	42	87	129	175	306	481
21	Kalimantan Tengah	109	322	431	143	85	228	29	85	114	81	183	264
22	Kalimantan Selatan	172	574	746	233	163	396	70	107	177	214	391	605
23	Kalimantan Timur	188	527	715	206	158	364	84	179	263	151	295	446
24	Kalimantan Utara	41	106	147	57	39	96	12	29	41	43	71	114
25	Sulawesi Utara	99	259	358	126	64	190	65	110	175	101	186	287
26	Sulawesi Tengah	75	290	365	79	109	188	24	80	104	96	145	241
27	Sulawesi Selatan	272	1.079	1.351	362	575	937	129	381	510	286	912	1.198
28	Sulawesi Tenggara	75	313	388	88	139	227	11	94	105	90	247	337
29	Gorontalo	42	133	175	46	63	109	11	20	31	40	92	132
30	Sulawesi Barat	25	78	103	29	57	86	8	34	42	21	73	94
31	Maluku	40	189	229	41	71	112	13	57	70	38	86	124
32	Maluku Utara	53	193	246	51	84	135	17	41	58	38	90	128
33	Papua	64	174	238	43	24	67	12	38	50	31	65	96
34	Papua Barat	35	93	128	24	33	57	4	15	19	21	49	70
35	Papua Selatan	18	49	67	8	13	21	8	6	14	25	21	46
36	Papua Tengah	37	54	91	24	14	38	3	9	12	17	21	38
37	Papua Pegunungan	14	25	39	6	3	9	3	3	6	6	8	14
38	Papua Barat Daya	16	41	57	13	17	30	4	7	11	8	49	57
Indonesia		6.760	25.560	32.320	11.009	10.183	21.192	3.931	8.562	12.493	9.308	21.882	31.190

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 15.a

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024**

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	251	2.247	2.498	143	897	1.040	394	3.144	3.538
2	SUMATERA UTARA	288	2.071	2.359	262	1.466	1.728	550	3.537	4.087
3	SUMATERA BARAT	192	1.490	1.682	141	927	1.068	333	2.417	2.750
4	RIAU	163	1.309	1.472	191	1.271	1.462	354	2.580	2.934
5	JAMBI	128	921	1.049	133	772	905	261	1.693	1.954
6	SUMATERA SELATAN	277	1.923	2.200	240	1.011	1.251	517	2.934	3.451
7	BENGKULU	83	566	649	80	457	537	163	1.023	1.186
8	LAMPUNG	181	791	972	281	968	1.249	462	1.759	2.221
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	88	425	513	73	302	375	161	727	888
10	KEPULAUAN RIAU	143	579	722	164	526	690	307	1.105	1.412
11	DKI JAKARTA	1.026	4.564	5.590	872	3.165	4.037	1.898	7.729	9.627
12	JAWA BARAT	1.729	7.658	9.387	2.160	7.221	9.381	3.889	14.879	18.768
13	JAWA TENGAH	1.194	8.385	9.579	1.565	8.027	9.592	2.759	16.412	19.171
14	YOGYAKARTA	180	1.425	1.605	259	1.728	1.987	439	3.153	3.592
15	JAWA TIMUR	1.201	7.698	8.899	1.466	7.134	8.600	2.667	14.832	17.499
16	BANTEN	399	1.840	2.239	405	1.852	2.257	804	3.692	4.496
17	BALI	196	1.024	1.220	369	865	1.234	565	1.889	2.454
18	NUSA TENGGARA BARAT	390	999	1.389	253	721	974	643	1.720	2.363
19	NUSA TENGGARA TIMUR	312	1.282	1.594	167	752	919	479	2.034	2.513
20	KALIMANTAN BARAT	222	740	962	216	675	891	438	1.415	1.853
21	KALIMANTAN TENGAH	176	627	803	162	639	801	338	1.266	1.604
22	KALIMANTAN SELATAN	308	1.290	1.598	292	894	1.186	600	2.184	2.784
23	KALIMANTAN TIMUR	303	1.142	1.445	339	1.209	1.548	642	2.351	2.993
24	KALIMANTAN UTARA	75	291	366	69	214	283	144	505	649
25	SULAWESI UTARA	177	650	827	143	456	599	320	1.106	1.426
26	SULAWESI TENGAH	204	896	1.100	129	591	720	333	1.487	1.820
27	SULAWESI SELATAN	339	2.503	2.842	375	2.132	2.507	714	4.635	5.349
28	SULAWESI TENGGARA	167	1.181	1.348	207	977	1.184	374	2.158	2.532
29	GORONTALO	55	338	393	47	201	248	102	539	641
30	SULAWESI BARAT	40	314	354	47	232	279	87	546	633
31	MALUKU	63	353	416	61	304	365	124	657	781
32	MALUKU UTARA	57	333	390	56	258	314	113	591	704
33	PAPUA	110	377	487	73	297	370	183	674	857
34	PAPUA BARAT	39	141	180	38	201	239	77	342	419
35	PAPUA SELATAN	23	92	115	29	84	113	52	176	228
36	PAPUA TENGAH	33	118	151	38	168	206	71	286	357
37	PAPUA PEGUNUNGAN	34	79	113	20	73	93	54	152	206
38	PAPUA BARAT DAYA	21	100	121	55	163	218	76	263	339
Indonesia		10.867	58.762	69.629	11.620	49.830	61.450	22.487	108.592	131.079

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.b

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	76	851	927	47	309	356	123	1.160	1.283
2	SUMATERA UTARA	112	606	718	41	434	475	153	1.040	1.193
3	SUMATERA BARAT	39	364	403	28	226	254	67	590	657
4	RIAU	45	399	444	44	265	309	89	664	753
5	JAMBI	29	265	294	28	209	237	57	474	531
6	SUMATERA SELATAN	71	564	635	73	288	361	144	852	996
7	BENGKULU	26	195	221	22	169	191	48	364	412
8	LAMPUNG	50	210	260	63	263	326	113	473	586
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12	85	97	23	66	89	35	151	186
10	KEPULAUAN RIAU	20	70	90	20	96	116	40	166	206
11	DKI JAKARTA	108	266	374	44	101	145	152	367	519
12	JAWA BARAT	191	845	1.036	283	902	1.185	474	1.747	2.221
13	JAWA TENGAH	163	1.022	1.185	140	791	931	303	1.813	2.116
14	YOGYAKARTA	23	154	177	16	132	148	39	286	325
15	JAWA TIMUR	150	971	1.121	157	746	903	307	1.717	2.024
16	BANTEN	36	174	210	64	268	332	100	442	542
17	BALI	29	138	167	43	101	144	72	239	311
18	NUSA TENGGARA BARAT	135	387	522	59	220	279	194	607	801
19	NUSA TENGGARA TIMUR	159	600	759	64	255	319	223	855	1.078
20	KALIMANTAN BARAT	67	236	303	58	180	238	125	416	541
21	KALIMANTAN TENGAH	67	221	288	49	169	218	116	390	506
22	KALIMANTAN SELATAN	61	300	361	82	233	315	143	533	676
23	KALIMANTAN TIMUR	51	243	294	56	173	229	107	416	523
24	KALIMANTAN UTARA	17	73	90	18	43	61	35	116	151
25	SULAWESI UTARA	35	202	237	30	104	134	65	306	371
26	SULAWESI TENGAH	65	394	459	34	181	215	99	575	674
27	SULAWESI SELATAN	79	809	888	87	605	692	166	1.414	1.580
28	SULAWESI TENGGARA	83	672	755	81	405	486	164	1.077	1.241
29	GORONTALO	13	124	137	9	68	77	22	192	214
30	SULAWESI BARAT	21	181	202	27	87	114	48	268	316
31	MALUKU	35	184	219	36	118	154	71	302	373
32	MALUKU UTARA	27	178	205	20	105	125	47	283	330
33	PAPUA	37	123	160	14	57	71	51	180	231
34	PAPUA BARAT	14	55	69	13	64	77	27	119	146
35	PAPUA SELATAN	16	49	65	11	26	37	27	75	102
36	PAPUA TENGAH	13	48	61	15	56	71	28	104	132
37	PAPUA PEGUNUNGAN	25	41	66	6	29	35	31	70	101
38	PAPUA BARAT DAYA	13	49	62	17	66	83	30	115	145
Indonesia		2.213	12.348	14.561	1.922	8.610	10.532	4.135	20.958	25.093

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.c

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	131	1.069	1.200	62	411	473	193	1.480	1.673
2	SUMATERA UTARA	139	1.188	1.327	115	609	724	254	1.797	2.051
3	SUMATERA BARAT	116	846	962	65	386	451	181	1.232	1.413
4	RIAU	96	695	791	63	474	537	159	1.169	1.328
5	JAMBI	47	402	449	39	248	287	86	650	736
6	SUMATERA SELATAN	149	953	1.102	93	388	481	242	1.341	1.583
7	BENGKULU	35	232	267	34	154	188	69	386	455
8	LAMPUNG	95	387	482	85	266	351	180	653	833
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	48	197	245	22	89	111	70	286	356
10	KEPULAUAN RIAU	59	246	305	55	168	223	114	414	528
11	DKI JAKARTA	732	3.112	3.844	335	1.229	1.564	1.067	4.341	5.408
12	JAWA BARAT	1.071	4.476	5.547	561	2.214	2.775	1.632	6.690	8.322
13	JAWA TENGAH	717	4.479	5.196	353	2.021	2.374	1.070	6.500	7.570
14	YOGYAKARTA	113	880	993	65	466	531	178	1.346	1.524
15	JAWA TIMUR	692	4.328	5.020	392	1.993	2.385	1.084	6.321	7.405
16	BANTEN	266	1.165	1.431	136	744	880	402	1.909	2.311
17	BALI	104	640	744	123	302	425	227	942	1.169
18	NUSA TENGGARA BARAT	181	416	597	98	258	356	279	674	953
19	NUSA TENGGARA TIMUR	82	401	483	52	254	306	134	655	789
20	KALIMANTAN BARAT	113	340	453	77	237	314	190	577	767
21	KALIMANTAN TENGAH	71	227	298	37	198	235	108	425	533
22	KALIMANTAN SELATAN	170	552	722	98	279	377	268	831	1.099
23	KALIMANTAN TIMUR	186	587	773	88	343	431	274	930	1.204
24	KALIMANTAN UTARA	40	170	210	26	91	117	66	261	327
25	SULAWESI UTARA	109	320	429	72	218	290	181	538	719
26	SULAWESI TENGAH	90	359	449	49	200	249	139	559	698
27	SULAWESI SELATAN	182	1.139	1.321	155	896	1.051	337	2.035	2.372
28	SULAWESI TENGGARA	42	274	316	51	271	322	93	545	638
29	GORONTALO	33	156	189	26	82	108	59	238	297
30	SULAWESI BARAT	12	99	111	12	89	101	24	188	212
31	MALUKU	17	101	118	12	107	119	29	208	237
32	MALUKU UTARA	12	117	129	20	105	125	32	222	254
33	PAPUA	38	128	166	25	111	136	63	239	302
34	PAPUA BARAT	19	68	87	10	66	76	29	134	163
35	PAPUA SELATAN	5	27	32	13	30	43	18	57	75
36	PAPUA TENGAH	10	31	41	10	52	62	20	83	103
37	PAPUA PEGUNUNGAN	10	29	39	10	33	43	20	62	82
38	PAPUA BARAT DAYA	7	33	40	9	45	54	16	78	94
Indonesia		6.039	30.869	36.908	3.548	16.127	19.675	9.587	46.996	56.583

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 16.a

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	ACEH	404	409	813	14	13	27	6.554	6.120	12.674	6.972	6.542	13.514
2	SUMATERA UTARA	516	788	1.304	18	19	37	7.952	10.045	17.997	8.486	10.852	19.338
3	SUMATERA BARAT	264	583	847	4	8	12	4.113	5.150	9.263	4.381	5.741	10.122
4	RIAU	254	337	591	15	10	25	5.797	6.743	12.540	6.066	7.090	13.156
5	JAMBI	252	207	459	3	3	6	3.168	3.579	6.747	3.423	3.789	7.212
6	SUMATERA SELATAN	361	562	923	4	8	12	6.150	6.874	13.024	6.515	7.444	13.959
7	BENGKULU	161	226	387	4	8	12	1.401	2.063	3.464	1.566	2.297	3.863
8	LAMPUNG	481	507	988	11	18	29	5.952	7.213	13.165	6.444	7.738	14.182
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	136	183	319	0	0	0	1.961	2.398	4.359	2.097	2.581	4.678
10	KEPULAUAN RIAU	267	237	504	6	9	15	2.836	3.109	5.945	3.109	3.355	6.464
11	DKI JAKARTA	703	954	1.657	41	59	100	26.949	24.019	50.968	27.693	25.032	52.725
12	JAWA BARAT	1.808	1.928	3.736	48	83	131	43.164	34.879	78.043	45.020	36.890	81.910
13	JAWA TENGAH	1.391	1.466	2.857	44	68	112	40.157	35.231	75.388	41.592	36.765	78.357
14	YOGYAKARTA	283	372	655	9	25	34	6.292	6.824	13.116	6.584	7.221	13.805
15	JAWA TIMUR	1.539	1.645	3.184	63	84	147	43.469	37.687	81.156	45.071	39.416	84.487
16	BANTEN	469	660	1.129	10	14	24	10.735	10.117	20.852	11.214	10.791	22.005
17	BALI	295	306	601	15	16	31	6.890	8.426	15.316	7.200	8.748	15.948
18	NUSA TENGGARA BARAT	344	257	601	11	11	22	5.175	3.933	9.108	5.530	4.201	9.731
19	NUSA TENGGARA TIMUR	249	334	583	1	3	4	4.426	3.919	8.345	4.676	4.256	8.932
20	KALIMANTAN BARAT	357	230	587	7	13	20	3.522	4.035	7.557	3.886	4.278	8.164
21	KALIMANTAN TENGAH	240	186	426	5	9	14	2.719	3.228	5.947	2.964	3.423	6.387
22	KALIMANTAN SELATAN	366	312	678	14	21	35	4.613	4.400	9.013	4.993	4.733	9.726
23	KALIMANTAN TIMUR	351	358	709	9	7	16	5.588	6.270	11.858	5.948	6.635	12.583
24	KALIMANTAN UTARA	96	87	183	0	4	4	1.417	1.327	2.744	1.513	1.418	2.931
25	SULAWESI UTARA	208	336	544	5	5	10	2.890	3.078	5.968	3.103	3.419	6.522
26	SULAWESI TENGAH	212	271	483	1	6	7	2.313	2.748	5.061	2.526	3.025	5.551
27	SULAWESI SELATAN	373	512	885	3	13	16	6.207	7.685	13.892	6.583	8.210	14.793
28	SULAWESI TENGGARA	260	327	587	2	5	7	2.048	2.743	4.791	2.310	3.075	5.385
29	GORONTALO	91	142	233	1	0	1	1.100	1.400	2.500	1.192	1.542	2.734
30	SULAWESI BARAT	82	98	180	0	0	0	943	1.238	2.181	1.025	1.336	2.361
31	MALUKU	136	150	286	4	2	6	1.557	1.707	3.264	1.697	1.859	3.556
32	MALUKU UTARA	113	144	257	3	3	6	747	1.021	1.768	863	1.168	2.031
33	PAPUA	153	139	292	11	6	17	1.140	1.181	2.321	1.304	1.326	2.630
34	PAPUA BARAT	114	79	193	0	0	0	912	871	1.783	1.026	950	1.976
35	PAPUA SELATAN	48	50	98	0	0	0	346	425	771	394	475	869
36	PAPUA TENGAH	147	101	248	5	2	7	723	776	1.499	875	879	1.754
37	PAPUA PEGUNUNGAN	138	95	233	0	0	0	427	322	749	565	417	982
38	PAPUA BARAT DAYA	74	70	144	0	0	0	629	631	1.260	703	701	1.404
Indonesia		13.736	15.648	29.384	391	555	946	272.982	263.415	536.397	287.109	279.618	566.727

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.b

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	ACEH	71	78	149	1	0	1	1.252	1.485	2.737	1.324	1.563	2.887
2	SUMATERA UTARA	55	109	164	1	0	1	854	1.021	1.875	910	1.130	2.040
3	SUMATERA BARAT	23	87	110	0	0	0	910	1.162	2.072	933	1.249	2.182
4	RIAU	41	40	81	0	0	0	1.013	1.034	2.047	1.054	1.074	2.128
5	JAMBI	42	34	76	0	0	0	415	475	890	457	509	966
6	SUMATERA SELATAN	73	115	188	0	0	0	980	1.262	2.242	1.053	1.377	2.430
7	BENGKULU	45	79	124	0	1	1	289	590	879	334	670	1.004
8	LAMPUNG	96	104	200	0	0	0	984	1.246	2.230	1.080	1.350	2.430
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21	31	52	0	0	0	356	387	743	377	418	795
10	KEPULAUAN RIAU	48	57	105	0	0	0	494	484	978	542	541	1.083
11	DKI JAKARTA	16	44	60	0	0	0	1.917	827	2.744	1.933	871	2.804
12	JAWA BARAT	345	354	699	0	1	1	5.116	3.971	9.087	5.461	4.326	9.787
13	JAWA TENGAH	116	169	285	0	0	0	4.844	3.579	8.423	4.960	3.748	8.708
14	YOGYAKARTA	37	76	113	0	0	0	786	617	1.403	823	693	1.516
15	JAWA TIMUR	40	59	99	0	0	0	5.929	4.414	10.343	5.969	4.473	10.442
16	BANTEN	79	151	230	0	0	0	1.855	1.019	2.874	1.934	1.170	3.104
17	BALI	27	29	56	0	0	0	1.362	1.417	2.779	1.389	1.446	2.835
18	NUSA TENGGARA BARAT	112	77	189	0	0	0	1.241	947	2.188	1.353	1.024	2.377
19	NUSA TENGGARA TIMUR	42	37	79	0	0	0	1.344	951	2.295	1.386	988	2.374
20	KALIMANTAN BARAT	78	43	121	1	2	3	739	917	1.656	818	962	1.780
21	KALIMANTAN TENGAH	49	16	65	0	0	0	538	643	1.181	587	659	1.246
22	KALIMANTAN SELATAN	75	65	140	0	0	0	737	800	1.537	812	865	1.677
23	KALIMANTAN TIMUR	83	80	163	0	0	0	883	1.074	1.957	966	1.154	2.120
24	KALIMANTAN UTARA	24	19	43	0	0	0	269	242	511	293	261	554
25	SULAWESI UTARA	19	20	39	1	0	1	324	426	750	344	446	790
26	SULAWESI TENGAH	43	35	78	0	0	0	500	575	1.075	543	610	1.153
27	SULAWESI SELATAN	21	39	60	0	1	1	1.165	1.566	2.731	1.186	1.606	2.792
28	SULAWESI TENGGARA	69	88	157	0	0	0	569	837	1.406	638	925	1.563
29	GORONTALO	10	25	35	0	0	0	224	417	641	234	442	676
30	SULAWESI BARAT	26	29	55	0	0	0	368	608	976	394	637	1.031
31	MALUKU	22	25	47	0	1	1	361	358	719	383	384	767
32	MALUKU UTARA	33	33	66	0	0	0	168	249	417	201	282	483
33	PAPUA	15	21	36	0	0	0	179	162	341	194	183	377
34	PAPUA BARAT	13	7	20	0	0	0	196	193	389	209	200	409
35	PAPUA SELATAN	7	6	13	0	0	0	70	74	144	77	80	157
36	PAPUA TENGAH	56	35	91	0	1	1	139	137	276	195	173	368
37	PAPUA PEGUNUNGAN	67	25	92	0	0	0	152	82	234	219	107	326
38	PAPUA BARAT DAYA	11	13	24	0	0	0	142	134	276	153	147	300
Indonesia		2.050	2.354	4.404	4	7	11	39.664	36.382	76.046	41.718	38.743	80.461

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

**JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2024**

No	Provinsi	Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	ACEH	201	203	404	6	2	8	4.243	3.425	7.668	4.450	3.630	8.080
2	SUMATERA UTARA	275	404	679	8	6	14	5.361	6.715	12.076	5.644	7.125	12.769
3	SUMATERA BARAT	157	344	501	1	1	2	2.498	2.955	5.453	2.656	3.300	5.956
4	RIAU	135	172	307	7	1	8	3.609	4.025	7.634	3.751	4.198	7.949
5	JAMBI	100	102	202	0	1	1	1.640	1.980	3.620	1.740	2.083	3.823
6	SUMATERA SELATAN	168	271	439	1	1	2	4.222	4.251	8.473	4.391	4.523	8.914
7	BENGKULU	48	92	140	0	1	1	739	876	1.615	787	969	1.756
8	LAMPUNG	129	231	360	2	2	4	3.450	3.642	7.092	3.581	3.875	7.456
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68	93	161	0	0	0	1.115	1.064	2.179	1.183	1.157	2.340
10	KEPULAUAN RIAU	86	95	181	2	1	3	1.494	1.506	3.000	1.582	1.602	3.184
11	DKI JAKARTA	588	778	1.366	24	41	65	18.121	14.707	32.828	18.733	15.526	34.259
12	JAWA BARAT	786	910	1.696	15	22	37	27.092	20.134	47.226	27.893	21.066	48.959
13	JAWA TENGAH	852	768	1.620	11	8	19	22.849	17.686	40.535	23.712	18.462	42.174
14	YOGYAKARTA	142	168	310	1	4	5	3.582	3.313	6.895	3.725	3.485	7.210
15	JAWA TIMUR	819	921	1.740	7	19	26	22.754	17.867	40.621	23.580	18.807	42.387
16	BANTEN	196	266	462	2	1	3	6.562	6.148	12.710	6.760	6.415	13.175
17	BALI	197	198	395	3	4	7	4.074	5.128	9.202	4.274	5.330	9.604
18	NUSA TENGGARA BARAT	141	131	272	4	4	8	2.973	2.128	5.101	3.118	2.263	5.381
19	NUSA TENGGARA TIMUR	105	148	253	0	0	0	2.216	2.063	4.279	2.321	2.211	4.532
20	KALIMANTAN BARAT	130	116	246	2	0	2	1.753	2.179	3.932	1.885	2.295	4.180
21	KALIMANTAN TENGAH	106	98	204	0	0	0	1.449	1.667	3.116	1.555	1.765	3.320
22	KALIMANTAN SELATAN	171	118	289	0	1	1	2.813	2.454	5.267	2.984	2.573	5.557
23	KALIMANTAN TIMUR	128	153	281	0	1	1	3.118	3.197	6.315	3.246	3.351	6.597
24	KALIMANTAN UTARA	35	30	65	0	0	0	848	758	1.606	883	788	1.671
25	SULAWESI UTARA	112	195	307	4	2	6	2.033	2.020	4.053	2.149	2.217	4.366
26	SULAWESI TENGAH	85	152	237	0	0	0	1.356	1.550	2.906	1.441	1.702	3.143
27	SULAWESI SELATAN	216	317	533	2	11	13	3.888	4.772	8.660	4.106	5.100	9.206
28	SULAWESI TENGGARA	88	134	222	0	0	0	915	1.038	1.953	1.003	1.172	2.175
29	GORONTALO	45	80	125	1	0	1	691	727	1.418	737	807	1.544
30	SULAWESI BARAT	24	41	65	0	0	0	393	442	835	417	483	900
31	MALUKU	58	57	115	0	1	1	772	873	1.645	830	931	1.761
32	MALUKU UTARA	32	47	79	0	1	1	410	602	1.012	442	650	1.092
33	PAPUA	44	47	91	2	0	2	636	695	1.331	682	742	1.424
34	PAPUA BARAT	28	21	49	0	0	0	450	404	854	478	425	903
35	PAPUA SELATAN	4	5	9	0	0	0	172	252	424	176	257	433
36	PAPUA TENGAH	21	16	37	1	0	1	378	410	788	400	426	826
37	PAPUA PEGUNUNGAN	6	12	18	0	0	0	151	121	272	157	133	290
38	PAPUA BARAT DAYA	18	12	30	0	0	0	325	361	686	343	373	716
Indonesia		6.544	7.946	14.490	106	136	242	161.145	144.135	305.280	167.795	152.217	320.012

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.d

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	12	77	89	0	0	0	0	1	1
2	SUMATERA UTARA	6	36	42	0	0	0	1	5	6
3	SUMATERA BARAT	3	27	30	0	0	0	0	2	2
4	RIAU	7	42	49	0	0	0	0	0	0
5	JAMBI	0	19	19	0	0	0	1	8	9
6	SUMATERA SELATAN	11	41	52	0	1	1	1	0	1
7	BENGKULU	4	9	13	0	0	0	0	0	0
8	LAMPUNG	3	15	18	0	3	3	2	62	64
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	10	14	0	0	0	0	1	1
10	KEPULAUAN RIAU	5	18	23	0	0	0	0	1	1
11	DKI JAKARTA	15	190	205	19	19	38	20	87	107
12	JAWA BARAT	15	172	187	0	1	1	6	37	43
13	JAWA TENGAH	31	172	203	7	15	22	4	10	14
14	YOGYAKARTA	13	116	129	1	3	4	0	0	0
15	JAWA TIMUR	31	156	187	0	5	5	12	125	137
16	BANTEN	8	53	61	0	0	0	1	9	10
17	BALI	4	32	36	2	2	4	2	4	6
18	NUSA TENGGARA BARAT	2	22	24	1	0	1	0	0	0
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0	10	10	0	0	0	0	0	0
20	KALIMANTAN BARAT	5	20	25	0	0	0	0	1	1
21	KALIMANTAN TENGAH	2	18	20	0	0	0	0	0	0
22	KALIMANTAN SELATAN	2	46	48	0	0	0	0	0	0
23	KALIMANTAN TIMUR	2	28	30	0	0	0	0	6	6
24	KALIMANTAN UTARA	2	3	5	0	0	0	0	0	0
25	SULAWESI UTARA	2	13	15	1	0	1	0	1	1
26	SULAWESI TENGAH	10	17	27	0	0	0	0	0	0
27	SULAWESI SELATAN	8	13	21	0	0	0	2	2	4
28	SULAWESI TENGGARA	3	15	18	0	0	0	0	0	0
29	GORONTALO	1	1	2	0	0	0	0	0	0
30	SULAWESI BARAT	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	MALUKU	0	10	10	0	0	0	0	1	1
32	MALUKU UTARA	0	3	3	0	0	0	0	0	0
33	PAPUA	0	2	2	0	0	0	0	0	0
34	PAPUA BARAT	1	3	4	0	0	0	0	0	0
35	PAPUA SELATAN	0	4	4	0	0	0	0	0	0
36	PAPUA TENGAH	2	1	3	0	0	0	0	0	0
37	PAPUA PEGUNUNGAN	0	1	1	0	0	0	29	34	63
38	PAPUA BARAT DAYA	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Indonesia		215	1.418	1.633	31	49	80	81	397	478

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.e

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	2	19	21	0	0	0	0	1	1
2	SUMATERA UTARA	1	3	4	0	0	0	0	0	0
3	SUMATERA BARAT	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	RIAU	2	3	5	0	0	0	0	0	0
5	JAMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SUMATERA SELATAN	2	5	7	0	0	0	0	0	0
7	BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	LAMPUNG	0	2	2	0	0	0	0	1	1
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEPULAUAN RIAU	1	1	2	0	0	0	0	1	1
11	DKI JAKARTA	4	22	26	0	0	0	0	0	0
12	JAWA BARAT	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	JAWA TENGAH	0	0	0	0	1	1	0	0	0
14	YOGYAKARTA	5	49	54	0	0	0	0	0	0
15	JAWA TIMUR	4	26	30	0	3	3	6	44	50
16	BANTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	BALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	0	3	3	0	0	0	0	0	0
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KALIMANTAN BARAT	0	1	1	0	0	0	0	0	0
21	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KALIMANTAN SELATAN	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SULAWESI TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SULAWESI SELATAN	0	3	3	0	0	0	0	0	0
28	SULAWESI TENGGARA	0	1	1	0	0	0	0	0	0
29	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MALUKU	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32	MALUKU UTARA	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33	PAPUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	PAPUA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	PAPUA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	PAPUA TENGAH	1	0	1	0	0	0	0	0	0
37	PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	0	0	29	34	63
38	PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		22	142	164	0	4	4	35	82	117

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.f

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ACEH	5	46	51	0	0	0	0	0	0
2	SUMATERA UTARA	5	25	30	0	0	0	0	2	2
3	SUMATERA BARAT	1	20	21	0	0	0	0	0	0
4	RIAU	3	34	37	0	0	0	0	0	0
5	JAMBI	0	14	14	0	0	0	0	0	0
6	SUMATERA SELATAN	9	31	40	0	1	1	0	0	0
7	BENGKULU	3	7	10	0	0	0	0	0	0
8	LAMPUNG	3	8	11	0	0	0	0	0	0
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	8	8	0	0	0	0	1	1
10	KEPULAUAN RIAU	2	12	14	0	0	0	0	0	0
11	DKI JAKARTA	9	99	108	0	0	0	2	0	2
12	JAWA BARAT	10	117	127	0	1	1	0	1	1
13	JAWA TENGAH	26	142	168	1	2	3	2	0	2
14	YOGYAKARTA	5	39	44	1	3	4	0	0	0
15	JAWA TIMUR	19	92	111	0	1	1	4	6	10
16	BANTEN	7	40	47	0	0	0	0	1	1
17	BALI	2	22	24	0	1	1	0	0	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	0	17	17	0	0	0	0	0	0
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0	6	6	0	0	0	0	0	0
20	KALIMANTAN BARAT	2	12	14	0	0	0	0	1	1
21	KALIMANTAN TENGAH	2	12	14	0	0	0	0	0	0
22	KALIMANTAN SELATAN	2	37	39	0	0	0	0	0	0
23	KALIMANTAN TIMUR	1	16	17	0	0	0	0	0	0
24	KALIMANTAN UTARA	1	0	1	0	0	0	0	0	0
25	SULAWESI UTARA	2	10	12	1	0	1	0	0	0
26	SULAWESI TENGAH	10	15	25	0	0	0	0	0	0
27	SULAWESI SELATAN	5	6	11	0	0	0	2	1	3
28	SULAWESI TENGGARA	0	9	9	0	0	0	0	0	0
29	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SULAWESI BARAT	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	MALUKU	0	4	4	0	0	0	0	0	0
32	MALUKU UTARA	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33	PAPUA	0	2	2	0	0	0	0	0	0
34	PAPUA BARAT	1	3	4	0	0	0	0	0	0
35	PAPUA SELATAN	0	4	4	0	0	0	0	0	0
36	PAPUA TENGAH	1	1	2	0	0	0	0	0	0
37	PAPUA PEGUNUNGAN	0	1	1	0	0	0	0	0	0
38	PAPUA BARAT DAYA	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Indonesia		137	915	1.052	3	9	12	10	13	23

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.g

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2024**

No	Nama Poltekkes	Program Studi																						Total
		Keperawatan	Kebidanan	Kesehatan Gigi	Analisis Farmasi Dan Makanan	Farmasi	Jamu	Sanitasi	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknologi Laboratorium Medis	Asuransi Kesehatan	Teknik Gigi	Radiologi	Rekam dan Informasi Kesehatan	Teknologi Elektro Medis	Ortetik Prostetik	Teknologi Bank Darah	Analisis Kesehatan /TLM	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	368	183	70	0	106	0	27	51	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893
2	Medan	218	181	108	0	142	0	33	133	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008
3	Padang	159	177	76	0	0	0	40	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487
4	Riau	161	78	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
5	Jambi	73	68	55	0	110	0	65	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458
6	Palembang	330	174	69	0	73	0	71	72	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863
7	Bengkulu	146	109	0	0	83	0	71	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503
8	Tanjung Karang	185	184	64	0	81	0	79	83	0	0	0	0	136		26	0	0	0	0	0	0	0	838
9	Tanjung Pinang	74	73	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
10	Pangkal Pinang	71	34	0	0	36	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
11	Jakarta I	37	68	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
12	Jakarta II				85	101	0	72	64	0	0	0	0	0	0	61	53	0	48	0	0	0	0	484
13	Jakarta III	129	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
14	Bandung	210	206	42	0	74	0	60	84	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
15	Tasikmalaya	197	114	38	0	79	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	737
16	Semarang	843	367	98	0	0	0	99	102	0	0	0	0	103	0	0	182	152	0	0	50	103	0	2.099
17	Surakarta	94	49		90	107	45	0	0	96	92	100	30	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	758
18	Yogyakarta	44	46	75	0	0	0	83	52	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	47	0	389
19	Surabaya	280	174	42	0	0	0	148	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	800
20	Malang	403	82		78	0	0	0	118	0	0	0	0	0	78	0	0	153	0	0	66	0	0	978
21	Banten	96	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363
22	Denpasar	116	37	41	0	0	0	25	40	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358
23	Mataram	142	85	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384
24	Kupang	381	162	98	0	118	0	84	108	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045
25	Pontianak	117	53	79	0	0	0	41	47	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409
26	Palangkaraya	78	64	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
27	Banjarmasin	73	86	48	0	0	0	37	38	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345
28	Kalimantan Timur	80	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
29	Manado	251	101	149	0	128	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	766
30	Palu	183	144		0	0	0	38	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438
31	Makassar	234	76	93	0	90	0	34	45	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	666
32	Kendari	151	159	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358
33	Gorontalo	118	115	0	0	77	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
34	Mamuju	22	14	0	0	0	0	17	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
35	Maluku	261	200	0	0	0	0	57	112	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804
36	Ternate	113	92	0	0	0	0	65	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	396
37	Jayapura	428	146	0	0	59	0	69	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	782
38	Sorong	123	79	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
Total		6.989	4.253	1.317	253	1.464	45	1.361	2.103	144	92	100	30	1.691	78	87	235	501	115	55	116			21.029

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 16.h

JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan		Keteknisian Medis		Kefarmasi	Kesehatan Lingkungan		Tenaga Kesehatan Masyarakat	Gizi	Keterampilan Fisik				Teknik Biomedika				Teknik Elektro Medik	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/ Teknologi Radiologi Pencitraan	Jumlah
			Keperawatan	Keperawatan Anestesiologi	Terapis Gigi	Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi	Farmasi	Sanitasi Lingkungan	Analisis Kesehatan/TLM	Promosi Kesehatan	Gizi & Dietetika	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Teknologi Laboratorium Medis	Teknologi Rekayasa Elektromedis	Teknologi Radiologi Pendtraan	Ortotik Prostetik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	0	0	0	153	0	0	42	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2	Medan	125	78	0	0	0	0	87	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426
3	Padang	0	40	0	0	0	0	41	0	39	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	562	275	0	112	0	0	57	0	32	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	1.339
6	Palembang	159	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	317
7	Bengkulu	143	50	0	0	0	0	0	0	71	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353
8	Tanjung Karang	142	92	0	0	0	0	92	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	44
12	Jakarta II	0	0	0	0	0	0	37	0	0	65	0	0	0	0	0	57	106	0	0	0	265
13	Jakarta III	137	131	0	0	0	0	0	0	34	0	44	0	0	0	163	0	0	0	0	0	509
14	Bandung	51	35	0	70	0	0	116	0	53	86	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	558
15	Tasikmalaya	209	40	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
16	Semarang	446	146	0	118	0	0	71	0	0	93	0	0	0	0	43	0	171	0	0	0	1.088
17	Surakarta	251	122	0	0	0	0	0	0	0	0	126	135	148	65	0	0	0	62	0	0	909
18	Yogyakarta	42	71	125	35	0	0	91	0	0	72	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	602
19	Surabaya	217	102	0	38	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	143	107	0	0	0	0	694
20	Malang	188	131	0	0	0	0	0	0	92	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531
21	Banten	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
22	Denpasar	214	108	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	477
23	Mataram	63	130	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	419
24	Kupang	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
25	Pontianak	151	148	0	0	0	0	46	85	0	63	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	578
26	Palangka Raya	147	47	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
27	Banjarmasin	173	35	0	97	0	0	81	0	0	50	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	541
28	Kalimantan Timur	125	125	0	0	0	0	0	0	84	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447
29	Manado	104	68	0	0	0	0	32	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
30	Palu	130	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
31	Makassar	184	0	0	149	0	52	99	98	0	92	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718
32	Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
33	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	48	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
34	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jayapura	33	158	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
38	Sorong	40	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
Total		4.036	2.473	125	853	0	52	1.027	302	405	1.622	214	135	148	65	1.406	164	277	74	0	0	13.378

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 16.i

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024**

No	Poltekkes	Profesi Bidan	Keperawatan	Gizi	Keterampilan Fisik	Jumlah
			Ners	Dietisien	Fisioterapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0	0	0	0	0
2	Medan	106	89	0	0	195
3	Padang	0	31	0	0	31
4	Riau	0	0	0	0	0
5	Jambi	476	98	0	0	574
6	Palembang	80	0	0	0	80
7	Bengkulu	74	35	0	0	109
8	Tanjung Karang	0	101	0	0	101
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	34	0	0	34
12	Jakarta II	0	0	0	0	0
13	Jakarta III	152	69	0	113	334
14	Bandung	47	42	16	0	105
15	Tasikmalaya	81	57	0	0	138
16	Semarang	345	255	27	0	627
17	Surakarta	102	99		188	389
18	Yogyakarta	246	73	79	0	398
19	Surabaya	151	44	0	0	195
20	Malang	179	87	28	0	294
21	Banten	0	77	0	0	77
22	Denpasar	136	112	0	0	248
23	Mataram	121	83	0	0	204
24	Kupang	0	66	0	0	66
25	Pontianak	97	110	0	0	207
26	Palangkaraya	91	0	0	0	91
27	Banjarmasin	0	0	0	0	0
28	Kalimantan Timur	418	232	0	0	650
29	Manado	0		0	0	0
30	Palu	0	146	0	0	146
31	Makassar	37	0	50	72	159
32	Kendari	0	0	0	0	0
33	Gorontalo	0	0	0	0	0
34	Mamuju	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0
37	Jayapura	0	87	0	0	87
38	Sorong	0	0	0	0	0
Total		2.939	2.027	200	373	5.539

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 16.j

JUMLAH LULUSAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan	Keterampilan Fisik		Jumlah
				Imaging Diagnostik	Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Semarang	48	13	19	48	128
2	Palu	130	93	0	0	223
Total		178	106	19	48	351

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 16.k

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI*
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Rumpun Tenaga Kesehatan													Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Aceh	563	102	1.991	663	491	854	54	258	261	0	5	0	5.242	
2	Sumatera Utara	1544	557	5.555	10.397	3.214	2.389	47	767	716	0	526	0	25.712	
3	Sumatera Barat	842	318	3.205	1.613	1.777	683	2	303	371	18	311	0	9.443	
4	Riau	231	0	2.611	1.732	655	385	0	179	344	0	8	0	6.145	
5	Jambi	247		689	1.833	410	385	57	24	168	0	388	0	4.201	
6	Sumatera Selatan	709	172	1.712	1.062	662	623	129	305	266	0	101	0	5.741	
7	Bengkulu	181	0	1.037	1.181	318	350	0	182	109	0	104	0	3.462	
8	Lampung	789	0	1.666	1.556	797	462	93	277	147	0	121	0	5.908	
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	653	78	34	123	0	41	0	0	0	0	929	
10	Kepulauan Riau	182	0	357	189	111	66	21	8	14	0	0	0	948	
11	DKI Jakarta	3765	902	7.049	4.777	4.131	3.086	75	938	981	41	225	12	25.982	
12	Jawa Barat	2132	529	13.417	7.713	6.041	1.156	134	747	2.226	20	790	5	34.910	
13	Jawa Tengah	2124	552	14.594	6.037	5.545	2.352	150	1.522	3.042	323	772	79	37.092	
14	DI Yogyakarta	1649	456	3.555	1.481	2580	930	97	539	1190	0	659	0	13.136	
15	Jawa Timur	3360	1237	13.446	7.368	5.416	2.231	157	1.354	1.942	0	947	156	37.614	
16	Banten	243	0	2.793	801	861	377	0	23	210	0	121	0	5.429	
17	Bali	1140	241	2.634	1.486	657	263	61	134	456	0	208	6	7.286	
18	Nusa Tenggara Barat	353	0	921	911	753	153	15	210	285	0	306	0	3.907	
19	Nusa Tenggara Timur	133	0	1.614	493	235	514	0	151	107	0	100	0	3.347	
20	Kalimantan Barat	193	0	1383	674	361	210	44	162	58	0	253	0	3.338	
21	Kalimantan Tengah	166	0	299	504	121	0	0	77	68	0	0	0	1.235	
22	Kalimantan Selatan	299	88	1366	773	851	590	85	117	383	0	173	0	4.725	
23	Kalimantan Timur	111	45	1661	1.245	755	601	91	115	68	0	117	0	4.809	
24	Kalimantan Utara	0	0	107	99	35	0	0	0	0	0	0	0	241	
25	Sulawesi Utara	399	74	1843	357	340	416	42	59	68	0	88	0	3.686	
26	Sulawesi Tengah	267	0	747	256	193	411	0	170	0	0	0	0	2.044	
27	Sulawesi Selatan	1243	318	5398	6.456	3.404	1.919	115	332	1.049	0	404	0	20.638	
28	Sulawesi Tenggara	212	0	462	596	660	575	79	200	228	0	113	0	3.125	
29	Gorontalo	55	0	579	260	538	369	73	237	94	0	12	0	2.217	
30	Sulawesi Barat	0	0	658	264	14	155	0	45	0	0		0	1.136	
31	Maluku	98	0	976	237	147	305	0	60	0	0	96	0	1.919	
32	Maluku Utara	72	0	199	225	48	139	0	36	0	0	56	0	775	
33	Papua	221	0	981	202	237	597	0	70	86	0	132	0	2.526	
34	Papua Barat	18	0	275	118	48	21	0	32		0	0	0	512	
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Indonesia		23.541	5.591	96.433	63.637	42.440	23.690	1.621	9.674	14.937	402	7.136	258	289.360	

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Catatan : * = lulusan jenjang DIII, DIV, S1, S2, S3, spesialis, dan profesi

Lampiran 16.1

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	8	0	20	10	0	9	0	0	0	23	0	70
2	Sumatera Utara	5	0	6	7	8	10	0	1	0	58	16	111
3	Sumatera Barat	19	28	10	25	0	0	2	6	0	32	0	122
4	Riau	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	16	8	11	12	0	21	0	0	0	46	0	114
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	82	12	69	151	37	27	18	0	2	267	37	702
12	Jawa Barat	45	16	48	67	27	50	22	7	8	226	55	571
13	Jawa Tengah	37	26	38	46	22	33	18	1	0	192		413
14	DI Yogyakarta	0	24	46	24	16	30	31	0	0	169	72	412
15	Jawa Timur	40	25	28	97	21	29	29	7	15	226	120	637
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	12	3	19	37	12	16	6	5	0	179	0	289
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	7	7	1	7		6	0	0	0	9	0	37
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	16	5	5	12	0	0	0	0	1	15	0	54
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	27	18	13	39	26	35	32	7	0	218	79	494
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13		13
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		314	184	314	534	169	266	158	34	26	1.673	379	4.051

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Lampiran 11.a

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	ACEH	634	605	1.239	892	2.315	3.207	1.526	2.920	4.446	13	43	56	132	596	728	145	639	784
2	SUMATERA UTARA	1.519	1.138	2.657	2.317	4.381	6.698	3.836	5.519	9.355	49	107	156	330	1.264	1.594	379	1.371	1.750
3	SUMATERA BARAT	589	613	1.202	690	2.011	2.701	1.279	2.624	3.903	12	36	48	113	724	837	125	760	885
4	RIAU	779	525	1.304	1.083	2.629	3.712	1.862	3.154	5.016	20	47	67	134	762	896	154	809	963
5	JAMBI	263	212	475	464	1.138	1.602	727	1.350	2.077	12	15	27	69	280	349	81	295	376
6	SUMATERA SELATAN	679	622	1.301	1.007	2.359	3.366	1.686	2.981	4.667	22	40	62	123	540	663	145	580	725
7	BENGKULU	142	124	266	258	587	845	400	711	1.111	3	9	12	33	164	197	36	173	209
8	LAMPUNG	538	381	919	763	1.748	2.511	1.301	2.129	3.430	12	22	34	66	307	373	78	329	407
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	148	118	266	268	503	771	416	621	1.037	8	18	26	45	114	159	53	132	185
10	KEPULAUAN RIAU	326	216	542	483	989	1.472	809	1.205	2.014	18	19	37	87	307	394	105	326	431
11	DKI JAKARTA	4.272	4.039	8.311	3.565	7.967	11.532	7.837	12.006	19.843	355	848	1.203	774	3.307	4.081	1.129	4.155	5.284
12	JAWA BARAT	4.851	3.924	8.775	6.246	11.203	17.449	11.097	15.127	26.224	270	605	875	780	3.748	4.528	1.050	4.353	5.403
13	JAWA TENGAH	3.117	2.240	5.357	4.025	7.285	11.310	7.142	9.525	16.667	136	253	389	600	2.288	2.888	736	2.541	3.277
14	YOGYAKARTA	813	768	1.581	841	1.731	2.572	1.654	2.499	4.153	83	202	285	197	833	1.030	280	1.035	1.315
15	JAWA TIMUR	3.832	2.897	6.729	4.989	8.315	13.304	8.821	11.212	20.033	289	532	821	923	3.461	4.384	1.212	3.993	5.205
16	BANTEN	1.764	1.549	3.313	1.898	3.806	5.704	3.662	5.355	9.017	93	269	362	222	1.348	1.570	315	1.617	1.932
17	BALI	1.188	810	1.998	1.884	2.285	4.169	3.072	3.095	6.167	40	50	90	310	777	1.087	350	827	1.177
18	NUSA TENGGARA BARAT	315	241	556	565	1.059	1.624	880	1.300	2.180	11	24	35	74	261	335	85	285	370
19	NUSA TENGGARA TIMUR	252	245	497	526	1.011	1.537	778	1.256	2.034	4	16	20	61	234	295	65	250	315
20	KALIMANTAN BARAT	332	214	546	634	836	1.470	966	1.050	2.016	17	16	33	88	221	309	105	237	342
21	KALIMANTAN TENGAH	227	175	402	447	700	1.147	674	875	1.549	11	22	33	69	188	257	80	210	290
22	KALIMANTAN SELATAN	433	316	749	593	1.047	1.640	1.026	1.363	2.389	26	37	63	175	451	626	201	488	689
23	KALIMANTAN TIMUR	516	437	953	809	1.525	2.334	1.325	1.962	3.287	28	57	85	146	473	619	174	530	704
24	KALIMANTAN UTARA	95	67	162	192	262	454	287	329	616	8	14	22	35	60	95	43	74	117
25	SULAWESI UTARA	376	374	750	917	1.441	2.358	1.293	1.815	3.108	5	13	18	91	237	328	96	250	346
26	SULAWESI TENGAH	176	195	371	401	783	1.184	577	978	1.555	2	17	19	51	182	233	53	199	252
27	SULAWESI SELATAN	872	1.126	1.998	1.147	2.730	3.877	2.019	3.856	5.875	64	141	205	241	1.085	1.326	305	1.226	1.531
28	SULAWESI TENGGARA	170	173	343	364	846	1.210	534	1.019	1.553	12	23	35	63	283	346	75	306	381
29	GORONTALO	105	96	201	147	295	442	252	391	643	2	4	6	20	72	92	22	76	98
30	SULAWESI BARAT	62	86	148	102	251	353	164	337	501	3	14	17	32	107	139	35	121	156
31	MALUKU	94	128	222	223	537	760	317	665	982	5	11	16	32	98	130	37	109	146
32	MALUKU UTARA	82	77	159	205	321	526	287	398	685	6	5	11	34	72	106	40	77	117
33	PAPUA	108	116	224	195	415	610	303	531	834	2	8	10	19	53	72	21	61	82
34	PAPUA BARAT	48	37	85	121	192	313	169	229	398	0	4	4	16	35	51	16	39	55
35	PAPUA SELATAN	33	30	63	81	157	238	114	187	301	1	3	4	9	18	27	10	21	31
36	PAPUA TENGAH	56	42	98	128	194	322	184	236	420	1	3	4	11	34	45	12	37	49
37	PAPUA PEGUNUNGAN	24	22	46	84	103	187	108	125	233	0	0	0	6	23	29	6	23	29
38	PAPUA BARAT DAYA	60	34	94	91	203	294	151	237	388	0	4	4	18	37	55	18	41	59
Indonesia		29.890	25.012	54.902	39.645	76.160	115.805	69.535	101.172	170.707	1.643	3.551	5.194	6.229	25.044	31.273	7.872	28.595	36.467

CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Penduduk *	PBI		Penduduk yang Didaftarkan Penda		Bukan PBI						Peserta Aktif		Peserta Tidak Aktif		Total Peserta	%
							Pekerja Penerima Upah (PPU)		Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)		Bukan Pekerja							
			Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Total	%	Total	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	5.623.479	2.668.261	131.305	1.751.245	176.872	854.079	38.181	18.422	12.659	112.873	9.314,0	5.404.880	96,11	60.154	1,07	5.773.211	102,66
2	Sumatera Utara	15.640.905	4.637.914	880.143	2.348.389	265.287	2.439.504	494.599	1.041.573	1.365.000	347.530	51.052,0	10.814.910	69,15	1.910.651	12,22	13.870.991	88,68
3	Sumatera Barat	5.820.359	1.832.872	250.945	1.030.179	202.944	885.947	107.787	358.584	499.645	116.227	11.830,0	4.223.809	72,57	619.262	10,64	5.296.960	91,01
4	Riau	7.099.297	2.108.421	331.507	1.447.076	131.362	1.508.027	349.439	475.412	433.673	82.973	10.155,0	5.621.909	79,19	793.267	11,17	6.878.045	96,88
5	Jambi	3.834.439	1.062.025	207.118	474.329	77.228	634.140	142.581	304.313	423.256	70.768	7.683,0	2.545.575	66,39	573.520	14,96	3.403.441	88,76
6	Sumatera Selatan	9.064.690	3.517.624	613.101	1.751.673	213.146	1.284.778	218.023	359.015	384.540	117.775	13.237,0	7.030.865	77,56	615.800	6,79	8.472.912	93,47
7	Bengkulu	2.127.957	865.608	131.510	293.655	74.282	370.213	44.441	107.051	136.290	35.012	2.705,0	1.671.539	78,55	183.436	8,62	2.060.767	96,84
8	Lampung	9.144.263	3.795.600	861.715	804.728	741.850	914.187	168.030	474.345	678.388	137.258	17.150,0	6.126.118	66,99	863.568	9,44	8.593.251	93,97
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.549.562	283.867	60.244	483.282	65.425	276.774	41.721	136.346	128.018	22.508	1.291,0	1.202.777	77,62	171.030	11,04	1.499.476	96,77
10	Kepulauan Riau	2.271.890	444.119	53.678	258.722	19.469	829.898	200.740	272.755	179.679	17.145	1.784,0	1.822.639	80,23	382.203	16,82	2.277.989	100,27
11	DKI Jakarta	11.038.216	1.368.057	165.223	4.419.840	447.630	10.276.695	1.940.028	807.143	302.343	295.521	20.108,0	17.167.256	155,53	2.262.479	20,50	20.042.588	181,57
12	Jawa Barat	51.316.378	16.017.775	3.974.958	7.705.568	778.123	8.115.365	1.828.622	3.252.143	3.794.658	852.376	102.139,0	35.943.227	70,04	5.725.419	11,16	46.421.727	90,46
13	Jawa Tengah	38.430.645	14.897.615	2.680.971	3.220.499	2.752.686	5.736.665	969.820	2.756.577	2.042.099	647.393	58.131,0	27.258.749	70,93	3.070.050	7,99	35.762.456	93,06
14	D I Yogyakarta	3.743.365	1.646.556	115.192	423.407	24.173	818.588	89.535	249.493	103.850	130.076	8.017,0	3.268.120	87,30	201.402	5,38	3.608.887	96,41
15	Jawa Timur	41.919.906	14.987.021	2.860.363	6.410.359	2.526.586	5.935.687	918.595	2.601.177	1.908.366	743.352	78.535,0	30.677.596	73,18	2.905.496	6,93	38.970.041	92,96
16	Banten	12.881.374	3.157.484	743.198	2.319.421	350.850	3.513.545	775.070	909.098	913.889	152.725	18.708,0	10.052.273	78,04	1.707.667	13,26	12.853.988	99,79
17	Bali	4.375.263	826.563	119.129	1.233.270	126.903	1.186.394	148.532	491.205	185.210	96.918	4.309,0	3.834.350	87,64	338.051	7,73	4.418.433	100,99
18	Nusa Tenggara Barat	5.751.295	2.644.748	658.513	910.107	88.916	657.809	75.898	93.033	200.026	71.064	8.094,0	4.376.761	76,10	284.018	4,94	5.408.208	94,03
19	Nusa Tenggara Timur	5.700.772	3.187.297	363.215	699.710	134.608	664.812	56.542	77.125	142.952	103.874	12.941,0	4.732.818	83,02	212.435	3,73	5.443.076	95,48
20	Kalimantan Barat	5.646.268	1.697.481	342.107	644.952	167.738	1.138.395	260.950	349.921	450.633	63.145	7.219,0	3.893.894	68,96	718.802	12,73	5.122.541	90,72
21	Kalimantan Tengah	2.825.290	512.918	94.879	858.176	117.035	821.234	290.131	124.992	168.711	48.538	5.531,0	2.365.858	83,74	464.373	16,44	3.042.145	107,68
22	Kalimantan Selatan	4.305.281	806.342	174.327	1.353.485	113.671	882.403	175.229	286.469	262.853	88.452	9.455,0	3.417.151	79,37	447.537	10,40	4.152.686	96,46
23	Kalimantan Timur	4.123.303	582.409	99.274	1.033.814	92.448	1.509.059	336.769	373.151	241.379	58.564	4.369,0	3.556.997	86,27	582.517	14,13	4.331.236	105,04
24	Kalimantan Utara	770.627	178.527	25.174	199.446	12.486	220.183	44.626	52.947	54.328	9.938	638,0	661.041	85,78	99.592	12,92	798.293	103,59
25	Sulawesi Utara	2.645.291	837.263	98.516	439.162	175.888	467.622	57.138	219.458	221.051	79.252	5.371,0	2.042.757	77,22	283.560	10,72	2.600.721	98,32
26	Sulawesi Tengah	3.219.494	1.296.082	169.274	578.989	99.899	699.675	86.129	125.081	150.164	47.137	5.122,0	2.746.964	85,32	241.415	7,50	3.257.552	101,18
27	Sulawesi Selatan	9.528.276	3.357.132	496.475	2.016.136	349.871	1.307.572	117.340	562.215	591.852	204.757	19.906,0	7.447.812	78,17	729.098	7,65	9.023.256	94,70
28	Sulawesi Tenggara	2.824.589	1.155.201	161.830	563.894	65.019	493.238	44.613	83.552	97.675	51.117	4.990,0	2.347.002	83,09	147.278	5,21	2.721.129	96,34
29	Gorontalo	1.250.960	635.275	28.152	276.422	16.998	191.008	12.704	25.844	28.515	11.856	754,0	1.140.405	91,16	41.973	3,36	1.227.528	98,13
30	Sulawesi Barat	1.466.741	646.312	92.002	294.838	36.217	191.375	18.974	51.722	73.555	21.671	2.918,0	1.205.918	82,22	95.447	6,51	1.429.584	97,47
31	Maluku	1.935.586	855.514	160.616	231.968	45.733	317.102	33.723	49.826	87.282	44.409	7.697,0	1.498.819	77,43	128.702	6,65	1.833.870	94,74
32	Maluku Utara	1.394.231	381.489	73.964	301.706	63.431	409.030	69.413	30.000	52.767	14.612	1.904,0	1.136.837	81,54	124.084	8,90	1.398.316	100,29
33	Papua	4.504.210	3.138.834	289.610	433.576	93.331	583.482	69.734	68.185	85.865	41.941	3.179,0	4.266.018	94,71	158.778	3,53	4.807.737	106,74
34	Papua Barat	1.199.441	654.346	43.315	214.343	16.491	252.187	35.680	24.718	32.367	18.350	1.505,0	1.163.944	97,04	69.552	5,80	1.293.302	107,83
Indonesia		284.973.643	96.684.552	17.551.543	47.426.366	10.664.596	56.386.672	10.261.337	17.212.891	16.433.538	4.957.107	517.741	222.667.588	78,1	27.212.616	9,55	278.096.343	97,59

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2024

Catatan:

*Jumlah Penduduk: DATA REKAPITULASI KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PER PROVINSI TAHUN 2020 (<https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1121/label-data>).

* Pada laporan BPJS Kesehatan, hanya menggunakan 34 Provinsi

* Penduduk Papua dan Papua Barat dijumlahkan dengan jumlah penduduk dari Provinsi pecahannya

Lampiran 19.b

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Aceh	59	208	364	1	3	635
2	Sumatera Utara	113	572	618	1	11	1.315
3	Sumatera Barat	108	150	279	1	39	577
4	Riau	74	290	237	-	17	618
5	Jambi	64	84	206	-	19	373
6	Sumatera Selatan	226	264	350	2	35	877
7	Bengkulu	97	60	179	-	17	353
8	Lampung	115	243	320	-	5	683
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	41	64	2	6	140
10	Kepulauan Riau	7	134	91	1	1	234
11	DKI Jakarta	9	373	44	-	1	427
12	Jawa Barat	424	1.497	1.097	-	60	3.078
13	Jawa Tengah	1.080	840	880	-	315	3.115
14	D I Yogyakarta	100	139	121	-	38	398
15	Jawa Timur	663	936	972	-	225	2.796
16	Banten	7	448	253	-	1	709
17	Bali	293	139	120	1	97	650
18	Nusa Tenggara Barat	93	81	175	1	14	364
19	Nusa Tenggara Timur	85	83	434	8	26	636
20	Kalimantan Barat	91	77	249	1	18	436
21	Kalimantan Tengah	59	75	204	5	8	351
22	Kalimantan Selatan	145	107	241	-	36	529
23	Kalimantan Timur	101	173	188	2	41	505
24	Kalimantan Utara	27	23	58	6	6	120
25	Sulawesi Utara	143	68	198	-	35	444
26	Sulawesi Tengah	40	59	218	4	9	330
27	Sulawesi Selatan	160	245	473	6	72	956
28	Sulawesi Tenggara	56	39	307	-	16	418
29	Gorontalo	22	35	95	-	8	160
30	Sulawesi Barat	34	20	98	1	9	162
31	Maluku	30	27	223	1	6	287
32	Maluku Utara	30	21	148	1	8	208
33	Papua	28	27	134	1	7	197
34	Papua Barat	5	10	76	1	-	92
35	Papua Selatan	9	18	76	-	-	103
36	Papua Tengah	11	17	98	1	3	130
37	Papua Pegunungan	1	4	146	3	-	154
38	Papua Barat Daya	13	16	91	-	2	122
Indonesia		4.649	7.643	10.125	51	1.214	23.682

Sumber: BPJS Kesehatan, 2025

Lampiran 19.c

FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	RS TNI POLRI	RS Khusus	Klinik Utama	Total
(1)	(2)	26	33	5	6	16	(8)
1	Aceh	26	33	5	6	16	86
2	Sumatera Utara	40	103	8	15	8	174
3	Sumatera Barat	28	18	4	23	12	85
4	Riau	19	37	3	11	7	77
5	Jambi	17	16	2	3	2	40
6	Sumatera Selatan	30	29	4	14	7	84
7	Bengkulu	12	8	2	2	4	28
8	Lampung	18	40	2	16	8	84
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	6	2	4	4	26
10	Kepulauan Riau	12	15	3	3	6	39
11	DKI Jakarta	36	74	9	21	43	183
12	Jawa Barat	61	253	15	42	102	473
13	Jawa Tengah	67	204	12	29	39	351
14	D I Yogyakarta	12	46	3	9	5	75
15	Jawa Timur	82	221	24	53	53	433
16	Banten	17	68	3	17	18	123
17	Bali	17	40	3	8	12	80
18	Nusa Tenggara Barat	19	15	3	6	3	46
19	Nusa Tenggara Timur	24	19	4	3	5	55
20	Kalimantan Barat	20	10	5	7	16	58
21	Kalimantan Tengah	15	4	2	3	4	28
22	Kalimantan Selatan	18	15	4	7	10	54
23	Kalimantan Timur	20	21	3	10	10	64
24	Kalimantan Utara	6	2	2	0	0	10
25	Sulawesi Utara	22	21	4	6	9	62
26	Sulawesi Tengah	20	5	3	4	6	38
27	Sulawesi Selatan	38	38	6	20	30	132
28	Sulawesi Tenggara	18	11	2	1	4	36
29	Gorontalo	11	4	2	1	4	22
30	Sulawesi Barat	8	1	2	2	2	15
31	Maluku	15	6	3	1	3	28
32	Maluku Utara	11	4	1	0	1	17
33	Papua	9	2	4	1	0	16
34	Papua Barat	7	0	3	0	0	10
35	Papua Selatan	4	1	2	0	0	7
36	Papua Tengah	4	3	1	0	0	8
37	Papua Pegunungan	4	0	0	0	0	4
38	Papua Barat Daya	4	4	2	0	1	11
Indonesia		801	1.397	162	348	454	3.162

Sumber: BPJS Kesehatan, 2025

Lampiran 19.d

**FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Apotek	Optik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	93	41	134
2	Sumatera Utara	232	64	296
3	Sumatera Barat	108	54	162
4	Riau	103	31	134
5	Jambi	54	20	74
6	Sumatera Selatan	115	35	150
7	Bengkulu	35	14	49
8	Lampung	97	27	124
9	Kepulauan Bangka Belitung	34	11	45
10	Kepulauan Riau	65	16	81
11	DKI Jakarta	215	33	248
12	Jawa Barat	655	131	786
13	Jawa Tengah	659	148	807
14	D I Yogyakarta	99	8	107
15	Jawa Timur	641	263	904
16	Banten	139	19	158
17	Bali	126	26	152
18	Nusa Tenggara Barat	57	24	81
19	Nusa Tenggara Timur	84	17	101
20	Kalimantan Barat	59	32	91
21	Kalimantan Tengah	46	8	54
22	Kalimantan Selatan	89	28	117
23	Kalimantan Timur	103	19	122
24	Kalimantan Utara	16	6	22
25	Sulawesi Utara	93	25	118
26	Sulawesi Tengah	57	18	75
27	Sulawesi Selatan	157	43	200
28	Sulawesi Tenggara	44	10	54
29	Gorontalo	32	9	41
30	Sulawesi Barat	21	4	25
31	Maluku	17	5	22
32	Maluku Utara	28	8	36
33	Papua	14	8	22
34	Papua Barat	10	2	12
35	Papua Selatan	1	2	3
36	Papua Tengah	11	3	14
37	Papua Pegunungan	2	1	3
38	Papua Barat Daya	18	4	22
Indonesia		4.429	1.217	5.646

Sumber: BPJS Kesehatan, 2025

Lampiran 20.a

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

No	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran Kementerian Kesehatan	
		Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBN PUSAT	99.869.185.822.000	79,32
	Rupiah Murni	71.448.989.232.000	
	Pinjaman Luar Negeri	4.833.129.963.000	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	298.657.899.000	
	Badan Layanan Umum	21.964.996.927.000	
	Hibah Luar Negeri	29.598.186.000	
	Hibah Langsung Dalam Negeri	1.000.000.000	
	Hibah Langsung Luar Negeri	1.292.813.615.000	
2	DANA DEKONSENTRASI	313.967.497.000	0,25
3	DANA ALOKASI KHUSUS	25.728.672.152.000	20,43
	a. DAK Fisik	13.000.000.000.000	
	b. DAK Nonfisik	12.728.672.152.000	
Total Anggaran Kementerian Kesehatan		125.911.825.471.000	
Total APBN		3.325.100.000.000.000	
% APBN Kementerian Kesehatan THD APBN Indonesia			3,79

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 20.b

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT ESELON I TAHUN 2024

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan											
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Sekretariat Jenderal	51.687.171.905.000	51.404.075.319.746	99,45			-	313.967.497.000	253.885.816.059	80,86	52.001.139.402.000	51.657.961.135.805	99,34
2	Inspektorat Jenderal	35.819.377.000	34.979.396.529	97,65			-			-	35.819.377.000	34.979.396.529	97,65
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.093.451.006.000	558.982.507.675	51,12	527.449.329.000	498.567.879.712	94,52%			-	1.620.900.335.000	1.057.550.387.387	65,24
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	5.718.626.370.000	4.324.787.556.975	75,63	27.125.615.226.000	25.058.961.450.421	92,38%			-	32.844.241.596.000	29.383.749.007.396	89,46
5	Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	1.991.241.394.000	1.899.225.059.222	95,38	931.792.459.000	906.632.646.598	97,30%			-	2.923.033.853.000	2.805.857.705.820	95,99
6	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.143.130.768.000	4.098.550.213.876	98,92	159.060.339.000	149.056.733.771	93,71%			-	4.302.191.107.000	4.247.606.947.647	98,73
7	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	464.908.773.000	395.846.782.365	85,15			-			-	464.908.773.000	395.846.782.365	85,15
8	Ditjen Tenaga Kesehatan	1.646.392.535.000	1.577.637.054.048	95,82	4.030.558.844.000	3.919.431.969.270	97,24%			-	5.676.951.379.000	5.497.069.023.318	96,83
Kementerian Kesehatan		66.780.742.128.000	64.294.083.890.436	96,28	32.774.476.197.000	30.532.650.679.772	93,16%	313.967.497.000	253.885.816.059	80,86	99.869.185.822.000	95.080.620.386.267	95,21

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 20.c

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ditjen Tenaga Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	1.230.692.443.000		188.898.890.000	2.931.726.461.000	504.109.787.000	60.057.503.000		1.143.522.359.000	6.059.007.443.000
	Realisasi	1.188.406.001.674		180.930.762.190	2.868.469.914.169	493.060.699.542	57.892.697.421		1.119.168.403.462	5.907.928.478.458
	%	96,56%	-	95,78	97,84	97,81	96,40		97,87	97,51
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	4.488.769.277.000	35.819.377.000	1.385.421.410.000	19.748.518.800.000	2.320.311.504.000	4.198.860.768.000	456.892.546.000	3.768.283.067.000	36.402.876.749.000
	Realisasi	4.287.925.874.743	34.979.396.529	834.679.431.166	17.489.321.537.602	2.217.435.489.686	4.146.960.095.090	387.907.799.264	3.628.914.785.503	33.028.124.409.583
	%	95,53	97,65	60,25	88,56	95,57	98,76	84,90	96,30	90,73
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	113.339.620.000		40.399.738.000	10.163.996.335.000	98.612.562.000	43.272.836.000	8.016.227.000	765.145.953.000	11.232.783.271.000
	Realisasi	85.405.750.088		39.449.255.231	9.025.957.555.625	95.361.516.592	42.754.155.136	7.938.983.101	748.985.834.353	10.045.853.050.126
	%	75,35%	-	97,65	88,80	96,70	98,80	99,04	97,89	89,43
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	46.168.338.062.000		6.180.297.000						46.174.518.359.000
	Realisasi	46.096.223.509.300		2.490.938.800						46.098.714.448.100
	%	99,84%	-	40,30	-	-	-	-	-	99,84
TOTAL										
Anggaran		52.001.139.402.000	35.819.377.000	1.620.900.335.000	32.844.241.596.000	2.923.033.853.000	4.302.191.107.000	464.908.773.000	5.676.951.379.000	99.869.185.822.000
Realisasi		51.657.961.135.805	34.979.396.529	1.057.550.387.387	29.383.749.007.396	2.805.857.705.820	4.247.606.947.647	395.846.782.365	5.497.069.023.318	95.080.620.386.267
%		99,34	97,65	65,24	89,46	95,99	98,73	85,15	96,83	95,21

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 20.d

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen Yankes	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ditjen Tenaga Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	51.908.677.883.000	35.819.377.000	941.843.081.000	8.029.278.456.000	1.661.209.186.000	4.214.405.404.000	462.942.252.000	4.194.813.593.000	71.448.989.232.000
	Realisasi	51.565.741.413.596	34.979.396.529	848.249.390.359	7.244.115.536.405	1.559.670.735.267	4.165.468.048.036	393.880.261.855	4.070.807.616.459	69.882.912.398.506
	%	99,34	97,65	90,06	90,22	93,89	98,84	85,08	97,04	97,81
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran			548.891.502.000	4.284.238.461.000					4.833.129.963.000
	Realisasi			99.342.539.132	3.278.502.962.519					3.377.845.501.651
	%	-	-	18,10	76,52	-	-	-	-	69,89
C.	PENERIMAAN BUKAN PAJAK									
	Anggaran			8.097.845.000	70.292.948.000	85.562.626.000	55.553.857.000		79.150.623.000	298.657.899.000
	Realisasi			5.550.076.370	69.957.121.730	79.820.647.777	50.987.306.497		74.817.880.791	281.133.033.165
	%	-	-	68,54	99,52	93,29	91,78		94,53	94,13
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran			76.510.165.000	20.456.254.327.000		32.206.064.000		1.400.026.371.000	21.964.996.927.000
	Realisasi			65.908.267.565	18.786.996.383.406		31.125.811.954		1.348.768.473.746	20.232.798.936.671
	%	-	-	86,14	91,84	-	96,65	-	96,34	92,11
E.	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI (HLDN)									
	Anggaran								1.000.000.000	1.000.000.000
	Realisasi								714.260.322	714.260.322
	%	-	-	-	-	-	-	-	71,43	71,43
F	HIBAH LUAR NEGERI (HLN)									
	Anggaran	1.628.186.000		27.970.000.000						29.598.186.000
	Realisasi	1.386.405.171		20.912.384.880						22.298.790.051
	%	85,15		74,77						75%
G	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLLN)									
	Anggaran	90.833.333.000		17.587.742.000	4.177.404.000	1.176.262.041.000	25.782.000	1.966.521.000	1.960.792.000	1.292.813.615.000
	Realisasi	90.833.317.038		17.587.729.081	4.177.003.336	1.166.366.322.776	25.781.160	1.966.520.510	1.960.792.000	1.282.917.465.901
	%	100,00	-	100,00	99,99	99,16	100,00	100,00	100,00	99,23
	TOTAL									
	Anggaran	52.001.139.402.000	35.819.377.000	1.620.900.335.000	32.844.241.596.000	2.923.033.853.000	4.302.191.107.000	464.908.773.000	5.676.951.379.000	99.869.185.822.000
	Realisasi	51.657.961.135.805	34.979.396.529	1.057.550.387.387	29.383.749.007.396	2.805.857.705.820	4.247.606.947.647	395.846.782.365	5.497.069.023.318	95.080.620.386.267
	%	99,34%	97,65%	65,24	89,46	95,99	98,73	85,15	96,83	95,21

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 20.e

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Provinsi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	9.828.999.000	7.723.428.140	78,58
2	Sumatera Utara	13.023.122.000	11.239.363.919	86,30
3	Sumatera Barat	8.652.918.000	6.039.459.590	69,80
4	Riau	7.928.014.000	6.904.373.140	87,09
5	Jambi	7.143.348.000	6.686.666.708	93,61
6	Sumatera Selatan	7.107.496.000	6.836.307.441	96,18
7	Bengkulu	7.292.361.000	6.715.667.076	92,09
8	Lampung	7.223.932.000	6.638.432.617	91,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	6.403.068.000	5.156.313.976	80,53
10	Kepulauan Riau	6.585.029.000	6.247.127.016	94,87
11	DKI Jakarta	6.371.428.000	5.824.304.456	91,41
12	Jawa Barat	12.569.646.000	9.874.798.038	78,56
13	Jawa Tengah	13.331.297.000	12.060.255.963	90,47
14	D.I. Yogyakarta	4.433.753.000	4.001.161.378	90,24
15	Jawa Timur	14.634.506.000	10.816.148.823	73,91
16	Banten	5.178.936.000	3.988.403.576	77,01
17	Bali	7.004.306.000	6.101.156.042	87,11
18	Nusa Tenggara Barat	7.858.424.000	7.117.639.150	90,57
19	Nusa Tenggara Timur	11.010.091.000	10.513.820.242	95,49
20	Kalimantan Barat	7.631.288.000	5.860.252.049	76,79
21	Kalimantan Tengah	7.953.734.000	7.284.291.023	91,58
22	Kalimantan Selatan	8.164.770.000	7.360.150.414	90,15
23	Kalimantan Timur	7.560.098.000	3.160.330.306	41,80
24	Kalimantan Utara	6.332.646.000	5.485.619.336	86,62
25	Sulawesi Utara	8.698.848.000	8.225.181.000	94,55
26	Sulawesi Tengah	8.022.161.000	7.743.676.904	96,53
27	Sulawesi Selatan	11.487.731.000	10.395.806.682	90,49
28	Sulawesi Tenggara	9.005.904.000	8.542.753.780	94,86
29	Gorontalo	6.430.822.000	5.807.402.897	90,31
30	Sulawesi Barat	6.394.057.000	5.499.176.666	86,00
31	Maluku	8.072.953.000	5.514.821.271	68,31
32	Maluku Utara	8.398.798.000	7.550.646.719	89,90
33	Papua	8.888.486.000	8.518.124.212	95,83
34	Papua Barat	9.295.871.000	4.441.558.480	47,78
35	Papua Selatan	7.150.933.000	3.740.360.923	52,31
36	Papua Tengah	7.399.292.000	4.050.012.081	54,74
37	Papua Pegunungan	6.480.649.000	290.877.025	4,49
38	Papua Barat Daya	7.017.782.000	3.929.947.000	56,00
Dekonsentrasi Kemenkes		313.967.497.000	253.885.816.059	80,86%

Sumber : OMSPAN, Kementerian Keuangan, 6 Februari 2025

Lampiran 20.f

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	DAK Fisik					DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Kontrak (Rp)	%	Penyerapan (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	526.066.625.625	515.346.785.926	97,96	423.951.324.469	80,59	425.384.775.000	363.306.456.500	85,41
2	Sumatera Utara	666.520.887.181	638.495.883.730	95,80	599.793.044.759	89,99	728.227.130.000	599.278.100.846	82,29
3	Sumatera Barat	267.033.485.353	254.121.795.447	95,16	246.818.478.268	92,43	332.544.024.000	266.959.519.199	80,28
4	Riau	231.077.274.605	204.483.750.732	88,49	192.527.228.951	83,32	275.067.238.000	227.189.906.219	82,59
5	Jambi	194.594.302.428	188.867.804.359	97,06	186.789.636.322	95,99	239.928.759.000	199.447.361.269	83,13
6	Sumatera Selatan	327.938.791.341	320.520.031.542	97,74	297.159.349.447	90,61	429.668.756.000	360.038.895.143	83,79
7	Bengkulu	356.408.503.125	345.842.984.178	97,04	326.582.231.861	91,63	213.476.437.000	152.294.390.748	71,34
8	Lampung	257.340.680.452	250.348.789.575	97,28	244.980.966.646	95,20	407.028.500.000	343.046.320.203	84,28
9	Bangka Belitung	161.477.466.906	156.726.705.773	97,06	156.512.079.173	96,93	87.782.549.000	73.504.452.370	83,73
10	Kepulauan Riau	107.058.221.000	98.258.328.476	91,78	96.451.061.915	90,09	112.492.228.000	87.139.084.860	77,46
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	634.480.643.944	602.721.537.438	94,99	595.602.758.560	93,87	1.329.056.837.000	1.141.970.753.681	85,92
13	Jawa Tengah	773.542.943.662	743.424.678.759	96,11	742.847.740.956	96,03	1.167.057.924.000	1.083.941.073.440	92,88
14	DI Yogyakarta	161.405.272.210	150.459.497.959	93,22	150.445.411.458	93,21	147.664.172.000	137.916.678.564	93,40
15	Jawa Timur	582.606.162.191	553.302.363.558	94,97	549.980.682.852	94,40	1.115.178.366.000	981.123.748.362	87,98
16	Banten	145.547.503.000	141.819.742.296	97,44	140.533.476.003	96,56	313.202.328.000	292.090.273.428	93,26
17	Bali	99.926.932.789	93.028.077.561	93,10	93.028.067.560	93,10	142.651.627.000	110.407.514.064	77,40
18	Nusa Tenggara Barat	364.950.167.712	356.666.958.512	97,73	347.325.789.744	95,17	255.769.253.000	226.135.459.399	88,41
19	Nusa Tenggara Timur	771.317.137.306	720.399.740.547	93,40	664.280.167.966	86,12	592.782.130.000	464.864.861.272	78,42
20	Kalimantan Barat	276.603.308.268	264.974.596.534	95,80	257.384.234.374	93,05	355.645.866.000	296.219.248.002	83,29
21	Kalimantan Tengah	398.326.911.124	388.612.026.397	97,56	383.304.993.302	96,23	264.315.056.000	201.075.033.570	76,07
22	Kalimantan Selatan	251.447.943.788	245.549.510.924	97,65	245.373.109.366	97,58	274.946.810.000	214.874.168.371	78,15
23	Kalimantan Timur	245.688.725.694	235.521.979.292	95,86	228.505.952.261	93,01	202.494.617.000	149.624.181.515	73,89
24	Kalimantan Utara	80.633.246.046	75.357.353.655	93,46	72.019.298.916	89,32	74.130.693.000	55.650.685.752	75,07
25	Sulawesi Utara	489.454.308.381	473.258.623.573	96,69	438.583.307.184	89,61	228.931.497.000	174.012.538.131	76,01
26	Sulawesi Tengah	336.380.201.339	322.389.896.385	95,84	280.191.073.264	83,30	299.901.079.000	259.064.191.682	86,38
27	Sulawesi Selatan	916.172.425.317	874.629.603.627	95,47	766.870.919.208	83,70	632.991.576.000	527.327.262.703	83,31
28	Sulawesi Tenggara	421.592.608.742	412.010.956.474	97,73	390.035.879.757	92,51	378.919.454.000	324.855.211.510	85,73
29	Gorontalo	186.272.398.263	176.630.549.483	94,82	156.374.232.240	83,95	127.448.285.000	101.342.038.022	79,52
30	Sulawesi Barat	142.817.194.833	141.197.899.352	98,87	124.727.665.675	87,33	135.111.393.000	103.494.649.835	76,60
31	Maluku	224.757.626.537	212.886.388.510	94,72	163.441.178.990	72,72	321.256.221.000	260.136.079.025	80,97
32	Maluku Utara	293.065.593.979	288.136.610.852	98,32	181.568.583.225	61,95	203.146.370.000	178.971.017.779	88,10
33	Papua	168.438.449.165	164.365.300.043	97,58	128.004.604.474	75,99	195.742.718.000	180.279.965.799	92,10
34	Papua Barat	218.400.108.176	213.610.765.029	97,81	185.977.212.783	85,15	101.522.068.000	81.725.389.537	80,50
35	Papua Selatan	119.804.159.944	116.555.804.372	97,29	85.464.796.788	71,34	125.864.701.000	91.894.806.689	73,01
36	Papua Tengah	254.232.251.871	243.730.150.081	95,87	199.643.252.259	78,53	169.172.536.000	153.839.461.898	90,94
37	Papua Pegunungan	909.834.862.954	897.527.737.564	98,65	700.832.242.342	77,03	205.740.565.000	192.555.306.174	93,59
38	Papua Barat Daya	211.101.790.667	125.778.312.135	59,58	86.476.251.515	40,96	116.427.614.000	101.777.653.971	87,42
TOTAL		12.774.317.115.918	12.207.559.520.650	95,56	11.130.388.284.833	87,13	12.728.672.152.000	10.759.373.739.532	84,53

Sumber : Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2025

KET:

1. Data berdasarkan SIKD Kemenkeu tanggal 30 Juni 2025
2. Data Realisasi Non Fisik TA 2023 berdasarkan data dari e-Renggar (Biro Perencanaan dan Anggaran) per 30 Juni 2025
3. Untuk Realisasi BOK Dinas hingga 30 Juni 2025
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024

Lampiran 20.g

ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2024

No	Komponen Anggaran Kesehatan	APBN (miliar rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat	
	A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga	53.700.847.760.000,0
	1. Kementerian Kesehatan	53.700.847.760.000
	B. Melalui Belanja Non K/L	46.168.338.062.000,0
	1. Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah	
	i Anggaran iuran PBI JKN	46.168.338.062.000,0
	ii Anggaran bantuan Iuran PBPU BP	
2.	Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke daerah dan Dana Desa	29.922.581.056.286,0
	A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	13.400.000.000.000,0
	B. BOK dan BOKB	16.117.972.152.000,0
	C. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua	404.608.904.286,0
3.	Anggaran Kesehatan (1+2+3)	129.791.766.878.286,0
4.	Total Belanja Negara	120.262.328.032.708,00
RASIO ANGGARAN KESEHATAN (%)		107,92

Sumber : Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2025

Data diolah dari BA SIKD OTSUS

Lampiran 21

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	105.074	579	105.653
2	Sumatera Utara	294.912	760	295.672
3	Sumatera Barat	108.687	654	109.341
4	Riau	118.754	579	119.333
5	Jambi	65.774	236	66.010
6	Sumatera Selatan	146.996	567	147.563
7	Bengkulu	37.540	164	37.704
8	Lampung	161.132	581	161.713
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.746	142	26.888
10	Kepulauan Riau	38.532	162	38.694
11	DKI Jakarta	147.040	1.714	148.754
12	Jawa Barat	798.315	9.462	807.777
13	Jawa Tengah	562.560	9.321	571.881
14	DI Yogyakarta	32.946	843	33.789
15	Jawa Timur	586.849	6.377	593.226
16	Banten	205.697	933	206.630
17	Bali	57.214	2.759	59.973
18	Nusa Tenggara Barat	104.803	916	105.719
19	Nusa Tenggara Timur	121.633	853	122.486
20	Kalimantan Barat	102.252	768	103.020
21	Kalimantan Tengah	51.676	236	51.912
22	Kalimantan Selatan	73.302	1.672	74.974
23	Kalimantan Timur	70.338	945	71.283
24	Kalimantan Utara	13.671	127	13.798
25	Sulawesi Utara	41.068	159	41.227
26	Sulawesi Tengah	55.028	194	55.222
27	Sulawesi Selatan	167.177	1.624	168.801
28	Sulawesi Tenggara	56.284	218	56.502
29	Gorontalo	22.822	194	23.016
30	Sulawesi Barat	30.935	549	31.484
31	Maluku	40.054	199	40.253
32	Maluku Utara	25.501	473	25.974
33	Papua	20.631	373	21.004
34	Papua Barat	12.296	90	12.386
35	Papua Selatan	11.573	185	11.758
36	Papua Tengah	30.397	47	30.444
37	Papua Pegunungan	31.153	11	31.164
38	Papua Barat Daya	13.767	132	13.899
39	Luar Negeri	-	117	117
40	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	-	2	2
Indonesia		4.591.129	45.917	4.637.046
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)		10,00		

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Lampiran 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022 - 2024

No	Provinsi	2022		2023		2024	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	104.606	106	84.158	134	105.074	100
2	Sumatera Utara	278.350	119	228.416	202	294.912	154
3	Sumatera Barat	104.250	90	82.561	118	108.687	92
4	Riau	130.895	98	111.873	136	118.754	109
5	Jambi	62.550	57	57.448	50	65.774	47
6	Sumatera Selatan	158.257	81	152.646	106	146.996	109
7	Bengkulu	34.822	28	31.233	38	37.540	28
8	Lampung	143.950	92	129.468	110	161.132	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.739	32	22.880	39	26.746	32
10	Kepulauan Riau	48.390	24	47.832	49	38.532	32
11	DKI Jakarta	171.574	101	162.338	115	147.040	108
12	Jawa Barat	820.850	571	825.157	792	798.315	749
13	Jawa Tengah	497.850	359	460.916	466	562.560	438
14	DI Yogyakarta	57.609	39	35.083	26	32.946	29
15	Jawa Timur	536.550	486	510.566	499	586.849	484
16	Banten	224.050	175	230.488	209	205.697	205
17	Bali	66.008	64	62.601	40	57.214	58
18	Nusa Tenggara Barat	98.211	95	88.770	97	104.803	84
19	Nusa Tenggara Timur	118.400	160	73.350	135	121.633	126
20	Kalimantan Barat	91.081	98	81.811	136	102.252	110
21	Kalimantan Tengah	44.150	44	40.711	77	51.676	60
22	Kalimantan Selatan	73.021	81	62.670	102	73.302	92
23	Kalimantan Timur	61.050	74	60.269	83	70.338	74
24	Kalimantan Utara	13.190	10	12.633	20	13.671	8
25	Sulawesi Utara	37.022	9	26.112	42	41.068	43
26	Sulawesi Tengah	58.954	48	36.259	67	55.028	73
27	Sulawesi Selatan	143.851	175	137.884	184	167.177	172
28	Sulawesi Tenggara	54.038	64	43.407	74	56.284	65
29	Gorontalo	20.139	21	18.713	23	22.822	30
30	Sulawesi Barat	27.182	46	24.034	48	30.935	40
31	Maluku	35.172	20	27.372	77	40.054	75
32	Maluku Utara	24.304	38	20.719	50	25.501	48
33	Papua	65.958	21	14.745	29	20.631	37
34	Papua Barat	20.694	46	5.884	31	12.296	17
35	Papua Selatan	-	-	9.614	23	11.573	48
36	Papua Tengah	-	-	9.112	13	30.397	14
37	Papua Pegunungan	-	-	400	9	31.153	4
38	Papua Barat Daya	-	-	862	11	13.767	21
39	Luar Negeri	-	-	400	-	0	14
40	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	-	-	862	-	0	21
Indonesia		4.452.717	3.572	4.032.257	4.460	4.591.129	4.150

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 23

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu						
		Grup 1: Kehamilan dengan komplikasi abortus (000-008)	Grup 2: Hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas (011-016)	Grup 3: Perdarahan obstetrik (020, 043-046, 067, 071, 072)	Grup 4: Infeksi terkait kehamilan (023, 0085, 086, 091)	Grup 5: Komplikasi obstetrik lain (022, 073, 087, 088, 090)	Grup 6: Komplikasi manajemen yang tidak terantisipasi (029, 074, 089)	Grup 7: Komplikasi non obstetrik (010, 024, 098, 099, G00-G99, I00-I99, J00-J99, K00-K99)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	3	27	32	5	11	2	20
2	Sumatera Utara	5	38	36	8	22	6	39
3	Sumatera Barat	4	14	18	3	10	1	42
4	Riau	2	32	19	2	6		48
5	Jambi	4	14	8	2	2	1	16
6	Sumatera Selatan	2	30	23	6	14	1	33
7	Bengkulu		6	8	2	2		10
8	Lampung	1	25	29	2	8		35
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	8	8	2		1	12
10	Kepulauan Riau		4	16	1	1		10
11	DKI Jakarta	4	27	19	3	18	1	36
12	Jawa Barat	14	209	188	31	71	9	227
13	Jawa Tengah	4	96	78	20	60	2	178
14	DI Yogyakarta		7	1	2	9		10
15	Jawa Timur	7	101	83	22	56	5	210
16	Banten	5	54	47	12	17	3	67
17	Bali		13	8		6		31
18	Nusa Tenggara Barat	2	20	25	3	11	1	22
19	Nusa Tenggara Timur	3	23	29	14	14	1	42
20	Kalimantan Barat	3	17	39	3	19	1	28
21	Kalimantan Tengah		23	13	1	7	1	15
22	Kalimantan Selatan	3	31	22	5	12		19
23	Kalimantan Timur	3	15	18	3	14		21
24	Kalimantan Utara		2	1		1		4
25	Sulawesi Utara	2	8	8	7	8	2	8
26	Sulawesi Tengah	2	21	18	7	11	1	13
27	Sulawesi Selatan	3	42	37	5	25	3	57
28	Sulawesi Tenggara	2	19	15	2	8		19
29	Gorontalo	2	5	2	2	4	2	13
30	Sulawesi Barat	3	9	9	2	6		11
31	Maluku	3	14	29	3	12		14
32	Maluku Utara	3	9	15	5	13		3
33	Papua	2	5	14	6	7		3
34	Papua Barat		2	5	4	3	1	2
35	Papua Selatan	1	4	18	8	7		10
36	Papua Tengah		2	6	1	2		3
37	Papua Pegunungan			2		1	1	
38	Papua Barat Daya		4	4	2	6		5
39	Luar Negeri		2	2	1		1	8
40	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	1	6	3	2	2		7
Indonesia		94	988	955	209	506	47	1.351

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 24

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Ibu Hamil				Ibu Bersalin/Nifas								
		K4*		K6		Jumlah	Persalinan Di Fasyankes**		KF1		KF Lengkap		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	74.137	67,69	59567	54,39	109.518	75.260	68,72	75.409	68,86	69.764	63,70	74.951	68,44
2	Sumatera Utara	252.296	82,41	243989	79,70	306.135	249.186	81,40	247.763	80,93	234.513	76,60	245.457	80,18
3	Sumatera Barat	74.426	64,33	68169	58,92	115.692	74.911	64,75	76.219	65,88	74.548	64,44	76.105	65,78
4	Riau	100.903	81,44	96448	77,84	123.903	98.021	79,11	107.238	86,55	98.349	79,38	107.291	86,59
5	Jambi	58.048	84,49	54866	79,86	68.707	55.141	80,26	56.766	82,62	56.172	81,76	56.762	82,61
6	Sumatera Selatan	143.796	92,83	136166	87,91	154.901	138.966	89,71	138.928	89,69	135.253	87,32	138.858	89,64
7	Bengkulu	31.914	80,51	27852	70,26	39.640	30.829	77,77	31.048	78,32	29.965	75,59	28.452	71,78
8	Lampung	146.724	86,17	132322	77,71	170.267	144.894	85,10	141.833	83,30	138.495	81,34	141.714	83,23
9	Kep. Bangka Belitung	20.807	73,72	20002	70,87	28.223	20.720	73,42	20.726	73,44	20.531	72,75	20.708	73,37
10	Kepulauan Riau	34.554	85,61	33618	83,29	40.363	34.297	84,97	34.439	85,32	32.520	80,57	34.407	85,24
11	DKI Jakarta	199.666	130,03	185643	120,90	153.549	194.623	126,75	192.014	125,05	190.994	124,39	190.742	124,22
12	Jawa Barat	777.938	93,53	744754	89,54	831.737	759.690	91,34	763.993	91,86	754.630	90,73	761.641	91,57
13	Jawa Tengah	411.628	68,61	397314	66,23	599.919	404.805	67,48	401.107	66,86	383.315	63,89	383.622	63,95
14	DI Yogyakarta	31.942	81,73	31676	81,05	39.084	32.440	83,00	32.436	82,99	31.099	79,57	32.449	83,02
15	Jawa Timur	472.980	76,71	463307	75,14	616.615	491.015	79,63	491.507	79,71	481.787	78,13	479.549	77,77
16	Banten	216.988	101,76	209798	98,39	213.238	210.026	98,49	209.779	98,38	207.237	97,19	180.446	84,62
17	Bali	53.320	89,36	51414	86,16	59.670	54.066	90,61	54.063	90,60	53.264	89,26	53.993	90,49
18	Nusa Tenggara Barat	82.103	73,08	71807	63,91	112.351	77.987	69,41	80.213	71,40	76.390	67,99	52.222	46,48
19	Nusa Tenggara Timur	70.374	55,74	63001	49,90	126.252	78.112	61,87	79.068	62,63	75.764	60,01	78.561	62,23
20	Kalimantan Barat	82.588	77,25	69373	64,89	106.914	76.085	71,16	80.413	75,21	75.713	70,82	79.876	74,71
21	Kalimantan Tengah	41.956	78,29	53589	100,00	53.589	37.020	69,08	37.412	69,81	35.397	66,05	37.267	69,54
22	Kalimantan Selatan	56.724	72,78	52936	67,92	77.944	55.928	71,75	57.660	73,98	56.673	72,71	57.644	73,96
23	Kalimantan Timur	58.057	79,01	52601	71,59	73.478	58.163	79,16	59.219	80,59	55.207	75,13	57.735	78,57
24	Kalimantan Utara	12.081	85,08	11212	78,96	14.200	11.836	83,35	11.792	83,04	10.844	76,37	11.805	83,13
25	Sulawesi Utara	32.034	74,26	25705	59,59	43.139	32.864	76,18	33.037	76,58	31.257	72,46	32.984	76,46
26	Sulawesi Tengah	45.350	78,99	40938	71,31	57.409	45.941	80,02	44.201	76,99	42.791	74,54	43.664	76,06
27	Sulawesi Selatan	127.695	72,51	120526	68,44	176.097	128.300	72,86	128.479	72,96	126.503	71,84	128.505	72,97
28	Sulawesi Tenggara	37.533	63,60	32126	54,44	59.015	41.085	69,62	41.642	70,56	39.778	67,40	41.453	70,24
29	Gorontalo	17.442	72,51	15171	63,07	24.055	18.943	78,75	18.960	78,82	18.542	77,08	18.833	78,29
30	Sulawesi Barat	13.266	40,31	16553	50,30	32.911	20.752	63,05	21.213	64,46	20.021	60,83	20.676	62,82
31	Maluku	28.192	67,16	22341	53,22	41.978	22.231	52,96	28.043	66,80	26.381	62,84	27.277	64,98
32	Maluku Utara	19.955	75,79	18031	68,48	26.330	18.845	71,57	21.079	80,06	20.447	77,66	21.071	80,03
33	Papua	11.410	53,05	8232	38,27	21.510	15.125	70,32	14.768	68,66	13.355	62,09	14.882	69,19
34	Papua Barat	5.096	40,63	3490	27,83	12.541	7.569	60,35	7.545	60,16	6.370	50,79	6.615	52,75
35	Papua Selatan	3.897	32,98	2259	19,12	11.816	9.050	76,59	8.931	75,58	5.762	48,76	9.142	77,37
36	Papua Tengah	6.172	19,86	3764	12,11	31.073	8.900	28,64	8.847	28,47	4.879	15,70	6.594	21,22
37	Papua Pegunungan	1.572	4,77	560	1,70	32.976	2.738	8,30	2.360	7,16	1.379	4,18	887	2,69
38	Papua Barat Daya	7.061	49,76	5626	39,65	14.190	7.055	49,72	7.213	50,83	6.644	46,82	6.902	48,64
Indonesia		3.862.625	80,12	3.646.746	75,64	4.820.929	3.843.419	79,72	3.867.363	80,22	3.742.533	77,63	3.761.742	78,03

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: *cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"

** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

Lampiran 25

CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	T2+ Bumil	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(14)	(15)
1	Aceh	110.077	58.277	52,94
2	Sumatera Utara	308.035	228.284	74,11
3	Sumatera Barat	116.426	68.764	59,06
4	Riau	124.564	83.525	67,05
5	Jambi	69.024	60.534	87,70
6	Sumatera Selatan	155.670	155.009	99,58
7	Bengkulu	39.920	23.304	58,38
8	Lampung	170.972	137.108	80,19
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.328	22.464	79,30
10	Kepulauan Riau	40.577	42.639	105,08
11	DKI Jakarta	152.737	256.740	168,09
12	Jawa Barat	835.669	750.577	89,82
13	Jawa Tengah	614.681	716.657	116,59
14	DI Yogyakarta	37.996	35.950	94,62
15	Jawa Timur	619.420	607.266	98,04
16	Banten	202.729	282.470	139,33
17	Bali	68.582	73.492	107,16
18	Nusa Tenggara Barat	112.964	69.667	61,67
19	Nusa Tenggara Timur	127.188	57.544	45,24
20	Kalimantan Barat	107.535	51.921	48,28
21	Kalimantan Tengah	53.989	23.441	43,42
22	Kalimantan Selatan	78.453	80.944	103,18
23	Kalimantan Timur	73.862	34.658	46,92
24	Kalimantan Utara	14.285	14.326	100,29
25	Sulawesi Utara	43.531	22.516	51,72
26	Sulawesi Tengah	57.746	45.546	78,87
27	Sulawesi Selatan	177.038	195.460	110,41
28	Sulawesi Tenggara	59.345	34.494	58,12
29	Gorontalo	24.254	15.017	61,92
30	Sulawesi Barat	33.093	10.961	33,12
31	Maluku	42.507	19.888	46,79
32	Maluku Utara	26.598	16.636	62,55
33	Papua	21.768	7.091	32,58
34	Papua Barat	12.649	15.116	119,50
35	Papua Selatan	11.883	5.669	47,71
36	Papua Tengah	31.606	6.886	21,79
37	Papua Pegunungan	33.173	1.029	3,10
38	Papua Barat Daya	14.289	7.946	55,61
Indonesia		4.853.163	4.339.816	89,42

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 26

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah WUS Tidak Hamil (15-39 Tahun)	Imunisasi T2+ Pada WUS Tidak Hamil	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(14)	(15)
1	Aceh	1.119.660	37.877	3,38
2	Sumatera Utara	3.075.013	157.283	5,11
3	Sumatera Barat	1.137.592	33.363	2,93
4	Riau	1.349.301	80.891	6,00
5	Jambi	734.339	31.465	4,28
6	Sumatera Selatan	1.694.975	54.823	3,23
7	Bengkulu	414.544	5.899	1,42
8	Lampung	1.793.482	61.900	3,45
9	Kepulauan Bangka Belitung	304.250	4.774	1,57
10	Kepulauan Riau	442.230	49.060	11,09
11	DKI Jakarta	2.051.097	83.787	4,08
12	Jawa Barat	9.819.640	245.871	2,50
13	Jawa Tengah	6.949.529	1.051.971	15,14
14	DI Yogyakarta	660.172	2.405	0,36
15	Jawa Timur	7.520.414	764.053	10,16
16	Banten	2.484.003	96.330	3,88
17	Bali	809.156	19.248	2,38
18	Nusa Tenggara Barat	1.094.986	27.187	2,48
19	Nusa Tenggara Timur	1.125.107	37.171	3,30
20	Kalimantan Barat	1.134.233	14.224	1,25
21	Kalimantan Tengah	569.934	5.998	1,05
22	Kalimantan Selatan	810.004	30.718	3,79
23	Kalimantan Timur	823.671	26.298	3,19
24	Kalimantan Utara	150.159	5.715	3,81
25	Sulawesi Utara	492.827	1.671	0,34
26	Sulawesi Tengah	613.268	12.261	2,00
27	Sulawesi Selatan	1.911.151	36.632	1,92
28	Sulawesi Tenggara	569.791	6.810	1,20
29	Gorontalo	250.015	5.727	2,29
30	Sulawesi Barat	307.161	2.667	0,87
31	Maluku	410.658	2.955	0,72
32	Maluku Utara	276.712	2.586	0,93
33	Papua	193.383	2.628	1,36
34	Papua Barat	121.404	5.764	4,75
35	Papua Selatan	90.999	2.105	2,31
36	Papua Tengah	286.427	1.240	0,43
37	Papua Pegunungan	290.520	238	0,08
38	Papua Barat Daya	131.699	1.955	1,48
Indonesia		54.013.506	3.013.550	5,58

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 27.a

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah WUS (15-39 Tahun)	Imunisasi T2 + Pada WUS	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(14)	(15)
1	Aceh	1.229.737	96.154	7,82
2	Sumatera Utara	3.383.048	385.567	11,40
3	Sumatera Barat	1.254.018	102.127	8,14
4	Riau	1.473.865	164.416	11,16
5	Jambi	803.363	91.999	11,45
6	Sumatera Selatan	1.850.645	209.832	11,34
7	Bengkulu	454.464	29.203	6,43
8	Lampung	1.964.454	199.008	10,13
9	Kepulauan Bangka Belitung	332.578	27.238	8,19
10	Kepulauan Riau	482.807	91.699	18,99
11	DKI Jakarta	2.203.834	340.527	15,45
12	Jawa Barat	10.655.309	996.448	9,35
13	Jawa Tengah	7.564.210	1.768.628	23,38
14	DI Yogyakarta	698.168	38.355	5,49
15	Jawa Timur	8.139.834	1.371.319	16,85
16	Banten	2.686.732	378.800	14,10
17	Bali	877.738	92.740	10,57
18	Nusa Tenggara Barat	1.207.950	96.854	8,02
19	Nusa Tenggara Timur	1.252.295	94.715	7,56
20	Kalimantan Barat	1.241.768	66.145	5,33
21	Kalimantan Tengah	623.923	29.439	4,72
22	Kalimantan Selatan	888.457	111.662	12,57
23	Kalimantan Timur	897.533	60.956	6,79
24	Kalimantan Utara	164.444	20.041	12,19
25	Sulawesi Utara	536.358	24.187	4,51
26	Sulawesi Tengah	671.014	57.807	8,61
27	Sulawesi Selatan	2.088.189	232.092	11,11
28	Sulawesi Tenggara	629.136	41.304	6,57
29	Gorontalo	274.269	20.744	7,56
30	Sulawesi Barat	340.254	13.628	4,01
31	Maluku	453.165	22.843	5,04
32	Maluku Utara	303.310	19.222	6,34
33	Papua	215.151	9.719	4,52
34	Papua Barat	134.053	20.880	15,58
35	Papua Selatan	102.882	7.774	7,56
36	Papua Tengah	318.033	8.126	2,56
37	Papua Pegunungan	323.693	1.267	0,39
38	Papua Barat Daya	145.988	9.901	6,78
Indonesia		58.866.669	7.353.366	12,49

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 27.b

**PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Persentase Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase Ibu Hamil Positif HIV (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	110.077	71.988	65,40	7	0,01
2	Sumatera Utara	308.035	147.781	47,98	63	0,04
3	Sumatera Barat	116.426	63.607	54,63	19	0,03
4	Riau	124.564	97.010	77,88	34	0,04
5	Jambi	69.024	37.578	54,44	4	0,01
6	Sumatera Selatan	155.670	145.419	93,41	30	0,02
7	Bengkulu	39.920	17.482	43,79	13	0,07
8	Lampung	170.972	102.259	59,81	57	0,06
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.328	23.394	82,58	10	0,04
10	Kepulauan Riau	40.577	24.799	61,12	19	0,08
11	DKI Jakarta	152.737	140.859	92,22	115	0,08
12	Jawa Barat	835.669	611.611	73,19	433	0,07
13	Jawa Tengah	614.681	450.781	73,34	201	0,04
14	DI Yogyakarta	52.812	40.597	76,87	15	0,04
15	Jawa Timur	619.420	462.461	74,66	443	0,10
16	Banten	202.729	228.479	112,70	109	0,05
17	Bali	68.582	58.853	85,81	90	0,15
18	Nusa Tenggara Barat	112.964	74.908	66,31	29	0,04
19	Nusa Tenggara Timur	127.188	62.329	49,01	107	0,17
20	Kalimantan Barat	107.535	51.763	48,14	45	0,09
21	Kalimantan Tengah	53.989	30.899	57,23	28	0,09
22	Kalimantan Selatan	78.453	59.960	76,43	31	0,05
23	Kalimantan Timur	73.862	63.476	85,94	74	0,12
24	Kalimantan Utara	14.285	11.904	83,33	5	0,04
25	Sulawesi Utara	43.531	23.080	53,02	41	0,18
26	Sulawesi Tengah	57.746	27.581	47,76	28	0,10
27	Sulawesi Selatan	177.038	117.516	66,38	61	0,05
28	Sulawesi Tenggara	59.345	31.315	52,77	35	0,11
29	Gorontalo	24.254	14.734	60,75	6	0,04
30	Sulawesi Barat	33.093	16.638	50,28	4	0,02
31	Maluku	42.507	19.611	46,14	55	0,28
32	Maluku Utara	26.598	11.626	43,71	44	0,38
33	Papua	21.768	11.971	54,99	139	1,16
34	Papua Barat	12.649	8.500	67,20	42	0,49
35	Papua Selatan	11.883	8.036	67,63	15	0,19
36	Papua Tengah	31.606	8.336	26,37	59	0,71
37	Papua Pegunungan	33.173	2.877	8,67	54	1,88
38	Papua Barat Daya	14.289	7.505	52,52	20	0,27
Indonesia		4.867.979	3.389.523	69,63	2.584	0,08

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 27.c

**PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1	Aceh	110.077	78.452	71,27	648	0,83
2	Sumatera Utara	308.035	117.097	38,01	1.059	0,90
3	Sumatera Barat	116.426	73.155	62,83	550	0,75
4	Riau	124.564	97.108	77,96	1.053	1,08
5	Jambi	69.024	46.813	67,82	437	0,93
6	Sumatera Selatan	155.670	145.870	93,70	834	0,57
7	Bengkulu	39.920	21.662	54,26	265	1,22
8	Lampung	170.972	108.457	63,44	915	0,84
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.328	21.482	75,83	389	1,81
10	Kepulauan Riau	40.577	25.145	61,97	440	1,75
11	DKI Jakarta	152.737	153.235	100,33	1.543	1,01
12	Jawa Barat	835.669	627.402	75,08	6.857	1,09
13	Jawa Tengah	614.681	403.418	65,63	4.823	1,20
14	DI Yogyakarta	52.812	34.977	66,23	312	0,89
15	Jawa Timur	619.420	450.493	72,73	7.207	1,60
16	Banten	202.729	204.904	101,07	2.206	1,08
17	Bali	68.582	55.879	81,48	703	1,26
18	Nusa Tenggara Barat	112.964	84.288	74,61	1.928	2,29
19	Nusa Tenggara Timur	127.188	82.664	64,99	3.253	3,94
20	Kalimantan Barat	107.535	56.238	52,30	1.363	2,42
21	Kalimantan Tengah	53.989	30.850	57,14	780	2,53
22	Kalimantan Selatan	78.453	62.212	79,30	1.211	1,95
23	Kalimantan Timur	73.862	55.943	75,74	1.264	2,26
24	Kalimantan Utara	14.285	11.939	83,58	186	1,56
25	Sulawesi Utara	43.531	16.185	37,18	274	1,69
26	Sulawesi Tengah	57.746	44.021	76,23	857	1,95
27	Sulawesi Selatan	177.038	129.428	73,11	2.824	2,18
28	Sulawesi Tenggara	59.345	36.972	62,30	1.007	2,72
29	Gorontalo	24.254	18.644	76,87	472	2,53
30	Sulawesi Barat	33.093	21.656	65,44	377	1,74
31	Maluku	42.507	21.007	49,42	772	3,67
32	Maluku Utara	26.598	17.092	64,26	591	3,46
33	Papua	21.768	11.937	83,54	496	4,16
34	Papua Barat	12.649	5.628	44,49	261	4,64
35	Papua Selatan	11.883	10.896	91,69	459	4,21
36	Papua Tengah	31.606	6.673	21,11	310	4,65
37	Papua Pegunungan	33.173	1.671	5,04	51	3,05
38	Papua Barat Daya	14.289	4.517	31,61	120	2,66
Indonesia		4.867.979	3.396.010	69,76	49.097	1,45

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 27.d

**PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Persentase Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Positif Sifilis	Persentase Ibu Hamil Positif Sifilis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	110077	68.516	62,24	8	0,01
2	Sumatera Utara	308035	123.861	40,21	26	0,01
3	Sumatera Barat	116426	48.662	41,80	2	0,00
4	Riau	124564	90.077	72,31	29	0,02
5	Jambi	69024	35.417	51,31	6	0,01
6	Sumatera Selatan	155670	131.410	84,42	25	0,02
7	Bengkulu	39920	12.468	31,23	4	0,01
8	Lampung	170972	99.957	58,46	22	0,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	28328	21.751	76,78	3	0,01
10	Kepulauan Riau	40577	21.837	53,82	11	0,03
11	DKI Jakarta	152737	112.072	73,38	275	0,18
12	Jawa Barat	835669	574.768	68,78	598	0,07
13	Jawa Tengah	614681	415.885	67,66	104	0,02
14	DI Yogyakarta	52812	35.149	66,55	28	0,05
15	Jawa Timur	619420	428.492	69,18	111	0,02
16	Banten	202729	218.933	107,99	154	0,08
17	Bali	68582	57.087	83,24	171	0,25
18	Nusa Tenggara Barat	112964	69.975	61,94	14	0,01
19	Nusa Tenggara Timur	127188	51.839	40,76	100	0,08
20	Kalimantan Barat	107535	41.227	38,34	46	0,04
21	Kalimantan Tengah	53989	25.334	46,92	13	0,02
22	Kalimantan Selatan	78453	54.039	68,88	6	0,01
23	Kalimantan Timur	73862	54.270	73,47	94	0,13
24	Kalimantan Utara	14285	11.148	78,04	16	0,11
25	Sulawesi Utara	43531	14.384	33,04	15	0,03
26	Sulawesi Tengah	57746	26.289	45,53	15	0,03
27	Sulawesi Selatan	177038	110.696	62,53	53	0,03
28	Sulawesi Tenggara	59345	29.060	48,97	32	0,05
29	Gorontalo	24254	13.063	53,86	21	0,09
30	Sulawesi Barat	33093	14.863	44,91	2	0,01
31	Maluku	42507	16.115	37,91	364	0,86
32	Maluku Utara	26598	9.792	36,81	69	0,26
33	Papua	21768	6.067	27,87	523	2,40
34	Papua Barat	12649	3.388	26,78	226	1,79
35	Papua Selatan	11883	3.781	31,82	358	3,01
36	Papua Tengah	31606	4.838	15,31	424	1,34
37	Papua Pegunungan	33173	2.050	6,18	130	0,39
38	Papua Barat Daya	14289	3.520	24,63	242	1,69
Indonesia		4.867.979	3.062.080	62,90	4.340	0,14

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 28.a

PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun)			Ibu Hamil		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%	Jumlah	Jumlah mendapat TTD Minimal 90 Tablet	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	295.045	193.871	65,71	30.030	22.270	74,16
2	Sumatera Utara	821.420	710.210	86,46	91.374	74.672	81,72
3	Sumatera Barat	296.264	314.836	106,27	85.034	72.661	85,45
4	Riau	323.607	305.119	94,29	58.660	51.766	88,25
5	Jambi	167.900	141.230	84,12	42.068	38.994	92,69
6	Sumatera Selatan	493.544	435.456	88,23	109.526	104.301	95,23
7	Bengkulu	102.580	91.655	89,35	31.686	27.401	86,48
8	Lampung	455.786	401.091	88,00	115.802	109.664	94,70
9	Kepulauan Bangka Belitung	68.672	67.280	97,97	20.657	18.869	91,34
10	Kepulauan Riau	95.992	94.711	98,67	36.542	35.159	96,22
11	DKI Jakarta	397.315	369.294	92,95	165.399	163.147	98,64
12	Jawa Barat	2.113.723	2.025.701	95,84	773.736	733.425	94,79
13	Jawa Tengah	1.617.036	1.647.461	101,88	368.845	319.593	86,65
14	DI Yogyakarta	160.781	159.294	99,08	36.711	33.120	90,22
15	Jawa Timur	1.759.660	1.558.638	88,58	523.130	479.446	91,65
16	Banten	527.490	515.308	97,69	225.601	214.168	94,93
17	Bali	182.148	177.688	97,55	59.506	53.497	89,90
18	Nusa Tenggara Barat	286.053	266.426	93,14	93.023	78.988	84,91
19	Nusa Tenggara Timur	285.787	270.178	94,54	75.189	58.017	77,16
20	Kalimantan Barat	260.437	260.847	100,16	79.493	67.503	84,92
21	Kalimantan Tengah	126.656	109.627	86,55	36.121	28.378	78,56
22	Kalimantan Selatan	180.682	168.920	93,49	67.646	55.267	81,70
23	Kalimantan Timur	181.026	153.645	84,87	61.916	54.580	88,15
24	Kalimantan Utara	27.262	27.623	101,32	12.670	10.976	86,63
25	Sulawesi Utara	107.333	71.742	66,84	9.080	7.486	82,44
26	Sulawesi Tengah	154.535	142.053	91,92	43.272	36.206	83,67
27	Sulawesi Selatan	408.700	365.737	89,49	104.120	83.811	80,49
28	Sulawesi Tenggara	136.204	96.505	70,85	36.116	26.117	72,31
29	Gorontalo	59.964	50.411	84,07	18.084	14.770	81,67
30	Sulawesi Barat	65.866	62.709	95,21	24.701	19.452	78,75
31	Maluku	102.157	49.952	48,90	113.619	9.485	8,35
32	Maluku Utara	58.077	43.748	75,33	10.683	7.598	71,12
33	Papua	51.413	8.373	16,29	3.612	2.414	66,83
34	Papua Barat	16.996	1.638	9,64	1.695	932	54,99
35	Papua Selatan	48.629	3.245	6,67	3.213	1.977	61,53
36	Papua Tengah	48.118	4.092	8,50	2.465	934	37,89
37	Papua Pegunungan	26.575	533	2,01	1.011	241	23,84
38	Papua Barat Daya	23.391	1.468	6,28	399	248	62,16
Indonesia		12.534.824	11.368.315	90,69	3.572.435	3.117.533	87,27

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 28.b

PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Gizi Kurang	Ibu Hamil Risiko KEK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	67,79	87,12
2	Sumatera Utara	81,02	90,19
3	Sumatera Barat	81,96	85,54
4	Riau	79,53	84,55
5	Jambi	88,57	92,79
6	Sumatera Selatan	95,83	93,77
7	Bengkulu	89,93	83,64
8	Lampung	86,65	84,64
9	Kepulauan Bangka Belitung	80,45	77,94
10	Kepulauan Riau	83,60	80,12
11	DKI Jakarta	70,49	93,58
12	Jawa Barat	67,37	66,50
13	Jawa Tengah	75,72	76,52
14	DI Yogyakarta	76,88	78,99
15	Jawa Timur	77,67	82,23
16	Banten	76,85	67,27
17	Bali	80,34	76,99
18	Nusa Tenggara Barat	51,75	64,20
19	Nusa Tenggara Timur	41,89	47,60
20	Kalimantan Barat	71,31	71,88
21	Kalimantan Tengah	86,43	69,08
22	Kalimantan Selatan	73,55	88,16
23	Kalimantan Timur	73,95	78,27
24	Kalimantan Utara	67,25	38,91
25	Sulawesi Utara	72,82	74,45
26	Sulawesi Tengah	81,11	80,50
27	Sulawesi Selatan	74,57	78,90
28	Sulawesi Tenggara	73,90	78,76
29	Gorontalo	78,25	91,59
30	Sulawesi Barat	33,02	57,31
31	Maluku	66,89	74,77
32	Maluku Utara	82,23	75,79
33	Papua	50,29	54,66
34	Papua Barat	60,95	19,83
35	Papua Selatan	18,70	29,49
36	Papua Tengah	98,66	97,70
37	Papua Pegunungan	100,00	52,46
38	Papua Barat Daya	88,12	89,47
Indonesia		71,29	75,12

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

*KEK=Kekurangan Energi Kronik

Lampiran 29

JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah PUS	PUS Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi																				Prevalensi KB		
			Peserta KB Modern																		Peserta KB Tradisional			Jumlah PUS Peserta KB	
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	MAL	%	Jumlah	%	Jumlah	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Aceh	879.901	25.498	2,90	305.183	35	77.894	8,85	31.925	3,63	249	0,03	22.423	2,55	36.201	4,11	8.873	1,01	508.246	57,76	8.647	0,98	516.893	58,74	
2	Sumatera Utara	2.331.071	50.121	2,15	572.747	25	180.966	7,76	42.004	1,80	1.858	0,08	104.546	4,48	242.922	10,42	20.009	0,86	1.215.173	52,13	20.231	0,87	1.235.404	53,00	
3	Sumatera Barat	856.089	33.106	3,87	241.795	28,24	39.794	4,65	51.719	6,04	1.110	0,13	33.231	3,88	68.677	8,02	12.504	1,46	481.936	56,30	10.647	1,24	492.583	57,54	
4	Riau	1.161.964	66.188	5,70	398.644	34,31	127.425	10,97	32.533	2,80	605	0,05	24.993	2,15	89.866	7,73	6.901	0,59	747.155	64,30	16.207	1,39	763.362	65,70	
5	Jambi	665.763	13.649	2,05	273.735	41,12	78.571	11,80	19.388	2,91	414	0,06	13.098	1,97	51.671	7,76	4.605	0,69	455.131	68,36	3.358	0,50	458.489	68,87	
6	Sumatera Selatan	1.493.070	17.707	1,19	612.410	41,02	82.590	5,53	32.775	2,20	792	0,05	16.759	1,12	202.917	13,59	7.880	0,53	973.830	65,22	9.192	0,62	983.022	65,84	
7	Bengkulu	362.987	11.713	3,23	151.738	41,80	21.310	5,87	10.653	2,93	299	0,08	8.288	2,28	43.951	12,11	2.524	0,70	250.476	69,00	1.385	0,38	251.861	69,39	
8	Lampung	1.600.679	18.119	1,13	678.816	42,41	109.658	6,85	48.367	3,02	685	0,04	17.436	1,09	189.978	11,87	10.673	0,67	1.073.732	67,08	5.460	0,34	1.079.192	67,42	
9	Kep. Bangka Belitung	263.568	5.677	2,15	108.760	41,26	38.469	14,60	8.151	3,09	240	0,09	8.290	3,15	13.941	5,29	1.643	0,62	185.171	70,26	3.217	1,22	188.388	71,48	
10	Kepulauan Riau	390.363	28.907	7,41	90.409	23,16	40.710	10,43	21.308	5,46	225	0,06	16.729	4,29	17.340	4,44	3.458	0,89	219.086	56,12	8.488	2,17	227.574	58,30	
11	DKI Jakarta	1.522.715	18.727	1,23	318.134	20,89	72.785	4,78	137.836	9,05	1.298	0,09	41.758	2,74	35.639	2,34	2.687	0,18	628.864	41,30	15.141	0,99	644.005	42,29	
12	Jawa Barat	8.580.526	119.252	1,39	3.316.199	38,65	759.466	8,85	742.793	8,66	6.719	0,08	209.634	2,44	299.733	3,49	65.339	0,76	5.519.135	64,32	49.708	0,58	5.568.843	64,90	
13	Jawa Tengah	6.273.980	223.253	3,56	2.334.162	37,20	291.289	4,64	474.663	7,57	7.480	0,12	213.174	3,40	504.475	8,04	62.109	0,99	4.110.605	65,52	47.098	0,75	4.157.703	66,27	
14	DI Yogyakarta	569.068	62.125	10,92	118.623	20,85	21.545	3,79	103.841	18,25	1.290	0,23	18.109	3,18	26.714	4,69	6.631	1,17	358.878	63,06	5.873	1,03	364.751	64,10	
15	Jawa Timur	6.935.265	116.626	1,68	2.915.273	42,04	565.092	8,15	478.347	6,90	7.742	0,11	227.752	3,28	370.835	5,35	57.436	0,83	4.739.103	68,33	36.074	0,52	4.775.177	68,85	
16	Banten	2.165.794	24.725	1,14	989.998	45,71	116.703	5,39	103.200	4,76	1.240	0,06	36.125	1,67	92.049	4,25	14.067	0,65	1.378.107	63,63	10.993	0,51	1.389.100	64,14	
17	Bali	679.043	26.245	3,86	149.615	22,03	26.258	3,87	148.211	21,83	816	0,12	32.767	4,83	20.987	3,09	6.286	0,93	411.185	60,55	7.146	1,05	418.331	61,61	
18	Nusa Tenggara Barat	996.390	5.436	0,55	374.744	37,61	21.125	2,12	50.375	5,06	511	0,05	13.097	1,31	123.264	12,37	11.022	1,11	599.574	60,17	1.653	0,17	601.227	60,34	
19	Nusa Tenggara Timur	788.337	1.689	0,21	117.794	14,94	12.660	1,61	28.949	3,67	1.044	0,13	39.029	4,95	121.282	15,38	12.169	1,54	334.616	42,45	8.801	1,12	343.417	43,56	
20	Kalimantan Barat	924.830	3.575	0,39	360.639	39,00	115.106	12,45	28.821	3,12	348	0,04	12.911	1,40	31.155	3,37	6.122	0,66	558.677	60,41	2.920	0,32	561.597	60,72	
21	Kalimantan Tengah	532.308	2.551	0,48	240.090	45,10	64.139	12,05	8.341	1,57	232	0,04	5.104	0,96	30.546	5,74	2.197	0,41	353.200	66,35	1.778	0,33	354.978	66,69	
22	Kalimantan Selatan	731.057	7.301	1,00	286.846	39,24	170.066	23,26	15.559	2,13	509	0,07	10.236	1,40	30.315	4,15	3.730	0,51	524.562	71,75	2.949	0,40	527.511	72,16	
23	Kalimantan Timur	655.939	18.719	2,85	168.453	25,68	84.516	12,88	49.542	7,55	539	0,08	18.878	2,88	28.966	4,42	4.745	0,72	374.358	57,07	6.231	0,95	380.589	58,02	
24	Kalimantan Utara	115.780	2.177	1,88	33.608	29,03	11.880	10,26	6.000	5,18	12	0,01	2.432	2,10	8.873	7,66	761	0,66	65.743	56,78	999	0,86	66.742	57,65	
25	Sulawesi Utara	392.171	702	0,18	131.087	33,43	28.348	7,23	15.417	3,93	247	0,06	7.617	1,94	56.023	14,29	2.924	0,75	242.365	61,80	1.109	0,28	243.474	62,08	
26	Sulawesi Tengah	498.813	1.191	0,24	130.334	26,13	56.780	11,38	26.727	5,36	382	0,08	12.607	2,53	61.679	12,37	4.143	0,83	293.843	58,91	1.166	0,23	295.009	59,14	
27	Sulawesi Selatan	1.410.521	13.067	0,93	447.783	31,75	129.627	9,19	46.551	3,30	823	0,06	32.628	2,31	158.116	11,21	13.865	0,98	842.460	59,73	8.307	0,59	850.767	60,32	
28	Sulawesi Tenggara	433.430	2.569	0,59	111.394	25,70	53.037	12,24	9.860	2,27	176	0,04	6.072	1,40	47.418	10,94	7.536	1,74	238.062	54,93	2.078	0,48	240.140	55,40	
29	Gorontalo	205.841	576	0,28	58.085	28,22	21.217	10,31	8.105	3,94	248	0,12	5.681	2,76	37.647	18,29	2.643	1,28	134.202	65,20	633	0,31	134.835	65,50	
30	Sulawesi Barat	237.291	2.296	0,97	55.009	23,18	24.728	10,42	6.633	2,80	150	0,06	4.760	2,01	29.879	12,59	4.040	1,70	127.495	53,73	3.077	1,30	130.572	55,03	
31	Maluku	260.576	258	0,10	58.341	22,39	8.398	3,22	1.684	0,65	55	0,02	2.507	0,96	23.894	9,17	2.404	0,92	97.541	37,43	1.321	0,51	98.862	37,94	
32	Maluku Utara	248.931	138	0,06	68.118	27,36	3.864	1,55	1.904	0,76	54	0,02	1.415	0,57	51.163	20,55	1.315	0,53	127.971	51,41	334	0,13	128.305	51,54	
33	Papua	624.576	1.779	0,28	102.424	16,40	6.978	1,12	1.913	0,31	126	0,02	408	0,07	20.561	3,29	1.868	0,30	136.057	21,78	2.043	0,33	138.100	22,11	
34	Papua Barat	169.030	365	0,22	34.603	20,47	3.963	2,34	1.218	0,72	76	0,04	1.413	0,84	9.695	5,74	820	0,49	52.153	30,85	1.134	0,67	53.287	31,53	
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indonesia			45.957.667	926.027	2,01	16.355.593	35,59	3.466.957	7,54	2.795.313	6,08	38.594	0,08	1.225.579	2,67	3.178.372	6,92	375.929	0,82	28.362.364	61,71	305.398	0,66	28.667.762	62,38

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga (dengan wieghting), BKKBN

Keterangan:
AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
MOP : Metode Operasi Pria
MOW : Metode Operasi Wanita
MAL : Metode Amenorea Laktasi
- : Tidak ada data

Lampiran 30

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN
MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	PUS Peserta KB Modern										Jumlah
		RS Pemerintah/ TNI/Polri	RS Swasta	Puskesmas/ Klinik TNI/ Polri	Klinik Swasta	Praktek Dokter	Pustu/ Pusling/ Bidan Desa	Praktek Mandiri Bidan	Mobil Pelayanan KB	Toko Obat/Apotik	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	36.424	9.348	117.142	35.382	945	132.673	133.799	3.549	28.892	1.587	508.246
2	Sumatera Utara	80.772	57.628	250.311	117.067	1.095	201.274	373.359	31.908	89.726	2.178	1.215.173
3	Sumatera Barat	38.428	22.927	88.476	15.698	5.222	147.143	116.837	8.616	36.476	2.113	481.936
4	Riau	21.814	2.793	108.078	51.003	1.416	169.397	255.656	3.569	94.661	887	747.155
5	Jambi	11.953	9.049	38.028	12.498	6.211	138.909	17.085	18.351	47.317	1.965	455.131
6	Sumatera Selatan	18.622	13.707	124.233	25.861	10.739	362.244	370.126	17.971	28.301	2.026	97.383
7	Bengkulu	8.873	3.518	52.267	5.768	3.239	64.999	96.335	3.423	11.412	642	250.476
8	Lampung	13.283	22.307	106.013	37.759	15.382	244.002	548.847	25.885	57.601	2.653	1.073.732
9	Kep. Bangka Belitung	69	5.202	16.605	511	3.272	61.319	61.134	1.917	23.041	671	185.171
10	Kepulauan Riau	13.614	16.705	34.094	16.666	498	25.509	64.251	2.882	39.867	518	219.086
11	DKI Jakarta**	69.004	42.123	149.874	11.229	11.009	2.004	174.726	136	50.873	15.601	628.864
12	Jawa Barat	218.988	297.718	653.676	316.135	103.767	703.093	2.580.540	2.177	607.514	15.934	5.519.135
13	Jawa Tengah	248.345	208.403	715.945	169.872	71.245	677.303	1.618.971	18.188	365.704	16.629	4.110.605
14	DI Yogyakarta	358	22.244	57.963	29.815	5.289	11.585	131.128	1.029	6.284	1.185	358.878
15	Jawa Timur	248.525	266.139	519.706	187.608	76.937	1.075.800	1.866.017	12.658	478.935	6.778	4.739.103
16	Banten	28.832	59.652	187.395	172.275	16.398	194.082	630.289	12.893	74.443	1.848	1.378.107
17	Bali	40.819	38.343	5.386	2.865	29.977	42.429	152.749	1.863	22.228	267	411.185
18	Nusa Tenggara Barat	22.736	9.734	8.106	12.232	11.802	317.083	126.038	6.511	10.617	1.761	599.574
19	Nusa Tenggara Timur	42.016	11.535	134.943	3.742	1.693	127.911	7.107	1.797	2.735	1.137	334.616
20	Kalimantan Barat	20.686	9.931	917	35.135	8.409	198.194	158.034	1.156	34.872	560	558.677
21	Kalimantan Tengah	8.316	2.542	57.844	12.062	3.132	12.806	104.914	2.036	33.343	951	3.532
22	Kalimantan Selatan	14.586	6.676	53.793	18.738	6.955	133.114	16.387	759	11.258	666	524.562
23	Kalimantan Timur	26.657	25.296	69.509	28.658	9.021	34.041	116.729	1.212	62.396	839	374.358
24	Kalimantan Utara	4.833	559	2.249	3.666	2.875	56	17.132	210	8.293	85	65.743
25	Sulawesi Utara	12.765	8.361	76.556	10.207	12.264	54.981	49.883	3.281	12.853	1.214	242.365
26	Sulawesi Tengah	20.087	6.155	70.399	3.424	2.849	144.714	26.537	2.194	15.357	2.127	293.843
27	Sulawesi Selatan	56.109	22.071	248.736	42.027	6.592	267.608	124.787	3.876	68.829	1.825	84.246
28	Sulawesi Tenggara	10.665	364	74.432	4.162	3.597	82.039	31.017	9.104	16.966	244	238.062
29	Gorontalo	1.097	2.667	51.545	608	2.681	3.214	16.591	730	10.195	603	134.202
30	Sulawesi Barat	6.497	239	35.054	3.162	1.165	49.315	1.945	1.611	827	581	127.495
31	Maluku	4.647	835	31.602	1.327	925	38.057	13.873	295	2.051	1.274	97.541
32	Maluku Utara	3.402	580	48.133	1.367	858	62.329	7.313	3.251	623	115	127.971
33	Papua	9.601	1.706	94.564	4.194	953	18.934	6.735	615	2.047	380	139.729
34	Papua Barat	4.115	841	29.531	961	801	9.451	4.666	55	1.613	119	52.153
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		1.419.684	1.238.462	4.545.557	1.530.601	474.799	5.957.336	10.340.290	236.011	2.523.471	96.153	28.362.364

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga (dengan wieghting), BKKBN

Keterangan:

- : Tidak ada data

**Data DKI Jakarta tidak ada pemilahan PUS Peserta KB Modern menurut Tempat Pelayanan

Lampiran 31

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Sasaran Ibu Bersalin	Persalinan di Fasyankes	Peserta KB Pasca Salin		Peserta KB Pasca Persalinan															
				ABS	%	Kondom	%	Pil	%	Suntik	%	AKDR	%	MOW	%	MOP	%	Implan	%	MAL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Aceh	109.518	76.059	33.466	44,00	2.661	7,95	7.249	21,66	12.453	37,21	1.461	4,37	1.349	4,03	112	0,33	1.374	4,11	7.609	22,74
2	Sumatera Utara	306.135	248.661	50.809	20,43	6.175	12,15	13.125	25,83	16.686	32,84	1.751	3,45	2.544	5,01	414	0,81	8.493	16,72	7.167	14,11
3	Sumatera Barat	115.692	76.028	32.497	42,74	3.328	10,24	4.633	14,26	15.104	46,48	2.981	9,17	1.669	5,14	4	0,01	3.779	11,63	2.802	8,62
4	Riau	123.903	106.788	48.607	45,52	5.957	12,26	14.042	28,89	26.144	53,79	2.003	4,12	584	1,20	39	0,08	4.575	9,41	2.519	5,18
5	Jambi	68.707	56.526	43.960	77,77	1.527	3,47	6.602	15,02	31.031	70,59	1.041	2,37	739	1,68	21	0,05	1.565	3,56	1.434	3,26
6	Sumatera Selatan	154.901	139.010	96.632	69,51	13.857	14,34	18.924	19,58	45.103	46,68	1.809	1,87	567	0,59	169	0,17	10.590	10,96	5.613	5,81
7	Bengkulu	39.640	31.059	22.503	72,45	1.454	6,46	2.557	11,36	15.154	67,34	729	3,24	159	0,71	3	0,01	2.084	9,26	363	1,61
8	Lampung	170.267	141.845	69.530	49,02	8.342	12,00	7.539	10,84	44.130	63,47	1.491	2,14	482	0,69	11	0,02	4.640	6,67	3.875	5,57
9	Kep. Bangka Belitung	28.223	20.737	15.597	75,21	502	3,22	3.262	20,91	9.295	59,59	388	2,49	573	3,67	7	0,04	1.206	7,73	364	2,33
10	Kepulauan Riau	40.363	34.435	25.009	72,63	2.833	11,33	3.155	12,62	8.462	33,84	1.486	5,94	781	3,12	10	0,04	2.416	9,66	5.866	23,46
11	DKI Jakarta	153.549	194.761	102.987	52,88	10.798	10,48	12.470	12,11	55.345	53,74	22.083	21,44	2.545	2,47	6	0,01	14.010	13,60	12.427	12,07
12	Jawa Barat	831.737	763.143	522.228	68,43	16.860	3,23	78.761	15,08	316.612	60,63	46.760	8,95	10.541	2,02	1.732	0,33	31.572	6,05	19.390	3,71
13	Jawa Tengah	599.919	404.387	255.768	63,25	19.667	7,69	15.616	6,11	149.026	58,27	30.018	11,74	10.234	4,00	146	0,06	38.223	14,94	19.193	7,50
14	DI Yogyakarta	39.084	32.454	6.811	20,99	918	13,48	299	4,39	885	12,99	3.417	50,17	565	8,30	2	0,03	696	10,22	29	0,43
15	Jawa Timur	616.615	492.299	369.148	74,98	15.049	4,08	30.254	8,20	222.074	60,16	35.847	9,71	10.385	2,81	225	0,06	31.529	8,54	23.785	6,44
16	Banten	213.238	211.125	179.047	84,81	9.952	5,56	27.038	15,10	116.583	65,11	6.535	3,65	891	0,50	87	0,05	16.012	8,94	1.949	1,09
17	Bali	59.670	54.070	38.796	71,75	6.462	16,66	2.710	6,99	12.574	32,41	6.862	17,69	3.133	8,08	49	0,13	2.552	6,58	4.454	11,48
18	Nusa Tenggara Barat	112.351	80.262	49.818	62,07	785	1,58	857	1,72	32.246	64,73	3.623	7,27	899	1,80	80	0,16	8.133	16,33	6.624	13,30
19	Nusa Tenggara Timur	126.252	77.203	11.490	14,88	120	1,04	367	3,19	3.875	33,72	1.167	10,16	1.653	14,39	24	0,21	5.053	43,98	1.595	13,88
20	Kalimantan Barat	106.914	79.385	47.772	60,18	1.119	2,34	7.690	16,10	24.729	51,76	1.530	3,20	934	1,96	9	0,02	1.405	2,94	10.356	21,68
21	Kalimantan Tengah	53.589	39.574	26.772	67,65	249	0,93	4.410	16,47	19.854	74,16	331	1,24	208	0,78	3	0,01	1.439	5,38	278	1,04
22	Kalimantan Selatan	77.944	57.407	46.433	80,88	439	0,95	9.430	20,31	30.262	65,17	1.201	2,59	942	2,03	28	0,06	2.138	4,60	1.993	4,29
23	Kalimantan Timur	73.478	58.459	43.076	73,69	2.487	5,77	5.472	12,70	21.335	49,53	4.629	10,75	1.517	3,52	13	0,03	4.401	10,22	3.222	7,48
24	Kalimantan Utara	14.200	11.779	6.540	55,52	317	4,85	297	4,54	1.564	23,91	555	8,49	336	5,14	-	#VALUE!	912	13,94	2.559	39,13
25	Sulawesi Utara	43.139	32.958	18.760	56,92	380	2,03	4.448	23,71	12.119	64,60	703	3,75	229	1,22	6	0,03	2.997	15,98	27	0,14
26	Sulawesi Tengah	57.409	44.205	30.032	67,94	1.544	5,14	7.957	26,50	10.918	36,35	2.119	7,06	1.067	3,55	20	0,07	5.592	18,62	815	2,71
27	Sulawesi Selatan	176.097	128.701	53.031	41,20	1.111	2,10	6.934	13,08	24.054	45,36	3.815	7,19	1.811	3,41	15	0,03	13.717	25,87	2.771	5,23
28	Sulawesi Tenggara	59.015	41.453	19.961	48,15	652	3,27	5.292	26,51	7.758	38,87	354	1,77	182	0,91	22	0,11	2.457	12,31	3.365	16,86
29	Gorontalo	24.055	18.943	12.212	64,47	155	1,27	996	8,16	5.154	42,20	580	4,75	204	1,67	3	0,02	3.646	29,86	1.474	12,07
30	Sulawesi Barat	32.911	20.888	5.403	25,87	222	4,11	658	12,18	2.131	39,44	262	4,85	333	6,16	26	0,48	1.237	22,89	534	9,88
31	Maluku	41.978	27.166	5.773	21,25	100	1,73	699	12,11	3.561	61,68	198	3,43	190	3,29	3	0,05	1.049	18,17	340	5,89
32	Maluku Utara	26.330	20.541	17.024	82,88	142	0,83	1.872	11,00	7.864	46,19	692	4,06	90	0,53	1	0,01	2.881	16,92	3.482	20,45
33	Papua	21.510	14.703	1.131	7,69	16	1,41	76	6,72	940	83,11	9	0,80	12	1,06	-	-	310	27,41	36	3,18
34	Papua Barat	12.541	8.088	603	7,46	5	0,83	39	6,47	429	71,14	53	8,79	81	13,43	1	0,17	71	11,77	14	2,32
35	Papua Selatan	11.816	9.404	1.135	12,07	22	1,94	230	20,26	877	77,27	9	0,79	32	2,82	-	-	187	16,48	-	-
36	Papua Tengah	31.073	8.988	563	6,26	14	2,49	31	5,51	264	46,89	9	1,60	91	16,16	-	-	133	23,62	21	3,73
37	Papua Pegunungan	32.976	2.539	18	0,71	-	-	3	16,67	13	72,22	-	-	-	-	-	-	2	11,11	-	-
38	Papua Barat Daya	14.190	7.167	34	0,47	-	-	1	2,94	22	64,71	-	-	5	14,71	-	-	11	32,35	-	-
Indonesia		4.820.929	3.873.200	2.310.976	59,67	136.221	5,89	305.995	13,24	1.306.630	56,54	188.501	8,16	58.557	2,53	3.291	0,14	233.087	10,09	158.345	6,85

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 34

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kematian					
		Neonatal			Bayi	Balita	
		0-7 hari	8-28 hari	0-28 hari		Anak Balita	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)
1	Aceh	641	143	784	893	31	924
2	Sumatera Utara	582	157	739	830	33	863
3	Sumatera Barat	390	153	543	735	74	809
4	Riau	587	163	750	836	14	850
5	Jambi	284	54	338	365	7	372
6	Sumatera Selatan	483	129	612	682	22	704
7	Bengkulu	238	71	309	357	14	371
8	Lampung	530	146	676	743	9	752
9	Kepulauan Bangka Belitung	133	50	183	239	20	259
10	Kepulauan Riau	173	43	216	251	11	262
11	DKI Jakarta	591	259	850	1.018	52	1.071
12	Jawa Barat	3.581	1.273	4.854	5.533	217	5.750
13	Jawa Tengah	2.425	905	3.330	4.327	584	4.912
14	D I Yogyakarta	181	56	237	293	30	323
15	Jawa Timur	2.335	882	3.217	3.754	186	3.940
16	Banten	906	255	1.161	1.325	53	1.378
17	Bali	321	118	439	600	89	689
18	Nusa Tenggara Barat	445	170	615	705	23	729
19	Nusa Tenggara Timur	617	176	793	898	27	925
20	Kalimantan Barat	579	165	744	872	37	909
21	Kalimantan Tengah	294	89	383	448	19	467
22	Kalimantan Selatan	437	146	583	673	27	701
23	Kalimantan Timur	371	115	486	589	50	639
24	Kalimantan Utara	91	31	122	156	13	169
25	Sulawesi Utara	175	130	305	336	5	341
26	Sulawesi Tengah	323	61	384	425	6	431
27	Sulawesi Selatan	884	263	1.147	1.305	35	1.340
28	Sulawesi Tenggara	301	67	368	447	17	464
29	Gorontalo	107	24	131	153	0	153
30	Sulawesi Barat	222	42	264	307	22	330
31	Maluku	117	21	138	179	23	203
32	Maluku Utara	181	33	214	270	15	285
33	Papua	135	39	174	196	1	197
34	Papua Barat	79	20	99	105	2	107
35	Papua Selatan	91	24	115	149	27	177
36	Papua Tengah	108	45	153	166	0	166
37	Papua Pegunungan	7	1	8	9	0	9
38	Papua Barat Daya	55	10	65	75	0	75
39	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	22	11	33	34	0	34
40	Luar Negeri	75	20	95	115	11	126
Indonesia		20.097	6.560	26.657	31.393	1.806	33.206

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

Keterangan : *= kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)														Penyebab Kematian Bayi(0 Hari-11 Bulan)														Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)																				
		N1: Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	N3: Birth trauma	N4: Complications of Intrapartum events	N5: Convulsions and disorders of cerebral status	N6: Infection	N7: Respiratory and cardiovascular disorders	N8: Other neonatal conditions	N9: Low birth weight and prematurity	N10: Miscellaneous	N11: Neonatal death of unspecified cause	P1 - P20	Belum Tahu	Lainnya	N1: Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	N3: Birth trauma	N4: Complications of Intrapartum events	N5: Convulsions and disorders of cerebral status	N6: Infection	N7: Respiratory and cardiovascular disorders	N8: Other neonatal conditions	N9: Low birth weight and prematurity	N10: Miscellaneous	N11: Neonatal death of unspecified cause	P1 - P20	Belum Tahu	Lainnya	N1: Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	N3: Birth trauma	N4: Complications of Intrapartum events	N5: Convulsions and disorders of cerebral status	N6: Infection	N7: Respiratory and cardiovascular disorders	N8: Other neonatal conditions	N9: Low birth weight and prematurity	N10: Miscellaneous	N11: Neonatal death of unspecified cause	P1 - P20	Belum Tahu	Lainnya							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)
1	Aceh	63	7	12	22	8	49	395	35	186	5	9	0			63	7	12	22	8	49	396	35	187	5	9	99	1		63	7	12	22	8	50	396	35	187	5	9	129	1								
2	Sumatera Utara	53	11	6	31	6	41	377	35	151	2	25	2		1	53	11	6	31	6	41	378	35	151	2	25	89	2		53	11	6	31	6	41	378	35	151	2	25	121	3								
3	Sumatera Barat	49	4	5	17	2	46	246	17	147	1	15	1			50	4	5	17	2	46	246	17	147	1	15	185			50	4	5	17	2	47	246	17	147	1	15	258									
4	Riau	71	17	4	70	12	60	254	20	212	6	24	0			71	17	4	70	12	61	254	20	212	6	24	84	1		71	17	4	70	12	61	254	20	212	6	24	96	3								
5	Jambi	32	4	1	14	7	24	151	5	96	1	6	0			32	4	1	14	7	24	151	5	96	1	6	23	1		32	4	1	14	7	24	151	5	96	1	6	30	1								
6	Sumatera Selatan	39	13	5	17	6	59	284	9	169	1	12	1			39	13	5	17	6	59	284	9	169	1	12	68			39	13	5	17	6	59	284	9	169	1	12	90									
7	Bengkulu	35	1	4	9	3	36	132	8	76	8	1		1		35	1	4	9	3	36	132	8	76	8	1	43	2		35	1	4	9	3	36	132	8	76	8	1	57	2								
8	Lampung	94	10	2	66	6	46	266	17	153	3	14	0		1	94	10	2	66	6	46	267	17	153	3	14	64	1		94	10	2	66	6	46	267	17	153	3	14	73	1								
9	Kepulauan Bangka Belitung	17	4		3	2	26	50	19	55	1	5	1			18	4		3	2	26	50	19	56	1	5	55			18	4		3	2	26	50	19	56	1	5	75									
10	Kepulauan Riau	23	1	1	9	4	19	85	3	64		7	1			23	1	1	9	4	19	85	3	64		7	35			23	1	1	9	4	19	85	3	64		7	46									
11	DKI Jakarta	123	2	2	27	12	148	246	27	249	1	10	4	1		123	2	2	27	12	148	247	27	251	1	10	166	2	1	124	2	2	28	12	148	248	27	251	1	10	215	2	1							
12	Jawa Barat	426	51	20	319	35	664	2	110	1166	9	54	10			427	51	20	324	35	664	2	110	1169	9	54	663	8		428	51	20	325	35	666	2000	112	1169	9	54	872	9								
13	Jawa Tengah	346	51	9	244	26	477	1	88	929	8	56	6			348	51	9	244	26	480	1	88	930	8	56	978	14		349	51	9	244	27	486	1	89	930	8	56	1539	22								
14	DI Yogyakarta	34	5	1	12	2	34	72	8	66	1	2	0			34	5	1	12	2	34	72	8	66	1	2	55	1		34	5	1	12	2	34	72	8	66	1	2	85	1								
15	Jawa Timur	283	33	13	173	30	517	1	65	891	4	34	5			284	33	13	173	30	518	1179	66	891	4	34	520	9		284	33	13	173	30	518	1179	66	891	4	34	704	11								
16	Banten	142	12	4	33	12	139	418	29	343	5	20	3		3	142	12	4	33	12	139	420	29	344	5	20	160	5		142	12	4	33	12	139	420	29	344	5	20	212	6								
17	Bali	67	2	1	20	4	87	143	19	88	2	3	3			67	2	1	20	4	88	143	19	88	2	3	163			67	2	1	20	4	88	143	19	88	2	3	252									
18	Nusa Tenggara Barat	50	3	1	57	8	121	214	7	149	1	2	3	1		50	3	1	57	8	121	214	7	149	1	2	92		1	50	3	1	57	8	122	214	7	149	1	2	113	1	1							
19	Nusa Tenggara Timur	58	5	7	88	7	116	300	22	172	4	14	2			59	5	7	88	7	117	300	22	172	4	14	101	2		59	5	7	88	7	117	300	22	172	4	14	128	2								
20	Kalimantan Barat	68	4	2	34	4	43	340	26	209	2	12	5			68	4	2	34	4	43	341	26	209	2	12	126	1		68	4	2	34	4	43	341	26	209	2	12	163	1								
21	Kalimantan Tengah	28	12	5	29	7	54	141	11	90	1	6	0			28	12	5	29	7	54	142	11	90	1	6	62	1		28	12	5	29	7	54	142	11	90	1	6	81	1								
22	Kalimantan Selatan	59	14	1	37	4	56	196	4	203	1	7	1			59	14	1	37	4	57	196	4	203	1	7	89	2		59	14	1	37	4	57	196	4	203	1	7	116	2								
23	Kalimantan Timur	28	3	1	31	5	32	239	13	124	2	6	2			28	3	1	31	5	32	240	13	124	2	6	101	3		28	3	1	31	5	32	240	13	124	2	6	150	4								
24	Kalimantan Utara	11			10	1	14	48	1	35		1	1			11			10	1	14	48	1	35		1	35			11			10	1	14	48	1	35		1	48									
25	Sulawesi Utara	19			3	5	71	83	6	115	1	2				19			3	5	71	83	6	115	1	2	33			19			3	5	71	83	6	115	1	2	38									
26	Sulawesi Tengah	25	7		24		40	170	8	98	4	9	0			25	7		24		41	170	8	98	4	9	39			25	7		24		41	170	8	98	4	9	45									
27	Sulawesi Selatan	89	12	5	70	15	154	460	23	303	1	17	2		1	89	12	5	70	15	154	461	23	303	1	17	154	1		89	12	5	70	15	154	461	23	303	1	17	189	1								
28	Sulawesi Tenggara	19	2	4	24	4	26	147	10	112	3	17	0			19	2	4	24	4	26	147	11	112	3	17	78			19	2	4	24	4	26	147	11	112	3	17	95									
29	Gorontalo	6	1		9	2	11	46	4	52		1	0			6	1		9	2	11	46	4	52		1	21			6	1		9	2	11	46	4	52		1	21									
30	Sulawesi Barat	12	1	1	28	8	20	94	8	82	2	6	2			12	1	1	28	8	20	95	8	82	2	6	44	1		12	1	1	28	8	20	96	8	82	2	6	65	1								
31	Maluku	7	3		20		16	52	6	30	4	0				8	3		20		16	52	6	30	4	0	41			8	3		20		17	52	6	30	4	0	63									
32	Maluku Utara	16	3	3	8	2	32	84	9	51	1	5	1			16	3	3	8	2	34	84	9	51	2	5	53			16	3	3	8	2	34	84	9	51	2	5	68									
33	Papua	10	5	2	7	6	18	75	6	36		8	1			10	5	2	7	6	19	75	6	36		8	22			10	5	2	7	6	19	75	6	36		8	23									
34	Papua Barat	5		2	18	2	11	31	3	25		2	0			5		2	18	2	11	31	3	25		2	6			5		2	18	2	11	31	3	25		2	8									
35	Papua Selatan	3	2		2	8	2	19	41	2	32	1	4	0		3	2		2	8	2	19	41	2	32	1	5	33			3	2																		

Lampiran 37

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi baru lahir ditimbang		BBLR	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	42.403	40.941	96,55	1.419	3,35
2	Sumatera Utara	140.526	137.541	97,88	1.600	1,14
3	Sumatera Barat	73.048	72.057	98,64	3.629	4,97
4	Riau	68.107	64.239	94,32	1.262	1,85
5	Jambi	64.868	61.163	94,29	1.390	2,14
6	Sumatera Selatan	141.024	128.498	91,12	2.288	1,62
7	Bengkulu	34.409	33.236	96,59	967	2,81
8	Lampung	122.662	123.562	100,73	2.863	2,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	20.390	20.251	99,32	1.229	6,03
10	Kepulauan Riau	33.822	33.566	99,24	1.031	3,05
11	DKI Jakarta	192.847	189.330	98,18	1.786	0,93
12	Jawa Barat	726.174	716.672	98,69	23.170	3,19
13	Jawa Tengah	369.378	350.831	94,98	21.091	5,71
14	D I Yogyakarta	30.499	30.383	99,62	2.156	7,07
15	Jawa Timur	461.544	439.305	95,18	19.896	4,31
16	Banten	209.080	204.791	97,95	4.047	1,94
17	Bali	53.632	52.679	98,22	2.212	4,12
18	Nusa Tenggara Barat	72.055	68.715	95,36	2.918	4,05
19	Nusa Tenggara Timur	64.320	61.709	95,94	4.867	7,57
20	Kalimantan Barat	70.982	67.017	94,41	3.562	5,02
21	Kalimantan Tengah	40.727	39.628	97,30	1.589	3,90
22	Kalimantan Selatan	55.346	54.711	98,85	3.958	7,15
23	Kalimantan Timur	63.152	64.456	102,06	3.771	5,97
24	Kalimantan Utara	14.869	14.504	97,55	609	4,10
25	Sulawesi Utara	21.867	20.639	94,38	800	3,66
26	Sulawesi Tengah	42.067	41.438	98,50	2.273	5,40
27	Sulawesi Selatan	111.226	110.203	99,08	6.820	6,13
28	Sulawesi Tenggara	33.306	32.379	97,22	1.357	4,07
29	Gorontalo	17.849	17.570	98,44	1.398	7,83
30	Sulawesi Barat	18.477	18.407	99,62	1.416	7,66
31	Maluku	18.232	16.554	90,80	535	2,93
32	Maluku Utara	17.634	16.965	96,21	644	3,65
33	Papua	6.741	6.550	97,17	326	4,84
34	Papua Barat	2.002	1.985	99,15	135	6,74
35	Papua Selatan	5.214	4.862	93,25	343	6,58
36	Papua Tengah	2.783	2.357	84,69	223	8,01
37	Papua Pegunungan	955	896	93,82	26	2,72
38	Papua Barat Daya	1.536	1.521	99,02	120	7,81
Indonesia		3.465.753	3.362.111	97,01	129.726	3,7

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)*	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	105.074	80.787	76,89	75.639	71,99
2	Sumatera Utara	294.912	247.506	83,93	244.032	82,75
3	Sumatera Barat	108.687	76.005	69,93	74.766	68,79
4	Riau	118.754	108.867	91,67	101.264	85,27
5	Jambi	65.774	56.137	85,35	55.372	84,19
6	Sumatera Selatan	146.996	137.340	93,43	136.432	92,81
7	Bengkulu	37.540	30.732	81,86	29.645	78,97
8	Lampung	161.132	140.699	87,32	141.455	87,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.746	20.628	77,13	20.407	76,30
10	Kepulauan Riau	38.532	34.416	89,32	33.476	86,88
11	DKI Jakarta	147.040	203.510	138,40	207.539	141,14
12	Jawa Barat	798.315	762.178	95,47	750.827	94,05
13	Jawa Tengah	562.560	402.989	71,63	400.252	71,15
14	DI Yogyakarta	32.946	30.371	92,18	29.861	90,64
15	Jawa Timur	586.849	479.912	81,78	474.393	80,84
16	Banten	205.697	208.757	101,49	206.754	100,51
17	Bali	57.214	54.085	94,53	53.762	93,97
18	Nusa Tenggara Barat	104.803	79.600	75,95	78.546	74,95
19	Nusa Tenggara Timur	121.633	74.351	61,13	76.980	63,29
20	Kalimantan Barat	102.252	79.095	77,35	79.087	77,35
21	Kalimantan Tengah	51.676	39.770	76,96	39.739	76,90
22	Kalimantan Selatan	73.302	57.494	78,43	56.801	77,49
23	Kalimantan Timur	70.338	57.763	82,12	45.021	64,01
24	Kalimantan Utara	13.671	11.884	86,93	11.535	84,38
25	Sulawesi Utara	41.068	32.230	78,48	31.779	77,38
26	Sulawesi Tengah	55.028	45.808	83,24	45.352	82,42
27	Sulawesi Selatan	167.177	128.371	76,79	126.995	75,96
28	Sulawesi Tenggara	56.284	39.865	70,83	40.764	72,43
29	Gorontalo	22.822	18.890	82,77	18.515	81,13
30	Sulawesi Barat	30.935	20.476	66,19	20.704	66,93
31	Maluku	40.054	26.589	66,38	25.154	62,80
32	Maluku Utara	25.501	20.821	81,65	20.695	81,15
33	Papua	20.631	14.678	71,15	13.615	65,99
34	Papua Barat	12.296	6.032	49,06	3.937	32,02
35	Papua Selatan	11.573	9.763	84,36	6.513	56,28
36	Papua Tengah	30.397	7.192	23,66	5.821	19,15
37	Papua Pegunungan	31.153	2.337	7,50	1.936	6,21
38	Papua Barat Daya	13.767	3.173	23,05	7.110	51,65
Indonesia		4.591.129	3.851.101	83,88	3.792.475	82,60

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

*Se bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

Lampiran 39

**PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif Sampai 6 Bulan	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	42.403	66.219	156,17	154.587	85.466	55,29
2	Sumatera Utara	140.526	123.682	88,01	239.865	120.850	50,38
3	Sumatera Barat	73.048	60.180	82,38	89.138	67.843	76,11
4	Riau	68.107	61.151	89,79	92.157	48.056	52,15
5	Jambi	64.868	64.776	99,86	105.582	76.895	72,83
6	Sumatera Selatan	141.024	131.211	93,04	190.708	132.000	69,22
7	Bengkulu	34.409	27.806	80,81	32.663	23.270	71,24
8	Lampung	122.662	114.213	93,11	217.031	169.489	78,09
9	Kep. Bangka Belitung	20.390	16.050	78,72	31.596	18.960	60,01
10	Kepulauan Riau	33.822	30.132	89,09	43.917	33.606	76,52
11	DKI Jakarta	192.847	193.463	100,32	65.426	53.444	81,69
12	Jawa Barat	726.174	662.321	91,21	757.003	547.992	72,39
13	Jawa Tengah	369.378	352.238	95,36	539.016	387.444	71,88
14	DI Yogyakarta	30.499	28.649	93,93	26.622	19.910	74,79
15	Jawa Timur	461.544	403.731	87,47	474.775	374.213	78,82
16	Banten	209.080	191.697	91,69	297.012	228.154	76,82
17	Bali	53.632	37.387	69,71	64.790	48.139	74,30
18	Nusa Tenggara Barat	72.055	63.121	87,60	156.142	130.261	83,42
19	Nusa Tenggara Timur	64.320	63.999	99,50	114.079	85.674	75,10
20	Kalimantan Barat	70.982	67.377	94,92	76.318	41.537	54,43
21	Kalimantan Tengah	40.727	41.375	101,59	39.607	19.536	49,32
22	Kalimantan Selatan	55.346	46.520	84,05	63.414	37.513	59,16
23	Kalimantan Timur	63.152	55.232	87,46	57.524	35.969	62,53
24	Kalimantan Utara	14.869	11.249	75,65	12.247	7.362	60,11
25	Sulawesi Utara	21.867	18.499	84,60	47.177	20.042	42,48
26	Sulawesi Tengah	42.067	39.061	92,85	67.341	39.994	59,39
27	Sulawesi Selatan	111.226	102.564	92,21	141.167	102.003	72,26
28	Sulawesi Tenggara	33.306	35.548	106,73	41.909	22.711	54,19
29	Gorontalo	17.849	15.394	86,25	21.918	8.059	36,77
30	Sulawesi Barat	18.477	15.393	83,31	20.706	9.455	45,66
31	Maluku	18.232	20.778	113,96	29.673	11.449	38,58
32	Maluku Utara	17.634	16.981	96,30	17.585	8.618	49,01
33	Papua	6.741	11.670	173,12	11.285	2.405	21,31
34	Papua Barat	2.002	3.936	196,60	4.341	452	10,41
35	Papua Selatan	5.214	5.006	96,01	7.063	1.314	18,60
36	Papua Tengah	2.783	4.204	151,06	6.342	1.099	17,33
37	Papua Pegunungan	955	1.513	158,43	1.814	628	34,62
38	Papua Barat Daya	1.536	2.023	131,71	4.006	581	14,50
Indonesia		3.465.753	3.206.349	92,52	4.363.546	3.022.393	69,26

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 42

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi di Imunisasi HB0		Bayi di Imunisasi BCG	
		L+P	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	105.074	67.304	64,05	52.348	49,82
2	Sumatera Utara	294.912	192.573	65,30	209.615	71,08
3	Sumatera Barat	108.687	69.987	64,39	63.709	58,62
4	Riau	118.754	92.363	77,78	92.821	78,16
5	Jambi	65.774	58.448	88,86	53.047	80,65
6	Sumatera Selatan	146.996	128.520	87,43	134.078	91,21
7	Bengkulu	37.540	25.166	67,04	24.780	66,01
8	Lampung	161.132	119.771	74,33	124.508	77,27
9	Kep. Bangka Belitung	26.746	20.371	76,16	19.505	72,93
10	Kepulauan Riau	38.532	29.378	76,24	32.566	84,52
11	DKI Jakarta	145.717	160.622	110,23	159.288	109,31
12	Jawa Barat	798.315	717.759	89,91	726.936	91,06
13	Jawa Tengah	572.070	401.391	70,16	425.649	74,41
14	D I Yogyakarta	47.740	34.096	71,42	33.752	70,70
15	Jawa Timur	586.849	329.000	56,06	354.291	60,37
16	Banten	194.050	228.452	117,73	219.657	113,20
17	Bali	65.446	65.997	100,84	59.268	90,56
18	Nusa Tenggara Barat	104.803	70.487	67,26	72.977	69,63
19	Nusa Tenggara Timur	121.633	92.449	76,01	96.483	79,32
20	Kalimantan Barat	102.252	68.535	67,03	60.035	58,71
21	Kalimantan Tengah	51.676	25.926	50,17	28.042	54,27
22	Kalimantan Selatan	73.302	57.470	78,40	53.246	72,64
23	Kalimantan Timur	70.338	51.609	73,37	51.280	72,91
24	Kalimantan Utara	13.671	9.808	71,74	9.776	71,51
25	Sulawesi Utara	41.068	25.990	63,29	29.350	71,47
26	Sulawesi Tengah	55.028	43.351	78,78	42.845	77,86
27	Sulawesi Selatan	167.177	122.568	73,32	125.781	75,24
28	Sulawesi Tenggara	56.284	36.877	65,52	40.598	72,13
29	Gorontalo	22.822	19.483	85,37	18.792	82,34
30	Sulawesi Barat	30.935	17.691	57,19	17.237	55,72
31	Maluku	40.054	22.087	55,14	24.642	61,52
32	Maluku Utara	25.501	17.806	69,82	19.855	77,86
33	Papua	20.631	8.239	39,94	10.955	53,10
34	Papua Barat	12.296	7.122	57,92	7.680	62,46
35	Papua Selatan	11.573	7.724	66,74	11.776	101,75
36	Papua Tengah	30.397	6.356	20,91	7.807	25,68
37	Papua Pegunungan	31.153	985	3,16	2.060	6,61
38	Papua Barat Daya	13.767	7.974	57,92	8.320	60,43
Indonesia		4.610.695	3.461.735	75,08	3.525.355	76,46

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 43.a

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Bayi (Surviving Infant)	Bayi Diimunisasi							
			DPT-HB-Hib3		Polio 4*		Campak/MR		Imunisasi Dasar Lengkap	
			L + P		L + P		L + P		L + P	
			L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	102.739	38.884	37,85	55.517	54,04	43.198	42,05	38.246	37,23
2	Sumatera Utara	289.185	198.334	68,58	204.449	70,70	256.573	88,72	221.543	76,61
3	Sumatera Barat	106.698	48.574	45,52	52.803	49,49	79.558	74,56	55.130	51,67
4	Riau	116.795	80.333	68,78	84.233	72,12	106.691	91,35	91.618	78,44
5	Jambi	64.688	49.326	76,25	52.009	80,40	67.869	104,92	52.245	80,76
6	Sumatera Selatan	144.479	133.364	92,31	140.861	97,50	304.370	210,67	149.050	103,16
7	Bengkulu	36.813	23.012	62,51	23.190	62,99	36.700	99,69	27.505	74,72
8	Lampung	158.612	116.161	73,24	120.163	75,76	301.575	190,13	122.029	76,94
9	Kep. Bangka Belitung	26.296	17.817	67,76	18.214	69,27	23.177	88,14	18.825	71,59
10	Kepulauan Riau	38.084	32.325	84,88	31.887	83,73	43.806	115,02	32.549	85,47
11	DKI Jakarta	144.196	148.872	103,24	149.501	103,68	177.280	122,94	150.457	104,34
12	Jawa Barat	787.432	679.991	86,36	723.127	91,83	922.453	117,15	727.544	92,39
13	Jawa Tengah	455.801	428.344	93,98	434.963	95,43	583.498	128,02	491.526	107,84
14	D I Yogyakarta	35.526	34.009	95,73	0	0,00	54.622	153,75	34.084	95,94
15	Jawa Timur	578.348	370.695	64,10	381.911	66,03	558.742	96,61	506.527	87,58
16	Banten	191.336	213.339	111,50	218.411	114,15	240.772	125,84	222.731	116,41
17	Bali	64.576	54.234	83,98	54.771	84,82	127.965	198,16	56.332	87,23
18	Nusa Tenggara Barat	102.182	71.263	69,74	76.734	75,10	85.630	83,80	80.764	79,04
19	Nusa Tenggara Timur	118.484	69.955	59,04	87.716	74,03	105.497	89,04	60.972	51,46
20	Kalimantan Barat	100.519	38.839	38,64	52.242	51,97	83.656	83,22	48.623	48,37
21	Kalimantan Tengah	50.752	19.429	38,28	23.494	46,29	33.794	66,59	27.116	53,43
22	Kalimantan Selatan	71.978	47.311	65,73	50.513	70,18	64.741	89,95	57.129	79,37
23	Kalimantan Timur	69.285	41.648	60,11	46.327	66,86	61.974	89,45	47.156	68,06
24	Kalimantan Utara	13.448	7.026	52,25	8.256	61,39	10.456	77,75	7.155	53,20
25	Sulawesi Utara	40.389	22.559	55,85	26.677	66,05	34.166	84,59	26.156	64,76
26	Sulawesi Tengah	53.579	35.861	66,93	38.575	72,00	51.230	95,62	42.369	79,08
27	Sulawesi Selatan	164.345	121.123	73,70	124.129	75,53	137.956	83,94	137.246	83,51
28	Sulawesi Tenggara	55.042	32.679	59,37	34.552	62,77	53.232	96,71	35.827	65,09
29	Gorontalo	22.161	15.532	70,09	16.303	73,57	22.878	103,24	15.537	70,11
30	Sulawesi Barat	30.031	12.247	40,78	15.295	50,93	32.191	107,19	15.576	51,87
31	Maluku	38.893	22.014	56,60	22.874	58,81	21.452	55,16	21.307	54,78
32	Maluku Utara	24.755	14.506	58,60	25.432	102,73	16.363	66,10	14.411	58,21
33	Papua	20.048	7.070	35,27	8.810	43,94	12.318	61,44	8.634	43,07
34	Papua Barat	11.877	6.083	51,22	6.547	55,12	1.548	13,03	4.957	41,74
35	Papua Selatan	11.143	8.074	72,46	9.495	85,21	8.731	78,35	4.826	43,31
36	Papua Tengah	29.255	6.109	20,88	6.018	20,57	6.560	22,42	6.677	22,82
37	Papua Pegunungan	29.816	1.448	4,86	1.488	4,99	999	3,35	817	2,74
38	Papua Barat Daya	13.293	5.959	44,83	7.319	55,06	11.556	86,93	5.551	41,76
Indonesia		4.412.879	3.274.349	74,20	3.434.806	77,84	4.785.777	108,45	3.666.747	83,09

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3
MR = measles rubella

Lampiran 43.b

**DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024**

No	Provinsi	2022		2023		2024	
		DPT/HB/HiB(1)- Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)- Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)- Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	3,0	12,8	2,1	15,7	3,7	12,8
2	Sumatera Utara	0,4	2,3	-33,0	-4,7	-19,4	-0,4
3	Sumatera Barat	2,5	5,3	-14,4	5,4	-5,1	13,9
4	Riau	3,5	4,4	-2,5	5,7	-8,7	9,3
5	Jambi	1,5	1,9	-3,7	4,3	-3,3	5,7
6	Sumatera Selatan	-0,5	0,4	-17,5	-0,6	-19,9	1,7
7	Bengkulu	0,2	3,5	-5,4	8,8	-7,6	11,8
8	Lampung	-1,9	-0,3	7,7	8,8	-2,5	2,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,2	4,3	-8,9	1,9	-1,0	5,4
10	Kepulauan Riau	-1,9	2,0	-1,5	9,3	-16,4	-2,6
11	DKI Jakarta	-0,3	0,2	-58,4	-6,3	-11,0	3,7
12	Jawa Barat	-1,2	1,0	-25,3	-4,9	-9,2	2,0
13	Jawa Tengah	-2,9	-5,8	-14,5	0,4	-23,8	-2,5
14	DI Yogyakarta	1,3	0,4	19,6	29,6	2,7	1,5
15	Jawa Timur	-0,8	-1,4	-9,7	3,1	-8,6	21,3
16	Banten	1,4	2,2	-26,5	1,0	-18,2	-3,4
17	Bali	-1,5	1,4	-13,7	9,6	-8,8	7,1
18	Nusa Tenggara Barat	-2,1	-0,8	-15,6	1,3	-15,8	0,3
19	Nusa Tenggara Timur	-0,8	-0,8	-7,6	5,3	7,5	9,2
20	Kalimantan Barat	4,3	6,9	16,6	20,0	7,5	28,2
21	Kalimantan Tengah	3,1	6,4	31,7	29,7	-6,4	29,1
22	Kalimantan Selatan	1,5	5,7	-25,2	-1,8	-29,3	15,8
23	Kalimantan Timur	4,8	5,2	-4,3	5,2	-2,6	12,6
24	Kalimantan Utara	10,2	8,7	17,1	18,5	6,4	21,1
25	Sulawesi Utara	3,1	1,5	20,3	18,6	3,3	16,6
26	Sulawesi Tengah	4,1	8,3	9,0	10,7	-0,6	15,9
27	Sulawesi Selatan	-2,2	2,0	-28,9	-3,3	-14,9	3,7
28	Sulawesi Tenggara	2,7	2,7	-17,6	4,7	6,8	19,1
29	Gorontalo	1,0	6,0	-12,6	3,6	21,2	26,6
30	Sulawesi Barat	5,0	9,8	-5,4	6,0	3,6	24,2
31	Maluku	1,3	6,2	-17,1	1,3	16,5	15,9
32	Maluku Utara	5,8	4,7	-5,7	4,2	17,1	17,4
33	Papua	10,2	14,3	34,5	27,9	10,5	29,6
34	Papua Barat	14,8	11,3	3,4	15,7	31,5	35,6
35	Papua Selatan	-	-	21,0	25,7	5,4	-9,4
36	Papua Tengah	-	-	8,3	17,8	17,4	25,4
37	Papua Pegunungan	-	-	44,8	60,7	56,5	30,5
38	Papua Barat Daya	-	-	23,7	19,1	24,6	19,0
Indonesia		1,8	2,8	-15,4	2,0	-10,3	6,8

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 43.c

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024

No	Provinsi	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	4	17,39	23	3	13,04	23	1	4,35
2	Sumatera Utara	33	25	75,76	33	18	54,55	33	15	45,45
3	Sumatera Barat	19	6	31,58	19	2	10,53	19	1	5,26
4	Riau	12	8	66,67	12	5	41,67	12	5	41,67
5	Jambi	11	11	100,00	11	11	100,00	11	7	63,64
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	17	100,00	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	10	100,00	10	4	40,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	15	100,00	15	7	46,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,14	7	5	71,43	7	3	42,86
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	7	6	85,71	7	3	42,86
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	27	100,00	27	21	77,78
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	35	100,00	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	34	89,47	38	37	97,37	38	29	76,32
16	Banten	8	8	100,00	8	8	100,00	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	9	100,00	9	4	44,44
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	9	90,00	10	3	30,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	14	63,64	22	11	50,00	22	1	4,55
20	Kalimantan Barat	14	9	64,29	14	7	50,00	14	0	0,00
21	Kalimantan Tengah	14	13	92,86	14	11	78,57	14	2	14,29
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,31	13	13	100,00	13	7	53,85
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	10	100,00	10	2	20,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00	5	3	60,00	5	0	0,00
25	Sulawesi Utara	15	10	66,67	15	12	80,00	15	3	20,00
26	Sulawesi Tengah	13	10	76,92	13	7	53,85	13	5	38,46
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	24	100,00	24	15	62,50
28	Sulawesi Tenggara	17	14	82,35	17	12	70,59	17	2	11,76
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	5	83,33	6	1	16,67
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33	6	3	50,00	6	0	0,00
31	Maluku	11	6	54,55	11	7	63,64	11	0	0,00
32	Maluku Utara	10	9	90,00	10	6	60,00	10	1	10,00
33	Papua	9	9	100,00	9	2	22,22	9	2	22,22
34	Papua Barat	7	7	100,00	7	5	71,43	7	1	14,29
35	Papua Selatan	4	0	0,00	4	1	25,00	4	1	25,00
36	Papua Tengah	8	0	0,00	8	1	12,50	8	0	0,00
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00	6	1	16,67	6	0	0,00
Indonesia		514	403	78,40	514	369	71,79	514	217	42,22

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 44.a

**CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Baduta	Baduta Diimunisasi					
			DPT-HB-Hib4		Campak/MR2		Imunisasi Baduta Lengkap	
			L + P		L + P		L + P	
		L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	101.671	20.872	20,53	22.410	22,04	21.758	21,40
2	Sumatera Utara	267.218	215.654	80,70	226.517	84,77	211.344	79,09
3	Sumatera Barat	100.271	30.622	30,54	33.644	33,55	32.644	32,56
4	Riau	129.296	55.966	43,29	62.920	48,66	58.757	45,44
5	Jambi	59.737	45.750	76,59	47.422	79,38	46.836	78,40
6	Sumatera Selatan	157.419	153.241	97,35	162.424	103,18	155.237	98,61
7	Bengkulu	33.184	20.105	60,59	21.963	66,19	20.363	61,36
8	Lampung	137.505	108.629	79,00	107.784	78,39	105.655	76,84
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.694	15.994	64,77	16.310	66,05	16.245	65,79
10	Kepulauan Riau	46.930	38.408	81,84	40.295	85,86	38.592	82,23
11	DKI Jakarta	165.589	175.174	105,79	177.843	107,40	171.879	103,80
12	Jawa Barat	810.223	668.085	82,46	709.849	87,61	698.624	86,23
13	Jawa Tengah	487.570	495.377	101,60	510.885	104,78	490.815	100,67
14	D I Yogyakarta	35.562	34.110	95,92	32.755	92,11	34.042	95,73
15	Jawa Timur	550.862	383.111	69,55	482.250	87,54	357.983	64,99
16	Banten	217.211	213.934	98,49	221.201	101,84	199.961	92,06
17	Bali	66.344	58.039	87,48	59.172	89,19	58.235	87,78
18	Nusa Tenggara Barat	95.501	68.018	71,22	72.787	76,22	71.246	74,60
19	Nusa Tenggara Timur	115.964	68.565	59,13	66.251	57,13	68.317	58,91
20	Kalimantan Barat	87.383	36.009	41,21	36.687	41,98	35.899	41,08
21	Kalimantan Tengah	44.509	14.575	32,75	19.906	44,72	13.668	30,71
22	Kalimantan Selatan	69.998	48.856	69,80	65.030	92,90	50.644	72,35
23	Kalimantan Timur	60.498	35.745	59,08	38.165	63,08	36.171	59,79
24	Kalimantan Utara	12.947	6.035	46,61	7.281	56,24	6.888	53,20
25	Sulawesi Utara	37.311	17.857	47,86	25.271	67,73	25.444	68,19
26	Sulawesi Tengah	55.499	32.790	59,08	41.665	75,07	39.192	70,62
27	Sulawesi Selatan	138.136	126.588	91,64	132.378	95,83	129.503	93,75
28	Sulawesi Tenggara	54.707	26.983	49,32	27.909	51,02	29.088	53,17
29	Gorontalo	19.018	16.658	87,59	15.345	80,69	17.419	91,59
30	Sulawesi Barat	26.357	10.807	41,00	11.793	44,74	10.950	41,54
31	Maluku	33.539	18.449	55,01	15.055	44,89	14.976	44,65
32	Maluku Utara	23.517	12.172	51,76	12.627	53,69	12.874	54,74
33	Papua	17.192	6.034	35,10	5.946	34,59	5.594	32,54
34	Papua Barat	9.643	4.906	50,88	5.019	52,05	4.016	41,65
35	Papua Selatan	12.810	5.749	44,88	5.943	46,39	4.974	38,83
36	Papua Tengah	20.029	4.358	21,76	4.157	20,75	4.118	20,56
37	Papua Pegunungan	12.732	951	7,47	334	2,62	351	2,76
38	Papua Barat Daya	10.361	4.658	44,96	4.351	41,99	4.859	46,90
Indonesia		4.348.937	3.299.834	75,88	3.549.544	81,62	3.305.161	76,00

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 44.b

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)*		Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)	
		Kelas 1	Kelas 2	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	101.498	101.483	43.198	42,56	40.162	39,57	35.635	35,11
2	Sumatera Utara	270.360	271.703	256.573	94,90	239.289	88,51	239.546	88,16
3	Sumatera Barat	104.523	104.641	79.558	76,12	74.908	71,67	75.601	72,25
4	Riau	128.855	130.815	106.691	82,80	83.649	64,92	87.750	67,08
5	Jambi	60.747	60.714	67.869	111,72	63.403	104,37	65.650	108,13
6	Sumatera Selatan	159.249	158.123	304.370	191,13	203.900	128,04	182.550	115,45
7	Bengkulu	33.714	33.634	36.700	108,86	33.611	99,69	34.668	103,07
8	Lampung	141.529	142.179	301.575	213,08	150.341	106,23	165.445	116,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.919	24.872	23.177	93,01	20.375	81,76	24.024	96,59
10	Kepulauan Riau	44.428	43.381	43.806	98,60	38.321	86,25	38.031	87,67
11	DKI Jakarta	165.621	162.817	177.280	107,04	151.006	91,18	137.143	84,23
12	Jawa Barat	787.151	790.489	922.453	117,19	864.864	109,87	843.422	106,70
13	Jawa Tengah	491.403	497.683	583.498	118,74	556.888	113,33	552.594	111,03
14	DI Yogyakarta	56.601	55.690	54.622	96,50	50.986	90,08	50.522	90,72
15	Jawa Timur	564.920	560.572	558.742	98,91	533.479	94,43	502.757	89,69
16	Banten	220.472	220.523	240.772	109,21	226.869	102,90	221.723	100,54
17	Bali	63.466	63.424	127.965	201,63	78.754	124,09	70.495	111,15
18	Nusa Tenggara Barat	98.516	97.935	85.630	86,92	81.217	82,44	79.561	81,24
19	Nusa Tenggara Timur	113.960	112.803	105.497	92,57	97.940	85,94	93.386	82,79
20	Kalimantan Barat	88.486	88.477	83.656	94,54	65.569	74,10	62.028	70,11
21	Kalimantan Tengah	45.254	45.236	33.794	74,68	24.452	54,03	26.540	58,67
22	Kalimantan Selatan	75.888	76.328	64.741	85,31	55.763	73,48	56.833	74,46
23	Kalimantan Timur	60.084	59.876	61.974	103,15	45.877	76,35	46.810	78,18
24	Kalimantan Utara	12.527	12.528	10.456	83,47	5.047	40,29	11.483	91,66
25	Sulawesi Utara	39.085	39.148	34.166	87,41	26.249	67,16	31.832	81,31
26	Sulawesi Tengah	56.158	56.012	51.230	91,22	49.397	87,96	51.410	91,78
27	Sulawesi Selatan	141.844	142.597	137.956	97,26	134.876	95,09	135.679	95,15
28	Sulawesi Tenggara	52.661	52.331	53.232	101,08	52.791	100,25	49.162	93,94
29	Gorontalo	19.247	19.335	22.878	118,87	20.416	106,07	21.110	109,18
30	Sulawesi Barat	26.269	26.207	32.191	122,54	19.749	75,18	19.147	73,06
31	Maluku	33.147	33.168	21.452	64,72	16.971	51,20	22.421	67,60
32	Maluku Utara	23.110	23.147	16.363	70,80	16.002	69,24	15.176	65,56
33	Papua	13.235	12.874	12.318	93,07	11.895	89,88	11.088	86,13
34	Papua Barat	9.071	9.015	1.548	17,07	1.335	14,72	1.421	15,76
35	Papua Selatan	9.438	9.061	8.731	92,51	8.988	95,23	7.802	86,11
36	Papua Tengah	17.869	17.577	6.560	36,71	4.782	26,76	4.496	25,58
37	Papua Pegunungan	21.796	22.610	999	4,58	939	4,31	999	4,42
38	Papua Barat Daya	9.844	9.836	11.556	117,39	332	3,37	6.724	68,36
Indonesia		4.386.945	4.388.844	4.785.777	109,09	4.151.392	94,63	4.082.664	93,02

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 45

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Sasaran Balita	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
			Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
				S	%		S	%		S	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	402.211	55.692	50.976	91,5	242.147	226.917	93,7	297.839	277.893	93,3
2	Sumatera Utara	1.136.179	245.839	138.021	56,1	694.708	639.266	92,0	940.547	777.287	82,6
3	Sumatera Barat	399.493	74.297	66.871	90,0	306.460	292.038	95,3	380.757	358.909	94,3
4	Riau	476.180	73.336	59.512	81,2	322.228	276.395	85,8	395.564	335.907	84,9
5	Jambi	256.850	40.834	36.724	89,9	171.601	162.034	94,4	212.435	198.758	93,6
6	Sumatera Selatan	597.148	115.782	105.114	90,8	495.696	476.633	96,2	611.478	581.747	95,1
7	Bengkulu	145.506	23.255	22.137	95,2	92.659	89.098	96,2	115.914	111.235	96,0
8	Lampung	634.217	110.118	107.709	97,8	447.387	438.706	98,1	557.505	546.415	98,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	105.989	21.197	19.053	89,9	74.988	70.931	94,6	96.185	89.984	93,6
10	Kepulauan Riau	154.884	24.129	22.365	92,7	100.972	95.532	94,6	125.101	117.897	94,2
11	DKI Jakarta	596.625	84.410	76.957	91,2	351.538	319.862	91,0	435.948	396.819	91,0
12	Jawa Barat	3.166.274	588.657	568.988	96,7	2.613.604	2.575.841	98,6	3.202.261	3.144.829	98,2
13	Jawa Tengah	2.236.732	382.864	370.601	96,8	1.592.372	1.574.409	98,9	1.975.236	1.945.010	98,5
14	DI Yogyakarta	193.681	30.879	30.243	97,9	140.268	139.841	99,7	171.147	170.084	99,4
15	Jawa Timur	2.315.021	459.005	435.896	95,0	1.950.915	1.907.885	97,8	2.409.920	2.343.781	97,3
16	Banten	798.863	157.671	153.403	97,3	686.041	666.768	97,2	843.712	820.171	97,2
17	Bali	250.719	42.070	41.556	98,8	162.866	161.074	98,9	204.936	202.630	98,9
18	Nusa Tenggara Barat	412.618	78.525	76.849	97,9	358.003	351.729	98,3	436.528	428.578	98,2
19	Nusa Tenggara Timur	458.845	79.228	75.044	94,7	313.791	294.238	93,8	393.019	369.282	94,0
20	Kalimantan Barat	393.933	77.171	60.279	78,1	314.339	244.372	77,7	391.510	304.651	77,8
21	Kalimantan Tengah	193.116	35.386	28.212	79,7	122.990	106.591	86,7	158.376	134.803	85,1
22	Kalimantan Selatan	293.925	54.927	49.718	90,5	236.400	223.169	94,4	291.327	272.887	93,7
23	Kalimantan Timur	260.558	46.758	35.231	75,4	200.078	150.534	75,2	246.836	185.765	75,3
24	Kalimantan Utara	50.703	11.280	9.901	87,8	48.724	41.295	84,8	60.004	51.196	85,3
25	Sulawesi Utara	160.507	26.243	24.374	92,9	96.513	88.166	91,4	122.756	112.540	91,7
26	Sulawesi Tengah	216.809	41.772	38.254	91,6	162.079	155.758	96,1	203.851	194.012	95,2
27	Sulawesi Selatan	617.850	109.231	100.729	92,2	475.326	447.263	94,1	584.557	547.992	93,7
28	Sulawesi Tenggara	212.474	36.013	29.523	82,0	146.503	125.318	85,5	182.516	154.841	84,8
29	Gorontalo	83.283	16.560	15.688	94,7	69.582	67.496	97,0	86.142	83.184	96,6
30	Sulawesi Barat	115.150	23.566	16.808	71,3	85.707	66.491	77,6	109.273	83.299	76,2
31	Maluku	141.269	25.120	20.658	82,2	95.494	84.998	89,0	120.614	105.656	87,6
32	Maluku Utara	98.474	18.017	15.363	85,3	69.096	60.504	87,6	87.113	75.867	87,1
33	Papua	351.262	13.204	7.170	54,3	54.014	23.687	43,9	67.218	30.857	45,9
34	Papua Barat	92.182	5.818	3.189	54,8	19.607	8.217	41,9	25.425	11.406	44,9
35	Papua Selatan	56.388	8.502	3.772	44,4	36.380	10.411	28,6	44.882	14.183	31,6
36	Papua Tengah	100.152	8.644	4.232	49,0	43.920	15.128	34,4	52.564	19.360	36,8
37	Papua Pegunungan	66.593	2.757	984	34,4	14.213	3.678	25,9	16.970	4.626	27,3
38	Papua Barat Daya	48.070	5.018	2.964	59,1	17.204	8.353	48,6	22.222	11.317	50,9
Indonesia		18.290.733	3.253.775	2.925.032	89,9	13.426.413	12.690.626	94,5	16.680.188	15.615.658	93,6

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025
Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

Lampiran 46

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Sasaran Balita	Balita Memiliki Buku KIA		Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya		Balita Dilayani SDIDTK		Kunjungan Balita Sakit	Balita Dilayani MTBS*	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%
(1)	(2)		(4)		(7)		(10)			(13)	(13)
1	Aceh	402.211	369.182	73,0	320.964	79,8	361.241	71,4	199.619	188.855	94,6
2	Sumatera Utara	1.136.179	1.063.367	74,5	946.414	83,3	892.171	62,5	317.687	264.724	83,3
3	Sumatera Barat	399.493	381.755	74,7	353.427	88,5	348.375	68,2	239.286	201.120	84,1
4	Riau	476.180	358.815	60,7	366.291	76,9	325.137	55,0	208.194	143.767	69,1
5	Jambi	256.850	249.959	77,6	245.832	95,7	238.272	74,0	145.593	141.921	97,5
6	Sumatera Selatan	597.148	628.319	85,4	561.344	94,0	585.624	79,6	254.124	289.687	114,0
7	Bengkulu	145.506	148.542	81,1	118.129	81,2	121.246	66,2	50.944	46.562	91,4
8	Lampung	634.217	660.535	83,4	633.412	99,9	641.358	81,0	296.310	263.897	89,1
9	Kep. Bangka Belitung	105.989	83.962	64,9	84.680	79,9	86.327	66,7	42.670	42.670	100,0
10	Kepulauan Riau	154.884	148.910	77,2	174.072	112,4	173.042	89,7	93.234	80.763	86,6
11	DKI Jakarta	596.625	598.061	80,9	491.364	82,4	629.336	85,1	668.313	558.130	83,5
12	Jawa Barat	3.166.274	3.366.582	84,5	3.034.280	95,8	3.025.710	75,9	2.015.213	1.859.138	92,3
13	Jawa Tengah	2.236.732	2.167.129	78,8	2.111.075	94,4	2.122.756	77,2	1.592.339	1.563.698	98,2
14	D I Yogyakarta	193.681	120.250	56,9	142.814	73,7	143.029	67,7	134.625	114.484	85,0
15	Jawa Timur	2.315.021	2.279.947	78,4	2.115.171	91,4	2.070.711	71,2	990.859	879.275	88,7
16	Banten	798.863	701.716	77,4	815.131	102,0	844.308	93,1	638.553	596.149	93,4
17	Bali	250.719	239.910	91,1	237.335	94,7	234.569	89,1	115.055	112.517	97,8
18	Nusa Tenggara Barat	412.618	369.652	72,2	354.082	85,8	399.020	77,9	205.614	198.925	96,8
19	Nusa Tenggara Timur	458.845	228.605	39,8	272.451	59,4	143.477	25,0	104.341	89.893	86,2
20	Kalimantan Barat	393.933	359.988	72,3	347.148	88,1	327.043	65,7	187.973	152.563	81,2
21	Kalimantan Tengah	193.116	120.616	48,9	176.448	91,4	129.229	52,4	100.281	89.714	89,5
22	Kalimantan Selatan	293.925	289.263	79,8	271.115	92,2	264.021	72,8	186.119	184.401	99,1
23	Kalimantan Timur	260.558	206.475	63,0	233.570	89,6	213.176	65,0	246.966	216.956	87,9
24	Kalimantan Utara	50.703	52.995	81,5	47.056	92,8	36.872	56,7	56.005	55.281	98,7
25	Sulawesi Utara	160.507	73.063	36,4	130.974	81,6	54.703	27,3	45.131	25.923	57,4
26	Sulawesi Tengah	216.809	151.390	56,1	209.065	96,4	195.115	72,3	76.845	72.494	94,3
27	Sulawesi Selatan	617.850	567.669	71,7	549.860	89,0	498.774	63,0	314.085	278.115	88,6
28	Sulawesi Tenggara	212.474	114.169	42,6	178.584	84,1	173.767	64,8	87.979	87.536	99,5
29	Gorontalo	83.283	76.875	71,9	73.252	88,0	44.007	41,2	32.739	28.444	86,9
30	Sulawesi Barat	115.150	74.196	50,9	93.037	80,8	81.471	55,9	52.446	41.870	79,8
31	Maluku	141.269	73.775	40,4	117.100	82,9	94.076	51,5	63.137	58.556	92,7
32	Maluku Utara	98.474	81.034	65,2	82.103	83,4	68.937	55,5	63.419	59.614	94,0
33	Papua	351.262	44.294	41,7	53.294	15,2	27.307	25,7	38.588	30.049	77,9
34	Papua Barat	92.182	24.571	43,4	29.011	31,5	24.233	42,8	24.528	20.280	82,7
35	Papua Selatan	56.388	38.403	58,0	28.868	51,2	27.161	41,0	75.633	57.187	75,6
36	Papua Tengah	100.152	50.009	35,1	27.962	27,9	14.254	10,0	59.272	53.578	90,4
37	Papua Pegunungan	66.593	8.929	6,7	5.232	7,9	2.411	1,8	4.172	2.037	48,8
38	Papua Barat Daya	48.070	24.428	38,9	17.734	36,9	5.242	8,3	12.198	10.194	83,6
Indonesia		18.290.733	16.597.340	90,7	16.049.681	87,8	15.667.508	69,9	10.040.089	9.160.967	91,2

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

* Cakupan balita dilayani MTBS dihitung berdasarkan sasaran kunjungan balita sakit

Lampiran 47

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	2022			2023			2024		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	213.077	175.110	82,18	318.496	274.919	86,32	272.696	243.191	89,18
2	Sumatera Utara	185.543	142.486	76,79	867.309	697.822	80,46	738.978	590.871	79,96
3	Sumatera Barat	390.546	295.112	75,56	380.617	311.819	81,92	373.445	295.830	79,22
4	Riau	446.328	238.154	53,36	413.206	273.326	66,15	391.733	279.485	71,35
5	Jambi	216.599	155.969	72,01	210.917	154.148	73,08	196.951	134.498	68,29
6	Sumatera Selatan	622.258	517.575	83,18	580.570	510.167	87,87	547.371	505.292	92,31
7	Bengkulu	112.774	78.577	69,68	114.706	83.972	73,21	109.734	81.767	74,51
8	Lampung	568.978	445.188	78,24	573.121	461.046	80,44	507.518	415.547	81,88
9	Kepulauan Bangka Belitung	111.574	72.682	65,14	108.548	76.223	70,22	99.688	73.325	73,55
10	Kepulauan Riau	144.384	104.954	72,69	130.737	104.030	79,57	116.218	99.097	85,27
11	DKI Jakarta	445.005	291.690	65,55	422.481	327.426	77,5	357.379	312.730	87,51
12	Jawa Barat	3.409.069	2.784.025	81,67	3.383.775	2.906.128	85,88	3.092.916	2.516.051	81,35
13	Jawa Tengah	1.224.586	949.911	77,57	2.122.057	1.755.821	82,74	1.992.640	1.773.090	88,98
14	DI Yogyakarta	160.221	124.539	77,73	163.592	131.345	80,29	168.055	137.190	81,63
15	Jawa Timur	2.548.645	1.876.799	73,64	2.547.184	2.028.098	79,62	2.364.696	2.048.027	86,61
16	Banten	882.749	704.605	79,82	858.926	728.240	84,78	783.406	646.323	82,5
17	Bali	205.213	164.961	80,39	201.328	167.783	83,34	192.654	163.389	84,81
18	Nusa Tenggara Barat	387.423	332.220	85,75	450.056	411.543	91,44	429.655	393.208	91,52
19	Nusa Tenggara Timur	416.799	332.215	79,71	398.602	328.517	82,42	399.856	315.170	78,82
20	Kalimantan Barat	398.797	197.038	49,41	389.244	195.537	50,24	370.675	201.734	54,42
21	Kalimantan Tengah	158.649	91.067	57,4	170.160	101.352	59,56	154.233	99.760	64,68
22	Kalimantan Selatan	304.749	199.622	65,5	302.044	215.518	71,35	284.310	232.810	81,89
23	Kalimantan Timur	252.698	100.606	39,81	269.458	108.565	40,29	245.544	118.695	48,34
24	Kalimantan Utara	60.956	29.094	47,73	63.919	32.101	50,22	52.772	29.886	56,63
25	Sulawesi Utara	74.362	56.614	76,13	113.699	88.770	78,07	117.870	90.239	76,56
26	Sulawesi Tengah	232.064	156.448	67,42	210.453	150.691	71,6	199.012	150.854	75,8
27	Sulawesi Selatan	611.426	463.981	75,89	595.697	465.539	78,15	570.184	433.748	76,07
28	Sulawesi Tenggara	174.739	120.094	68,73	203.594	135.830	66,72	180.718	136.597	75,59
29	Gorontalo	21.391	16.129	75,4	85.729	72.400	84,45	84.503	78.870	93,33
30	Sulawesi Barat	114.850	70.415	61,31	114.632	68.713	59,94	110.622	76.298	68,97
31	Maluku	133.444	86.563	64,87	129.555	90.663	69,98	121.301	92.379	76,16
32	Maluku Utara	17.758	12.994	73,17	99.983	72.125	72,14	85.302	65.759	77,09
33	Papua	143.294	43.423	30,3	82.316	28.199	34,26	64.644	23.450	36,28
34	Papua Barat	72.435	21.547	29,75	32.790	11.498	35,07	26.640	10.777	40,45
35	Papua Selatan				53.177	15.298	28,77	48.146	13.228	27,47
36	Papua Tengah				53.954	12.772	23,67	50.599	11.445	22,62
37	Papua Pegunungan				14.539	3.164	21,76	15.383	3.187	20,72
38	Papua Barat Daya				27.743	11.644	41,97	22.441	12.409	55,3
Indonesia		15.463.383	11.452.407	74,1	17.258.914	13.612.752	78,9	15.940.488	12.906.206	81,0

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 48.a

**PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,42	7,46	88,80	2,36
2	Sumatera Utara	0,52	3,01	92,80	3,68
3	Sumatera Barat	1,63	7,60	87,20	3,61
4	Riau	0,66	3,90	91,10	4,31
5	Jambi	0,79	4,42	90,90	3,86
6	Sumatera Selatan	0,44	1,88	88,00	9,70
7	Bengkulu	0,60	3,38	88,60	7,42
8	Lampung	0,63	3,91	88,00	7,49
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,90	5,05	88,50	5,53
10	Kepulauan Riau	0,97	4,81	88,80	5,40
11	DKI Jakarta	1,18	3,22	88,90	6,65
12	Jawa Barat	1,15	5,49	87,50	5,87
13	Jawa Tengah	1,52	8,31	84,50	5,63
14	DI Yogyakarta	1,68	9,58	83,50	5,25
15	Jawa Timur	1,39	6,28	84,70	7,62
16	Banten	1,22	5,03	86,40	7,39
17	Bali	0,48	2,80	87,00	9,76
18	Nusa Tenggara Barat	1,81	10,07	84,90	3,18
19	Nusa Tenggara Timur	2,78	14,30	80,90	1,98
20	Kalimantan Barat	2,54	10,83	82,80	3,81
21	Kalimantan Tengah	1,63	7,44	81,70	9,19
22	Kalimantan Selatan	1,89	9,29	85,30	3,54
23	Kalimantan Timur	2,84	10,93	81,00	5,26
24	Kalimantan Utara	1,82	7,25	87,20	3,75
25	Sulawesi Utara	0,61	4,18	91,80	3,38
26	Sulawesi Tengah	2,06	9,44	85,10	3,41
27	Sulawesi Selatan	1,29	7,29	88,40	3,03
28	Sulawesi Tenggara	1,58	7,43	87,30	3,66
29	Gorontalo	1,78	6,28	89,60	2,34
30	Sulawesi Barat	2,86	12,73	81,40	3,06
31	Maluku	1,86	9,02	87,10	2,04
32	Maluku Utara	1,66	8,10	87,60	2,65
33	Papua	3,17	11,92	80,80	4,14
34	Papua Barat	4,11	12,79	79,70	3,39
35	Papua Selatan	4,51	12,17	78,00	5,30
36	Papua Tengah	3,07	9,12	82,60	5,18
37	Papua Pegunungan	2,54	8,27	81,20	8,02
38	Papua Barat Daya	3,53	11,77	81,20	3,46
Indonesia		1,40	6,60	86,50	5,50

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 48.b

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,52	8,15	88,7	1,63
2	Sumatera Utara	0,37	2,11	95,56	1,96
3	Sumatera Barat	1,48	8,29	87,59	2,65
4	Riau	0,51	3,26	93,2	3,03
5	Jambi	0,64	3,73	93,18	2,46
6	Sumatera Selatan	0,28	1,27	89,7	8,76
7	Bengkulu	0,52	3,23	91,34	4,91
8	Lampung	0,5	3,55	90,39	5,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,65	4,01	89,64	5,7
10	Kepulauan Riau	0,79	4,7	89,6	4,91
11	DKI Jakarta	0,64	2,29	91,34	5,72
12	Jawa Barat	0,94	5,7	88,77	4,59
13	Jawa Tengah	1,47	9,53	83,8	5,21
14	DI Yogyakarta	1,53	10,59	81,93	5,94
15	Jawa Timur	1,27	7,09	84,79	6,85
16	Banten	0,99	4,3	88,24	6,47
17	Bali	0,46	3,42	87,24	8,88
18	Nusa Tenggara Barat	1,99	12,85	83,4	1,76
19	Nusa Tenggara Timur	3,19	18,51	77,21	1,1
20	Kalimantan Barat	2,43	10,75	83,4	3,42
21	Kalimantan Tengah	1,64	7,46	82,99	7,92
22	Kalimantan Selatan	2,09	9,91	84,58	3,42
23	Kalimantan Timur	2,6	11,71	79,49	6,2
24	Kalimantan Utara	1,32	6,1	89,44	3,14
25	Sulawesi Utara	0,42	3,25	94,08	2,25
26	Sulawesi Tengah	1,86	9,69	85,71	2,75
27	Sulawesi Selatan	1,2	7,26	89,43	2,11
28	Sulawesi Tenggara	1,56	8,2	87,74	2,5
29	Gorontalo	1,33	5,65	91,22	1,8
30	Sulawesi Barat	3,37	16,27	77,94	2,41
31	Maluku	1,59	9,43	87,60	1,37
32	Maluku Utara	1,48	8,7	88,12	1,71
33	Papua	2,9	13,21	80,69	3,21
34	Papua Barat	3,82	15,08	78,38	2,71
35	Papua Selatan	4,19	13,00	78,53	4,28
36	Papua Tengah	2,79	8,93	83,81	4,47
37	Papua Pegunungan	2,33	8,25	83,1	6,32
38	Papua Barat Daya	3,55	13,79	80,18	2,48
Indonesia		1,2	6,8	87,3	4,6

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 48.c

**PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,66	4,35	93,57	0,42
2	Sumatera Utara	0,67	1,86	96,02	1,44
3	Sumatera Barat	1,97	5,61	91,96	0,45
4	Riau	0,76	1,91	96,52	0,81
5	Jambi	0,97	2,19	96,05	0,79
6	Sumatera Selatan	0,48	1,03	96,01	2,48
7	Bengkulu	0,87	2,79	96,00	0,34
8	Lampung	0,85	2,45	95,16	1,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,22	2,54	95,92	0,32
10	Kepulauan Riau	1,01	2,35	95,73	0,91
11	DKI Jakarta	0,96	1,53	96,53	0,97
12	Jawa Barat	1,57	3,90	93,66	0,87
13	Jawa Tengah	1,99	6,45	90,94	0,62
14	DI Yogyakarta	2,22	6,70	90,67	0,41
15	Jawa Timur	1,54	4,04	93,35	1,07
16	Banten	1,36	3,10	93,63	1,90
17	Bali	0,79	2,01	96,72	0,49
18	Nusa Tenggara Barat	3,05	8,18	88,48	0,29
19	Nusa Tenggara Timur	3,72	8,66	87,46	0,16
20	Kalimantan Barat	3,80	9,54	86,03	0,63
21	Kalimantan Tengah	3,02	7,26	86,55	3,17
22	Kalimantan Selatan	2,30	6,19	91,17	0,34
23	Kalimantan Timur	4,12	10,60	84,62	0,66
24	Kalimantan Utara	2,30	6,25	91,23	0,22
25	Sulawesi Utara	0,61	1,56	97,68	0,15
26	Sulawesi Tengah	2,95	7,07	89,47	0,50
27	Sulawesi Selatan	1,94	4,76	92,98	0,32
28	Sulawesi Tenggara	2,67	7,28	89,54	0,51
29	Gorontalo	1,83	4,34	93,73	0,09
30	Sulawesi Barat	5,45	14,30	80,10	0,16
31	Maluku	1,57	4,36	93,66	0,41
32	Maluku Utara	1,96	5,21	92,58	0,25
33	Papua	3,42	8,91	87,21	0,46
34	Papua Barat	3,05	9,48	87,05	0,42
35	Papua Selatan	5,02	12,71	81,47	0,80
36	Papua Tengah	3,24	8,15	87,88	0,73
37	Papua Pegunungan	8,58	13,59	76,29	1,54
38	Papua Barat Daya	3,17	7,39	88,76	0,68
Indonesia		1,80	4,70	92,60	0,90

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 48.d

**PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,78	5,32	92,67	0,24
2	Sumatera Utara	0,57	1,83	97,05	0,55
3	Sumatera Barat	2,23	7,18	90,32	0,27
4	Riau	0,61	1,74	97,21	0,44
5	Jambi	0,82	2,01	96,80	0,38
6	Sumatera Selatan	0,35	0,82	96,97	1,86
7	Bengkulu	0,88	3,11	95,83	0,18
8	Lampung	0,74	2,24	96,21	0,82
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,85	2,50	96,36	0,30
10	Kepulauan Riau	0,84	2,39	96,29	0,48
11	DKI Jakarta	0,63	1,24	97,64	0,49
12	Jawa Barat	1,49	4,22	93,86	0,44
13	Jawa Tengah	2,00	7,59	90,06	0,35
14	DI Yogyakarta	2,21	8,31	89,28	0,19
15	Jawa Timur	1,35	4,38	93,59	0,68
16	Banten	1,25	2,93	94,59	1,23
17	Bali	0,78	2,67	96,29	0,26
18	Nusa Tenggara Barat	3,05	9,17	87,62	0,16
19	Nusa Tenggara Timur	4,65	12,28	83,00	0,08
20	Kalimantan Barat	3,60	9,91	86,13	0,36
21	Kalimantan Tengah	2,80	7,30	88,13	1,77
22	Kalimantan Selatan	2,48	6,99	90,35	0,18
23	Kalimantan Timur	3,63	11,49	84,49	0,39
24	Kalimantan Utara	1,89	5,93	92,08	0,10
25	Sulawesi Utara	0,47	1,27	98,18	0,08
26	Sulawesi Tengah	2,74	7,79	89,22	0,25
27	Sulawesi Selatan	1,99	5,10	92,77	0,14
28	Sulawesi Tenggara	2,75	8,28	88,71	0,26
29	Gorontalo	1,47	3,97	94,50	0,06
30	Sulawesi Barat	6,76	19,54	73,62	0,08
31	Maluku	1,74	5,32	92,72	0,22
32	Maluku Utara	1,85	5,66	92,33	0,16
33	Papua	3,29	10,23	86,19	0,29
34	Papua Barat	3,57	11,34	84,86	0,23
35	Papua Selatan	5,70	14,52	79,26	0,52
36	Papua Tengah	3,28	9,20	86,78	0,74
37	Papua Pegunungan	11,51	17,38	70,12	1,00
38	Papua Barat Daya	3,98	8,82	86,73	0,47
Indonesia		1,70	5,10	92,80	0,50

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 48.e

**PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,53	5,25	87,65	5,19	1,11	0,27
2	Sumatera Utara	0,32	2,46	91,14	4,71	1,04	0,33
3	Sumatera Barat	0,66	5,12	85,03	7,20	1,63	0,36
4	Riau	0,29	3,18	88,36	6,43	1,45	0,29
5	Jambi	0,32	3,44	88,02	6,55	1,41	0,26
6	Sumatera Selatan	0,19	1,56	85,35	10,18	2,17	0,56
7	Bengkulu	0,22	1,95	82,75	11,84	2,70	0,55
8	Lampung	0,22	3,29	85,19	8,49	2,18	0,64
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,10	2,23	86,25	9,07	1,95	0,41
10	Kepulauan Riau	0,41	3,52	86,31	7,57	1,80	0,38
11	DKI Jakarta	0,37	2,20	86,04	9,19	1,83	0,36
12	Jawa Barat	0,45	3,83	84,30	8,64	2,21	0,56
13	Jawa Tengah	0,64	5,92	82,46	8,38	2,05	0,55
14	DI Yogyakarta	0,31	5,93	83,67	7,67	1,83	0,59
15	Jawa Timur	1,00	5,30	79,76	10,09	2,95	0,90
16	Banten	0,91	4,29	83,85	8,38	1,98	0,60
17	Bali	0,15	1,52	79,98	13,32	3,93	1,11
18	Nusa Tenggara Barat	0,37	5,34	84,02	8,03	1,86	0,38
19	Nusa Tenggara Timur	1,19	7,80	83,59	5,80	1,30	0,33
20	Kalimantan Barat	1,03	6,20	83,87	6,77	1,60	0,53
21	Kalimantan Tengah	1,05	4,81	81,88	8,88	2,54	0,83
22	Kalimantan Selatan	0,79	5,46	85,35	6,59	1,46	0,34
23	Kalimantan Timur	1,03	6,42	81,42	8,21	2,16	0,75
24	Kalimantan Utara	0,63	3,43	85,98	7,89	1,81	0,26
25	Sulawesi Utara	0,17	2,62	88,60	7,17	1,28	0,17
26	Sulawesi Tengah	0,72	5,38	84,68	7,15	1,70	0,37
27	Sulawesi Selatan	0,43	4,11	86,70	7,01	1,47	0,27
28	Sulawesi Tenggara	0,63	4,13	86,13	7,14	1,58	0,39
29	Gorontalo	0,66	3,35	88,19	6,25	1,26	0,29
30	Sulawesi Barat	0,75	6,33	82,43	7,88	2,08	0,53
31	Maluku	0,88	6,21	88,02	3,91	0,83	0,16
32	Maluku Utara	0,76	4,81	86,60	6,16	1,40	0,27
33	Papua	1,90	7,81	80,95	7,00	1,78	0,56
34	Papua Barat	2,27	7,86	82,06	6,19	1,34	0,29
35	Papua Selatan	3,11	7,27	77,98	8,37	2,40	0,88
36	Papua Tengah	2,50	6,36	81,00	7,38	2,12	0,65
37	Papua Pegunungan	1,51	4,20	73,25	13,31	5,12	2,61
38	Papua Barat Daya	2,36	7,37	81,53	6,42	1,74	0,58
Indonesia		0,60	4,60	84,10	8,10	2,00	0,50

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 48.f

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,41	5,08	89,34	4,04	0,89	0,25
2	Sumatera Utara	0,18	1,61	93,65	3,71	0,67	0,18
3	Sumatera Barat	0,47	4,44	87,62	5,78	1,30	0,39
4	Riau	0,15	2,49	90,61	5,29	1,11	0,35
5	Jambi	0,18	2,68	91,48	4,37	0,98	0,31
6	Sumatera Selatan	0,11	1,15	87,42	8,85	1,99	0,48
7	Bengkulu	0,13	1,52	86,60	9,36	1,90	0,48
8	Lampung	0,15	2,77	87,62	7,14	1,74	0,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,05	1,75	87,40	7,44	2,09	1,28
10	Kepulauan Riau	0,26	3,16	87,78	6,06	1,88	0,86
11	DKI Jakarta	0,16	1,41	87,18	8,73	1,79	0,72
12	Jawa Barat	0,27	3,35	86,86	6,86	1,88	0,78
13	Jawa Tengah	0,46	5,50	83,89	7,03	2,06	1,06
14	DI Yogyakarta	0,22	5,37	83,49	7,11	2,28	1,53
15	Jawa Timur	0,85	5,25	81,21	8,71	2,71	1,27
16	Banten	0,57	3,42	85,91	7,62	1,69	0,80
17	Bali	0,10	1,56	82,01	11,14	3,52	1,67
18	Nusa Tenggara Barat	0,30	6,07	87,13	5,10	1,10	0,30
19	Nusa Tenggara Timur	0,93	8,02	86,37	3,74	0,73	0,20
20	Kalimantan Barat	0,83	5,65	85,69	5,43	1,56	0,83
21	Kalimantan Tengah	0,76	4,58	82,77	8,00	2,55	1,35
22	Kalimantan Selatan	0,63	5,32	86,18	5,61	1,47	0,78
23	Kalimantan Timur	0,82	6,43	80,93	7,62	2,52	1,68
24	Kalimantan Utara	0,43	2,53	87,69	7,17	1,59	0,59
25	Sulawesi Utara	0,09	1,98	91,34	5,45	0,91	0,22
26	Sulawesi Tengah	0,58	5,13	86,73	5,73	1,41	0,43
27	Sulawesi Selatan	0,29	3,50	89,51	5,18	1,13	0,39
28	Sulawesi Tenggara	0,44	3,84	88,78	5,41	1,15	0,37
29	Gorontalo	0,46	2,81	90,67	4,85	0,90	0,32
30	Sulawesi Barat	0,63	6,14	84,59	6,43	1,63	0,59
31	Maluku	0,57	5,60	90,03	3,02	0,61	0,17
32	Maluku Utara	0,60	4,73	89,34	4,19	0,90	0,23
33	Papua	1,48	7,56	83,33	5,55	1,47	0,61
34	Papua Barat	1,95	8,14	83,60	4,70	1,13	0,48
35	Papua Selatan	2,64	7,39	79,87	7,22	2,04	0,85
36	Papua Tengah	2,16	5,88	82,63	6,58	2,03	0,72
37	Papua Pegunungan	1,26	3,51	71,49	14,76	5,26	3,72
38	Papua Barat Daya	2,22	7,38	83,60	4,88	1,35	0,56
Indonesia		0,4	4,1	86,3	6,7	1,8	0,8

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	SEKOLAH								
		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	394.820	317.645	80,45	186.344	156.330	83,89	156.620	131.364	83,87
2	Sumatera Utara	1.039.968	918.786	88,35	625.546	550.538	88,01	519.204	432.101	83,22
3	Sumatera Barat	440.696	353.569	80,23	215.310	171.210	79,52	195.952	141.258	72,09
4	Riau	591.881	396.919	67,06	266.423	180.373	67,70	197.517	140.433	71,10
5	Jambi	234.097	175.151	74,82	124.540	100.176	80,44	109.260	82.689	75,68
6	Sumatera Selatan	770.148	656.439	85,24	365.825	322.974	88,29	311.733	256.957	82,43
7	Bengkulu	125.430	61.717	49,20	63.488	43.531	68,57	56.565	34.347	60,72
8	Lampung	584.626	477.028	81,60	309.379	259.707	83,94	252.781	192.080	75,99
9	Kepulauan Bangka Belitung	165.272	144.566	87,47	75.828	61.608	81,25	49.907	40.523	81,20
10	Kepulauan Riau	44.523	44.124	99,10	19.182	18.871	98,38	14.462	13.947	96,44
11	DKI Jakarta	371.799	365.959	98,43	181.020	172.672	95,39	174.781	142.869	81,74
12	Jawa Barat	4.160.552	3.881.658	93,30	2.011.606	1.830.789	91,01	1.722.013	1.889.726	109,74
13	Jawa Tengah	2.528.836	2.498.537	98,80	1.265.631	1.227.711	97,00	1.079.816	1.004.104	92,99
14	D I Yogyakarta	295.510	261.016	88,33	165.246	145.962	88,33	141.836	82.022	57,83
15	Jawa Timur	3.160.731	2.981.340	94,32	1.563.504	1.412.724	90,36	1.384.794	1.100.767	79,49
16	Banten	1.129.313	1.132.487	100,28	491.282	489.156	99,57	425.210	417.980	98,30
17	Bali	303.187	299.691	98,85	157.776	154.228	97,75	146.876	142.145	96,78
18	Nusa Tenggara Barat	469.964	321.262	68,36	218.865	150.114	68,59	190.420	108.930	57,21
19	Nusa Tenggara Timur	853.298	293.149	34,35	408.956	152.359	37,26	402.185	164.337	40,86
20	Kalimantan Barat	508.162	442.226	87,02	248.925	215.690	86,65	213.058	170.132	79,85
21	Kalimantan Tengah	178.670	162.097	90,72	78.970	69.407	87,89	40.165	32.003	79,68
22	Kalimantan Selatan	400.320	373.964	93,42	168.613	162.356	96,29	136.365	107.269	78,66
23	Kalimantan Timur	387.975	354.630	91,41	179.755	161.226	89,69	148.640	123.670	83,20
24	Kalimantan Utara	80.756	54.755	67,80	33.909	23.495	69,29	29.542	18.963	64,19
25	Sulawesi Utara	101.923	55.893	54,84	49.987	28.910	57,84	48.588	26.718	54,99
26	Sulawesi Tengah	228.352	177.135	77,57	104.297	75.359	72,25	95.392	59.340	62,21
27	Sulawesi Selatan	437.693	296.119	67,65	220.919	165.452	74,89	176.742	119.010	67,34
28	Sulawesi Tenggara	153.443	95.254	62,08	86.185	51.433	59,68	91.842	48.646	52,97
29	Gorontalo	60.532	56.972	94,12	30.941	29.713	96,03	32.153	31.020	96,48
30	Sulawesi Barat	59.275	53.255	89,84	24.744	22.530	91,05	20.870	18.985	90,97
31	Maluku	150.607	100.342	66,63	72.922	54.339	74,52	63.357	48.852	77,11
32	Maluku Utara	353.676	67.975	19,22	60.760	48.389	79,64	46.600	28.610	61,39
33	Papua	61.900	34.906	56,39	31.421	20.048	63,80	24.797	31.582	127,36
34	Papua Barat	15.306	11.792	77,04	7.448	5.485	73,64	5.133	2.664	51,90
35	Papua Selatan	36.611	22.116	60,41	21.753	8.143	37,43	14.924	3.526	23,63
36	Papua Tengah	16.655	13.340	80,10	4.447	3.175	71,40	5.645	5.347	94,72
37	Papua Pegunungan	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	Papua Barat Daya	15.142	5.345	35,30	4.874	2.133	43,76	3.752	1.335	35,58
Indonesia		20.911.650	17.959.159	85,88	10.146.621	8.748.316	86,22	8.729.497	7.396.251	84,73

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

Keterangan :

* merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"

Lampiran 53

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Kab/Kota	kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi		Puskesmas	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	23	22	95,65	366	363	99,18
2	Sumatera Utara	33	33	100,00	619	619	100,00
3	Sumatera Barat	19	18	94,74	280	280	100,00
4	Riau	12	10	83,33	239	239	100,00
5	Jambi	11	11	100,00	208	208	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	350	350	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	179	179	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	320	320	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	64	64	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	96	96	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	44	44	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	1.106	1.106	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	881	881	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	121	121	100,00
15	Jawa Timur	38	35	92,11	973	918	94,35
16	Banten	8	8	100,00	253	253	100,00
17	Bali	9	9	100,00	120	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	177	177	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	17	77,27	435	343	78,85
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00	249	249	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	204	204	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	242	242	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	188	188	100,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00	58	58	100,00
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67	199	198	99,50
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	219	219	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	474	474	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	11	64,71	308	308	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00	95	95	100,00
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33	98	98	100,00
31	Maluku	11	8	72,73	240	197	82,08
32	Maluku Utara	10	10	100,00	150	150	100,00
33	Papua	9	3	33,33	122	51	41,80
34	Papua Barat	7	1	14,29	76	27	35,53
35	Papua Selatan	4	3	75,00	85	79	92,94
36	Papua Tengah	8	-	0,00	122	10	8,20
37	Papua Pegunungan	8	-	0,00	155	3	1,94
38	Papua Barat Daya	6	1	16,67	98	30	30,61
Indonesia		514	455	88,52	10.213	9.561	93,62

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 54

**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Persentase lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		usia 60 +	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	512.035	436.794	85,31
2	Sumatera Utara	1.536.692	1.390.575	90,49
3	Sumatera Barat	680.973	564.615	82,91
4	Riau	550.526	435.752	79,15
5	Jambi	354.036	329.024	92,94
6	Sumatera Selatan	903.849	796.390	88,11
7	Bengkulu	207.494	178.949	86,24
8	Lampung	1.034.915	963.684	93,12
9	Kepulauan Riau	150.766	121.780	80,77
10	Kepulauan Bangka Belitung	166.246	123.824	74,48
11	DKI Jakarta	1.210.258	1.029.168	85,04
12	Jawa Barat	5.537.266	4.994.250	90,19
13	Jawa Tengah	5.243.501	4.932.129	94,06
14	DI Yogyakarta	653.334	400.631	61,32
15	Jawa Timur	6.236.411	5.926.548	95,03
16	Banten	1.015.241	974.161	95,95
17	Bali	645.845	605.198	93,71
18	Nusa Tenggara Barat	529.058	503.485	95,17
19	Nusa Tenggara Timur	549.606	434.133	78,99
20	Kalimantan Barat	540.158	393.409	72,83
21	Kalimantan Tengah	247.576	225.022	90,89
22	Kalimantan Selatan	417.571	362.536	86,82
23	Kalimantan Timur	359.172	231.789	64,53
24	Kalimantan Utara	61.851	40.926	66,17
25	Sulawesi Utara	369.697	314.230	85,00
26	Sulawesi Tengah	297.879	230.027	77,22
27	Sulawesi Selatan	1.074.817	819.298	76,23
28	Sulawesi Tenggara	238.673	180.555	75,65
29	Gorontalo	124.140	94.113	75,81
30	Sulawesi Barat	128.072	83.607	65,28
31	Maluku	193.458	122.299	63,22
32	Maluku Utara	111.390	99.873	89,66
33	Papua	81.747	61.808	75,61
34	Papua Barat	37.146	28.131	75,73
35	Papua Selatan	35.696	18.035	50,52
36	Papua Tengah	92.867	12.888	13,88
37	Papua Pegunungan	119.507	410	0,34
38	Papua Barat Daya	47.220	16.173	34,25
Indonesia		32.296.689	28.476.219	88,17

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 56.a

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TBC MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Insiden Tuberkulosis (Dalam Absolut)	Treatment Coverage (TC%)	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)
					Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan					
					Jumlah	%	Jumlah	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	89.726	65.788	73%	8.047	64%	4.530	36%	12.577	226	18.462	68%	681	19%
2	Sumatera Utara	361.748	267.120	74%	32.650	65%	17.759	35%	50.409	323	74.434	68%	3.053	21%
3	Sumatera Barat	121.903	110.345	91%	9.473	60%	6.222	40%	15.695	269	25.083	63%	2.931	61%
4	Riau	113.309	135.647	120%	10.709	63%	6.182	37%	16.891	251	23.315	72%	1.679	37%
5	Jambi	58.458	28.545	49%	4.466	60%	2.953	40%	7.419	199	12.028	62%	1.091	47%
6	Sumatera Selatan	184.417	128.617	70%	14.680	63%	8.740	37%	23.420	265	37.946	62%	2.092	29%
7	Bengkulu	37.772	15.971	42%	2.124	64%	1.219	36%	3.343	158	7.772	43%	464	31%
8	Lampung	152.128	157.143	103%	10.719	59%	7.336	41%	18.055	192	31.302	58%	3.265	54%
9	Kep. Bangka Belitung	24.521	29.215	119%	1.952	63%	1.154	37%	3.106	203	5.045	62%	543	56%
10	Kepulauan Riau	66.856	72.500	108%	4.303	61%	2.797	39%	7.100	325	13.756	52%	837	32%
11	DKI Jakarta	342.079	304.659	89%	35.640	56%	27.763	44%	63.403	593	70.387	90%	9.429	69%
12	Jawa Barat	1.140.692	938.662	82%	124.743	55%	101.098	45%	225.841	449	234.710	96%	52.537	116%
13	Jawa Tengah	523.350	494.067	94%	50.213	56%	39.517	44%	89.730	237	107.685	83%	18.657	90%
14	DI Yogyakarta	38.080	42.622	112%	3.589	56%	2.802	44%	6.391	170	7.835	82%	1.814	120%
15	Jawa Timur	567.414	663.259	117%	49.932	56%	39.110	44%	89.042	213	116.752	76%	10.699	47%
16	Banten	244.899	301.737	123%	32.474	58%	23.656	42%	56.130	452	50.391	111%	9.955	102%
17	Bali	31.575	35.046	111%	3.250	61%	2.082	39%	5.332	120	6.497	82%	436	35%
18	Nusa Tenggara Barat	93.387	79.716	85%	6.790	61%	4.299	39%	11.089	196	19.215	58%	1.216	33%
19	Nusa Tenggara Timur	87.291	68.026	78%	5.755	58%	4.083	42%	9.838	174	17.961	55%	832	24%
20	Kalimantan Barat	90.315	71.854	80%	8.762	63%	5.070	37%	13.832	243	18.583	74%	1.989	55%
21	Kalimantan Tengah	37.924	37.848	100%	3.561	63%	2.133	37%	5.694	203	7.803	73%	789	52%
22	Kalimantan Selatan	73.512	61.386	84%	7.416	60%	4.876	40%	12.292	288	15.126	81%	2.347	80%
23	Kalimantan Timur	105.395	81.936	78%	6.892	61%	4.400	39%	11.292	279	21.686	52%	2.267	54%
24	Kalimantan Utara	17.190	14.296	83%	1.296	63%	755	37%	2.051	277	3.537	58%	262	38%
25	Sulawesi Utara	69.872	38.753	55%	6.645	66%	3.437	34%	10.082	373	14.377	70%	341	12%
26	Sulawesi Tengah	49.009	43.131	88%	5.227	61%	3.293	39%	8.520	273	10.084	84%	494	25%
27	Sulawesi Selatan	221.401	206.598	93%	17.100	59%	12.054	41%	29.154	308	45.556	64%	1.791	20%
28	Sulawesi Tenggara	48.265	25.796	53%	4.037	61%	2.610	39%	6.647	238	9.931	67%	409	21%
29	Gorontalo	33.753	30.836	91%	2.862	58%	2.102	42%	4.964	404	6.945	71%	201	15%
30	Sulawesi Barat	24.592	21.284	87%	2.309	58%	1.698	42%	4.007	267	5.060	79%	229	23%
31	Maluku	45.231	22.037	49%	3.193	58%	2.281	42%	5.474	281	9.307	59%	604	34%
32	Maluku Utara	23.873	14.089	59%	2.453	63%	1.431	37%	3.884	287	4.912	79%	201	21%
33	Papua	56.594	27.754	49%	3.649	54%	3.138	46%	6.787	640	11.645	58%	1.090	48%
34	Papua Barat	15.842	6.981	44%	1.588	55%	1.304	45%	2.892	500	3.260	89%	432	69%
35	Papua Selatan	29.729	14.284	48%	2.424	51%	2.301	49%	4.725	872	6.117	77%	1.109	94%
36	Papua Tengah	44.684	20.054	45%	3.295	55%	2.675	45%	5.970	405	9.194	65%	1.304	73%
37	Papua Pegunungan	27.913	1.400	5%	887	58%	643	42%	1.530	104	5.743	27%	327	30%
38	Papua Barat Daya	12.422	4.387	35%	1.021	56%	791	44%	1.812	289	2.556	71%	252	51%
Indonesia		5.307.120	4.683.389	88,2	496.126	57,9	360.294	42,1	856.420	311,6	1.090.000	78,6	138.649	64,4

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan:

*) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP 4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Data 2024 per 17 Maret 2025

*) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.090.000 (Global TB Report 2024)

Lampiran 56.b

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	343	338	704	656	973	578	1.206	662	1.700	884	1.715	814	1.406	598	8.047	4.530	12.577
2	Sumatera Utara	1.681	1.372	3.234	3.067	4.065	2.438	5.215	2.443	6.501	3.037	6.840	3.208	5.114	2.194	32.650	17.759	50.409
3	Sumatera Barat	1.539	1.392	844	979	1.085	776	1.137	748	1.425	826	1.673	769	1.770	732	9.473	6.222	15.695
4	Riau	886	793	1.049	968	1.473	953	1.798	971	2.150	1.101	2.013	898	1.340	498	10.709	6.182	16.891
5	Jambi	548	543	445	427	564	394	612	416	773	465	836	417	688	291	4.466	2.953	7.419
6	Sumatera Selatan	1.098	994	1.246	1.094	1.764	1.201	2.366	1.372	2.703	1.488	2.762	1.402	2.741	1.189	14.680	8.740	23.420
7	Bengkulu	254	210	164	142	260	179	312	163	355	193	390	202	389	130	2.124	1.219	3.343
8	Lampung	1.645	1.620	790	906	1.261	937	1.396	919	1.793	1.138	1.831	989	2.003	827	10.719	7.336	18.055
9	Kep. Bangka Belitung	283	260	169	139	242	158	304	172	377	179	325	146	252	100	1.952	1.154	3.106
10	Kepulauan Riau	424	413	607	609	744	527	768	431	788	402	585	251	387	164	4.303	2.797	7.100
11	DKI Jakarta	4.781	4.648	4.585	5.145	5.596	4.208	5.389	3.596	6.022	4.087	5.313	3.660	3.954	2.419	35.640	27.763	63.403
12	Jawa Barat	26.910	25.627	14.620	17.875	17.147	14.270	16.015	11.798	17.846	13.312	17.710	11.222	14.495	6.994	124.743	101.098	225.841
13	Jawa Tengah	9.674	8.983	4.459	5.916	5.505	4.834	6.057	4.551	7.308	5.349	8.760	5.632	8.450	4.252	50.213	39.517	89.730
14	DI Yogyakarta	940	874	360	424	395	337	357	269	471	304	496	320	570	274	3.589	2.802	6.391
15	Jawa Timur	5.458	5.241	5.214	6.148	5.364	5.229	6.287	5.204	8.845	6.695	10.024	6.342	8.740	4.251	49.932	39.110	89.042
16	Banten	5.110	4.845	3.435	4.070	5.040	3.556	5.010	3.191	5.445	3.579	5.088	2.844	3.346	1.571	32.474	23.656	56.130
17	Bali	208	228	331	350	479	361	486	286	625	332	559	289	562	236	3.250	2.082	5.332
18	Nusa Tenggara Barat	632	584	571	547	861	605	1.061	616	1.281	769	1.244	690	1.140	488	6.790	4.299	11.089
19	Nusa Tenggara Timur	442	390	749	772	834	688	834	566	879	554	986	580	1.031	533	5.755	4.083	9.838
20	Kalimantan Barat	1.043	946	926	723	1.095	649	1.430	726	1.547	824	1.481	692	1.240	510	8.762	5.070	13.832
21	Kalimantan Tengah	409	380	284	275	451	334	579	338	703	342	662	292	473	172	3.561	2.133	5.694
22	Kalimantan Selatan	1.256	1.091	588	548	794	517	990	605	1.289	817	1.447	796	1.052	502	7.416	4.876	12.292
23	Kalimantan Timur	1.188	1.079	700	609	991	687	1.070	609	1.176	629	999	485	768	302	6.892	4.400	11.292
24	Kalimantan Utara	135	127	126	123	154	115	191	106	263	114	236	92	191	78	1.296	755	2.051
25	Sulawesi Utara	193	148	735	549	908	473	997	475	1.318	734	1.307	575	1.187	483	6.645	3.437	10.082
26	Sulawesi Tengah	254	240	629	600	762	480	857	488	914	634	984	458	827	393	5.227	3.293	8.520
27	Sulawesi Selatan	941	850	1.844	1.906	2.241	1.706	2.548	1.713	3.250	2.211	3.400	2.098	2.876	1.570	17.100	12.054	29.154
28	Sulawesi Tenggara	213	196	538	479	589	405	657	381	747	500	760	406	533	243	4.037	2.610	6.647
29	Gorontalo	103	98	386	399	401	294	393	306	648	432	525	380	406	193	2.862	2.102	4.964
30	Sulawesi Barat	111	118	262	332	337	259	326	238	452	290	399	262	422	199	2.309	1.698	4.007
31	Maluku	293	311	516	463	580	418	495	340	472	322	462	274	375	153	3.193	2.281	5.474
32	Maluku Utara	98	103	457	350	482	257	406	222	397	200	321	185	292	114	2.453	1.431	3.884
33	Papua	570	520	751	879	802	742	540	431	435	288	335	182	216	96	3.649	3.138	6.787
34	Papua Barat	231	201	323	361	313	284	270	172	188	132	149	94	114	60	1.588	1.304	2.892
35	Papua Selatan	535	574	568	627	398	416	379	314	264	192	175	115	105	63	2.424	2.301	4.725
36	Papua Tengah	656	648	739	661	674	497	492	373	386	297	215	131	133	68	3.295	2.675	5.970
37	Papua Pegunungan	180	147	210	158	203	160	124	86	106	48	49	34	15	10	887	643	1.530
38	Papua Barat Daya	121	131	175	182	207	174	143	110	141	80	137	65	97	49	1.021	791	1.812
Indonesia		71.386	67.263	54.333	60.458	66.034	51.096	69.497	46.407	81.983	53.780	83.193	48.291	69.700	32.999	496.126	360.294	856.420
		16,19%		13,40%		13,68%		13,53%		15,85%		15,35%		11,99%		100%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

*) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Data 2024 per 17 Maret 2025

*) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.090.000 (Global TB Report 2024)

Lampiran 56.c

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	34	48	387	348	636	357	866	440	1.217	578	1.155	518	895	329	5.190	2.618	7.808
2	Sumatera Utara	267	248	1.753	1.663	2.464	1.398	3.430	1.454	4.287	1.825	4.272	1.840	2.948	1.074	19.421	9.502	28.923
3	Sumatera Barat	72	95	581	581	837	482	929	527	1.153	611	1.307	546	1.325	483	6.204	3.325	9.529
4	Riau	71	103	656	531	1.031	562	1.306	598	1.552	736	1.390	553	836	267	6.842	3.350	10.192
5	Jambi	45	51	301	285	423	272	456	286	573	329	577	281	469	159	2.844	1.663	4.507
6	Sumatera Selatan	140	158	825	627	1.159	749	1.575	880	1.783	923	1.688	870	1.511	543	8.681	4.750	13.431
7	Bengkulu	23	16	111	82	183	101	219	104	242	125	261	131	250	86	1.289	645	1.934
8	Lampung	107	102	491	527	805	567	932	570	1.166	704	1.118	562	1.105	396	5.724	3.428	9.152
9	Kep. Bangka Belitung	11	9	97	88	174	100	227	120	294	109	211	91	156	58	1.170	575	1.745
10	Kepulauan Riau	25	42	452	432	546	344	590	282	582	259	414	157	245	92	2.854	1.608	4.462
11	DKI Jakarta	227	363	2.714	2.723	3.326	2.043	3.275	1.834	3.708	2.065	3.025	1.648	1.834	814	18.109	11.490	29.599
12	Jawa Barat	870	1.169	7.897	9.033	10.084	7.213	9.706	6.073	10.302	6.759	9.368	5.195	6.678	2.641	54.905	38.083	92.988
13	Jawa Tengah	220	356	2.712	3.429	3.635	2.932	4.217	2.803	4.863	3.092	5.327	2.936	4.317	1.710	25.291	17.258	42.549
14	DI Yogyakarta	17	22	200	222	239	158	216	124	290	140	286	144	297	98	1.545	908	2.453
15	Jawa Timur	304	432	3.194	3.513	3.565	2.982	4.521	3.251	6.401	4.360	6.848	3.833	5.373	2.105	30.206	20.476	50.682
16	Banten	202	220	1.848	1.946	2.962	1.772	3.005	1.667	3.178	1.822	2.703	1.285	1.574	621	15.472	9.333	24.805
17	Bali	14	13	238	220	327	194	343	184	459	231	378	178	353	123	2.112	1.143	3.255
18	Nusa Tenggara Barat	43	54	372	348	590	394	763	414	967	561	883	465	821	317	4.439	2.553	6.992
19	Nusa Tenggara Timur	47	63	492	545	551	475	565	376	591	339	611	317	590	252	3.447	2.367	5.814
20	Kalimantan Barat	96	93	673	503	802	451	1.056	514	1.118	592	1.040	467	795	292	5.580	2.912	8.492
21	Kalimantan Tengah	26	27	196	184	316	206	434	227	508	227	468	155	282	97	2.230	1.123	3.353
22	Kalimantan Selatan	38	45	345	289	499	271	671	348	800	451	839	391	512	190	3.704	1.985	5.689
23	Kalimantan Timur	30	41	469	355	646	392	739	365	808	383	683	296	482	158	3.857	1.990	5.847
24	Kalimantan Utara	1	10	94	85	120	80	158	77	237	81	187	68	143	57	940	458	1.398
25	Sulawesi Utara	48	45	547	401	708	380	821	387	1.092	588	1.033	434	853	321	5.102	2.556	7.658
26	Sulawesi Tengah	35	38	441	416	537	340	626	354	671	438	649	259	474	165	3.433	2.010	5.443
27	Sulawesi Selatan	126	147	1.329	1.347	1.705	1.247	1.967	1.269	2.497	1.655	2.426	1.382	1.866	894	11.916	7.941	19.857
28	Sulawesi Tenggara	27	31	382	333	428	291	473	275	515	358	525	254	330	134	2.680	1.676	4.356
29	Gorontalo	21	28	290	282	305	228	306	232	494	314	372	246	270	107	2.058	1.437	3.495
30	Sulawesi Barat	15	22	209	239	265	185	232	167	339	191	248	139	231	92	1.539	1.035	2.574
31	Maluku	40	65	361	342	413	314	370	246	354	234	336	168	258	86	2.132	1.455	3.587
32	Maluku Utara	23	24	380	269	385	202	328	179	309	155	230	131	207	65	1.862	1.025	2.887
33	Papua	96	103	524	638	548	499	355	258	267	166	197	102	120	36	2.107	1.802	3.909
34	Papua Barat	26	24	227	224	205	173	170	105	112	63	74	49	49	15	863	653	1.516
35	Papua Selatan	83	91	366	347	244	216	210	163	151	95	82	52	51	16	1.187	980	2.167
36	Papua Tengah	111	121	481	412	427	267	262	184	191	117	101	53	57	21	1.630	1.175	2.805
37	Papua Pegunungan	45	22	95	51	99	65	50	32	45	15	18	4	3	1	355	190	545
38	Papua Barat Daya	14	10	100	106	133	109	101	65	84	43	71	19	37	21	540	373	913
Indonesia		3.640	4.551	32.830	33.966	42.322	29.011	46.470	27.434	54.200	31.734	51.401	26.219	38.597	14.936	269.460	167.851	437.311
		1,87%		15,27%		16,31%		16,90%		19,65%		17,75%		12,24%		100%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
*) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll
*) Data 2024 per 17 Maret 2025
*) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.090.000 (Global TB Report 2024)

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar Dan Diobati ¹⁾			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati ¹⁾			Angka Kesembuhan (<i>Cure Rate</i>) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis						Angka Pengobatan Lengkap (<i>Complete Rate</i>) Semua Kasus Tuberkulosis						Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Treatment Success Rate/TSR</i>) Semua Kasus Tuberkulosis						Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
								Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan			
		L	P	L + P	L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Aceh	4.551	2.281	6.832	7.458	4.183	11.641	1.070	23,5	601	26,3	1.671	24,5	5.302	71,1	3.065	73,3	8.367	71,9	6.372	85,4	3.666	87,6	10.038	86,2	408	3,5
2	Sumatera Utara	15.048	7.104	22.152	27.208	14.542	41.750	5.694	37,8	2.804	39,5	8.498	38,4	17.209	63,2	9.572	65,8	26.781	64,1	22.903	84,2	12.376	85,1	35.279	84,5	1.530	3,7
3	Sumatera Barat	4.930	2.693	7.623	8.500	5.637	14.137	2.454	49,8	1.429	53,1	3.883	50,9	4.852	57,1	3.618	64,2	8.470	59,9	7.306	86,0	5.047	89,5	12.353	87,4	646	4,6
4	Riau	5.255	2.538	7.793	8.945	5.317	14.262	2.010	38,2	1.003	39,5	3.013	38,7	6.030	67,4	3.848	72,4	9.878	69,3	8.040	89,9	4.851	91,2	12.891	90,4	471	3,3
5	Jambi	2.259	1.248	3.507	4.145	2.642	6.787	1.117	49,4	652	52,2	1.769	50,4	2.491	60,1	1.729	65,4	4.220	62,2	3.608	87,0	2.381	90,1	5.989	88,2	325	4,8
6	Sumatera Selatan	6.991	3.930	10.921	13.219	7.955	21.174	2.531	36,2	1.558	39,6	4.089	37,4	9.552	72,3	5.842	73,4	15.394	72,7	12.083	91,4	7.400	93,0	19.483	92,0	743	3,5
7	Bengkulu	1.041	568	1.609	1.864	1.170	3.034	317	30,5	183	32,2	500	31,1	1.230	66,0	836	71,5	2.066	68,1	1.547	83,0	1.019	87,1	2.566	84,6	170	5,6
8	Lampung	4.919	2.836	7.755	10.111	6.777	16.888	2.565	52,1	1.578	55,6	4.143	53,4	6.763	66,9	4.792	70,7	11.555	68,4	9.328	92,3	6.370	94,0	15.698	93,0	396	2,3
9	Kep. Bangka Belitung	970	498	1.468	1.793	1.108	2.901	488	50,3	248	49,8	736	50,1	1.039	57,9	707	63,8	1.746	60,2	1.527	85,2	955	86,2	2.482	85,6	171	5,9
10	Kepulauan Riau	2.096	1.266	3.362	3.816	2.491	6.307	958	45,7	628	49,6	1.586	47,2	2.164	56,7	1.508	60,5	3.672	58,2	3.122	81,8	2.136	85,7	5.258	83,4	279	4,4
11	DKI Jakarta	13.716	8.797	22.513	29.383	23.445	52.828	5.041	36,8	3.408	38,7	8.449	37,5	17.994	61,2	15.945	68,0	33.939	64,2	23.035	78,4	19.353	82,5	42.388	80,2	1.759	3,3
12	Jawa Barat	39.350	27.795	67.145	102.877	86.248	189.125	15.642	39,8	11.771	42,3	27.413	40,8	70.144	68,2	62.302	72,2	132.446	70,0	85.786	83,4	74.073	85,9	159.859	84,5	4.810	2,5
13	Jawa Tengah	20.528	14.312	34.840	43.759	35.231	78.990	10.711	52,2	8.147	56,9	18.858	54,1	26.451	60,4	23.228	65,9	49.679	62,9	37.162	84,9	31.375	89,1	68.537	86,8	3.354	4,2
14	DI Yogyakarta	1.296	833	2.129	3.467	2.797	6.264	606	46,8	432	51,9	1.038	48,8	2.336	67,4	2.057	73,5	4.393	70,1	2.942	84,9	2.489	89,0	5.431	86,7	333	5,3
15	Jawa Timur	24.492	17.049	41.541	42.895	34.211	77.106	14.509	59,2	10.693	62,7	25.202	60,7	22.989	53,6	20.397	59,6	43.386	56,3	37.498	87,4	31.090	90,9	68.588	89,0	3.709	4,8
16	Banten	10.606	6.913	17.519	26.173	19.891	46.064	3.860	36,4	2.516	36,4	6.376	36,4	19.649	75,1	15.669	78,8	35.318	76,7	23.509	89,8	18.185	91,4	41.694	90,5	1.098	2,4
17	Bali	1.788	1.010	2.798	2.983	1.948	4.931	1.150	64,3	689	68,2	1.839	65,7	1.298	43,5	985	50,6	2.283	46,3	2.448	82,1	1.674	85,9	4.122	83,6	426	8,6
18	Nusa Tenggara Barat	3.900	2.392	6.292	6.309	4.143	10.452	2.293	58,8	1.542	64,5	3.835	61,0	3.222	51,1	2.212	53,4	5.434	52,0	5.515	87,4	3.754	90,6	9.269	88,7	704	6,7
19	Nusa Tenggara Timur	2.999	1.997	4.996	5.225	3.675	8.900	1.199	40,0	814	40,8	2.013	40,3	3.348	64,1	2.453	66,7	5.801	65,2	4.547	87,0	3.267	88,9	7.814	87,8	562	6,3
20	Kalimantan Barat	4.458	2.218	6.676	7.633	4.321	11.954	1.857	41,7	1.008	45,4	2.865	42,9	4.665	61,1	2.791	64,6	7.456	62,4	6.522	85,4	3.799	87,9	10.321	86,3	447	3,7
21	Kalimantan Tengah	1.750	891	2.641	3.125	1.891	5.016	665	38,0	368	41,3	1.033	39,1	1.751	56,0	1.160	61,3	2.911	58,0	2.416	77,3	1.528	80,8	3.944	78,6	244	4,9
22	Kalimantan Selatan	2.818	1.576	4.394	5.782	3.720	9.502	1.267	45,0	794	50,4	2.061	46,9	3.056	52,9	2.060	55,4	5.116	53,8	4.323	74,8	2.854	76,7	7.177	75,5	420	4,4
23	Kalimantan Timur	2.823	1.435	4.258	6.016	4.152	10.168	1.193	42,3	643	44,8	1.836	43,1	3.750	62,3	2.892	69,7	6.642	65,3	4.943	82,2	3.535	85,1	8.478	83,4	417	4,1
24	Kalimantan Utara	800	360	1.160	1.176	664	1.840	290	36,3	162	45,0	452	39,0	597	50,8	367	55,3	964	52,4	887	75,4	529	79,7	1.416	77,0	113	6,1
25	Sulawesi Utara	3.794	1.971	5.765	5.311	2.907	8.218	1.211	31,9	701	35,6	1.912	33,2	3.099	58,4	1.760	60,5	4.859	59,1	4.310	81,2	2.461	84,7	6.771	82,4	428	5,2
26	Sulawesi Tengah	2.538	1.599	4.137	4.228	2.844	7.072	620	24,4	388	24,3	1.008	24,4	2.831	67,0	2.029	71,3	4.860	68,7	3.451	81,6	2.417	85,0	5.868	83,0	467	6,6
27	Sulawesi Selatan	8.855	5.909	14.762	13.139	9.436	22.575	4.008	45,3	2.856	48,3	6.864	46,5	6.687	50,9	5.220	55,3	11.907	52,7	10.695	81,4	8.076	85,6	18.771	83,1	1.227	5,4
28	Sulawesi Tenggara	2.155	1.326	3.481	3.426	2.192	5.618	872	40,5	580	43,7	1.452	41,7	1.808	52,8	1.208	55,1	3.016	53,7	2.680	78,2	1.788	81,6	4.468	79,5	328	5,8
29	Gorontalo	1.399	928	2.327	2.167	1.525	3.692	598	42,7	431	46,4	1.029	44,2	1.335	61,6	976	64,0	2.311	62,6	1.933	89,2	1.407	92,3	3.340	90,5	149	4,0
30	Sulawesi Barat	1.299	907	2.206	1.930	1.375	3.305	636	49,0	443	48,8	1.079	48,9	1.061	55,0	798	58,0	1.859	56,2	1.697	87,9	1.241	90,3	2.938	88,9	197	6,0
31	Maluku	1.656	1.099	2.755	2.712	1.901	4.613	413	24,9	279	25,4	692	25,1	1.928	71,1	1.355	71,3	3.283	71,2	2.341	86,3	1.634	86,0	3.975	86,2	208	4,5
32	Maluku Utara	1.208	760	1.968	1.765	1.122	2.887	293	24,3	193	25,4	486	24,7	1.079	61,1	735	65,5	1.814	62,8	1.372	77,7	928	82,7	2.300	79,7	167	5,8
33	Papua	1.439	1.068	2.507	2.953	2.302	5.255	589	40,9	424	39,7	1.013	40,4	1.524	51,6	1.249	54,3	2.773	52,8	2.113	71,6	1.673	72,7	3.786	72,0	269	5,1
34	Papua Barat	586	443	1.029	1.198	1.001	2.199	195	33,3	149	33,6	344	33,4	644	53,8	571	57,0	1.215	55,3	839	70,0	720	71,9	1.559	70,9	140	6,4
35	Papua Selatan	867	740	1.607	2.053	1.900	3.953	351	40,5	294	39,7	645	40,1	1.194	58,2	1.178	62,0	2.372	60,0	1.545	75,3	1.472	77,5	3.017	76,3	142	3,6
36	Papua Tengah	1.045	772	1.817	2.873	2.354	5.227	433	41,4	328	42,5	761	41,9	1.759	61,2	1.539	65,4	3.298	63,1	2.192	76,3	1.867	79,3	4.059	77,7	164	3,1
37	Papua Pegunungan	181	128	309	951	740	1.691	45	24,9	28	21,9	73	23,6	354	37,2	311	42,0	665	39,3	399	42,0	339	45,8	738	43,6	54	3,2
38	Papua Barat Daya	457	300	757	924	685	1.609	183	40,0	125	41,7	308	40,7	503	54,4	399	58,2	902	56,1	686	74,2	524	76,5	1.210	75,2	86	5,3
Indonesia		206.861	130.490	337.351	419.492	310.443	729.935	89.934	43,5	60.890	46,7	150.824	44,7	263.688	62,9	209.363	67,4	473.051	64,8	353.622	84,3	270.253	87,1	623.875	85,5	27.561	3,8

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan:

¹⁾ Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan cohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BKKPM/BPKPM/BPA, Lembaga Pemasyarakatan,

Rumah Tahapan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

²⁾ Data Hasil Pengobatan TBC Cohort Tahun 2023 per 17 Maret 2025

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Balita	Perkiraan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita												Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia								Total	CFR (%)	Kasus Pneumonia yang mendapatkan antibiotik	Persentase Kasus Pneumonia yang mendapatkan pengobatan sesuai standar	
				Pneumonia				Pneumonia Berat				Jumlah				%	< 1 Tahun				1-<5 tahun							
				< 1 Tahun		1-<5 tahun		< 1 Tahun		1-<5 tahun		L	P	L+P	L		P	L+P	L	P	L	P						
				L	P	L	P	L	P	L	P												L					P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			
1	Aceh	548.866	24.479	403	286	1.254	1.000	75	57	124	97	1.856	1.440	3.296	13,46	1	0	0	1	1	1	2	0,06	2.972	90,17			
2	Sumatera Utara	1.560.648	46.663	863	636	1.824	1.605	455	291	371	283	3.513	2.815	6.328	13,56	31	15	3	9	34	24	58	0,92	6.282	99,27			
3	Sumatera Barat	565.241	22.101	1.151	842	3.281	2.871	68	51	171	141	4.671	3.905	8.576	38,80	0	1	0	0	0	1	1	0,01	8.202	95,64			
4	Riau	644.531	17.209	319	198	654	557	32	14	46	33	1.051	802	1.853	10,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.735	93,63			
5	Jambi	368.234	11.599	306	221	573	459	14	13	17	17	910	710	1.620	13,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.586	97,90			
6	Sumatera Selatan	923.818	33.350	845	826	2.587	2.281	118	64	106	69	3.656	3.240	6.896	20,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.235	90,41			
7	Bengkulu	207.056	4.141	68	35	201	149	4	1	1	4	274	189	463	11,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	462	99,78			
8	Lampung	918.823	20.490	1.006	1.129	2.771	2.308	88	67	106	62	3.971	3.566	7.537	36,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.468	99,08			
9	Kep. Bangka Belitung	145.333	8.793	351	194	917	742	9	5	13	9	1.290	950	2.240	25,47	2	1	0	0	2	1	3	0,13	2.215	98,88			
10	Kepulauan Riau	207.944	8.276	240	144	457	382	9	3	12	8	718	537	1.255	15,16	1	2	0	0	1	2	3	0,24	1.222	97,37			
11	DKI Jakarta	891.491	37.799	7.199	5.517	14.795	12.753	172	135	252	209	22.418	18.614	41.032	108,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	41.032	100,00			
12	Jawa Barat	4.960.090	229.156	22.310	18.745	44.892	40.319	1.739	1.193	2.577	2.151	71.518	62.408	133.926	58,44	31	35	15	10	46	45	91	0,07	130.668	97,57			
13	Jawa Tengah	3.547.812	128.076	10.860	9.496	31.054	27.163	962	635	1.485	1.207	44.361	38.501	82.862	64,70	98	97	34	46	132	143	275	0,33	80.786	97,49			
14	DI Yogyakarta	198.343	8.568	1.550	1.053	3.521	2.655	990	622	1.385	1.004	7.446	5.334	12.780	149,16	5	1	2	3	7	4	11	0,09	10.989	85,99			
15	Jawa Timur	3.537.130	137.861	12.845	12.234	37.808	35.094	363	234	548	502	51.564	48.064	99.628	72,27	4	2	3	1	7	3	10	0,01	97.670	98,03			
16	Banten	1.168.992	48.162	5.851	5.246	12.575	11.596	131	114	149	146	18.706	17.102	35.808	74,35	2	0	0	2	2	2	4	0,01	34.038	95,06			
17	Bali	323.353	6.955	1.117	785	2.179	1.584	87	77	140	86	3.523	2.532	6.055	87,06	6	5	0	0	6	5	11	0,18	5.921	97,79			
18	Nusa Tenggara Barat	564.602	32.663	3.032	2.322	6.151	5.046	341	190	416	385	9.940	7.943	17.883	54,75	6	3	0	0	6	3	9	0,05	17.743	99,22			
19	Nusa Tenggara Timur	540.594	23.137	1.154	810	1.295	1.253	125	76	115	138	2.689	2.277	4.966	21,46	1	0	0	1	1	1	2	0,04	4.966	100,00			
20	Kalimantan Barat	544.043	11.534	439	341	723	616	31	22	46	52	1.239	1.031	2.270	19,68	11	13	0	1	11	14	25	1,10	2.200	96,92			
21	Kalimantan Tengah	275.864	12.055	243	149	420	287	108	81	108	84	879	601	1.480	12,28	2	1	3	0	5	1	6	0,41	1.480	100,00			
22	Kalimantan Selatan	422.507	23.365	2.268	1.678	4.745	3.846	411	310	385	309	7.809	6.143	13.952	59,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.657	97,89			
23	Kalimantan Timur	365.934	10.466	1.139	751	1.988	1.583	67	36	139	96	3.333	2.466	5.799	55,41	0	0	0	1	0	1	1	0,02	5.764	99,40			
24	Kalimantan Utara	73.996	2.116	286	221	584	415	8	2	4	4	882	642	1.524	72,02	1	1	1	0	2	1	3	0,20	1.505	98,75			
25	Sulawesi Utara	261.229	7.001	34	21	81	79	11	4	7	6	133	110	243	3,47	4	3	0	0	4	3	7	2,88	240	98,77			
26	Sulawesi Tengah	294.550	16.112	1.426	1.039	3.306	2.593	118	88	145	125	4.995	3.845	8.840	54,87	3	0	2	0	5	0	5	0,06	8.123	91,89			
27	Sulawesi Selatan	908.767	34.446	1.378	1.031	2.958	2.257	360	249	455	364	5.151	3.901	9.052	26,28	11	3	2	1	13	4	17	0,19	8.688	95,98			
28	Sulawesi Tenggara	273.700	10.510	321	250	551	450	17	9	20	29	909	738	1.647	15,67	0	0	3	0	3	0	3	0,18	1.640	99,57			
29	Gorontalo	118.164	5.660	581	390	907	814	36	18	55	42	1.579	1.264	2.843	50,23	0	1	0	0	0	1	1	0,04	2.734	96,17			
30	Sulawesi Barat	142.964	6.977	215	120	425	334	79	37	104	67	823	558	1.381	19,79	9	10	0	3	9	13	22	1,59	1.198	86,75			
31	Maluku	184.774	6.911	222	174	370	314	9	15	9	8	610	511	1.121	16,22	6	4	1	0	7	4	11	0,98	1.099	98,04			
32	Maluku Utara	124.666	2.855	182	114	306	223	8	7	19	11	515	355	870	30,47	1	1	0	0	1	1	2	0,23	837	96,21			
33	Papua	92.253	2.583	220	167	248	190	78	67	86	97	632	521	1.153	44,64	4	4	0	0	4	4	8	0,69	1.057	91,67			
34	Papua Barat	50.702	1.460	228	201	401	300	18	11	23	21	670	533	1.203	82,40	2	4	0	1	2	5	7	0,58	1.153	95,84			
35	Papua Selatan	58.181	1.676	318	267	465	416	123	60	116	108	1.022	851	1.873	111,75	3	6	5	9	8	15	23	1,23	1.370	73,1			
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0			
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0			
38	Papua Barat Daya	56.757	1.635	69	56	132	114	5	1	3	6	209	177	386	23,61	5	7	1	1	6	8	14	3,63	386	100,0			
Indonesia		26.071.952	1.006.840	81.039	67.689	187.399	164.648	7.269	4.859	9.758	7.980	285.465	245.176	530.641	52,70	250	220	75	90	325	310	635	0,12	515.323	97,11			

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 59.a

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal) (Target Tes)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (Tes HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	0	2	2	3	17	0	52	11	196	44	20	5	287	65	352	135.151	104.579	77%
2	Sumatera Utara	22	8	11	13	172	24	574	50	1.705	417	178	76	2.662	588	3.250	452.858	345.840	76%
3	Sumatera Barat	2	1	3	2	29	3	108	10	388	72	30	6	560	94	654	167.178	106.048	63%
4	Riau	7	6	4	4	41	4	192	17	522	134	49	27	815	192	1.007	233.796	198.708	85%
5	Jambi	0	5	0	2	17	2	55	3	163	49	14	3	249	64	313	92.750	61.823	67%
6	Sumatera Selatan	9	2	2	7	45	5	161	16	498	158	60	23	775	211	986	248.250	205.800	83%
7	Bengkulu	2	1	0	0	5	2	37	8	80	24	8	6	132	41	173	63.327	45.875	72%
8	Lampung	13	3	9	5	57	15	196	46	594	185	64	33	933	287	1.220	223.299	159.463	71%
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	1	4	8	2	36	8	131	62	20	4	197	80	277	42.660	40.056	94%
10	Kepulauan Riau	7	2	5	4	48	8	133	15	488	156	57	26	738	211	949	78.454	82.970	106%
11	DKI Jakarta	16	10	20	20	199	33	937	103	2.686	607	298	98	4.156	871	5.027	339.786	580.577	171%
12	Jawa Barat	57	47	51	49	513	103	1.755	294	4.570	1.667	565	222	7.511	2.382	9.893	1.311.992	1.194.931	91%
13	Jawa Tengah	35	30	27	23	222	75	721	159	2.506	1.254	755	384	4.266	1.925	6.191	861.554	951.448	110%
14	DI Yogyakarta	1	4	5	2	60	8	207	16	388	97	98	42	759	169	928	85.762	93.289	109%
15	Jawa Timur	41	32	51	38	322	58	1.043	326	4.051	2.474	1.286	738	6.794	3.666	10.460	886.108	964.578	109%
16	Banten	9	8	23	9	99	16	426	46	1.247	360	141	50	1.945	489	2.434	361.382	358.361	99%
17	Bali	10	5	9	7	56	14	233	78	865	439	182	100	1.355	643	1.998	120.125	99.766	83%
18	Nusa Tenggara Barat	3	4	3	1	41	5	95	20	294	111	41	9	477	150	627	149.851	145.221	97%
19	Nusa Tenggara Timur	11	7	7	6	33	28	153	70	523	283	82	52	809	446	1.255	183.991	100.648	55%
20	Kalimantan Barat	8	11	10	8	53	18	199	45	590	246	96	25	956	353	1.309	144.031	109.462	76%
21	Kalimantan Tengah	2	1	1	0	20	6	68	13	219	111	27	17	337	148	485	81.156	55.875	69%
22	Kalimantan Selatan	4	3	3	0	25	5	111	21	309	121	57	15	509	165	674	123.848	133.495	108%
23	Kalimantan Timur	11	11	5	3	64	12	195	46	590	283	104	51	969	406	1.375	133.262	171.412	129%
24	Kalimantan Utara	1	1	0	2	13	1	34	11	102	34	9	1	159	50	209	25.318	29.045	115%
25	Sulawesi Utara	5	7	4	2	66	12	202	35	371	108	37	20	685	184	869	78.575	41.249	52%
26	Sulawesi Tengah	1	3	4	0	57	4	160	16	343	79	35	3	600	105	705	88.991	43.671	49%
27	Sulawesi Selatan	5	7	6	11	180	17	460	47	1.028	241	86	32	1.765	355	2.120	266.815	197.148	74%
28	Sulawesi Tenggara	4	3	1	1	45	11	122	26	295	107	22	9	489	157	646	85.291	55.780	65%
29	Gorontalo	0	1	1	0	18	1	73	6	141	23	10	3	243	34	277	36.521	25.898	71%
30	Sulawesi Barat	1	0	1	1	4	1	27	4	76	14	4	1	113	21	134	43.738	25.905	59%
31	Maluku	5	10	4	2	45	22	138	76	307	187	42	23	541	320	861	65.504	46.556	71%
32	Maluku Utara	5	3	3	3	34	22	101	43	247	106	13	12	403	189	592	39.655	22.753	57%
33	Papua	26	26	7	8	54	147	213	412	625	662	58	37	983	1.292	2.275	107.520	49.512	46%
34	Papua Barat	7	6	3	5	20	57	93	131	224	247	18	16	365	462	827	70.241	34.473	49%
35	Papua Selatan	1	3	1	0	3	19	12	27	56	62	4	6	77	117	194	58.329	26.893	46%
36	Papua Tengah	7	11	2	14	53	139	139	187	357	338	37	27	595	716	1.311	95.736	47.096	49%
37	Papua Pegunungan	3	3	2	3	7	33	41	88	177	181	12	9	242	317	559	48.463	10.117	21%
38	Papua Barat Daya	0	2	0	4	9	18	38	52	69	84	9	6	125	166	291	53.901	20.081	37%
		342	289	291	266	2.754	950	9.540	2.582	28.021	11.827	4.628	2.217	45.576	18.131	63.707	7.685.169	6.986.402	0,9
Indonesia		1,0%		0,9%		5,8%		19,0%		62,5%		10,7%		100%					

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Data per 25 Januari 2024

Lampiran 59.b

JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	269	279	352
2	Sumatera Utara	2.777	3.105	3.250
3	Sumatera Barat	526	579	654
4	Riau	766	914	1.007
5	Jambi	182	261	313
6	Sumatera Selatan	844	813	986
7	Bengkulu	179	176	173
8	Lampung	721	889	1.220
9	Kepulauan Bangka Belitung	279	248	277
10	Kepulauan Riau	926	930	949
11	DKI Jakarta	5.744	5.569	5.027
12	Jawa Barat	8.680	7.953	9.893
13	Jawa Tengah	5.897	5.142	6.191
14	DI Yogyakarta	902	905	928
15	Jawa Timur	7.242	9.500	10.460
16	Banten	2.404	2.251	2.434
17	Bali	1.826	2.799	1.998
18	Nusa Tenggara Barat	618	504	627
19	Nusa Tenggara Timur	556	1.201	1.255
20	Kalimantan Barat	931	1.184	1.309
21	Kalimantan Tengah	385	494	485
22	Kalimantan Selatan	621	723	674
23	Kalimantan Timur	1.312	1.172	1.375
24	Kalimantan Utara	173	199	209
25	Sulawesi Utara	656	632	869
26	Sulawesi Tengah	455	217	705
27	Sulawesi Selatan	1.476	1.823	2.120
28	Sulawesi Tenggara	524	389	646
29	Gorontalo	143	124	277
30	Sulawesi Barat	38	75	134
31	Maluku	487	467	861
32	Maluku Utara	413	242	592
33	Papua	3.206	2.074	2.275
34	Papua Barat	797	933	827
35	Papua Selatan	-	159	194
36	Papua Tengah	-	1.575	1.311
37	Papua Pegunungan	-	456	559
38	Papua Barat Daya	-	343	291
Indonesia		52.955	57.299	63.707

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penvakit. Kemenkes RI. 2025
Data per 25 Januari 2024

Lampiran 60.a

JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui	Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	0	1	0	1	1	0	5	0	38	7	30	10	19	5	10	2	1	0	-	-	-	104	26	130
2	Sumatera Utara	2	2	8	1	5	7	39	7	392	46	356	73	180	76	75	22	19	6	-	-	-	1.076	240	1.316
3	Sumatera Barat	0	0	0	1	0	0	4	1	69	5	82	11	34	12	13	3	2	1	-	-	-	204	34	238
4	Riau	0	0	0	3	2	3	7	0	106	11	105	17	40	18	18	6	4	5	-	-	-	282	63	345
5	Jambi	0	0	0	1	0	1	1	1	24	3	26	8	14	4	5	2	3	0	-	-	-	73	20	93
6	Sumatera Selatan	1	0	4	0	1	3	8	0	84	11	107	22	44	20	17	6	4	0	-	-	-	270	62	332
7	Bengkulu	0	0	1	0	0	0	1	0	18	1	12	2	12	5	1	2	1	1	-	-	-	46	11	57
8	Lampung	4	1	4	1	4	3	9	3	99	15	88	20	55	16	15	8	5	1	-	-	-	283	68	351
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	1	1	1	0	22	3	24	5	11	7	4	2	3	0	-	-	-	66	18	84
10	Kepulauan Riau	1	0	3	1	2	3	17	1	96	9	83	17	57	21	21	9	8	3	-	-	-	288	64	352
11	DKI Jakarta	3	2	6	6	14	15	41	10	505	59	428	105	281	107	124	42	56	16	-	-	-	1.458	362	1.820
12	Jawa Barat	2	2	16	10	20	17	90	9	996	122	789	216	419	206	192	63	56	14	-	-	-	2.580	659	3.239
13	Jawa Tengah	3	4	10	8	13	11	38	15	325	67	423	134	321	196	219	114	115	42	-	-	-	1.467	591	2.058
14	DI Yogyakarta	0	1	0	0	3	2	5	3	56	1	40	11	41	21	23	14	26	3	-	-	-	194	56	250
15	Jawa Timur	5	2	12	9	24	21	66	9	621	162	711	264	561	335	389	230	213	79	-	-	-	2.602	1.111	3.713
16	Banten	1	0	4	4	7	4	13	2	211	25	189	51	90	37	41	22	7	3	-	-	-	563	148	711
17	Bali	3	0	5	1	4	4	11	0	141	47	150	58	109	76	84	51	29	6	-	-	-	536	243	779
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	2	3	0	9	1	54	8	51	8	22	8	14	3	6	0	-	-	-	159	30	189
19	Nusa Tenggara Timur	2	0	4	3	4	1	7	2	114	39	106	48	44	18	34	16	13	10	-	-	-	328	137	465
20	Kalimantan Barat	1	1	0	4	0	3	12	1	101	23	101	42	59	17	29	9	11	1	-	-	-	314	101	415
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	0	0	2	1	49	8	45	14	39	11	11	6	5	0	-	-	-	152	40	192
22	Kalimantan Selatan	1	0	0	1	2	0	7	1	61	6	68	14	37	18	24	6	9	1	-	-	-	209	47	256
23	Kalimantan Timur	3	4	2	3	3	1	9	2	73	19	83	24	62	31	36	15	15	4	-	-	-	286	103	389
24	Kalimantan Utara	0	0	0	1	0	0	4	0	18	7	22	6	14	10	3	0	1	0	-	-	-	62	24	86
25	Sulawesi Utara	2	3	1	1	2	1	18	3	118	14	65	15	33	12	12	6	4	2	-	-	-	255	57	312
26	Sulawesi Tengah	0	1	0	0	3	0	17	0	91	12	65	15	29	7	17	0	3	1	-	-	-	225	36	261
27	Sulawesi Selatan	0	0	3	1	1	5	34	2	273	25	184	32	105	28	28	14	5	1	-	-	-	633	108	741
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	1	10	3	57	10	53	10	24	15	7	4	1	1	-	-	-	152	44	196
29	Gorontalo	0	0	0	1	0	0	4	0	36	7	24	2	6	3	7	0	0	0	-	-	-	77	13	90
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	2	0	24	0	14	2	8	2	2	1	0	0	-	-	-	51	5	56
31	Maluku	1	3	1	3	1	0	8	2	49	21	42	21	17	6	5	3	4	2	-	-	-	128	61	189
32	Maluku Utara	2	0	3	0	1	3	9	6	54	26	40	21	35	8	5	3	4	3	-	-	-	153	70	223
33	Papua	1	4	11	6	1	3	15	48	150	223	124	96	39	53	20	13	8	4	-	-	-	369	450	819
34	Papua Barat	0	0	2	3	1	2	3	11	41	43	29	20	10	10	3	5	1	0	-	-	-	90	94	184
35	Papua Selatan	0	1	0	1	1	0	0	5	13	18	12	7	8	7	0	2	0	0	-	-	-	34	41	75
36	Papua Tengah	1	2	2	4	1	3	12	47	91	109	45	52	28	17	9	8	1	1	-	-	-	190	243	433
37	Papua Pegunungan																			-	-	-	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	1	0	1	3	5	19	21	14	17	7	7	2	0	0	0	-	-	-	45	52	97
Indonesia		39	34	103	82	126	119	541	201	5.289	1.233	4.830	1.490	2.914	1.450	1.519	712	643	211	0	0	0	16.004	5.532	21.536
		0,3%		0,9%		1,1%		3,4%		30,3%		29,3%		20,3%		10,4%		4,0%		0,0%		0,0%	100%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Data per 25 Januari 2024

Lampiran 60.b

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui		Total			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Aceh	0	1	0	0	0	0	1	0	5	2	7	1	4	2	1	1	0	0	-	-	18	7	25	
2	Sumatera Utara	1	0	0	0	0	0	1	1	50	8	65	11	28	16	10	3	2	1	-	-	157	40	197	
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	9	0	5	0	7	0	1	0	-	-	30	1	31	
4	Riau	0	0	0	1	0	0	1	0	7	1	17	2	5	3	4	1	0	1	-	-	34	9	43	
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	6	1	5	2	1	1	1	0	-	-	19	5	24	
6	Sumatera Selatan	0	0	1	0	0	0	0	0	13	0	14	3	8	1	5	0	0	0	-	-	41	4	45	
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	2	0	1	0	1	-	-	8	4	12	
8	Lampung	0	1	0	0	0	1	0	0	6	0	17	2	6	1	3	1	0	0	-	-	32	6	38	
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	5	2	1	0	1	0	-	-	13	4	17	
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	9	6	10	3	3	2	3	0	-	-	34	11	45	
11	DKI Jakarta	1	0	2	0	1	2	4	1	40	9	43	25	53	28	30	12	8	4	-	-	182	81	263	
12	Jawa Barat	0	0	1	1	3	2	11	1	98	17	86	38	72	30	41	12	15	5	-	-	327	106	433	
13	Jawa Tengah	1	1	2	0	3	1	4	2	42	12	67	28	67	37	48	19	18	9	-	-	252	109	361	
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	3	6	6	7	3	8	0	-	-	28	13	41	
15	Jawa Timur	1	1	1	1	2	2	5	0	41	23	99	34	97	47	70	27	58	16	-	-	374	151	525	
16	Banten	0	0	0	0	1	0	1	0	20	4	31	10	19	8	5	5	1	1	-	-	78	28	106	
17	Bali	0	0	1	0	0	1	1	0	8	6	10	7	19	10	13	5	7	1	-	-	59	30	89	
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	7	2	2	2	2	2	3	0	-	-	20	7	27	
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	1	0	1	0	8	2	20	7	3	0	4	2	2	3	-	-	39	14	53	
20	Kalimantan Barat	1	0	0	1	0	0	1	0	10	2	20	10	11	4	4	0	2	0	-	-	49	17	66	
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	8	0	5	2	1	1	2	0	-	-	27	3	30	
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	1	0	0	0	13	1	26	1	8	1	7	1	5	0	-	-	60	4	64	
23	Kalimantan Timur	1	2	1	0	1	0	1	0	13	2	9	7	18	10	12	3	5	1	-	-	61	25	86	
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	3	3	0	0	0	0	-	-	9	4	13	
25	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	11	2	5	1	6	1	1	0	0	0	-	-	24	4	28	
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	1	0	11	1	13	5	10	2	6	0	1	0	-	-	42	8	50	
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	3	1	36	4	26	6	25	8	7	5	1	0	-	-	98	24	122	
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	9	3	5	3	5	1	1	1	-	-	31	8	39	
29	Gorontalo	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2	5	0	1	2	3	0	0	0	-	-	13	5	18	
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	-	-	8	0	8	
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	3	3	1	2	1	3	0	-	-	15	8	23	
32	Maluku Utara	1	0	0	0	0	2	1	2	4	1	8	3	6	2	0	0	1	2	-	-	21	12	33	
33	Papua	0	1	1	0	0	1	1	0	11	8	11	7	3	3	1	5	1	0	-	-	29	25	54	
34	Papua Barat	0	0	0	2	0	0	0	0	3	2	1	1	0	2	0	0	0	0	-	-	4	7	11	
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	1	2	3	
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	2	9	2	4	3	1	0	0	0	0	0	-	-	14	7	21	
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	-	-	1	2	3	
Indonesia		8	7	10	7	15	12	46	12	524	117	671	234	524	245	304	115	150	46	0	0	2252	795	3047	
		0,5		0,6		0,9		1,9		21,0		29,7		25,2		13,8		6,4		0,0		100,0			

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Data per

Lampiran 60.c

**JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2024
		2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	33	88	130	
2	Sumatera Utara	403	893	1.316	
3	Sumatera Barat	109	156	238	
4	Riau	223	263	345	
5	Jambi	21	36	93	
6	Sumatera Selatan	563	320	332	
7	Bengkulu	81	62	57	
8	Lampung	159	233	351	
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	62	84	
10	Kepulauan Riau	167	289	352	
11	DKI Jakarta	89	1.229	1.820	
12	Jawa Barat	510	2.575	3.239	
13	Jawa Tengah	1.484	2.008	2.058	
14	DI Yogyakarta	107	174	250	
15	Jawa Timur	666	2.434	3.713	
16	Banten	434	622	711	
17	Bali	851	1.680	779	
18	Nusa Tenggara Barat	396	148	189	
19	Nusa Tenggara Timur	178	358	465	
20	Kalimantan Barat	229	333	415	
21	Kalimantan Tengah	75	142	192	
22	Kalimantan Selatan	162	233	256	
23	Kalimantan Timur	232	269	389	
24	Kalimantan Utara	64	64	86	
25	Sulawesi Utara	177	196	312	
26	Sulawesi Tengah	127	105	261	
27	Sulawesi Selatan	464	413	741	
28	Sulawesi Tenggara	116	70	196	
29	Gorontalo	19	54	90	
30	Sulawesi Barat	12	20	56	
31	Maluku	33	72	189	
32	Maluku Utara	123	155	223	
33	Papua	858	261	819	
34	Papua Barat	141	184	184	
35	Papua Selatan	-	57	75	
36	Papua Tengah	-	740	433	
37	Papua Pegunungan	-	79	0	
38	Papua Barat Daya	-	40	97	
Indonesia		9.341	17.117	21.536	0

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Data per

Lampiran 60.d

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	130	1	1%
2	Sumatera Utara	1.316	3	0%
3	Sumatera Barat	238	2	1%
4	Riau	345	0	0%
5	Jambi	93	2	2%
6	Sumatera Selatan	332	2	1%
7	Bengkulu	57	0	0%
8	Lampung	351	1	0%
9	Kepulauan Bangka Belitung	84	0	0%
10	Kepulauan Riau	352	0	0%
11	DKI Jakarta	1.820	25	1%
12	Jawa Barat	3.239	32	1%
13	Jawa Tengah	2.058	6	0%
14	DI Yogyakarta	250	2	1%
15	Jawa Timur	3.713	13	0%
16	Banten	711	2	0%
17	Bali	779	2	0%
18	Nusa Tenggara Barat	189	0	0%
19	Nusa Tenggara Timur	465	1	0%
20	Kalimantan Barat	415	4	1%
21	Kalimantan Tengah	192	0	0%
22	Kalimantan Selatan	256	1	0%
23	Kalimantan Timur	389	5	1%
24	Kalimantan Utara	86	0	0%
25	Sulawesi Utara	312	3	1%
26	Sulawesi Tengah	261	0	0%
27	Sulawesi Selatan	741	3	0%
28	Sulawesi Tenggara	196	1	1%
29	Gorontalo	90	0	0%
30	Sulawesi Barat	56	0	0%
31	Maluku	189	0	0%
32	Maluku Utara	223	3	1%
33	Papua	819	0	0%
34	Papua Barat	184	0	0%
35	Papua Selatan	75	0	0%
36	Papua Tengah	433	1	0%
37	Papua Pegunungan	0	0	0%
38	Papua Barat Daya	97	0	0%
Indonesia		21.536	115	0,0

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 61

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Diare					
		Dilayani		Mendapat Oralit (Semua Umur)		Mendapat Oralit dan Zinc (Balita)	
		Semua Umur	Balita				
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(5)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	45.444	15.840	38.640	85,0	13.992	88,3
2	Sumatera Utara	133.953	56.382	131076	97,9	53.695	95,2
3	Sumatera Barat	50.105	13.050	49.008	97,8	12.912	98,9
4	Riau	38.745	10.481	34.580	89,3	9.001	85,9
5	Jambi	29.469	8.516	27.997	95,0	7.802	91,6
6	Sumatera Selatan	27.263	9.349	26.824	98,4	8.997	96,2
7	Bengkulu	10.625	3.393	9.739	91,7	3.024	89,1
8	Lampung	74.406	22.326	67.548	90,8	16.968	76,0
9	Kep. Bangka Belitung	17.822	6.545	16.961	95,2	6.391	97,6
10	Kepulauan Riau	21.425	4.418	20.776	97,0	4.312	97,6
11	DKI Jakarta	195.005	55.037	178.267	91,4	51.262	93,1
12	Jawa Barat	663.921	213.663	644.026	97,0	206.228	96,5
13	Jawa Tengah	467.663	130.750	399.615	85,4	113.179	86,6
14	DI Yogyakarta	41.886	7.525	37.062	88,5	6.869	91,3
15	Jawa Timur	435.344	163.769	424.354	97,5	159.785	97,6
16	Banten	172.447	53.758	165.567	96,0	51.243	95,3
17	Bali	41.739	10.693	39.257	94,1	9.647	90,2
18	Nusa Tenggara Barat	102.324	44.220	96.288	94,1	41.940	94,8
19	Nusa Tenggara Timur	29.313	14.261	25.613	87,4	12.920	90,6
20	Kalimantan Barat	36.776	13.340	30.381	82,6	11.037	82,7
21	Kalimantan Tengah	20.353	6.692	18.053	88,7	6.005	89,7
22	Kalimantan Selatan	44.075	14.990	41.049	93,1	14.297	95,4
23	Kalimantan Timur	55.417	16.779	50.292	90,8	15.316	91,3
24	Kalimantan Utara	13.889	5.669	12.430	89,5	5.133	90,5
25	Sulawesi Utara	11.532	3.556	9.901	85,9	3.016	84,8
26	Sulawesi Tengah	34.225	12.314	29.937	87,5	11.168	90,7
27	Sulawesi Selatan	120.370	38.367	91.006	75,6	28.509	74,3
28	Sulawesi Tenggara	24.613	9.786	20.138	81,8	8.225	84,0
29	Gorontalo	13.040	5.885	11.619	89,1	5.453	92,7
30	Sulawesi Barat	16.785	5.657	13.771	82,0	4.901	86,6
31	Maluku	17.183	8.503	13.610	79,2	6.964	81,9
32	Maluku Utara	11.256	5.342	10.042	89,2	4.871	91,2
33	Papua	5.610	3.483	5.418	96,6	3.427	98,4
34	Papua Barat	7.309	4.020	6.135	83,9	3.811	94,8
35	Papua Selatan	3.658	1.873	3.108	85,0	1.598	85,3
36	Papua Tengah	1.771	1.274	1.469	82,9	1.105	86,7
37	Papua Pegunungan	15.144	10.188	12.288	81,1	6.480	63,6
38	Papua Barat Daya	4.167	2.439	3.113	74,7	1.986	81,4
Indonesia		3.056.072	1.014.133	2.816.958	92,2	933.469	92,05

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	100,0
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,0
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua	9	9	100,0
34	Papua Barat	7	7	100,0
35	Papua Selatan	4	4	100,0
36	Papua Tengah	8	3	37,5
37	Papua Pegunungan	8	3	37,5
38	Papua Barat Daya	6	6	100,0
Indonesia		514	504	98,1

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 64

KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.599.952	18	22	40	148	77	225	166	99	265	4,7
2	Sumatera Utara	15.294.995	3	2	5	66	37	103	69	39	108	0,7
3	Sumatera Barat	5.676.344	4	0	4	31	22	53	35	22	57	1,0
4	Riau	6.728.053	3	5	8	72	32	104	75	37	112	1,7
5	Jambi	3.674.667	1	6	7	27	20	47	28	26	54	1,5
6	Sumatera Selatan	8.837.301	13	7	20	141	103	244	154	110	264	3,0
7	Bengkulu	2.059.421	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0,3
8	Lampung	8.521.201	9	2	11	106	53	159	115	55	170	2,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.068	2	2	4	30	18	48	32	20	52	3,4
10	Kepulauan Riau	2.188.486	3	0	3	24	12	36	27	12	39	1,8
11	DKI Jakarta	11.350.328	16	15	31	304	146	450	320	161	481	4,2
12	Jawa Barat	49.964.542	70	43	113	1.134	558	1.692	1.204	601	1.805	3,6
13	Jawa Tengah	37.892.283	26	39	65	850	379	1.229	876	418	1.294	3,4
14	DI Yogyakarta	3.694.038	4	4	8	25	18	43	29	22	51	1,4
15	Jawa Timur	41.814.499	44	49	93	1.385	720	2.105	1.429	769	2.198	5,3
16	Banten	13.632.823	34	34	68	484	239	723	518	273	791	5,8
17	Bali	4.646.694	2	1	3	81	35	116	83	36	119	2,6
18	Nusa Tenggara Barat	5.646.015	20	24	44	138	101	239	158	125	283	5,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.656.039	23	12	35	291	121	412	314	133	447	7,9
20	Kalimantan Barat	5.459.482	1	3	4	49	21	70	50	24	74	1,4
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	6	3	9	45	21	66	51	24	75	2,7
22	Kalimantan Selatan	4.232.631	2	3	5	82	55	137	84	58	142	3,35
23	Kalimantan Timur	3.834.983	8	4	12	112	5	117	120	9	129	3,4
24	Kalimantan Utara	742.542	1	1	2	23	10	33	24	11	35	4,7
25	Sulawesi Utara	2.592.274	9	9	18	281	142	423	290	151	441	17,0
26	Sulawesi Tengah	3.121.753	21	18	39	199	118	317	220	136	356	11,4
27	Sulawesi Selatan	9.150.274	20	29	49	417	310	727	437	339	776	8,5
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	8	8	16	120	47	167	128	55	183	6,7
29	Gorontalo	1.194.463	2	3	5	143	64	207	145	67	212	17,7
30	Sulawesi Barat	1.462.887	9	11	20	104	45	149	113	56	169	11,6
31	Maluku	1.841.492	3	7	10	272	148	420	275	155	430	23,4
32	Maluku Utara	1.301.836	29	20	49	376	212	588	405	232	637	48,9
33	Papua	828.420	108	148	256	609	360	969	717	508	1.225	147,9
34	Papua Barat	578.696	40	66	106	186	100	286	226	166	392	67,7
35	Papua Selatan	544.491	8	7	15	96	77	173	104	84	188	34,5
36	Papua Tengah	991.989	128	17	145	59	65	124	187	82	269	27,1
37	Papua Pegunungan	203.572	1	3	4	4	5	9	5	8	13	6,4
38	Papua Barat Daya	553.575	31	42	73	206	76	282	237	118	355	64,1
Indonesia		278.516.052	730	669	1.399	8.727	4.572	13.299	9.457	5.241	14.698	5,3
Proporsi Jenis Kelamin			52,2	47,8		65,6	34,4		64,3	35,7		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025
Keterangan: Data per 20 Maret 2025

Lampiran 65

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.599.952	265	250	94,3	5	1,9	0,9	24	9,1	1	0,4
2	Sumatera Utara	15.294.995	108	75	69,4	17	15,7	1,1	5	4,6	0	0,0
3	Sumatera Barat	5.676.344	57	44	77,2	5	8,8	0,9	0	0,0	0	0,0
4	Riau	6.728.053	112	96	85,7	10	8,9	1,5	8	7,1	0	0,0
5	Jambi	3.674.667	54	44	81,5	8	14,8	2,2	4	7,4	0	0,0
6	Sumatera Selatan	8.837.301	264	223	84,5	5	1,9	0,6	11	4,2	1	9,1
7	Bengkulu	2.059.421	7	3	42,9	3	42,9	1,5	0	0,0	0	0,0
8	Lampung	8.521.201	170	120	70,6	14	8,2	1,6	9	5,3	0	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.068	52	38	73,1	11	21,2	7,2	4	7,7	1	25,0
10	Kepulauan Riau	2.188.486	39	35	89,7	3	7,7	1,4	3	7,7	1	33,3
11	DKI Jakarta	11.350.328	481	422	87,7	21	4,4	1,9	18	3,7	1	5,6
12	Jawa Barat	49.964.542	1.805	1.375	76,2	162	9,0	3,2	121	6,7	6	5,0
13	Jawa Tengah	37.892.283	1.294	1.038	80,2	126	9,7	3,3	58	4,5	1	1,7
14	DI Yogyakarta	3.694.038	51	44	86,3	3	5,9	0,8	3	5,9	0	0,0
15	Jawa Timur	41.814.499	2.198	1.660	75,5	212	9,6	5,1	115	5,2	13	11,3
16	Banten	13.632.823	791	679	85,8	53	6,7	3,9	67	8,5	0	0,0
17	Bali	4.646.694	119	98	82,4	5	4,2	1,1	3	2,5	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.646.015	283	272	96,1	6	2,1	1,1	16	5,7	1	6,3
19	Nusa Tenggara Timur	5.656.039	447	372	83,2	39	8,7	6,9	27	6,0	1	3,7
20	Kalimantan Barat	5.459.482	74	53	71,6	14	18,9	2,6	3	4,1	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	75	67	89,3	4	5,3	1,5	2	2,7	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	4.232.631	142	122	85,9	14	9,9	3,3	2	1,4	0	0,0
23	Kalimantan Timur	3.834.983	129	119	92,2	0	0,0	0,0	3	2,3	0	0,0
24	Kalimantan Utara	742.542	35	33	94,3	1	2,9	1,3	0	0,0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	2.592.274	441	413	93,7	16	3,6	6,2	30	6,8	1	3,3
26	Sulawesi Tengah	3.121.753	356	343	96,3	8	2,2	2,6	22	6,2	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	9.150.274	776	655	84,4	47	6,1	5,1	39	5,0	1	2,6
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	183	165	90,2	9	4,9	3,3	8	4,4	0	0,0
29	Gorontalo	1.194.463	212	193	91,0	7	3,3	5,9	13	6,1	0	0,0
30	Sulawesi Barat	1.462.887	169	155	91,7	5	3,0	3,4	8	4,7	0	0,0
31	Maluku	1.841.492	430	405	94,2	12	2,8	6,5	58	13,5	0	0,0
32	Maluku Utara	1.301.836	637	616	96,7	6	0,9	4,6	104	16,3	1	1,0
33	Papua	828.420	1.225	1.207	98,5	6	0,5	7,2	295	24,1	0	0,0
34	Papua Barat	578.696	392	381	97,2	2	0,5	3,5	101	25,8	0	0,0
35	Papua Selatan	544.491	188	134	71,3	0	0,0	0,0	28	14,9	0	0,0
36	Papua Tengah	991.989	269	132	49,1	0	0,0	0,0	143	53,2	0	0,0
37	Papua Pegunungan	203.572	13	6	46,2	5	38,5	24,6	1	7,7	1	100,0
38	Papua Barat Daya	553.575	355	342	96,3	5	1,4	9,0	64	18,0	1	1,6
Indonesia		278.516.052	14.698	12.429	84,6	869	5,9	3,1	1.420	9,7	32	2,3

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: Data per 20 Maret 2025

Lampiran 66

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5.599.952	26	228	254	0,45	ELIMINASI
2	Sumatera Utara	15.294.995	1	114	115	0,08	ELIMINASI
3	Sumatera Barat	5.676.344	4	64	68	0,12	ELIMINASI
4	Riau	6.728.053	6	117	123	0,18	ELIMINASI
5	Jambi	3.674.667	4	53	57	0,16	ELIMINASI
6	Sumatera Selatan	8.837.301	16	261	277	0,31	ELIMINASI
7	Bengkulu	2.059.421	0	7	7	0,03	ELIMINASI
8	Lampung	8.521.201	7	183	190	0,22	ELIMINASI
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.068	3	70	73	0,48	ELIMINASI
10	Kepulauan Riau	2.188.486	3	40	43	0,20	ELIMINASI
11	DKI Jakarta	11.350.328	21	484	505	0,44	ELIMINASI
12	Jawa Barat	49.964.542	62	2.238	2.300	0,46	ELIMINASI
13	Jawa Tengah	37.892.283	43	1.385	1.428	0,38	ELIMINASI
14	DI Yogyakarta	3.694.038	3	50	53	0,14	ELIMINASI
15	Jawa Timur	41.814.499	80	2.516	2.596	0,62	ELIMINASI
16	Banten	13.632.823	35	829	864	0,63	ELIMINASI
17	Bali	4.646.694	6	165	171	0,37	ELIMINASI
18	Nusa Tenggara Barat	5.646.015	38	286	324	0,57	ELIMINASI
19	Nusa Tenggara Timur	5.656.039	22	563	585	1,03	BELUM ELIMINASI
20	Kalimantan Barat	5.459.482	1	90	91	0,17	ELIMINASI
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	8	88	96	0,35	ELIMINASI
22	Kalimantan Selatan	4.232.631	4	173	177	0,42	ELIMINASI
23	Kalimantan Timur	3.834.983	11	137	148	0,39	ELIMINASI
24	Kalimantan Utara	742.542	0	35	35	0,47	ELIMINASI
25	Sulawesi Utara	2.592.274	10	460	470	1,81	BELUM ELIMINASI
26	Sulawesi Tengah	3.121.753	21	323	344	1,10	BELUM ELIMINASI
27	Sulawesi Selatan	9.150.274	21	792	813	0,89	ELIMINASI
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	22	231	253	0,93	BELUM ELIMINASI
29	Gorontalo	1.194.463	3	208	211	1,77	BELUM ELIMINASI
30	Sulawesi Barat	1.462.887	6	173	179	1,22	BELUM ELIMINASI
31	Maluku	1.841.492	7	520	527	2,86	BELUM ELIMINASI
32	Maluku Utara	1.301.836	37	686	723	5,55	BELUM ELIMINASI
33	Papua	828.420	161	1.244	1.405	16,96	BELUM ELIMINASI
34	Papua Barat	578.696	154	642	796	13,76	BELUM ELIMINASI
35	Papua Selatan	544.491	15	228	243	4,46	BELUM ELIMINASI
36	Papua Tengah	991.989	171	282	453	4,57	BELUM ELIMINASI
37	Papua Pegunungan	203.572	1	20	21	1,03	BELUM ELIMINASI
38	Papua Barat Daya	553.575	52	405	457	8,26	BELUM ELIMINASI
Indonesia		278.516.052	1.085	16.390	17.475	0,63	Eliminasi

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: Data per 20 Maret 2025

Lampiran 67

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT / RFT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Kusta (PB)		Kusta (MB)	
		Tahun 2023		Tahun 2022	
		Penderita PB ^a	RFT PB (%)	Penderita MB ^b	RFT MB (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	39	92	163	94
2	Sumatera Utara	3	100	149	83
3	Sumatera Barat	15	100	48	87
4	Riau	12	83	78	71
5	Jambi	9	78	37	92
6	Sumatera Selatan	18	100	209	91
7	Bengkulu	1	100	23	85
8	Lampung	12	92	121	97
9	Kep. Bangka Belitung	2	100	27	81
10	Kepulauan Riau	4	100	31	68
11	DKI Jakarta	41	77	288	90
12	Jawa Barat	118	96	1.585	89
13	Jawa Tengah	57	97	909	89
14	DI Yogyakarta	7	100	25	73
15	Jawa Timur	128	91	2.108	89
16	Banten	68	97	536	86
17	Bali	8	100	94	98
18	Nusa Tenggara Barat	36	89	143	87
19	Nusa Tenggara Timur	35	82	411	84
20	Kalimantan Barat	7	88	52	80
21	Kalimantan Tengah	11	88	75	77
22	Kalimantan Selatan	11	73	95	90
23	Kalimantan Timur	20	84	95	84
24	Kalimantan Utara	0	100	40	74
25	Sulawesi Utara	27	89	433	83
26	Sulawesi Tengah	35	97	282	95
27	Sulawesi Selatan	99	93	669	86
28	Sulawesi Tenggara	28	67	206	88
29	Gorontalo	4	100	142	95
30	Sulawesi Barat	20	91	132	78
31	Maluku	18	83	297	80
32	Maluku Utara	57	93	530	82
33	Papua	167	91	497	73
34	Papua Barat	82	44	348	31
35	Papua Selatan	17	100	100	92
36	Papua Tengah	31	58	140	83
37	Papua Pegunungan	2	100	19	50
38	Papua Barat Daya	72	77	186	42
Indonesia		1.321	85,1	11.323	83,9

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2024, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2023 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b = Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2024, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2022 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

Keterangan: Data per 13 Maret 2025

Lampiran 68

**KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jumlah Kasus Non Polio AFP	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.522.951	121	7,73	81,6
2	Sumatera Utara	4.076.693	516	12,56	84,4
3	Sumatera Barat	1.550.059	157	9,78	87,0
4	Riau	1.987.009	85	4,28	45,0
5	Jambi	905.243	119	12,95	79,5
6	Sumatera Selatan	2.345.037	124	5,29	77,9
7	Bengkulu	500.448	19	3,71	60,0
8	Lampung	2.121.110	156	7,35	52,7
9	Kep. Bangka Belitung	372.151	25	6,65	44,4
10	Kepulauan Riau	656.562	52	7,39	83,6
11	DKI Jakarta	2.412.860	181	7,42	40,6
12	Jawa Barat	12.016.868	940	7,82	82,1
13	Jawa Tengah	7.521.418	979	13,00	88,2
14	DI Yogyakarta	834.875	48	5,75	84,0
15	Jawa Timur	8.242.949	554	6,71	71,7
16	Banten	3.299.832	176	5,33	59,0
17	Bali	962.863	81	8,41	71,8
18	Nusa Tenggara Barat	1.447.069	67	4,63	74,0
19	Nusa Tenggara Timur	1.679.989	140	8,29	85,5
20	Kalimantan Barat	1.321.041	103	7,79	67,0
21	Kalimantan Tengah	676.136	46	6,44	56,9
22	Kalimantan Selatan	1.129.097	54	4,78	55,2
23	Kalimantan Timur	898.639	75	8,10	70,1
24	Kalimantan Utara	190.983	17	7,57	64,7
25	Sulawesi Utara	580.176	40	5,91	85,4
26	Sulawesi Tengah	836.379	54	6,37	72,1
27	Sulawesi Selatan	2.133.372	72	3,37	87,5
28	Sulawesi Tenggara	78.703	24	2,78	75,8
29	Gorontalo	290.311	16	5,42	36,4
30	Sulawesi Barat	392.274	26	6,63	86,2
31	Maluku	499.088	30	5,52	73,5
32	Maluku Utara	350.041	25	6,03	70,4
33	Papua	205.781	24	7,17	83,3
34	Papua Barat	138.146	18	7,34	50,0
35	Papua Selatan	145.617	12	7,58	52,4
36	Papua Tengah	270.406	3	0,98	37,5
37	Papua Pegunungan	310.828	2	0,57	50,0
38	Papua Barat Daya	15.003	2	0,82	33,3
Indonesia		65.761.361	5.183	7,75	76,2

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Data per 17 Maret 2025

Lampiran 69.a

JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Difteri				Pertusis			Tetanus Neonatorum				Suspek Campak		
		Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus			Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus		
		L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	13	19	32	4	108	133	241	0	0	0	0	724	813	1.537
2	Sumatera Utara	20	12	32	5	0	1	1	2	3	5	2	530	610	1.140
3	Sumatera Barat	19	16	35	8	10	9	19	1	0	1	1	302	372	674
4	Riau	16	14	30	2	65	75	140	1	2	3	2	61	63	124
5	Jambi	11	7	18	1	4	6	10	0	1	1	1	99	119	218
6	Sumatera Selatan	5	5	10	0	0	0	0	1	1	2	2	225	242	467
7	Bengkulu	2	0	2	0	87	115	202	0	0	0	0	30	32	62
8	Lampung	8	2	10	0	16	22	38	0	0	0	0	206	271	477
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	2	1	273	295	568	0	0	0	0	62	64	126
10	Kepulauan Riau	3	2	5	0	24	17	41	0	0	0	0	79	63	142
11	DKI Jakarta	41	29	70	1	39	43	82	1	0	1	0	837	814	1.651
12	Jawa Barat	64	45	109	1	25	22	47	1	0	1	1	1.448	1.625	3.073
13	Jawa Tengah	8	7	15	1	10	23	33	0	1	1	0	2.378	2.742	5.120
14	DI Yogyakarta	2	10	12	0	18	17	35	0	0	0	0	605	647	1.252
15	Jawa Timur	178	161	339	6	30	20	50	8	5	13	10	1.741	1.917	3.658
16	Banten	22	24	46	0	9	8	17	4	2	6	3	472	530	1.002
17	Bali	2	0	2	0	25	26	51	0	0	0	0	140	140	280
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	54	64	118	0	0	0	0	120	119	239
19	Nusa Tenggara Timur	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	113	132	245
20	Kalimantan Barat	17	12	29	1	0	0	0	0	0	0	0	262	232	494
21	Kalimantan Tengah	9	3	12	0	3	3	6	0	0	0	0	80	83	163
22	Kalimantan Selatan	5	5	10	0	3	2	5	0	0	0	0	102	81	183
23	Kalimantan Timur	34	32	66	7	2	0	2	0	1	1	0	219	215	434
24	Kalimantan Utara	1	2	3	1	0	0	0	1	0	1	0	84	108	192
25	Sulawesi Utara	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	101	102	203
26	Sulawesi Tengah	2	3	5	0	0	0	0	0	1	1	0	256	240	496
27	Sulawesi Selatan	9	4	13	1	0	0	0	0	1	1	1	310	332	642
28	Sulawesi Tenggara	4	2	6	0	2	3	5	0	0	0	0	109	98	207
29	Gorontalo	0	3	3	0	67	55	122	0	0	0	0	80	63	143
30	Sulawesi Barat	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	124	122	246
31	Maluku	3	0	3	1	4	6	10	0	0	0	0	44	43	87
32	Maluku Utara	2	1	3	0	3	3	6	0	1	1	1	204	192	396
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	25	13	38
34	Papua Barat	2	3	5	0	0	2	2	2	0	2	1	23	17	40
35	Papua Selatan	0	0	0	0	101	110	211	0	0	0	0	9	10	19
36	Papua Tengah	1	4	5	1	73	95	168	0	0	0	0	25	33	58
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	14	37	51	0	0	0	0	0	1	1
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	93	92	185	0	0	0	0	56	54	110
Indonesia		512	431	943	42	1.162	1.304	2.466	23	20	43	27	12.285	13.354	25.639
Case Fatality Rate (%)					4,5							62,8			

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025
Data per 17 Maret 2025

Lampiran 69.b

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Total Kasus	Meninggal	Case fatality Rate (%)	Faktor Risiko																				Status Rawat			
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS		
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Diimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1	Aceh	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	5	2	40,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	1	1	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	3	2	66,7	0	5	1	0	0	1	0	5	0	0	0	6	0	0	3	1	2	0	4	0	1	1	6	0
5	Jambi	1	1	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	2	2	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
8	Lampung	0	0	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0,0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
11	DKI Jakarta	1	0	0,0	3	9	0	1	0	2	2	9	0	1	6	6	0	0	5	5	2	1	8	1	2	2	13	0
12	Jawa Barat	1	1	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	13	10	76,9	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
16	Banten	6	3	50,0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
17	Bali	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	Kalimantan Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	0	0,0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0
24	Kalimantan Utara	1	0	0,0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	1	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0,0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	2	1	2	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
32	Maluku Utara	1	1	100,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
33	Papua	2	2	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	2	1	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36	Papua Tengah	0	0	0,0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0,0	2	2	0	1	0	0	0	2	3	1	2	0	1	1	2	0	0	3	2	0	0	3	5	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		43	27	62,8	9	22	1	7	4	4	3	26	10	3	10	17	6	7	12	11	7	13	21	4	7	11	37	4

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Data per 17 Maret 2025

Lampiran 69.c

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	185	122	67	47	72	65	111	92	91	199	250	236	1.537
2	Sumatera Utara	32	80	42	50	70	99	114	116	92	172	140	133	1.140
3	Sumatera Barat	60	44	59	39	60	53	88	60	37	82	63	29	674
4	Riau	13	12	5	6	9	14	14	9	9	10	7	16	124
5	Jambi	11	16	20	7	27	20	29	16	19	22	12	19	218
6	Sumatera Selatan	35	49	27	24	57	39	48	56	55	40	25	12	467
7	Bengkulu	5	15	6	2	4	4	10	3	3	4	5	1	62
8	Lampung	23	56	31	26	37	28	40	24	49	40	74	49	477
9	Kep. Bangka Belitung	18	13	11	8	7	9	17	7	12	9	10	5	126
10	Kepulauan Riau	8	10	8	4	8	11	33	10	12	10	14	14	142
11	DKI Jakarta	122	101	161	190	229	136	174	117	109	115	88	109	1.651
12	Jawa Barat	306	267	321	281	294	258	297	243	226	255	200	125	3.073
13	Jawa Tengah	383	402	432	330	545	441	566	423	466	460	390	282	5.120
14	DI Yogyakarta	79	83	120	84	95	73	113	97	143	114	109	142	1.252
15	Jawa Timur	197	237	289	198	336	214	323	324	391	421	415	313	3.658
16	Banten	97	104	81	48	95	100	91	89	103	88	44	62	1.002
17	Bali	41	17	44	32	43	12	17	21	7	23	14	9	280
18	Nusa Tenggara Barat	22	14	18	16	21	10	12	35	60	31	0	0	239
19	Nusa Tenggara Timur	7	21	12	8	16	42	14	18	20	57	13	17	245
20	Kalimantan Barat	35	36	46	23	42	42	41	55	53	71	42	8	494
21	Kalimantan Tengah	6	2	0	5	2	5	19	47	37	34	6	0	163
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	0	0	0	1	12	61	86	21	0	183
23	Kalimantan Timur	60	34	74	23	53	39	52	30	28	20	9	12	434
24	Kalimantan Utara	42	16	25	28	13	9	13	20	7	10	8	1	192
25	Sulawesi Utara	39	22	36	12	26	26	2	10	11	16	2	1	203
26	Sulawesi Tengah	104	68	36	27	37	24	55	35	43	15	23	29	496
27	Sulawesi Selatan	106	52	51	27	68	49	49	62	44	68	54	12	642
28	Sulawesi Tenggara	33	23	18	4	4	22	51	32	20	0	0	0	207
29	Gorontalo	22	16	0	2	0	12	0	12	26	41	12	0	143
30	Sulawesi Barat	24	38	8	8	17	12	41	53	23	17	4	1	246
31	Maluku	47	5	0	0	2	12	9	2	2	4	4	0	87
32	Maluku Utara	57	46	18	12	33	38	32	34	39	39	45	3	396
33	Papua	6	1	0	1	2	3	2	5	5	9	4	0	38
34	Papua Barat	0	4	7	5	5	4	4	3	3	2	3	0	40
35	Papua Selatan	8	0	1	1	5	0	4	0	0	0	0	0	19
36	Papua Tengah	1	2	2	4	0	5	13	10	14	6	1	0	58
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
38	Papua Barat Daya	28	43	28	4	1	1	2	1	0	1	0	1	110
Indonesia		2.262	2.071	2.106	1.586	2.335	1.931	2.501	2.183	2.321	2.591	2.111	1.641	25.639

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025
Data per 17 Maret 2025

Lampiran 69.d

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	9	127	27	487	57	449	42	137	43	337	0	0	1.537	178	11,6
2	Sumatera Utara	11	80	99	285	124	272	96	140	96	363	0	0	1.140	426	37,4
3	Sumatera Barat	9	49	28	121	64	106	50	85	117	313	0	0	674	268	39,8
4	Riau	0	8	9	43	14	22	8	10	13	41	0	0	124	44	35,5
5	Jambi	3	22	19	64	35	52	18	30	23	50	0	0	218	98	45,0
6	Sumatera Selatan	16	75	51	154	60	105	40	50	32	83	0	0	467	199	42,6
7	Bengkulu	0	1	7	15	13	14	9	10	8	22	0	0	62	37	59,7
8	Lampung	14	49	70	141	85	103	42	56	80	128	0	0	477	291	61,0
9	Kep. Bangka Belitung	7	16	12	38	23	31	15	19	14	22	0	0	126	71	56,3
10	Kepulauan Riau	7	20	15	43	19	37	11	16	11	26	0	0	142	63	44,4
11	DKI Jakarta	127	365	240	615	158	300	88	147	93	224	0	0	1.651	706	42,8
12	Jawa Barat	61	427	318	898	389	658	218	336	214	754	0	0	3.073	1.200	39,0
13	Jawa Tengah	110	465	647	1.322	835	1.176	543	775	612	1.382	0	0	5.120	2.747	53,7
14	DI Yogyakarta	36	210	92	387	73	240	30	126	51	289	0	0	1.252	282	22,5
15	Jawa Timur	93	479	422	1.321	487	892	218	298	268	668	0	0	3.658	1.488	40,7
16	Banten	29	175	129	348	111	186	62	85	80	208	0	0	1.002	411	41,0
17	Bali	10	31	36	66	51	59	28	35	37	89	0	0	280	162	57,9
18	Nusa Tenggara Barat	13	31	27	103	29	73	9	13	7	19	0	0	239	85	35,6
19	Nusa Tenggara Timur	8	25	47	80	42	52	29	44	24	44	0	0	245	150	61,2
20	Kalimantan Barat	8	54	41	190	59	121	43	67	26	62	0	0	494	177	35,8
21	Kalimantan Tengah	0	17	0	71	2	60	0	7	0	8	0	0	163	2	1,2
22	Kalimantan Selatan	0	16	0	57	0	52	0	18	0	40	0	0	183	0	0,0
23	Kalimantan Timur	2	65	28	152	35	105	22	36	25	76	0	0	434	112	25,8
24	Kalimantan Utara	6	33	20	78	16	39	11	17	7	25	0	0	192	60	31,3
25	Sulawesi Utara	4	22	14	69	29	43	17	22	18	47	0	0	203	82	40,4
26	Sulawesi Tengah	3	44	40	194	36	125	19	44	23	89	0	0	496	121	24,4
27	Sulawesi Selatan	19	90	60	233	63	160	34	52	45	107	0	0	642	221	34,4
28	Sulawesi Tenggara	4	20	19	76	20	48	10	21	15	42	0	0	207	68	32,9
29	Gorontalo	2	18	11	65	10	30	4	7	8	23	0	0	143	35	24,5
30	Sulawesi Barat	1	19	10	79	18	50	10	22	18	76	0	0	246	57	23,2
31	Maluku	1	10	8	39	6	21	2	8	0	9	0	0	87	17	19,5
32	Maluku Utara	6	73	34	167	21	90	9	18	15	48	0	0	396	85	21,5
33	Papua	3	10	5	13	8	9	3	3	2	3	0	0	38	21	55,3
34	Papua Barat	1	9	7	23	1	4	2	2	2	2	0	0	40	13	32,5
35	Papua Selatan	0	0	2	13	2	6	0	0	0	0	0	0	19	4	21,1
36	Papua Tengah	1	14	3	30	3	9	2	2	1	3	0	0	58	10	17,2
37	Papua Pegunungan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0
38	Papua Barat Daya	2	9	6	48	7	27	3	9	5	17	0	0	110	23	20,9
Indonesia		626	3.178	2.603	8.129	3.005	5.826	1.747	2.767	2.033	5.739	0	0	25.639	10.014	39,1

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Data per 17 Maret 2025

Lampiran 69.e

JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		>14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	1	12	6	154	16	185	2	22	0	9	0	0	382	25	6,5
2	Sumatera Utara	0	0	18	76	17	85	3	6	3	14	0	0	181	41	22,7
3	Sumatera Barat	0	0	0	3	3	5	1	1	1	2	0	0	11	5	45,5
4	Riau	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0
5	Jambi	2	3	3	9	3	3	2	3	3	5	0	0	23	13	56,5
6	Sumatera Selatan	0	0	9	26	5	8	3	5	2	11	0	0	50	19	38,0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	1	33,3
8	Lampung	0	0	1	7	5	11	1	2	1	2	0	0	22	8	36,4
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	3	2	66,7
10	Kepulauan Riau	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	1	25,0
11	DKI Jakarta	2	9	10	31	3	12	8	10	2	4	0	0	66	25	37,9
12	Jawa Barat	2	31	26	112	17	80	5	14	12	25	0	0	262	62	23,7
13	Jawa Tengah	5	25	53	113	63	95	33	50	20	47	0	0	330	174	52,7
14	DI Yogyakarta	0	0	10	41	4	23	1	12	3	14	0	0	90	18	20,0
15	Jawa Timur	0	5	30	253	44	192	6	15	10	25	0	0	490	90	18,4
16	Banten	1	6	6	19	7	17	1	3	0	2	0	0	47	15	31,9
17	Bali	0	2	1	1	2	3	1	1	0	6	0	0	13	4	30,8
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	9	55	12	50	3	4	1	1	0	0	110	25	22,7
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	4	0	0	1	1	0	1	0	0	6	1	16,7
20	Kalimantan Barat	0	0	2	72	11	40	3	10	5	7	0	0	129	21	16,3
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	56	0	45	0	3	0	3	0	0	107	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	31	0	35	0	3	0	7	0	0	76	0	0,0
23	Kalimantan Timur	0	0	5	56	6	54	2	9	5	17	0	0	136	18	13,2
24	Kalimantan Utara	0	0	2	10	0	7	0	0	1	1	0	0	18	3	16,7
25	Sulawesi Utara	0	0	2	35	9	18	1	4	3	6	0	0	63	15	23,8
26	Sulawesi Tengah	0	0	7	45	7	46	2	8	2	19	0	0	118	18	15,3
27	Sulawesi Selatan	0	0	6	82	9	66	4	11	3	21	0	0	180	22	12,2
28	Sulawesi Tenggara	0	0	4	28	7	21	2	7	6	13	0	0	69	19	27,5
29	Gorontalo	0	9	4	37	5	15	0	0	1	6	0	0	67	10	14,9
30	Sulawesi Barat	0	0	3	44	4	26	1	4	4	33	0	0	107	12	11,2
31	Maluku	0	0	3	15	3	9	1	3	0	5	0	0	32	7	21,9
32	Maluku Utara	0	0	5	21	3	17	1	3	2	6	0	0	47	11	23,4
33	Papua	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0
34	Papua Barat	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	25,0
35	Papua Selatan	0	0	2	8	1	5	0	0	0	0	0	0	13	3	23,1
36	Papua Tengah	0	0	2	23	2	5	2	2	0	0	0	0	30	6	20,0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
38	Papua Barat Daya	0	0	1	9	3	7	0	2	0	0	0	0	18	4	22,2
Indonesia		13	102	232	1.482	272	1.190	90	218	92	317	0	0	3.309	699	21,1

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Data per 17 Maret 2025

Lampiran 69.f

**FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1	1	1	1	6	0
2	Sumatera Utara	6	6	6	6	53	0
3	Sumatera Barat	3	3	3	3	22	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	1	1	1	10	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	1	3	3	10	0
13	Jawa Tengah	5	4	5	5	59	0
14	DI Yogyakarta	2	0	2	2	5	0
15	Jawa Timur	12	7	12	12	149	0
16	Banten	5	1	5	5	17	0
17	Bali	1	0	1	1	8	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	5	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	1	1	1	5	0
24	Kalimantan Utara	1	0	1	1	5	0
25	Sulawesi Utara	2	1	2	2	16	0
26	Sulawesi Tengah	7	6	7	7	131	0
27	Sulawesi Selatan	4	3	4	4	29	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	7	3	7	7	59	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	2	1	2	2	25	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	1	0	1	1	12	0
Indonesia		65	40	65	65	626	0

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Data per 17 Maret 2025

Lampiran 69.g

DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab	Tanpa Spesimen	
		Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	4	34	0	0	0	0	2	19	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	3	22	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	3	15	0	0	0	0	1	36	8	0	0
14	DI Yogyakarta	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	10	133	1	4	1	12	0	0	0	0	0
16	Banten	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	7	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	4	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	6	49	0	0	0	0	0	0	0	1	10
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		53	502	1	4	1	12	7	82	8	2	18

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025
Data per 17 Maret 2025

Lampiran 70

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) SUSPEK CAMPAK DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	KLB di Desa/Kelurahan		
		Jumlah	Ditangani <24 jam	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1	1	100
2	Sumatera Utara	6	6	100
3	Sumatera Barat	3	3	100
4	Riau	0	0	0
5	Jambi	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	1	100
7	Bengkulu	0	0	0
8	Lampung	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	3	3	100
13	Jawa Tengah	5	5	100
14	DI Yogyakarta	2	2	100
15	Jawa Timur	12	12	100
16	Banten	5	5	100
17	Bali	1	1	100
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	1	100
22	Kalimantan Selatan	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	1	100
24	Kalimantan Utara	1	1	100
25	Sulawesi Utara	2	2	100
26	Sulawesi Tengah	7	7	100
27	Sulawesi Selatan	4	4	100
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0
29	Gorontalo	7	7	100
30	Sulawesi Barat	0	0	0
31	Maluku	0	0	0
32	Maluku Utara	2	2	100
33	Papua	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0
38	Papua Barat Daya	1	1	100
Indonesia		65	65	100

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025
Data per 17 Maret 2025

Lampiran 72.a

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus	Incidence Rate per 100.000 Penduduk	Meninggal	CFR (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.669.606	3.450	60,85	21	0,6
2	Sumatera Utara	15.405.644	9.366	60,80	58	0,6
3	Sumatera Barat	5.802.172	2.823	48,65	12	0,4
4	Riau	7.410.230	3.206	43,26	19	0,6
5	Jambi	3.748.137	2.321	61,92	3	0,1
6	Sumatera Selatan	9.000.101	6.263	69,59	37	0,6
7	Bengkulu	2.080.246	3.103	149,17	16	0,5
8	Lampung	8.824.030	9.068	102,76	30	0,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.542.390	1.914	124,09	23	1,2
10	Kepulauan Riau	2.594.369	1.685	64,95	16	0,9
11	DKI Jakarta	10.835.148	13.276	122,53	30	0,2
12	Jawa Barat	51.701.460	61.423	118,80	339	0,6
13	Jawa Tengah	35.420.092	17.636	49,79	257	1,5
14	DI Yogyakarta	4.126.444	4.027	97,59	10	0,2
15	Jawa Timur	40.703.833	32.086	78,83	264	0,8
16	Banten	13.600.575	13.727	100,93	48	0,3
17	Bali	4.622.547	15.570	336,83	25	0,2
18	Nusa Tenggara Barat	5.511.473	4.218	76,53	7	0,2
19	Nusa Tenggara Timur	5.807.691	3.987	68,65	29	0,7
20	Kalimantan Barat	5.332.218	2.529	47,43	23	0,9
21	Kalimantan Tengah	2.827.450	4.015	142,00	22	0,5
22	Kalimantan Selatan	4.469.992	3.232	72,30	16	0,5
23	Kalimantan Timur	3.837.948	10.902	284,06	20	0,2
24	Kalimantan Utara	760.222	644	84,71	7	1,1
25	Sulawesi Utara	2.581.013	4.826	186,98	29	0,6
26	Sulawesi Tengah	3.236.561	2.473	76,41	10	0,4
27	Sulawesi Selatan	9.150.274	6.043	66,04	27	0,4
28	Sulawesi Tenggara	2.862.285	4.867	170,04	24	0,5
29	Gorontalo	1.223.639	2.319	189,52	23	1,0
30	Sulawesi Barat	1.451.058	2.491	171,67	4	0,2
31	Maluku	1.859.254	398	21,41	4	1,0
32	Maluku Utara	1.318.213	1.089	82,61	6	0,6
33	Papua	888.142	481	54,16	0	0,0
34	Papua Barat	491.895	325	66,07	2	0,6
35	Papua Selatan	515.717	0	0,00	0	0,0
36	Papua Tengah	1.017.614	976	95,91	0	0,0
37	Papua Pegunungan	1.080.522	249	23,04	0	0,0
38	Papua Barat Daya	539.781	263	48,72	0	0,0
Indonesia		279.849.986	257.271	91,93	1.461	0,57

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 72.b

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kabupaten/Kota Terjangkit					
			2022		2023		2024	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)
1	Aceh	23	22	95,65	22	95,65	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	33	100,00	33	100,00	33	100,00
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	19	100,00	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	6	85,71	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	100,00	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00	38	100,00	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00	8	100,00	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00	21	95,45	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	100,00	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
31	Maluku	11	9	81,82	9	81,82	9	81,82
32	Maluku Utara	10	9	90,00	10	100,00	9	90,00
33	Papua	9	8	27,59	5	55,56	5	55,56
34	Papua Barat	7	8	61,54	5	71,43	5	71,43
35	Papua Selatan	4	-	-	0	0,00	0	0,00
36	Papua Tengah	8	-	-	1	12,50	2	25,00
37	Papua Pegunungan	8	-	-	0	0,00	2	25,00
38	Papua Barat Daya	6	-	-	0	0,00	5	83,33
Indonesia		514	484	94,16	478	93,00	488	94,94

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: Persentase tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota dari 34 provinsi (sebelum pemekaran Papua dan Papua Barat)

Lampiran 73.a

KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Penduduk	Malaria										Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 Penduduk
			Suspek	Konfirmasi Laboratorium			% Konfirmasi Laboratorium	Positif			Pengobatan Standar	% Pengobatan Standar	
				Mikroskopis	Rapid Diagnostic Test (RDT)	Total		L	P	L+P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	5.554.815	48.631	14.695	33.936	48.631	100,00%	305	67	372	372	100,00%	0,07
2	Sumatera Utara	15.588.525	44.379	17.467	26.910	44.377	100,00%	4.061	2.535	6.596	4.822	73,10%	0,42
3	Sumatera Barat	5.836.156	13.042	2.850	10.192	13.042	100,00%	43	11	54	45	83,33%	0,01
4	Riau	6.728.053	19.617	6.395	13.222	19.617	100,00%	1.747	969	2.716	2.690	99,04%	0,40
5	Jambi	3.724.284	29.797	10.981	18.761	29.742	99,82%	43	6	49	49	100,00%	0,01
6	Sumatera Selatan	8.837.301	42.263	12.656	29.607	42.263	100,00%	91	8	99	99	100,00%	0,01
7	Bengkulu	2.112.235	16.325	3.493	12.823	16.316	99,94%	3	0	3	3	100,00%	0,00
8	Lampung	9.419.582	67.360	38.029	29.331	67.360	100,00%	1.584	1.012	2.596	2.596	100,00%	0,28
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.531.530	12.453	4.129	8.324	12.453	100,00%	12	1	13	10	76,92%	0,01
10	Kepulauan Riau	2.183.292	13.376	7.139	6.237	13.376	100,00%	206	100	306	306	100,00%	0,14
11	DKI Jakarta	10.684.946	7.665	1.865	5.800	7.665	100,00%	314	44	358	341	95,25%	0,03
12	Jawa Barat	50.345.189	12.146	8.456	3.690	12.146	100,00%	477	35	512	489	95,51%	0,01
13	Jawa Tengah	37.892.283	30.979	17.334	13.199	30.533	98,56%	709	38	747	562	75,23%	0,02
14	DI Yogyakarta	3.759.503	19.383	11.790	7.593	19.383	100,00%	88	33	121	27	22,31%	0,03
15	Jawa Timur	41.814.499	12.915	6.498	6.417	12.915	100,00%	505	48	553	544	98,37%	0,01
16	Banten	12.431.391	4.268	781	3.487	4.268	100,00%	119	11	130	130	100,00%	0,01
17	Bali	4.433.262	11.334	8.199	3.135	11.334	100,00%	64	11	75	60	80,00%	0,02
18	Nusa Tenggara Barat	5.646.015	82.783	56.200	26.582	82.782	100,00%	158	92	250	215	86,00%	0,04
19	Nusa Tenggara Timur	5.656.039	935.007	419.262	515.745	935.007	100,00%	5075	3819	8894	8472	95,26%	1,57
20	Kalimantan Barat	5.695.475	28.319	8.105	20.214	28.319	100,00%	48	14	62	39	62,90%	0,01
21	Kalimantan Tengah	2.809.698	14.880	2.902	11.978	14.880	100,00%	120	17	137	122	89,05%	0,05
22	Kalimantan Selatan	4.273.400	28.659	3.959	24.697	28.656	99,99%	284	18	302	275	91,06%	0,07
23	Kalimantan Timur	4.045.858	34.291	7.559	26.731	34.290	100,00%	1484	122	1606	1476	91,91%	0,40
24	Kalimantan Utara	739.778	8.301	1.064	7.237	8.301	100,00%	126	11	137	93	67,88%	0,19
25	Sulawesi Utara	2.701.777	40.048	26.153	13.895	40.048	100,00%	833	412	1245	1092	87,71%	0,46
26	Sulawesi Tengah	3.121.753	28.466	2.995	25.471	28.466	100,00%	754	387	1.141	940	82,38%	0,37
27	Sulawesi Selatan	9.463.385	46.782	8.533	38.249	46.782	100,00%	1558	347	1905	1777	93,28%	0,20
28	Sulawesi Tenggara	2.793.072	19.553	2.922	16.631	19.553	100,00%	413	112	525	417	79,43%	0,19
29	Gorontalo	1.227.794	67.945	37.603	30.342	67.945	100,00%	1463	118	1581	1580	99,94%	1,29
30	Sulawesi Barat	1.503.232	10.025	1.829	7.920	9.749	97,25%	283	32	315	291	92,38%	0,21
31	Maluku	1.945.648	64.904	32.224	32.679	64.903	100,00%	1432	856	2288	2174	95,02%	1,18
32	Maluku Utara	1.355.622	17.420	11.085	6.335	17.420	100,00%	141	64	205	205	100,00%	0,15
33	Papua	1.060.551	1.107.215	510.314	595.999	1.106.313	99,92%	130711	99075	229786	219460	95,51%	216,67
34	Papua Barat	578.696	203.146	75.855	127.291	203.146	100,00%	4.828	2.995	7.823	7.127	91,10%	13,52
35	Papua Selatan	542.075	237.537	99.990	135.653	235.643	99,20%	31796	25195	56991	52017	91,27%	105,13
36	Papua Tengah	1.472.912	817.160	447.038	370.002	817.040	99,99%	99.560	68.718	168.278	157.447	93,56%	114,25
37	Papua Pegunungan	1.467.046	72.152	38.447	32.862	71.309	98,83%	21744	16231	37975	32523	85,64%	25,89
38	Papua Barat Daya	627.127	87.424	29.630	57.494	87.124	99,66%	4.211	3.008	7.219	5.944	82,34%	11,51
Indonesia		281.603.799	4.357.950	1.996.426	2.356.671	4.353.097	99,89%	317.393	226.572	543.965	506.831	93,17%	1,93

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 73.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Endemisitas Malaria				% Kabupaten/Kota Mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria
		Bebas Malaria (Sudah Mendapat Sertifikat Eliminasi)	Endemis Rendah (API<1)	Endemis Sedang (API 1-5)	Endemis Tinggi (API >5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	22	1	0	0	96%
2	Sumatera Utara	25	4	4	0	76%
3	Sumatera Barat	18	1	0	0	95%
4	Riau	12	0	0	0	100%
5	Jambi	8	3	0	0	73%
6	Sumatera Selatan	17	0	0	0	100%
7	Bengkulu	10	0	0	0	100%
8	Lampung	14	0	1	0	93%
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	0	0	86%
10	Kepulauan Riau	6	1	0	0	86%
11	DKI Jakarta	6	0	0	0	100%
12	Jawa Barat	27	0	0	0	100%
13	Jawa Tengah	34	1	0	0	97%
14	DI Yogyakarta	5	0	0	0	100%
15	Jawa Timur	38	0	0	0	100%
16	Banten	8	0	0	0	100%
17	Bali	9	0	0	0	100%
18	Nusa Tenggara Barat	7	3	0	0	70%
19	Nusa Tenggara Timur	9	8	4	1	41%
20	Kalimantan Barat	12	2	0	0	86%
21	Kalimantan Tengah	12	2	0	0	86%
22	Kalimantan Selatan	11	2	0	0	85%
23	Kalimantan Timur	5	4	1	0	50%
24	Kalimantan Utara	3	2	0	0	60%
25	Sulawesi Utara	10	4	1	0	67%
26	Sulawesi Tengah	8	3	2	0	62%
27	Sulawesi Selatan	23	0	1	0	96%
28	Sulawesi Tenggara	15	2	0	0	88%
29	Gorontalo	5	1	0	0	83%
30	Sulawesi Barat	5	1	0	0	83%
31	Maluku	3	4	4	0	27%
32	Maluku Utara	6	4	0	0	60%
33	Papua	0	0	0	9	0%
34	Papua Barat	1	0	3	3	14%
35	Papua Selatan	0	0	0	4	0%
36	Papua Tengah	0	4	0	4	0%
37	Papua Pegunungan	0	1	2	5	0%
38	Papua Barat Daya	1	1	0	4	17%
Indonesia		401	60	23	30	78,02

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 73.c

**ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020- 2024**

No	Provinsi	API				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,04	0,06	0,02	0,03	0,07
2	Sumatera Utara	0,07	0,17	0,35	0,33	0,42
3	Sumatera Barat	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
4	Riau	0,24	0,13	0,25	0,42	0,40
5	Jambi	0,02	0,01	0,07	0,05	0,01
6	Sumatera Selatan	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7	Bengkulu	0,05	0,00	0,01	0,01	0,00
8	Lampung	0,05	0,06	0,08	0,13	0,28
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,12	0,07	0,08	0,04	0,01
10	Kepulauan Riau	0,09	0,02	0,02	0,01	0,14
11	DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
12	Jawa Barat	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
13	Jawa Tengah	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
14	DI Yogyakarta	0,00	0,01	0,04	0,02	0,03
15	Jawa Timur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
16	Banten	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
17	Bali	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
18	Nusa Tenggara Barat	0,05	0,07	0,09	0,06	0,04
19	Nusa Tenggara Timur	2,76	1,69	2,79	1,25	1,57
20	Kalimantan Barat	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
21	Kalimantan Tengah	0,06	0,06	0,08	0,05	0,05
22	Kalimantan Selatan	0,12	0,07	0,11	0,08	0,07
23	Kalimantan Timur	0,62	0,61	0,87	0,95	0,40
24	Kalimantan Utara	0,09	0,05	0,15	0,20	0,19
25	Sulawesi Utara	0,36	0,28	0,42	0,47	0,46
26	Sulawesi Tengah	0,06	0,02	0,05	0,21	0,37
27	Sulawesi Selatan	0,09	0,10	0,19	0,19	0,20
28	Sulawesi Tenggara	0,14	0,13	0,21	0,21	0,19
29	Gorontalo	0,03	0,04	0,04	1,30	1,29
30	Sulawesi Barat	0,10	0,07	0,17	0,23	0,21
31	Maluku	0,42	0,45	0,61	0,87	1,18
32	Maluku Utara	0,16	0,10	0,18	0,18	0,15
34	Papua	63,12	80,05	113,07	156,59	216,67
33	Papua Barat	10,15	7,56	12,68	17,86	13,52
35	Papua Selatan	-	-	-	82,07	105,13
36	Papua Tengah	-	-	-	103,40	114,25
37	Papua Pegunungan	-	-	-	7,64	25,89
38	Papua Barat Daya	-	-	-	12,47	11,51
Indonesia		0,94	1,12	1,61	1,50	1,93

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 74.a

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Provinsi	Penderita Kronis Filariasis				
		Kasus Kronis Tahun Sebelumnya	Kasus Kronis Baru Ditemukan	Kasus Kronis Pindah	Kasus Kronis Meninggal	Jumlah Seluruh Kasus Kronis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1	Aceh	481	1	0	71	411
2	Sumatera Utara	44	3	0	4	46
3	Sumatera Barat	125	1	9	10	83
4	Riau	104	4	0	0	108
5	Jambi	224	0	0	19	199
6	Sumatera Selatan	109	0	0	3	109
7	Bengkulu	64	0	0	4	60
8	Lampung	24	1	0	0	23
9	Kepulauan Bangka Belitung	81	1	0	3	79
10	Kepulauan Riau	78	0	0	3	75
11	DKI Jakarta	18	1	0	0	19
12	Jawa Barat	323	21	17	74	253
13	Jawa Tengah	287	3	0	0	290
14	DI Yogyakarta	2	1	1	0	2
15	Jawa Timur	187	2	0	29	147
16	Banten	79	0	0	0	59
17	Bali	2	2	0	0	4
18	Nusa Tenggara Barat	6	0	0	0	6
19	Nusa Tenggara Timur	1200	3	20	244	955
20	Kalimantan Barat	188	1	0	8	143
21	Kalimantan Tengah	40	9	0	2	47
22	Kalimantan Selatan	20	5	0	8	17
23	Kalimantan Timur	88	0	0	1	63
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	13	2	0	0	15
26	Sulawesi Tengah	110	0	0	10	100
27	Sulawesi Selatan	56	1	0	21	36
28	Sulawesi Tenggara	40	0	0	0	42
29	Gorontalo	2	2	0	0	4
30	Sulawesi Barat	64	0	0	0	64
31	Maluku	36	0	0	2	34
32	Maluku Utara	27	2	0	3	26
33	Papua	1023	0	0	0	1023
34	Papua Barat	39	0	0	0	60
35	Papua Selatan	1996	0	0	0	224
36	Papua Tengah	368	0	0	0	368
37	Papua Pegunungan	117	0	0	0	117
38	Papua Barat Daya	290	0	0	0	290
Indonesia		7.955	66	47	519	5.601

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 74.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%,
DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Persentase Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	12	11	91,7	1	8,3	4	33,3
2	Sumatera Utara	9	9	100,0	0	0,0	7	77,8
3	Sumatera Barat	10	10	100,0	0	0,0	10	100,0
4	Riau	10	10	100,0	0	0,0	10	100,0
5	Jambi	5	5	100,0	0	0,0	4	80,0
6	Sumatera Selatan	9	9	100,0	0	0,0	5	55,6
7	Bengkulu	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0
8	Lampung	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,4	2	28,6	4	57,1
10	Kepulauan Riau	3	3	100,0	0	0,0	1	33,3
11	DKI Jakarta	0	0	-	0	-	0	-
12	Jawa Barat	11	11	100,0	0	0,0	11	100,0
13	Jawa Tengah	9	9	100,0	0	0,0	4	44,4
14	DI Yogyakarta	0	0	-	0	-	0	-
15	Jawa Timur	0	0	-	0	-	0	-
16	Banten	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0
17	Bali	0	0	-	0	-	0	-
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	-	0	-	0	-
19	Nusa Tenggara Timur	18	18	100,0	0	0,0	3	16,7
20	Kalimantan Barat	9	8	88,9	1	11,1	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	11	9	81,8	1	9,1	4	36,4
22	Kalimantan Selatan	8	8	100,0	0	0,0	4	50,0
23	Kalimantan Timur	6	6	100,0	0	0,0	3	50,0
24	Kalimantan Utara	4	3	75,0	0	0,0	1	25,0
25	Sulawesi Utara	0	0	-	0	-	0	-
26	Sulawesi Tengah	9	9	100,0	0	0,0	4	44,4
27	Sulawesi Selatan	4	4	100,0	0	0,0	3	75,0
28	Sulawesi Tenggara	12	12	100,0	0	0,0	6	50,0
29	Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0	4	66,7
30	Sulawesi Barat	4	4	100,0	0	0,0	2	50,0
31	Maluku	8	8	100,0	0	0,0	0	0,0
32	Maluku Utara	6	6	100,0	0	0,0	2	33,3
33	Papua	9	6	66,7	2	22,2	3	33,3
34	Papua Barat	6	1	16,7	5	83,3	0	0,0
35	Papua Selatan	4	2	50,0	2	50,0	2	50,0
36	Papua Tengah	5	2	40,0	1	20,0	1	20,0
37	Papua Pegunungan	5	0	0,0	4	80,0	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	1	16,7	3	50,0	0	0,0
Indonesia		236	206	87,3	22	9,3	113	47,9

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Provinsi yang seluruh kabupaten/kota nya bukan endemis filariasis : DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara

Lampiran 74.c

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022 - 2024

No	Provinsi	2022			2023			2024		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	1.494	1.130	-	1.434	1.036	-	1.493	1.046	-
2	Sumatera Utara	6.883	5.720	6	10.360	7.848	20	11.377	8.448	14
3	Sumatera Barat	4.504	2.883	8	6.638	4.636	7	7.335	5.206	3
4	Riau	2.330	1.627	-	4.858	4.065	2	5.548	4.823	5
5	Jambi	1.031	784	-	1.511	1.278	1	1.641	1.165	-
6	Sumatera Selatan	2.432	2.197	1	4.183	3.820	4	4.674	4.489	5
7	Bengkulu	1.380	1.133	1	2.147	1.945	1	2.122	1.912	1
8	Lampung	2.188	1.987	-	3.043	2.656	-	3.152	2.702	-
9	Kepulauan Bangka Belitung*	50	37	-	168	94	-	286	193	-
10	Kepulauan Riau*	11	-	-	17	4	-	116	70	-
11	DKI Jakarta*	1.579	583	-	4.795	2.363	-	4.894	2.362	-
12	Jawa Barat	1.248	908	-	3.646	2.398	1	3.055	1.983	-
13	Jawa Tengah*	363	104	-	1.026	285	-	1.236	369	-
14	DI Yogyakarta*	203	25	-	307	132	-	204	63	-
15	Jawa Timur*	239	145	-	682	343	-	721	245	-
16	Banten	254	233	-	932	869	-	790	666	-
17	Bali	38.009	20.755	22	72.522	47.043	9	57.943	32.565	7
18	Nusa Tenggara Barat	1.769	1.672	3	3.102	2.718	4	4.156	3.892	10
19	Nusa Tenggara Timur	12.576	12.570	9	19.321	18.078	35	30.267	28.579	46
20	Kalimantan Barat	3.943	3.235	15	6.970	6.353	16	8.261	7.401	9
21	Kalimantan Tengah	1.312	982	1	2.179	1.739	2	1.938	1.791	-
22	Kalimantan Selatan	400	305	-	662	551	-	898	714	-
23	Kalimantan Timur	1.251	1.251	-	3.076	2.869	-	3.412	3.287	-
24	Kalimantan Utara	212	126	-	465	351	-	505	379	-
25	Sulawesi Utara	5.850	3.707	13	9.153	5.287	18	7.713	4.571	11
26	Sulawesi Tengah	2.439	2.292	3	4.211	4.092	3	4.393	4.176	1
27	Sulawesi Selatan	7.000	5.811	14	10.120	10.070	11	10.630	10.591	4
28	Sulawesi Tenggara	658	654	2	1.328	1.327	-	1.077	959	-
29	Gorontalo	812	712	2	1.015	925	-	1.075	994	2
30	Sulawesi Barat	835	616	-	1.180	1.137	1	1.505	1.431	-
31	Maluku	850	615	2	2.780	2.176	11	2.313	1.680	4
32	Maluku Utara	124	89	-	179	139	-	629	479	-
34	Papua*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		104.229	74.888	102	184.010	138.627	146	185.359	139.231	122
Persentase VAR/GHPR		71,85%			75,34%			75,11%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025
, VAR = Kasus digitig yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati
* daerah bebas rabies
- : tidak ada kasus

Lampiran 74.d

**JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2024**

No	Provinsi	2022			2023			2024		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(3)	(10)	(11)	(3)	(10)	(11)
1	DKI Jakarta	18	0	0	15	0	0	22	5	22,73
2	Jawa Barat	187	30	16,04	54	6	11,11	62	8	12,90
3	Jawa Tengah	502	70	13,94	884	139	15,72	545	66	12,11
4	DI Yogyakarta	235	13	5,53	377	32	8,49	168	13	7,74
5	Jawa Timur	606	23	3,8	1090	17	1,56	487	6	1,23
6	Banten	64	12	18,75	30	7	23,33	67	9	13,43
7	Maluku	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00
8	Kalimantan Utara	3	0	0	35	1	2,86	15	2	13,33
9	Sulawesi Selatan	1	0	0	26	3	11,54	21	5	23,81
10	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00
11	Sulawesi Tenggara	4	0	0	1	0	0	0	0	0,00
12	Kalimantan Timur	4	0	0	28	0	0	41	2	4,88
13	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	15	1	6,67
14	Bali	0	0	0	0	0	0	3	0	0,00
15	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	57	4	7,02
16	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
Indonesia		1624	148	9,11	2545	205	8,06	1506	121	8,03

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 77.a

**REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024**

No	Provinsi	Jumlah WUS 30-50 tahun	Deteksi Dini Kanker Serviks					Deteksi Dini Kanker Payudara				
			Pemeriksaan IVA	IVA positif	Curiga Ca leher rahim	Total Pemeriksaan 2022 s.d 2024	% Cakupan	Pemeriksaan SADANIS	Benjolan	Curiga Ca Payudara	Total Pemeriksaan 2022 s.d 2024	% Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	848.645	37.181	1671	26	83.336	9,82	106.779	300	29	277.194	32,66
2	Sumatera Utara	2.219.121	259.092	3649	125	570.243	25,70	391.920	655	101	966.748	43,56
3	Sumatera Barat	857.336	51.290	1420	40	98.139	11,45	120.808	405	49	256.036	29,86
4	Riau	1.141.620	27.029	370	7	53.443	4,68	79.232	219	22	196.314	17,20
5	Jambi	567.331	39.536	474	9	65.940	11,62	63.879	248	5	109.497	19,30
6	Sumatera Selatan	1.335.924	95.618	1586	51	212.271	15,89	131.627	245	46	277.676	20,79
7	Bengkulu	317.106	15.661	243	5	41.638	13,13	33.181	93	10	100.446	31,68
8	Lampung	1.306.450	146.116	2407	28	473.415	36,24	237.955	312	34	802.682	61,44
9	Kep. Bangka Belitung	232.308	12.226	177	3	54.281	23,37	17.465	39	1	59.990	25,82
10	Kepulauan Riau	417.012	21.186	87	0	35.820	8,59	170.085	5483	0	246.365	59,08
11	DKI Jakarta	1.818.138	104.636	241	1	326.409	17,95	1.382	2	0	331.900	18,25
12	Jawa Barat	7.889.087	2.308.322	2801	69	4.080.083	51,72	421.866	1418	3	1.157.397	14,67
13	Jawa Tengah	5.279.059	121.107	2907	70	225.590	4,27	528.655	1983	97	1.097.399	20,79
14	DI Yogyakarta	620.318	2.929	65	8	6.562	1,06	12.938	69	10	29.524	4,76
15	Jawa Timur	6.254.606	501.700	2515	17	967.798	15,47	990.693	4197	22	1.915.142	30,62
16	Banten	2.080.761	642.878	3422	78	1.194.233	57,39	357.278	543	111	670.847	32,24
17	Bali	717.291	24.502	511	24	45.607	6,36	37.614	93	19	66.816	9,32
18	Nusa Tenggara Barat	833.763	135.698	336	2	558.983	67,04	27.276	276	3	87.308	10,47
19	Nusa Tenggara Timur	817.475	37.686	1584	26	124.222	15,20	120.612	367	33	461.631	56,47
20	Kalimantan Barat	822.143	13.068	217	15	36.218	4,41	52.407	160	6	82.075	9,98
21	Kalimantan Tengah	443.950	5.853	142	5	18.628	4,20	27.175	128	9	76.446	17,22
22	Kalimantan Selatan	643.924	24.223	835	14	64.737	10,05	69.052	236	6	185.226	28,77
23	Kalimantan Timur	591.177	66.225	326	8	225.788	38,19	49.366	213	4	94.638	16,01
24	Kalimantan Utara	108.667	1.691	18	1	4.480	4,12	6.252	9	0	11.847	10,90
25	Sulawesi Utara	368.764	5.281	77	2	13.400	3,63	58.230	1360	5	165.232	44,81
26	Sulawesi Tengah	487.208	34.288	635	15	105.497	21,65	79.200	156	9	214.762	44,08
27	Sulawesi Selatan	1.430.226	62.491	831	39	174.669	12,21	184.115	857	41	493.524	34,51
28	Sulawesi Tenggara	417.062	8.096	99	14	21.789	5,22	33.947	115	6	60.980	14,62
29	Gorontalo	189.162	54.064	438	4	80.580	42,60	58.087	153	2	146.473	77,43
30	Sulawesi Barat	210.384	2.591	25	4	10.778	5,12	17.733	59	2	54.458	25,89
31	Maluku	270.196	7.642	66	6	12.966	4,80	28.961	89	6	49.181	18,20
32	Maluku Utara	195.076	4.017	55	5	8.512	4,36	13.433	31	3	38.649	19,81
33	Papua	112.649	2.896	162	9	4.170	3,70	7.991	44	5	15.624	13,87
34	Papua Barat	75.573	1.085	35	0	3.339	4,42	4.327	10	3	16.640	22,02
35	Papua Selatan	65.230	7	1	0	15	0,02	3.258	9	2	74	0,11
36	Papua Tengah	157.099	1.233	16	0	2.449	1,56	7.085	14	2	12.099	7,70
37	Papua Pegunungan	194.344	628	4	0	762	0,39	30	5	0	4.296	2,21
38	Papua Barat Daya	86.178	946	9	0	2.726	3,16	1.981	6	1	7.703	8,94
Indonesia		42.422.363	4.880.718	30.457	730	10.009.516	23,59	4.553.875	20.601	707	10.840.839	0,26

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Keterangan : Sasaran = perempuan usia 30-50 tahun

Lampiran 77.b

KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menerapkan KTR	
			Jumlah	Cakupan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	31	93,9
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	11	91,7
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	36	94,7
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	19	86,4
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	13	92,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	16	94,1
29	Gorontalo	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua	9	7	77,8
34	Papua Barat	7	6	85,7
35	Papua Selatan	4	4	100,0
36	Papua Tengah	8	1	12,5
37	Papua Pegunungan	8	2	25,0
38	Papua Barat Daya	6	5	83,3
Indonesia		514	485	94,4

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 77.c

KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥40% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menyelenggarakan UBM	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	15	65,2
2	Sumatera Utara	33	27	81,8
3	Sumatera Barat	19	16	84,2
4	Riau	12	4	33,3
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	13	76,5
7	Bengkulu	10	7	70,0
8	Lampung	15	13	86,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,1
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	26	96,3
13	Jawa Tengah	35	20	57,1
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	19	86,4
20	Kalimantan Barat	14	5	35,7
21	Kalimantan Tengah	14	6	42,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	4	40,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	1	6,7
26	Sulawesi Tengah	13	8	61,5
27	Sulawesi Selatan	24	17	70,8
28	Sulawesi Tenggara	17	7	41,2
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	4	66,7
31	Maluku	11	4	36,4
32	Maluku Utara	10	5	50,0
33	Papua	9	2	22,2
34	Papua Barat	7	0	0,0
35	Papua Selatan	4	2	50,0
36	Papua Tengah	8	0	0,0
37	Papua Pegunungan	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	0	0,0
Indonesia		514	340	66,1

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 77.d

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI ≥80% PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Target Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan PANDU	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	30	90,9
3	Sumatera Barat	19	19	19	100,0
4	Riau	12	12	7	58,3
5	Jambi	11	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	18	66,7
13	Jawa Tengah	35	35	32	91,4
14	Di Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	38	100,0
16	Banten	8	8	8	100,0
17	Bali	9	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	18	81,8
20	Kalimantan Barat	14	14	5	35,7
21	Kalimantan Tengah	14	14	13	92,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	4	40,0
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	6	40,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	5	38,5
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	10	58,8
29	Gorontalo	6	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	6	5	83,3
31	Maluku	11	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	10	2	20,0
33	Papua	9	9	3	33,3
34	Papua Barat	7	7	6	85,7
35	Papua Selatan	4	4	2	50,0
36	Papua Tengah	8	8	2	25,0
37	Papua Pegunungan	8	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	6	3	50,0
Indonesia		514	514	414	80,5

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 77.e

DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA (SKRINING PTM PRIORITAS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Sasaran	Target (70%)	Capaian	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	4.659.719	3.261.803	335.271	10,28
2	Sumatera Utara	13.874.625	9.712.238	1.418.348	14,60
3	Sumatera Barat	5.238.026	3.666.618	600.518	16,38
4	Riau	6.010.080	4.207.056	422.165	10,03
5	Jambi	3.337.416	2.336.191	363.357	15,55
6	Sumatera Selatan	7.937.687	5.556.381	366.354	6,59
7	Bengkulu	1.893.097	1.325.168	104.879	7,91
8	Lampung	8.463.605	5.924.524	1.374.647	23,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.383.079	968.155	111.156	11,48
10	Kepulauan Riau	1.948.991	1.364.294	500.008	36,65
11	DKI Jakarta	9.796.369	6.857.458	3.161.171	46,10
12	Jawa Barat	45.597.881	31.918.517	9.614.077	30,12
13	Jawa Tengah	34.542.595	24.179.817	3.603.615	14,90
14	DI Yogyakarta	3.471.497	2.430.048	71.144	2,93
15	Jawa Timur	38.365.581	26.855.907	9.214.436	34,31
16	Banten	11.231.988	7.862.392	3.364.612	42,79
17	Bali	4.059.523	2.841.666	472.828	16,64
18	Nusa Tenggara Barat	5.022.089	3.515.462	1.752.994	49,87
19	Nusa Tenggara Timur	4.958.059	3.470.641	404.339	11,65
20	Kalimantan Barat	5.102.633	3.571.843	436.819	12,23
21	Kalimantan Tengah	2.520.061	1.764.043	129.986	7,37
22	Kalimantan Selatan	3.832.028	2.682.420	721.862	26,91
23	Kalimantan Timur	3.655.547	2.558.883	517.987	20,24
24	Kalimantan Utara	663.805	464.664	40.843	8,79
25	Sulawesi Utara	2.462.247	1.723.573	135.552	7,86
26	Sulawesi Tengah	2.794.889	1.956.422	259.452	13,26
27	Sulawesi Selatan	8.539.536	5.977.675	897.518	15,01
28	Sulawesi Tenggara	2.472.534	1.730.774	364.581	21,06
29	Gorontalo	1.102.946	772.062	453.509	58,74
30	Sulawesi Barat	1.329.563	930.694	47.189	5,07
31	Maluku	1.346.674	942.672	81.041	8,60
32	Maluku Utara	1.207.348	845.144	48.974	5,79
33	Papua	919.730	643.811	24.000	3,73
34	Papua Barat	512.052	358.436	11.541	3,22
35	Papua Selatan	450.984	315.689	4.838	1,53
36	Papua Tengah	1.307.578	915.305	23.168	2,53
37	Papua Pegunungan	1.320.904	924.633	87	0,01
38	Papua Barat Daya	554.579	388.205	8.793	2,27
Indonesia		253.887.545	177.721.282	41.463.659	23,33

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA ≥18 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Sasaran Usia ≥18 Tahun	Sasaran (70%)	Deteksi Dini Obesitas		Obesitas		
				Jumlah	%	Jumlah	Proporsi (%)	Prevalensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	3.461.569	2.423.098	601.443	24,82	132.408	22,0	3,8
2	Sumatera Utara	9.453.608	6.617.526	2.903.870	43,88	511.775	17,6	5,4
3	Sumatera Barat	3.553.498	2.487.449	1.127.661	45,33	194.682	17,3	5,5
4	Riau	4.502.514	3.151.760	779.282	24,73	156.534	20,1	3,5
5	Jambi	2.397.210	1.678.047	640.454	38,17	105.877	16,5	4,4
6	Sumatera Selatan	5.588.292	3.911.804	729.354	18,64	98.864	13,6	1,8
7	Bengkulu	1.333.126	933.188	222.841	23,88	26.478	11,9	2,0
8	Lampung	5.645.517	3.951.862	2.092.418	52,95	236.935	11,3	4,2
9	Kep. Bangka Belitung	987.430	691.201	165.416	23,93	31.722	19,2	3,2
10	Kepulauan Riau	1.640.152	1.148.106	680.831	59,30	168.537	24,8	10,3
11	DKI Jakarta	7.184.644	5.029.251	3.287.533	65,37	683.872	20,8	9,5
12	Jawa Barat	33.464.904	23.425.433	11.805.619	50,40	2.345.063	19,9	7,0
13	Jawa Tengah	23.645.142	16.551.599	7.152.574	43,21	1.393.887	19,5	5,9
14	DI Yogyakarta	2.817.663	1.972.364	324.895	16,47	66.066	20,3	2,3
15	Jawa Timur	27.697.445	19.388.212	10.725.940	55,32	2.084.196	19,4	7,5
16	Banten	8.683.264	6.078.285	4.684.676	77,07	849.087	18,1	9,8
17	Bali	3.108.845	2.176.192	617.763	28,39	94.351	15,3	3,0
18	Nusa Tenggara Barat	3.414.529	2.390.170	1.973.821	82,58	223.460	11,3	6,5
19	Nusa Tenggara Timur	3.439.765	2.407.836	712.835	29,60	65.563	9,2	1,9
20	Kalimantan Barat	3.373.014	2.361.110	620.503	26,28	136.435	22,0	4,0
21	Kalimantan Tengah	1.816.129	1.271.290	240.559	18,92	48.598	20,2	2,7
22	Kalimantan Selatan	2.808.430	1.965.901	1.091.488	55,52	205.781	18,9	7,3
23	Kalimantan Timur	2.485.776	1.740.043	641.591	36,87	162.630	25,3	6,5
24	Kalimantan Utara	478.469	334.928	66.612	19,89	18.407	27,6	3,8
25	Sulawesi Utara	1.695.966	1.187.176	230.722	19,43	52.373	22,7	3,1
26	Sulawesi Tengah	2.016.967	1.411.877	508.158	35,99	84.830	16,7	4,2
27	Sulawesi Selatan	5.925.967	4.148.177	1.929.194	46,51	303.112	15,7	5,1
28	Sulawesi Tenggara	1.728.366	1.209.856	454.678	37,58	89.758	19,7	5,2
29	Gorontalo	786.830	550.781	715.990	130,00	95.699	13,4	12,2
30	Sulawesi Barat	885.096	619.567	130.773	21,11	24.041	18,4	2,7
31	Maluku	1.135.260	794.682	181.918	22,89	29.865	16,4	2,6
32	Maluku Utara	809.083	566.358	131.603	23,24	28.142	21,4	3,5
33	Papua	579.983	405.988	52.380	12,90	14.275	27,3	2,5
34	Papua Barat	312.025	218.418	33.397	15,29	10.549	31,6	3,4
35	Papua Selatan	324.409	227.086	11.018	4,85	3.176	28,8	1,0
36	Papua Tengah	647.011	452.908	30.270	6,68	8.138	26,9	1,3
37	Papua Pegunungan	659.824	461.877	101	0,02	11	10,9	0,0
38	Papua Barat Daya	348.516	243.961	15.861	6,50	4.416	27,8	1,3
Indonesia		180.836.238	126.585.367	58.316.042	46,07	10.789.593	18,5	6,0

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 78.a

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Target	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA	% Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	23	23	100
2	Sumatera Utara	33	33	33	100
3	Sumatera Barat	19	19	19	100
4	Riau	12	12	12	100
5	Jambi	11	11	11	100
6	Sumatera Selatan	17	17	17	100
7	Bengkulu	10	10	10	100
8	Lampung	15	15	15	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100
10	Kepulauan Riau	7	7	7	100
11	DKI Jakarta	6	6	6	100
12	Jawa Barat	27	27	27	100
13	Jawa Tengah	35	35	35	100
14	DI Yogyakarta	5	5	5	100
15	Jawa Timur	38	38	38	100
16	Banten	8	8	8	100
17	Bali	9	9	9	100
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	22	100
20	Kalimantan Barat	14	14	14	100
21	Kalimantan Tengah	14	14	14	100
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100
23	Kalimantan Timur	10	10	10	100
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100
25	Sulawesi Utara	15	15	15	100
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	100
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	100
28	Sulawesi Tenggara	17	17	17	100
29	Gorontalo	6	6	6	100
30	Sulawesi Barat	6	6	6	100
31	Maluku	11	11	11	100
32	Maluku Utara	10	10	10	100
33	Papua	9	9	7	77,8
34	Papua Barat	7	7	5	71,4
35	Papua Selatan	4	4	2	50,0
36	Papua Tengah	8	8	7	87,5
37	Papua Pegunungan	8	8	1	12,5
38	Papua Barat Daya	6	6	5	83,3
Indonesia		514	514	499	97,1

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 78.b

JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

No	Provinsi	Baseline 2019	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	207	274	427	296	597	319	705
2	Sumatera Utara	69	165	69	197	69	230	132
3	Sumatera Barat	416	471	503	490	586	508	735
4	Riau	795	830	880	842	976	853	1.157
5	Jambi	184	216	233	227	464	238	611
6	Sumatera Selatan	1.177	1.227	1.422	1.243	1.510	1.260	1.778
7	Bengkulu	100	129	105	139	162	149	268
8	Lampung	393	437	452	451	520	466	675
9	Kepulauan Bangka Belitung	72	92	94	99	136	106	198
10	Kepulauan Riau	27	47	27	54	27	61	81
11	DKI Jakarta	1.115	1.133	1.191	1.138	1.624	1.144	2.772
12	Jawa Barat	730	809	846	835	1.039	861	1.663
13	Jawa Tengah	244	346	302	380	363	414	501
14	D I Yogyakarta	191	206	245	210	277	215	345
15	Jawa Timur	529	640	680	677	953	714	1.302
16	Banten	150	173	150	181	151	189	183
17	Bali	155	181	210	190	275	199	516
18	Nusa Tenggara Barat	301	330	354	340	453	350	669
19	Nusa Tenggara Timur	2	66	2	88	2	109	2
20	Kalimantan Barat	241	282	276	295	328	309	452
21	Kalimantan Tengah	194	235	258	248	297	262	384
22	Kalimantan Selatan	1.116	1.154	1.455	1.167	1.844	1.179	2.416
23	Kalimantan Timur	502	531	509	541	511	551	532
24	Kalimantan Utara	14	29	14	33	14	38	14
25	Sulawesi Utara	3	47	4	61	4	76	4
26	Sulawesi Tengah	14	52	14	65	14	77	14
27	Sulawesi Selatan	30	100	38	123	210	147	299
28	Sulawesi Tenggara	2	52	1	68	1	85	1
29	Gorontalo	0	18	-	23	-	29	-
30	Sulawesi Barat	1	19	39	24	39	30	39
31	Maluku	6	38	6	49	6	60	6
32	Maluku Utara	12	41	12	51	12	61	12
33	Papua	5	90	5	118	5	146	5
34	Papua Barat	3	41	3	54	3	66	3
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		9.000	10.500	10.826	11.000	13.472	11.500	18.474

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 79.a

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum	Jumlah SAM Yg di Awasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	809	693	85,66
2	Sumatera Utara	338	272	80,47
3	Sumatera Barat	1.337	912	68,21
4	Riau	511	434	84,93
5	Jambi	652	576	88,34
6	Sumatera Selatan	1.469	1.043	71,00
7	Bengkulu	604	516	85,43
8	Lampung	1.278	1.060	82,94
9	Kepulauan Bangka Belitung	253	201	79,45
10	Kepulauan Riau	211	164	77,73
11	DKI Jakarta	17	17	100,00
12	Jawa Barat	2.074	1.748	84,28
13	Jawa Tengah	5.428	4.582	84,41
14	DI Yogyakarta	527	527	100,00
15	Jawa Timur	3.433	2.973	86,60
16	Banten	166	140	84,34
17	Bali	478	458	95,82
18	Nusa Tenggara Barat	514	429	83,46
19	Nusa Tenggara Timur	1.542	992	64,33
20	Kalimantan Barat	1.050	641	61,05
21	Kalimantan Tengah	256	230	89,84
22	Kalimantan Selatan	753	569	75,56
23	Kalimantan Timur	514	410	79,77
24	Kalimantan Utara	167	100	59,88
25	Sulawesi Utara	851	565	66,39
26	Sulawesi Tengah	1.317	926	70,31
27	Sulawesi Selatan	2.512	1.828	72,77
28	Sulawesi Tenggara	764	530	69,37
29	Gorontalo	289	225	77,85
30	Sulawesi Barat	165	126	76,36
31	Maluku	771	620	80,42
32	Maluku Utara	31	25	80,65
33	Papua	138	104	75,36
34	Papua Barat	4.170	3.815	91,49
35	Papua Selatan	3	2	66,67
36	Papua Tengah	41	41	100,00
37	Papua Pegunungan	59	55	93,22
38	Papua Barat Daya	33	29	87,88
Indonesia		35.525	28.578	80,44

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 79.b

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022-2024**

No	Provinsi	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	89,70	89,74	90,08
2	Sumatera Utara	92,13	92,19	92,94
3	Sumatera Barat	85,23	85,59	86,85
4	Riau	90,07	90,47	92,24
5	Jambi	79,19	80,02	82,16
6	Sumatera Selatan	86,35	87,19	87,23
7	Bengkulu	73,07	73,08	72,10
8	Lampung	81,60	82,78	84,51
9	Kepulauan Bangka Belitung	80,96	81,64	82,97
10	Kepulauan Riau	91,82	92,10	94,71
11	DKI Jakarta	97,93	99,42	99,96
12	Jawa Barat	93,04	93,86	94,90
13	Jawa Tengah	93,32	93,76	95,43
14	DI Yogyakarta	96,50	96,69	96,91
15	Jawa Timur	95,05	96,01	96,93
16	Banten	92,71	92,95	94,01
17	Bali	98,42	98,31	98,32
18	Nusa Tenggara Barat	95,40	96,03	96,13
19	Nusa Tenggara Timur	86,76	88,35	88,55
20	Kalimantan Barat	80,43	82,08	82,13
21	Kalimantan Tengah	77,01	77,72	78,71
22	Kalimantan Selatan	76,18	76,29	77,34
23	Kalimantan Timur	87,14	87,90	89,11
24	Kalimantan Utara	89,96	90,19	89,42
25	Sulawesi Utara	94,15	94,37	94,46
26	Sulawesi Tengah	86,74	86,85	87,86
27	Sulawesi Selatan	91,96	92,12	92,23
28	Sulawesi Tenggara	94,64	94,80	95,31
29	Gorontalo	96,16	96,00	96,13
30	Sulawesi Barat	78,98	79,86	80,14
31	Maluku	92,10	92,98	93,32
32	Maluku Utara	88,10	89,01	88,92
33	Papua	65,39	66,49	85,84
34	Papua Barat	81,57	81,57	82,38
35	Papua Selatan	-	-	71,90
36	Papua Tengah	-	-	81,53
37	Papua Pegunungan	-	-	30,64
38	Papua Barat Daya	-	-	81,68
Indonesia		91,05	91,72	92,64

Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2025

**JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana				Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Sharing/Komunal	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jamban Sehat Permanen (JSP)	Open Defecation (OD) Tertutup		
								Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	23	1.525.190	160.857	127.526	1.170.285	63.189	1.521.857	99,78
2	Sumatera Utara	33	3.763.447	240.295	275.495	2.849.038	65.807	3.430.635	91,16
3	Sumatera Barat	19	1.378.457	152.518	189.915	934.682	25.285	1.302.400	94,48
4	Riau	12	1.741.472	66.582	409.734	1.125.090	0	1.601.406	91,96
5	Jambi	11	1.002.251	96.203	121.984	718.258	23.227	959.672	95,75
6	Sumatera Selatan	17	2.294.308	165.640	276.304	1.732.512	62.272	2.236.728	97,49
7	Bengkulu	10	548.224	21.152	94.100	373.488	0	488.740	89,15
8	Lampung	15	2.315.456	85.540	744.933	1.327.457	30.000	2.187.930	94,49
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	475.482	7.765	7.240	457.491	705	473.201	99,52
10	Kepulauan Riau	7	667.344	14.938	17.008	599.159	4.701	635.806	95,27
11	DKI Jakarta	6	2.560.751	275.890	72.497	2.081.079	129.675	2.559.141	99,94
12	Jawa Barat	27	14.799.893	1.336.753	3.897.918	8.221.223	558.842	14.014.736	94,69
13	Jawa Tengah	35	11.249.626	1.133.942	964.126	9.151.560	0	11.249.628	100,00
14	DI Yogyakarta	5	1.088.699	53.773	98.041	936.885	0	1.088.699	100,00
15	Jawa Timur	38	12.434.298	928.102	1.445.674	10.060.522	0	12.434.298	100,00
16	Banten	8	3.342.906	380.843	859.108	1.918.761	170.698	3.329.410	99,60
17	Bali	9	1.137.540	71.412	8.213	1.045.815	12.100	1.137.540	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.493.205	129.384	167.025	1.196.796	0	1.493.205	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	1.381.187	154.736	289.586	824.691	1.033	1.270.046	91,95
20	Kalimantan Barat	14	1.550.529	84.868	241.531	1.042.280	56.247	1.424.926	91,90
21	Kalimantan Tengah	14	704.746	22.910	102.138	384.948	68.348	578.344	82,06
22	Kalimantan Selatan	13	1.079.230	67.320	234.106	659.767	0	961.193	89,06
23	Kalimantan Timur	10	1.128.872	21.369	28.464	923.923	36.727	1.010.483	89,51
24	Kalimantan Utara	5	172.136	7.713	24.893	103.986	20.836	157.428	91,46
25	Sulawesi Utara	15	724.690	47.640	139.285	508.554	0	695.479	95,97
26	Sulawesi Tengah	13	781.362	43.576	81.797	545.099	2.037	672.509	86,07
27	Sulawesi Selatan	24	2.317.422	122.942	158.781	2.025.488	413	2.307.624	99,58
28	Sulawesi Tenggara	17	646.970	43.447	111.345	399.851	7.310	561.953	86,86
29	Gorontalo	6	358.653	62.635	595	261.770	0	325.000	90,62
30	Sulawesi Barat	6	330.504	27.690	12.396	253.137	0	293.223	88,72
31	Maluku	11	436.377	21.869	121.509	205.065	18.685	367.128	84,13
32	Maluku Utara	10	298.004	27.786	55.609	162.816	0	246.211	82,62
33	Papua	9	202.984	24.018	29.395	124.682	6.854	184.949	91,12
34	Papua Barat	7	149.481	11.361	16.831	98.227	1.297	127.716	85,44
35	Papua Selatan	4	120.262	5.941	20.344	43.062	0	69.347	57,66
36	Papua Tengah	8	193.732	5.111	27.351	40.458	0	72.920	37,64
37	Papua Pegunungan	8	99.068	7.397	12.257	6.726	0	26.380	26,63
38	Papua Barat Daya	6	180.494	6.109	12.525	124.211	0	142.845	79,14
Indonesia		514	76.675.252	6.138.027	11.497.579	54.638.842	1.366.288	73.640.736	96,04

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 81.a

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022-2024**

No	Provinsi	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	77,48	78,85	81,10
2	Sumatera Utara	82,30	84,18	85,73
3	Sumatera Barat	69,27	70,97	72,82
4	Riau	84,06	84,58	86,32
5	Jambi	79,54	83,04	83,97
6	Sumatera Selatan	78,62	80,54	82,36
7	Bengkulu	79,58	80,28	83,01
8	Lampung	83,65	84,58	85,44
9	Kepulauan Bangka Belitung	91,63	93,21	94,16
10	Kepulauan Riau	87,74	91,10	91,23
11	DKI Jakarta	92,79	93,50	94,01
12	Jawa Barat	74,02	74,88	75,10
13	Jawa Tengah	84,37	85,20	86,72
14	DI Yogyakarta	96,21	96,42	96,71
15	Jawa Timur	81,13	83,72	85,56
16	Banten	85,12	86,41	87,93
17	Bali	95,94	95,70	96,83
18	Nusa Tenggara Barat	83,12	85,11	86,80
19	Nusa Tenggara Timur	73,70	75,67	77,66
20	Kalimantan Barat	77,41	79,89	81,56
21	Kalimantan Tengah	74,33	76,31	78,15
22	Kalimantan Selatan	82,55	82,89	83,70
23	Kalimantan Timur	90,33	91,21	91,65
24	Kalimantan Utara	82,22	84,22	85,17
25	Sulawesi Utara	84,05	85,91	87,31
26	Sulawesi Tengah	75,01	75,80	77,40
27	Sulawesi Selatan	92,24	93,69	93,83
28	Sulawesi Tenggara	87,07	88,99	90,62
29	Gorontalo	79,82	81,72	82,99
30	Sulawesi Barat	78,88	80,73	82,52
31	Maluku	76,47	78,17	80,51
32	Maluku Utara	79,39	80,64	82,32
33	Papua	40,34	43,00	80,57
34	Papua Barat	73,52	76,30	79,00
35	Papua Selatan	-	-	60,85
36	Papua Tengah	-	-	41,44
37	Papua Pegunungan	-	-	12,61
38	Papua Barat Daya	-	-	77,84
Indonesia		80,92	82,36	83,60

Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2025

PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan *	Jumlah Target Desa/Kelurahan SBS	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
				Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
				Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6.500	6.500	5.502	84,65	6.416	98,71
2	Sumatera Utara	6.110	6.110	5.088	83,27	2.562	41,93
3	Sumatera Barat	1.265	1.239	1.214	95,97	1.118	90,23
4	Riau	1.862	1.862	1.824	97,96	1.827	98,12
5	Jambi	1.585	1.585	1.483	93,56	1.305	82,33
6	Sumatera Selatan	3.259	3.247	3.039	93,25	2.844	87,59
7	Bengkulu	1.513	1.513	1.296	85,66	1.176	77,73
8	Lampung	2.651	2.651	2.224	83,89	2.578	97,25
9	Kepulauan Bangka Belitung	393	393	393	100,00	344	87,53
10	Kepulauan Riau	419	417	416	99,28	344	82,49
11	DKI Jakarta	267	267	267	100,00	245	91,76
12	Jawa Barat	5.957	5.957	5.957	100,00	5.930	99,55
13	Jawa Tengah	8.563	8.562	8.562	99,99	8.562	100,00
14	DI Yogyakarta	438	438	438	100,00	438	100,00
15	Jawa Timur	8.494	8.494	8.494	100,00	8.494	100,00
16	Banten	1.552	1.551	1.552	100,00	868	55,96
17	Bali	716	716	716	100,00	672	93,85
18	Nusa Tenggara Barat	1.166	1.166	1.152	98,80	1.166	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	3.442	3.360	3.233	93,93	2.704	80,48
20	Kalimantan Barat	2.145	2.111	1.711	79,77	836	39,60
21	Kalimantan Tengah	1.571	1.566	1.435	91,34	1.130	72,16
22	Kalimantan Selatan	2.016	2.008	2.008	99,60	1.546	76,99
23	Kalimantan Timur	1.038	1.038	1.002	96,53	939	90,46
24	Kalimantan Utara	482	482	450	93,36	426	88,38
25	Sulawesi Utara	1.839	1.800	1.810	98,42	1.738	96,56
26	Sulawesi Tengah	2.017	1.984	1.625	80,57	1.417	71,42
27	Sulawesi Selatan	3.059	3.059	3.047	99,61	3.059	100,00
28	Sulawesi Tenggara	2.285	2.260	1.923	84,16	2.096	92,74
29	Gorontalo	729	729	701	96,16	380	52,13
30	Sulawesi Barat	648	648	603	93,06	310	47,84
31	Maluku	1.235	1.078	913	73,93	463	42,95
32	Maluku Utara	1.185	1.185	866	73,08	751	63,38
33	Papua	999	916	894	89,49	774	84,50
34	Papua Barat	824	810	448	54,37	478	59,01
35	Papua Selatan	690	614	402	58,26	150	24,43
36	Papua Tengah	1.208	537	148	12,25	25	4,66
37	Papua Pegunungan	2.627	1.430	147	5,60	53	3,71
38	Papua Barat Daya	1.013	647	301	29,71	210	32,46
Indonesia		83.762	80.930	73.284	87,49	66.374	82,01

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2025

* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2-2-2138 Tahun 2025

**PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024**

No	Provinsi	TFU Terdaftar				TFU Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar							
		Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	Pasar	Puskesmas	Jumlah TFU Terdaftar	Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)		Pasar		Puskesmas		Jumlah Total	
						Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	2.733	115	316	3164	1.790	65,50	66	57,39	209	66,14	2.065	65,27
2	Sumatera Utara	5.705	263	520	6488	4.268	74,81	165	62,74	429	82,50	4.862	74,94
3	Sumatera Barat	5.480	309	335	6124	5.023	91,66	283	91,59	319	95,22	5.625	91,85
4	Riau	5.277	415	243	5935	4.565	86,51	350	84,34	201	82,72	5.116	86,20
5	Jambi	3.034	75	199	3308	2.902	95,65	75	100,00	199	100,00	3.176	96,01
6	Sumatera Selatan	4.388	200	317	4905	3.735	85,12	200	100,00	282	88,96	4.217	85,97
7	Bengkulu	2.097	157	176	2430	2.090	99,67	157	100,00	176	100,00	2.423	99,71
8	Lampung	5.462	368	407	6237	4.020	73,60	285	77,45	336	82,56	4.641	74,41
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.085	45	62	1192	956	88,11	40	88,89	57	91,94	1.053	88,34
10	Kepulauan Riau	1.415	57	80	1552	1.333	94,20	51	89,47	68	85,00	1.452	93,56
11	DKI Jakarta	4.047	129	334	4510	3.763	92,98	113	87,60	317	94,91	4.193	92,97
12	Jawa Barat	22.957	533	1177	24667	19.898	86,68	457	85,74	1.092	92,78	21.447	86,95
13	Jawa Tengah	22.464	895	994	24353	20.916	93,11	792	88,49	948	95,37	22.656	93,03
14	DI Yogyakarta	2.907	145	121	3173	2.884	99,21	145	100,00	119	98,35	3.148	99,21
15	Jawa Timur	28.188	725	964	29877	26.395	93,64	725	100,00	964	100,00	28.084	94,00
16	Banten	6.793	159	269	7221	6.184	91,03	144	90,57	256	95,17	6.584	91,18
17	Bali	2.507	231	140	2878	2.386	95,17	222	96,10	140	100,00	2.748	95,48
18	Nusa Tenggara Barat	5.248	127	224	5599	4.594	87,54	103	81,10	181	80,80	4.878	87,12
19	Nusa Tenggara Timur	5.946	267	392	6605	3.996	67,20	175	65,54	240	61,22	4.411	66,78
20	Kalimantan Barat	3.444	70	245	3759	2.688	78,05	55	78,57	202	82,45	2.945	78,35
21	Kalimantan Tengah	2.595	102	172	2869	2.039	78,57	85	83,33	148	86,05	2.272	79,19
22	Kalimantan Selatan	3.997	148	271	4416	3.643	91,14	114	77,03	249	91,88	4.006	90,72
23	Kalimantan Timur	3.124	70	184	3378	3.035	97,15	67	95,71	184	100,00	3.286	97,28
24	Kalimantan Utara	921	36	57	1014	849	92,18	26	72,22	50	87,72	925	91,22
25	Sulawesi Utara	1.408	64	96	1568	1.008	71,59	36	56,25	76	79,17	1.120	71,43
26	Sulawesi Tengah	2.540	166	159	2865	1.996	78,58	119	71,69	128	80,50	2.243	78,29
27	Sulawesi Selatan	8.908	560	488	9956	8.586	96,39	521	93,04	468	95,90	9.575	96,17
28	Sulawesi Tenggara	3.239	305	274	3818	2.960	91,39	271	88,85	261	95,26	3.492	91,46
29	Gorontalo	1.346	103	104	1553	947	70,36	71	68,93	64	61,54	1.082	69,67
30	Sulawesi Barat	1.756	133	105	1994	1.738	98,97	124	93,23	100	95,24	1.962	98,40
31	Maluku	2.064	35	198	2297	1.529	74,08	25	71,43	157	79,29	1.711	74,49
32	Maluku Utara	1.442	47	107	1596	1.252	86,82	37	78,72	97	90,65	1.386	86,84
33	Papua	849	36	124	1009	743	87,51	30	83,33	110	88,71	883	87,51
34	Papua Barat	586	17	71	674	532	90,78	15	88,24	71	100,00	618	91,69
35	Papua Selatan	519	15	66	600	485	93,45	14	93,33	62	93,94	561	93,50
36	Papua Tengah	361	13	54	428	320	88,64	9	69,23	39	72,22	368	85,98
37	Papua Pegunungan	85	12	27	124	65	76,47	12	100,00	22	81,48	99	79,84
38	Papua Barat Daya	345	9	53	407	196	56,81	5	55,56	29	54,72	230	56,51
Indonesia		177.262	7.156	10.125	194.543	156.309	88,18	6.184	86,42	9.050	89,38	171.543	88,18

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2025

PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jasa Boga			Restoran			TPP Tertentu			Depot Air Minum (DAM)			Rumah Makan			Kelompok Gerai Pangan Jajanan			Sentra Pangan Jajanan / Kantin			Total		
		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP/ Memenuhi Syarat Sesuai Standar	
			Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	204	75	36,76	548	308	56,20	311	185	59,49	442	339	76,70	37	11	29,73	1.114	670	60,14	394	206	52,28	3.050	1.794	58,82
2	Sumatera Utara	316	164	51,90	1.389	585	42,12	904	614	67,92	958	485	50,63	244	122	50,00	2.643	1.424	53,88	611	213	34,86	7.065	3.607	51,05
3	Sumatera Barat	214	109	50,93	1.450	704	48,55	828	574	69,32	2.028	1.525	75,20	90	40	44,44	3.208	2.465	76,84	889	508	57,14	8.707	5.925	68,05
4	Riau	403	229	56,82	1.539	775	50,36	687	463	67,39	753	462	61,35	25	13	52,00	2.766	1.731	62,58	1.377	438	31,81	7.550	4.111	54,45
5	Jambi	159	130	81,76	994	618	62,17	504	406	80,56	715	527	73,71	35	6	17,14	1.779	1.319	74,14	338	190	56,21	4.524	3.196	70,65
6	Sumatera Selatan	214	170	79,44	730	560	76,71	789	675	85,55	511	399	78,08	235	170	72,34	1.440	1.238	85,97	452	320	70,80	4.371	3.532	80,81
7	Bengkulu	118	63	53,39	445	266	59,78	224	164	73,21	761	547	71,88	43	19	44,19	870	665	76,44	560	265	47,32	3.021	1.989	65,84
8	Lampung	307	187	60,91	1.183	758	64,07	1.108	854	77,08	1.582	1.241	78,45	211	111	52,61	1.993	1.363	68,39	744	303	40,73	7.128	4.817	67,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	60	36	60,00	469	325	69,30	336	266	79,17	469	427	91,04	13	9	69,23	1.281	965	75,33	336	207	61,61	2.964	2.235	75,40
10	Kepulauan Riau	316	201	63,61	1.269	716	56,42	437	309	70,71	711	410	57,67	416	281	67,55	1.494	1.073	71,82	733	370	50,48	5.376	3.360	62,50
11	DKI Jakarta	546	391	71,61	5.035	4.416	87,71	269	240	89,22	1.242	1.037	83,49	20	18	90,00	2.818	2.081	73,85	2.536	2.105	83,00	12.466	10.288	82,53
12	Jawa Barat	2.156	1.162	53,90	4.499	2.400	53,35	2.871	1.956	68,13	8.309	5.005	60,24	1.776	902	50,79	11.001	6.534	59,39	2.089	1.148	54,95	32.701	19.107	58,43
13	Jawa Tengah	2.869	2.337	81,46	2.882	2.348	81,47	1.661	1.357	81,70	2.404	1.846	76,79	466	307	65,88	8.485	7.341	86,52	1.388	1.063	76,59	20.155	16.599	82,36
14	DI Yogyakarta	356	273	76,69	320	272	85,00	849	671	79,03	1.058	923	87,24	38	17	44,74	573	460	80,28	474	399	84,18	3.668	3.015	82,20
15	Jawa Timur	2.330	1.608	69,01	2.441	1.820	74,56	2.553	2.014	78,89	2.771	2.061	74,38	221	118	53,39	8.709	7.524	86,39	3.190	2.351	73,70	22.215	17.496	78,76
16	Banten	662	404	61,03	1.481	952	64,28	406	313	77,09	293	126	43,00	16	11	68,75	4.398	2.626	59,71	333	185	55,56	7.589	4.617	60,84
17	Bali	214	124	57,94	1.372	994	72,45	473	322	68,08	1.995	1.169	58,60	304	268	88,16	850	722	84,94	1.277	935	73,22	6.485	4.534	69,92
18	Nusa Tenggara Barat	440	194	44,09	963	439	45,59	280	134	47,86	1.163	620	53,31	278	106	38,13	1.013	630	62,19	380	183	48,16	4.517	2.306	51,05
19	Nusa Tenggara Timur	180	96	53,33	727	385	52,96	876	477	54,45	570	338	59,30	661	411	62,18	1.294	800	61,82	226	84	37,17	4.534	2.591	57,15
20	Kalimantan Barat	198	134	67,68	501	315	62,87	380	259	68,16	1.610	1.138	70,68	1.045	577	55,22	1.240	825	66,53	649	431	66,41	5.623	3.679	65,43
21	Kalimantan Tengah	153	91	59,48	569	286	50,26	359	206	57,38	1.034	805	77,85	81	66	81,48	1.833	992	54,12	490	256	52,24	4.519	2.702	59,79
22	Kalimantan Selatan	283	139	49,12	814	359	44,10	549	376	68,49	3.097	1.659	53,57	90	43	47,78	2.765	1.895	68,54	323	139	43,03	7.921	4.610	58,20
23	Kalimantan Timur	480	380	79,17	1.188	728	61,28	1.800	1.448	80,44	1.205	881	73,11	62	34	54,84	4.165	3.061	73,49	1.328	818	61,60	10.228	7.350	71,86
24	Kalimantan Utara	119	80	67,23	308	185	60,06	430	367	85,35	713	617	86,54	65	56	86,15	882	628	71,20	416	305	73,32	2.933	2.238	76,30
25	Sulawesi Utara	83	19	22,89	878	271	30,87	118	75	63,56	295	263	89,15	4	2	50,00	691	324	46,89	200	58	29,00	2.269	1.012	44,60
26	Sulawesi Tengah	136	107	78,68	902	733	81,26	505	430	85,15	692	619	89,45	94	62	65,96	1.513	1.216	80,37	669	506	75,64	4.511	3.673	81,42
27	Sulawesi Selatan	584	465	79,62	1.070	716	66,92	741	517	69,77	3.110	2.261	72,70	3.304	2.209	66,86	5.154	3.230	62,67	3.605	2.089	57,95	17.568	11.487	65,39
28	Sulawesi Tenggara	79	32	40,51	738	375	50,81	719	508	70,65	1.320	763	57,80	41	10	24,39	1.199	666	55,55	712	244	34,27	4.808	2.598	54,03
29	Gorontalo	244	180	73,77	237	121	51,05	74	56	75,68	1.058	783	74,01	706	452	64,02	1.632	732	44,85	1.159	524	45,21	5.110	2.848	55,73
30	Sulawesi Barat	145	73	50,34	477	193	40,46	1.001	458	45,75	1.473	311	65,75	1.062	458	43,13	994	560	56,34	523	183	34,99	4.675	2.236	47,83
31	Maluku	165	105	63,64	41	19	46,34	324	136	41,98	1.081	735	67,99	1.204	630	52,33	2.666	1.096	41,11	457	309	67,61	5.938	3.030	51,03
32	Maluku Utara	121	74	61,16	166	126	75,90	266	181	68,05	126	98	77,78	25	24	96,00	429	335	78,09	57	28	49,12	1.190	866	72,77
33	Papua	60	21	35,00	246	140	56,91	217	155	71,43	209	158	75,60	9	5	55,56	614	431	70,20	40	32	80,00	1.395	942	67,53
34	Papua Barat	67	37	55,22	184	143	77,72	263	165	62,74	58	50	86,21	15	6	40,00	172	138	80,23	39	17	43,59	798	556	69,67
35	Papua Selatan	36	13	36,11	121	46	38,02	160	120	75,00	18	11	61,11	0	0	0,00	44	25	56,82	51	18	35,29	430	233	54,19
36	Papua Tengah	27	12	44,44	129	44	34,11	372	319	85,75	269	182	67,66	13	8	61,54	256	188	73,44	20	9	45,00	1.086	762	70,17
37	Papua Pegunungan	0	0	0,00	27	11	40,74	24	24	100,00	2	0	0,00	0	0	0,00	791	6	0,76	1	0	0,00	845	41	4,85
38	Papua Barat Daya	14	10	71,43	132	62	46,97	86	53	61,63	71	53	74,65	29	24	82,76	176	84	47,73	17	2	11,76	525	288	54,86
Indonesia		15.058	9.925	65,91	38.464	24.514	63,73	24.754	17.847	72,10	45.176	30.874	68,34	12.978	7.606	58,61	84.945	58.063	68,35	29.083	17.441	59,97	250.458	166.270	66,39

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 83.b

**JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	8	34,78
2	Sumatera Utara	33	14	42,42
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	19	86,36
20	Kalimantan Barat	14	6	42,86
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	10	76,92
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33
31	Maluku	11	5	45,45
32	Maluku Utara	10	7	70,00
33	Papua	9	4	44,44
34	Papua Barat	7	1	14,29
35	Papua Selatan	4	1	25,00
36	Papua Tengah	8	1	12,50
37	Papua Pegunungan	8	2	25,00
38	Papua Barat Daya	6	1	16,67
Indonesia		514	422	82,10

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 83.c

**JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah RS dan Puskesmas	Jumlah RS dan Puskesmas yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	447	271	60,63
2	Sumatera Utara	829	382	46,08
3	Sumatera Barat	358	228	63,69
4	Riau	324	189	58,33
5	Jambi	252	150	59,52
6	Sumatera Selatan	442	368	83,26
7	Bengkulu	205	125	60,98
8	Lampung	404	327	80,94
9	Kepulauan Bangka Belitung	93	75	80,65
10	Kepulauan Riau	132	76	57,58
11	DKI Jakarta	234	131	55,98
12	Jawa Barat	1536	1083	70,51
13	Jawa Tengah	1241	1090	87,83
14	DI Yogyakarta	200	182	91,00
15	Jawa Timur	1412	1356	96,03
16	Banten	384	353	91,93
17	Bali	202	168	83,17
18	Nusa Tenggara Barat	223	181	81,17
19	Nusa Tenggara Timur	506	225	44,47
20	Kalimantan Barat	307	158	51,47
21	Kalimantan Tengah	238	118	49,58
22	Kalimantan Selatan	293	235	80,20
23	Kalimantan Timur	250	187	74,80
24	Kalimantan Utara	75	38	50,67
25	Sulawesi Utara	259	169	65,25
26	Sulawesi Tengah	259	129	49,81
27	Sulawesi Selatan	600	378	63,00
28	Sulawesi Tenggara	348	161	46,26
29	Gorontalo	115	54	46,96
30	Sulawesi Barat	114	62	54,39
31	Maluku	271	55	20,30
32	Maluku Utara	173	52	30,06
33	Papua	141	51	36,17
34	Papua Barat	92	22	23,91
35	Papua Selatan	93	18	19,35
36	Papua Tengah	140	27	19,29
37	Papua Pegunungan	188	9	4,79
38	Papua Barat Daya	116	24	20,69
Indonesia		13.496	8.907	66,00

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2025; Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2025; Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 83.d

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Kebijakan Gernas	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	22	95,65
2	Sumatera Utara	33	33	100,00
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	16	94,12
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	21	95,45
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	10	66,67
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	23	95,83
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33
31	Maluku	11	10	90,91
32	Maluku Utara	10	10	100,00
33	Papua	9	7	77,78
34	Papua Barat	7	3	42,86
35	Papua Selatan	4	3	75,00
36	Papua Tengah	8	2	25,00
37	Papua Pegunungan	8	2	25,00
38	Papua Barat Daya	6	3	50,00
Indonesia		514	481	93,58

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 83.e

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2024**

No	Provinsi	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	64,18	65,91	67,76
2	Sumatera Utara	67,26	70,95	73,47
3	Sumatera Barat	58,18	59,85	62,29
4	Riau	69,43	71,53	74,80
5	Jambi	60,85	64,12	66,21
6	Sumatera Selatan	59,96	61,82	63,21
7	Bengkulu	54,98	54,74	56,52
8	Lampung	61,24	63,15	65,96
9	Kepulauan Bangka Belitung	30,79	32,57	30,72
10	Kepulauan Riau	46,69	54,21	57,19
11	DKI Jakarta	36,23	38,80	39,00
12	Jawa Barat	53,37	54,17	56,25
13	Jawa Tengah	67,02	68,85	71,76
14	DI Yogyakarta	84,94	85,79	86,68
15	Jawa Timur	66,28	70,74	73,40
16	Banten	60,98	63,06	64,94
17	Bali	81,65	84,26	85,99
18	Nusa Tenggara Barat	62,30	66,31	67,74
19	Nusa Tenggara Timur	41,80	42,70	46,88
20	Kalimantan Barat	60,74	64,16	65,70
21	Kalimantan Tengah	54,07	56,49	59,92
22	Kalimantan Selatan	55,96	57,50	60,60
23	Kalimantan Timur	73,18	75,82	76,77
24	Kalimantan Utara	67,21	71,43	69,65
25	Sulawesi Utara	69,57	72,39	74,21
26	Sulawesi Tengah	58,61	59,60	62,59
27	Sulawesi Selatan	69,90	71,88	71,86
28	Sulawesi Tenggara	72,80	74,01	76,67
29	Gorontalo	69,48	70,75	72,04
30	Sulawesi Barat	55,37	59,28	59,95
31	Maluku	60,66	63,61	66,13
32	Maluku Utara	65,42	68,17	68,05
33	Papua	27,28	29,01	62,15
34	Papua Barat	53,81	56,92	58,22
35	Papua Selatan	-	-	38,34
36	Papua Tengah	-	-	26,79
37	Papua Pegunungan	-	-	4,44
38	Papua Barat Daya	-	-	58,25
Indonesia		60,66	63,15	65,25

Sumber: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, Badan Pusat Statistik, 2024

Lampiran 88.a

JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA
TAHUN 2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Banjir	18	11	17	3	21	11	6	3	1	13	11	10	125
2	Letusan Gunung Api	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4
3	Gempa Bumi	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	1	3	1	2	3	0	0	0	1	1	1	2	15
6	Banjir Bandang	1	3	0	5	2	0	0	1	0	0	2	1	15
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
8	Angin Puting Beliung	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	11
9	Gelombang Pasang/Badai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Banjir dan Tanah Longsor	1	3	8	3	11	1	6	2	0	3	2	5	45
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		24	21	27	14	38	12	13	6	9	18	22	19	223
1	Kebakaran	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	6
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penyakit	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
7	Keracunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gagal Teknologi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		2	1	1	1	0	0	1	1	3	2	0	0	12
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Jumlah Bencana Berdampak Krisis		26	22	28	15	38	12	14	7	12	20	22	19	235

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 88.b

**JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2024**

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banjir	125	25	76	71	39.052	122.372
2	Letusan Gunung Api	4	3	9	210	18.797	34.279
3	Gempa Bumi	3	3	1	29	221	37.765
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	15	7	35	11	295	4.258
6	Banjir Bandang	15	8	46	25	1.677	3.769
7	Kekeringan	4	3	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	11	7	11	1	18	0
9	Gelombang Pasang/Badai	1	1	0	0	0	0
10	Banjir dan Tanah Longsor	45	17	136	131	30.287	139.658
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		223	27	314	478	90.347	342.101
1	Kebakaran	2	1	1	0	14	0
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	6	2	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0
6	Penyakit	3	2	12	18	2.687	1.851
7	Keracunan	0	0	0	0	0	0
8	Gagal Teknologi	1	1	0	0	15	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		12	8	13	18	2.716	1.851
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		0	0	0	0	0	0
Indonesia		235		327	496	93.063	343.952

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 88.c

**JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	9	1	0	0	2.480
2	Sumatera Utara	13	18	10	228	7.157
3	Sumatera Barat	23	90	16	15.765	100.415
4	Riau	2	0	18	2.687	0
5	Jambi	7	2	0	2.250	1.223
6	Sumatera Selatan	10	13	5	2.990	32.343
7	Bengkulu	2	0	0	66	300
8	Lampung	3	3	0	6	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	14	32	24	18.279	28.363
13	Jawa Tengah	18	17	38	12.098	63.220
14	D.I. Yogyakarta	1	0	0	0	0
15	Jawa Timur	23	3	19	4.285	34.582
16	Banten	3	6	0	2	2.012
17	Bali	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	5	0	0	128	0
19	Nusa Tenggara Timur	4	9	67	13.180	23.118
20	Kalimantan Barat	15	3	0	458	900
21	Kalimantan Tengah	10	6	0	665	1.532
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	3	1	2	69	300
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	7	0	110	2.774	10.226
26	Sulawesi Tengah	8	1	0	0	45
27	Sulawesi Selatan	19	54	82	5.801	6.563
28	Sulawesi Tenggara	4	0	1	236	162
29	Gorontalo	10	33	59	7.361	18.621
30	Sulawesi Barat	3	0	0	273	1.270
31	Maluku	3	0	0	0	695
32	Maluku Utara	5	19	44	3.461	4.679
33	Papua Barat	3	0	0	0	60
34	Papua	1	0	0	0	200
35	Papua Barat Daya	1	0	0	0	0
36	Papua Tengah	3	16	1	1	0
37	Papua Selatan	1	0	0	0	1.827
38	Papua Pegunungan	1	0	0	0	1.659
Indonesia		235	327	496	93.063	343.952

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No.	Provinsi	Jumlah Kejadian Bencana																				Jumlah	
		Banjir	Letusan Gunung Api	Gempa Bumi	Gempa Bumi dan Tsunami	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Kekeringan	Angin Puting Beluhng	Gelombang Pasang/ Badai	Banjir dan Tanah Longsor	Kebakaran	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecelakaan Transportasi Darat	Kecelakaan Transportasi Laut- Utara	Kecelakaan Industri	Penyakit	Keracunan	Gagal Teknologi	Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial		Aksi Teror dan Sabotase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2	Sumatera Utara	7	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13
3	Sumatera Barat	9	0	0	0	1	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
5	Jambi	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6	Sumatera Selatan	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
7	Bengkulu	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Lampung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	4	0	1	0	4	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
13	Jawa Tengah	7	0	1	0	3	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
14	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Jawa Timur	11	0	1	0	0	0	2	3	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
16	Banten	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
19	Nusa Tenggara Timur	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	Kalimantan Barat	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
21	Kalimantan Tengah	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Sulawesi Utara	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
26	Sulawesi Tengah	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
27	Sulawesi Selatan	9	0	0	0	3	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
28	Sulawesi Tenggara	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
29	Gorontalo	5	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
31	Maluku	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
32	Maluku Utara	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
33	Papua Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
34	Papua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37	Papua Selatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38	Papua Pegunungan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		125	4	3	0	15	15	4	11	1	45	2	6	0	0	0	3	0	1	0	0	0	235

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 89.a

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2022-2024

No	Provinsi	2022		2023		2024	
		PIHK	Reguler	PIHK	Reguler	PIHK	Reguler
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
1	Aceh	9	1.988	38	4.454	39	4.711
2	Sumatera Utara	28	3.747	102	8.084	113	8.695
3	Sumatera Barat	58	2.109	220	4.789	226	4.872
4	Riau	161	2.271	394	5.247	402	5.317
5	Jambi	105	1.323	188	3.054	193	3.126
6	Sumatera Selatan	163	3.190	423	7.280	443	7.343
7	Bengkulu	4	742	36	1.779	37	1.717
8	Lampung	42	3.197	218	7.191	232	7.287
9	Kepulauan Bangka Belitung	24	483	79	1.153	83	1.117
10	Kepulauan Riau	49	581	87	1.317	89	1.330
11	DKI Jakarta	1.108	3.568	2.919	7.745	3.203	8.206
12	Jawa Barat	1.033	17.578	2.627	39.330	2.823	40.635
13	Jawa Tengah	537	13.726	1.559	31.579	1.624	32.512
14	DI Yogyakarta	228	1.439	555	3.289	595	3.399
15	Jawa Timur	1.233	15.991	2.963	36.578	3.120	37.833
16	Banten	496	4.259	1.147	9.669	1.212	10.436
17	Bali	21	316	41	725	43	729
18	Nusa Tenggara Barat	30	2.037	76	4.951	83	4.834
19	Nusa Tenggara Timur	5	288	2	694	2	675
20	Kalimantan Barat	21	1.136	40	2.578	42	2.630
21	Kalimantan Tengah	106	733	191	1.703	198	1.706
22	Kalimantan Selatan	321	1.732	607	3.954	643	4.140
23	Kalimantan Timur	440	1.179	956	2.684	982	2.783
24	Kalimantan Utara	-	188	7	465	12	442
25	Sulawesi Utara	2	324	1	761	1	720
26	Sulawesi Tengah	20	894	39	2.096	44	2.105
27	Sulawesi Selatan	549	3.320	1.241	7.901	1.324	7.935
28	Sulawesi Tenggara	55	917	175	2.153	185	2.131
29	Gorontalo	2	446	7	1.014	8	1.003
30	Sulawesi Barat	7	657	7	1.567	7	1.535
31	Maluku	2	491	11	1.134	11	1.086
32	Maluku Utara	6	488	10	1.178	10	1.113
33	Papua	25	483	40	1.029	41	1.077
34	Papua Barat	4	326	5	755	5	746
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		6.894	92.147	17.011	209.880	18.075	215.926

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: PIHK = Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.b

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1.830	2.881	4.711
2	Sumatera Utara	3.542	5.153	8.695
3	Sumatera Barat	1.956	2.916	4.872
4	Riau	2.424	2.893	5.317
5	Jambi	1.378	1.748	3.126
6	Sumatera Selatan	3323	4.020	7.343
7	Bengkulu	746	971	1.717
8	Lampung	3.388	3.899	7.287
9	Kepulauan Bangka Belitung	504	613	1.117
10	Kepulauan Riau	603	727	1.330
11	DKI Jakarta	3.535	4.671	8.206
12	Jawa Barat	18.609	22.026	40.635
13	Jawa Tengah	15.153	17.359	32.512
14	DI Yogyakarta	1.534	1.865	3.399
15	Jawa Timur	17.744	20.089	37.833
16	Banten	4.685	5.751	10.436
17	Bali	346	383	729
18	Nusa Tenggara Barat	2.445	2.389	4.834
19	Nusa Tenggara Timur	282	393	675
20	Kalimantan Barat	1.251	1.379	2.630
21	Kalimantan Tengah	781	925	1.706
22	Kalimantan Selatan	1.849	2.291	4.140
23	Kalimantan Timur	1.166	1.617	2.783
24	Kalimantan Utara	161	281	442
25	Sulawesi Utara	278	442	720
26	Sulawesi Tengah	758	1.347	2.105
27	Sulawesi Selatan	2.642	5.293	7.935
28	Sulawesi Tenggara	781	1.350	2.131
29	Gorontalo	376	627	1.003
30	Sulawesi Barat	489	1.046	1.535
31	Maluku	454	632	1.086
32	Maluku Utara	479	634	1.113
33	Papua	448	629	1.077
34	Papua Barat	313	433	746
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		96.253	119.673	215.926

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.c

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Jemaah Haji					
		< 40 tahun	40 - 49 tahun	50 - 59 tahun	60 - 69 tahun	> 69 tahun	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	440	790	1.397	1.344	740	4.711
2	Sumatera Utara	616	1.518	3.267	2.499	795	8.695
3	Sumatera Barat	320	692	1.485	1.636	739	4.872
4	Riau	376	1.131	2.053	1.307	450	5.317
5	Jambi	217	537	1.018	983	371	3.126
6	Sumatera Selatan	586	1.280	2.387	2.257	833	7.343
7	Bengkulu	79	196	499	693	250	1.717
8	Lampung	472	1.354	2.482	2.032	947	7.287
9	Kepulauan Bangka Belitung	93	275	316	297	136	1.117
10	Kepulauan Riau	89	339	531	267	104	1.330
11	DKI Jakarta	748	1.694	2.859	2.244	661	8.206
12	Jawa Barat	4.050	9.156	13.496	10.007	3.926	40.635
13	Jawa Tengah	2.226	6.093	10.516	9.502	4.175	32.512
14	DI Yogyakarta	255	553	1.086	1.100	405	3.399
15	Jawa Timur	3.935	7.926	12.647	9.814	3.511	37.833
16	Banten	1.241	2.373	3.548	2.350	924	10.436
17	Bali	59	184	284	134	68	729
18	Nusa Tenggara Barat	273	1.006	1.577	1.278	700	4.834
19	Nusa Tenggara Timur	87	167	199	160	62	675
20	Kalimantan Barat	222	531	948	689	240	2.630
21	Kalimantan Tengah	222	493	559	294	138	1.706
22	Kalimantan Selatan	600	1.101	1.452	753	234	4.140
23	Kalimantan Timur	307	720	932	627	197	2.783
24	Kalimantan Utara	45	132	158	87	20	442
25	Sulawesi Utara	98	152	219	193	58	720
26	Sulawesi Tengah	301	556	684	385	179	2.105
27	Sulawesi Selatan	779	2.075	2.752	1.578	751	7.935
28	Sulawesi Tenggara	228	525	689	462	227	2.131
29	Gorontalo	83	224	341	261	94	1.003
30	Sulawesi Barat	179	424	528	261	143	1.535
31	Maluku	89	232	279	315	171	1.086
32	Maluku Utara	92	238	278	325	180	1.113
33	Papua	134	328	358	184	73	1.077
34	Papua Barat	98	201	249	125	73	746
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		19.639	45.196	72.073	56.443	22.575	215.926

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: - Kelompok umur dibuat berdasarkan masukan dari surveilans, ada hubungannya dengan permintaan dari pemerintah Arab Saudi untuk kelompok umur tertentu

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.d

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN DAN PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	Lain-Lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	1.020	471	1.075	502	1.370	231	23	19	4.711
2	Sumatera Utara	1.506	933	3.262	114	2.441	399	33	7	8.695
3	Sumatera Barat	804	423	1.674	199	1.426	318	21	7	4.872
4	Riau	1.432	595	1.730	63	1.279	210	6	2	5.317
5	Jambi	1.155	369	681	172	627	109	10	3	3.126
6	Sumatera Selatan	1.903	762	1.761	552	1.889	429	16	31	7.343
7	Bengkulu	506	148	415	33	469	100	9	37	1.717
8	Lampung	2.057	817	1.740	486	1.721	366	13	87	7.287
9	Kepulauan Bangka Belitung	450	123	232	76	201	33	1	1	1.117
10	Kepulauan Riau	219	129	521	27	369	59	3	3	1.330
11	DKI Jakarta	1.116	824	2.469	699	2.522	544	25	7	8.206
12	Jawa Barat	11.836	4.447	9.733	2.729	9.646	2.002	166	76	40.635
13	Jawa Tengah	10.120	3.717	7.185	2.226	7.817	1.281	66	100	32.512
14	DI Yogyakarta	295	192	782	348	1.476	278	23	5	3.399
15	Jawa Timur	11.225	4.370	9.087	1.542	9.691	1.586	89	243	37.833
16	Banten	3.089	1.056	2.600	598	2.433	484	22	154	10.436
17	Bali	175	108	226	50	133	28	3	6	729
18	Nusa Tenggara Barat	1.653	412	929	221	1.150	160	4	305	4.834
19	Nusa Tenggara Timur	251	103	201	15	82	20	2	1	675
20	Kalimantan Barat	697	240	713	184	625	128	7	36	2.630
21	Kalimantan Tengah	601	254	416	71	287	52	5	20	1.706
22	Kalimantan Selatan	1.211	605	1.060	272	857	108	1	26	4.140
23	Kalimantan Timur	742	302	811	181	624	98	5	20	2.783
24	Kalimantan Utara	170	51	111	20	74	14		2	442
25	Sulawesi Utara	158	100	277	22	138	19	3	3	720
26	Sulawesi Tengah	555	333	613	25	466	99	11	3	2.105
27	Sulawesi Selatan	2.979	964	1.755	317	1.556	280	22	62	7.935
28	Sulawesi Tenggara	745	248	490	95	449	92	11	1	2.131
29	Gorontalo	168	98	241	58	326	86	10	16	1.003
30	Sulawesi Barat	562	206	414	8	288	53	1	3	1.535
31	Maluku	442	129	264	42	162	40	6	1	1.086
32	Maluku Utara	360	181	277	48	198	47	1	1	1.113
33	Papua	302	180	385	19	155	30	1	5	1.077
34	Papua Barat	227	107	232	7	139	28		6	746
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		60.731	23.997	54.362	12.021	53.086	9.811	619	1.299	215.926

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.e

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN DAN PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Pedagang	Ibu Rumah Tangga	Pegawai BUMN/ BUMD	Pegawai Swasta	Pelajar/ Mahasiswa	Pensiunan/ Lain-Lain	PNS	Petani	TNI/POLRI	Lain-lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	245	1.226	69	531	185	152	1.651	530	45	77	4.711
2	Sumatera Utara	663	2.361	298	1.743	201	214	2.167	857	122	69	8.695
3	Sumatera Barat	536	1.257	151	539	112	250	1.597	355	53	22	4.872
4	Riau	207	1.731	114	1.032	120	82	1.168	764	38	61	5.317
5	Jambi	130	990	23	446	51	43	762	643	24	14	3.126
6	Sumatera Selatan	583	1.732	261	724	148	622	2.003	1.137	91	42	7.343
7	Bengkulu	116	333	19	209	11	80	577	351	19	2	1.717
8	Lampung	523	1.592	84	1.456	112	159	1.865	1.404	54	38	7.287
9	Kepulauan Bangka Belitung	46	420	20	164	11	46	234	157	11	8	1.117
10	Kepulauan Riau	70	417	33	362	25	61	299	33	22	8	1.330
11	DKI Jakarta	769	2.669	215	2.569	200	366	1.229	30	142	17	8.206
12	Jawa Barat	4.060	14.056	765	8.775	996	1.548	7.125	2.566	429	315	40.635
13	Jawa Tengah	4.271	5.253	470	7.958	535	1.015	6.899	5.562	325	224	32.512
14	DI Yogyakarta	239	518	40	678	89	164	1.417	140	87	27	3.399
15	Jawa Timur	2.763	7.297	440	11.372	1.407	560	7.245	6.040	458	251	37.833
16	Banten	718	3.786	198	2.748	437	239	1.741	444	78	47	10.436
17	Bali	108	175	7	279	23	21	92	16	6	2	729
18	Nusa Tenggara Barat	428	866	29	617	43	495	1.175	1.129	15	37	4.834
19	Nusa Tenggara Timur	147	223	10	106	14	9	99	58	6	3	675
20	Kalimantan Barat	113	700	47	264	47	292	794	310	45	18	2.630
21	Kalimantan Tengah	173	469	10	168	39	327	348	137	18	17	1.706
22	Kalimantan Selatan	417	1.038	49	820	219	61	985	506	27	18	4.140
23	Kalimantan Timur	196	1.017	44	622	77	46	585	144	27	25	2.783
24	Kalimantan Utara	14	193	2	74	11	1	102	39	1	5	442
25	Sulawesi Utara	38	232	10	91	28	113	144	38	13	13	720
26	Sulawesi Tengah	246	693	20	262	89	28	542	189	15	21	2.105
27	Sulawesi Selatan	392	3.410	64	1.163	190	163	1.575	876	63	39	7.935
28	Sulawesi Tenggara	66	747	26	352	61	49	529	275	13	13	2.131
29	Gorontalo	54	225	19	55	13	164	388	51	16	18	1.003
30	Sulawesi Barat	71	655	4	247	48	14	325	156	11	4	1.535
31	Maluku	75	378	5	114	12	81	196	197	18	10	1.086
32	Maluku Utara	29	319	5	190	8	19	292	221	14	16	1.113
33	Papua	111	410	8	266	22	36	163	44	13	4	1.077
34	Papua Barat	90	279	5	135	20	11	132	50	20	4	746
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		18.707	57.667	3.564	47.131	5.604	7.531	46.445	25.449	2.339	1.489	215.926

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.f

JUMLAH DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI REGULER
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN
TAHUN 2022-2024

No	Provinsi	2022			2023			2024		
		Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Diperiksa	%	Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Diperiksa	%	Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Diperiksa	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1.988	1.931	97,1	4.454	4.360	97,9	4.711	4.609	97,8
2	Sumatera Utara	3.747	3.746	100,0	1.153	1.129	97,9	8.695	8.485	97,6
3	Sumatera Barat	2.109	2.099	99,5	725	714	98,5	4.872	4.794	98,4
4	Riau	2.271	2.271	100,0	9.669	9.479	98,0	5.317	5.221	98,2
5	Jambi	1.323	1.297	98,0	1.779	1.753	98,5	3.126	3.071	98,2
6	Sumatera Selatan	3.190	3.164	99,2	3.289	3.243	98,6	7.343	7.193	98,0
7	Bengkulu	742	734	98,9	7.745	7.597	98,1	1.717	1.678	97,7
8	Lampung	3.197	3.172	99,2	1.014	1.003	98,9	7.287	7.145	98,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	483	483	100,0	39.330	38.628	98,2	1.117	1.096	98,1
10	Kepulauan Riau	581	581	100,0	3.054	3.021	98,9	1.330	1.301	97,8
11	DKI Jakarta	3.568	3.564	99,9	31.579	31.147	98,6	8.206	8.044	98,0
12	Jawa Barat	17.578	17.571	100,0	36.578	35.838	98,0	40.635	39.694	97,7
13	Jawa Tengah	13.726	13.724	100,0	2.578	2.547	98,8	32.512	31.769	97,7
14	DI Yogyakarta	1.439	1.439	100,0	3.954	3.881	98,2	3.399	3.320	97,7
15	Jawa Timur	15.991	15.975	99,9	465	461	99,1	37.833	37.034	97,9
16	Banten	4.259	4.256	99,9	1.703	1.677	98,5	10.436	10.199	97,7
17	Bali	316	316	100,0	2.684	2.649	98,7	729	717	98,4
18	Nusa Tenggara Barat	2.037	2.035	99,9	1.317	1.292	98,1	4.834	4.740	98,1
19	Nusa Tenggara Timur	288	288	100,0	7.191	7.076	98,4	675	662	98,1
20	Kalimantan Barat	1.136	1.136	100,0	1.134	1.112	98,1	2.630	2.579	98,1
21	Kalimantan Tengah	733	732	99,9	1.178	1.149	97,5	1.706	1.663	97,5
22	Kalimantan Selatan	1.732	1.732	100,0	4.951	4.902	99,0	4.140	4.051	97,9
23	Kalimantan Timur	1.179	1.167	99,0	694	677	97,6	2.783	2.720	97,7
24	Kalimantan Utara	188	188	100,0	1.029	1.018	98,9	442	434	98,2
25	Sulawesi Utara	324	324	100,0	755	749	99,2	720	796	110,6
26	Sulawesi Tengah	894	882	98,7	5.247	5.194	99,0	2.105	2.055	97,6
27	Sulawesi Selatan	3.320	3.311	99,7	1.567	1.547	98,7	7.935	7.193	90,6
28	Sulawesi Tenggara	917	917	100,0	7.901	7.827	99,1	2.131	2.092	98,2
29	Gorontalo	446	446	100,0	2.096	2.056	98,1	1.003	985	98,2
30	Sulawesi Barat	657	656	99,8	2.153	2.137	99,3	1.535	1.509	98,3
31	Maluku	491	488	99,4	761	747	98,2	1.086	1.068	98,3
32	Maluku Utara	488	488	100,0	4.789	4.728	98,7	1.113	1.092	98,1
33	Papua	483	475	98,3	7.280	7.092	97,4	1.077	1.055	98,0
34	Papua Barat	326	324	99,4	8.084	7.955	98,4	746	732	98,1
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		92.147	91.912	98,3	209.880	206.385	98,3	215.926	210.796	97,6

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.g

**HASIL CAKUPAN PEMBINAAN JEMAAH HAJI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Kuota Jemaah			Cakupan				
					Pembinaan Jemaah Haji (T)		Pembinaan Jemaah Haji Risti (T+1)		
		Awal	Tambahan	Jumlah	Jumlah	Persentase	Jumlah JH Risti	Jamaah Haji Risti Dibina	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	4.378	257	4.635	4.642	100,15	2.321	795	34,25
2	Sumatera Utara	8.328	296	8.624	8.500	98,56	3.663	1.156	31,56
3	Sumatera Barat	4.613	193	4.806	4.795	99,77	2.381	1.263	53,04
4	Riau	5.047	226	5.273	5.251	99,58	1.979	965	48,76
5	Jambi	2.909	162	3.071	3.086	100,49	1.382	175	12,66
6	Sumatera Selatan	7.012	283	7.295	7.193	98,60	3.161	988	31,26
7	Bengkulu	1.636	66	1.702	1.695	99,59	939	73	7,77
8	Lampung	7.050	284	7.334	7.170	97,76	3.097	587	18,95
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.065	51	1.116	1.097	98,30	427	103	24,12
10	Kepulauan Riau	1.291	52	1.343	1.306	97,24	397	129	32,49
11	DKI Jakarta	7.926	384	8.310	8.103	97,51	3.223	1.575	48,87
12	Jawa Barat	38.723	1.478	40.201	39.805	99,01	15.181	4.625	30,47
13	Jawa Tengah	30.377	1.682	32.059	31.899	99,50	13.725	5.237	38,16
14	DI Yogyakarta	3.147	182	3.329	3.325	99,88	1.354	166	12,26
15	Jawa Timur	35.152	2.118	37.270	37.137	99,64	14.021	5.119	36,51
16	Banten	9.461	447	9.908	10.212	103,07	3.518	986	28,03
17	Bali	698	34	732	717	97,95	249	106	42,57
18	Nusa Tenggara Barat	4.499	287	4.786	4.740	99,04	2.293	486	21,19
19	Nusa Tenggara Timur	668	27	695	662	95,25	297	27	9,09
20	Kalimantan Barat	2.519	92	2.611	2.587	99,08	1.002	139	13,87
21	Kalimantan Tengah	1.612	76	1.688	1.675	99,23	414	250	60,39
22	Kalimantan Selatan	3.818	253	4.071	4.063	99,80	1.147	90	7,85
23	Kalimantan Timur	2.586	152	2.738	2.721	99,38	952	43	4,52
24	Kalimantan Utara	416	23	439	435	99,09	117	10	8,55
25	Sulawesi Utara	713	20	733	706	96,32	288	94	32,64
26	Sulawesi Tengah	1.993	80	2.073	2.055	99,13	774	245	31,65
27	Sulawesi Selatan	7.272	468	7.740	7.796	100,72	2.638	667	25,28
28	Sulawesi Tenggara	2.019	95	2.114	2.106	99,62	786	79	10,05
29	Gorontalo	978	29	1.007	985	97,82	380	48	12,63
30	Sulawesi Barat	1.453	68	1.521	1.509	99,21	497	196	39,44
31	Maluku	1.086	28	1.114	1.077	96,68	516	43	8,33
32	Maluku Utara	1.076	38	1.114	1.092	98,03	532	74	13,91
33	Papua	1.076	47	1.123	1.058	94,21	336	18	5,36
34	Papua Barat	723	22	745	732	98,26	239	29	12,13
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		203.320	10.000	213.320	211.932	99,35	84.226	26.586	31,57

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.h

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI (RISTI) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024

No	Provinsi	Non Risti	Risti	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1.041	3.568	4.609
2	Sumatera Utara	2.239	6.246	8.485
3	Sumatera Barat	639	4.155	4.794
4	Riau	794	4.427	5.221
5	Jambi	800	2.271	3.071
6	Sumatera Selatan	1.123	6.070	7.193
7	Bengkulu	363	1.315	1.678
8	Lampung	1.563	5.582	7.145
9	Kepulauan Bangka Belitung	225	871	1.096
10	Kepulauan Riau	173	1.128	1.301
11	DKI Jakarta	1.097	6.947	8.044
12	Jawa Barat	10.771	28.923	39.694
13	Jawa Tengah	800	2.271	3.071
14	DI Yogyakarta	782	2.538	3.320
15	Jawa Timur	11.013	26.021	37.034
16	Banten	2.248	7.951	10.199
17	Bali	255	462	717
18	Nusa Tenggara Barat	1.311	3.429	4.740
19	Nusa Tenggara Timur	165	497	662
20	Kalimantan Barat	584	1.995	2.579
21	Kalimantan Tengah	430	1.233	1.663
22	Kalimantan Selatan	981	3.070	4.051
23	Kalimantan Timur	591	2.129	2.720
24	Kalimantan Utara	87	347	434
25	Sulawesi Utara	162	544	706
26	Sulawesi Tengah	522	1.533	2.055
27	Sulawesi Selatan	1.790	5.996	7.786
28	Sulawesi Tenggara	561	1.531	2.092
29	Gorontalo	200	785	985
30	Sulawesi Barat	403	1.106	1.509
31	Maluku	204	864	1.068
32	Maluku Utara	155	937	1.092
33	Papua	314	741	1.055
34	Papua Barat	166	566	732
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		44.552	138.049	182.601

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.i

JUMLAH RAWAT JALAN DAN RATIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER BERDASARKAN EMBARKASI
TAHUN 2024

No	Embarkasi	Jumlah Kloter	Jumlah Jemaah Berangkat	Jumlah Rawat Jalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh (BTJ)	12	4.710	194
2	Balikipapan (BPN)	19	6.016	867
3	Banjarmasin (BDJ)	19	5.846	890
4	Batam (BTH)	28	12.380	1.207
5	Jakarta Bekasi (JKS)	63	27.521	1.306
6	Jakarta Pondok Gede (JKG)	65	25.984	279
7	Kertajati (KJT)	30	13.062	363
8	Mataram Lombok (LOP)	13	4.829	302
9	Medan (KNO)	25	8.690	495
10	Padang (PDG)	17	6.595	153
11	Palembang (PLM)	19	8.466	247
12	Semarang Solo (SOC)	100	35.970	768
13	Surabaya (SUB)	106	39.261	944
14	Ujung Pandang (UPG)	37	16.632	366
Indonesia		553	215.962	8.381

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Lampiran 89.j

**JUMLAH DAN PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024**

No	Provinsi	Jumlah Jemaah	Jumlah Jemaah Wafat	Persentase Jemaah Wafat (%)	Permil Jemaah Wafat (‰)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	4.711	15	0,32	3,18
2	Sumatera Utara	8.695	21	0,24	2,42
3	Sumatera Barat	4.872	13	0,27	2,67
4	Riau	5.317	10	0,19	1,88
5	Jambi	3.126	14	0,45	4,48
6	Sumatera Selatan	7.343	20	0,27	2,72
7	Bengkulu	1.717	1	0,06	0,58
8	Lampung	7.287	8	0,11	1,10
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.117	2	0,18	1,79
10	Kepulauan Riau	1.330	1	0,08	0,75
11	DKI Jakarta	8.206	11	0,13	1,34
12	Jawa Barat	40.635	63	0,16	1,55
13	Jawa Tengah	32.512	75	0,23	2,31
14	DI Yogyakarta	3.399	7	0,21	2,06
15	Jawa Timur	37.833	79	0,21	2,09
16	Banten	10.436	28	0,27	2,68
17	Bali	729	1	0,14	1,37
18	Nusa Tenggara Barat	4.834	8	0,17	1,65
19	Nusa Tenggara Timur	675	1	0,15	1,48
20	Kalimantan Barat	2.630	2	0,08	0,76
21	Kalimantan Tengah	1.706	3	0,18	1,76
22	Kalimantan Selatan	4.140	9	0,22	2,17
23	Kalimantan Timur	2.783	5	0,18	1,80
24	Kalimantan Utara	442	2	0,45	4,52
25	Sulawesi Utara	720	1	0,14	1,39
26	Sulawesi Tengah	2.105	5	0,24	2,38
27	Sulawesi Selatan	7.935	14	0,18	1,76
28	Sulawesi Tenggara	2.131	7	0,33	3,28
29	Gorontalo	1.003	0	0,00	0,00
30	Sulawesi Barat	1.535	3	0,20	1,95
31	Maluku	1.086	6	0,55	5,52
32	Maluku Utara	1.113	2	0,18	1,80
33	Papua	1.077	0	0,00	0,00
34	Papua Barat	746	1	0,13	1,34
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Indonesia		215.926	438	0,20	2,03

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2025

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

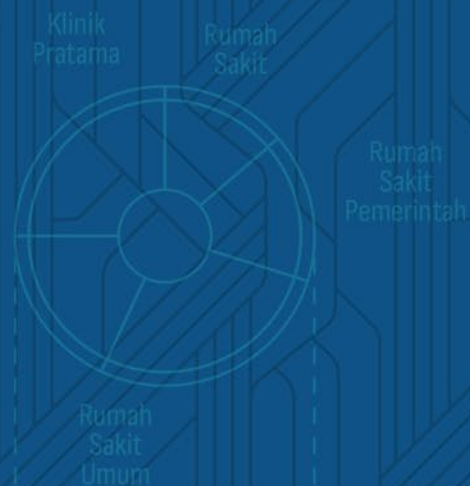


KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2025